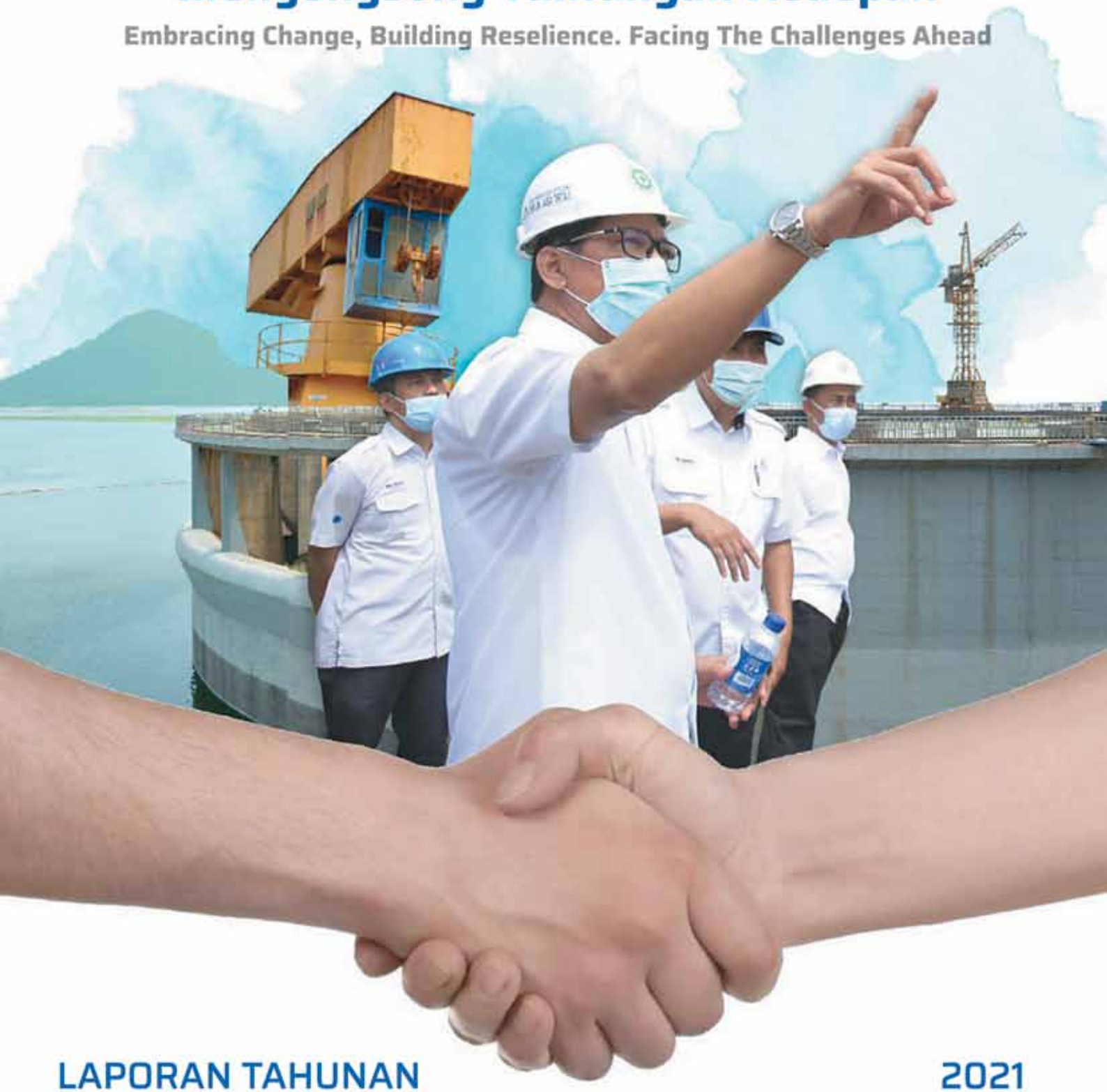
BUMN UNTUK INDONESIA

AKHLAK

Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri

Merangkul Perubahan
Membangun Daya Tahan
Menyongsong Tantangan Kedepan

Embracing Change, Building Reselience. Facing The Challenges Ahead



LAPORAN TAHUNAN
Annual Report

2021

Merangkul Perubahan Membangun Daya Tahan Menyongsong Tantangan Kedepan

Embracing Changes, Building Reselience. Facing The Challenges Ahead



Selamat datang pada Laporan Tahunan 2021 Perum Jasa Tirta II dengan tema Merangkul Perubahan, Membangun Daya Tahan, Menyongsong tantangan-tantangan kedepan.

Tema tersebut dipilih berdasarkan kesinambungan tema laporan tahunan dan mempertimbangan kondisi dan situasi yang telah terjadi selama tahun 2021 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Dengan dimulainya pemulihan kondisi perekonomial global dari dampak pandemi Covid-19 setelah pelaksanaan vaksinasi massal dengan target kekebalan komunal, perusahaan yang mampu bertahan ditutut untuk dapat dengan segera menyesuaikan diri.

Bahwasannya kondisi dunia yang semakin mengarah pada kondisi yang sering disebut dengan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menuntut perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta mampu untuk tetap tangguh dalam menghadapi dan melalui tantangan-tantangan kedepan yang akan semakin menantang.

Welcome to the 2021 Annual Report of Perum Jasa Tirta II with the theme Embracing Change, Building Resilience, Facing the challenges ahead.

The theme was chosen based on the continuity of the annual report theme and taking into account the conditions and situations that have occurred during 2021 and the future of the Company's business.

With the start of the recovery of global economic conditions from the impact of the Covid-19 pandemic after the implementation of mass vaccination with a target of communal immunity, companies that are able to survive are required to be able to adapt immediately.

World conditions that lead to conditions that are often referred to as VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) require that companies be able to adapt to the changes that occur and be able to remain resilient in facing and through future challenges that will continue to increase challenging.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Informasi keuangan tahun 2021 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini telah mendapatkan persetujuan pemilik modal Perusahaan bedasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/2MBU/04/2021 Tanggal 27 Juni 2022 termasuk didalam surat tersebut adalah persetujuan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 dan 2019.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata “Perum Jasa Tirta II”, “PJT II”, dan “Perusahaan” yang didefinisikan sebagai Perum Jasa Tirta II yang menjalankan bisnis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.



This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

The 2021 financial information presented in this Annual Report has obtained the approval of the Company's capital owners based on the Minister of SOE Regulation No. PER-05/2MBU/04/2021 On 27 June 2022 included in the letter is the re-approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 and 2019 Financial Years.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current and future conditions of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", and "Company" which is defined as Perum Jasa Tirta II, which conducts business in the field of Water Resources Management.

TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM JASA TIRTA II
About Perum Jasa Tirta II Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2021 Perum Jasa Tirta II dengan Merangkul Perubahan Membangun Daya Tahan. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2021 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Laporan Tahunan 2021 Perum Jasa Tirta II menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip corporate governance.

Laporan Tahunan 2021 Perum Jasa Tirta II disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II, Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, dan Kriteria Annual Report Award (ARA).

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2021.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II 2021 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Perusahaan yaitu www.jasatirta2.co.id.

Welcome to the 2021 Annual Report of Perum Jasa Tirta II . The theme was chosen based on in-depth analysis and review referring to the facts and developments of the Company's business throughout 2021 and the future of the Company's business sustainability.

2021 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is a comprehensive source of documentation containing information on the Company's performance in a year. This information contains complete documentation describing the Company's profile; operational, marketing and financial performance; information about the tasks, roles and structural functions of the Company organization that applies the concepts of best practices and the principles of corporate governance.

2021 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is prepared based on Regulation of The Minister of SOE No. PER- 01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 7 of 2010 on Perum Jasa Tirta II, Decree of The Minister of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, Annual Report Award Criteria (ARA).

The main purpose of the preparation of this Annual Report is to increase the disclosure of information of the Company to relevant authorities and to become an annual book that helps build pride and solidarity among employees.

In addition, this Annual Report also aims to build understanding and trust about the Company by providing appropriate, balanced and relevant information. Shareholders and all other stakeholders can obtain adequate information related to policies that have been and will be carried out as well as the Company's achievements throughout 2021.

Perum Jasa Tirta II 2021 Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using types and sizes of fonts that are easy to read and print with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, www.jasatirta2.co.id.

KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuation



Selamat datang pada Laporan Tahunan 2021 Perum Jasa Tirta II dengan tema Merangkul Perubahan, Membangun Daya Tahan, Menyongsong tantangan- tantangan kedepan.

Tema tersebut dipilih berdasarkan kesinambungan tema laporan tahunan dan mempertimbangan kondisi dan situasi yang telah terjadi selama tahun 2021 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Dengan dimulainya pemulihan kondisi perekonomial global dari dampak pandemi Covid-19 setelah pelaksanaan vaksinasi massal dengan target kekebalan komunal, perusahaan yang mampu bertahan ditutut untuk dapat dengan segera menyesuaikan diri.

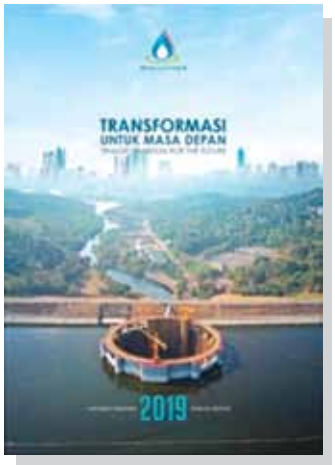
Bahwasannya kondisi dunia yang semakin mengarah pada kondisi yang sering disebut dengan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) menuntut perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta mampu untuk tetap tangguh dalam menghadapi dan melalui tantangan-tantangan kedepan yang akan semakin menantang.

Welcome to the 2021 Annual Report of Perum Jasa Tirta II with the theme Embracing Change, Building Resilience, Facing the challenges ahead.

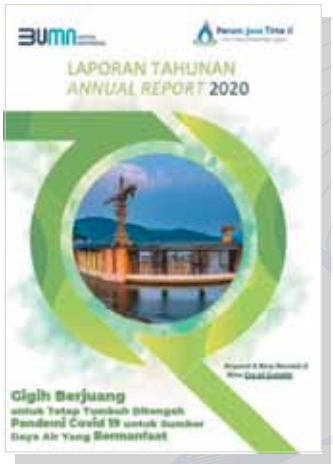
The theme was chosen based on the continuity of the annual report theme and taking into account the conditions and situations that have occurred during 2021 and the future of the Company's business.

With the start of the recovery of global economic conditions from the impact of the Covid-19 pandemic after the implementation of mass vaccination with a target of communal immunity, companies that are able to survive are required to be able to adapt immediately.

World conditions that lead to conditions that are often referred to as VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) require that companies be able to adapt to the changes that occur and be able to remain resilient in facing and through future challenges that will continue to increase challenging.



2019
Transformasi Menuju Masa Depan
Transformation for the Future



2020
Gigih Berjuang Tetap Tumbuh Ditengah
Pandemi Covid 19 untuk Sumber Daya Air Yang Bermanfaat
Beyond A New Normal A new Era of Growth

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN
Financial Performance Highlights

Laporan Posisi Keuangan / Statement of Financial Position

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	2018	2017
ASET / Assets					
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	452.330	518.162	597.052	434.206	512.604
Piutang Usaha / Trade Receivables	284.399	230.178	153.570	297.271	137.510
Persediaan / Inventories	1.903	2.074	2.548	2.147	1.515
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / Prepaid Expenses and Advances	8.467	20.915	9.824	14.838	20.314
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Assets	781	2.901	2.194	2.792	1.198
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	**747.880**	**774.230**	**765.188**	**751.254**	**673.141**
Penyertaan pada Perusahaan Asosiasi / Participation in Associated Companies	-	-	-	-	492
Aset Tetap / Fixed Asses	752.743	599.694	540.399	476.051	384.505
Aset Hak Guna / Right-Of-Use Assets	12.544	6.253	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	74.712	57.433	39.018	41.042	67.144
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	101.875	102.125	79.970	48.442	17.250
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	941.874	765.505	659.387	565.535	469.391
Jumlah Aset / Total Assets	**1.689.754**	**1.539.735**	**1.424.575**	**1.316.789**	**1.142.532**
LIABILITAS / Liabilities					
Utang Usaha / Trade Payables	12.297	46.542	39.620	76.453	40.468
Beban Akrual / Accrual Expense	37.638	21.379	33.271	34.344	56.042
Utang Pajak / Tax Payable	26.306	25.987	21.411	15.748	14.655
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / Short-Term Contract Liabilities	6.023	1.907	-	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short- Term Financial Liabilities	85.753	58.333	47.037	36.385	30.390
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short-Term Liabilities	**168.017**	**154.148**	**141.339**	**162.930**	**141.555**
Pendapatan Diterima dimuka / Prepaid income	9.155		-	-	-
Utang Sewa Jangka Panjang / Long-Term Lease Liabilities	6.697	4.350			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post Retirement Liabilities	212.748	150.037	72.762	79.404	140.380
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Liabilities	11.930	14.265	22.130	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	240.530	168.652	94.892	79.404	140.380
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	**408.547**	**322.800**	**236.231**	**242.334**	**281.935**
EKUITAS / Equity					
Modal Pemerintah / Government Share	164.548	164.548	164.548	164.548	164.548
Cadangan Umum / Reserved	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943
Cadangan Bertujuan / Reserved Appropriated	1.027.001	1.027.001	885.253	760.306	603.209
Penghasilan Komprehensif lain / Other Comprehensive Income	-135.816	-92.641	-30.586		
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	194	194	194	-49.605	-104.324
Saldo Laba / Retain earning	203.264	95.619	145.580	175.264	183.221
Kepentingan Non Pengendali / Non Controling	8.073	8.271	9.412	9.999	-
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.281.207	1.216.935	1.188.344	1.074.455	860.597
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	**1.689.754**	**1.539.735**	**1.424.575**	**1.316.789**	**1.142.532**

*) Penyajian kembali / Restatement

Laporan Laba Rugi / Statement of Profit or Loss

Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	2018	2017
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	856.518	839.387	816.472	825.544	828.700
Beban Usaha / Operating Expenses	-544.687	-518.623	-472.146	-456.753	-476.092
Laba Usaha / Profit From Operations	311.831	320.764	344.326	368.791	352.608
Beban Promosi dan Pemasaran / Promotion and Marketing Expenses	-4.731	-5.371	-14.424	-5.398	-4.997
Beban Administrasi dan Umum / General and Administration Expenses	-168.651	-164.637	-167.799	-139.908	-141.301
Pendapatan Lain-lain / Other Income	15.887	28.246	56.330	31.255	36.928
Beban Lain-lain / Other Expenses	-9.754	-35.513	-20.619	-18.209	-9.588
Laba Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	144.582	143.489	197.814	236.531	233.650
Beban Pajak Penghasilan / Income Tax Expense	-37.136	-30.254	-43.818	-69.935	-59.098
Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit	107.446	113.235	153.996	166.596	174.552
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	-43.174	-62.055	1.177	54.062	10.616
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Comprehensive Income for the Current Year	64.272	51.180	155.173	220.658	185.168

*) Penyajian kembali / Restatement

Rasio Keuangan / Financial Ratio

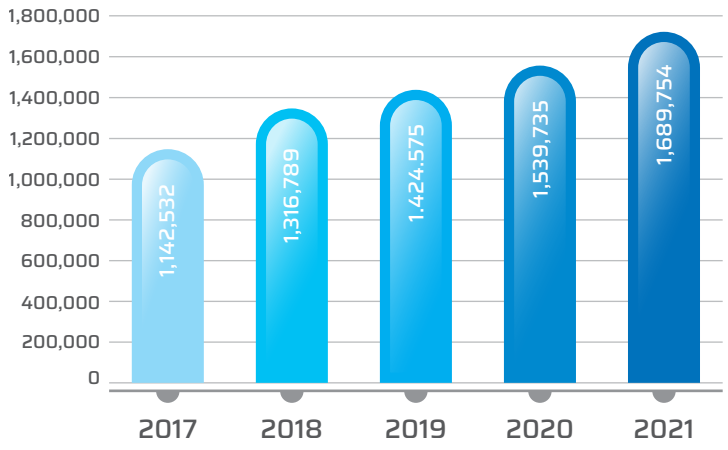
Dalam juta Rupiah / in million Rupiah

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	2018	2017
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / Return on Equity	9,53	9,46	15,06	20,33	25,71
Imbalan Investasi (ROI) / Return on Investment	13,04	12,69	16,97	22,13	24,57
Laba terhadap Aset (ROA) / Return on Assets	8,56	9,32	13,89	17,96	20,45
Rasio Kas / Cash Ratio	269,22	336,15	422,43	266,5	362,12
Rasio Lancar / Current Ratio	445,12	502,26	541,38	461,09	470,21
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset / Own Capital Ratio to Total Assets	75,82	79,04	83,42	65,18	76,43
Perputaran Persediaan (dalam satuan hari) / Inventory Turnover (in units of days)	1	1	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / Billing Period (in units of days)	121	100	69	81	25

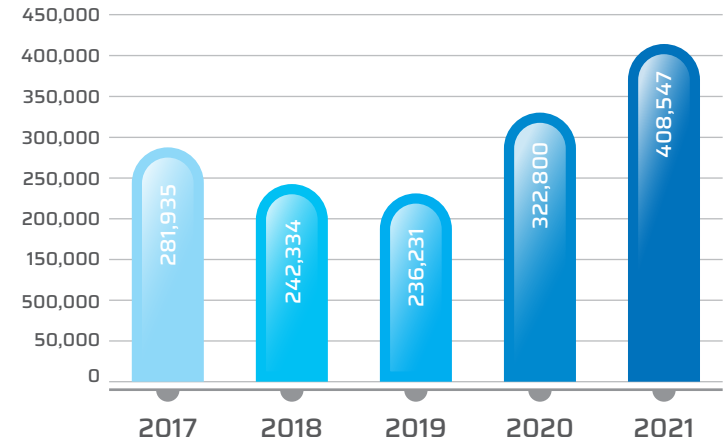
*) Penyajian kembali / Restatement

Grafik Kinerja Keuangan / Financial Performance Graphic

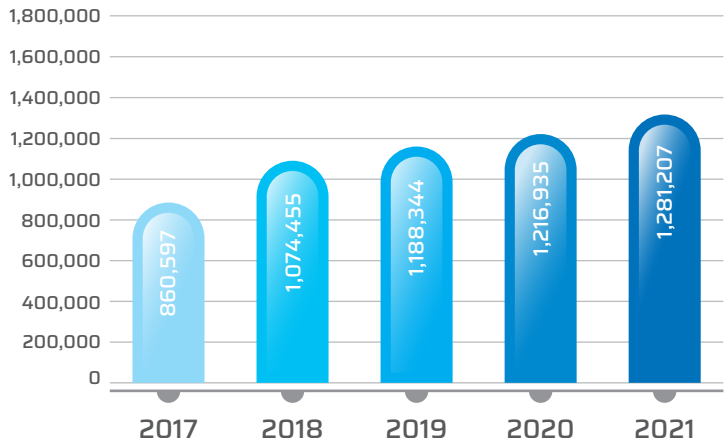
Jumlah Aset / Total Assets
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



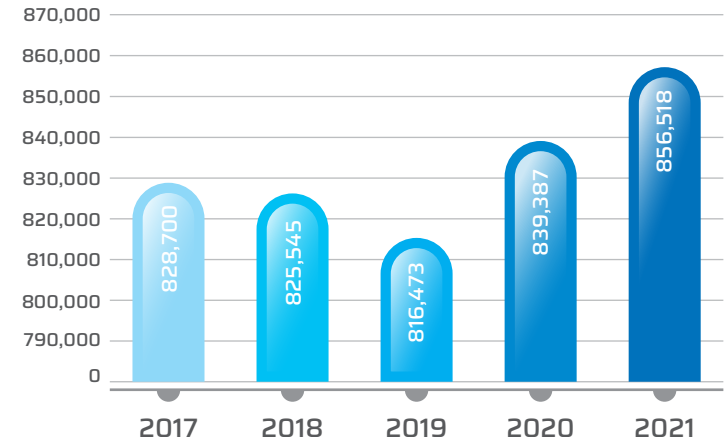
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



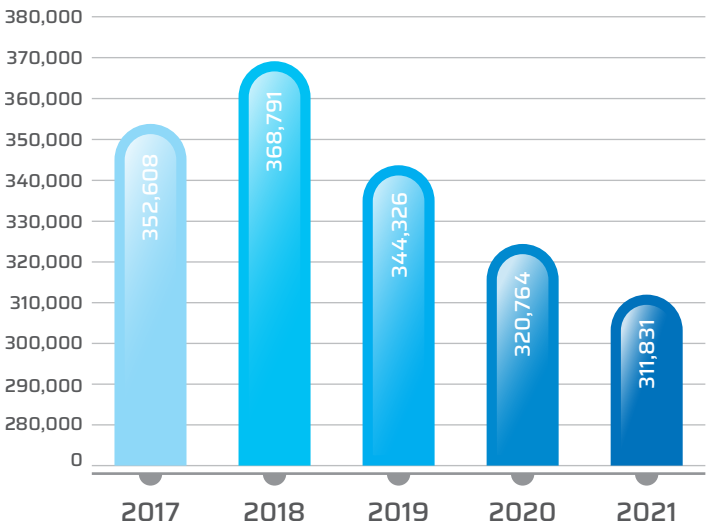
Jumlah Ekuitas / Total Equity
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



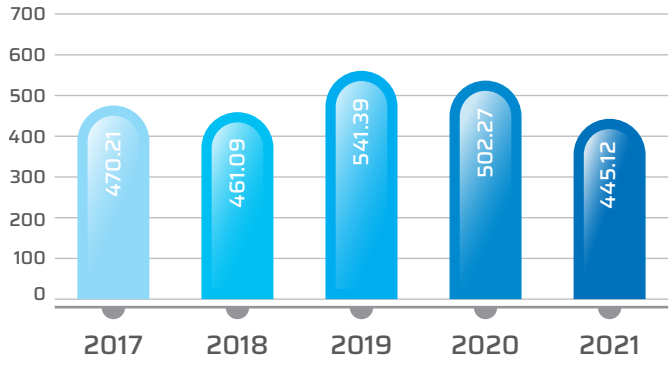
Jumlah Pendapatan Usaha / Total Operating Revenues
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Jumlah Laba Usaha /
Total Profit from Operations
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

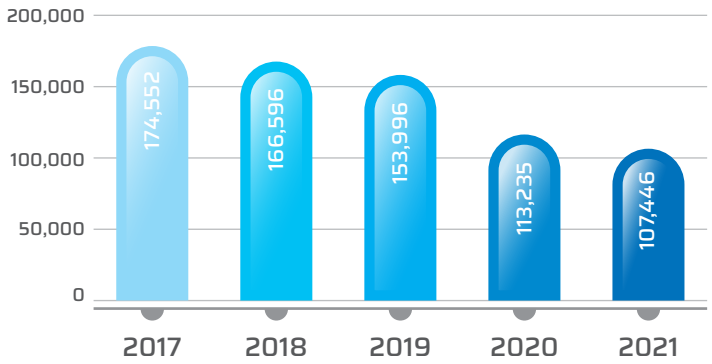


Rasio Lancar /
Total Current Year Profit
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

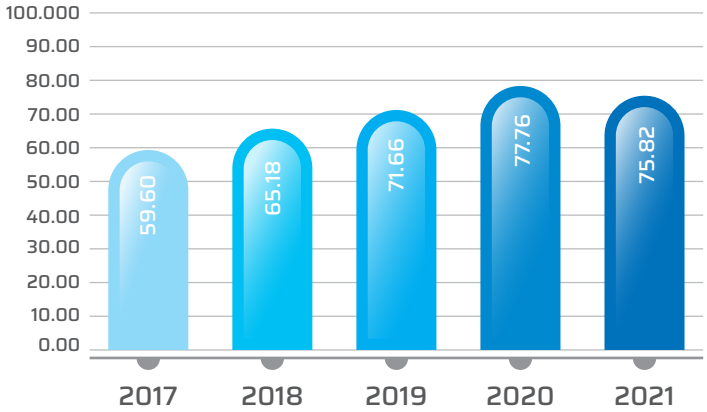


Laba Bersih Tahun Berjalan / Net Profit for the Year

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

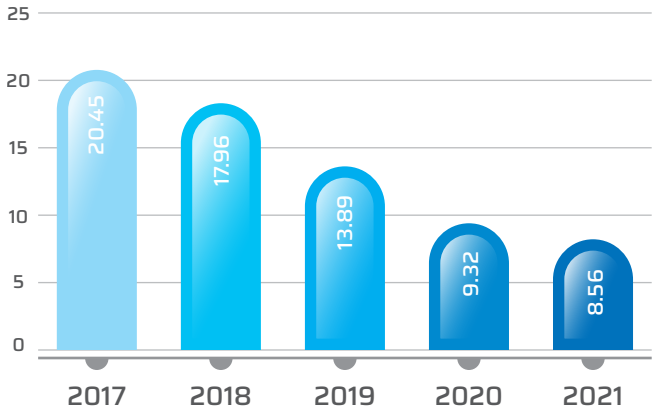


Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset / Ratio of Equity to Total Assets

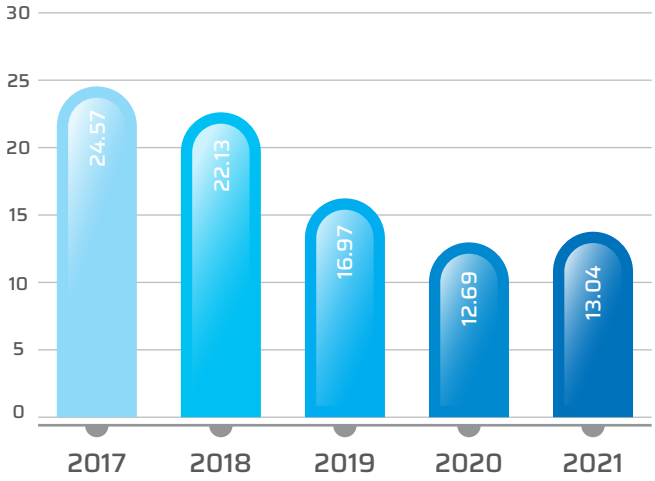


Laba terhadap Aset (ROA) /
Return on Assets (ROA)

Jumlah Laba Usaha /
Total Profit from Operations
(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)



Imbalan Investasi (ROI) /
Return on Investment (ROI)




ANE 20 TON

DAFTAR ISI / Table of Contents

PENJELASAN TEMA / Theme Explanation 1
TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM JASA TIRTA II / About Perum Jasa Tirta II Annual Report 2
KESINAMBUNGAN TEMA / Continuity of Theme 4
IKHTISAR KINERJA KEUANGAN / Summary of financial performance 6
DAFTAR ISI / Table of Content 14
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) / Anti -Breeding Management System (SMAP) 16
KILAS KINERJA 2021 / Glas Performance 2021 18
RINGKASAN KINERJA / Performance Summary 20
PERISTIWA PENTING 2021 / Important Events 2021 24
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI / Awards and Certification 28

PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile 38
Identitas Perusahaan / Company Identity 40
Sekilas Perusahaan / A Glimpse Of The Company 43
Jejak Langkah / Milestone 46
Visi, Misi, Motto Dan Kompetensi Inti Perusahaan / Company Vision, Mission, Motto And Core Competencies 48
Bidang Usaha Perusahaan / Company Business Sector 53

LAPORAN MANAJEMEN / Management Report 58
LAPORAN DEWAN PENGAWAS / Report of the Supervisory Board 62
LAPORAN DIREKSI / Board Of Directors Report 78
PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PERUM JASA TIRTA II / Statement of the Supervisory Board and Directors regarding responsibility for Annual Report 2021 Perum Jasa Tirta II 84
Struktur Organisasi / Organizational Structure 86
Profil Dewan Pengawas / Profile of The Supervisory Board 90
Profil Direksi / Directors Profile 96
Profil Pejabat Satu Level Di Bawah Direksi/ Profile Of Officials One Level Below The Board of Directors 102
Komposisi Pemilik Modal / Capital Owner Composition 112
Struktur Grup Perusahaan / Company Group Structure 112
Kronologi Pencatatan Saham & Obligasi / Chronology of Share and Bond Listing 112
Sekilas Tentang Anak Perusahaan / Subsidiaries at a Glance 113
Sekilas Tentang Cucu Perusahaan / The Company's Grandson at a Glance 113
Informasi Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan / Information on Company Supporting Institution and/or Professional 114
Informasi pada Website Perusahaan / Information on Company Website 115
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern / Education and / or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit 116

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / Management Discussion And Analysis 118
Tinjauan Makroekonomi Dan Industri / Macroeconomic And Industrial Review 120
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha / Operation Review per Business Segment 123
Kinerja Anak Perusahaan / Subsidiary Performance 151
Tinjauan Keuangan / Financial Overview 153
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian / Consolidated Statements Profit of Loss And Other Comprehensive Income 163
Kemampuan Memenuhi Kewajiban, Tingkat Kolektibilitas Piutang, Dan Profitabilitas Perusahaan / The Ability To Meet Obligations, Levels of Collectibility of Receivables, aAnd Company Profitability 167
Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal / Capital Structure And Management Policy On Capital Structur 172
Prospek Usaha / Business Prospect 175

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK / Good Corporate Governance 194
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan / Basic Application Of Corporate Governance 198
Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perum Jasa Tirta II / Structure and Governance Mechanism of

Perum Jasa Tirta II 204
Struktur Organ Perum Jasa Tirta II / Organs Structure Of Perum Jasa Tirta II 205
Penilaian Penerapan GCG / GCG Implementation Assessment 212
Rapat Pembahasan Bersama (RPB) / Joint Discussion Meeting (RPB) 216
Dewan Pengawas / Supervisory Board 219
Direksi / Directors' Board 251
Rincian Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi Tahun 2021 / Remuneration Details For The Supervisory Board and The Board Of Directors In 2021 271
Organ Pendukung Dewan Pengawas / Supporting Organs Of The Supervisory Board 272
Komite Audit / Audit Committee 276
Komite Nominasi Dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee 284
Komite Pemantau Manajemen Risiko / Risk Management Monitoring Committee 286
Sekretaris Perusahaan / Company Secretary 289
Satuan Pengawasan Internal / Internal Supervision Unit 296
Struktur Organisasi Karyawan Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II / Employee Organizational Structure Perum Jasa Tirta II Supervision Unit 297
Manajemen Risiko / Risk Management 319
Pedoman Pengendalian Gratifikasi / Gratification Control Guidelines 354
Program Anti Korupsi / Anti-Corruption Program 372

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS / Business Support Review 382
Sumber Daya Manusia / Human Resources 384
Struktur Pengelola SDM / HR Management Structure 385
Komposisi Dan Jumlah Karyawan Perum Jasa Tirta II / Composition and number of employees of Jasa Jasa Tirta II 386
Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2021 / Education and training in 2021 396

TEKNOLOGI INFORMASI / Information Technology 402
Peta Strategi TI / IT Strategy Map 406
Rantai Nilai Pengelolaan Bisnis / Business Management Value Chain 406

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN / Social and environmental responsibility 414
Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial / Commitment to social responsibility 417
7 Prinsip Utama Csr Berdasarkan Iso 26000 / 7 Main Principles Of Csr Based On Iso 26000 419
Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik Yang Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban / The scope of corporate social responsibility both which is an obligation and that exceeds obligations 430
Strategi Dan Program Kerja Dalam Dalam Upaya Stekeholders Engagement Dan Meningkatkan Nilai Stakeholders / Work strategies and programs in the Stekeholders Engagement effort and increase the value of stakeholders 431
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia / Corporate Social Responsibility Related To Human Rights 433
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi Yang Adil / Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations 437
Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup / Commitment and Policy of Corporate Social Responsibility for Environment 440
Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup / Implementation Of Corporate Social Responsibility Initiatives In The Environmental Sector 448

LAPORAN KEUANGAN / Financial Report 454

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (SMAP)



Perum Jasa tirta II telah mengukuhkan komitmennya untuk menegakan Intregitas dan transparasi melalui Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa divisi dan unit Kerja Perum Jasa Tirta juga telah mempunyai Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: PRD 16/DIR/10/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan dan meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen anti Penyuapan guna mencegah, medekteksi dan menangani penyuapan dilingkungan Perum Jasa Tirta II telah dilaksanakan pula Assesment pertama untuk tahun 2021 oleh Sucofindo International Sertification Service.

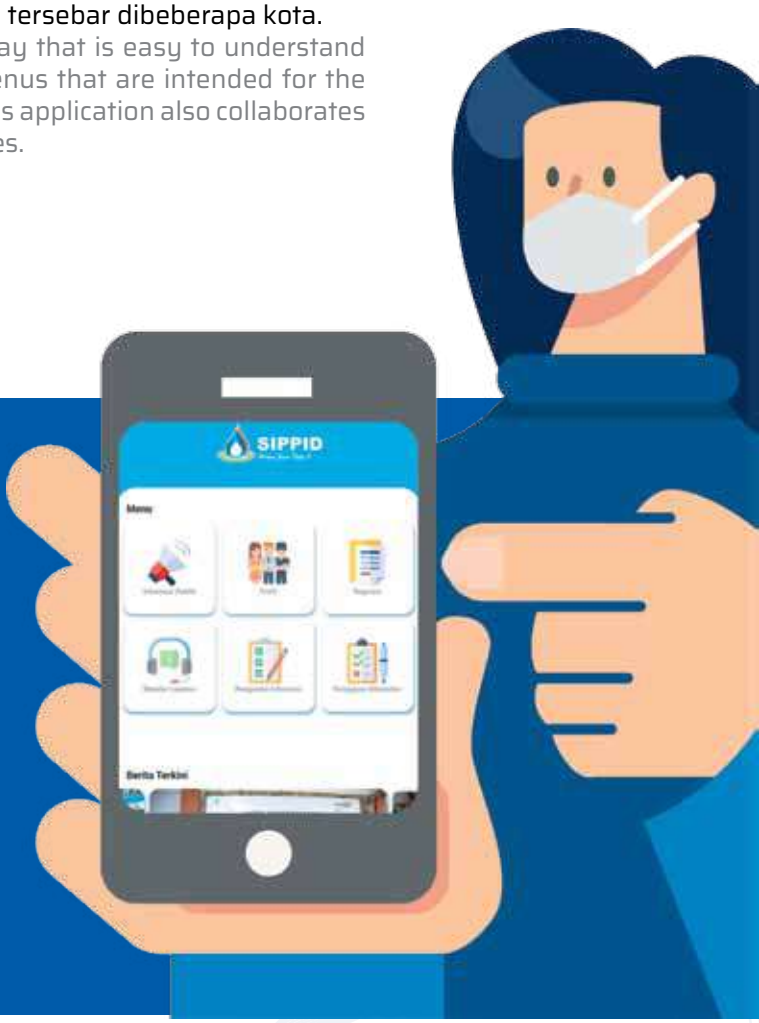
Perum Jasa Tirta II has confirmed its commitment to upholding integrity and transparency through the Implementation and Certification of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in several divisions and work units. Perum Jasa Tirta also has a Board of Directors Regulation of Perum Jasa Tirta II number: PRD 16/ DIR/10/2020 concerning Guidelines for Anti-Bribery Management System which aims to provide a comprehensive picture in implementing and increasing the effectiveness of the Anti-Bribery Management System to prevent, detect and handle bribery in the Perum Jasa Tirta II environment. The first assessment for 2021 by Sucofindo International has also been carried out The Certification Service.

SPPID Mobile Mempermudah Informasi Dalam Genggaman

SPPID Mobile Mempermudah Informasi Dalam Genggaman

Perum Jasa Tirta II menghadirkan aplikasi yang membantu sebagai sarana layanan online bagi pemohon informasi public guna memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat, mudah, tepat dan transparan dan sebagai salah satu inovasi pelaksanaan keterbukaan informasi public di PJT II.
Perum Jasa Tirta II presents an application that helps as an online service facility for applicants for public information to make it easier for the public to access information quickly, easily, precisely and transparently and as one of the innovations in implementing public information disclosure at PJT II.

Aplikasi SPPID di rancang dengan tampilan yang mudah dipahami dan digunakan bagi pengunduhnya, tersedia berbagai menu yang diperuntukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik perusahaan. Aplikasi ini pun berkolaborasi dengan influencer local yang tersebar dibeberapa kota.
The SPPID application is designed with a display that is easy to understand and use for downloaders, there are various menus that are intended for the public to obtain company public information. This application also collaborates with local influencers spread across several cities.



Scan disini / Scan here:

GET IT ON Google Play

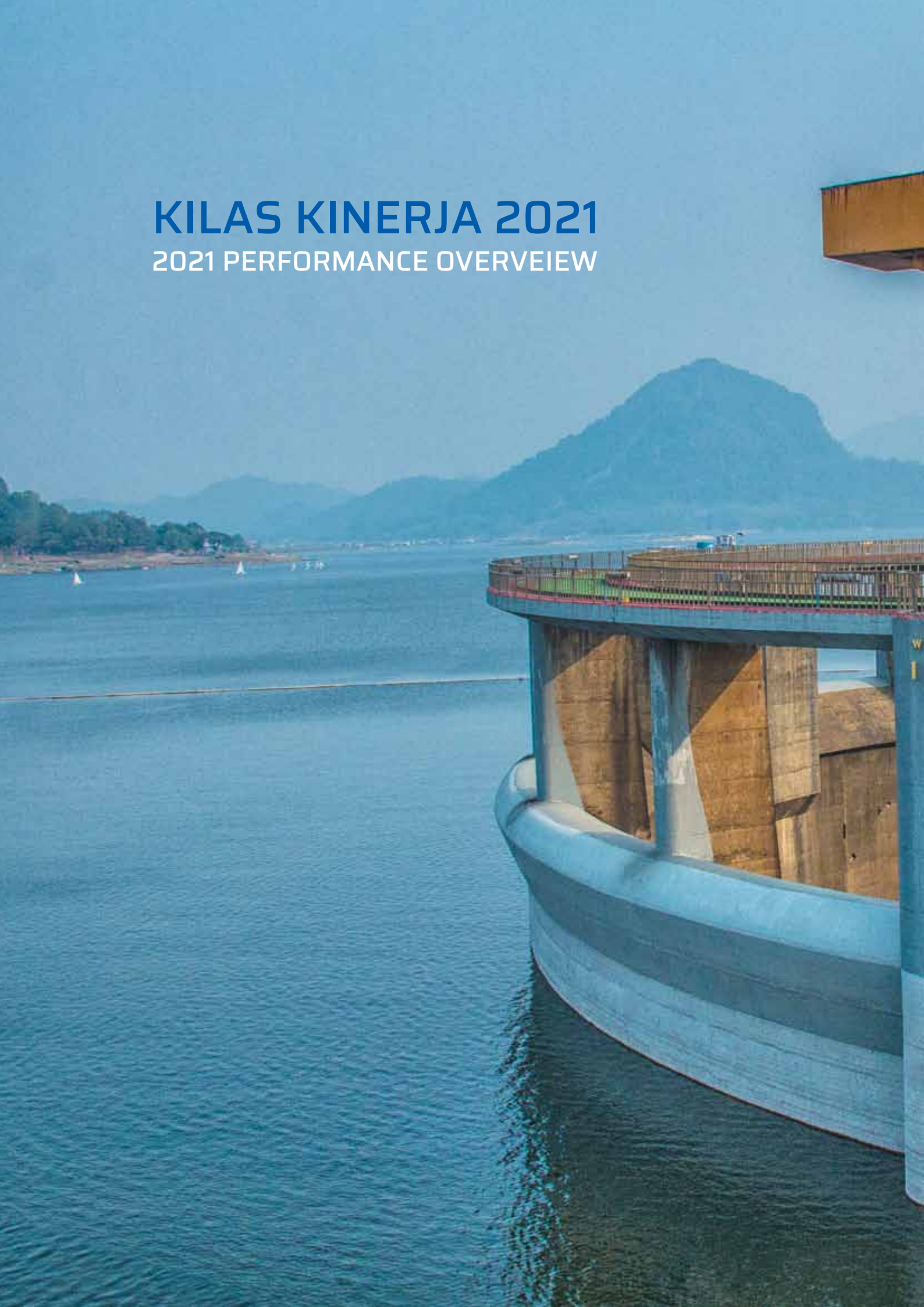
Download on App Store

Seluruh pertanyaan dan masukan yang terangkum dalam lembar umpan balik dapat disampaikan kepada:
Seluruh pertanyaan dan masukan yang terangkum dalam lembar umpan balik dapat disampaikan kepada:

Perum Jasa Tirta II
Sekretariat Perusahaan
Jl. Lurah Kawa No.1
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat 41152
Tel (0264) 201972
Email : pjt2@jasatirta2.co.id

KILAS KINERJA 2021

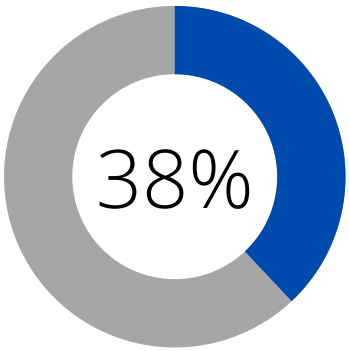
2021 PERFORMANCE OVERVEIEW




ADUK SERBA GUNA
R.H.DJUANDA

Ringkasan Kinerja

Performance Summary

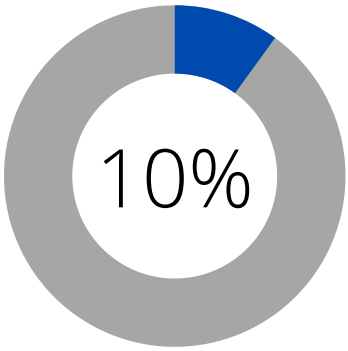


38%

±5 miliar m²/tahun, Potensi aliran yang belum dapat dikendalikan dan mengalir ke laut
±5 billion m²/year, Potential flow that cannot be controlled and flows into the sea

±8 miliar m²/tahun, Aliran yang dapat dikendalikan
±8 billion m²/year, Flow that can be controlled

62%



10%

±1,2 miliar m³/tahun
Alokasi untuk pengusahaan PJT II
±1.2 billion m³/year
Allocation for PJT II concessions

±6,8 miliar m³/tahun, Dialokasikan untuk ±300 ribu Ha lahan pertanian (Jawa Barat bagian Utara) tanpa dipungut biaya apapun
±6.8 billion m³/year, Allocated to ± 300 thousand hectares of agricultural land (Northern West Java) for free

90%

Peran Strategis PJT II / PJT II Strategic Role
KETAHANAN PANGAN NASIONAL
National Food Security

30%

Ekuivalen / Equivalent
Menopang produksi padi Jawa Barat atau 8% produksi padi Nasional tanpa memungut biaya apa pun kepada petani.
Supporting West Java's rice production or 8% of the national rice production without charging any fees to farmers.

Rp 13,96 triliun/tahun
trillion/year

Ekuivalen dalam Rupiah / Equivalent in Rupiah
(asumsi harga padi Rp 4.200/kg / assuming the price of rice is Rp 4,200/ kg)

3,3 Juta ton/tahun
Million tons/year

Produksi Padi / Rice Production
PJT II berkontribusi terhadap Ketahanan Pangan Nasional. / PJT II contributes to the National Food Security.

Kinerja Penugasan Pengelolaan SDA Tahun 2021

Performance of the 2021 water Resources Management Assignment



Perum Jasa Tirta II sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II oleh Pemerintah diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan.
Sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan (10 Penugasan) yang meliputi :

1. Mengoperasikan dan memelihara prasarana SDA.
2. Mengoperasikan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur.
3. Mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur.
4. Memelihara sumber air.
5. Melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer pada Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur.
6. Melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.
7. Menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi di atas kepada pengguna SDA, masyarakat dan Pengelola SDA.
8. Membantu Pemerintah dalam melaksanakan konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
9. Penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai.
10. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Perum Jasa Tirta II in accordance with Government Regulation (PP) No. 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II by the Government given the duties and responsibilities in the exploitation of River Basin Water Resources and some duties and responsibilities in the field of water resources management in the Company's work area.
Some of the duties and responsibilities in the field of water resources management in the Company's work area (10 Assignments) which include :

1. Operate and maintain water resource infrastructure.
2. Operate primary irrigation network in Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigation Areas.
3. Operate secondary irrigation network in Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigation Areas.
4. Maintain water sources.
5. Carry out maintenance of primary irrigation canals in Jatiluhur North and South Jatiluhur Irrigations.
6. Monitoring, calibrating discharge measuring instruments, evaluating the quantity and quality of water at water sources which are the responsibility of the Company.
7. Disseminate the results of the above monitoring and evaluation to water resources users, communities and water resource managers.
8. Assisting the Government in carrying out conservation of water resources and controlling the destructive power of water in accordance with the Company's capabilities.
9. Flushing in the context of river maintenance.
10. Provide guidance and counseling to the community in order to improve community empowerment.

Kinerja Penugasan Pengelolaan SDA Tahun 2021

Performance of the 2021 Water Resources Management Assignment

Pelaksanaan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air tahun 2021 sebesar 96,08% dari rencananya dengan interpretasi sangat baik, dengan rincian sebagai berikut :

Implementation of Operational Performance and Maintenance of Water Resources in 2021 amounted to 96.08% of the plan with a very good interpretation, with details as follows :

REKAPITULASI PEKERJAAN FISIK 10 PENUGASAN PEMERINTAH | RECAPITULATION OF PHYSICAL WORK 10 GOVERNMENT ASSIGNMENTS

2021						
NO	BIDANG PENUGASAN / ASSIGNMENT FIELD	RKAP	REALISASI	RN	RL	KINERJA
1	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana SDA / Operation and Maintenance of water Resources Infrastructure	68.959.674.474	65.138.636.690	100	94,46	94,46
2	Operasi Jaringan Irigasi Primer / Primary Irrigation Network Operation	8.135.000.000	8.128.746.050	100	99,92	99,92
3	Operasi Jaringan Irigasi Sekunder / Secondary Irrigation Network Operations	4.482.000.000	4.472.495.700	100	99,79	99,79
4	Memelihara Sumber Air / Maintaining Water Sources	5.799.128.100	5.478.304.181	100	94,47	94,47
5	Memelihara Jaringan Irigasi Primer / Maintaining Primary Irrigation Network	8.641.000.000	8.634.581.450	100	99,93	99,93
6	Pemantauan, Kalibrasi, Evaluasi Kuantitas dan Kualitas Air / Monitoring, Calibration, Evaluation of Water Quantity and Quality	10.916.431.000	10.710.310.200	100	98,11	98,11
7	Menyebarluaskan Hasil Pemantauan dan Evaluasi / Disseminate Monitoring and Evaluation Results	2.268.800.000	2.266.089.750	100	99,88	99,88
8	Membantu Pemerintah dalam Melaksanakan Konservasi / Assisting the Government in Implementing Conservation	12.623.100.000	12.189.310.399	100	96,56	96,56
9	Penggelontoran dalam Rangka Pemeliharaan Sungai / Flushing in the Context of River Maintenance	-	-	-	-	-
10	Pemberdayaan Masyarakat / Community empowerment	640.000.000	639.958.500	100	99,99	99,99
	Jumlah / Total	122.465.133.574	117.658.432.920	100	96,08	96,08



Pelaksanaan Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air tahun 2021 sebesar 96,08% dari rencananya dengan interpretasi sangat baik, dengan rincian sebagai berikut :

Implementation of Operational Performance and Maintenance of Water Resources in 2021 amounted to 96.08% of the plan with a very good interpretation, with details as follows :

BIAYA NON FISIK | NON-PHYSICAL FEE

1	Beban Personalia / Personnel Expenses	161.096 Juta
2	Beban Administrasi dan Umum / Administrative and General Expenses	57.547 Juta
3	Beban Pemeliharaan / Maintenance Expense	7.903 Juta
4	Beban Perencanaan / Planning Expenses	12.092 Juta
5	Pemantauan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat / Community Monitoring, Evaluation and Empowerment	6.252 Juta

Sehingga secara garis besar realisasi biaya pengelolaan SDA Tahun 2021 sebesar :

So in general terms, the realization of the cost of managing water resources in 2021 is as follows :

A	Beban Personalia / Personnel Expenses	117.668.432.920
B	Beban Administrasi dan Umum / Administrative and General Expenses	243.723.385.884
	Jumlah / Total	361.391.818.804

Alokasi anggaran Pengelolaan Sumber Daya Air dari keseluruhan anggaran RKAP Tahun 2021 Semester II adalah Rp 361.989.380.000,- telah dilaksanakan sebesar Rp 361.391.818.804,- atau 99,83% dengan dengan interpretasi memuaskan.

The budget allocation for Water Resources Management from the entire RKAP 2021 Semester II budget is Rp 361,989,380,000,- It has been implemented at Rp 361,391,818,804,- or 99.83% with a satisfactory interpretation.



Peristiwa Penting 2021
2021 Event Highlights



5 JANUARI / JANUARY

Shalat Istisqa / Istisqa prayer



13 JANUARI / JANUARY

Jasa Tirta II Bantu Korban Longsor Sumedang / Jasa Tirta II Help Sumedang Landslide Victims



14 JANUARI / JANUARY

Apel Bulan K3 Nasional Tahun 2021 / National OSH Month Month 2021



19 JANUARI / JANUARY

Kunjungan Kemenko Kemaritiman & Investasi RI Ke Bendungan Bekasi / Visit of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs & Investment of the Republic of Indonesia to Bekasi Dam



21 JANUARI / JANUARY

Kunjungan Kerja Direktur KTI / KTI Director Working Visit



1 FEBRUARY / FEBRUARY

Sosialisasi Pengeringan Tailrace / Tailrace Drying Outreach



5 FEBRUARY / FEBRUARY

Kunjungan ASDEP Kemenko Marves Bandung - Bekasi / ASDEP Visit from Coordinating Ministry for Marves, Bandung - Bekasi



5 FEBRUARY / FEBRUARY

Kunjungan Direktur Pengembangan Usaha Ke Cisanti Pangalengan / Visit of the Director of Business Development to Cisanti Pangalengan



5 FEBRUARY / FEBRUARY

Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Banten / Working Visit of Commission IV DPRD Banten



9 FEBRUARY / FEBRUARY

MoU Perum Jasa Tirta II dengan Kejaksaan Negeri Purwakarta / MoU of Perum Jasa Tirta II with the Purwakarta District Attorney



10 FEBRUARY / FEBRUARY

Penyaluran Bantuan Korban Banjir Wilayah Pantura / Distribution of Aid for Flood Victims in the Pantura Region



22 FEBRUARY / FEBRUARY

Rapat Koordinasi Dengan DPRD Karawang Terkait Banjir / Coordination Meeting with DPRD Karawang Regarding Flood



23 FEBRUARY / FEBRUARY

Kunjungan Direktur Pengembangan Usaha ke Kampung Ilmu / Director of Business Development Visit to Science Village



24 FEBRUARY / FEBRUARY

Kunjungan ke Jebolan Pabayuran / Kunjungan ke Jebolan Pabayuran



27 FEBRUARY / FEBRUARY

Kunjungan Pangdam III Siliwangi / Kunjungan Pangdam III Siliwangi



12 MARET / MARCH

Silaturahim Direksi Dengan BoD-1 / Board of Directors Gathering With BoD-1



13 MARET / MARCH

Media Fellowship Program / Media Fellowship Program



2 APRIL / APRIL

Acara Green Festival / Green Festival Event



3 APRIL / APRI

Green Program Kolaborasikan Konservasi Pemberdayaan Masyarakat / Green Community Empowerment Conservation Collaborating Program



5 APRIL / APRIL

Kunjungan Kerja Dirut KeJebolan BTT51 & 11 / President Director's Working Visit Conceded BTT51&11



9 APRIL / APRIL

Serah terima dan Pelepasan Seketaris Dewas / Handover and Release of the Secretary of the Dewas



7 MEI / MAY

Kerjasama Pengelolaan AMDK Jatiluhur, SPAM BIKI & SPAM CURUG dengan Jasa Tirta Luhur / Cooperation in Jatiluhur AMDK Management, BIKI SPAM & CURUG SPAM with Jasa Tirta Luhur



9 MEI / MAY

MOU dengan PT. Jasa Tirta Luhur / MOU with PT. Jasa Tirta Luhur



19 MEI / MAY

Halal Bihalal Direksi Dengan BoD-1 / Halal Bihalal Directors With BoD-1



21 MEI / MAY

Kunjungan YON ARMED Purwakarta / Visit of YON ARMED Purwakarta



24 MEI / MAY

Kunjungan Copenhagen Infrastructur Partner / Copenhagen Infrastructure Partners Visit



29 MEI / MAY

Kunjungan PT Inalum Ke Perum Jasa Tirta II / PT Inalum's Visit to Perum Jasa Tirta II



2 JUNI / JUNE

MoU dengan PT Yodya Karya / MoU with PT Yodya Karya



4 JUNI / JUNE

Kunjungan DPRD Kabupaten Purwakarta Komisi II Ke Perum Jasa Tirta II / The visit of the DPRD of Purwakarta Regency Commission II to Perum Jasa Tirta II



4 JUNI / JUNE

Kunjungan Kerja Bupati Purwakarta Ke Perum JAsa Tirta II / Purwakarta Regent's Working Visit to Perum Jasa Tirta II

Peristiwa Penting 2021
2021 Event Highlights



8 JUNI / JUNE

Kunjungan Kerja BBWS Citarum / BBWS Citarum Working Visit



8 JUNI / JUNE

Kunjungan K - Water ke Jatiluhur / K - Water visit to Jatiluhur



17 JUNI / JUNE

Mou Perum Jasa Tirta II Dengan PT. Patimban Banyu Negara Utama / MoU of Perum Jasa Tirta II with PT Patimban Banyu Negara Utama



17 AGUSTUS / AUGUST

Direktur PJT II mengikuti peringatan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia secara Online / Director of PJT II attends the Online Commemoration of the Republic of Indonesia's Independence Day Commemoration Ceremony



26 AGUSTUS / AUGUST

Acara Puncak Harbak / The highlight of the day of devotion



31 AGUSTUS / AUGUST

Webinar Nasional Peningkatan peran BUMN / National Webinar Increasing the role of SOEs



8 SEPTEMBER / SEPTEMBER

Kunjungan DPRD Kab. Karawang / Karawang Regency DPRD Visit



25 SEPTEMBER / SEPTEMBER

ASDEP TJSL Kolaborasi program Biogas / ASDEP TJSL Biogas program collaboration



29 SEPTEMBER / SEPTEMBER

Kunjungan Direksi ke Radial Gate UBRUG / Board of Directors Visit to Radial Gate UBRUG



8 OKTOBER / OCTOBER

Kunjungan Direksi & Dwas ke Cisanti / Board of Directors & Supervisory Board Visit to Cisanti



14 OKTOBER / OCTOBER

Official Visit the Minister of Ocean and Fisheries Republic of Korea / Kunjungan Resmi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Korea



14 OKTOBER / OCTOBER

Jasa Tirta II Raih Penghargaan TJSL BUMN Pilar Lingkungan Terbaik Kedua / Jasa Tirta II Won the Second Best Environmental Pillar BUMN TJSL Award



26 OKTOBER / OCTOBER

Jasa Tirta II raih Kualifikasi BUMN Informatif / Jasa Tirta II achieves Informative BUMN Qualification



31 OKTOBER / OCTOBER

Studi Banding MUSPIDA Siak Riau / Comparative Study of MUSPDA Siak Riau



4 NOVEMBER / NOVEMBER

Recount SIPDA dengan BBWS dan PSDA / Recount SIPDA with BBWS and PSDA



10 NOVEMBER / NOVEMBER

Jasa Tirta II Tebar 5000 Lobster Air Tawar di Waduk Jatiluhur / Jasa Tirta II Spreads 5000 Freshwater Lobsters in Jatiluhur Reservoir



10 NOVEMBER / NOVEMBER

Asia Sustainability Reporting Rating Award / Asia Sustainability Reporting Ranking Award



10 NOVEMBER / NOVEMBER

Kunjungan Direksi PJT I Malang / Visit of the Board of Directors of PJT I Malang



20 NOVEMBER / NOVEMBER

Kunjungan Direksi & Dewas ke unit wilayah II / Board of Directors & Board of Directors visit to regional unit II



13 DESEMBER / DECEMBER

Inspksi Renovasi Mesjid AS-SALAM / AS-SALAM Mosque Renovation Inspection



15 DESEMBER / DECEMBER

Kolaborasi Jasa Tirta II dalam Penanaman Pohon / Jasa Tirta II Collaboration in Tree Planting



16 DESEMBER / DECEMBER

Pelatihan Penyajian Kopi bagi Penyandang Disabilitas / Coffee Serving Training for Persons with Disabilities



22 DESEMBER / DECEMBER

Womn Empowerment on Mother's day and Beyond / Woman Empowerment on Mother's day and Beyond



23 DESEMBER / DECEMBER

Jasa Tirta II Raih Penghargaan Forum CSR Jabar 2021 / Jasa Tirta II Wins the 2021 West Java CSR Forum Award



27 DESEMBER / DECEMBER

Kunjungan direksi Dewas ke SPAM Marunda / Visit of the Board of Directors of the Supervisory Board to SPAM Marunda



28 DESEMBER / DECEMBER

Jasa Tirta II Raih kategori Terpatuh Pajak Penerangan Jalan / Jasa Tirta II Achieves the Road Lighting Tax Compliance category



30 DESEMBER / DECEMBER

Pelatihan UMK Binaan Jasa Tirta II Tahap II / Jasa Tirta II Assisted MSE Training Phase II

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications





Penghargaan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Pajak Penerangan Jalan Katagori Terpatuh Wajib Penerangan Jalan.

Grant for The Category of Road Lighting Tax Mandatory Street Lighting from the Regional Revenue Agency of Purwakarta Regency.





Penghargaan katagori “Silver Rank” untuk Sustainability Report pada acara The 17th Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2021.

The 17th Asia Sustainability event Reporting Rating (ASRRAT) 2021 awarded the Sustainability Report in the “Silver Rank” category.

Kamtibmas Tingkat Jawa Barat
West Java residents' safety and peace Level



Risk Awar 2021
3rd Best Skretaris Perusahaan
3rd Best Corporate Secretary, Risk Award 2021



Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) Karsa Bhakti Persada Kepada Perum Jasa Tirta II Jatilihur Valley & Resort Sebagai Hotel Bintang Tiga.

A business certification from a tourism organization (LSUP) As A Three Star Hotel, Karsa Bhakti Persada To Perum Jasa Tirta II Jatilihur Valley Resort.



Penghargaan Kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif dengan skor 90,81 pada kategori BUMN dalam Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Obtaining the Award of Openness Public Agency Information as Informative Public Bodies with a score of 90.81 in the SOE category.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso penghargaan INFOBANK Top CEO Forum 2021 urutan ke-2 BUMN Sangat Bagus dan bagian Top 100 CEO 2021 Megatren Global.

Obtaining the Award of Openness Public Agency Information as Informative Public Bodies with a score of 90.81 in the SOE category.



Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI / ISO 37001:2016
Ruang Lingkup Sertifikasi:

- Divisi Keuangan dan Akuntansi
- Divisi Komersil dan Pelayanan
- Pelanggan Unit Layanan Pengadaan.

ISO 37001:2016 / SNI Anti Management System Certification Bribery
The certification's range:

- Customers in the Commercial and Service
- Division, Procurement Service Unit,
- and Finance and Accounting Division.



Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Jasa Tirta II sebagai perusahaan Mitra CSR di Jawa Barat pada 5 (lima) kategori, yaitu :

1. CSR Infrastructure & Sanitation Award Top Contributor
2. CSR Social Solidarity Award Top Program
3. CSR Infrastructure & Sanitation Award Top program
4. Environmental Stewardship Award Top Program
5. Religious Facility Top Program.

Jasa Tirta II has received recognition from the West Java Provincial Government as a CSR Partner business in 5 (five) categories, including:

1. Top Contributors to the CSR Infrastructure & Sanitation Awards
2. Top Program for the CSR Social Solidarity Award
3. The top program for CSR Infrastructure & Sanitation
4. Top Program for the Environmental Stewardship Award
5. Top Program for Religious Facilities.

SERTIFIKAT SMK3
(Divisi PLTA)
CERTIFICAT OF SMK3 (
Hydropower Division)



SERTIFIKAT ISO 17025:2017
(Laboratorium)
CERTIFICATE FOR ISO
17025:2017 (Laboratory)



Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications



Penghargaan sebagai BUMN dengan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Kategori Pilar Lingkungan terbaik Kedua pada acara Penghargaan BUMN Track TJSL & CSR Award 2021.

The second-best neighborhood at the event was recognized with a STATE-OWNED with Social Responsibility Program Environment (TJSL) Pillar Category Award 2021.



Jasa Tirta II berhasil meraih penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada 5 (lima) kategori yaitu Infrastructure & Sanitation Award Top Contributor, Social Solidarity Award Top Program, Infrastructure & Sanitation Award Top Program, Environmental Stewardship Award Top Program, Religious Facility Award Top Program.

Jasa Tirta II won Corporate Social Awards (CSR) on 5 (five) categories, including Top Contributor in Infrastructure & Sanitation, Top Program in Social Solidarity, Top Program in Infrastructure & Sanitation, Top Program in Environmental Stewardship, and Top Program in Religious Facility.

Penghargaan Kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif dengan skor 90,81 pada kategori BUMN dalam Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik.

With a score of 90.81 on categories of SOEs in the Awarding Disclosure of Public Agency Information, one is qualified for the title of Body Informative Public.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

SERTIFIKASI YANG DIMILIKI / CERTIFICATION OWNED	NAMA SERTIFIKASI / CERTIFICATION NAME	NOMOR SERTIFIKASI / CERTIFICATION NUMBER	LEMBAGA SERTIFIKASI / CERTIFICATION AGENCY
Sertifikasi Kompetensi Laboratorium / Certification for Laboratory Competency	Registrasi Laboratorium Lingkungan / Registration of Environmental Laboratory	00108/LPJ/ LABLING-1/LRK/KLH	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Ministry of Environment and Forestry
	Sertifikat Uji Profisiensi / Certificate of Recognition	April 2017	ERA, Canada
	Akreditasi SNI ISO/IEC 17025-2008 / Accredited SNI ISO 17025-2008	LP-174-IDN	Komite Akreditasi Nasional / National Accreditation Committee
	Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Air / Certification of Water Sampling Officer	13.001526.17 13.001531.17 13.001527.17 13.001528.17	PPT Migas
Sertifikasi Kompetensi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Competency Certification of Monitoring Occupational Health and Safety	Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi / Certification of Intermediate HSE Construction Engineer	01561/AMK3.K/XI/2017 01563/AMK3.K/XI/2017 01566/AMK3.K/XI/2017	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of the Republic
	Sertifikasi Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik / Certification of HSE Electrical Specialist	02260/AK3-LIST/I/2018 02261/AK3-LIST/I/2018	Kementerian Ketenagakerjaan RI / Ministry of Manpower of the Republic
Sertifikat Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu / Certificate of Recognition of Implementation and Maintenance of Quality Management System	Sertifikat ISO - 9001:2015 / SNI / ISO - 9001:2008 dengan ruang lingkup kegiatan: Penyediaan Air Baku untuk PAM dan Industri pada Unit Usaha Wilayah I, II, III, IV & Pembangkitan dan Penyaluran Listrik PLTA Ir. H. Djuanda / Certificate of ISO - 9001:2015 / SNI ISO - 9001:2008 with scope of activities: Raw Water Supply for Water Company and Industry in Business Unit Region I, II, III, IV & Power Generation and Distribution of Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant	2701001	Komite Akreditasi Nasional / National Accreditation Committee
Sertifikat Air Minim Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Water Certificate	Sertifikat Halal / Halal Certificate	No. 01121081261212	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat / Indonesian Ulemma Council (MUI) of West Java
	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI / SNI Marking Product Certificate	01-3553-2006 nomor 597/LS/IPB/SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	Lembaga Sertifikasi Produk ILPro IPB / Product Certification Institute of ILPro IPB
Sertifikasi anti penyuapan / Antibribery certification	Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan ruang lingkup Divisi Keuangan & Akuntansi, Divisi Komersil & Pelayanan Pelanggan & ULP ISO 37001:2016 / Management System Certificate Anti-Bribery with scope Finance & Accounting Division, Commercial Division & Customer Service & ULP	No. SAB. 00043	Sucofindo



PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile




sa Tirta II
enghidupi Negeri

IDENTITAS PERUSAHAAN
Company Identity

NAMA PERUSAHAAN
Company Name

PERUM JASA TIRTA II

TANGGAL PENDIRIAN
Date of Establishment

26 Agustus 1967
August 26, 1967

BENTUK BADAN HUKUM
Legal Entity

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum.
State Owned Enterprise (SOE) in the form of Public Utility Company.

BIDANG USAHA
Line of Business

Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA).
Management and Exploitation of Water Resources (SDA).

MODAL DASAR
Authorized Capital

Rp164.547.635.935,00

JUMLAH KARYAWAN
Total Employee

1.046 Karyawan (Tidak termasuk karyawan anak perusahaan,Pegawai Waktu Tertentu, dan Outsorce)

1.046 employees (Excluding subsidiary employees, Specific Ti me Employees, and Outsources)

ENTITAS ANAK
Subsidiary Entity

PT. Jasa Tirta Luhur

DASAR HUKUM PENDIRIAN
Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010
Government Regulation No. 7 of 2010

KEPEMILIKAN
Ownership

100%

Milik Negara Republik
Indonesia
Owned by the Republic of Indonesia

ALAMAT KANTOR PUSAT
Head Office Address

Jl. Lurah Kawi No. 1
Jatiluhur – Purwakarta, Jawa Barat

LAYANAN INFORMASI
Information Service

pjt2@jasatirta2.co.id
(0264) 201972
(0264) 201971

Jasa Tirta II
jasatirta.2
Perum Jasa Tirta II
jasatirta 2
www.jasatirta2.co.id

STATUS PERUSAHAAN
Company Status

Perusahaan Umum(Perum)
Public-utility Company

KANTOR LAYANAN
Service Offices

1 Kantor Pusat / Head Office
1 Kantor Perwakilan / Representative Office
2 Kantor Unit Usaha / Business Unit Offices
4 kantor Wilayah / Regional offices

NPWP
Tax Identification Number

010000552-409.003

SERIKAT PEKERJA
Workers Union

Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II (SEKAR)



Kantor Pusat - Head Office

Jalan Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur
Purwakarta - Jawa Barat
Telp & Fax (0264) 201 971-72



Kantor Perwakilan - Representive Office

Jalan H. Agus Salim No. 69, Jakarta Pusat
Telp. (021) 314 5827



Kantor Unit Wilayah I - Regional Unit Office I

Jalan Ir. Djuanda No. 124D Bekasi
Jawa Barat
Telp & Fax. (021) 880 1884



Kantor Unit Wilayah II - Regional Unit Office II

Jalan Curug Klari, Karawang Jawa Barat
Telp. (0264) 200 487
Fax. (0264) 203 580



Kantor Unit Wilayah III - Regional Unit Office III

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16,
Subang-Jawa Barat
Telp. (0260) 411510 & Fax. (0260) 415 684



Kantor Unit Wilayah IV - Regional Unit Office IV

Jalan Rasamala Raya, Bendungan Jatiluhur,
Purwakarta-Jawa Barat
Telp. / Fax. (0264) 822 2537



Kantor Unit PLTA - Hydropower Unit Office

Jalan Rasamala Raya, Bendungan Jatiluhur,
Purwakarta-Jawa Barat
Telp. (0264) 200 565 & Fax. (0264) 200 060



Kantor Unit Usaha Pariwisata dan Hotel
Hotel Business Unit Office

Jatiluhur Valley & Resort
Jl. Rasamala No. 1, Jatiluhur - Purwakarta, Jawa Barat
Telp. (0264) 201087, 201989

Profil Wilayah Sungai Citarum
Citarum River Basin Profile

Sungai Citarum mengalir dari hulu yang berada di daerah Gunung Wayang, disebelah Selatan Kota Bandung, menuju ke Utara dan bermuara di Laut Jawa. Dengan Panjang sekitar 297 km. Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, Air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, perikanan, Sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air untuk pasokan Pulau Jawa dan Bali, serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri.

The Citarum River flows from upstream in the Gunung Wayang area, south of Bandung City, to the north and empties into the Java Sea. With a length of about 297 km. Citarum is the longest and largest river in the Provinces of West Java and DKI Jakarta, Citarum River water is used as a source of raw water, agricultural irrigation, fisheries, a source for hydroelectric power plants to supply Java and Bali, as well as a water supplier for industrial activities.

Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Provinsi Jawa Barat. WS Citarum Seluas kurang lebih 12.000 km2 mencakup 12 wilayah administrasi kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. Curah Hujan tahunan di WS Citarum rata-rata sebesar 2.358 mm.

Citarum River is a river that has the largest watershed (DAS) in West Java Province. Citarum WS has an area of approximately 12,000 km2 covering 12 administrative districts/cities in West Java Province, namely: Bandung Regency, West Bandung Regency, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Indramayu Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Subang Regency, Sumedang Regency, Bandung City, Bekasi City and Cimahi City. The average annual rainfall in the Citarum River Basin is 2,358 mm.

Jumlah sungai besar yang ada di Wilayah Sungai Citarum Kurang Lebih 19 sungai yang bermuara di laut utara maupun bergabung dengan sungai lainya. Sungai utama yang ada di WS Citarum adalah Sungai Citarum. Sungai Citarum bermuara di Muara Gembong (Kabupaten Bekasi). Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan wilayah sungai, wilayah sungai Citarum terdiri dari 19 DAS.

The number of large rivers in the Citarum River Basin is approximately 19 rivers that empties into the north sea or joins other rivers. The main river in the Citarum River Basin is the Citarum River. The Citarum River empties into Muara Gembong (Bekasi Regency). Based on Presidential Decree No. 12 of 2021 regarding the determination of river areas, the Citarum river area consists of 19 watersheds.

Terdapat tiga Waduk Besar yaitu Sanguling, Cirata dan Ir. H. Djuanda / Jatiluhur yang berfungsi sebagai pembangkit listrik dan pendukung sistem irigasi yang ada dikawasan tersebut. Ketiga Waduk Tersebut adalah Waduk Sanguling, Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. Semua waduk tersebut berada dalam satu aliran Sungai Citarum dan berada di 4 Kabupatn (Cianjur, Bandung Barat, Purwakarta dan Karawang.

There are three large reservoirs, namely Sanguling, Cirata and Ir. H. Djuanda / Jatiluhur which functions as a power generator and supports the existing irrigation system in the area. The three reservoirs are Sanguling Reservoir, Cirata Reservoir and Jatiluhur Reservoir. All of these reservoirs are located in one flow of the Citarum River and are located in 4 districts (Cianjur, West Bandung, Purwakarta and Karawang.

Bendungan Jatiluhur adalah Bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan itu dinamakan oleh Pemerintah Waduk Ir. H. Djuanda dengan panorama danau yang luasnya 8.300 ha. Bendungan ini mulai dibangun sejak tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis, dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar m3/tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonsia yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II yang memiliki fungsi penyedia air irigasi untuk 242.000 ha sawah (dua kali tanam setahun), air baku, air minum, budidaya perikanan dan pngendali banjir. Bendungan juga memiliki 6 unit turbin dengan daya terpasang 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kwh setiap tahun.

Jatiluhur Dam is the largest dam in Indonesia. The dam was named by the Reservoir Government Ir. H. Juanda with a panoramic view of the lake which covers an area of 8,300 ha. This dam was built in 1957 by a French contractor, with an available water potential of 12.9 billion m3/year and is the first multipurpose reservoir in Indonesia managed by Perum Jasa Tirta II which has the function of providing irrigation water for 242,000 ha of rice fields (planting twice a year), raw water, drinking water, aquaculture and flood control. The dam also has 6 turbine units with an installed power of 187 MW with an average electricity production of 1,000 million kwh per year.

Sekilas Perusahaan
Company at a Glance

Sejarah perusahaan kami bermula dari proyek nasional Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda merupakan bagian dari tahap Pengembangan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum, dan berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan air irigasi pertanian di sebagai wilayah Jawa Barat, penyediaan air baku untuk PDAM dan Industri Pembangkit Listrik. Selain itu, Bendungan/ Waduk PLTA Ir. H. Djuanda juga berfungsi sebagai pengendali banjir di sebagian wilayah Karawang dan daerah subur sekitarnya, serta sebagai salah satu tujuan wisata dan olahraga air di wilayah Jawa Barat.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, maka berdasarkan PP No. 8 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur. Badan ini bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya.

The history of our company was initiated from a national project of the Government of the Republic of Indonesia for the construction of the Ir. H. Djuanda Dam in 1957 that completed in 1967. The construction is part of the Water Resources Development stage in the Citarum River basin, and serves to support the national food security through the provision of agricultural irrigation in some areas of West Java, the provision of raw water for Regional Water Company (PDAM) and Power Generation Industries. In addition, Hydroelectric Power Plant (PLTA) dam/ reservoir of Ir. H. Djuanda also serves as flood controllers in some part of Karawang and its surrounding areas, as well as one of the tourist destinations and water sports in West Java.

With the completion of the development, in conform to Government Regulation No.8 on July 24, 1967, the Government of the Republic of Indonesia established the Jatiluhur Board of Management and Supervisory under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur. This agency is in charge of carrying out Exploitation and Maintenance of Facilities and Infrastructure of Dams/ Reservoirs and PLTA Ir. H. Djuanda as well as pioneering the development of subsequent projects.



Dengan bertambah luasnya ruang lingkup tugas Perusahaan serta sejalan dengan usainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi Waduk, Bendungan Utama, Stasiun PLTA serta sarana-sarana Sistem Pengairan dan Irigasi, menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membentuk Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970 yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 Tahun 1980, PP No. 42 Tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998. POJ diberi mandat oleh Pemerintah untuk mengelola sumbersumber pendapatan Otorita, dan harus diusahakan pemasukannya semaksimal mungkin untuk dipergunakan bagi biaya rehabilitasi, perbaikan berat dan pembangunan jaringan.

With the expansion of the Company's scope of work, in line with the majority of the construction of the Jatiluhur Multipurpose Project which includes the Reservoir, the Main Dam, the Hydroelectric Station, and the Irrigation System facilities, this became the basis of Government Consideration to form the established Jatiluhur Authority (POJ) based on PP No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Government Regulation No.35 of 1980, PP No.42 of 1990, and PP No.13 of 1998. POJ is mandated by the Government to manage the sources of income of the Authority, and must cultivate as much as possible to be used for rehabilitation, heavy repair, and network construction.

RIWAYAT PERUBAHAN NAMA

Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat, maka berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan Perum Jasa Tirta II bertransformasi menjadi lebih dinamis, responsif, dan mampu meningkatkan perannya sebagai perusahaan yang terkemuka di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

Sesuai dengan tujuan didirikannya Perum JasaTirta II, manajemen tetap berkomitmen terhadap misi yang diemban Perum Jasa Tirta II yaitu menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan inovatif melalui penyediaan air baku. Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau selain PT PLN (Persero). Pengembangan kepariwisataan dan pemanfaatan lahan yang bertujuan memberikan kontribusi dalam menunjang ketahanan pangan nasional dan keuntungan bagi Negara dan turut melaksanakan kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

HISTORY OF COMPANY'S NAME

To assist the implementation and support of the government policies and programs in the field of economy and national development in general, especially in the field of water resources management and utilization and optimization of resources utilization of the Company, to produce goods and services based on sound management principles of the Company. Therefore, based on Government Regulation No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its duties and business activities with PP No.7 of 2010.

With these changes, Perum Jasa Tirta II is expected to transform into a more dynamic, responsive and able to improve its role as a leading company in the field of water resources management.

In accordance with the purpose in establishing Perum Jasa Tirta II, the management remains committed to the mission carried by Perum Jasa Tirta II, which is to manage the Water Resources with good and innovative Corporate Governance through the prov sion of raw water. Power generation and distribution to PT PLN (Persero), and/or any other than PT PLN (Persero). To develop tourism and land use which aims to contribute in supporting the national food security and profit for the State. To participate in implementing the Government program policies in the field of economy and national development in general, especially in the field of business and management of Water Resources and optimization of resource utilization of the Company to produce goods and services based on sound corporate management


LAYANAN
INFORMASI PUBLIK

JEJAK LANGKAH / MILESTONE

1957–1967

Proyek pembangunan Bendungan Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai dibangun pada tahun 1967 dan diresmikan Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Bendungan Ir. H. Djuanda.

Construction of Jatiluhur Multipurpose Dam project was declared completed in 1967 and inaugurated by the Government of the Republic of Indonesia under the name of Ir. H. Djuanda Dam.

1967–1970

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1967 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur.

Based on Govt. Reg. No.8 of 1967, on July 24, 1967, the Government established the Board of Management and Advisory of Jatiluhur Lake under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur.

1997–1999

Pemerintah membentuk Perum Otorita Jatiluhur yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970, yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 tahun 1980, PP No. 42 tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998.

The government established the Perum Otorita Jatiluhur under Govt. Reg. No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Govt. Reg. No.35 of 1980, Govt. Reg. No.42 of 1990, and Govt. Reg. No.13 of 1998.

1999

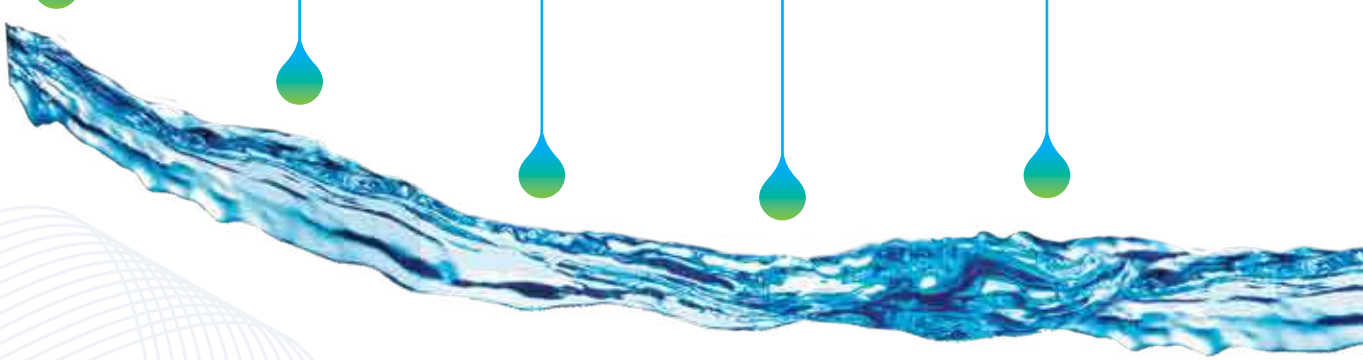
Pegawai/Pekerja dari Proyek PLTA Jatiluhur beserta bangunan Waduk, PLTA serta Gardu Induknya diserahkan kepada PN Jatiluhur untuk menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan potensi-potensi yang timbul setelah selesainya sebagian Proyek PLTA Jatiluhur.

Officers/Workers from Jatiluhur Hydroelectric Project and Reservoir building, hydropower, and substation were handed over to PN Jatiluhur to organize the Management and Exploitation of potentials that arise after the completion of part of Jatiluhur Hydroelectric Project.

2010

Berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II, yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

Based on Govt. Reg. No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its tasks and business activities with Govt. Reg. No. 7 of 2010.





2017

Perusahaan melakukan perubahan logo sebagai bentuk implementasi transformasi. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

The company changes the logo as a form. of implementing transformation. The latest logo has been ratified pursuant to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/DIR/35/PRD-PED/2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/01/PRT/2014 concerning the Guideline of Service Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

2018

Perusahaan mendirikan anak perusahaan yakni PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, dengan Akta nomor 46 tanggal 29 Agustus 2018.Perseroan bergerak dalam bidang jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi. Pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemilik modal.

The company established a subsidiary, namely PT Jasa Tirta Luhur which was established based on the Notary Deed of Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, by Deed number 46 dated August 29, 2018. The Company is engaged in Drinking Water Supply System and Construction services. The establishment has obtained the approval of the owner of the capital.

2021

Perusahaan kini tergabung kedalam sub klaster holding Danareksa-PPA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.113 tanggal 10 November tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Danareksa". Dimana PT Danareksa ditunjuk sebagai holding perusahaan lintas sektor salah satunya sebagai Holding Perusahaan Sumber Daya Air.

The company is now incorporated into the Danareksa-PPA holding sub-cluster. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 113 dated November 10, 2021 concerning amendments to Government Regulation No. 25 of 1976 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) "Danareksa". Where PT Danareksa was appointed as a holding company across sectors, one of which was as a Holding Company for Water Resource.

Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti Perusahaan
Company Vision, Mission, Motto and Core Competencies

VISI / Vison

Menjadi Perusahaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030. / Being the Reputable Water Resource Managemenet and Enterprise Company in Southeast Asia 2030.

MISI / Mission

- Pengoptimalan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara yang efisien, efektif, inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya. / Optimizing the utilization of Water Resources in an efficient, effective, innovative and sustainable manner with the objective of maintaining the sustainability and management of Water Resources and derivatives.
- Menciptakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya kreativitas dan inovasi serta berdaya saing tinggi dalam pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya. / Creating Human Resources that have the power of creativity and innovation and high competitiveness in the management of Water Resources and derivatives.
- Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbaharukan (EBT). / Implementing appropriate technology and environmentally friendly, especially in the Development of New and Renewable Energy (EBT).

*Visi dan Misi Perusahaan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021. / *The Company's Vision and Mission have been determined based on the 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

MOTTO PERUSAHAAN / Company Motto

Air Untuk Menghidupi Negeri
Water for Wellness

Motto Perum Jasa Tirta II tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 01/DIR/27/PRT/2016. / Perum Jasa Tirta II Motto has been established through Board of Directors Regulation No. 01/DIR/27/PRT/2016.

Kompetensi Inti Perusahaan / Company Core Competencies

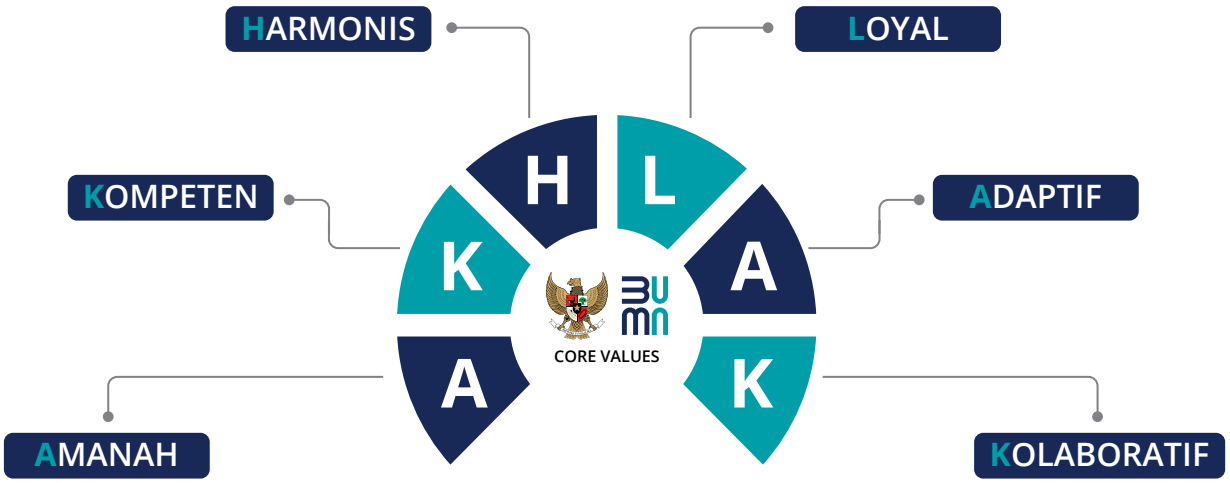


- Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) / Management of Water Resources (SDA).



- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Air (SDA) / Development of New and Renewable Energy by utilizing the potential of Water Resources (SDA)

Nila-Nilai Utama
Core Values



AMANAH / TRUST
adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Hold on to the trust.

KOMPETEN / COMPETENT
adalah terus belajar dan mengembangkan kapasitas.
Continue to learn and develop capacity.

HARMONIS / HARMONY
adalah saling peduli dan menghargai perbedaan.
Care for each other and respect differences.

LOYAL / LOYAL
adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

ADAPTIF / ADAPTIVE
adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan.
Continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

KOLABORATIF / COLLABORATIVE
adalah membangun kerjasama yang sinergis.
Build synergistic cooperation.

Tata Nilai Perusahaan
Corporate Values

Sejalan dengan Moto "Air untuk Menghidupi Negeri" (Water for Wellness) maka nilai-nilai perusahaan yang menjadi jiwa dan karakter seluruh insan PJT II sebagai pedoman bersama guna meraih tujuan perusahaan yang terus berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada negeri adalah sebagai berikut :

In line with the motto "Water For Wellness", the values of the Company that become the soul and the characters of all PJT II person serves as a common guideline in order to achieve the goals of a growing company and provide prosperity to the country are as follows :

T Tangguh - Strong
Berkemampuan Tinggi dalam Melaksanakan Tugas
High Capability in Carrying out Tasks

I Inovatif - Innovative
Memiliki Kreativitas dan Inovasi dalam Menjalankan Tugas
Having Creativity and Innovation in Running Duties

R Responsif - Responsive
Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas untuk Kepuasan Pelanggan
Providing Fast and Qualified Services for Customers Satisfaction

T Transparan - Transparent
Bersikap Jujur, Terbuka dan Profesional dan Menjalankan Tugas
Being Honest, Open, and Professional in Running Tasks

A Akuntabel - Accountable
Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas
Responsible in Implementing Tasks



Filosofi Logo
Logo Philosophy

Logo Perusahaan telah berubah sebanyak 1 (satu) kali sejak berdirinya Perum Jasa Tirta II. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

Company logo has changed once since the establishment of Perum Jasa Tirta II. The latest logo has been ratified pursuant to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/DIR/35/PRD-PED/ 2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/01/ PRT/2014 on Guidelines for Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

Logo Perusahaan merupakan representasi dari bentuk tetesan air, sebagai manifestasi filosofi air yang mengajarkan kerendahan hati, kebaikan, kegigihan, fleksibilitas, dan keseimbangan.

The Company logo is a representation of the shape of water droplets, as a manifestation of water philosophy that teaches humility, kindness, tenacity, flexibility, and balance.

Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri

TAGLINE

Tagline tersebut memberikan pemahaman bahwa Perusahaan sebagai Perusahaan Pengelola Sumber Daya Air (SDA) berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi dan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan menjaga SDA tersebut untuk keberlangsungan negeri.

Tagline

The tagline provides an understanding that the Company as a Water Resources Management Company (SDA) is committed to always contribute and benefit to the welfare and prosperity of the country and maintain the water resources for the sustainability of the country.

WARNA

Gradasi warna menunjukkan Langkah Besar yang diambil PJT II dan Aspirasi Perusahaan terhadap masa depan yang lebih Positif dan Dinamis.

- Warna biru mencerminkan Perusahaan yang andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab;
- Warna putih melambangkan kesucian amanah yang diemban Perusahaan dalam ikut berkontribusi membangun kemakmuran bangsa lintas generasi.
- Warna merah mencerminkan keuletan dan ketegasan serta keberanian Perusahaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan.
- Warna hijau mencerminkan pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan.

Color

The color gradation shows the Big Step taken by PJT II and the Company's Aspiration towards a more Positive and Dynamic future.
• he Blue reflects a reliable, trustworthy, and responsible Company;
• The white symbolizes the sanctity of the trust that the Company carries in contributing to build the nation's prosperity across generations
• The red reflects the resilience, firmness, and courage of the Company in the face of various challenges
• The green reflects the management of water resources that are environmentally sound.

PANDUAN WARNA
Color Guide

Biru Muda Light Blue
R=0, G=157, B=224
C=78, M=23, Y=0, K=0

Navy
R=0, G=74, B=169
C=100, M=83, Y=5, K=0

Hijau Green
R=153 G=204, B=51
C=47, M=0, Y=100, K=0

Merah Red
R=255, G=0, B=0
C=0, M=100, Y=100, K=0

Abu-abu Grey
R=102, G=102, B=102
C=62, M=53, Y=53, K=25

LOGOGRAM



Struktur logo terdiri dari logo gram (bentuk tetesan air) maupun logotype (Perum Jasa Tirta II) dan tagline (Air untuk Menghidupi Negeri).

The logo structure consists of logogram (water droplets), logotype (Perum Jasa Tirta II), and tagline (Water for Wellness).

LOGOTYPE

Perum Jasa Tirta II

Logotype Perum Jasa Tirta II, font Diavlo Black.otf dan Tagline Air untuk Menghidupi Negeri, font Amperzand.

Logotype Perum Jasa Tirta II, font: Diavlo Black.otf Tagline Air untuk menghidupi negeri, font: Amperzand

Tujuan Perusahaan
Company's Objectives

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in general, particularly in the field of Water Resources Enterprise and Management, as well as optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.

Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Perum Jasa Tirta II adalah Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

KEGIATAN USAHA

Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang memiliki luas genangan 83 km persegi, mampu menampung 2,50 miliar meter kubik volume total air baku pada TMA +107 meter. Bendungan ini juga memiliki daerah tangkapan keseluruhan seluas 4.500 km persegi, dengan daerah tangkapan yang langsung ke waduk adalah seluas 380 km persegi. Dengan potensi sumber daya yang sangat besar tersebut, maka kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya air dan kelistrikan serta kegiatan usaha lainnya, sebagai berikut :

- Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai ketentuan perundangundangan;
- Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
- Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
- Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata,perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

PRODUK DAN JASA

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik Perum Jasa Tirta II mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir. H. Djuanda di Jatiluhur yang memiliki daya terpasang sebelumnya antara tahun 1994 sampai dengan 1998 adalah sebesar 150 MW. Hingga saat ini, daya terpasang pada PLTA Ir. H. Djuanda telah meningkat menjadi 187,5 MW. Produksi listrik rata-rata dalam setahun adalah sebesar 830 juta kWh yang sebagian digunakan untuk pemakaian sendiri dan penugasan Pemerintah, sedangkan selebihnya dipasok ke PT PLN (Persero) melalui jaringan tegangan 150 kV dan 70 kV.

In accordance with Government Regulation No.7 of 2010 and Company's Articles of Association, the business field of Perum Jasa Tirta II is the Business and Management of Water Resources, and optimizing the utilization of Company's resources to produce goods and services.

BUSINESS ACTIVITY

Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir covers the inundation area of 83 square km, able to accommodate 2.50 billion cubic meters of total raw water volume at TMA +107 meters. The dam also has a total catchment area of 4,500 sq km, with a direct catchment area to a reservoir of 380 sq km.With such enormous resources potential, the operational activities of Perum Jasa Tirta II concentrate on water and electricity resource management and other business activities, such as:

- Raw water supply services for drinking water, industry, agriculture, flushing, ports, power generation, and other water needs;
- Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) and/or any other than PT PLN in accordance with the laws and regulations;
- Generation, distribution of hydroelectricity, drinking water, consultancy services in the field of Water Resources technology, large equipment rental, and water quality laboratory services;
- Development of Drinking Water Supply System (SPAM); and
- Optimizing the Company's potential resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, leasing and exploitation of facilities and infrastructure owned by the Company.

PRODUCTS AND SERVICES

Power Generation and Distribution Perum Jasa Tirta II manages Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant in Jatiluhur with previous installed power between 1994 and 1998 was 150 MW. Currently, the power installed on Ir. H. Djuanda hydropower has increased to 187.5 MW. The average electricity production in a year is 830 million kWh, partly for own usage and government assignments. While the rest is supplied to PT PLN (Persero) through a network voltage of 150 kV and 70 kV..



Selain itu, pada sistem pengairan milik Perusahaan juga terdapat banyak bangunan terjunan dengan potensi minihidro yang banyak menghasilkan listrik mulai dari 50 kVa hingga 5.000 kVa.

Penyediaan Air Baku

Sebagai pengelola bendungan Ir. H. Djuanda, Perum Jasa Tirta II bertugas mendistribusikan air baku, di mana saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar meter kubik per tahun yang disalurkan ke 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor, dan Bandung. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Kepariwisataan

Keberadaan bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perum Jasa Tirta II telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, dan wahan rekreasi air.

In addition, there are numerous spillway constructions with minihidro potential on the Company's irrigation systems that can generate electricity ranging from 50 kVA to 5,000 kVA.

Raw Water Supply

As the manager of Ir. H. Djuanda dam, Perum Jasa Tirta II is in charge of distributing raw water, which currently has the production capacity of up to 1 billion cubic meters per year which is distributed to 15 Municipal Water Companies (PDAM) in Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor and Bandung. It is also channeled to a number of industries in the region of Bekasi, Karawang, Purwakarta, and Bandung.

Tourism

The existence of Ir. H. Djuanda Jatiluhur dam with its beautiful scenery, combined with the splendor of the dam building is a special attraction for tourists and become one of the destinations of tourism in West Java. In order to take advantage of tourism potential in this area, Perum Jasa Tirta II has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, and water recreation rides.

Fasilitas pariwisata di kawasan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi bangunan hotel bintang tiga dengan nama Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan hotel ini, terdapat 33 bungalow dengan 30 kamar Hotel, dan 7 ruang pertemuan yang 5 di antaranya berada di Gedung Grha Vidya (terdiri dari 1 ruang pertemuan utama berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan lain sebagainya.

ourism facilities in the area of Ir.H.Danda Jatiluhur Dam has been equipped with three-star hotel building under Jatiluhur Hotel Resort which operated since 1967. There are 33 bungalows with 30 hotel rooms in the area of this hotel. Also, seven meeting rooms, five of which are located in Grha Vidya Building (consisting of one main meeting room with the capacity of 800 people, and 4 meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 separate meeting rooms located in the Istora Restaurant with the capacity of 80 people, each. The tourism area is also equipped with a swimming pool and water recreation facilities such as waterboom Jatiluhur Water World (JWW), cruises, water ski boating, and so forth.

Pemanfaatan Lahan

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan yang berupa lahan pertanian dan non pertanian seluas 689,18 ha melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta, seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PDAM Kabupaten/Kota, dan industri serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian.

Land Utilization

As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilizes land in the form of agricultural and non-agricultural land covering 689.18 ha through leasing system and business cooperation with various agencies, either state-owned (SOE) or private sector such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Regency/Municipal Water Company, industry, and individual communities that rent land for agriculture.

Jasa Laboratorium Kualitas Air

Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga menyediakan Jasa Pelayanan Laboratorium untuk pengujian kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan "Komite Akreditasi Nasional" Jawa Barat. Beberapa perusahaan besar industri makanan dan minuman di Indonesia seperti ABC dan Indofood telah menggunakan jasa laboratorium milik PJT II. Kemudian Rumah Sakit besar, perhotelan, dan apartemen hingga pabrik tekstil dan kertas berskala besar juga telah menggunakan jasa pelayanan laboratorium milik PJT II selama ini.

Water Quality Laboratory Services

Perum Jasa Tirta II (PJT II) also provides Laboratory Services for water quality testing, which is one of the reference laboratories for West Java's National Accreditation Committee. Some major food and beverage industries in Indonesia, such as ABC and Indofood, have used this laboratory service owned by PJT II. Then large hospitals, hotels and apartments, to large-scale textile and paper factories have also used the services owned by PJT II to date.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sepanjang tahun 2021 Perusahaan telah menyusun rencana strategis, di antaranya adalah pengembangan usaha Sumber Daya Air (SDA) dengan berinvestasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PJT II mendukung pengembangan proyek-proyek SPAM untuk mendukung kecukupan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait.

Development of Drinking Water Supply System

In 2021, the company has developed strategic plan, among them is the development of the Water Resources (SDA) business by investing in the Drinking Water Supply System (SPAM). PJT II supports the development of SPAM projects to support the adequacy of providing clean water for the community in collaboration with relevant stakeholders.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral" dengan keterangan sebagai berikut :

Bottled Drinking Water

Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to provide drinking water to communities in the Company's service areas. This commitment is realized in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral" with the following information :

KEMASAN DAN ISI BERSIH / Packaging And Net Content	NOMOR PENDAFTARAN PANGAN / Food Registration Number	SERTIFIKAT HALAL / Halal Certification	SERTIFIKAT SNI / SNI Certification	KAPASITAS PRODUKSI / Production Capacity
Gelas Plastik 240 ml / Plastic Glass 240 ml	BPOM RI MD 265228001325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	6.500 gelas/jam cup/hour
Botol Plastik 330 ml / Plastic Bottle 330 ml	BPOM RI MD 265228003325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	1.500 botol/jam bottle/hour
Botol Plastik 600 ml / Plastic Bottle 600 ml	BPOM RI MD 256228002325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	1.200 botol/jam bottle/hour
Galon Plastik / Plastic Gallon	BPOM RI MD 256228002325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	200 galon/jam gallon/hour

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan PH antara 5 -7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O3) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Biomagnetic serta Far Infrared untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H2O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan serta mitra/stakeholders Perusahaan.

AMDK Jatiluhur is demineralized drinking water with PH between 5 – 7.5 and TDS below 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur is processed by Reverse Osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O3) and ultraviolet, and processed again with Biomagnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecule. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H2O) molecules that are identical to fluid molecules in human body cells to be more easily absorbed to the body that drives the nutrients and oxygen to be more easily transported. Target market of Air Demineral Jatiluhur, among others, are employees of the Company and their families, communities in the Company's work area and our partners/stakeholders.





LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT






JASATIRTA II
BBWS CITARUM
DM Entec Co.,Ltd
AUTOMATIC TRASH RAKE
SIPHON CIBEET

LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Supervisiory Board Report



Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilik Modal dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,
Pertama, perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dari Tahun 2019 sampai tahun 2021. Perum Jasa Tirta II (untuk selanjutnya disebut "Perusahaan" atau PJT II) dapat menjawab tantangan yang dihadapi dengan terus merangkul perubahan, membangun daya tahan untuk menyongsong tantangan kedepan.

Pada tahun 2021, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.689.754 juta, meningkat Rp150.019 juta atau 9,74% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.539.735 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp408.547 juta, meningkat Rp85.747 juta atau 26,56% dari sebelumnya sebesar Rp322.800 juta pada tahun 2020. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.281.207 juta, meningkat Rp64.272 juta atau 5.28% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.216.935 juta.

Laporan Tugas pengawasan periode Januari 2021 – Desember 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jalannya perusahaan, sekaligus perwujudan GCG. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Pengawas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta didukung penuh oleh Komite Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berupaya menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara lebih efektif dan efisien.
Dewan Pengawas berupaya aktif dalam membantu Direksi untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di perusahaan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Respected Capital Owners and Stakeholders, First, allow us to express our thankfulness and gratitude to God Almighty for His abundance of blessings as we face the challenges of the Covid-19 epidemic from 2019 to 2021. The obstacles faced can be overcome by Perum Jasa Tirta II (hence referred to as "the Company" or PJT II) by continuing to accept change and developing resilience to tackle new challenges.

The assets of the company were valued at Rp1,689,754 million in 2021, up Rp150,019 million (9.74 percent) from Rp1,539,735 million in 2020. Liabilities for the Company were valued at Rp408,547 million, up Rp85,747 million or 26.56 percent from the Rp322.800 million in 2020. Compared to the realization in 2020 of Rp1,216,935 million, the Company's equity was reported at Rp1,281,207 million, an increase of Rp64,272 million or 5.28 percent.

The Supervisory Task Report for the period of January 2021 through December 2021 serves as a means of holding the Perum Jasa Tirta II Supervisory Board accountable for performing its oversight responsibilities and offering guidance on how to run the business and implement GCG. The Supervisory Board is fully supported by the Supervisory Board Committee and the Secretary of the Supervisory Board in carrying out its supervisory duties and giving recommendations. It is also directed by the provisions of the applicable laws and regulations. The Perum Jasa Tirta II Supervisory Board strives to perform its advising and oversight responsibilities more effectively and efficiently.
When issues arise, the Supervisory Board actively works with the Board of Directors to find solutions.

Beberapa permasalahan yang menurut Dewan Pengawas strategis selama bulan Januari 2021 - Desember 2021 yang dapat dilaporkan antara lain: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang berpengaruh pada pendapatan BJPSDA, Antisipasi perusahaan dalam menghadapi pandemi Covid-19, Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dan monitoring berkala pencapaian realisasi investasi.

Perkembangan tindaklanjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat Dewan Pengawas dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas memberikan saran/masukan kepada Direksi guna percepatan penyelesaian permasalahan stategis dimaksud.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sementara itu, untuk program yang capaian kinerjanya belum mencapai target, Dewan Pengawas akan mendorong dalam peningkatannya. Kedepan, Dewan Pengawas akan terus berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Sepanjang tahun 2021, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tercermin dari sejumlah program kerja yang direalisasikan, di antaranya kunjungan kerja untuk melihat proses operasi secara langsung, meninjau kesesuaian prosedur yang diterapkan, dan menyelaraskan proses kerja dengan prinsip -prinsip GCG. Dewan Pengawas berupaya mengawasi dan meninjau seluruh langkah strategi yang diambil Direksi dengan memberikan arahan atau rekomendasi yang disampaikan melalui mekanisme rapat gabungan maupun penerbitan surat/tanggapan baik kepada Direksi maupun Pemilik Modal. Pelaksanaan

Follow-up on BPK recommendations that affect BJPSDA income are just a few of the issues that, according to the Strategic Supervisory Board, can be reported between January 2021 and December 2021. the readiness of businesses to deal with the Covid-19 pandemic, adjustments to organizational structure and governance, and routine evaluation of investment realization results.

In the Supervisory Board meetings and the joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors, follow-up developments on strategic concerns were heavily discussed. In order to hasten the settlement of the aforementioned strategic issues, the Supervisory Board advises and/or makes suggestions to the Board of Directors.

While the Supervisory Board will support adjustments for programs whose performance accomplishments have not yet met the aim, the different performance successes that have been attained can be maintained and even improved in the upcoming years. The Supervisory Board will keep enhancing how the company's supervisory responsibilities are carried out in the future.

Monitoring the Implementation of a Strategy

A number of work programs that have been accomplished throughout 2021 demonstrate the supervisory role played by the Supervisory Board, including working visits to directly observe the operating process, examining the adequacy of the methods applied, and aligning work processes with GCG principles. By giving instructions or making recommendations through the method of joint meetings and sending letters/responses to both the Board of Directors and Capital Owners, the Supervisory Board tries to oversee and assess all strategic actions done by the Board of Directors. Every month, the Supervisory Board convenes regular internal and joint sessions.

rapat Dewan Pengawas secara rutin dilaksanakan setiap bulannya, baik rapat internal maupun gabungan. Agenda rapat Dewan Pengawas membahas hal-hal yang bersifat rutin yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengawas beserta Organ serta melakukan reviu kinerja berkala perseroan (baik operasional produksi maupun keuangan) dan permasalahan yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen serta membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Selama periode Tahun 2021, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 15 (lima belas) Rapat Internal Dewan Pengawas dan 12 (dua belas) Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas,

A number of work programs that have been accomplished throughout 2021 demonstrate the supervisory role played by the Supervisory Board, including working visits to directly observe the operating process, examining the adequacy of the methods applied, and aligning work processes with GCG principles. By giving instructions or making recommendations through the method of joint meetings and sending letters/responses to both the Board of Directors and Capital Owners, the Supervisory Board tries to oversee and assess all strategic actions done by the Board of Directors. Every month, the Supervisory Board convenes regular internal and joint sessions.

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali dan menerbitkan 15 surat/ tanggapan kepada Direksi dan Pemilik Modal. Rangkuman pokok- pokok arahan atau rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Direksi selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Aset Dan Audit Internal
2. Penguatan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan Investasi

Up to 13 times, the Board of Trustees and Board of Directors have met together, and 15 letters and responses to the Board of Directors and Owners Capital have been published. Following is a list of the Supervisory Board's suggestions or points of guidance for the Board of Directors for 2021:

1. Improving Internal Audit, Asset Governance, and the Internal Control System
2. Enhancing Risk Management
3. Implementing Investments

Prospek Usaha

Prospects for Business

Dewan Pengawas telah melakukan peninjauan atas rancangan target usaha yang diajukan oleh Direksi dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021. Meninjau RKAP tersebut, Dewan Pengawas menanggapi secara positif prospek usaha yang telah disusun Direksi yang mana pada prosesnya telah disandarkan pada analisis yang komprehensif mengenai asumsi-asumsi ekonomi makro tahun 2021 dan faktor- faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.

The draft business goals included in the Board of Directors' 2021 Corporate Budget Work Plan have been examined by the Supervisory Board (RKAP). After reviewing the RKAP, the Supervisory Board gave a favorable response to the business prospects that the Board of Directors had produced, relying on the analysis offered in the process. detailed information on macroeconomic projections for 2021 and other elements influencing the operation of the company.

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite dibawah Dewan Pengawas. Sepanjang tahun 2021, komite -komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan seluruh rencana kerja masing-masing komite sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021.

Pelaksanaan rencana kerja komite-komite tersebut dapat dilakukan dilakukan melalui forum rapat komite dengan mengundang Direktorat, Divisi maupun Unit kerja terkait maupun secara tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan secara mendalam oleh masing-masing komite dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.

Selama tahun 2021, Komite Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan melaksanakan rapat selama tahun 2021.

Selain itu Dewan Pengawas dan Komite telah menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib Kerja, yang selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi. Kebijakan dan Tata Tertib Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawaban. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Pengawas dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Performance Evaluation of Committees Under the Supervisory

Board The Supervisory Board regularly (annually) assesses how well the Supervisory Board's committees are doing their duties. The committees established by the Supervisory Board have successfully performed their tasks, obligations, and responsibilities during 2021. This is mirrored in the execution of each committee's whole work plan, which was laid out in early 2021.

Implementing the work plans of these committees can be done directly by inviting relevant Directorates, Divisions, and work units to committee meetings, or indirectly by evaluating the reports that have been received, thoroughly examining each one, and then reporting the findings to the Supervisory Board in writing.

The Supervisory Board Committee has effectively performed its obligations during 2021 and had meetings the entire year.

The Supervisory Board and the Committee have also created a number of Policies and Work Orders, always adjusting them to the current laws and difficulties. Every action is carried out in accordance with these Policies and Work Rules, which also ensure accountability. The Supervisory Board's and the Committee's organizational structure and membership are compliant with all relevant laws.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas pencapaian program maupun rencana kerja dan berharap kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menjaga Perusahaan agar lebih resilient dalam menghadapi segala tantangan dan memperoleh kinerja terbaik dalam industri di Indonesia.

The Supervisory Board recognizes the success of the programs and work plans and expects that the Committee's performance can be further enhanced so that it can contribute more to maintaining the Company's resilience in overcoming all obstacles and achieving the finest results in the Indonesian business.

Penilaian Atas Kinerja Manajemen

Penilaian Dewan Pengawas mengenai kinerja Manajemen Perusahaan Tahun 2021 terdiri dari aspek kuantitatif maupun kualitatif atas realisasi dari Rencana Kerja Tahunan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menilai kinerja Perusahaan masih baik terlihat dari Perusahaan tetap dapat membukukan laba dan merealisasikan strategi inisiatif untuk mendukung pencapaian target tahun 2021 meskipun di tengah

Management Performance Evaluation

The realization of the Annual Work Plan, which had previously been submitted by the Board of Directors and authorized by the Supervisory Board, will be evaluated by the Supervisory Board in terms of both quantitative and qualitative criteria in 2021. The Company is still able to record profits and carry out strategic activities to support the fulfillment of the 2021 target, according to the Supervisory Board, proving that the Company is still performing well.

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peran dan amanat dalam menjaga dan mengelola Sumber Daya Air bagi kepentingan sosial dan komersial mendorong Perum Jasa Tirta II untuk senantiasa menempatkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan etis sebagai sebuah nilai yang harus terpelihara dengan baik. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pengelolaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan dan pemeliharaan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pemangku kepentingan dalam integrasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Sebagai salah satu aspek prioritas, Dewan Pengawas berupaya memastikan bahwa Perusahaan menaruh komitmen dalam memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai modal

Corporate social responsibility implementation

Perum Jasa Tirta II is encouraged to always prioritize ethical business conduct as a principle that must be upheld by his function and mission in protecting and managing water resources for social and commercial reasons. This commitment is then fulfilled by integrating corporate social responsibility programs into the management of social, economic, and environmental repercussions while maintaining harmonious and synergistic partnerships with stakeholders. The Supervisory Board works to guarantee that the Company is committed to focusing on the well-being of the community and environmental sustainability as a capital concern as one of its top priorities.

Pengawasan Dewan Pengawas Terhadap Strategis Perusahaan

Dewan Pengawas telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan kepada Perusahaan antara lain dengan memberikan nasihat maupun pendapat kepada Direksi dalam menetapkan kebijakan dan dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan selama tahun 2021. Dewan Pengawas juga memfokuskan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Perusahaan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Pengawas selama tahun 2021, yaitu beberapa aspek namun tidak terbatas pada aspek perkreditan, operasional, perkembangan teknologi informasi, tata kelola terintegrasi dan budaya perusahaan.

Oversight of the Company's Strategic Plan by the Supervisory Board

The Supervisory Board has performed its duty as a supervisory function to the Company by, among other things, giving the Board of Directors advice and opinions on how to formulate policies and govern the Company in 2021. The Supervisory Board also focuses on monitoring the Company's strategic policies as they are put into practice, particularly in regards to issues that will be of particular interest to it in 2021, including but not limited to various aspects of credit, operations, information technology development, integrated governance, and corporate culture.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dewan Pengawas menyadari bahwa komitmen internal dalam mewujudkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) harus senantiasa dipelihara untuk mendukung budaya sadar GCG yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas sebagai organ manajemen utama memegang peranan penting dalam mengawasi dan menjamin bahwa setiap aktivitas usaha telah menerapkan prinsip GCG dan kepatuhan sebagai fondasinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tujuan GCG dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta menghindari segala praktik kecurangan (fraud) yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi reputasi Perusahaan.

Dilatarbelakangi kesadaran akan pentingnya GCG dalam mendukung usaha yang berkelanjutan, Dewan Pengawas mendorong optimalisasi penerapan GCG melalui penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG demi menjamin praktik

Putting Good Corporate Governance Into Practice (GCG)

The Supervisory Board is aware that in order to ensure a thorough and long-lasting culture of GCG awareness, internal commitment to realizing the GCG principles and best practices must always be maintained. In this situation, the Supervisory Board, which serves as the primary management body, is crucial in monitoring and guaranteeing that the GCG principles and compliance are the cornerstones of every corporate activity. This is done in an effort to maximize GCG's role and goals in fostering a positive business environment, boosting competition, and avoiding any dishonest behavior that can damage the Company's reputation.

The Supervisory Board encourages the optimization of GCG implementation by strengthening various GCG policies and manuals to ensure best practices, dependable systems and procedures, and are relevant to business developments

terbaik, sistem dan prosedur yang andal, serta relevan dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan. Perum Jasa Tirta II telah memiliki Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai acuan pedoman dasar bagi seluruh insan PJT II dalam mengimplementasikan prinsip-prin Untuk menggenapkan komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap optimalisasi penerapan GCG, Perusahaan telah membentuk road map GCG yang berperan sebagai kerangka acuan arah implementasi dan pengembangan GCG 5 tahun kedepan. Road map GCG Perum Jasa Tirta II merupakan grand strategy dan milestone implementasi GCG berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun sasaran akhir road map GCG adalah terciptanya tata kelola yang berkelanjutan pada seluruh proses bisnis oleh seluruh organ perusahaan.

and Company regulations in light of the knowledge of the significance of GCG in supporting sustainable business. There is currently a Corporate Governance Manual available for Perum Jasa Tirta II employees to use as a baseline manual for putting the concepts into practice. and the growth of GCG during the following five years. The Perum Jasa Tirta II GCG road map integrates elements of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility to provide a comprehensive strategy and milestone for sustainable GCG implementation. The creation of sustainable governance in all business processes by all corporate organs is the eventual goal of the GCG road map.

Strategi Anti Fraud

Menindaklanjuti surat sekretaris kementerian BUMN Nomor : S-17S. MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal setifikasi ISO 37001:2016. Sistem manajemen anti penyuapan, perusahaan telah diaudit oleh pihak eksternal dan pada tanggal 28 Desember 2020. Serta hasilnya PJT II Telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016.
Dewan Pengawas sangat mendukung upaya yang dilakukan Perusahaan dalam pemberantasan KKN Khususnya terkait strategi dan manajemen anti penyuapan.

Fraud Prevention Plan

In response to the letter dated February 17, 2020, with letter number S-17S. MBU/02/2020, from the secretary of the Ministry of SOEs about certification to ISO 37001:2016. On December 28, 2020, the company's anti-bribery management system will be audited by an outside party. PJT II has now been awarded the ISO 37001:2016 accreditation as a result. The Supervisory Board wholeheartedly endorses the Company's efforts to eradicate KKN, particularly with regard to anti-bribery management and initiatives.

Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perusahaan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan

Gratification Management

The company prohibits giving and receiving gratuities in any form and with anyone in accordance with applicable laws. The Company's commitment to the prohibition of gratifications continues to be echoed, among others by issuing policies regarding Anti-Bribery Provisions and Gratification Control which are used as guidelines for all PJT II personnel in preventing gratification

pedoman seluruh insan PJT II dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan PJT II dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai dengan Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomer: KBS-01/DIR/06/2021 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Lampiran VII): Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

and bribery practices that can harm PJT II's interests and conflict with GCG principles so as to create a control environment that is conducive to gratification. conducive environment in accordance with the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company Number: KBS-01/DIR/06/2021 concerning Guidelines for Good Corporate Governance (Appendix VII): Regarding Guidelines for Gratification Control.

Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

Dewan Pengawas memandang WBS memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pelaporan pelanggaran WBS merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perusahaan yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan yang sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi Anti Fraud yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan telah memiliki sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independent dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

Administration of the Whistleblower System (WBS)

The Supervisory Board believes that WBS plays a significant role in promoting the adoption of sound corporate governance. The adoption of WBS violation reporting is in keeping with one of the pillars of the Anti Fraud Strategy, namely the detection pillar as required by the regulator, and is part of the effort to prevent violations and damaging publications about the Company that impact the Company's reputation. The Company has a whistleblower protection structure in place and an impartial, confidential method for reporting infractions.

Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

Dewan Pengawas berpendapat bahwa secara umum penerapan WBS di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Dewan Pengawas menyarankan agar sosialisasi dan penerapan WBS dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.
Rencana Kerja 2022 .

Violation complaints (Whistle Blowing System)

The Supervisory Board believes that the Company's WBS implementation has been going well overall. To foster an environment of cleanliness, professionalism, and integrity at work, the Supervisory Board advises that WBS be socialized and implemented continuously. Work Plan for 2022.

Dewan Pengawas telah memberikan tanggapan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022

The Board of Directors' 2022 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), which addresses financial performance,

yang telah disusun oleh Direksi terkait Kinerja keuangan, Kinerja Operasional, Rencana Investasi, Manajemen Resiko dan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Untuk peningkatan efektivitas anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen serta sebagai media akuntabilitas, Dewan Pengawas menyampaikan beberapa catatan

operational performance, investment plans, risk management, and other pressing issues, has received feedback from the Supervisory Board. The Supervisory Board submitted many notes to improve the budget's efficacy as a management planning and control tool and a vehicle for accountability.

Komposisi Dewan Pengawas

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK-092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK-392/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, maka susunan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

1. Kelik Wirawan Wahyu Widodo- Ketua Dewan Pengawas
2. Nuning Sri Rejeki Wulandari - Anggota Dewan Pengawas
3. Romy Marcandi - Anggota Dewan Pengawas
4. Muhamad Sofwan - Anggota Dewan Pengawas Independen

The Supervisory Board's Composition

The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II is composed as follows in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Capital Owner of Perum Jasa Tirta II Number: SK-4/MBU01/2020, SK-092/MBU/03/2020, SK-340/MBU/10/2020, and SK-392/MBU/12/2020 regarding the dismissal and appointment of members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II:

1. Kelik Wirawan, Chairman of the Supervisory Board
2. Nuning Sri Rejeki Wulandari, a supervisory board member
3. Romy Marcandi, a supervisory board member
4. Muhamad Sofwan, Member Independent Supervisory Committee

Organ Dewan Pengawas

- Komite Audit
  Untuk membantu kelancaran tugas-tugas pengawasan secara teknis, khususnya dalam hal pengendalian internal, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP- 84/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP- 02/DEWAS/II/2021 tanggal Februari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta

Board of the Supervisory Board Organs

- Accounting Committee
  The Supervisory Board is helped by the Committee audits in order to facilitate the technical supervision activities, particularly in terms of internal control. The Audit Committee is made up of the following individuals in accordance with the Decrees of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-02/DEWAS/II/2021 dated February 2021 regarding the

II, maka susunan Komite Audit sebagai berikut:
Ketua: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota: Wawan Saeful Anwar
Anggota : Agus Waluyo

- Komite Pemantau Manajemen Risiko
  Komite Pemantau Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam pengawasan dan penerapan manajemen risiko serta dalam rangka mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai berikut:
  Ketua : Romy Marcandi
  Anggota : Kandianawati

- Komite Nominasi dan Remunerasi
  Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas di bidang nominasi dan remunerasi, dibentuklah Komite Nominasi dan Remunerasi. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP- 04/DEWAS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Nomor: KEP-86/DEWAS/XI/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan sebagai berikut:
  Ketua: Kelik Wirawan
  Anggota: Wahyu Widodo, Mohamad Sofwan dan Nuning Sri Rejeki Wulandari

Appointment of Members of the Audit
The Chairman: Nuning Sri Rejeki Wulandari
Participant: Wawan Saeful Anwar
Participant: Agus Waluyo

- Committee for Monitoring Risk Management
  The Supervisory Board constituted the Risk Management Monitoring Committee to support it in overseeing and putting risk management in place as well as in creating an effective and independent supervisory structure and implementation based on good corporate governance principles. The composition of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company (Perum) Jasa Tirta II is set forth in the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of the Chairperson of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020
  The Chairman : Romy Marcandi .
  Individual: Kandianawati

- Committee for Nomination and Remuneration
  To facilitate the effective discharge of the Supervisory Board's obligations in A Nomination and Remuneration Committee was established in the area of nomination and compensation. The membership of the Nomination and Remuneration Committee Public Company (Perum) Jasa Tirta II is as follows, in accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP- 04/DEWAS/II/2021 dated February 25, 2021 concerning Amendment to the Decision Letter (SK) of the Supervisory Board Number: KEP-86/DEWAS/XI/2020 concerning the Establishment of the Nomination and Rem
  The Chairman: Kelik Wirawan,
  The members: Wahyu Widodo, Mohamad Sofwan, and Nuning Sri Rejeki Wulandari

- Sekretariat Dewan Pengawas
  Dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan dan efektifitas tugas dan fungsi Dewan Pengawas, dibentuklah Sekretariat Dewan Pengawas. Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-05/DEWAS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, Nomor: KEP-06/DEWAS/III/2021 dan Nomor: KEP- 07/DEWAS/III/2021 tanggal 05 April 2021 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II serta Nomor: KEP-08/DEWAS/IV/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengalihan Penugasan Staf Komite Audit menjadi Staf Sekretariat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, susunan Sekretaris Dewan Pengawas yakni Yusuf Abdullah Musthofa

- The Supervisory Board Secretariat
  A Secretariat of the Board was established to aid in the implementation of the activities and effectiveness of the Supervisory Board's responsibilities and tasks. In accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-05/DEWAS/III/2021 dated March 30, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, Number: KEP-06/DEWAS/III/2021 and Number: KEP-07/DEWAS/III/2021 dated 05 April 2021 concerning Appointment for Yusuf Abdullah Musthofa as the Supervisory Board's Secretary.

Penutup

Atas nama Dewan Pengawas, kami memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi tantangan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola secara konsisten sehingga Perusahaan masih dapat terus berjalan berkesinambungan dan optima.

Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan baik di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh stakeholder atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perusahaan. Kepada seluruh pekerja PJT II dan Perusahaan Anak kami memberikan penghargaan disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun

Closing

The Supervisory Board would like to thank the Board of Directors for their excellent performance of their duties and ability to meet challenges posed by the Covid-19 pandemic while consistently implementing the governance principles to ensure that the Company can continue to operate continuously and at its best.

The Supervisory Board is extremely grateful to the Board of Directors for their ability to effectively operate the Company despite the COVID-19 pandemic.

We also want to thank everyone who has supported and believed in the company. We like to extend our gratitude and admiration to all PJT II and Subsidiary workers for their commitment and hard work throughout 2021, despite the challenging circumstances. All employees have given their all and become stronger in

2021 walau dalam kondisi yang sulit, seluruh pekerja memberikan seluruh daya upayanya dan menjadi tangguh demi memajukan Perusahaan agar tetap tumbuh.

order to progress the Company and ensure its further growth.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Terima Kasih

Jatiluhur, Juni 2022
Jatiluhur, June, 2022



Atas nama Dewan Pengawas
Supervisory Board


JASATIRTA II
BBWS CITARUM
DY Entec Co.,Ltd
AUTOMATIC TRASH RAKE
SIPHON CIBEET





LAPORAN DIREKSI
Board Of Directors Report



Imam Santoso
Direktur Utama
President Director

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemilik Modal dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kerja keras seluruh jajaran Perusahaan, PJT II kembali mencatat kinerja yang menggembirakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Berkat dukungan dari semua pihak, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengurusan Perusahaan telah berjalan dengan baik selama tahun 2021. Momentum pemulihan ekonomi domestik relatif terjaga dengan baik. Output ekonomi Indonesia terus tumbuh positif pada triwulan III tahun 2021 di tengah eskalasi Covid-19 oleh Variant Delta. Akibat penerapan PPKM yang ketat, konsumsi rumah tangga hanya meningkat 1,0% (year-on-year) dan investasi meningkat 3,74% (year-on-year), sehingga menahan permintaan domestik. Kinerja ekonomi terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor yang kuat sebesar 29,16%, diikuti oleh kinerja impor sebesar 30,11% (year-on-year).

Pencapaian kinerja Perusahaan Tahun 2021 PJT II telah memiliki prioritas kerja jangka pendek serta program kerja yang dilaksanakan sepanjang 2021 Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2021, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1.689.754 juta, meningkat Rp150.019 juta atau 9,74% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1.539.735 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp408.547 juta, meningkat Rp85.747 juta atau 26,56% dari sebelumnya sebesar Rp322.800 juta pada tahun 2020. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.281.207 juta, meningkat Rp64.272 juta atau 5.28% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1.216.935 juta.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dear Investors and Capital Owners,

Praise be to God Almighty, PJT II once again turned in an optimistic performance for the fiscal year ended December 31, 2021, thanks to the dedication of all levels of the Company.

With the help of all stakeholders, we were able to communicate that the Company's management and management implementation has been going smoothly throughout 2021. The recovery of the domestic economy is currently moving along fairly successfully. Despite the Covid-19 rise by Variant Delta in the third quarter of 2021, Indonesia's economic production remained favorable. The tight application of PPKM resulted in household spending growing by only 1.0 percent (year over year) and investment growing by 3.74 percent (year over year), which restrained domestic demand. Strong export growth of 29.16 percent and import performance of 30.11 percent were the key drivers of economic performance (year-on-year).

Achievement of company performance in 2021 Short-term work priorities and work programs for PJT II have been carried out throughout 2021. In accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries' consolidated financial statements as of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year just ended, are presented in the company's consolidated financial statements, which have been audited by public accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & colleagues.

In 2021, the Company's assets were recorded at Rp1,689,754 million, an increase of Rp. 150,019 million or 9.74% when compared to 2020 of Rp1,539,735 million. The Company's liabilities were recorded at Rp408,547 million, an increase of Rp.85,747 million or 26.56% from the previous Rp322,800 million in 2020. The Company's equity was recorded at Rp1,281,207 million, an increase of Rp.64,272 million or 5.28% compared to the realization in 2020 amounting to Rp1,216,935 million.

Pada tahun 2021, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp408,547 juta yang terdiri dari 41,13% Liabilitas Jangka Pendek dan 58,87% Liabilitas Jangka Panjang.

Pada tahun 2021, Pendapatan Usaha sebesar Rp856.518 juta, meningkat Rp17.131 juta atau 2,04% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp839.387 juta. Beban Pokok di tahun 2021 meningkat Rp26.064 juta atau 5,03% dari sebelumnya Rp516.225 juta pada tahun 2020 menjadi Rp544.687 juta pada tahun 2021.

Sementara itu, Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2021 sebesar Rp107.446 juta, menurun Rp5.789 juta atau 5,11% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp113.235 juta. Laba Komprehensif Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp64.272 juta, meningkat 25,58% atau setara dengan Rp13.092 juta bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp51.180 juta.

Prospek Usaha

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha industri listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun- tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kenaikan persentase pertumbuhan penduduk daerah perkotaan turut mendukung kenaikan permintaan air bersih dan air minum. Selain didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar, dan gaya hidup yang mengutamakan kepraktisan mendukung permintaan air minum dari perusahaan air minum (PAM) maupun permintaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) karena alasan kebersihan. Faktor pendukung lainnya seperti momen Ramadhan, Natal, dan Tahun Baru diprediksi menjadi momen andalan untuk menggenjot penjualan AMDK di setiap tahunnya. Meninjau faktor-faktor tersebut, Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang masih terjaga dengan baik.

Pengembangan Organisasi

Penyesuaian dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan untuk mengefektifkan proses bisnis dan meningkatkan sistem pengendalian internal.

The Company's total liabilities were Rp408,547 million in 2021, made up of 58.87 percent of Long-Term Liabilities and 41.13 percent of Current Liabilities.

Operating Revenues in 2021 totaled Rp856,518 million, up Rp17,131 million or 2.04 percent from Rp839,387 million in 2020. From Rp516,225 million in 2020 to Rp544,687 million in 2021, the cost of products increased by Rp26,064 million, or 5.03 percent.

In contrast, the Net Profit for the Year in 2021 was Rp107,446 million, down IDR 5,789 million or 5.11 percent from IDR 113,235 million in 2020. The total profit for the year was Rp64,272 million, up 25.58 percent or Rp13,092 million from the total profit for 2020, which was Rp51,180 million.

The Business Prospect

The company is certain that the commercial outlook for the water and electricity sectors will remain favorable in the upcoming years. Projections of regional, national, and industrial economic development that are consistent with population expansion lend credence to this confidence.

The rise in urban population growth as a proportion also contributes to the rise in demand for clean water and drinking water. In addition to being influenced by population growth, the level of clean water accessibility in the local area and a way of life that places a premium on practicality support the demand for bottled drinking water (AMDK) and for drinking water from drinking water companies (PAM) for reasons of cleanliness. The months of Ramadan, Christmas, and New Year are anticipated to be the primary times to increase bottled water sales each year. After considering these elements, the management believes that the company's business prospects in 2021 and the following years are still favorable.

Organizational Growth

Adjustments and changes to the Company's organizational structure and work procedures to streamline business processes and improve the internal control system.

Dalam rangka Pengembangan Bisnis dan Wilayah Kerja Perusahaan, perusahaan melakukan upaya untuk mempersiapkan SDM untuk Pengembangan Wilayah dan Usaha serta Penguatan.

Unit- unit kerja antara lain :
- Menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensinya.
- Pemenuhan perangkat SDM lainnya (analisa beban kerja, jobdescription, jobqualification, dsb).

Program pengembangan sumber daya manusia berupa sertifikasi dan pelatihan bagi karyawan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Perusahaan.

Dalam rangka mempersiapkan talent – talent internal Perusahaan serta talent-talent BUMN, telah dilakukan Fit And Proper Test, sebagai upaya untuk mendapatkan talent-talent yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Negara.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Perum Jasa Tirta II memahami bahwa Good Corporate Governance merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam jangka panjang, penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja atau performance suatu perusahaan karena nilai akhir (ultimate value) penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja (high performance) serta citra perusahaan yang baik *(good corporate image)*.

Aktualisasi GCG di PJT di lakukan secara menyeluruh di tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi perusahaan. Optimalisasi penerapan GCG PJT II terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

In the context of Business Development and Company Work Areas, the company makes efforts to prepare human resources for Regional and Business Development and Strengthening.

The work units include:
- Placing employees according to their competence.
- Fulfillment of other HR tools (workload analysis, job description, job qualification, etc.).

Human resource development program in the form of certification and training for employees needed to meet the demands of the duties and responsibilities assigned by the Company.

In order to prepare the Company's internal talents as well as BUMN talents, a Fit And Proper Test has been carried out, as an effort to obtain professional, integrity, dedicated and competent talents in carrying out the tasks of managing State-Owned Enterprises.

Putting Good Corporate Governance Into Practice

Perum Jasa Tirta II understands that Good Corporate Governance is a standard reference that must be applied by SOEs as the operational basis for the company's business activities as stipulated in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. (GCG) in State-Owned Enterprises (BUMN).

In the long term, the implementation of GCG has relevance to the performance of a company because the ultimate value of implementing GCG is to improve performance (high performance) and a good corporate image.

At PJT, GCG actualization is comprehensively carried out at all organizational levels and levels by making use of the provisions and requirements linked to the company's GCG implementation. By enhancing infrastructure to accomplish best practices and modifying systems and procedures required to support more efficient GCG implementation, the optimization of GCG PJT II implementation continues.

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik terbaik yang menjadi acuan maupun untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) terhadap Pedoman Pelaksanaan GCG, PJT II secara rutin melaksanakan Assessment terhadap penerapan GCG. Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Selain melakukan penilaian GCG berlandaskan kriteria tersebut, Perusahaan juga mempertimbangkan capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Key Performance Indikator (KPI) dalam menilai kualitas dan keberhasilan implementasi selama tahun buku. Adapaun skor penilaian GCG pada tahun 2021 sebesar 83,6013.

PJT II regularly conducts an evaluation of the implementation of GCG in order to obtain an overview of the conditions of GCG implementation against the best practice as a reference and to identify areas of improvement (areas of improvement) on the GCG Implementation Guidelines. Good Corporate Governance at BUMN Company. The Company evaluates the quality and effectiveness of implementation during the financial year in addition to conducting GCG assessments based on these criteria by taking into account the accomplishments of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and Key Performance Indicators (KPI). The 2021 GCG evaluation result is an 83.6013.

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Pengawas dan Direksi (Board Manual). Board Manual berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Pengawas dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Selama tahun 2021 Direksi telah mengadakan rapat, baik Rapat internal Direksi maupun Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi.

The Work Guidelines for the Supervisory Board and the Board of Directors provide direction to the Board of Directors (Board Manual). The Board Manual includes guidelines for the Supervisory Board and Board of Directors' work management and explains the stages of activities in a structured, systematic, simple-to-understand, and consistent manner. It can be used as a guide by the Supervisory Board and Board of Directors as they carry out their respective responsibilities to fulfill the Company's Vision and Mission, with the goal of achieving high work standards in accordance with GMP principles. The Board of Directors has held meetings throughout 2021, including both internal board sessions and joint meetings with the Supervisory Board.

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)
Sejalan dengan visi misinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat sekitar, PJT II terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat, di sekitar wilayah operasi perusahaan melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate social responsibility implementation (CSR) Through the execution of Corporate Social Responsibility (CSR) programs, PJT II continues to be devoted to giving back to the community around the company's operations areas in keeping with its vision and goal to enhance the quality of life and the economy of the surrounding community.

Saat ini berupaya terus untuk membangun sistem keamanan dan menerapkan SMK3 untuk mencapai zero accident serta berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PJT II telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran terhadap lingkungan, dan upaya ini dilakukan pada semua kegiatan usaha baik di pelabuhan, kapal, maupun kantor.

In order to achieve zero accidents, it is now working to adopt SMK3 and continue building a security system. It also aims to take environmental considerations into account when performing each of its actions. In order to lessen environmental pollution, PJT II has made and will continue to make efforts in all company operations at ports, ships, and offices.

Perubahan Komposisi Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-420/MBU/12/2021tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum II Tahun 2021 pemilik modal memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Haris Zulkarnain sebagai Direktur Keuangan & SDM dan mengangkat Ibu Indrani Widiastuti sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dan Bapak Dikdik Permadi Yoffana sebagai Direktur Pengembangan Usaha.

Changes in the Constituents

Based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-420/MBU/12/2021 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies II in 2021, the owners of capital have decided to honorably dismiss Mr. Haris Zulkarnain as Director of Finance & HR and appoint Mrs. Indrani Widiastuti as Director of Finance, HR and Risk Management and Mr. Dikdik Permadi Yoffana as Director of Business Development.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Pada kesempatan yang baik ini, mewakili Direksi, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemilik Modal, Dewan Pengawas pemangku kepentingan dan seluruh pegawai yang telah berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Kami juga berterima kasih kepada mitra usaha, pelanggan, serta para pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan yang telah diberikanselama ini. Dukungan Anda semua sangat besarartinya bagi keberhasilan PJT II dalam melanjutkan pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang berkesinambungan di masa depan.

Gratitude for Stakeholders

On this auspicious occasion, on behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude for the support and trust given by the Capital Owners, the Stakeholder Supervisory Board and all employees who have contributed to this achievement.

We also thank our business partners, customers, and other stakeholders for the trust that has been given so far. Your support is very meaningful for PJT II's success in continuing sustainable business growth and expansion in the future.

Jatiluhur 22 Juni 2022 / Jatiluhur 22 June 2022
Atas Nama Direksi / For the benefit of the Board of Directors



Imam Santoso

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PERUM JASA TIRTA II

Responsibility Statement Of Supervisory Board And Board of Directors For 2021 Annual Report Of Perum Jasa Tirta II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / We, the undersigned, declare that every information contained in Perum Jasa Tirta II Annual Report 2021 has been fully disclosed and take full responsibility for the authenticity of the annual report content. This statement has been made truthfully.

Jatiluhur, 22 Juni 2022 / Jatiluhur, June 22, 2022

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas /
Chairman of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Muhamad Sofwan
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Romy Marcandi
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Direksi /
Board of Directors

Imam Santoso
Direktur Utama /
President Director

Direksi /
Board of Directors

Indriani Widiastuti
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko / Director of Business Development of Supervisory Board

Direksi /
Board of Directors

Anton Mardiyono
Direktur Operasi dan Pemeliharaan /
Operation and Maintenance Director of Supervisory Board

Direksi /
Board of Directors

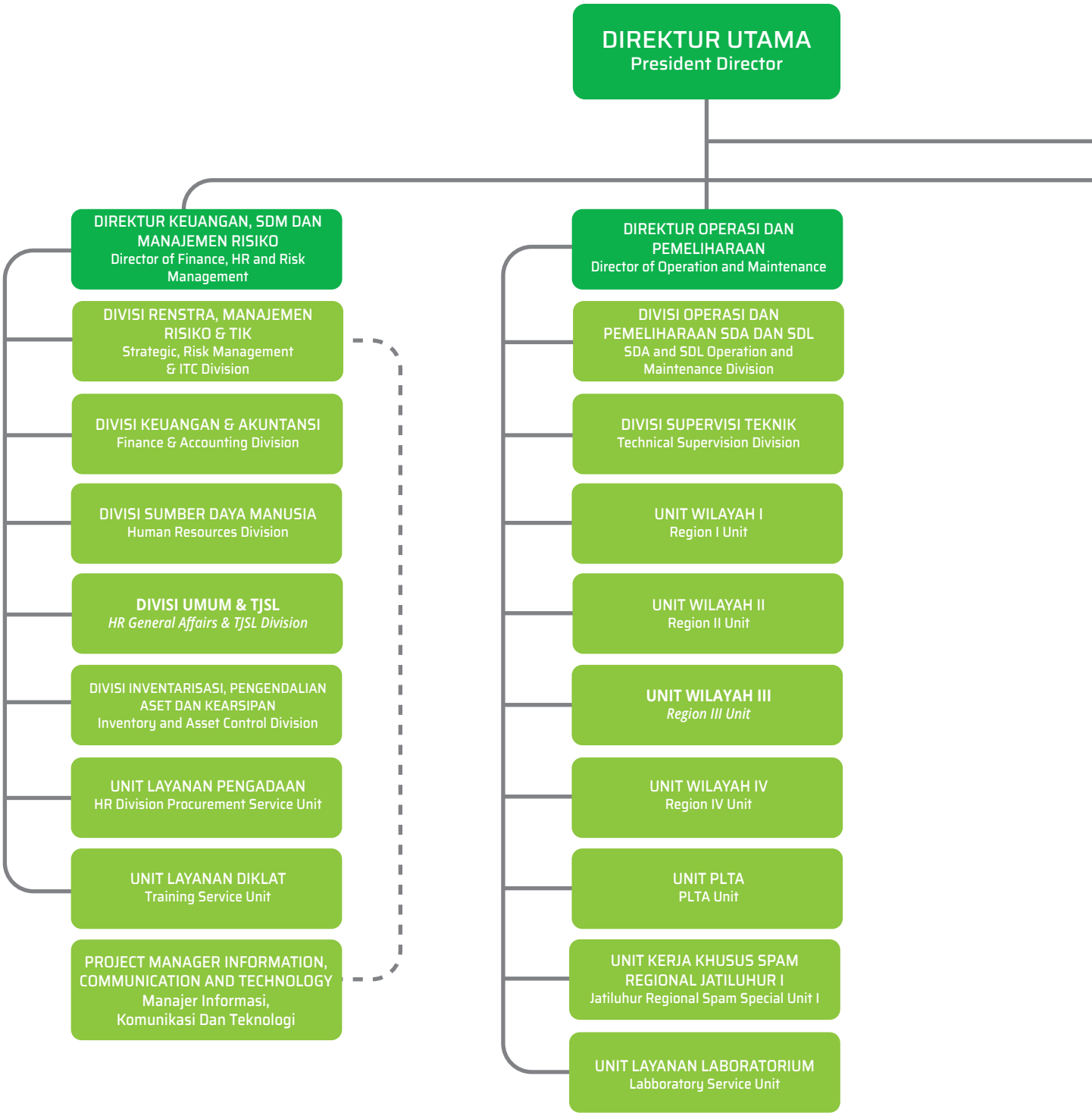
Dikdik Permadi Yoffana
Direktur Pengembangan Uasha /
Director of Business Development

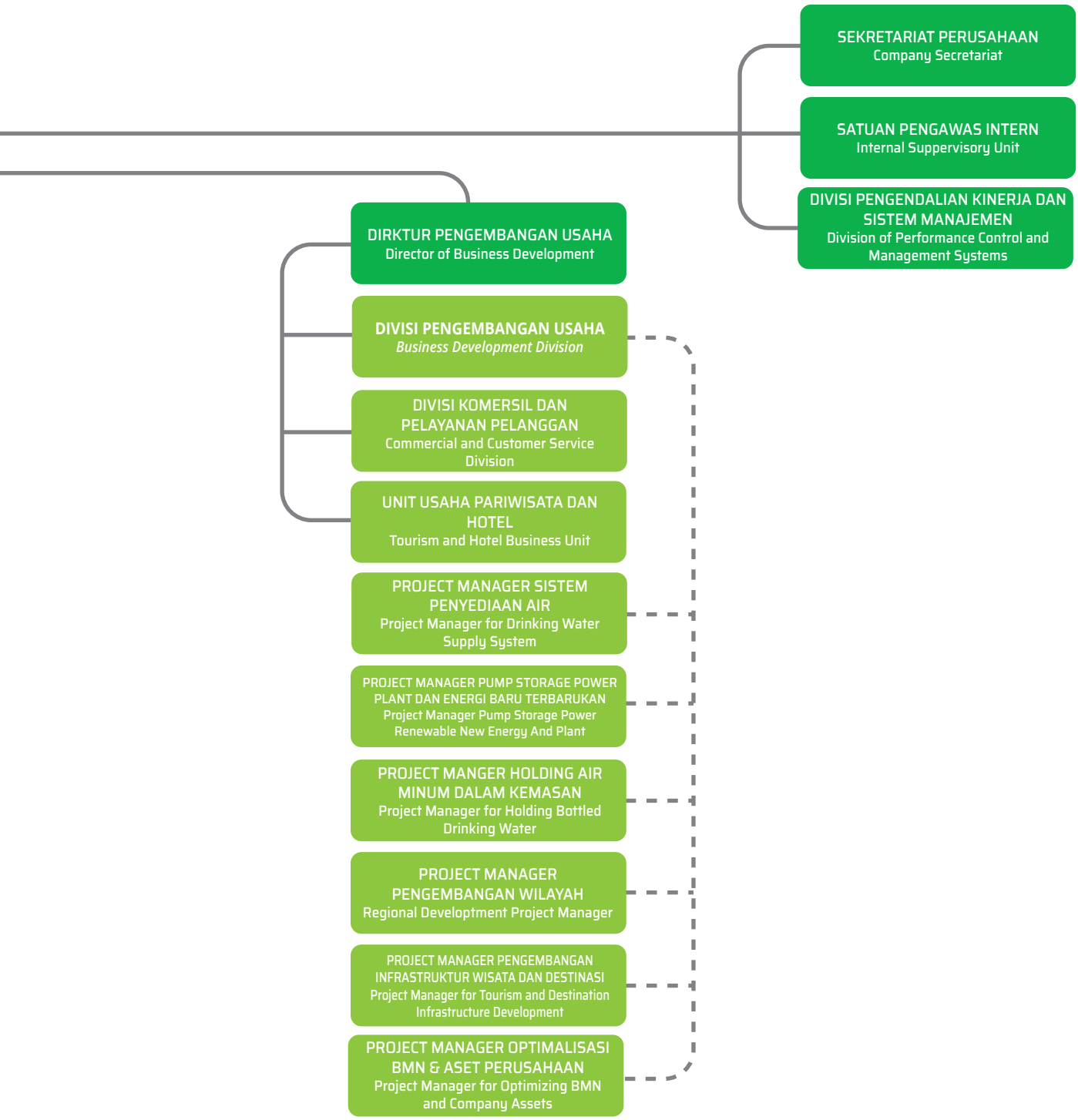


Struktur Organisasi
Organisation Structure

Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PRD-16/DIR/12/2021 adalah sebagai berikut:

The organizational structure of Perum Jasa Tirta II based on the Decree of the Board of Directors number PRD-16/DIR/12/2021 is as follows:




SEKRETARIAT PERUSAHAAN
Company Secretariat
SATUAN PENGAWAS INTERN
Internal Suppervisory Unit
DIVISI PENGENDALIAN KINERJA DAN SISTEM MANAJEMEN
Division of Performance Control and Management Systems
DIRKTUR PENGEMBANGAN USAHA
Director of Business Development
DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
Business Development Division
DIVISI KOMERSIL DAN PELAYANAN PELANGGAN
Commercial and Customer Service Division
UNIT USAHA PARIWISATA DAN HOTEL
Tourism and Hotel Business Unit
PROJECT MANAGER SISTEM PENYEDIAAN AIR
Project Manager for Drinking Water Supply System
PROJECT MANAGER PUMP STORAGE POWER PLANT DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
Project Manager Pump Storage Power Renewable New Energy And Plant
PROJECT MANGER HOLDING AIR MINUM DALAM KEMASAN
Project Manager for Holding Bottled Drinking Water
PROJECT MANAGER PENGEMBANGAN WILAYAH
Regional Developtment Project Manager
PROJECT MANAGER PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WISATA DAN DESTINASI
Project Manager for Tourism and Destination Infrastructure Development
PROJECT MANAGER OPTIMALISASI BMN & ASET PERUSAHAAN
Project Manager for Optimizing BMN and Company Assets

DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board



Mohamad Sofwan

Kelik Wirawan Wahyu Widodo



Nuning Sri Rejeki W

Romy Marcandi

PROFIL DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board Profile



KELIK WIRAWAN WAHYU WIDODO

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Solo, 5 Desember 1969 Solo, December 5, 1969
Usia / Age	:	52 tahun per 31 Desember 2021 / 52 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Depok, Jawa Barat / Depok, West Java

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-340/MBU/10/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tanggal 21 Oktober 2020. / He has served as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-340 / MBU / 10/2020 Regarding Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II on 21 October 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik (Jurusan Administrasi Negara) pada tahun 1994. / He obtained a Bachelor's degree from the Faculty of Social and Political Sciences (Department of State Administration) in 1994.

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya, beliau Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2019-Sekarang). / In his career, he is Special Staff to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (2019-Present).

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau menjabat Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. / In addition to serving as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he also serves as Special Staff to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated
Workshop Komisaris Profesional, Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility (CSR) Workshop. / Workshop Commissioner has attended Professional, Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility (CSR) Workshop.



NUNING SRI REJEKI W

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Bogor, 6 Juli 1963 Bogor, July 6, 1963
Usia / Age	:	58 tahun per 31 Desember 2021 / 58 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Depok, Jawa Barat / Depok, West Java

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK-4/ MBU/01/2020 3 Januari 2020. / She served as Member of the Supervisory Board based on SK-4 / MBU / 01/2020 January 3, 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar sarjana dari IPB pada tahun 1987, Master dari Universitas Detroit Mercy Tahun 1994. / She obtained a bachelor's degree from IPB in 1987, a Master from Detroit Mercy University in 1994.

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Tenaga Pengkaji Harmonisasi, Strukturiasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara pada Direktorat Jendral Kekayaan Negara. / In the course of his career, Head of the Regional Office of the Directorate General of State Assets, Reviewers of the Harmonization, Structure, Privatization and Effectiveness of State Assets at the Directorate General of State Assets.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten. / The Head of the Banten DJKN Regional Office as well as the Head of the Banten Province Ministry of Finance Representative.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated
Diklat Perencanaan Anggaran Bagi Pejabat Eslon 2 Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Diklat Kepemimpinan Tk. II angkatan XL Kelas A. / Budget Planning Training for Eslon 2 Officials of the Directorate General of State Assets, Tk Leadership Training. II class XL class A.

PROFIL DEWAN PENGAWAS
Supervisory Board Profile



ROMY MARCANDI

Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Malang, 17 Januari 1976 Malang, January 17, 1976
Usia / Age	:	45 tahun per 31 Desember 2021 / 45 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Tangerang Selatan / South Tangerang

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-92/MBU/03/2020 23 Maret 2020. / He has served as Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-92 / MBU / 03/2020 March 23, 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar Magister dari Universitas Pembangunan Nasional dan S1 Manajemen Universitas Mahasaraswati Tahun 2000. / He obtained a Master's degree from the National Development University and a Bachelor of Management from Mahasaraswati University 2000.

Riwayat Karier / Employment History
Sekretaris Dewan Komisaris PT Djakarta Lyoyd (Persero) (2015-2017), Komisaris PT PANN (Persero (2017-2020), Kepala Bidang PMN, PSO dan Penerus Pinjaman Kementerian BUMN./ Secretary to the Board of Commissioners of PT Djakarta Lyoyd (Persero) (2015-2017), Commissioner of PT PANN (Persero (2017-2020), Head of PMN, PSO and Loan Successor Ministry of SOEs.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to the position as Member of the Supervisory Board at Perum Jasa Tirta II, he does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated
- Pemeriksa Piutang Negara (Diklat Polri-Tahun 2001) / State Receivables Checker (Diklat Polri - Year 2001)
- Restrukturisasi Piutang Negara (UGM-Tahun 2002) / State Receivables Restructuring (UGM-Year 2002)
- Asset Apprasial for Financial Restructuring&Regional Autonomy (Queensland University of Technology -Tahun 2007) / Asset Apprasial for Financial Restructuring & Regional Autonomy (Queensland University of Technology-2007)
- Stengthening Private Sector Involvement in Public Asset Creation&Management (Queensland University of Technology-Tahun 2015) / Strengthening Private Sector Involvement in Public Asset Creation & Management (Queensland University of Technology-2015).



MOHAMAD SOFWAN

Anggota Dewan Pengawas Independen
Member Independent Supervisiory Board

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Pati, 17 Februari 1988 Pati, February 17, 1988
Usia / Age	:	33 tahun per 31 Desember 2021 / 33 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Depok, Jawa Barat / Depok, West Java

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-392/MBU/10/2020 15 Desember 2020. / He has served as Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK392 / MBU / 10/2020 December 15, 2020.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2012, Dan Magister dari Universitas Nahdatul Ulama pada tahun 2019. / He obtained a Bachelor of Management from Syarif Hidayatullah University, Jakarta in 2012, and a Masters degree from Nahdatul Ulama University in 2019.

Riwayat Karier / Employment History
Staf Ahli DPR RI, Staf Khusus-Dewan Pengarah BPIP RI. / Expert Staff to DPR RI, Special Staff to the Steering Committee of BPIP RI.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to serving as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.
Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated:
-

DEWAN DIREKSI
Board Of Directors



Dikdik Permadi Yoffana

Indriani Widiastuti



Imam Santoso

Anton Mardiyono

PROFIL DIREKSI
Board Of Directors' Profile



IMAM SANTOSO

Direktur Utama
President Director

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Yogyakarta 8 Maret 1958 / Yogyakarta March 8, 1958
Usia / Age	:	63 tahun per 31 Desember 2021 / 63 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Jakarta Selatan / South Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. / He served as President Director based on SK-350/MBU/10/2020 dated 27 October 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the President Director of Jasa Tirta II Public Company (Perum).

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil UGM pada tahun 1982, Master Sains dari Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University pada tahun 1990, dan Doktor dari Universitas Diponegoro pada tahun 2018. / He earned a Bachelor's degree in Civil Engineering from UGM in 1982, Master of Science from the Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University in 1990, and a Doctorate from Diponegoro University in 2018.

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero), dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. / In the course of his career, he has served as President Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero), and Director General of Water Resources, Ministry of PUPR.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain / In addition to serving as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi lainnya dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with members of the Supervisory Board, other Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated
Workshop Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) secara Blended Learning, Peningkatan Kompetensi Teknis Pengajar Bidang SDA, Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator Pelatihan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK). / Workshop on Leadership Leadership Training (PKA) with Blended Learning, Technical Competence Improvement for Water Resources Teachers, Facilitator Capacity Development Training and Training of Workforce Competency Assessors (AKTK).



INDRIANI WIDIASTUTI

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HR and Risk Management

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Klaten, 13 Desember 1968 Klaten, December 13, 1968
Usia / Age	:	53 tahun per 31 Desember 2021 / 53 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko berdasarkan SK 420/<BU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan. / He serves as Director of Finance, HR and Risk Management based on SK 420/<BU/12/2021 dated December 29, 2021 regarding Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Company's Board of Directors.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar Sarjana Sains dari UGM tahun 1993, Master Teknologi Informasi dari UI tahun 2007, dan MBA dari UGM tahun 2019./ He obtained his Bachelor of Science degree from UGM in 1993, Master of Information Technology from UI in 2007, and MBA from UGM in 2019.

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat Dewan Pengawas Perum Perhutani sampai dengan September 2019-Juni 2020, Asdep Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, Komisaris PT Asuransi Jiwasraya. / In the course of his career, he served on the Supervisory Board of Perum Perhutani until September 2019-June 2020, Deputy Assistant for Transportation Facilities and Infrastructure Construction II Ministry of SOEs, Commissioner of PT Asuransi Jiwasraya.

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. / In addition to, She does not hold concurrent positions in any company.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi lainnya dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with members of the Supervisory Board, other Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated
Pelatihan yang pernah diikuti, Business Model Canvas, PPM Manajemen. Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA Universitas Indonesia. / The training that has been followed, Business Model Canvas, PPM Management. Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA University of Indonesia.

PROFIL DIREKSI
Board Of Directors' Profile



ANTON MARDIYONO

Direktur Operasi
dan Pemeliharaan
Operation and
Maintenance Director

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Semarang, 02 Maret 1975 Semarang, March 02, 1975
Usia / Age	:	46 tahun per 31 Desember 2021 / 46 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Cimahi

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II sejak 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK - 196/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since June 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998) dan Magister WRDM di IIT Roorkee New Delhi, India (2006). / He obtained a Bachelor of Civil Engineering degree from Diponegoro University (1998) and a Masters in WRDM at IIT Roorkee New Delhi, India (2006).

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian dan Pengelolaan Data & Alokasi Air (2014), Kepala Divisi Pengelolaan Air II (2015), Kepala Divisi Rencana Strategis & Litbang (2016), General Manajer Wilayah III (2017), General Manajer Unit Usaha Wilayah I (2018), Kepala Divisi Pengembangan Usaha (2019), dan Komisaris PT Jasa Tirta Luhur (2020 sd sekarang). / In his career at Perum Jasa Tirta II, he served as Head of Data & Water Allocation of Controlling and Management Bureau, 2014; Head of Water Manajement Division II, 2015; Head of Planning and Research & Development Bureau, 2016; General Manager of Wilayah III, 2017; General Manager of Wilayah I, 2018, Head of Business Development, 2019 and Commisioner of PT Jasa Tirta Luhur (since 2020 until now).

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Selain menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, beliau merangkap jabatan sebagai komisaris di Entitas Anak, PT Jasa Tirta Luhur. / In addition to serving as Director of Operations and Maintenance of Perum Jasa Tirta II, he also serves as a Commisioner in a Subsidiary, PT Jasa Tirta Luhur.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi lainnya dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with members of the Supervisory Board, other Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated
Peserta Twinning Program on Integrated Water Resources Management (Beasiswa NARBO-2007), Peserta Dam Operation and Maintenance Expert Training (Beasiswa JICA-2010), Pembicara di Hydro International Conference and Exhibition , Italy (2014), dan Peserta Webinar KNIBB tentang waduk dan PLTA dan Pembangunan Bendungan (2020). / Participants of the Twinning Program on Integrated Water Resources Management (NARBO-2007 Scholarship), Participants of Dam Operation and Maintenance Expert Training (JICA-2010 Scholarships), Speakers at the Hydro International Conference and Exhibition, Italy (2014), and Participants of the KNIBB Webinar on reservoirs and hydropower and Dam Construction (2020).



DIKDIK PERMADI YOFFANA

Direktur
Pengembangan Uasha
Director of Business Development

Tempat dan Tanggal lahir / Place and date of birth	:	Bandung, 18 Juni 1972 Bandung, June 18, 1972
Usia / Age	:	49 tahun per 31 Desember 2021 / 49 years as of December 31, 2021
Kewarganegaraan / Citizenship	:	Indonesia
Domisili / Domicile	:	Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II sejak 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-420/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II. / He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since 29 December, 2021 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau Memperoleh gelar Master Degree, MBA, Universitas Gadjah Mada, graduated with honored cum laude (2015), Undergradute, S1, Universitas Padjadjaran, Economic Faculty, Majoring in Financial Management, Bandung, West Java, graduated with honored cum laude 1995.

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat Sebagai Direktur Business Advisory & Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset Persero (2020). Komisaris Utama PT PPA Finance (2020). Direktur Utama PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PERSERO).

Rangkap Jabatan / Concurrent Position
Selain menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, beliau merangkap jabatan sebagai komisaris di Entitas Anak, PT Jasa Tirta Luhur. / In addition to serving as Director of Operations and Maintenance of Perum Jasa Tirta II, he also serves as a Commisioner in a Subsidiary, PT Jasa Tirta Luhur.

Hubungan Afiliasi / Affiliation
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas, Direksi lainnya dan Pemilik Modal. / He has no affiliation with members of the Supervisory Board, other Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / Trainings Participated:
-



HARIS ZULKARNAIN

Direktur Keuangan dan SDM (Telah Berakhir Masa Jabatannya). / Director of Finance and HR (His term of office has ended).

Usia / Age : 54 tahun / 54 years old
Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Domisili / Domicile : Bekasi

Riwayat Pendidikan / Educational Background
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 1992, Master Teknik Elektro dari Indian Institute Technology, India pada tahun 2001. / He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Tridinanti University, Palembang in 1992, Master of Electrical Engineering from Indian Institute Technology, India in 2001.

Riwayat Karier / Employment History
Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat sebagai Tenaga Profesional Tingkat III Bidang Teknik, Divisi Satuan Pengawas Internal (2005), Kepala Sub Divisi Pemeliharaan Jaringan Listrik, Divisi PLTA (2005), Kepala Bagian Teknik, Divisi PLTA (2007), Kepala Unit Layanan Pengadaan, Divisi Unit Layanan Pengadaan (2011), Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Divisi PLTA (2012), Kepala Biro Perencanaan dan Penelitian & Pengembangan, Divisi Renlitbang (2013), Kepala Divisi Pengelolaan Air II, Divisi DPA II (2015), dan Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II (2015). / In his career at Perum Jasa Tirta II, he served as a Professional Staff in Lvl III Engineering, Internal Control Unit Division, 2005; Head of Sub. Electricity Maintenance Division, Hydroelectric Division, 2005; Head of Engineering Division, Hydroelectric Division, 2007; Head of Procurement Services Unit, Procurement Unit Division, 2011; Head of Bureau of Planning and Head of PLTA Division, 2012; Head of Planning and Research & Development Bureau, Renlitbang Division, 2013; Head of Water Management Division II, Division of DPA II, 2015; Corporate Secretary at Perum Jasa Tirta II since 2015 to date.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-420/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum II Tahun 2021, sejak tanggal 29 Desember 2021, beliau tidak lagi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PJT II.
Based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-420/MBU/12/2021 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies II in 2021, since December 29, 2021, he no longer serves as Director of Finance and Human Resources of PJT II.

Daftar Nama Pengurus dan Organ Dewan Pengawas

List of Names of Management and Organs of the Supervisory Board

No.	NAMA Name	JABATAN Position	KEP. MENTERI TENTANG PENGANGKATAN Kep. Menteri Tentang Pengangkatan	KETERANGAN Description
1.	**Kelik Wirawan Wahyu Widodo**	Ketua Dewan Pengawas Ketua Dewan Pengawas	SK - 340/MBU10/2020 21 Oktober 2020 / October 21, 2020	Sejak 21 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / Since 21 October 2020 until now
2.	**Muhamad Sofwan**	Anggota Dewan Pengawas Independen Anggota Dewan Pengawas Independen	SK-392/MBU/10/2020 15Desember2020 / December15,2020	Sejak 15 Desember 2020 sampai dengan sekarang / Since December 15, 2020 until now
3.	**Nuning Sri Rejeki Wulandari**	Anggota Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas	SK - 4/MBU/01/2020 3 Januari 2020 / January 3, 2020	Sejak 3 Januari 2020 sampai dengan sekarang / Since January 3, 2020 until now
4.	**Romy Marcandi**	Anggota Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas	SK - 92/MBU/03/2020 23 Maret 2020 / March 23, 2020	Sejak 23 Maret 2020 sampai dengan sekarang / Since March 23, 2020 until now
5.	**Imam Santoso**	Direktur Utama President Director	SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 / October 27, 2020	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang Sincr October 27, 2020 until now
6.	**Anton Mardiono**	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Direktur Operasi dan Pemeliharaan	SK-196/MBU/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 / June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang Since June 11, 2020 until now
7.	**Indriani Widiastuti**	Direktur Pengembangan Usaha Direktur Pengembangan Usaha	SK-196/MBU/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 / Juni 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan 29 Desember 2021 Sice June 11, 2020 until December 29, 2021
8.	**Indriani Widiastuti**	Direktur Keuangan ,Sumber Daya Manusia & MANRISK Direktur Keuangan ,Sumber Daya Manusia & MANRISK	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan / December 29, 2021 Regarding Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Company's Board of Directors	Sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d Sekarang Since December 29, 2021 until now
9.	**Dikdik Permadi Yoffana**	Direktur Pengembangan Usaha Direktur Pengembangan Usaha	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II / December 29, 2021 Regarding the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)	Sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d Sekarang Since January 29, 2021 until now
10.	**Haris Zulkarnain**	Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia	SK- 222/MBU/08/2018 1 Agustus 2018 / Agustus 1, 2018	Sejak 1 Agustus 2018 sampai dengan 29 Desember 2021 Since Agustus 1, 2018 until December 29, 2021

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

Profile of Officials One Level Below the Board of Directors



NANDANG MUNANDAR, SE, M. AKT

Sekretaris Perusahaan/
Corporate Secretary.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 12 Februari 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP dan Magister Akuntansi dari Universitas Budi Luhur Jakarta (2010). / Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 12, 1972. He obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP and Master's Degree in Accounting from Budi Luhur University, Jakarta (2010).



HERI HERMAWAN, SE

Kepala Satuan Pengawasan Intern /
Head of Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).



ANDRIYANTO, SE., M.M

Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen / Head of the Division of Performance Control, Risk and Management Systems.

Warga Negara Indonesia, lahir di Subang, 15 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Pasundan, Bandung (1994) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Widyatama, Bandung (2017). / Indonesian citizen, born in Subang, on February 15, 1971. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from Pasundan University, Bandung in 1994 and a Master Management degree from Widyatama University, Bandung (2017).



UDIEN YULIANTO, ST., M.TECH

Kepala Divisi Renstra, Manajemen Risiko dan TIK /
Head of Strategic Planning and ICT Division

Warga Negara Indonesia Lahir di Sidoarjo 10 Juli 1970. Memperoleh gelar sarjana pengairan dari Iniversitas Brawijaya, Master Teknik Pengairan dari University Of Roorkee India. / Indonesian citizen Born in Sidoarjo July 10, 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorkee India.



HERRISON TOGATOROP, SE., AK

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi /
Head of Finance and Accounting Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 2 Juni 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (1999). / Indonesian citizen, born in Medan on June 2, 1972. He earned a Bachelor of Economics degree at the University of North Sumatra (1999).



EUIS RINA RISMAYANTI, SE., MM

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia /
Head of Human Resources Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Unisba dan Master Manajemen dari Universitas Tama Jagakarsa. / Indonesian citizen, born in Bandung, November 19, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Unisba and Masret Management from Tama Jagakarsa University.



DERI DAMANHURI, SE., MM

Kepala Divisi Umum dan TJSL /
Head of General Division and TJSL.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 23 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari UNPAS. Gelar Magister Management dari Universitas Widyatama. / Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 23, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from UNPAS. Master's Degree in Management from Widyatama University.



I.S BUDI SATRIJO, SH., MH

Kepala Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan / Head of the Inventory, Asset and Records Control Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 27 April 1968. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1983) dan gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran. / Indonesian citizen, born in Bandung on April 27, 1968. He obtained Bachelor of Laws degree from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1983, and Business Law Masters Degree from Padjajaran University.

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

Profile of Officials One Level Below the Board of Directors



HERRY RACHMADYANTO, ST., MM., MSC

Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan SDA dan SDL / Head of Operation and Maintenance Division of SDA and SDL.

Warga Negara Indonesia, Lahir di Langsa pada 12 Juni 1977. Memperoleh gelar sarjana teknik dari ITB tahun 2000, Master Manajemen dari UGM, dan Master Teknik Pengairan dari Institute For Water Education, Netherlands. / Indonesian citizen, born in Langsa on June 12, 1977. Obtained a bachelor's degree in engineering from ITB in 2000, Master of Management from UGM, and Master of Water Engineering from Institute For Water Education, Netherlands.



BUDIYO, ST

Kepala Divisi Supervisi Tehnik / Head of Technical Supervision Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 12 April 1972. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS (1998). / Indonesian citizen, born in Bandung on April 12, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1998).



JOHN RICO, ST., MT

General Manajer Unit Wilayah I / General Manager Unit Region I.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 19 April 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik sipil dari Universitas Andalas (1996), dan Master Teknik Pengairan dari ITB Bandung pada tahun 2003. / Indonesian citizen, born in Jakarta on April 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from Andalas University (1996), and a Master of Water Engineering from ITB Bandung in 2003.



RESKY HERAVENO, ST

General Manajer Unit Wilayah II / General Manager Unit Region II

Negara Indonesia lahir di Tanjung Pandan pada 22 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB pada tahun 1995. / The State of Indonesia was born in Tanjung Pandan on February 22, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from ITB in 1995.



FEMBRI SETYAWAN, ST

General Manajer Unit Wilayah III /
General Manager of Region III Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 3 November 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (2000). / Indonesian citizen, born in Nganjuk on November 3, 1975. He obtained Bachelor's degree in Water Engineering from Brawijaya University, Malang (2000).



MARIO MORA PANGESTU, ST., MM

General Manajer Unit Wilayah IV /
General Manager of Regional Unit IV.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Februari 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Merdeka Malang (1996) dan gelar Magister Manajemen dari STIE-IPWIJA (2004). / Indonesian citizen, born in Jakarta on February 13, 1969. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from the Merdeka University of Malang (1996), and Master of Management from STIE- IPWIJA Jakarta (2004).



AGUS KUSNADI, ST., ME

General Manajer PLTA /
General Manager of Hydroelectric Power.

Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 5 Februari 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1996) dan gelar ME dari Universitas Padjadjaran (2009). / Indonesian citizen, born in Tasikmalaya,on February 5, 1970. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from Pasundan University (1996), and a ME degree from Universitas Padjadjaran (2009).



BIMA KAWINDRA, ST

Kepala Unit Kerja Khusus SPAM regional Jatiluhur I /
Head of the Jatiluhur Regional SPAM Special Work Unit I

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 28 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998). / Indonesian citizen, born in Yogyakarta, on May 28, 1974. He obtained Bachelor's degree in Civil Engineering from Diponegoro University (1998).

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

Profile of Officials One Level Below the Board of Directors



ADE FERRY FIRMANSYAH, SE., MM

Kepala Divisi Pengembangan Usaha /
Head of Business Development Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 29 Desember 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (1998) dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2004). / Indonesian citizen, born in Ciamis on December 29, 1974. He earned a bachelor's degree in economics from the Islamic University of Indonesia (1998) and a Masters in Management from the University of Indonesia (2004)



RIMPUN RAJAB HARAHAP, SE., MM

Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan /
Head of Commercial and Customer Service Division.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Univers Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (1997) dan Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2012)./ Indonesian citizen, born in Jakarta, August 31, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from the Univers Prof. Dr. Moestopo (Religious) (1997) and Master of Management from Budi Luhur University (2012).



DADAN HIDAYAT, ST., ME

General Manajer Unit Usaha Pariwisata dan Hotel /
General Manager of the Tourism and Hotel Business Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 19 November 1973 . Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITENAS(1998) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (2010). / Indonesian citizen, born in Cirebon, 19 November 1973. He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from ITENAS(1998) and a Master's degree in Economics from Padjadjaran University (2010)



BUDY GUNADY, ST., MPSDA

Project Manager Information Communication and Technology / Information Communication and Technology Project Manager.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 11 November 1969. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjadjaran (1995) dan Magister dari Institut Teknologi Bandung (2010). / Indonesian citizen, born in Bandung on November 11, 1969. Obtained Bachelor's degree from UNPAD in 1995 and Masters from ITB (2010).



DADANG HIDAYAT, ST., MT

Project Manager SPAM /
Project Manager SPAM.

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 6 November 1970.Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin dariUniversitas Pasundan (1997) dan gelar Magister Teknik Mesin dari Universitas ISTN (2012). / Indonesian citizen, born in Ciamis, November 6, 1970. He holds a Bachelor of Engineering degree majoring in Mechanical Engineering from the University of Pasundan (1997) and a Master's degree in Mechanical Engineering from the University of ISTN (2012).



EMIL MUHAMMAD NUR, ST

Project Manager Pump Storage Power Plant dan Energi Baru Terbarukan / Project Manager Pump Storage Power Plant and New Renewable Energy

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 29 November 1976. Memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Univ Jenderal Ahmad Yani pada 1998. / Indonesian citizen, born in Bandung on November 29, 1976. Obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Univ General Ahmad Yani in 1998.



IMAS AAN, SE., MM

Project Manager Holding Air Minum Dalam Kemasan /
Project Manager Holding Bottled water

Warga Negara Indonesia, lahir di Garut, 13 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari Ikopin Jatinangor (1996) dan gelar Magister Keuangan dari Universitas Tama Jagakarsa (2005). / Indonesian citizen, born in Garut on November 13, 1972. He obtained a bachelor's degree from Ikopin Jatinangor (1996) and a Masters in Finance from the University of Tama Jagakarsa (2005).



CUCU HARNANTO, ST., MM

Project Manager Pengembangan Wilayah /
Regional Development Project Manager

Warga negara Indonesia Lahir di Majalengka 13 Desember 1971. Memperoleh gelar Master dari Universitas Bhayangkara Jakarta dan Sarjana Teknik Elektro dari STTNas Yogyakarta. / Indonesian citizen Born in Majalengka December 13, 1971. He obtained a Master's degree from Bhayangkara University, Jakarta and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from STTNas Yogyakarta.

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

Profile of Officials One Level Below the Board of Directors



RENI MAYASARI, ST., M.Si

Project Manager Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi / Project Manager for Tourism and Destination Infrastructure Development.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 9 Agustus 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Islam Bandung (2000) dan gelar Master Kebijakan Publik dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2006)./ Indonesian citizen, born in Purwakarta on August 9, 1975. She obtained Bachelor degree in engineering from Bandung Islamic University (2000) and Master degree from Krisnadwipayana University, Jakarta (2006).



Ir. AGUS SURANTO, MM

Project Manager Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan/ Project Manager for Optimizing BMN and Company Assets.

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 27 April 1967 Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (1991) dan gelar Magister Manajemen dari STIE Widya Jayakarta (2003). / Indonesian citizen, born in Semarang, Central Java on April 27, 1967. He pursued his undergraduate degree in Civil Engineering from Sebelas Maret University, Solo (1991) and a Master degree in Management from STIE Widya Jayakarta, Jakarta (2003).



OYOK MUSTIKASARI, SE., MM

Special Expertise Tingkat I, Bidang Pemeriksaan, Satuan Pengawasan Intern / Special Expertise Level I, Field of Examination, Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 6 Februari 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Krisma Dwipayana (1990) dan magister manajemen dari Unpas (lulus 2013). / Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 6, 1966. He holds a Bachelor's degree in Management Economics from Krisma Dwipayana University (1990) and a master's degree in management from Unpas (graduated 2013).



DINDIN HENDRIANA, ST

Special Expertise Tingkat I, Bidang Pemeriksaan, Satuan Pengawasan Intern / Special Expertise LevelI, Field of Examination, Internal Audit Unit.

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 19 Januari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS Bandung (1997). / Indonesian citizen, born in Karawang on January 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1997).



ANOM SOAL HERUDJITO, ST., MT

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/ atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and / or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance.

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 25 Februari 1974 Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1997) dan gelar Magister Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2007). / Indonesian citizen, born in Sukabumi, on February 25, 1974. He obtained his undergraduate degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1997) and a Master degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (2007).



DEWI SYAFITRI, ST.

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and/or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Desember 1969. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Pancasila (1995)./ Indonesian citizen, born in Jakarta on December 12, 1969. She obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from the University of Pancasila (1995).



ESTHI PAMBANGUN, SE

Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/ atau Analisis Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha / Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and/or Performance Analysis of the Directorate of Business Development.

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 2 Juli 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1998). / Indonesian citizen, born in Semarang, July 2, 1976. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Diponegoro University (1998).



Ir. ANDRIJANTO, MT

Direktur Utama PT. Jasa Tirta Luhur / President Director of PT. Jasa Tirta Luhur.

Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, 5 Maret 1968. Memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Magister Manajemen SDA dari Institut Teknologi Bandung (2007). / Indonesian citizen, born in Pangkal Pinang, March 5, 1968 He obtained a degree in Engineering from Bandung Institute of Technology (1993) and Masters of Water Resources Management from the Bandung Institute of Technology (2007).

PROFIL PEJABAT SATU LEVEL DI BAWAH DIREKSI

Profile of Officials One Level Below the Board of Directors



KASWA, SE., MM

Direktur Utama Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II /
The President Director of the Pension Fund of Perum Jasa Tirta II

Warga Negara Indonesia, lahir di Kuningan, 15 Juni 1965. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Tridarma Bandung (2002) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Tama Jagakarsa (2006). / Indonesian citizen, born in Kuningan on June 15, 65. He obtained Bachelor of Economics from the STIE Tridarma bandung in 2002 and Master of Management degree from Tama Jagakarsa University (2006).



EEF SYAEFUL AMIEN,SE.

Direktur Investasi Dana Pensiun Jasa Tirta II /
Investment Director of Jasa Tirta II Pension Fund.

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).



Komposisi Pemilik Modal
Capital Owner Composition



100%
PERUM JASA TIRTA II
Milik Pemerintah Republik Indonesia
Owned by the Government of the Republic of Indonesia

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure



99%
PT JASA TIRTA LUHUR
Jl. Insinyur H. Juanda No. 124
D Bekasi, Jawa Barat 17113

51%
PT TEGAR MANDIRI CEMERLANG
Kawasan Industri Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1 Jl. Marunda Timur Kabupaten Bekasi.

Kronologi Pencatatan Saham & Obligasi
Chronology of Share and Bond Listing

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perum Jasa Tirta II belum mencatatkan saham dan/atau obligasi di bursa mana pun. Kepemilikan modal 100% milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

As of December 31, 2020, Perum Jasa Tirta II has not listed shares and/or bonds on any stock exchange. The Company is 100%ownedbyTheRepublicofIndonesia.

Sekilas Tentang Anak Perusahaan

Subsidiaries at a Glance

JATILUHUR
PT JASA TIRTA LUHUR

PT Jasa Tirta Luhur didirikan pada tanggal 29 Agustus 2018 dan memulai operasi komersial pada tahun yang sama. Perusahaan bergerak dalam bidang jasa siste penyediaan air minum dan konstruksi. Perusahaan memiliki 1 (satu) anak usaha yaitu PT Tegar Mandiri Cemerlang.

PT Jasa Tirta Luhur was established on August 29, 2018 and started commercial operations in the same year. The Company engaged in drinking water supply and construction systems. The company has a subsidiary, namely PT Tegar Mandiri Cemerlang.

Saat ini, kantor PT Jasa Tirta Luhur beralamat di Jl. Insinyur H. Juanda No. 124 D Bekasi, Jawa Barat 17113.

Currently, PT Jasa Tirta Luhur office is located at Jl. Insinyur H. Juanda No. 124 D Bekasi, Jawa Barat 17113.

Sekilas Tentang Cucu Perusahaan

The Company's Grandson at a Glance

TMC
PT TEGAR MANDIRI CEMERLANG

Saat ini, kantor PT Tegar Mandiri Cemerlang beralamat di Kawasan Industri Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1 Jl. Marunda Timur Kabupaten Bekasi.

Currently, PT Tegar Mandiri Cemerlang office is located at Kawasan Industri Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1 Jl. Marunda Timur Kabupaten Bekasi.

Informasi Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perusahaan

Information on Company Supporting Institution and/or Professional

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / PUBLIC ACCOUNTING FIRM	
Nama Lembaga / Name of Institution	**KAP AMIR ABADI JUSUF MAWAR & REKAN (RSM Indonesia)**
Alamat / Address	Ciputra World, SOHO SKYLOFT Unit 1888 - 1898, Jl. Mayjen Sungkono No.89, Surabaya
Surat Penunjukan / Appointment Letter	SP-1/KA.DKS/11/2021, SP.ADD-02/KA.DKSMR/06/2022
Periode Penunjukan / Appointment Period	2021
Jasa yang Diberikan / Service(s) Rendered	Pekerjaan Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) Tahun Buku / Audit Work on Consolidated Financial Statements and Financial Statements and Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises (UMK) Funding Program for Fiscal Year
Biaya Jasa / Fees	Rp 425.887.020

KONSULTASI HUKUM / LEGAL CONSULTANT	
Nama Lembaga / Name of Institution	**FAZAR, AGUNG & PARTNER LAW FIRM**
Alamat / Address	Jl. Sukabumi No.42, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271
Surat Penunjukan / Appointment Letter	SPK.Jkons-08/Sekper.DU/07/2021 Tanggal 23/07/2021
Periode Penunjukan / Appointment Period	2021
Jasa yang Diberikan / Service(s) Rendered	Konsultasi Hukum / Legal Consultation
Biaya Jasa / Fees	Rp4.066.800.000

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern

Education and / or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit

Informasi pada Website Perusahaan

Information on Company Website

Sebagai bentuk transparansi dan penyediaan kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan memiliki situs web/ website resmi perusahaan yang memuat informasi mengenai kinerja perusahaan dan diperbaharui secara berkala. Website tersebut dapat diakses pada alamat www.jasatirta2.co.id.

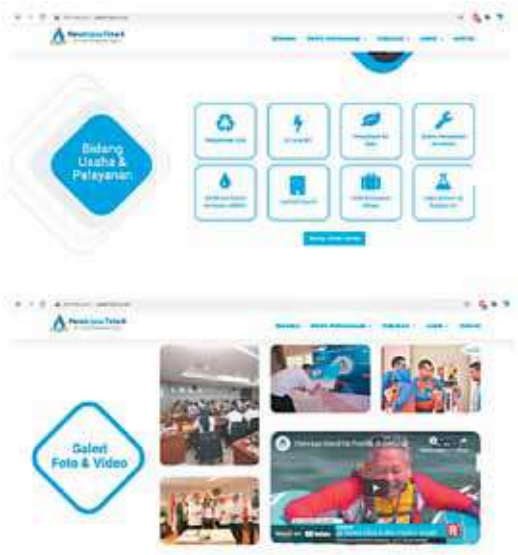
As a form of transparency and providing easy access to information for all stakeholders, the Company has an official website that contains information about the company's performance and is updated regularly. The website can be accessed at www.jasatirta2.co.id.

Website resmi Perusahaan telah memuat informasi sebagai berikut:

1. Profil Perusahaan
2. Berita & Informasi
3. Data Hidrologi
4. Bidang Usaha & Pelayanan
5. Keterbukaan Informasi Publik 2.Berita & Informasi 6.Publikasi
   - Berita Perusahaan
   - Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa
   - Press Release
   - CSR
7. Karir
8. Link
9. E-Bulletin 10.E-Kaleidoskop
11. Layanan Pelanggan
12. Kontak

The official website of the Company has the following information:

1. Company Profile
2. News & Information
3. Hydrological Data
4. Line of Business & Services
5. Disclosure of Public Information
6. Publication
   - Company News
   - Announcement of Goods & Services
   - Procurement
   - CSR
7. Career
8. Link
9. E-Bulletin
10. E-Kaleidoscope
11. Customer Service
12. Contac



Tampilan Website Perum Jasa Tirta II / Website View Perum Jasa Tirta II

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern

Education and / or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Control Unit

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pada tahun 2021, Dewan Pengawas dan Direksi telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa sebagai pembicara seminar, dan/atau workshop melalui online dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19.

BOARD OF DIRECTORS EDUCATION AND/OR TRAINING

In 2021, the Board of Directors has participated in a number of competency development programs in the form of seminar speakers and / or online workshops due to the Covid 19 pandemic outbreak.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE AUDIT

Pada tahun 2021, Komite Audit telah telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa sebagai pembicara seminar, dan/atau workshop melalui online dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19.

AUDIT COMMITTEE EDUCATION AND/ OR TRAINING

In 2021, the Audit Committee has participated in a number of competency development programs in the form of seminar speakers, and / or online workshops due to the Covid 19 pandemic outbreak.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah program pengembangan kompetensi berupa pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop. Uraian mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2021 tercantum pada tabel berikut :

CORPORATE SECRETARY EDUCATION AND/OR TRAINING

In 2021, the Corporate Secretary have participated in a number of competency development programs in the form of training, education, seminars, and/ or workshops. A description of the education and/or training that the Corporate Secretary participated in 2021 is listed in the following table :

No.	NAMA PESERTA Name	TANGGAL Date	JUDUL/TEMA Theme
1.	**Kelik Wirawan Wahyu Widodo**	15-18 Juni 2021	Deriving Value from Value Chain Optimization and Portofolio Management of Holding Company
		22-25 Juni 2021	Organization fit for Sustainable Competitive Growth
		28 Juni 2021	Training Mastering STAR Interview for Talent Selection
2.	**Nuning Sri Rejeki Wulandari**	24 Mei 2021	Sharing Session Manajemen Risiko BUMN Karya, BUMN Minerba dan BoC Charter pada BUMN Perbankan
		22-25 Juni 2021	Organization fit for Sustainable Competitive Growth
3.	**Romy Marcandi**	24 Mei 2021	Sharing Session Manajemen Risiko BUMN Karya, BUMN Minerba dan BoC Charter pada BUMN Perbankan
		22-25 Juni 2021	Organization fit for Sustainable Competitive Growth
4.	**Mohamad Sofwan**	9,10,16,23,30 Juni dan 7 Juli 2021	Onboarding Commissioner Angkatan I
		22-25 Juni 2021	Organization fit for Sustainable Competitive Growth

Halaman ini sengaja di kosongkan / This page has been intentionally left blank



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS


G20
INDONESIA
2022

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI
MACROECONOMIC AND INDUSTRIAL REVIEW

Meskipun terdapat beberapa risiko, perkembangan ekonomi global terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Perekonomian global terus pulih, namun perlambatan terlihat di berbagai negara terutama faktor pertumbuhan yang tinggi pada triwulan II 2021, dampak menjamurnya varian delta, dan dampak gangguan rantai pasok. Prospek pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 mencerminkan pemulihan yang kuat. Namun, ada berbagai risiko pemulihan global yang perlu diingat: B. Dampak peningkatan kasus Covid-19 dengan Omicron dan varian baru lainnya, ketimpangan vaksinasi, stagflasi global, dan dinamika kebijakan moneter di negara berkembang.

Despite some risks, global economic developments continue to show signs of recovery. The global economy continues to recover, but a slowdown is seen in various countries, especially the high growth factor in the second quarter of 2021, the impact of the proliferation of delta variants, and the impact of supply chain disruptions. The outlook for global economic growth in 2021 reflects a strong recovery. However, there are various global recovery risks to keep in mind: B. The impact of increasing cases of Covid-19 with Omicron and other new variants, vaccination inequality, global stagflation, and dynamics of monetary policy in developing countries.

Momentum pemulihan ekonomi domestik relatif terjaga dengan baik. Output ekonomi Indonesia terus tumbuh positif pada triwulan III tahun 2021 di tengah eskalasi Covid-19 oleh Variant Delta. Akibat penerapan PPKM yang ketat, konsumsi rumah tangga hanya meningkat 1,0% (year-on-year) dan investasi meningkat 3,74% (year-on-year), sehingga menahan permintaan domestik. Kinerja ekonomi terutama didorong oleh pertumbuhan ekspor yang kuat sebesar 29,16%, diikuti oleh kinerja impor sebesar 30,11% (year-on-year). Dari sisi produksi, tren pemulihan juga tercermin dari perkembangan positif sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan. Laju pemulihan ekonomi domestik juga tercermin dari membaiknya kinerja korporasi yang tercermin dari risiko pembiayaan yang tepat dari profitabilitas, profitabilitas dan utang jangka pendek. Meskipun pemulihan kuat, kepercayaan bisnis masih relatif terbatas mengingat ketidakpastian masih dibayangi oleh pandemi Covid-19.

The momentum for domestic economic recovery is relatively well maintained. Indonesia's economic output continued to grow positively in the third quarter of 2021 amid the Covid-19 escalation by Variant Delta. Due to the strict implementation of PPKM, household consumption only increased 1.0% (year-on-year) and investment increased 3.74% (year-on-year), thereby restraining domestic demand. Economic performance was mainly driven by strong export growth of 29.16%, followed by import performance of 30.11% (year-on-year). On the production side, the recovery trend is also reflected in positive developments in key sectors such as the manufacturing industry, trade and mining. The pace of domestic economic recovery is also reflected in improving corporate performance as reflected in the risk of proper financing of profitability, profitability and short-term debt. Despite the strong recovery, business confidence remains relatively limited given the uncertainty still overshadowed by the Covid-19 pandemic.

Perkembangan perdagangan dan neraca pembayaran terus menunjukkan tren positif, dengan posisi cadangan devisa yang meningkat. Sepanjang tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia masih dalam kondisi hitam, ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang tinggi secara konsisten. Tren pertumbuhan ekspor didorong oleh kenaikan harga komoditas dan peningkatan permintaan global. Di sisi lain, impor sejak awal tahun cukup baik, didorong oleh industri manufaktur dan permintaan domestik. Surplus perdagangan pada kuartal III 2021 sebesar US$ 13,2 miliar, tertinggi

Developments in trade and the balance of payments continue to show a positive trend, with the position of foreign exchange reserves increasing. Throughout 2021, Indonesia's trade balance is still in a black condition, supported by consistently high export growth. The export growth trend was driven by rising commodity prices and increasing global demand. On the other hand, imports have been good since the beginning of the year, driven by the manufacturing industry and domestic demand. The trade surplus in the third quarter of 2021 was US$ 13.2 billion, the highest in the last 20 years.

dalam 20 tahun terakhir. Kinerja perdagangan yang baik mendukung neraca pembayaran (neraca pembayaran) Indonesia pada triwulan III tahun 2021, dengan surplus transaksi berjalan sebesar $4,47 miliar dan transaksi modal dan finansial sebesar $6,1 miliar, surplus $10,7 miliar. Cadangan devisa Indonesia meningkat menjadi US$ 146,9 miliar pada akhir triwulan III 2021. Ini setara dengan 8,6 bulan dana impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, cadangan devisa tertinggi yang pernah ada.

Good trade performance supported Indonesia's balance of payments (balance of payments) in Q3 2021, with a current account surplus of $4.47 billion and a capital and financial account of $6.1 billion, a surplus of $10.7 billion. Indonesia's foreign exchange reserves increased to US$ 146.9 billion at the end of the third quarter of 2021. This is equivalent to 8.6 months of import funds and payment of government external debt, the highest foreign exchange reserves ever.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus pulih, namun kita perlu mewaspadai risiko ketidakpastian akibat eskalasi baru Covid-19 dan dinamika berbagai perekonomian global. Saat ini, Indonesia telah selamat dari gelombang kedua Covid-19 yang disebabkan oleh mutasi delta dan mampu mengurangi kasus harian secara signifikan. Hal ini memfasilitasi kegiatan ekonomi kota dan tercermin dalam perkembangan terakhir dalam indikator ekonomi seperti Indeks Mobilitas, Indeks Pengeluaran Pemerintah, Indeks Penjualan Riil dan Indeks Manajer Pembelian Manufaktur. Meski kasus Covid-19 di dalam negeri relatif terkendali, pemerintah Indonesia terus mengambil langkah proaktif untuk memerangi pandemi tersebut. Namun demikian, berbagai risiko ketidakpastian, terutama yang disebabkan oleh dinamika perekonomian global, seperti penyeimbangan kembali ekonomi Tiongkok, potensi hambatan di negara maju, dan masalah gangguan rantai pasokan global. Selain itu, potensi risiko penyebaran virus Covid-19 juga masih tinggi terutama akibat munculnya varian Omicron. Pemerintah akan terus menerapkan langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Selain itu, sinergi kebijakan baik fiskal, sektor keuangan dan moneter juga akan semakin diperkuat guna mengantisipasi dampak negatif pandemi Covid-19 dan eskalasi risiko perekonomian global.

The Indonesian economy is expected to continue to recover, but we need to be aware of the risk of uncertainty due to the new escalation of Covid-19 and the dynamics of various global economies. Currently, Indonesia has survived the second wave of Covid-19 caused by the delta mutation and was able to significantly reduce daily cases. This facilitates the city's economic activity and is reflected in recent developments in economic indicators such as the Mobility Index, Government Expenditure Index, Real Sales Index and Manufacturing Purchasing Managers' Index. Although the domestic Covid-19 case is relatively under control, the Indonesian government continues to take proactive steps to combat the pandemic. However, there are various risks of uncertainty, especially those caused by the dynamics of the global economy, such as the rebalancing of the Chinese economy, potential barriers in developed countries, and global supply chain disruption problems. In addition, the potential risk of spreading the Covid-19 virus is still high, especially due to the emergence of the Omicron variant. The government will continue to implement anticipatory and responsive measures in controlling the Covid-19 pandemic. In addition, policy synergies in the fiscal, financial and monetary sectors will also be strengthened to anticipate the negative impact of the Covid-19 pandemic and the escalation of global economic risks.

Pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut tercermin pada pertumbuhan positif kontributor utama PDB serta output yang telah berada di atas level pra-pandemi.

The continued recovery in the domestic economy is reflected in the positive growth of the main contributor to GDP and output, which is already above pre-pandemic levels.

Kinerja perekonomian sangat dipengaruhi oleh keberhasilan perjuangan melawan pandemi. Di awal kuartal III, insiden Varian Delta mendesak pemerintah untuk membalikkan pengereman darurat dengan memperkenalkan PPKM Level IV di berbagai daerah untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Economic performance is strongly influenced by the success of the fight against the pandemic. At the beginning of the third quarter, the Varian Delta incident urged the government to reverse emergency braking by introducing PPKM Level IV in various areas to maintain public safety.

Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap likuiditas masyarakat, rata-rata 10,1 persen di bawah level sebelum pandemi. Namun, kebijakan tersebut terbukti berhasil menurunkan prevalensi kasus Covid-19. Saat ini, berbagai indikator pandemi terus membaik. Kasus harian tambahan, kasus aktif, tingkat positif dan hunian tempat tidur tetap rendah. Karena penekanan pandemi, tingkat PPKM secara bertahap menurun di berbagai daerah, merangsang dan meningkatkan dan memperkuat kegiatan ekonomi selama ini.

Momentum pemulihan ekonomi domestik berlanjut pada triwulan III tahun 2021. Meski melambat akibat penyebaran mutasi Delta Covid-19 Juli-Agustus 2021, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 3,51% (year-on-year) pada triwulan III 2021. Di sisi pengeluaran, setiap orang telah mengembangkan komponen secara positif., Terutama peningkatan yang signifikan dalam ekspor. Sektor usaha penyumbang utama adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Di sisi produksi, sektor-sektor utama mampu berkembang secara positif. Di industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan, kinerja ekspor cukup kuat, dengan produksi tumbuh sangat kuat pada 3,68%, 5,16% dan 7,78% (year-on-year). Sementara itu, sektor konstruksi meningkat 3,84% secara triwulanan, sejalan dengan keberlanjutan proyek strategis nasional.

Kegiatan usaha pada sektor Listrik, Gas dan Air bersih pada triwulan I-2021 dengan SBT kegiatan usaha sebesar 0,18%, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (SBT 0,19%). Pada triwulan II tahun 2021 terjadi peningkatan SBT terbatas sebesar 0,27%, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya (SBT 0,18%). Responden mengatakan pertumbuhan bisnis ditopang oleh kinerja manufaktur yang membaik dan permintaan domestik yang lebih kuat, terutama di subsektor Tebaga Listrik.

Pada Triwulan III-2021, kegiatan usaha tumbuh stabil pada SBT 0,24% dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (SBT 0,27%). Responden menuturkan peningkatan kasus Covid-19 dan kebijakan restriktif menjadi salah satu faktor yang sedikit menurunkan permintaan LGA. Pada triwulan IV-2021 aktivitas usaha meningkat sebesar SBT 0,29%, sedikit meningkat dari SBT 0,24% pada triwulan sebelumnya. Responden mengatakan, kinerja tersebut didorong oleh peningkatan permintaan dari pelanggan di subsektor kelistrikan dan penambahan instalasi listrik.

This policy has a significant impact on public liquidity, an average of 10.1 percent below pre-pandemic levels. However, this policy has proven successful in reducing the prevalence of Covid-19 cases. Currently, various indicators of the pandemic continue to improve. Additional daily cases, active cases, positive rates and bed occupancy remain low. Due to the suppression of the pandemic, the level of PPKM has gradually decreased in various regions, stimulating and increasing and strengthening economic activity so far.

The momentum for domestic economic recovery continued in the third quarter of 2021. Although it slowed down due to the spread of the Delta Covid-19 mutation in July-August 2021, national economic growth grew 3.51% (year-on-year) in the third quarter of 2021. On the expenditure side, every year people have developed components positively., especially a significant increase in exports. The main contributory business sectors are manufacturing, agriculture, trade and construction industries.

On the production side, the main sectors were able to develop positively. In the manufacturing, trading and mining industries, export performance was quite strong, with production growing very strongly at 3.68%, 5.16% and 7.78% (year-on-year). Meanwhile, the construction sector increased 3.84% on a quarterly basis, in line with the sustainability of national strategic projects.

Business activities in the Electricity, Gas and Clean Water sector in the first quarter of 2021 with WNB 0.18% of business activities, relatively stable compared to the previous quarter (WNB 0.19%). In the second quarter of 2021, there was a limited increase in WNB 0.27%, a slight increase from the previous quarter (WNB 0.18%). Respondents said business growth was supported by improved manufacturing performance and stronger domestic demand, especially in the Electric Copper sub-sector.

In Quarter III-2021, business activities grew steadily at WNB 0.24% and relatively stable compared to the previous quarter (WNB 0.27%). Respondents said the increase in Covid-19 cases and restrictive policies were one of the factors that slightly reduced LGA demand. In quarter IV-2021 business activity increased by WNB 0.29%, slightly increased from WNB 0.24% in the previous quarter. Respondents said that this performance was driven by increased demand from customers in the electricity sub-sector and additional electrical installations.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Perum Jasa Tirta II bertugas menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk menjalankan tugas tersebut, Perusahaan melakukan 5 (lima) kegiatan usaha utama, meliputi:

1. Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
2. Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau Perusahaan pengelolaan tenaga listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
4. Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
5. Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

Seluruh kegiatan usaha tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) segmen sebagai berikut:
1. Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;
2. Penyediaan air;
3. Kepariwisataan;
4. Pemanfaatan lahan;
5. Jasa laboratorium kualitas air;
6. Air minum dalam kemasan (AMDK).

Kegiatan wilayah/usaha tersebut dijalankan oleh 7 (tujuh) unit usaha yang terdiri dari, Unit Wilayah I (UW I), Unit Wilayah II (UW II), Unit Wilayah III (UW III), Unit Wilayah IV (UW IV), Unit PLTA, Unit Usaha Pariwisata dan Hotel, Unit Layanan Laboratorium dan 1 (satu) anak Perusahaan yaitu PT. Jasa Tirta Luhur.

Perum Jasa Tirta II has the duty to organize the general utilization of the high quality and viability of water and water sources for the fulfillment of the livelihood of the people and to carry out certain tasks assigned by the government in the management of the Watershed. To carry out these duties the Company carries out 5 business activities:

1. Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing, ports, power plants and, fulfillment of other water needs;
2. Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other power management companies in accordance with the provisions of legislation;
3. Generation, distribution of hydroelectric power, drinking water, business consulting services in the field of water resources technology, rental of large equipment and water quality laboratory services;
4. Development of DWSS (Drinking Water Supply System); and
5. Conducting efforts to optimize the potential of the Company's resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, rental and business services of facilities and infrastructure owned by the Company.

All business activities are grouped into the following 6 segments;
1. Generation and distribution of electricity
2. Water supply
3. Tourism
4. Land use
5. Water quality laboratory services
6. Bottled drinking water (bottled water).

The six segment business activities are carried out by 7 (seven) business units consisting of, Area I (UW I) Units, Region II (UW II) Units, Region III (UW III) Units, Region IV (UW IV) Units, PLTA, Tourism and Hotel Business Unit, Laboratory Service Unit and 1 (one) subsidiary, namely PT. Tirta Luhur Services.

Seluruh unit wilayah/usaha yang berada di Wilayah I, II, III, dan IV utamanya bertugas mengembangkan usaha- usaha jasa air; menyelenggarakan kegiatan pelestarian, perlindungan air, pengelolaan SDA serta pelaksanaan konstruksi; Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) dan monitoring kualitas air; penyediaan air baku; pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas masyarakat lainnya.

Perusahaan juga memiliki Unit PLTA yang bertugas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Uraian lebih lanjut mengenai tinjauan operasi, produktivitas, pendapatan usaha, serta profitabilitas per segmen usaha disajikan dalam deskripsi sebagai berikut;

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Deskripsi Usaha

Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang dikelola oleh PJT II memiliki 6 (enam) turbin dengan kapasitas total daya terpasang sebesar 187,5 Mega Watt (MW). PLTA Ir. H. Djuanda dapat memproduksi listrik dengan rata-rata dalam setahun sebesar 900 juta kWh untuk didistribusikan ke PT PLN (Persero) serta industri di sekitar kawasan Jatiluhur – Purwakarta melalui jaringan transmisi 150 kV dan 70 kV.

Sesuai dengan karakteristiknya, PLTA Ir. H. Djuanda juga merupakan PLTA serbaguna, di mana selain berfungsi sebagai Pembangkit Tenaga Listrik, PLTA ini juga berfungsi untuk menyediakan air irigasi, pengendalian banjir, perikanan dan pariwisata, sehingga dalam pembangkitan tenaga listriknya perlu dikoordinasikan dengan keperluan irigasi dan musim tanam padi.

Di samping PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II juga mengoperasikan dan memelihara PLTA Mini Hydro yang bertempat di Curug – Klari – Karawang, sehingga lebih dikenal dengan nama PLTA Mini Hydro Curug. PLTA Mini Hydro Curug dibangun pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang sebesar 2x3,2 Mega Watt dan mulai dioperasikan pada tahun 2002 untuk

All the Company's business units that operate in Region I, II, III, and IV are primarily in charge of developing water services, conducting conservation activities on water protection, Water Resources Management and construction implementation, OPSDA and water quality monitoring, raw water supply, maintaining relationships with local government, private establishments, and other elements in the communities.

The company also has a hydropower unit whose task is to support national energy security. Further descriptions regarding the review of operations, productivity, operating revenues, and profitability per business segment are presented in the following descriptions;

Power Generation and Distribution

Business Description

Ir. H. Djuanda Jatiluhur Hydro Power Plant, which is managed by PJT II, has 6 (six) turbines with a total installed power capacity of 187.5 Mega Watt. PLTA Ir.
H. Djuanda can produce an average of 900 million kWh electricity in a year to be distributed to PT PLN (Persero) and Industry around Jatiluhur-Purwakarta Area through 150 kV and 70 kV transmission lines.

In accordance with its characteristics, PLTA Ir. H. Djuanda is also a versatile hydropower plant, which in addition to functioning as a Power Plant, hydropower also serves to provide irrigation water, flood control, fisheries and tourism, so that in generating power it needs to be coordinated with irrigation needs and rice growing season.

Besides PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II also operates and maintains the Mini Hydo hydropower plant located at Curug-Klari-Karawang, which is familiarly known as PLTA Mini Hydo Curug. The Mini Hydro Curug Hydro Power Plant was built in 2000 with an installed power capacity of 2x3,2 Mega Watt and commenced in 2002 to meet the electricity needed by the pumps at East and West Tarum in order to raise the water level standard to be

memenuhi kebutuhan listrik di Pompa Tarum Barat dan Tarum Timur guna menaikkan level air baku agar dapat disalurkan ke wilayah irigasi dan sekitarnya. Selain itu, penyaluran daya listrik juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bendung Curug serta area perkantoran dan perumahan di sekitar Bendung tersebut.

channeled to irrigation and surrounding areas and to meet the needs of electricity in Bendung Curug, Office and Housing area around the Bendung.

Tabel Realisasi Produksi Listrik Tahun 2020 – 2021
Table of Electricity Production Realization in 2020 – 2021

(dalam juta kWh / in million kWh)

URAIAN Description	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
				RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
Produksi listrik / Electricity Production	777.35	886.26	974.27	114.01	90,97

Informasi mengenai realisasi produksi listrik per unit pembangkit tahun 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut: / Information regarding the realization of electricity production per generating unit in 2021 is presented in the following table:

Tabel Realisasi Produksi Listrik per Unit Pembangkit Tahun 2021
Table of Realization of Electricity Production per Plant Unit in 2021

(dalam ribu kWh / in thousand kWh)

BULAN Month	PEMBANGKIT UNIT / Plant Unit							Jumlah Total
	I	II	III	IV	V	VI	Mini hydro	
Januari / January	8,838,000	11,243,000	1,415,000	11,073,000	7,153,000	10,999,000	803,000	51,524,000
Februari / February	-	-	-	14,101,000	14,251,000	12,327,000	847,000	41,526,000
Maret / March	6,554,000	6,789,000	4,314,000	11,262,000	9,140,000	6,262,000	1,230,000	45,551,000
April / April	5,207,000	15,256,000	2,588,000	13,438,000	-	9,457,000	1,084,000	47,030,000
Mei / May	18,597,000	15,109,000	4,002,000	18,777,000	16,000	2,335,000	1,416,000	60,252,000
Juni / June	14,573,000	11,363,000	10,112,000	9,613,000	8,210,000	2,510,000	716,000	57,097,000
Juli / July	14,920,000	15,974,000	12,470,000	12,681,000	17,651,000	19,000	1,119,000	74,834,000
Agustus / August	16,527,000	17,312,000	19,643,000	19,373,000	19,802,000	4,026,000	1,511,000	98,194,000
September / September	17,785,000	19,041,000	19,909,000	5,492,000	20,133,000	16,530,000	2,274,000	101,164,000
Oktober / October	18,033,000	18,225,000	15,046,000	14,596,000	16,728,000	15,298,000	1,482,000	99,408,000
November / November	9,302,000	17,008,000	17,329,000	17,219,000	18,048,000	14,583,000	908,000	94,397,000
Desember / December	18,312,000	19,736,000	19,759,000	19,706,000	19,933,000	16,985,000	854,000	115,285,000
Jumlah / Total	**148,648,000**	**167,056,00**	**126,587,000**	**167,331,000**	**151,065,000**	**111,331,000**	**14,244,000**	**886,262,000**

Kenaikan dan penurunan produksi listrik per unit pembangkit dari bulan ke bulan karena PLTA Ir. H. Djuanda harus beroperasi mengikuti pola operasi pemberian air untuk irigasi dan program pemeliharaan rutin. Dalam operasional PLTA tidak terjadi limpas ataupun pembuangan air dari hollow jet.

Pada bulan Februari 2021 Unit I, Unit II dan Unit III tidak berproduksi karena adanya pengeringan pada tailrace. Pada bulan April 2021 Unit V tidak berproduksi dikarenakan adanya pemeliharaan pemasangan Governor Free. Pada bulan Juni 2021 Mini Hydro mengalami penurunan produksi dikarenakan ketersediaan air tidak sesuai dengan rencana (dibawah normal).

The increase and decrease in electricity production per generating unit from month to month due to PLTA Ir. H. Djuanda must operate according to the pattern of operation of providing water for irrigation and routine maintenance programs. In hydropower operations there is no runoff or discharge of water from the hollow jet.

In February 2021 Unit I, Unit II and Unit III did not produce due to tailrace drying. In April 2021 Unit V was not in production due to the maintenance of the Governor Free installation. In June 2021 Mini Hydro experienced a decrease in production due to water availability not according to plan (below normal)

Produktivitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Pada tahun 2021, Perusahaan merealisasikan produksi listrik sebesar 886,26 juta kWh atau 114,01% dari RKAP 2021 sebesar 777,35 juta kWh. Bila dibandingkan dengan capaian produksi listrik tahun 2020, capaian ini menurun 9,03% atau setara dengan 88,01 juta kWh dari sebelumnya sebesar 974,27 juta kWh.

Informasi mengenai penyaluran listrik untuk PT PLN, swasta, dan pemakian sendiri pada tahun 2021 dimuat dalam tabel berikut :

Productivity of Power Generation and Distribution Segment

In 2021, the Company realized electricity production of 886.26 million kWh or 114.01% from the 2021 RKAP of 777.35 million kWh. Compared to the achievement of electricity production in 2020, this figure decrease by 9.03% or equivalent to 88.01 million kWh from the previous year of 974.27 million kWh.

Information regarding the distribution of electricity for PT PLN, private sector, and own use in 2021 are listed in the following table :

Tabel Perbandingan Realisasi Produksi Listrik Tahun 2021 dengan RKAP Tahun 2021 dan Realisasi Tahun 2020
Table of Comparison between Realization of Electricity Production in 2021 with RKAP 2021 and Realization in 2020

(dalam juta kWh / in million kWh)

URAIAN Description	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	PORSI TAHUN 2021 (DALAM %) Share in 2021 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
PT PLN (Persero)	400.02	494.16	631.54	123,53	78,25	55,76
Ke Non PLN/Swasta / To Non PLN/Private	342.53	353.62	295.30	103,24	119,75	39,90
Pemakaian Sendiri / Own Usage	34.80	38.48	47.43	110,57	81,14	4,34
JUMLAH / Total	**777.35**	**886.26**	**974.27**	**114,01**	**90,97**	**100,00**

Listrik hasil produksi Perusahaan disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan swasta serta sebagian lainnya digunakan sendiri oleh Perusahaan. Pada tahun 2021, penyaluran listrik ke PT PLN (Persero) sebesar 494,16 juta kWh atau 55,76% dari total produksi. Penyaluran ke PT PLN (Persero) tahun 2021 ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 21,75% atau setara dengan 137,38 juta kWh dari sebelumnya sebesar 631,54 juta kWh.

Electricity produced by the Company is distributed to PT PLN (Persero) and the private sector, and some are used by he Company itself. In 2021, the distribution of electricity to PT PLN (Persero) amounted to 494.16 million kWh or 55.76% of total production. Distribution to PT PLN (Persero) in 2021 decreased from 2020 by 21.75% or equivalent to 137.38 million kWh from the previous year of 631.54 million kWh.

Penyaluran listrik kepada Non PT PLN (Persero)/ Swasta pada tahun 2021 adalah sebesar 353,62 juta kWh atau 39,90% dari total produksi. Jumlah ini meningkat 58,32 juta kWh atau 19,75% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 295,30 juta kWh.

Distribution of electricity to Non-PT PLN (Persero)/ Private in 2021 is 353.62 million kWh or 39.90% of total production. This number increased by 58.32 million kWh or 19.75% compared to 2020 of 295.30 million kWh.

Adapun penyaluran listrik untuk pemakaian sendiri di tahun 2021 sebesar 38,48 juta kWh atau 4,34%dari total produksi. Jumlah ini menurun 8,95 juta kWh atau 18,86% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 47,423 juta kW.

The distribution of electricity for own use in 2021 is 38.48 million kWh or 4.34% of total production. This number decreased by 8.95 million kWh or 18.86% when compared to 2020 of 47.423 million kW.

Pendapatan Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Revenue from Power Generation and Distribution

Realisasi Pendapatan listrik tahun 2021 sebesar Rp454.556 juta atau 108,29% dari RKAP tahun 2021 sebesar Rp419.740 juta, jika dibandingkan dengan Pendapatan listrik tahun 2020 sebesar Rp448.611 juta mengalami peningkatan 1,33%.

Realization of electricity revenue in 2021 is IDR454.556 million or 108.29% of the 2021 RKAP of IDR419.760 million, when compared to electricity revenue in 2020 of IDR448.611 million experienced an increase of 1.33%.

Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Profitability of Power Generation and Distribution Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik Tahun 2020 - 2021
Table of Profitability of Power Generation and Distribution Segment in 2020 - 2021

(dalam Juta Rupiah / in Million)

URAIAN Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL Nominal	%
Pendapatan Listrik / Electricity Revenue	454.556	448.611	5.945	1,33
Beban Listrik / Electricity Expenses	-94.475	-101.634	-7.159	-7,04
Laba Operasi / Operating Profit	360.081	346.977	13.104	3,78
Profitabilitas / Profitability	79.22%	77,34%	-	1,87

*) Penyajian kembali / Restatement

Pendapatan dari penyaluran listrik tahun 2021 berjumlah Rp454,556 juta dengan beban operasi sebesar Rp94,475 juta sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp360,081 juta dan profitabilitas sebesar 79,22%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan listrik tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5,945 juta atau 1,33%, beban listrik menurun sebesar Rp7,159 juta atau 7,04%, laba operasi meningkat sebesar Rp13.104 juta atau 3,78%. Maka profitabilitas tahun 2021 meningkat sebesar 1,87% dari tahun 2020 sebesar 77,34% menjadi 79,22% pada tahun 2021.

Jasa Air

Deskripsi Usaha

Segmen operasi penyediaan air meliputi air baku, air bersih, dan air irigasi. Perusahaan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) yang berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2021.

Sebagai BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), pelaksanaan tugas PJT II terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek sosial dan aspek komersial. Berdasarkan volume air yang disalurkan serta ditinjau dari aspek komersial, penyediaan air baku yang dipasok ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/ Kota, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya serta Air Bersih hanya sebesar 13%. Selebihnya merupakan kontribusi PJT II dalam membantu Pemerintah terkait dengan pengelolaan irigasi, penanganan banjir, konservasi, penyuluhan, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian di daerah irigasi utara dan selatan Jatiluhur yang mendapatkan supply/ pasokan air dari sumber setempat dan Bendungan Ir. H. Djuanda (Jatiluhur).

Produktivitas Segmen Jasa Air

1. Air Baku
   Realisasi penyaluran air baku tahun 2021 sebesar 1.134,86 juta m³ atau 108,08 % dari RKAP tahun 2021 sebesar 1.050,01 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 1.001,62 juta m³ naik 13,30 %. Perbandingan realisasi penyaluran air baku tahun 2021 dengan RKAP tahun 2021 dan realisasi tahun 2020 disajikan pada Tabel - 4 berikut:

Revenue from electricity distribution in 2021 amounted to Rp454.556 million with operating expenses amounting to Rp94.475 million so as to produce operating profit of Rp360.081 million and profitability of 79.22%. If compared with 2020, electricity revenue in 2021 increased by Rp5.945 million or 1.33%, electricity expenses decreased by Rp7.159 million or 7.04%, operating profit increased by Rp13.104 million or 3.78%. So the profitability in 2021 will increase by 1.87% from 77.34% in 2020 to 79.22% in 2021.

Water Services

Business Description

The water supply operation segment includes raw water, clean water and irrigation water. The Company includes in Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) which is guided by the 2021 Citarum Cascade Reservoir Operation Plan.

As a state-owned enterprise in the form of Perusahaan Umum (PERUM), there were 2 (two) aspects of duty of PJT II, namely commercial and social aspects. Based on the volume of water supplied, from the commercial aspect of the provision of raw water supplied to the Regency/ Municipal Water Supply Company (PDAM), the Water Supply Company (PAM) Jaya and Water Supply only gained profit for PJT II of 13%, the rest is the contribution of PJT II in assisting the Government, related to irrigation management, flood handling, conservation, counseling and support to national food security program in agriculture, especially for agriculture in north and south parts of Jatiluhur that get water supply from local sources and Ir. H. Djuanda (Jatiluhur) Reservoir.

Water Service Segment Productivity

1. Raw Water
   The realization of raw water distribution in 2021 is 1.134.86 million m³ or 108.08% of the 2021 RKAP of 1,050.01 million m3 and when compared to the realization in 2020 of 1,001.62 million m3, an increase of 13.30%. The comparison of the realization of raw water distribution in 2021 with the RKAP in 2021 and the realization in 2020 is presented in Table - 4 below:

Tabel Penyaluran Air Baku / Table of Raw Water Distribution

(dalam juta m³ / in million m³)

URAIAN Description	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	PORSI TAHUN 2021 (DALAM %) Share in 2021 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
PAM Jaya	459.10	531.23	526.70	115.71	100.86	46,81
PDAM Kabupaten/Kota	160.01	221.67	173.30	138.54	127.91	19,53
Industri / Industry	386.90	345.00	262.06	89.17	131.65	30,40
PT Sang Hyang Seri	44.00	36.96	39.56	84.00	93.42	3,26
Jumlah / Total	**1,050.01**	**1,134.86**	**1,001.62**	**108.08**	**113.30**	**100**

Dari tabel di atas, realisasi penyaluran air baku ke PAM Jaya pada tahun 2021 sebesar 531,23 juta m³ atau 115,71% dari RKAP 2021 sebesar 459,10 juta m³. Realisasi ini meningkat 4,53 juta atau 0,86% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 526,70 juta m³.

Realisasi penyaluran air baku ke PDAM Kabupaten/ Kota tahun 2021 sebesar 221,67 juta m³ atau 138,54 % dari RKAP tahun 2021 sebesar 160,01 juta m3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 173,30 juta m³ naik 27,91%.

Realisasi penyaluran air baku ke Industri tahun 2021 sebesar 345,00 juta m³ atau 89,17% dari RKAP tahun 2021 sebesar 386,90 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 262,06 juta m³ naik 31,65%.

Realisasi penyaluran air baku ke PT Sang Hyang Seri tahun 2021 sebesar 36,96 juta m³ atau 84,00% dari RKAP tahun 2021 sebesar 44,00 juta m³ dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 39,56 juta m³ turun 6,58%.

2. Air Baku ke PLTA
   Perbandingan realisasi penyaluran air baku ke PLTA tahun 2021 dengan RKAP tahun 2021 dan realisasi tahun 2020 disajikan pada Tabel - 5 berikut:

From the above table, the realization of the distribution of raw water to PAM Jaya in 2021 was 531.23 million m³ or 115,71% of the 2021 RKAP of 459.10 million m³. This realization increased by 4.53 million or 0.86% compared to the realization in 2020 of 526,70 million m³.

The realization of raw water distribution to Regency/City PDAMs in 2021 is 221.67 million m³ or 138.54% of the 2021 RKAP of 160.01 million m³ and when compared to the realization in 2020 of 173.30 million m³, an increase of 27.91% .

The realization of raw water distribution to Industry in 2021 is 345.00 million m³ or 89.17% of the 2021 RKAP of 386.90 million m³ and when compared to the realization in 2020 of 262.06 million m3, an increase of 31.65%.

The realization of raw water distribution to PT Sang Hyang Seri in 2021 is 36.96 million m³ or 84.00% of the 2021 RKAP of 44.00 million m³ and when compared to the realization in 2020 of 39.56 million m³, a decrease of 6.58%.

2. Raw water to Hydropower Plant
   Comparison of the realization of raw water distribution to PLTA in 2021 with RKAP in 2021 and realization in 2020 is presented in Table - 5 below:

Tabel Perbandingan dan Realisasi Penyaluran Air Baku ke PLTA Tahun 2021
Table of Comparison and Realization of Raw Water Distribution to Hydropower Plant in 2021

(dalam juta kWh / in million kWh)

URAIAN Description	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
				RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020
1	3	2	4	5=2:3	6=2:4
PLTA Ir. H. Djuanda	400,022,520.09	494,166,276,00	631,540,765.00	123.53	78.25

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran air baku ke PLTA Ir. H. Djuanda tahun 2021 sebesar 494,17 juta kWh atau 123,53 % dari RKAP tahun 2021 sebesar 400,02 juta kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 631,54 juta kWh turun 21,75 %.

Based on the table, the realization of raw water distribution to PLTA Ir. H. Djuanda in 2021 of 494.17 million kWh or 123.53% of the 2021 RKAP of 400.02 million kWh and when compared to the realization in 2020 of 631.54 million kWh, a decrease of 21.75%.

3. Air Bersih
   Realisasi penyaluran air bersih tahun 2021 sebesar 2,406,458 m3 atau 74,99 % dari RKAP tahun 2021 sebesar 3.209.206 m3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 2,516,269 m3 turun 4,36 %.

3. Clean water
   The realization of clean water distribution in 2021 was 2.406.458 m3 or 74.99% of the 2021 RKAP of 3.209.206 m3 and when compared to the realization in 2020 of 2.516.269 m3, it decreased by 4.36%.

Perbandingan realisasi penyaluran air bersih tahun 2021 dengan RKAP tahun 2021 dan realisasi tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Comparison of the realization of clean water distribution in 2021 with the 2021 RKAP and the realization in 2020 is presented in the following table:

Tabel Penyaluran Air Bersih Tahun 2021
Table of Clean Water Distribution in 2021

(dalam m^3 / in m^3)

URAIAN Description	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	PORSI TAHUN 2021 (DALAM %) Share in 2021 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Industri / Industry	153.969	111.310	143.720	72,29	77,45	4,62
Pemakaian Sendiri / Own Usage	973.398	640.346	655.816	65,78	97,64	26,61
Penduduk / Occupant	1.130.623	849.889	1.041.102	75,17	81,63	35,32
Air Bersih Curah / Bulk Clean Water	951.216	804.913	675.631	84,62	119,14	33,45
Jumlah / Total	**3.209.206**	**2.406.458**	**2.516.269**	**74,99**	**95,64**	**100,00**

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penyaluran air bersih ke Industri pada tahun 2021 sebesar 111,310 m³ atau 72,29% dari RKAP 2021 sebesar 153,969 m³. Capaian tersebut menurun 32.410 m³ atau 22,55% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 143,720 m³.

Realisasi penyaluran air bersih pemakaian sendiri untuk wilayah Jatiluhur dan Curug pada tahun 2021 sebesar 640,346 m³ atau 65,78% dari RKAP 2021 sebesar 973,398 m³. Capaian tersebut menurun 15,470 m³ atau 2,36% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 655,816 m³.

Realisasi penyaluran air bersih ke penduduk pada tahun 2021 sebesar 849,889 m³ atau 75,17% dari RKAP 2021 sebesar 1,130,623 m³. Capaian tersebut menurun 191,213 m³ atau 18,37% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.
Realisasi penyaluran air bersih curah tahun 2021 sebesar 804,913 m³ atau 84,62% dari RKAP 2021 sebesar 951,216 m³. Jumlah tersebut meningkat 129,282 m³ atau 19,13% dibandingkan dengan realisasi 2020.

4. Air Irigasi
   a) Realisasi Tanam Padi MT. Rendeng dan MT. Gadu

Based on the table, the realization of clean water distribution to the industry in 2021 was 111,310 m³ or 72.29% of the 2021 RKAP of 153.969 m³. This achievement decreased by 32,410 m³ or 22.55% compared to the realization in 2020 of 143.720 m³.

The realization of the distribution of clean water for own usage for the Jatiluhur and Curug areas in 2021 was 640.346 m³ or 65.78/% of the 2021 RKAP of 973.398 m³. This achievement decreased by 15.470 m³ or 2.36% compared to the realization in 2020 of 655.816 m³.

The realization of clean water distribution to the population in 2021 is 849.889 m or 75.17% of the 2021 RKAP of 1.130.623 m³. This achievement decreased by 191.213 m³ or 18.37% when compared to the realization in 2020.
The realization of bulk clean water distribution in 2021 was 804,913 m³ or 84.62% of the 2021 RKAP of 951.216 m³. This amount increased 129.282 m³ or 19.13% compared to the realization of 2020.

4. Irrigation Water
   a) Realization of MT Rice Planting. Rendeng and MT. Gadu

Tabel Musim Tanam (MT) Rendeng Tahun 2020/2021 dan MT Gadu Daerah Irigasi (DI) Jatiluhur Tahun 2021
Table of Wet Season Plantation in 2020-2021 and Dry Season Plantation in Jatiluhur Irrigation Area 2021

(dalam Ha, kecuali dinyatakan lain / in Ha, except stated otherwise)

NO.	DAERAH IRIGASI Irigation Area	REALISASI 2021 Realization 2021	RENCANA Plan	% REALISASI TERHADAP % Realization to
1.	MT Rendeng DI Utara Jatiluhur Wet Season Plantation in North Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	215.267	219.261	98,18
	Luar Target / Beyond Target	8.570	-	-
	Jumlah / Total	**223.837**	**219.261**	**102,09**
	MT Rendeng DI Selatan Jatiluhur Wet Season Plantation in South Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	51.542	51.573	99,94
	Luar Target / Beyond Target	14.839	-	-
	Jumlah / Total	**66.381**	**51.573**	**128,71**
	Total Rendeng	**290.218**	**270.834**	**107,16**
2.	MT Gadu DI Utara Jatiluhur Dry Season Plantation in North Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	208.240	214.909	96,90
	Luar Target / Beyond Target	9.570	-	-
	Jumlah / Total	**217.810**	**214.909**	**101,35**
	MT Gadu DI Selatan Jatiluhur Dry Season Plantation in South Jatiluhur			
	Dalam Target / Within Target	30.533	30.634	99,67
	Luar Target / Beyond Target	31.118	-	-
	Jumlah / Total	61.651	30.634	201,25
	Total Gardu	**279.461**	**245.543**	**113,81**
	Total Rendeng + Gardu	**569.679**	**516.377**	**110,32**

Brdasarkan data tabel diatas realisasi tanam padi MT. Rendeng DI. Utara Jatiluhur tahun 2020/2021 seluas 223,837 Ha atau 102,09 % dari rencana produksi tahun 2020/2021 seluas 219.261 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target). Sedangkan untuk realisasi tanam padi MT. Rendeng DI. Selatan Jatiluhur seluas 66,381 Ha atau 128,71 % dari rencana produksi tahun 2020/2021 seluas 51.573 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target).

Based on the table data above, the realization of MT rice planting. Rendeng DI. North Jatiluhur in 2020/2021 covering an area of 223.837 Ha or 102.09% of the production plan for 2020/2021 covering an area of 219,261 Ha (consisting of within the target and outside the target). As for the realization of rice planting MT. Rendeng DI. South of Jatiluhur covering an area of 66,381 Ha or 128.71% of the production plan for 2020/2021 covering an area of 51.573 Ha (consisting of within the target and outside the target).

Realisasi tanam padi MT. Gadu DI. Utara Jatiluhur sampai dengan Desember 2021 seluas 217,810 Ha atau 101,35 % dari rencana produksi tahun 2021 seluas 214,909 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target). Sedangkan untuk realisasi tanam padi MT. Gadu DI. Selatan Jatiluhur seluas 61,651 Ha atau 201,25 % dari rencana produksi tahun 2021 seluas 30,634 Ha (terdiri dari dalam target dan luar target).

Realization of rice planting MT. Gadu DI. North Jatiluhur until December 2021 covers an area of 217,810 Ha or 101.35% of the 2021 production plan covering an area of 214,909 Ha (consisting of within the target and outside the target). As for the realization of rice planting MT. Gadu DI. South of Jatiluhur covering an area of 61,651 Ha or 201.25% of the planned production in 2021 covering an area of 30,634 Ha (consisting of within the target and outside the target).

Rencana produksi tanam padi MT. Rendeng tahun 2020/2021 DI. Jatiluhur berdasarkan pembagian golongan air dimulai 1 Oktober 2020, sedangkan MT. Gadu tahun 2021 dimulai 1 Juni 2021.

Rice production plan for MT. Rendeng in 2020/2021 DI. Jatiluhur based on the division of water groups starting October 1, 2020, while MT. Gadu 2021 begins June 1, 2021.

b) Realisasi pemberian air
Realisasi pemberian air untuk Musim Tanam Rendeng 2020/2021 dan MT. Gadu 2021 sebesar 7.693,00 juta m3 atau 110,70 % dari RKAP tahun 2021 sebesar 6.949,12 juta m3 yang airnya berasal dari sumber setempat dan Waduk Ir. H. Djuanda.

b) Realization of water supply
Realization of water supply for the 2020/2021 Rendeng Planting Season and MT. Gadu 2021 is 7,693.00 million m3 or 110.70% of the 2021 RKAP of 6,949.12 million m3 whose water comes from local sources and Ir. H. Juanda.

5. Pengelolaan 3 Waduk
Rencana dan realisasi pengelolaan Waduk Saguling, Cirata dan Ir. H. Djuanda berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2021 yang merupakan hasil kesepakatan bersama institusi dalam rangka Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC).

5. Management of 3 reservoirs
Plan and realization of the management of the Saguling, Cirata and Ir. H. Djuanda Reservoirs refer to the 2021 Citarum Reservoir Operation Plan which is the result of an agreement with the institution as part of Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC).

Data yang menggambarkan realisasi dan rencana Air Masuk, Air Keluar dan Tinggi Muka Air 3 Waduk pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Data describing the realization and plan of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of 3 Reservoirs in 2021 is presented in the following table:

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Saguling Tahun 2021
Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Saguling Reservoir in 2021

BULAN Month	AIR MASUK (Juta m³) Incoming Water (Million m³)		AIR KELUAR (Juta m³) Outgoing Water (Million m³)		TINGGI MUKA AIR (mdpl) Water Level (masl)	
	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization
Januari / January	337,99	301,81	272,43	234,79	629,24	633,93
Februari / February	243,80	320,18	222,50	239,72	630,60	636,51
Maret / March	376,35	409,01	183,99	310,90	636,10	639,22
April / April	219,00	410,25	178,60	319,17	637,05	641,42
Mei / May	159,76	254,07	95,93	253,64	639,46	641,31
Juni / June	223,56	145,24	197,51	197,33	640,11	639,89
Juli / July	53,86	84,12	173,78	163,02	637,27	637,59
Agustus / August	37,56	50,29	138,92	143,00	634,49	634,50
September / September	34,03	50,00	152,83	139,57	630,32	628,93
Oktober / October	91,92	97,08	123,82	39,57	630,26	631,56
November / November	496,36	249,35	398,58	222,39	632,96	632,56
Desember / December	410,15	325,17	344,69	265,04	633,68	634,67
Jumlah / Total	**2.684,34**	**2.696,57**	2.483,57	2.528,14		
Rata-rata / Average	**223,70**	**224,71**	206,96	210,68		
% Realisasi : Rencana / % Realization : Plan	**99,55%**		**98,24%**			

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Saguling dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata sebesar 223,70 juta m3 atau 99,55 % dari rencana sebesar 224,71 juta m3.

Based on the table above, the realization of water entering the Saguling Reservoir from January to December 2021 is an average of 223.70 million m3 or 99.55% of the planned 224.71 million m3.

Realisasi air keluar Waduk Saguling dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata sebesar 206,96 juta m3 atau 98,24 % dari rencana sebesar 210,68 juta m3.

The realization of water out of the Saguling Reservoir from January to December 2021 is an average of 206.96 million m3 or 98.24% of the planned 210.68 million m3.

Realisasi TMA Waduk Saguling pada tanggal 1 Desember 2021 berada pada elevasi +633,68 m dpl atau lebih rendah 0,99 m dari rencana pada elevasi + 634,67mdpl.

The realization of the Saguling Reservoir TMA on December 1, 2021 is at an elevation of +633.68 m asl or 0.99 m lower than the plan at an elevation of +634.67 masl.

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Cirata Tahun 2021
Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Cirata Reservoir in 2021

BULAN Month	AIR MASUK (Juta m³) Incoming Water (Million m³)		AIR KELUAR (Juta m³) Outgoing Water (Million m³)		TINGGI MUKA AIR (mdpl) Water Level (masl)	
	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization
Januari / January	474,64	522,32	417,46	428,58	208,22	208,93
Februari / February	525,63	535,60	474,26	423,87	209,39	210,42
Maret / March	423,05	645,38	301,70	509,76	212,04	212,49
April / April	356,74	629,07	222,01	503,66	214,82	218,28
Mei / May	307,72	479,21	218,54	479,05	216,58	218,16
Juni / June	442,03	312,20	427,04	384,29	216,83	216,67
Juli / July	290,10	230,19	428,88	346,58	214,08	214,39
Agustus / August	235,82	187,45	338,97	320,91	211,97	211,61
September / September	300,94	192,92	458,01	325,58	208,61	208,18
Oktober / October	326,76	164,79	331,56	110,10	208,50	209,30
November / November	833,15	462,13	855,27	423,46	207,99	210,04
Desember / December	648,15	582,43	513,02	498,25	211,02	211,75
Jumlah / Total	**5.164,74**	**4.943,70**	**4.986,72**	**4.754,10**		
Rata-rata / Average	**430,39**	**411,98**	**415,56**	**396,18**		
% Realisasi : Rencana / % Realization : Plan	**104,47%**		**104,89%**			

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Cirata dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata sebesar 430,39 juta m3 atau 104,47 % dari rencana sebesar 411,98 juta m3.

Based on the table above, the realization of water entering the Cirata Reservoir from January to December 2021 averaged 430.39 million m3 or 104.47% of the planned 411.98 million m3.

Realisasi air keluar Waduk Cirata dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata sebesar 415,56 juta m3 atau 104,89 % dari rencana sebesar 396,18 juta m3.

The realization of the water coming out of the Cirata Reservoir from January to December 2021 is on average 415.56 million m3 or 104.89% of the planned 396.18 million m3.

Realisasi TMA Waduk Cirata pada tanggal 1 Desember 2021 berada pada elevasi +211,02 m dpl atau lebih rendah 0,73 m dari rencana pada elevasi +211,75 m dpl.

The realization of the Cirata Reservoir TMA on December 1, 2021 is at an elevation of +211.02 m above sea level or 0.73 m lower than the planned elevation +211.75 m asl.

Tabel Air Masuk, Air Keluar, dan Tinggi Muka Air Waduk Ir. H. Djuanda Tahun 2021
Table of Incoming Water, Outgoing Water, and Water Level of Ir. H. Djuanda Reservoir in 2021

BULAN Month	AIR MASUK (Juta m³) Incoming Water (Million m³)		AIR KELUAR (Juta m³) Outgoing Water (Million m³)		TINGGI MUKA AIR (mdpl) Water Level (masl)	
	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization	RENCANA Plan	REALISASI Realization
Januari / January	446,54	493,24	320,56	321,41	91,45	95,78
Februari / February	643,91	495,62	241,51	290,30	97,58	98,69
Maret / March	379,13	584,19	253,98	334,80	99,02	102,01
April / April	271,84	580,19	261,03	349,92	98,87	104,87
Mei / May	305,63	533,11	326,76	535,68	98,16	104,73
Juni / June	522,77	420,65	317,93	557,28	100,62	102,87
Juli / July	478,38	371,01	401,06	575,86	100,99	99,99
Agustus / August	392,47	336,49	527,54	575,86	98,33	96,41
September / September	463,91	327,34	558,57	557,28	95,87	97,24
Oktober / October	360,95	132,65	605,95	374,98	91,02	93,37
November / November	921,90	469,85	580,12	400,52	96,09	94,35
Desember / December	569,03	555,56	675,90	401,76	94,20	96,59
Jumlah / Total	**5.756,46**	**5.299,90**	**5.070,91**	**5.275,64**		
Rata-rata / Average	**479,71**	**441,66**	**422,58**	**439,64**		
% Realisasi : Rencana / % Realization : Plan	**108,61%**		**96,12%**			

Berdasarkan tabel di atas, realisasi air masuk Waduk Ir. H. Djuanda dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata sebesar 479,71 juta m3 atau 108,61 % dari rencana sebesar 441,66 juta m3.

Based on the table above, the realization of water entering the Ir. H. Djuanda from January to December 2021 an average of 479.71 million m3 or 108.61% of the planned 441.66 million m3.

Realisasi air keluar Waduk Ir. H. Djuanda dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 rata-rata sebesar 422,58 juta m3 atau 96,12 % dari rencana sebesar 439,64 juta m3.

The realization of the water coming out of the Ir. H. Djuanda from January to December 2021 an average of 422.58 million m3 or 96.12% of the planned 439.64 million m3.

Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda pada tanggal 1 Desember 2021 berada pada elevasi +94,20 m dpl atau lebih rendah 2,39 m dari rencana pada elevasi +96,59 m dpl.

Realization of TMA Reservoir Ir. H. Djuanda on December 1, 2021 is at an elevation of +94.20 m above sea level or 2.39 m lower than the plan at an elevation of +96.59 m above sea level.

Profitabilitas Segmen Jasa Air

Profitablity of Water Service Segment

a. Profitabilitas Air Baku / Raw Water Profitability

URAIAN PENDAPATAN Income Description	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Air Baku / Raw Water Revenue	292.436	302.949	-10.513	-3,47%
Beban Air Baku / Raw Water Load	-383.371	-342.359	41.012	11,98%
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	**-90.935**	**-39.410**	**-51.525**	**-130,74%**
Profitabilitas / Profitability	**-31,10%**	**-13,01%**		**-18,09%**

b. Profitabilitas Air Bersih / Clean Water Profitability

URAIAN PENDAPATAN Income Description	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Air Bersih / Clean Water Revenue	8.918	8.942	-24	-0,27%
Beban Air Bersih / Clean Water Load	-9.800	-25.261	-15.461	-61,21%
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	**-882**	**-16.319**	**15.437**	**94,60%**
Profitabilitas / Profitability	**-9,89**	**-182,50%**		**172,61%**

Kepariwisataan

Tourism

Deskripsi Usaha

Keberadaan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bangunan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perusahaan telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, playground, lapangan tenis, perkemahan, dan wahana rekreasi air serta sarana olahraga air.

Business Description

The existence of the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir that is equipped with beautiful natural scenery combined with the splendor of the reservoir building makes a tourist attraction and become one of the Tourism destinations in West Java. In taking advantage of the tourism potential in the region, the Company has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, playgrounds, tennis courts, campsites, and water recreation rides and sports facilities.

Fasilitas pariwisata di kawasan Bandungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi dengan bangunan hotel bintang tiga dengan nama kawasan Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan ini, terdapat 33 bungalow dan 30 kamar hotel, juga terdapat 7 (tujuh) ruang pertemuan yang 5 (lima) di antaranya berada di Gedung Grha Vidya (terdiri dari satu ruang utama berkapasitas 800 orang dan empat ruang pertemuan berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 (dua) ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan fasilitas rekreasi lainnya.

Produktivitas Segmen Pariwisata

Selama tahun 2021 telah dilakukan upaya-upaya yang intens dalam mengoptimalkan pencapaian target bidang pariwisata yang menurun akibat dampak pandemi covid 19 antara lain:

1. Adanya kalender event Jatiluhur Greenfest pada bulan Desember dan Old & New year fest dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
2. Melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKS) Pengelolaan hotel, restoran dan bungalow.

Informasi mengenai perbandingan realisasi produksi pariwisata tahun 2021 dengan RKAP 2021 dan realisasi tahun 2020 dimuat dalam tabel berikut :

Tourism facilities in the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Reservoir area are complemented with a three-star hotel building called the Jatiluhur Hotel Resort area which has been operating since 1967. 33 bungalows and 30 hotel rooms were built within the premises, including 7 (seven) meeting rooms, 5 (five) of which are located in the Grha Vidya Building (consisting of one main room with a capacity of 800 people and four meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 (two) separate meeting rooms in the Istora Restaurant area with a capacity of 80 people each. The tourism area is also equipped with swimming pool and water recreation facilities in the form of a water park with the name Jatiluhur Water World (JWW), cruise ships, water skiing, and other recreational facilities.

Tourism Segment Productivity

During 2021, intense efforts have been made to optimize the achievement of targets in the tourism sector which has declined due to the impact of the COVID-19 pandemic, including:

1. The existence of the Jatiluhur Greenfest event calendar in December and the Old & New year fest while still paying attention to health protocols.
2. Conducting Collective Labor Agreement (PKS) Management of hotels, restaurants and bungalows.

Information regarding the comparison of the realization of tourism production in 2021 and the 2021 RKAP and the realization in 2020 is described in the following table:

Tabel Produktivitas Segmen Pariwisata Tahun 2021
Table of Productivity of Tourism Segment in 2021

URAIAN Description	SATUAN Unit	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
					RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization in 2020
1	2	3	4	5=3:2	6=4:3	7=4:5
Hotel & Bungalow						
Hotel Istora/Pesanggrahan & Bungalow	kamar	6,698	7,975	3,958	119.07	201.49
Rekreasi / Recreational						
Kapal Motor / Motor Boat	trip	210	94	191	44.76	49.21
Ticketing	Orang / Person	127,000	73,222	101,516	57.66	72.13
Water World						
Ticketing	Orang / Person	13,334	6,641	6,956	49.81	95.47
Bar & Restoran / Bar & Restaurant						
Room Service	Porsi / Portion	3,588	1,272	905	35.45	140.55
Restoran Istora	Porsi / Portion	29,088	24,848	19,155	85.42	129.72
Restoran Passanggrahan	Porsi / Portion	23,972	12,896	8,501	53.80	151.70
Gedung Konversi / Conversion Building						
Room Rental	Kali / Times	201	129	28	64.18	460.71
Food & Beverage (Banquet)	Porsi / Portion	8,460	14,205	18,307	167.91	77.59

Realisasi Hotel Istora, Pesanggrahan dan Bungalow tahun 2021 sebanyak 7.975 kamar atau 119,07 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 6.698 unit dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 3.958 unit naik 101,49 %.

The realization of Istora Hotels, Pesanggrahans and Bungalows in 2021 was 7,975 rooms or 119.07% of the 2021 RKAP of 6,698 units and compared to the realization in 2020 of 3,958 units, an increase of 101.49%.

Realisasi Kapal Motor dalam Tahun 2021 sebanyak 94 trip atau 44,76 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 210 trip dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 191 trip turun 50,79 %. Pendapatan Kapal Motor tidak tercapai karena banyaknya pesaing yang bermunculan pada wisata air dengan harga yang kompetitif dan sarana penunjang yang lengkap, menjadikan wisata air Jatiluhur Water World kalah bersaing dan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan.

The realization of Motor Ships in 2021 was 94 trips or 44.76% of the 2021 RKAP of 210 trips and when compared to the realization in 2020 of 191 trips, it decreased by 50.79%. Motorboat revenue was not achieved because of the many competitors that appeared in water tourism with competitive prices and complete supporting facilities, making Jatiluhur Water World water tourism unable to compete and unable to achieve the set target.

Realisasi pengunjung Rekreasi (Ticketing) tahun 2021 sebanyak 73.222 orang atau 57,66 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 127.000 orang dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 101.516 orang turun 27,87 %. Tidak tercapainya Pendapatan Ticketing Rekreasi karena tidak adanya perubahan sarana dan prasarana pada Kawasan rekreasi, sehingga menimbukan kejenuhan bagi wisatawan JVR.

The realization of Recreational Visitors (Ticketing) in 2021 was 73,222 people or 57.66% of the 2021 RKAP as many as 127,000 people and when compared to the realization in 2020 as many as 101,516 people, down 27.87%. Not achieving Recreational Ticketing Revenue due to the absence of changes in facilities and infrastructure in the recreation area, thus causing saturation for JVR tourists.

Realisasi pengunjung Water World tahun 2021 sebanyak 6.641 orang atau 49,81 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 13.334 orang dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 6.956 orang turun 4,53 %. Tidak tercapainya rencana produksi karena adanya beberapa pesaing kolam renang di wilayah Purwakarta dengan konsep terkini dan tidak ada wahana tambahan di Water World.

The realization of Water World visitors in 2021 was 6,641 people or 49.81% of the 2021 RKAP as many as 13,334 people and when compared to the realization in 2020 as many as 6,956 people, down 4.53%. The production plan was not achieved due to several swimming pool competitors in the Purwakarta area with the latest concept and no additional rides at Water World.

Realisasi Room Service (Bar & Restoran) tahun 2021 sebanyak 1.272 porsi atau 35,45 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 3.588 porsi dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 905 porsi naik 40,55 %. Tidak tercapainya rencana akibat dari tingkat hunian Hotel Pesanggrahan yang rendah yang berpengaruh terhadap pencapaian target Room Service (Bar & Restoran).

The realization of Room Service (Bar & Restaurant) in 2021 was 1,272 portions or 35.45% of the 2021 RKAP of 3,588 portions and when compared to the realization in 2020 as many as 905 portions, an increase of 40.55%. The plan was not achieved due to the low occupancy rate of the Pesanggrahan Hotel which affected the achievement of the Room Service (Bar & Restaurant) target.

Realisasi Restoran Istora (Bar & Restoran) tahun 2021 sebanyak 24.848 porsi atau 85,42 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 29.088 porsi dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 19.155 porsi naik 29,72 %.

The realization of Istora Restaurant (Bar & Restaurant) in 2021 was 24,848 portions or 85.42% of the 2021 RKAP of 29,088 portions and when compared to the realization in 2020 of 19,155 portions, an increase of 29.72%.

Realisasi Restoran Pasanggrahan (Bar & Restoran) tahun 2021 sebanyak 12.896 porsi atau 53,80 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 23.972 porsi dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 8.501 porsi naik 51,70 %. Tidak tercapainya rencana produksi karena tingkat kunjungan wisatawan rendah sehingga berpengaruh terhadap penjualan Restoran Pesanggarahan (Bar & Restoran).

The realization of the Pasanggrahan Restaurant (Bar & Restaurant) in 2021 was 12,896 portions or 53.80% of the 2021 RKAP of 23,972 portions and when compared to the realization in 2020 of 8,501 portions, an increase of 51.70%. The production plan was not achieved because the level of tourist visits was low so that it affected the sales of Pesanggrahan Restaurants (Bars & Restaurants).

Realisasi Room Rental gedung konvensi tahun 2021 sebanyak 129 kali atau 64,18 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 201 kali dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 28 kali naik 360,71 %. Tidak tercapainya rencana produksi karena danya Pembatasan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) pada JVR yang berpengaruh terhadap Penjualan Room Rental gedung konvensi.

The realization of room rental for convention buildings in 2021 was 129 times or 64.18% of the 2021 RKAP as many as 201 times and when compared to the realization in 2020, it was 28 times, an increase of 360.71 %. The production plan was not achieved due to restrictions on MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) activities at the JVR which affected Room Rental Sales of the convention building.

Realisasi Food & Beverage (Banquet) gedung konvensi tahun 2021 sebanyak 14.205 kali atau 167,91 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 8.460 kali dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 18.307 kali turun 22,41 %. Tidak tercapainya rencana produksi karena tingkat kunjungan Room Rental gedung konvensi rendah sehingga berpengaruh terhadap Penjualan Food & Beverage (Banquet) gedung konvensi.

The realization of Food & Beverage (Banquet) of the convention building in 2021 was 14,205 times or 167.91% of the 2021 RKAP of 8,460 times and when compared to the realization in 2020 as many as 18,307 times, it decreased by 22.41%. The production plan was not achieved due to the low level of Room Rental visits to the convention building so that it affected the Food & Beverage (Banquet) sales of the convention building.

Realisasi pengunjung Pariwisata tahun 2021 sebanyak 48.456 orang, turun 31,73 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebanyak 70.972 orang disajikan pada berikut:

Realization of Tourism visitors in 2021 as many as 48,456 people, a decrease of 31.73% compared to the same period in 2020 as many as 70,972 people are presented below:

Tabel Realisasi Pengunjung Pariwisata Tahun 2020 – 2021
Table of Realization of Tourist in 2020 – 2021

BULAN Month	WISATAWAN / Tourist		JUMLAH / Total	
	NUSANTARA Local	MANCANEGARA Foreign	TAHUN 2021 In 2021	TAHUN 2020 In 2020
Januari / January	8,605	-	8,605	13,042
Februari / February	4,090	-	4,090	7,026
Maret / March	6,346	-	6,346	4,347
April / April	4,128	-	4,128	-
Mei / May	13,736	-	13,736	-
Juni / June	5,159	-	5,159	5,617
Juli / July	97	-	97	12,547
Agustus / August	-	-	-	18,987
September / September	6,295	-	6,295	9,406
Oktober / October	10,494	-	10,494	13,215
November / November	6,414	-	6,414	9,925
Desember / December	7,872	-	7,872	7,404
Jumlah / Total	**48,456**	-	**48,456**	**70,972**

Pendapatan Segmen Pariwisata

Pada tahun 2021 Segmen Pariwisata mencatatkan Pendapatan sebesar Rp10,655 juta, meningkat Rp1,553 juta atau 17,06% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp9,102 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan layanan, sarana dan prasarana, promosi, dan event-event kepariwisataan lainnya.

Tourism Segment Revenue

In 2021, the Tourism Segment recorded Revenue of Rp10.655 million, an increase of Rp1.553 million or 17.06% compared to 2020 of Rp9.102 million. This increase in revenue was mainly due to improvements in services, facilities and infrastructure, promotions, and other tourism events.

Profitabilitas Segmen Pariwisata

Profitability of Tourism Segment

Tabel Profitabilitas Pariwisata Air Tahun 2021 – 2020
Table of Profitability of Tourism Segment in 2021 – 2020

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN PENDAPATAN Income Description	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Pariwisata / Tourism Revenue	10.655	9.102	1.553	17,06%
Beban Pariwisata / Tourism Expenses	-18.687	-23.147	-4.460	-19,27%
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	**-8.032**	**-14.045**	**6.013**	**42,81%**
Profitabilitas / Profitability	**-75,38%**	**-154,31%**		**78,92%**

Pendapatan dari segmen Pariwisata tahun 2021 berjumlah Rp10,655 juta dengan beban operasi sebesar Rp18,687 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp8,032 juta dan profitabilitas sebesar minus 75,38%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan pariwisata tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1,553 juta atau 17,06%, beban pariwisata menurun Rp4,460 juta atau 19,27%, dan rugi operasi menurun Rp6.013 juta atau 42,81%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 78,92% dari sebelumnya minus 154,31% pada tahun 2020 menjadi minus 75,38% pada tahun 2021.

Revenue from the Tourism segment in 2021 amounted to Rp10.655 million with operating expenses of Rp18.687 million resulting in an operating loss of Rp8.032 million and a profitability of minus 75.38%. When compared to 2020, tourism revenues in 2021 increased by Rp1.553 million or 17.06%, tourism expenses decreased by Rp4.460 million or 19.27%, and operating losses decreased by Rp6.013 million or 42.81%. This causes profitability in 2021 to increase by 78.92% from minus 154.31% in 2020 to minus 75.38% in 2021.

Pemanfaatan Lahan

Land Utilization

Deskripsi Usaha

Business Description

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan berupa pertanian darat maupun pertanian sawah, dan non pertanian seperti perikanan kolam, lahan komersil, jalan, halaman pabrik, lahan parkir, hingga jalur pipa & kabel, jalur hijau, jembatan, serta lahan untuk tower komunikasi dan listrik seluas 7.788,37 m³. Kegiatan usaha ini dijalankan melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perusahaan

As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II car-ries out land use in the form of land agriculture and rice farming, and non-agriculture such as pond fisheries, commercial land, roads, factory yards, parking lots, pipelines & cables, green lines, bridges and land for communication and electricity towers covering an area of 7,788.37 m3 through a system of leasing and business cooperation with various agencies either BUMN (State-Owned Enterprises) such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perus- ahaan Daerah Air Minum

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota, instansi swasta, serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian. Pemanfaatan lahan ini dikelola oleh unit wilayah I, II, III, dan IV.

(PDAM) of Regen-cy/City level, private institutions, and indi-vidual that lease land for agriculture. The use of this land is managed by business units I, II, III, and IV.

Produktivitas Segmen Pemanfaatan Lahan

Productivity of Land Utilization Segment

Realisasi atas pemanfaatan lahan untuk disewakan tahun 2021 seluas 598,27 ha atau 69,99 % dari RKAP tahun 2021 seluas 854,80 ha dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 seluas 603,00 ha turun 0,78 %.

The realization of land use for lease in 2021 is 598.27 ha or 69.99% of the 2021 RKAP of 854.80 ha and when compared to the realization in 2020 it is 603.00 ha, a decrease of 0.78%.

Tidak tercapainya pemanfaatan lahan dikarenakan terdapatnya sejumlah luasan lahan petani yang beralih fungsi menjadi fasilitas/jalan umum yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga luasan lahan petani menjadi berkurang sedangkan untuk lahan non petani akibat dampak pandemik Covid-19.

The failure to achieve land use was due to the fact that a number of farmers' land areas were converted into public facilities/roads used by the Central Government and Regional Governments so that the area of farmers' land was reduced while for non-farmers' land due to the impact of the Covid-19 pandemic.

Perbandingan realisasi terhadap rencana produksi pemanfaatan lahan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Comparison of realization against land use production plan in 2021 is presented in the following table:

Tabel Pemanfaatan Lahan Tahun 2021 – 2020
Table of Land Use in 2021 - 2020

(dalam Ha / In Ha)

URAIAN Description	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to		
				RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	PORSI TAHUN 2021 (DALAM %) Share in 2021 (in%)
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4	7
Lahan Pertanian / Agricultural Land	358,94	285.88	315.13	79.64	90.72	47,78
Lahan Non Pertanian / Non Agricultural Land	495,85	312.40	287.87	63.00	108.52	52,22
Jumlah / Total	**854,80**	**598.27**	**603.00**	**69.99**	**99.22**	**100**

Pendapatan Segmen Pemanfaatan Lahan

Land Utilization Segment Revenue

Pada tahun 2021, Segmen Pemanfaatan Lahan mencatatkan Pendapatan sebesar Rp60,802 juta, meningkat Rp3,524 juta atau 6,15% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp57,278 juta.

In 2021, the Land Use Segment recorded Revenue of Rp60.802 million, an increase of Rp3.524 million or 6.15% compared to 2020 of Rp57.278 million.

Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan

Profitability of Land Utilization Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan Tahun 2020 – 2021
Table of Profitability of Land Utilization Segment in 2020 – 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN PENDAPATAN Income Description	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Lahan / Land Income	60.802	57.278	3.524	6,15%
Beban Lahan / Land Load	-8.447	-12.266	-3.819	-31,13%
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	**52.355**	**45.012**	**7.343**	**16,31%**
Profitabilitas / Profitability	**86,11%**	**78,59%**		**7,52%**

Jasa Laboratorium

Deskripsi Usaha

Laboratorium Perum Jasa Tirta II merupakan salah satu laboratorium rujukan di Jawa Barat yang sudah terakreditasi ISOIEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2003, dengan Nomor Akreditasi: LP-174-IDN serta telah teregister Lingkungan di Kementrian Linokungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016, dengan Nomor Registrasi 00108 / LPJAABLING-1/ LRK/KLHK.

Jumlah parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi ISONEC 17025:2017 adalah sebanyak 114 parameter terakreditasi meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi dari 9 (Sembilan) komoditi produk, yaitu : Air Limbah, Air Sungai/Danau, Air untuk keperluan Higiene Sanitasi, Air Minum, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan Kerja, Kebisingan Lingkungan dan Sampling. Sedangkan

Laboratory Services

Business Description

Perum Jasa Tirta II Laboratory is one of the reference laboratories in West Java that has been accredited to ISOIEC 17025: 2017 by the National Accreditation Committee since 2003, with Accreditation Number: LP- 174-IDN and has been registered with the Environment at the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016, with Registration No. 00108 / LPJAABLING-1/LRK/ KLHK.

The number of parameters included in the Scope of Accreditation of ISONEC 17025:2017 are 114 accredited parameters including physical, chemical, and microbiological parameters of 9 (Nine) product commodities, namely: Wastewater, River/ Lake Water, Water for Sanitary Hygiene, Drinking Water, Ambient Air, Fixed Source Emissions, Work Environment Noise, Environmental Noise and Sampling. Meanwhile, the parameters included in

parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Registrasi Labling KLHK adalah sebanyak 68 parameter dari 6 (enam) komoditi produk, yaitu: Air Limbah, Air Sungai/Danau, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan dan Sampling.

the Scope of the KLHK Labling Registration are 68 parameters from 6 (six) product commodities, namely: Wastewater, River/Lake Water, Ambient Air, Emissions from Immovable Sources, Environmental Noise and Sampling.

Peningkatan kualitas jasa pelayanan yang diberikan laboratorium kepada para pengguna jasa didukung oleh tenaga analis yang kompeten (dilengkapi dengan sertifikasi dan pelatihan terkait), alat instrumen yang lengkap serta penggunaan bahan kimia dan pemilihan metode pengujian yang sesuai dengan standar internasional/regional dan nasional. Pengguna jasa laboratorium meliputi pengguna internal dan eksternal seperti industri/ kegiatan usaha, kawasan industri, rumah sakit/ klinik kesehatan, hotel/apartemen/mall, instansi dan perorangan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, dan sekitarnya.

Improved quality of service provided by laboratories to the users is supported by competent analysts (equipped with certification and related training), complete instrument tools and chemical usage and selection of testing methods in accordance with international/ regional and national standards. Users of laboratory services include internal and external users such as industry/business activities, industrial estates, hospitals/ health clinics, hotels/ apartments/malls, agencies and individuals spread across Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta and surrounding areas.

Produktivitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Realisasi jasa analisa laboratorium sebanyak 8.859 sampel atau 109,37 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 8.100 sampel dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 7.980 sampel naik 11,02 %.

Adapun realisasi jasa analisa laboratorium tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Productivity of Water Quality Laboratory Service Segment

The realization of laboratory analysis services was 8,859 samples or 109.37% of the 2021 RKAP of 8,100 samples and when compared to the realization in 2020 of 7,980 samples, an increase of 11.02%.

The realization of laboratory analysis services in 2021 is presented in the following table:

Tabel Populasi Analisa Laboratorium Tahun 2021
Table of Laboratory Analysis Population in 2021

(dalam satuan sampel / in sample unit)

BULAN Month	POPULASI SAMPEL / Sample Population		
	INDUSTRI Industry	SUNGAI/SALURAN River/chanel	JUMLAH SAPEL Total sample
Januari / January	529	136	665
Februari / February	525	143	668
Maret / March	572	195	767
April / April	588	146	734
Mei / May	611	155	766
Juni / June	612	163	775
Juli / July	673	139	812
Agustus / August	566	112	678
September / September	594	132	726
Oktober / October	617	131	748
November / November	598	150	748
Desember / December	640	132	772
Jumlah / Total	**7,125**	**1,734**	**8,859**
Rata-rata / Average	**713**	**173**	**886**
RKAP Tahun 2021 / RKAP in 2021	6,500	1,600	8,100
% Realisasi : RKAP 2021 / % Realization : RKAP 2021	109.62	108.38	109.37
Realisasi Tahun 2020 / Realization in 2020	6,273	1,707	7,980
% Realisasi : Tahun 2020 / % Realization : in 2020	113.58	101.58	111.02

Berdasarkan tabel di atas, realisasi untuk sampel industri sebanyak 7.125 sampel atau 109,62 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 6.500 sampel dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 6.273 sampel naik 13,58 %.

Sedangkan realisasi untuk sampel sungai/saluran sebanyak 1.734 sampel atau 108,38 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 1.600 sampel dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 1.707 sampel naik 1,58 %.

Based on the table above, the realization for the industrial sample is 7,125 samples or 109.62% of the 2021 RKAP of 6,500 samples and when compared to the realization in 2020 of 6,273 samples, an increase of 13.58 %.

While the realization for the sample of rivers/ channels was 1,734 samples or 108.38% of the 2021 RKAP as many as 1,600 samples and when compared to the realization in 2020 as many as 1,707 samples, an increase of 1.58%.

Pendapatan Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Pada tahun 2021, Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air mencatatkan Pendapatan sebesar Rp6,984 juta, meningkat Rp927 juta atau 15,30% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp6.057 juta. Peningkatan pendapatan ini equivalent dengan penurunan produksi sebesar 0,29% serta adanya perubahan tarif dasar jasa analisa pada semester II tahun 2021. Selain itu, komoditas jasa pengujian kualitas udara dan lingkungan kerja juga memiliki kontribusi yang cukup baik dalam peningkatan pendapatan.

Water Quality Laboratory Service Segment Revenues

In 2021, the Water Quality Laboratory Service Segment recorded Revenues of Rp6.984 million, an increase of Rp927 million or 15.30% compared to 2020 of Rp6.057 million. This increase in revenue is equivalent to an decreased production of 0.29% and a change in the base rate of analytical services in the second semester of 2021. In addition, air quality testing services and work environment also had a fairly good contribution to revenue increase.

Profitabilitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air

Profitability of Water Quality Laboratory Service Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air Tahun 2020 - 2021
Table of Water Quality Laboratory Service Segment in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN PENDAPATAN Income Description	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Laboratorium / Laboratory Income	6.984	6.057	927	15,30%
Beban Laboratorium / Laboratory Load	-7.268	-6.669	599	8,98%
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	**-284**	**-612**	**328**	**53,59%**
Profitabilitas / Profitability	**-4,07%**	**-10,10%**		**6,04%**

Pendapatan dari segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2021 berjumlah Rp6,984 juta dengan beban operasi sebesar Rp284 juta. Hal ini masih menunjukkan kerugian operasi 284 juta dengan profitabilitas minus 4,07%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp927 juta atau 15,30%, meskipun beban Jasa Laboratorium Kualitas Air meningkat sebesar Rp7,268 juta atau 8,98%, setara dengan rugi operasi yang menurun sebesar Rp328 juta atau 53,59%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,04% dari sebelumnya minus 10,10% pada tahun 2020 menjadi minus 4,07% pada tahun 2020.

Revenue from the Water Quality Laboratory Services segment in 2021 amounted to Rp6.984 million with operating expenses of Rp284 million. This still shows an operating loss of 284 million with a profitability of minus 4.07%. When compared to 2020, the revenue for Water Quality Laboratory Services in 2021 will increase by Rp927 million or 15.30%, although the expenses for Water Quality Laboratory Services have increased by Rp7,268 million or 8.98%, equivalent to a decrease in operating loss of Rp328. million or 53.59%. This causes profitability in 2021 to increase by 6.04% from minus 10.10% in 2020 to minus 4.07% in 2020.

Air Minum dalam Kemasan (AMDK)

Deskripsi Usaha

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral".

Lokasi pengolahan AMDK dibangun pada Oktober 2009, kemudian pindah ke Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Juni 2012. Lokasi pengolahan AMDK diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada 29 Mei 2013.

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan pH antara 5 – 7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O3) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Biomagnetic serta Far Infrared untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H2O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan, serta mitra/stakeholdes Perusahaan.

Produktivitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Realisasi produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) masih di bawah rencana disebabkan oleh performa mesin yang belum maksimal karena terkendala pekerjaan rehabilitasi mesin produksi AMDK belum selesai.

Informasi perbandingan realisasi produksi AMDK tahun 2021 dengan RKAP 2021 dan realisasi tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Bottled Drinking Water (AMDK)

Company Information

Perum Jasa Tirta II is committed to providing drinking water for people in the Company's service areas, despite rising demand. This dedication is reflected in the supply of raw water for drinking water and bottled drinking water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral."

The AMDK processing site was built in October 2009 and then relocated in June 2012 to Jatiluhur Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency, West Java. On May 29, 2013, the Governor of West Java, Ahmad Heryawan, inaugurated the AMDK processing site.

Jatiluhur drinking water is demineralized drinking water with a pH of 5 - 7.5 and a TDS of less than 10 mg/liter. Jatiluhur bottled water is treated with a reverse osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O3) and ultraviolet light, and then treated with biomagnetic and far infrared technology to convert to hexagonal molecules. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H2O) molecules that are identical to the fluid molecules in human body cells, allowing it to be more easily absorbed by the body's cells and nutrients and oxygen to be transported more easily. Jatiluhur Demineralized Water's target market includes the Company's employees and their families, communities in the Company's work area, and the Company's partners/ stakeholders.

The packaged drinking water (AMDK) segment's productivity

The realization of Bottled Drinking Water (AMDK) production is still below plan due to engine performance that has not been optimized due to problems with the bottled drinking water machine rehabilitation work that has not been completed.

The following table compares AMDK production realization in 2021 to RKAP 2021 and realization in 2020:

Table of AMDK Production in 2021 / Table of AMDK Production in 2021

URAIAN Description	SATUAN Unit	RKAP 2021	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
					RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020
1	2	3	4	5	6=4:3	7=4:5
Galon 19 Liter / 19 Liter Gallon	Galon / Gallon	120,494	151,097	158,083	125.40	95.58
Botol 600 ml / 600 ml Bottle	Botol / Bottle	514,000	184,608	222,984	35.92	82.79
Botol 330 ml / 330 ml Bottle	Botol / Bottle	1,013,400	802,272	953,208	79.17	84.17
Gelas 240 ml / 240 ml Glass	Gelas / Glass	1,551,601	850,944	1,029,600	54.84	82.65

Realisasi produksi galon 19 liter tahun 2021 sebanyak 151.097 galon atau 125,40 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 120.494 galon dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 158.083 galon turun 4,42 %. Realisasi produksi botol 600 ml tahun 2021 sebanyak 184.608 botol atau 35,92 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 514.000 botol dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 222.984 botol turun 17,21 %.

The realization of 19 liter gallon production in 2021 was 151,097 gallons or 125.40% of the 2021 RKAP of 120,494 gallons and when compared to the realization in 2020 of 158,083 gallons, it decreased by 4.42%. The realization of 600 ml bottle production in 2021 was 184,608 bottles or 35.92% of the 2021 RKAP of 514,000 bottles and when compared to the realization in 2020 as many as 222,984 bottles, it decreased by 17.21%.

Realisasi produksi botol 330 ml tahun 2021 sebanyak 802.272 botol atau 79,17 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 1.013.400 botol dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 953.208 botol turun 15,83 %.

The realization of 330 ml bottle production in 2021 was 802,272 bottles or 79.17% of the 2021 RKAP of 1,013,400 bottles and when compared to the realization of tofu in 2020, 953,208 bottles decreased by 15.83%.

Realisasi produksi gelas 240 ml pada tahun 2021 sebanyak 850.944 gelas atau 54,84 % dari RKAP tahun 2021 sebanyak 1.551.601 gelas dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 1.029.600 gelas turun 17,35 %. Tidak tercapainya produksi AMDK selain dikarenakan performa mesin yang belum maksimal juga sebagian besar pelanggan terkena dampak Covid-19.

The realization of 240 ml glass production in 2021 was 850,944 glasses or 54.84% of the 2021 RKAP of 1,551,601 glasses and when compared to the realization in 2020 as many as 1,029,600 glasses, it decreased by 17.35%. The unattainable production of bottled drinking water was not only due to engine performance that had not been maximized, but most of the customers were also affected by Covid-19.

Pendapatan Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pada tahun 2021, Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mencatatkan Pendapatan sebesar Rp2,928 juta, menurun Rp757 juta atau 20,54% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp3,685 juta.

Revenue from Bottled Drinking Water (AMDK)

In 2021, the Bottled Drinking Water Segment (AMDK) recorded revenues of Rp2.928 million, a decrease of Rp757 million or 20.54% compared to 2020 of Rp3.685 million.

Profitabilitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Profitability of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment

Tabel Profitabilitas Segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Tahun 2020 - 2021
Table of Profitability of Bottled Drinking Water (AMDK) Segment in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN PENDAPATAN Income Description	REALISASI 2021 Realization 2021	REALISASI 2020 Realization 2020	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL Nominal	%
1	2	3	4	5=4:3
Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK) Revenue	2.928	3.685	-757	-20,54%
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK) Expenses	-5.690	-6.655	-965	-14,50%
Laba/(Rugi) Operasi / Profit/(Loss) Operation	**-2.762**	**-2,970**	**208**	**7%**
Profitabilitas / Profitability	**-94,33%**	**-80,60%**		**-13,73%**

Pendapatan dari segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2021 berjumlah Rp2,928 juta dengan beban operasi sebesar Rp5,690 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp2,762 juta dan profitabilitas sebesar minus 94,33%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp757 juta atau 20,54%, beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurun Rp965 juta atau 14,50%, dan rugi operasi menurun Rp208 juta atau 7,00%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2021 mengalami penurunan sebesar minus 13,73% dari sebelumnya minus 80,60% pada tahun 2020 menjadi minus 94,33% pada tahun 2021.

Revenue from the Bottled Water (AMDK) segment in 2021 amounted to Rp2.928 million with operating expenses of Rp5.690 million resulting in an operating loss of Rp2.762 million and a profitability of minus 94.33%. When compared to 2020, revenue for bottled drinking water (AMDK) in 2021 decreased by IDR 757 million or 20.54%, expenses for bottled drinking water (AMDK) decreased by IDR 965 million or 14.50%, and operating losses decreased by IDR 208 million or 7.00%. This causes profitability in 2021 to decrease by minus 13.73% from minus 80.60% in 2020 to minus 94.33% in 2021.

KINERJA ANAK PERUSAHAAN
SUBSIDIARY PERFORMANCE

PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasa Tirta Luhur bergerak dalam bidang jasa sistem penyediaan air minum dan konstruksi. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 2018, berlokasi di Bekasi, dengan kepemilikan PJT II sebesar 99,00%.

PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasa Tirta Luhur is engaged in the provision of water supply and construction services. The Company has been operating since 2018, located in Bekasi, with PJT II ownership of 99.00%.

Kinerja PT Jasa Tirta Luhur Tahun 2021
Performance of PT Jasa Tirta Luhur in 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Jumlah Aset / Total Assets	49.603	48.789	814	1,67
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	28.464	26.841	1.623	6,05
Jumlah Ekuitas / Total Equity	21.139	21.948	-809	-3,69
Pendapatan Usaha / Revenues	25.102	4.527	20.575	454,50
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	-23.179	-4.199	-18.980	452,01
Laba (Rugi) Bruto / Gross Profit (Loss)	1,923	328	1.595	486,28
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	-808	-4.289	3.481	-81,16

Pada tahun 2021, Pendapatan Usaha PT Jasa Tirta Luhur sebesar Rp25,102 juta meningkat 454,50% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,527 juta. Kenaikan Pendapatan Usaha diiringi dengan kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp23,179 juta, sehingga menghasilkan Laba Bruto dan Rugi Bersih Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp1,923 juta dan Rp808 juta.
Jumlah Aset PT Jasa Tirta Luhur tahun 2021 tercatat sebesar Rp49,603 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp28,464 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp21,139 juta.

In 2021, PT Jasa Tirta Luhur's Operating Income was Rp25.102 million, an increase of 454.50% compared to 2020 of Rp4.527 million. The increase in Operating Income was accompanied by an increase in Cost of Revenue by Rp23.179 million, resulting in Gross Profit and Net Loss for the Year of Rp1.923 million and Rp808 million, respectively. Total Assets of PT Jasa Tirta Luhur in 2021 was recorded at Rp49.603 million, Total Liabilities of Rp28.464 million, and Total Equity of Rp21.139 million.

Jumlah Aset PT Jasa Tirta Luhur tahun 2020 tercatat sebesar Rp48,789 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp26,841 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp21,948 juta.

Total Assets of PT Jasa Tirta Luhur in 2020 were recorded at Rp48.789 million, Total Liabilities amounted to Rp26.841 million, and Total Equity amounted to Rp21.948 million.

PT Tegar Mandiri Cemerlang
PT Tegar Mandiri Cemerlang merupakan entitas cucu yang bergerak di bidang jasa konsultan teknik (desain konstruksi fasilitas umum) dan telah beroperasi komersial sejak tahun 2018.

PT Tegar Mandiri Cemerlang
PT Tegar Mandiri Cemerlang is a second-tier subsidiary engaged in engineering consulting services (public facility construction design) and has been operating commercially since 2018.

Kinerja PT Tegar Mandiri Cemerlang Tahun 2021
Performance of PT Tegar Mandiri Cemerlang in 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Jumlah Aset / Total Assets	40.234	43.112	-2.878	-6,68
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	24.028	26.590	-2.562	-9,64
Jumlah Ekuitas / Total Equity	16.205	16.522	-317	-1,92
Pendapatan Usaha / Revenues	5.403	4.527	876	19,35
Beban Pokok Pendapatan / Cost of Revenues	-4.040	-4.199	159	-3,79
Laba (Rugi) Bruto / Gross Profit (Loss)	1.363	328	1.035	315,55
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Net Profit (Loss) for the Year	-317	-2.261	1.944	85,98

Pada tahun 2021, Pendapatan Usaha PT Tegar Mandiri Cemerlang sebesar Rp5,403 juta meningkat 19,35% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,527 juta. Sedangkan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp4,040 juta menurun 3,79% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4.199, sehingga menghasilkan Laba Bruto dan Rugi Bersih Tahun Berjalan masing-masing sebesar Rp1,363 juta dan Rp317 juta.

Jumlah Aset PT Tegar Mandiri Cemerlang tahun 2021 tercatat sebesar Rp40,234 juta, Jumlah Liabilitas sebesar Rp24,028 juta, dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp16,205 juta.

In 2021, PT Tegar Mandiri Cemerlang's business revenue of Rp5.403 million increased 19.35% compared to 2020 amounting to Rp4.527 million. While the cost of revenue of Rp4,040 million decreased by 3.79% compared to 2020 of Rp4.199, resulting in gross profit and net loss of the current year amounting to Rp1.363 million and Rp317 million.

The amount of assets of PT Tegar Mandiri Cemerlang in 2021 was recorded at Rp40.234 million, the amount of liabilities was Rp24.028 million, and the amount of equity was Rp16.205 million.

TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

This description of the financial performance was prepared based on the Company's Consolidated Financial Statements which have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries dated December 31, 2021 and its financial performance and consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Statements

Tabel Posisis Keuangan Tahun 2019 - 2021
Table of Financial Position in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Aset / Assets	**1.689.754**	**1.539.735**	**1.424.575**	**150.019**	**9,74**
Aset Lancar / Current Assets	747.880	774.230	765.188	-26.350	-3,40
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	941.874	765.505	659.387	176.369	23,04
Liabilitas / Liabilities	**408.547**	**322.800**	**236.231**	**85.747**	**26,56**
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	168.017	154.148	141.339	13.869	9,00
Liabilitas Jangka Panjang / Non Current Liabilities	240.530	168.652	94.892	71.878	42,62
Ekuitas / Equity	**1.281.207**	**1.216.935**	**1.188.344**	**64.272**	**5,28**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1,689,754 juta, meningkat Rp150,019 juta atau 9,74% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp1,539,735 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp408,547 juta, meningkat Rp85,747 juta atau 26,56% dari sebelumnya sebesar Rp322,800 juta pada tahun 2020. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1,281,207 juta, meningkat Rp64,272 juta atau 5,28% bila dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp1,216,935 juta.

In 2021, the Company's assets were recorded at Rp1.689.754 million, an increase of Rp150.019 million or 9.74% compared to 2020 of Rp1.539.735 million. The Company's liabilities were recorded at Rp408.547 million, an increase of Rp85.747 million or 26.56% from the previous Rp.322.800 million in 2020. The Company's equity was recorded at Rp1.281.207 million, an increase of Rp64.272 million or 5.28% compared to the realization in 2020 amounting to Rp1.216.935 million.

Aset

Pada tahun 2021, jumlah Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp1,689,754 juta yang terdiri dari 44,26% Aset Lancar dan 55,74% Aset Tidak Lancar. Nilai Jumlah Aset ini meningkat Rp150,019 juta atau 9,74% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,539,735 juta. Peningkatan Aset tersebut disebabkan karena kenaikan aset tidak lancar dari peningkatan aset tetap dan pajak dibayar di muka.

Asset

In 2021, the Company's total assets were recorded at Rp1.689.754 million, consisting of 44.26% Current Assets and 55.74% Non-Current Assets. Total Asset Value increased by Rp150,019 million or 9.74% compared to 2020 of Rp1.539.735 million. The increase in assets was due to an increase in non-current assets from an increase in fixed assets and prepaid taxes.

Aset Lancar

Current Assets

Tabel Aset Lancar Tahun 2019 - 2021
Table of Current Assets in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	452.330	518.162	597.052	-65.832	-12,70
Piutang Usaha / Trade Receivables	284.399	230.178	153.570	54.221	23,56
Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current	781	2.901	2.194	-2.120	-73,08
Persediaan / Inventories	1.903	2.074	2.548	-171	-8,24
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka / Prepaid Fees and Down Payment	8.467	20.915	9.824	-12.448	-59,52
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	**747.880**	**774.230**	**765.188**	**-26.350**	**-3,40**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Aset Lancar Perusahaan sebesar Rp747,880 juta, menurun 3,40% atau setara dengan Rp26.350 juta bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp774,230 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada pos jumlah biaya dibayar di muka dan uang muka sebesar 59,52% atau setara dengan Rp12,448 juta dan aset keuangan lancar lainnya sebesar 73,08% atau setara dengan Rp2,120 juta.

In 2021, the Company's Current Assets amounted to Rp747.880 million, a decrease of 3.40% or equivalent to Rp26.350 million when compared to Rp774.230 million in 2020. The decrease was mainly due to a decrease in the amount of prepaid expenses and advances by 59.52% or equivalent to Rp12.448 million and other current financial assets by 73.08% or equivalent to Rp2.120 million.

• Kas dan Setara Kas

• Cash and Cash Equivalent

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2020 - 2021
Table of Cash and Cash Equivalent in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Kas dan Bank / Cash and Bank	42.331	38.162	4.169	10,92
Deposito Berjangka / Time Deposit	410.000	480.000	-70.000	-14,58
Jumlah / Total	**452.331**	**518.162**	**-65.831**	**-12,70**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, kas dan setara kas sebesar Rp452,330 juta, menurun Rp65,832 juta atau 12,70% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp518,162 juta. Disebablkan oleh menurunnya deposito berjangka.

In 2021, cash and cash equivalents amounting to Rp452.330 million, decreased by Rp65.832 million or 12.70% when compared to 2020 amounting to Rp518.162 million. Caused by decreased time deposits.

- **Piutang Usaha**

  Pada tahun 2021, Piutang Usaha sebesar Rp284,399 juta, meningkat 54,221 juta atau 23.56% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp230,178 juta. Disebabkan oleh kenaikan piutang usaha yang belum difakturkan.

- **Trade Receivables**

  In 2021, Accounts Receivable of Rp284.399 million, an increase of 54.221 million or 23.56% when compared to 2020 of Rp230.178 million. Caused by an increase in trade receivables that have not been failed.

Tabel Piutang Usaha Tahun 2020 - 2021
Accounts Receivable Table 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Piutang Usaha yang telah difakturkan / Accounts Receivable that has been invoiced	72,321	64,532	7,789	12,07
Piutang Usaha yang belum difakturkan / Accounts Receivable that has not been invoiced	212,078	165,646	46,432	28,03
Jumlah / Total	**284,399**	**230,178**	**54,221**	**23,56**

*) Penyajian kembali / Restatement

- **Aset Keuangan Lancar Lainnya**

- **Other Current Financial Assets**

Tabel Aset Keuangan Lancar Lainnya Tahun 2020 - 2021
Table of Other Current Financial Assets in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Entitas Induk / Holding	431	3.585	-3.154	-87,98
Entitas Anak / Subsidiary	350	500	-150	-30,00
Jumlah / Total	**781**	**4.085**	**-3.304**	**-80,88**

*) Penyajian kembali / Restatement

Aset Keuangan Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar 781 juta, menurun Rp3,304 juta atau 80,88% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp4,085 juta. Penurunan ini disebabkan oleh piutang bunga deposito entitas induk perusahaan.

Other Current Financial Assets in 2021 amounted to 781 million, a decrease of Rp3.304 million or 80.88% when compared to 2020 of Rp4.085 million. This decrease was caused by interest receivable from the parent company's deposit.

• Persediaan

• Inventories

Tabel Persediaan Tahun 2020 - 2021
Table of Inventories in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Suku cadang / Spareparts	747	747	0.00	0.00
Bahan Baku AMDK / Raw Material AMDK	449	678	-229	-33.78
Bahan Kimia / Chemicals	268	438	-170	-38.81
Bahan & Perlengkapan Lain / Material & Other Supplies	215	112	103	91.96
Bahan Farmasi / Pharmaceuticals	230	199	31	15.58
Barang Jadi - AMDK / Finished Goods - AMDK	120	50	70	140
Bahan Makanan & Minuman / Food & Beverage	37	29	8	27.59
Bahan Perlengkapan Perhotelan / Hospitality Supplies	14	8	6	75.00
Bahan Perlengkapan Bar & Restoran / Bar & Restaurant Supplies	12	2	10	500.00
Provisi Penurunan Nilai / Provision of Impairment Value	(189)	(189)	0	0.00
Jumlah / Total	**1.903**	**2.074**	**-171**	**-8.24**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Persediaan tercatat sebesar Rp1,903 juta, menurun Rp171 juta atau 8,24% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2,074 juta. Penurunan tersebut berasal pada bahan baku AMDK dan bahan kimia, sisanya mengalami peningkatan. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perusahaan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

In 2021, Inventories were recorded at Rp1.903 million, a decrease of Rp171 million or 8.24% compared to 2020 which was Rp2.074 million. The decrease came from raw materials for bottled water and chemicals, the rest experienced an increase. Management believes that the Company's inventories are located in several locations, so the possibility of incurring losses at the same time for several locations is very small.

• Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

• Prepaid Expenses and Advances

Tabel Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Tahun 2020 - 2021
Table of Prepaid Expenses and Advances in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Biaya Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	6.593	8.011	-1.418	-17,70
Uang Muka / Advances	1.874	12.904	-11.030	-85,48
Jumlah / Total	**8.467**	**20.915**	**-12.448**	**-59,52**

*) Penyajian kembali / Restatement

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2021 tercatat sebesar Rp8,467 juta, menurun Rp12,448 juta atau 59,52% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp20,915 juta. Penurunan ini terutama berasal dari pembayaran uang muka ke KSO Putra Kencana sebesar Rp10,469 juta.

Prepaid Expenses and Advances in 2021 were recorded at Rp8.467 million, a decrease of Rp12.448 million or 59.52% when compared to 2020 of Rp20.915 million. This decrease was mainly due to the down payment to KSO Putra Kencana amounting to Rp10.469 million.

Aset Tidak Lancar

Non Current Assets

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2019 - 2021
Table of Non Current Assets in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Aset Hak Guna / Rights of Used Assets	12.544	6.253	-	6.291	100,61
Aset Tetap / Fixed Assets	752.743	599.694	540.399	153.049	25,52
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	74.712	57.433	39.018	17.279	30,09
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other non Current Asset	101.875	102.125	79.970	-250	-0,24
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Other non Current Asset	**941.874**	**765.505**	**659.387**	**-176.369**	**-23,04**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Aset Tidak Lancar tercatat sebesar Rp941,874 juta, meningkat Rp176,369 juta atau 23,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp765,505 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan seluruh komponen, yaitu Aset Hak Guna sebesar 100,61% atau setara dengan Rp6,291 juta, dan Aset Pajak Tangguhan sebesar 30,09% atau setara dengan Rp17,279 juta.

- **Aset Hak Guna**
  Aset hak guna merupakan dampak penerapan PSAK 73 yang berasal dari kegiatan sewa pembiayaan anak dan cucu perusahaan. Hal tersebut secara lebih rinci diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan kami.

- **Aset Tetap**
  Pada tahun 2021, Aset Tetap tercatat sebesar Rp752,743 juta, meningkat Rp153,049 juta atau 25,52% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp599,694 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan sarana, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, serta peralatan. Manajemen memiliki liabilitas dan aset kontijensi berupa tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas yang hingga saat ini telah diselesaikan, sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan.

- **Aset Pajak Tangguhan**
  Pada tahun 2021, Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp74,712 juta, meningkat Rp17,279 juta atau 30,09% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp57,433 juta.

- **Aset Tidak Lancar Lainnya**
  Pada tahun 2021, Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar Rp101,875 juta, menurun bila dibanding tahun 2020 sebesar Rp102,125.

In 2021, Non-Current Assets were recorded at IDR941.874 million, an increase of Rp176.369 million or 23.04% compared to 2020 of Rp765.505 million. The increase mainly came from an increase in all components, namely Right to Use Assets by 100.61% or equivalent to Rp6.291 million, and Deferred Tax Assets by 30,09% or equivalent to Rp17.279 million.

- **Right of Use Assets**
  Right to use assets is the impact of the implementation of PSAK 73 which is derived from the finance lease activities of the company's children and grandchildren. This is disclosed in more detail in the notes to our financial statements.

- **Fixed Assets**
  In 2021, Fixed Assets were recorded at Rp752.743 million, an increase of Rp153.049 million or 25.52% compared to 2020 amounting to Rp599.694 million. The increase was due to the addition of facilities, spare parts, installations & networks, transportation & heavy equipment, and equipment. Management has contingent liabilities and assets in the form of land owned by Perum Jasa Tirta II, located in Ciganea with a replacement land located in Kampung Bongas, which currently has been settled, so that the replacement land located in Kampung Bongas was recorded as a Company asset.

- **Deferred Tax Assets**
  In 2021, Deferred Tax Assets amounted to Rp74.712 million, an increase of Rp17.279 million or 30,09% compared to 2020 amounting to Rp46.308 million.

- **Other Non Current Assets**
  In 2021, Other Non-Current Assets amounted to Rp101.875 million, a decrease when compared to 2020 which was Rp102.125.

Liabilitas

Pada tahun 2021, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp408,547 juta yang terdiri dari 41,13% Liabilitas Jangka Pendek dan 58,87% Liabilitas Jangka Panjang. Nilai Jumlah Liabilitas ini meningkat Rp85,747 juta atau 26,56% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp322,800 juta. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari liabilitas imbalan pasca kerja.

Liabilities

In 2021, the Company's liabilities were recorded at Rp312.236 million, consisting of 46.68% Current Liabilities and 53.32% Non Current Liabilities. Total Liabilities increase by Rp76.005 million or 32.17% compared to 2020 amounting to Rp236.231 million. The increase in liabilities mainly came from the post retirement lisbilities.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2019 - 2021
Table of Current Liabilities in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Utang Usaha / Accounts payable	12.297	46.542	39.620	-34.245	-73,58
Beban Akrual / Accrued Expenses	37.638	21.379	33.271	16.259	76,05
Utang Pajak / Tax Payables	26.306	25.987	21.411	319	1,23
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Currant Financial Liabilities	85.753	58.333	47.037	27.420	47,01
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / Short-Term Contract Liabilities	6.023	1.907	-	4.116	215,84
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Currant Liabilities	**168.017**	**154.148**	**141.339**	**13.869**	**9,00**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan sebesar Rp168,017 juta, meningkat 9,00% atau setara dengan Rp13,869 juta bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp154,148 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos liabilitas kontrak jangka pendek sebesar 215,84% atau setara dengan Rp4,116 juta dan beban akrual sebesar 76,05% atau setara dengan Rp16,259 juta.

In 2021, the Company's Short-Term Liabilities amounted to Rp168.017 million, an increase of 9.00% or equivalent to Rp13.869 million compared to that of 2020 which was Rp154.148 million. The increase was mainly due to an increase in short-term contract liabilities by 215.84% or equivalent to Rp4.116 million and accrued expenses by 76.05% or equivalent to Rp16.259 million.

• **Utang Usaha / Trade Payables**

• Trade Payables

Tabel Utang Usaha Tahun 2020 - 2021
Table of Trade Payables in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Pihak Ketiga / Third Parties	6.742	32.657	-25.915	-79,36
Pihak Berelasi / Related Parties	5.555	13.885	-8.330	-59,99
Jumlah / Total	**12.297**	**46.542**	**-34.245**	**-73,58**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Utang Usaha sebesar Rp12,297 juta, menurun Rp34,245 juta atau 73,58% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp46.542 juta. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 79,36% atau setara dengan Rp25.915 juta.

In 2021, Trade Payables amounted to Rp12.297 million, a decreaser of Rp34.245 million or 73,58% compared to 2020 amounting to Rp46.542 million. The decrease was mainly derived from an increase in trade payables to related parties by 79,36% or equivalent to Rp25.915 million.

• **Beban Akrual**

• Accrued Expenses

Tabel Beban Akrual Tahun 2020 - 2021
Table of Accrued Expenses in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Beban Pegawai / Employee Expenses	22.505	14.477	8.028	55.45
Beban Non Pegawai / Non Employee Expenses	15.133	6.902	8.231	119.26
Jumlah / Total	**37.638**	**21.379**	**16.259**	**76.05**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Beban Akrual sebesar Rp37,638 juta, meningkat Rp16,259 juta atau 76,05% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp21,379 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya beban pegawai yang masih harus dibayarkan per 31 Desember 2021.

In 2021, Accrued Expenses amounted to Rp37.638 million, an increase of Rp16.259 million or 76,05% compared to 2020 of Rp21.379 million. The increase mainly came from the increase in employee expenses that still had to be paid as of December 31, 2021.

- **Utang Pajak**
  Pada tahun 2021, Utang Pajak sebesar Rp26,306 juta, meningkat Rp319 juta atau 1,23% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp25,987 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan Titipan PPN.

- **Tax Payable**
  In 2021, tax payable amounted to Rp26.306 million, an increase of Rp319 million or 1.23% compared to 2020 amounting to Rp25.987 million. This increase was mainly derived from the increase in VAT.

- **Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya**

- **Other Short-Term Financial Liabilities**

Tabel Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020 - 2021
Table of Other Short-Term Financial Liabilities in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Utang Lain-lain / Other Payables	58.959	18.356	40.603	221,20
Pendapatan Diterima Dimuka / Prepaid Income	29.794	39.977	-13.183	-32,98
Jumlah / Total	**85.753**	**58.333**	**27.420**	**47,01**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp85,753 juta, meningkat Rp27.420 juta atau 47,01% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp58.333 juta. Kenaikan ini disebabkan dari Utang Lain-Lain sebesar 221,20%.

In 2021, Other Current Financial Liabilities amounted to Rp85.753 million, an increase of Rp27.420 million or 47,01% compared to 2020 amounting to Rp58.333 million. This increase was due to Other Debt of 221,20%.

Liabilitas Jangka Panjang

Non Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2019 - 2021
Table of Non Current Liabilities in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Utang Sewa Jangka Panjang / Long term lease debt	6.697	4.350	-	2.347	53,95
Pendapatan Diterima Dimuka / Prepaid income	9.155	-	-	9.155	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / Post Employment Benefits	212.748	150.037	72.762	62.711	41,80
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Non Current Liabilities	11.930	14.265	22.130	-2.335	-16,37
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total of Long-Term Liabilities	**240.530**	**168.652**	**94.892**	**71.878**	**42,62**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan sebesar Rp240,530 juta, meningkat 42,62% atau setara dengan Rp71,878 juta bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp168,652 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja tahun 2021.

In 2021, the Company's Long-Term Liabilities amounted to Rp240.530 million, an increase of 42.62% or equivalent to Rp71.878 million compared to 2020 which was Rp168.652 million. The increase was mainly due to post-employment benefits liabilities in 2021.

- **Liabilitas Imbalan Pasca Kerja**
  Pada tahun 2021, Liabilitas Imbalan Pasca Kerja sebesar Rp212,748 juta, meningkat Rp62,711

- **Post-Employment Benefits Liabilities**
  In 2021, Post-Employment Benefits Liabilities amounted to Rp212.748 million, increase by

juta atau 41,80% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp150,037 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian aktuaria pembayaran imbalan yang digunakan aktuaris dalam menghitung liabilitas imbalan kerja.

Rp62.711 million or 41.80% compared to 2020 of Rp150.037 million. This increase was mainly due to the increase in benefit payment loss used by actuaries in calculating employee benefit liabilities.

- **Liabilitas Jangka Panjang Lainnya**
  Pada tahun 2021, Liabilitas Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp11,930 juta. Pencatatan Liabilitas Jangka Panjang Lainnya merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang belum terselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal.

- **Other Non Current Liabilities**
  In 2021, Other Non Current Liabilities amounted to Rp11.930 million. The recording of Other Non-Current Liabilities is a reclassification of the outstanding balance of trade payables that was not yet settled and paid in normal operating cycle.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2019 - 2021
Table of Equity in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Modal Pemerintah / Government Capital	164,548	164,548	164,548	0	0
Cadangan Umum / General Reserves	13,943	13,943	13,943	0	0
Cadangan Bertujuan / Appropriated Reserves	1,027,001	1,027,001	885,253	0	0
Penghasilan Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income	-135,816	-92,641	-30,586	-43.175	46.60
Komponen Ekuitas Lainnya / Other Equity Components	194	194	194	0	0
Saldo Laba / Retained Earnings	203,264	95,619	145,580	107,645	112.58
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Total Equity Attributable to Owners of Parent Entity	1,273,134	1,208,664	1,178,932	64,470	5.33
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali / Total Equity Attributable to Non Controlling Interest	8,073	8,272	9,412	-198	-2,39
Jumlah Ekuitas / Total Equity	**1,281,207**	**1,216,935**	**1,188,344**	**64,272**	**5.28**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, jumlah Ekuitas sebesar Rp1,281,207 juta, meningkat Rp64,272 juta atau 5,28% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1,216,935 juta. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Saldo Laba sebesar 112,58% atau setara dengan Rp107,645 juta dan kenaikan Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar 5,33% atau setara dengan Rp64,470 juta.

In 2021, total Equity is Rp1.281.207 million, an increase of Rp64.272 million or 5.28% compared to 2020 of Rp1.216.935 million. The increase came from an increase in retained earnings by 112.58% or equivalent to Rp107.645 million and an increase in Equity Attributable to Owners of the Parent Entity by 5.33% or equivalent to Rp64.470 million.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS PROFIT OF LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019 - 2021
Table of Consolidated Income and Other Comprehensive Income in 2019 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
				NOMINAL	%
Pendapatan Usaha / Operating Revenues	856.518	839.387	816.473	17.131	2,04
Beban Usaha / Operating Expenses	-544.687	-518.623	-472.146	26.064	5,02
Laba Usaha / Profit From Operations	311.831	320.764	344.326	-8.933	2,78
Beban Promosi dan Pemasaran / Promotion and Marketing Expenses	-4.731	-5.371	-14.424	640	11,92
Beban Administrasi dan Umum / General and Administration Expenses	-168.651	-164.637	-167.799	4.014	2,44
Pendapatan Lain-lain / Other Income	15.88	28.246	56.330	-17.241	-61,04
Beban Lain-lain / Other Expenses	-9.754	-35.513	-20.619	30.641	86,28
Laba Sebelum Pajak / Profit (Loss) Before Tax	144.582	143.489	197.814	1.093	0,76
Beban Pajak Penghasilan / Income Tax Expense	-37.135	-30.254	-43.818	-6.881	-22,74
Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit	107.446	113.235	153.996	-5.789	-5,11
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	-43.175	-62.055	1.177	18.880	-30,42
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	**64.272**	**51.180**	**155.173**	**13.092**	**25,58**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Pendapatan Usaha sebesar Rp856,518 juta, meningkat Rp17,131 juta atau 2,04% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp839,387 juta.

In 2021, Revenues amounted to Rp856.518 million, an increase of Rp17.131 million or 2.04% compared to 2020 amounting to Rp839.387 million.

Beban Pokok di tahun 2021 meningkat Rp26,064 juta atau 5,02% dari sebelumnya Rp518,623 juta pada tahun 2020 menjadi Rp544,687 juta pada tahun 2021.

Cost of goods in 2021 increased by Rp26.064 million or 5.02% from the previous Rp518.623 million in 2020 to Rp544.687 million in 2021.

Sementara itu, Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2021 sebesar Rp107,446 juta, menurun Rp5,789 juta atau 5,11% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp113,235 juta. Laba Komprehensif Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp64,272 juta, meningkat 25,58% atau setara dengan Rp13,092 juta bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp51,180 juta.

Meanwhile, Net Profit for the Year in 2021 was Rp107.446 million, a decrease of Rp5.789 million or 5.11% compared to 2020 amounting to Rp113.235 million. Comprehensive Income for the Year was recorded at Rp64.272 million, an increase of 25.58% or equivalent to Rp13.092 million compared to 2020 amounting to Rp51.180 million.

Pendapatan Usaha

Revenues

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2020 - 2021
Table of Revenues in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Pendapatan Listrik / Electricity Revenues	454.556	448.611	5.945	1.33
Pendapatan Air Baku / Raw Water Revenues	292.436	302.949	-10.513	-3.47
Pendapatan Air Bersih / Clean Water Revenues	8.918	8.942	-24	-0.27
Pemanfaatan Lahan / Land Utilization	60.802	57.278	3.524	6.15
Pariwisata / Tourism	10.655	9.102	1.553	17.06
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water (AMDK)	2.928	3.685	-757	-20.54
Laboratorium / Laboratory	6.984	6.057	927	15.30
Usaha Lainnya / Other Businesses	19.239	2.763	16.476	596
Jumlah / Total	**856.518**	**839.387**	**17.131**	**2.04**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Perusahaan membukukan Pendapatan usaha sebesar Rp856,518 juta, meningkat 2,04% atau setara dengan Rp17,131 juta bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp839,387 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Pendapatan Listrik, Pemanfaatan Lahan, Pariwisata dan Laboratorium dan Usaha Lainnya..

Di sisi lain, Perusahaan membukukan penurunan atas Pendapatan Lahan, Air Baku, Pariwisata, dan Air Minum Dalam Kemasan.

In 2021, the Company booked revenues of Rp815.627 million, an increase of 0.34% or equivalent to Rp2.746 million compared to 2020 of Rp839.387 million. Such increase was caused by The increase was caused by Electricity Revenue, Land Use, Tourism and Laboratories and other businesses.

On the other hand, the Company recorded an decrease in Land Revenue, Raw Water, Tourism, and Laboratory.

Beban Usaha

Operating Expenses

Tabel Beban Usaha Tahun 2020 - 2021
Table of Operating Expenses in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Beban Listrik / Electricity Expenses	94.475	101.634	-7.159	-7,04
Beban Air Baku / Raw Water Expenses	383.371	342.359	41.012	11,78
Beban Air Bersih / Clean Water Expenses	9.800	25.261	-15.461	61,21
Beban Pemanfaatan Lahan / Land Utilization Expenses	8.447	12.266	-3.819	-31,13
Beban Pariwisata / Tourism Expenses	18.687	23.147	-4.460	-19,27
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water Expenses	5.690	6.655	-965	-14,50
Beban Laboratorium / Laboratory Expenses	7.268	6.669	599	8,98
Beban Usaha Lainnya / Other Operating Expenses	16.949	632	16.317	2.581,80
Jumlah / Total	**544.687**	**518.623**	**26.064**	**5,03**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Beban Usaha Perusahaan sebesar Rp544,687 juta, meningkat Rp26,064 juta atau setara dengan 5,03% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp518,623 juta. Peningkatan ini berasal dari kenaikan Air Baku, Laboratorium dan Usaha Lainnya.

In 2021, the Company's Operating Expenses amounted to Rp544.687 million, an increase of Rp26.064 million or equivalent to 5,03% when compared to 2020 which was Rp518.623 million. This increase came from the increase in Raw Water, Laboratories and Other Businesses.

Laba Kotor

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Laba Kotor sebesar Rp311,831 juta, menurun Rp8,933 juta atau 2,78% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp320,764 juta. Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya Beban Usaha sebesar Rp26.064 juta atau 5,03% di tahun 2021.

Gross Profit

In 2021, the Company recorded Gross Profit of Rp311.831 million, a decrease of Rp8.933 million or 2,78% compared to 2020 of Rp320.764 million. This decrease was in line with the increasing in Operating Expenses of Rp26.064 million or 5.03% in 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatatkan Laba Sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp144,582 juta, menurun Rp1.093 juta atau 0,76% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp143,489 juta.

Profit Before Income Tax

In 2021, the Company recorded Profit Before Income Tax of Rp144.582 million, a decrease of Rp1.093 million or 0,76% compared to 2020 of Rp143.489 million.

Beban Pajak

Pada tahun 2021, Beban Pajak sebesar Rp37,136 juta, meningkat Rp6,882 juta atau 22,75% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp30,254 juta.

Tax Expenses

In 2021, Tax Expense was Rp37.136 million, a increase of Rp6.882 million or 22,75% compared to 2020 which was Rp30.254 million.

Laba Bersih Tahun Berjalan
Pada tahun 2021, Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp107,446 juta, menurun Rp5,789 juta atau 5,11% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp113,235 juta.

Penghasilan Komprehensif Lain
Pada tahun 2021, Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan sebesar minus Rp43,174 juta, meningkat Rp18.881 atau 30,43% bila dibandingkan tahun 2020 minus sebesar Rp62,055 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh Peningkatan keuntungan aktuaria tahun 2020.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Pada tahun 2021, Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp64,272 juta, meningkat Rp13,092 juta atau 25,58% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp51,180 juta. Peningkatan ini sejalan peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar 30,43% atau setara dengan Rp18.881 juta.

Current year's net profit
In 2021, the current year's net profit of Rp107.446 million, decreased by Rp5.789 million or 5.11% when compared to 2020 amounting to Rp113.235 million.

Other comprehensive income
In 2021, another year's comprehensive income was minus Rp43.174 million, an increase of Rp18.881 or 30.43% when compared to 2020 minus amounting to Rp62,055 million. This increase was caused by increasing actuarial profits in 2020.

Comprehensive Profit of the current year
In 2021, the current year's comprehensive profit was Rp64,272 million, an increase of Rp13,092 million or 25.58% when compared to 2020 amounting to Rp51,180 million. This increase is in line with an increase in other comprehensive income by 30.43% or equivalent to Rp18,881 million.

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flow Statements

Tabel Arus Kas Konsolidasian Tahun 2020 - 2021
Table of Consolidated Cash Flow in 2020 - 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	2021	2020*	PERTUMBUHAN 2020 - 2021 Growth in 2020 - 2021	
			NOMINAL	%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities	110.950	62.029	48.921	78,87
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Flows Used for Investing Activities	-169.713	-110.200	-59.513	54,00
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows (Used for) Financing Activities	-7.068	-30.719	23.651	-76,99
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalent	-65.831	-78.890	13.059	-16,55
Kas dan Setara Kas - Saldo Awal / Cash and Cash Equivalent - Beginning Balance	518.162	597.052	-78.890	-13,21
Kas dan Setara Kas - Saldo Akhir / Cash and Cash Equivalent - Ending Balance	**452.331**	**518,162**	**-65.831**	**-12,70**

*) Penyajian kembali / Restatement

Pada tahun 2021, Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp110,950 juta, meningkat Rp62,029 juta atau 78,87% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp62,029 juta. Penurunan ini disebabkan oleh faktor penurunan jumlah penerimaan dari pelanggan dan peningkatan pembayaran ke dewas, direksi dan karyawan.

In 2021, the Company obtained net cash flow from operating activities of Rp110.950 million, an decrease of Rp62.029 million or 78,87% compared to 2020 of Rp62.029 million. This increase was due to a decrease in total receipts from customers and an increasing payment to comisioners, directors, employees.

Arus kas bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp169,713 juta, meningkat Rp59.513 juta atau 54,00% dari tahun 2020 sebesar Rp110.200 juta. Hal ini disebabkan oleh perolehan aset tetap.

Net cash flow used for investing activities in 2021 was recorded at Rp169.713 million, decreased by Rp59.513 million or 54,00% from 2020 of Rp110.200 million. This was caused by a acquisition of fixed assets.

Sementara Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp7,068 juta, menurun Rp23.651 juta atau 76,99% bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp38,584 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran dividen yang diberikan kepada pemilik modal.

Meanwhile, Net Cash Flows Used for Financing Activities amounted to Rp7.068 million, an decrease of Rp23.651 million or 76,99% compared to 2020 amounting to Rp38.584 million. This increase was due to a dividend payments given to investors.

KEMAMPUAN MEMENUHI KEWAJIBAN, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

ABILITY TO MEET OBLIGATIONS, RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL, AND COMPANY PROFITABILITY

Selama tahun 2021, Perusahaan memiliki tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas Perusahaan. Tingkat kolektibilitas piutang meningkat dengan lebih cepatnya piutang tertagih, sedangkan profitabilitas perusahaan menurun dari tahun sebelumnya.

In 2021, the Company showed good ability to fulfill its obligations. This can be seen from the company's liquidity and solvency ratios. Receivables collectibilitylevel increased in line with fast receivables collection, while the profitability of the company decreased from the previous year.

Kemampuan Memenuhi Kewajiban

Kemampuan memenuhi kewajiban Perusahaan untuk jangka pendek tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang dimiliki. Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan tentang kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Tingkat likuiditas tercermin dalam Rasio Kas dan Rasio Lancar. Sementara kemampuan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan dicerminkan melalui rasio solvabilitas, yaitu Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) dan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER).

Ability to Meet Obligations

The ability to meet the Company's short-term obligations is reflected on its financial ratios. Liquidity is a ratio that reflects the Company's ability to meet short- term obligations with current assets owned. The level of liquidity is reflected on the Cash Ratio and Current Ratio. Meanwhile, generally, the ability to meet obligations is reflected on the solvency ratio, namely the Debt to Assets Ratio (DAR) and Debt to Equity Ratio (DER).

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Tabel Rasio Likuiditas Tahun 2019 - 2021
Table of Liquidity Ratio in 2019 - 2021

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*
Rasio Kas / Cash Ratio	269,22	336,15	422,43
Rasio Lancar / Current Ratio	445,12	502,26	541,38

*) Penyajian kembali / Restatement

- **Rasio Kas**
  Rasio Kas merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi utang lancar, dengan kata lain rasio kas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar pada tahun buku yang bersangkutan. Rasio Kas tahun 2021 sebesar 269,22%, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 336,15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas menurun di tahun 2021.

- **Rasio Lancar**
  Rasio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu Perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar tahun 2021 sebesar 445,12 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 502,26. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset Lancar yang tersedia menurun di tahun 2020.

- **Cash Ratio**
  Cash ratio is a ratio that shows the cash position that can cover current debt, in other words, the cash ratio is a ratio that describes the ability of cash owned in managing current liabilities in the relevant financial year. Cash Ratio in 2021 is 269.22%, a decrease compared to 2020 of 336.15%. This shows that the Company's ability to settle its short-term obligations using Cash and Cash Equivalents will decline in 2021.

- **Current Ratio**
  The ratio is the ratio between current assets and current liabilities and is the most commonly used measure to determine the ability of a company to meet its short-term liabilities. The current ratio in 2021 is 445.12, lower than in 2020 at 502.26. This shows that the Company's ability to pay its short-term obligations using available Current Assets decreased in 2020.

Rasio Solvabilitas

Perusahaan menggunakan Rasio Solvabilitas untuk mengukur jumlah Aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR).

Solvency Ratio

The Company uses Solvency Ratio to measure total Company Assets financed by debt. The solvency ratio used is Debt to Equity (DER) ratio and Debt to Total Assets (DAR) ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas Tahun 2019 - 2021
Table of Solvability Ratio in 2019 - 2021

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) / Liabilities/Debt to Equity Ratio	31,89	26,53	19,88
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) / Liabilities /Debt to Asset Ratio	24,18	20,96	16,58

*) Penyajian kembali / Restatement

- **Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER)**
  Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebesar 31,89%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 26,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan Ekuitas yang tersedia menurun dari tahun 2020 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

- **Liabilities/Debt to Equity (DER) ratio**
  The Liability to Equity Ratio (DER) until the end of 2021 was recorded at 31.89%, higher than in 2020 which was recorded at 26.53%. This shows that the ability to pay the company's obligations using available Equity decreased from 2020 due to the risk of debt default being greater than the previous year.

- **Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR)**
  Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) tahun 2021 tercatat sebesar 24,18%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 20,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan aset menurun dari tahun 2020 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

- **Liabilities/Debt to Assets Ratio (DAR)**
  The Liabilities to Assets Ratio (DAR) in 2021 was recorded at 24.18%, higher than 2020 at 20.96%. This shows that the ability to pay the company's obligations using assets decreased from 2020 due to the risk of debt default being greater than the previous year.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pengukuran tingkat kolektibilitas piutang Perum Jasa Tirta II dilakukan menggunakan rasio Perputaran Persediaan, Periode Penagihan, dan Perbandingan Modal Sendiri terhadap Total Ekuitas.

Receivable Collectability Rate

Measurement of receivables collectability rate of Perum Jasa Tirta II is carried out using Inventory Turnover ratio, Collection Period, and Ratio of Owned Capital to Total Equity.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun 2019 - 2021
Table of Receivables Collectability Rate in 2019 - 2021

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*
Perputaran Persediaan (dalam satuan hari) / Inventory Turnover (in units of days)	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / Billing Period (in units of days)	121	100	69
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (dalam %) / Own Capital Ratio to Total Assets (in %)	75,82	79,04	83,42

*) Penyajian kembali / Restatement

Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur periode yang diperlukan dalam menjual persediaan Perusahaan. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2021 adalah 1, sama dengan tahun 2020 dan 2019.

Inventory Turnover

Inventory Turnover is the ratio used to measure the period required to sell the Company's inventory. The Inventory Turnover Ratio in 2021 was 1, the same as 2020 and 2019.

Periode Penagihan

Periode Penagihan adalah rasio yang mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Rasio Periode Penagihan tahun 2021 adalah 121 hari, lebih lambat dibandingkan tahun 2020 yang memakan waktu selama 100 hari.

Collection Period

Collection Period is a ratio that measures the average period needed to collect receivables (in day). Collection Period Ratio in 2021 was 121 days, slower than in 2020 which was recorded at 100 days.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah rasio yang menunjukkan tingkat total aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2021 adalah 75,82%, menurun dari tahun 2020 sebesar 79,04%.

Equity to Total Assets Ratio

Equity to Total Assets ratio is a ratio that shows the level of total assets financed by equity. Equity to total assets ratio in 2021 was 75,82%, decrease from 2020 of 79,04%.

Profitabilitas Usaha

Profitabilitas usaha dihitung untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Perusahaan. Adapun perhitungan profitabilitas usaha menggunakan Rasio Imbalan kepada Pemilik Modal (Return on Equity), Imbalan Investasi (Return on Investment), dan Laba terhadap Aset (Return on Asset).

Profitability

Profitability is calculated to measure the Company's ability to increase profits as well as the level of business efficiency and profitability achieved by the Company. The calculation of profitability uses the Return on Equity, Return on Investment, and Return on Assets.

Tabel Profitabilitas Usaha Tahun 2019 - 2021
Table of Profitability in 2019 - 2021

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / Return on Equity	9,53	9,46	15,06
Imbalan Investasi (ROI) / Return on Investment	13,04	12,69	16,97
Imbalan Aset (ROA) / Return on Asset	8,56	9,32	13,89

*) Penyajian kembali / Restatement

Imbalan Kepada Pemilik Modal

Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh Pemilik Modal. Pada tahun 2021, nilai ROE sebesar 9,53%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,46%.

Imbalan Investasi

Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola investasi untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2021, nilai ROI sebesar 13,04%, naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,69%.

Imbalan Aset

Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2021, nilai ROA sebesar 8,56%, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 9,32%.

Return on Equity

Return on Equity (ROE) shows the ability of equity to generate profits for all Investorss. In 2021, the ROE value was 19.53%, increase compared to 2020 of 9.46%.

Return on Investment

Return on Investment (ROI) shows the ability of the Company to manage investments to generate profits. In 2021, the ROI value was 13.04%, up compared to 2020 of 12.69%.

Return on Assets

Return on Assets (ROA) shows the ability of the Company to manage assets to generate profits. In 2021, the valueBof ROA was 8.56%, a decrease compared to 2020 of 9.32%.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan, Pendapatan Bersih dan Kinerja Perusahaan

Perusahaan tidak dipengaruhi oleh volatilitas harga- harga komoditas global dan perusahaan juga belum menerapkan kebijakan lindung nilai (hedging).

Oleh karena itu dampak perubahan harga komoditas tidak berpengaruh terhadap penjualan, pendapatan bersih dan kinerja perusahaan.

Impact of Price Change on Sales, Net Revenue and Company Performance

The company is not affected by the volatility of global commodity prices and the company has not implemented a hedging policy.

Therefore, the impact of changes in commodity prices has no effect on sales, net income and company performance.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Rincian Struktur Modal

Permodalan yang kuat sangat diperlukan untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan pangsa pasat yang dimiliki. Struktur modal Perum Jasa Tirta II untuk tahun 2021 dapat terlihat dari jumlah Aset yang dibiayai melalui Liabilitas sebesar 24,18%. Porsi liabilitas dalam struktur modal Perusahaan mengalami peningkatan dari semula sebesar 20,96% pada tahun 2020 menjadi 24,18% pada tahun 2021.

Details of Capital Structure

Strong capital is required to support business expansion and maintain market share owned. The capital structure of Perum Jasa Tirta II for 2021 can be seen from the amount of assets financed through liabilities at 24.18%. The portion of liabilities in the Company's capital structure increased from originally 20.37% in 2020 to 24.18% in 2021.

Tabel Struktur Modal Tahun 2019 - 2021
Table of Capital Structure in 2019 - 2021

(dalam % / in %)

URAIAN / Description	2021	2020*	2019*
Liabilitas / Liabilities	24,18	20,96	16,58
Ekuitas / Equity	75,82	79,04	83,42
Aktiva / Assets	100,00	100,00	100,00

*) Penyajian kembali / Restatement

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Manajemen secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi Pemilik Modal dengan senantiasa mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Management Policy on Capital Structure

The management actively and routinely reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns for the Investors by always considering the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure as well as future capital requirements.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Ekuitas, transaksi material diklasifikasikan sebagai transaksi yang bernilai di atas 20% ekuitas. Selama tahun 2021, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak mana pun.

Based on Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 concerning Material Transactions and Changes in Equity Activities, material transactions are classified as transactions with of above 20% of equity. During 2021, the Company did not have a material commitment for investment in capital goods with any party.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2021
CAPITAL GOODS INVESTMENT IN 2021

Untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan konsumen, Perusahaan melakukan pengadaan barang modal yang dibukukan sebagai aset tetap. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan memiliki investasi barang modal sebesar Rp1,321,898 juta yang terdiri dari tanah, sarana, bangunan, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat dan perabot & peralatan.

To improve capacity and customer service, the Company procures capital goods which are recorded as fixed assets. During 2021, the company has a capital goods investment of Rp1,321,898 million consisting of land, facilities, buildings, spare parts, installations & networks, transportation & heavy equipment and furniture & equipment.

Tabel investasi Barang Modal Tahun 2021
Table of Capital Goods Investment in 2021

(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)

URAIAN / Description	SUMBER DANA Fund Source	MATA UANG Currency	NILAI Value*
Tanah / Land	Internal	Rupiah	16.635
Sarana / Facilities	Internal	Rupiah	21.678
Bangunan / Building	Internal	Rupiah	213.002
Suku Cadang / Spare Parts	Internal	Rupiah	3.828
Instalasi & Jaringan / Installation & Network	Internal	Rupiah	764.893
Alat Angkut & Alat Berat / Transportation & Heavy Equipment	Internal	Rupiah	105.997
Perabot & Peralatan / Furniture & equipment	Internal	Rupiah	195.864
Aset Tanaman Konservasi / Conservation Plant Assets	Internal	Rupiah	
Nilai Buku / Book value			**702.293**
*) Catatan: Nilai Buku merupakan hasil biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. / Note: Book Value is the result of acquisition cost less accumulated depreciation.			

Tujuan investasi barang modal ini adalah untuk meningkatkan operasional layanan dan fasilitas pendukung guna mewujudkan layanan prima bagi pelanggan. Seluruh pengadaan barang modal tersebut menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran sehingga Perusahaan tidak memiliki risiko mata uang asing.

The purpose of this capital goods investment is to improve operational services and supporting facilities in order to provide excellent service for customers. All capital goods procurement uses the Rupiah currency as a means of payment so that the Company does not have foreign currency risk.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO REPORTING DATE

1. Laporan reviu atas permasalahan tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perusahaan kepada PT PLN (Persero) Group dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Surat Ketetapan Lebih/Kurang bayar (SKPKB/LB) dari Direktorat Jendral Pajak tanggal 22 April 2022.

Kedua informasi dan fakta tersebut diungkap secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) poin 39 laporan auditor independen atas laporan keuangan Perusahaan yang terdapat di bagian lampiran laporan tahunan ini.

1. Review report on the issue of the Company's Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) billing to PT PLN (Persero) Group from the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
2. Decision Letter of Over/Underpayment (SKPKB/LB) from the Directorate General of Taxes dated April 22, 2022.

Both information and facts are disclosed in detail in the Notes to Financial Statements (CALK) point 39 of the independent auditor's report on the Company's financial statements contained in the appendix to this annual report.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Selama tahun 2021, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan di tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

During 2021, the Company has fulfilled all of its obligations as a corporate taxpayer. The tax contributions from the Company in 2020 and 2021 are as follows:

Tabel Kontribusi Kepada Negara (Pembayaran Pajak) Tahun 2020 – 2021
Table of Contribution to the Country (Tax Payment) in 2020 – 2021

JENIS PAJAK / Tax Type	2021	2020
A. Kontribusi Pada negara (Pajak) / Contribution to the Country (Tax)	**186,848,274,535.00**	**165,156,821,899**
Pajak Penghasilan (PPh) / income Tax		
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	18,762,597,331.00	18,994,200,214
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	1,829,682,780.00	1,444,409,911
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	1,987,330,955.00	1,982,261,684
PPh Pasal 4 ayat 2 / Income Tax Article 4 paragraph 2	3,246,370,859.00	2,418,590,611
PPh Pasal 25 / Income Tax Article 25	75,139,487,628.00	78,044,558,160
	100,965,469,553.00	**102,884,020,580**
Pajak Pertambahan nilai (PPn)/ Value Added Tax (vAT)		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Value Added Tax (VAT)	38,842,217,823.00	28,383,519,759
PPN Wajib Pungut / VAT Taxpayer	26,343,769,487.00	21,454,605,030
	65,185,987,310.00	**49,838,124,789**
Pajak Daerah / Regional Tax		
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tenant / Street Lighting Tax (PPJ) Tenant	8,278,972,784.00	3,434,845,104
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemakaian Sendiri . Street Lighting Tax (PPJ) for Self Use	227,817,806.00	184,142,867
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Penduduk / Residential Street Lighting Tax (PPJ)	35,875,439.00	24,157,636
Pajak Air Permukaan / Surface Water Tax	2,666,677,300.00	
Pajak Hotel, Restoran, Hiburan & Parkir / Hotel, Restaurant, Entertainment & Parking Tax	1,037,913,584.00	648,277,107
Pajak Bumi & Bangunan (PBB) / Land & Building Tax (PBB)	8,449,560,759.00	8,143,253,816
	20,696,817,672.00	**12,434,676,530**

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECT

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha industri listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun- tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Telah disepakatinya kesepakatan awal Fase I antara Amerika Serikatdan Tiongkokuntukmenghentikanperang dagang diprediksi akan menjadi salah satu indikator global bagi Indonesia dalam menyambut prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4% - 6,0%. Pemerintah optimis bahwa target tersebut akan tercapai didorong oleh beberapa hal, seperti revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa.

The Company is optimistic that business prospects of the electricity industry and the water industry continue to be bright for the upcoming years. This optimism is supported by projections of global, national and industrial economic growth that are in line with population growth.

The initial Phase I agreement between the United States and China to cease the trade war is predicted to be one of the global indicators for Indonesia in welcoming prospects for better economic growth in 2020. This is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020 - 2024 which targets national economic growth in the range of 5.4% - 6.0%. The government is optimistic that the target will be achieved as driven by several factors, such as revitalization of the manufacturing industry, transformation of the agricultural sector, downstream mining, sustainable infrastructure development and service sector transformation.

Sementara itu, prospek pertumbuhan industri listrik didukung oleh proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019–2038 yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun. Hal tersebut diperkuat oleh pertumbuhan penjualan listrik oleh PT PLN (Persero) selaku pihak tersalur utama Perusahaan kepada pelanggan. Pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahun dan adanya potensi demand untuk sektor industri, rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi.

Meanwhile, growth prospects of the electricity industry are supported by the projections of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) as stipulated in the 2019-2038 National Electricity General Plan which projects an average growth in electricity demand of approximately 6.9% per year. This is strengthened by the growth in electricity sales by PT PLN (Persero) as the Company's main channel to customers. This growth is expected to be maintained in line with the projected population growth each year and the potential demand for the industrial, household, business, public, and transportation sectors.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, maka kebutuhan akan air bersih, air minum dalam kemasan, dan air untuk pertanian cenderung meningkat sehingga mendorong terciptanya penyaluran air yang lebih besar dan luas. Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 – 2035 milik Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk diprediksi naik antara 3% - 7% setiap lima tahun. Dalam laporan tersebut, penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi berjumlah 256 juta jiwa, meningkat 6% hingga tahun 2020 menjadi 271 jutajiwa, meningkat 5% hingga tahun 2025 menjadi 285 juta jiwa, meningkat lagi 4% hingga tahun 2030 menjadi 296 juta jiwa, dan kembali meningkat 3% hingga akhir tahun 2035 menjadi 306 juta

In line with the projected population growth each year, the needs for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture tend to increase so that water is distributed in much greater amount and widely. According to Population Projection Data for 2010 - 2035 by the Statistics Indonesia, the population is predicted to increase between 3% - 7% every five years. In the report, Indonesia's population in 2015 is predicted to be 256 million people, increasing 6% until 2020 to 271 million people, increasing 5% until 2025 to 285 million people, increasing again 4% until 2030 to 296 million people, and again increasing 3% until the end of 2035 to 306 million people.

Data Proyeksi Penduduk 2010 – 2035
Population Projection Data for 2010 - 2035

DATA PENDUDUK / Population Date	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Proyeksi Penduduk (dalam jutaan) / Population Projection (in Million)	239	256	271	285	296	306
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan (%) / Population Percentage in Urban Areas (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

(data: Badan Pusat Statistik / data: Statistics Indonesia)

Kenaikan persentase pertumbuhan penduduk daerah perkotaan turut mendukung kenaikan permintaan air bersih dan air minum. Selain didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar, dan gaya hidup yang mengutamakan kepraktisan mendukung permintaan air minum dari perusahaan air minum (PAM) maupun permintaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) karena alasan kebersihan. Faktor pendukung lainnya seperti momen Ramadhan, Natal, dan Tahun Baru diprediksi menjadi momen andalan untuk menggenjot penjualan AMDK di setiap tahunnya. Meninjau faktor-faktor tersebut, Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang masih terjaga dengan baik.

The increase in the percentage of urban population growth contributed to the increase in demand for clean water and drinking water. Besides being supported by population growth, the level of availability of clean water in the surrounding environment, and lifestyles that prioritize practicality, support the demand for drinking water from drinking water companies (PAM) as well as requests for Bottled Drinking Water (AMDK) for hygiene reasons. Other supporting factors such as the moment of Ramadan, Christmas, and The New Year are predicted to be a mainstay moment to boost sales of bottled drinking water each year. In light of these factors, the Management considers that the Company's business prospects in 2021 and the coming years will continue to be bright.

PERBANDINGAN ANTARA PROYEKSI DAN REALISASI TAHUN 2021

COMPARISON BETWEEN 2021 PROJECTION AND REALIZATION

Perusahaan telah menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun buku 2021, khususnya untuk kinerja operasional dan keuangan pokok. Dalam pencapaiannya, Perusahaan senantiasa melakukan review terhadap target yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.

The Company has set targets to be achieved in fiscal year 2021, particularly for operational and financial performance. In its achievement, the Company always reviews the targets set in accordance with the development of internal and external conditions of the Company.

Aspek Produksi

Capaian aspek produksi di sepanjang tahun 2021 menunjukkan hasil yang positif. Beberapa aspek produksi dapat mencapai 100% atau lebih, antara lain penyaluran air baku mencapai 108,08% dari target, penyaluran air bersih 104,46 dari target, penyaluran air irigasi 113,65 dari target dan sampel laboratorium mencapai 109,37% dari target.

Informasi mengenai pencapaian aspek produksi dengan target RKAP tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Production Aspects

Achievements of production aspects throughout 2021 showed positive results. Some aspects of production can reach 100% or more, i.e. raw water distribution reaching 108.08% of the target, clean water distribution 113,65 of the target, irrigation water distribution 113.65 of the target and laboratory samples reaching 109.37% of the target.

Information on production aspect achievement against the 2021 RKAP target is presented in the following table:

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Produksi Tahun 2021
Table of Comparison between Target and Realization of Production Aspect in 2021

URAIAN / Description	SATUAN / Unit	Realisasi Tahun 2021 Realization in 2021	RKAP 2021	% PENCAPAIAN % Achievement
Produksi listrik / Electricity production	kWh	886.262.000	777.353.209	114,01
Penyaluran air baku / Raw water distribution	Juta m³	1.134.860.000	1.050.010.000	108,08
Penyaluran air baku ke PLTA / Raw water distribution to hydropower plant	kWh	494.166.276,00	400.022.520,09	123,53
Penyaluran air bersih / Clean water distribution	m³	2.406.458	3.209.206	74,99
Penyaluran air irigasi / Irrigation water distribution	Juta m³	6.662,98	5.862,72	113,65
Sampel laboratorium / Laboratory sample	Sampel	8.859	8.100	109,37
Pemanfaatan lahan / Land utilization				
Pertanian / Agriculture	Ha	285,88	358,94	79,65
Non Pertanian / Non Agriculture	Ha	312,40	495,85	63,00
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / Bottled Drinking Water				
Galon 19 liter / 19 liter Gallon	Galon	151.097	120.494	125,40
Botol 600 ml / 600 ml bottle	Botol	184.608	514.000	35,92
Botol 330 ml / 330 ml bottle	Botol	802.272	1.013.400	79,17
Gelas 240 ml / 240 ml bottle	Gelas	850.944	1.551.601	54,84

Aspek Keuangan

Dari sisi Laporan Laba Rugi Konsolidasian, hampir seluruh komponennya belum mampu mencapai target RKAP tahun 2021. Perusahaan membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp856.518 miliar, terealisasi 108,91% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp786,47 juta, laba kotor mencapai 101,77% dari target RKAP 2021, dan Laba Bersih Tahun Berjalan mencapai 86,27% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya kinerja Laba Rugi di tahun 2021 disebabkan belum adanya perjanjian pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) PLTA Saguling (PT. Indonesia Power) dan PLTA Cirata (PT. Pembangkitan Jawa Bali) serta dampak pandemi Covid-19.

Dari sisi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, realisasi Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2021 masing-masing mencapai 101,59% dan 128,48% dari target RKAP tahun 2021. Sedangkan jumlah Ekuitas yang berhasil direalisasikan mencapai 95,23% dari target RKAP tahun 2021.

Financial Aspect

In terms of the Consolidated Income Statement, almost all of its components have not been able to achieve the 2021 RKAP target. The company posted Operating Revenues of Rp856.518 million, realized 108,91% of the 2021 RKAP of Rp786.47 million, gross profit reaching 101.77% of the 2021 RKAP target, and the Current Year Net Profit reaches 86,27% of the target set. The failure to achieve the Profit and Loss performance in 2021 is due to the absence of an agreement for the utilization of Water Resources (SDA) for Saguling Hydroelectric Power (PT. Indonesia Power) and Cirata Hydroelectric Power Plant (PT. Pembangkitan Jawa Bali) as well as the impact of the Covid-19 pandemic.

In terms of the Consolidated Financial Position Statements, the realization of Assets and Liabilities as of December 31, 2021 reached 101.59% and 128,48% of the 2021 RKAP target, respectively. Meanwhile the total realized Equity reached 95.23% of the 2021 RKAP target .

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Keuangan Tahun 2021
Table of Comparison between Target and Realization of Financial Aspect in 2021

URAIAN / Description	REALISASI TAHUN 2021 Realization in 2021	RKAP 2021	% PENCAPAIAN % Achievement
Pendapatan Usaha / Revenue	856.52	786,47	108,91
Beban Pokok / Cost of Revenues	544.69	480,08	113,46
Laba Kotor / Gross Profit	311,83	306,39	101,78
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	144,58	142,34	101,57
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	107,45	141,34	76,02
Jumlah Aset / Total Assets	**1.689,75**	**1.663,35**	**101,59**
Aset Lancar / Current Assets	747,88	677,56	110,38
Aset Tidak Lancar / Non Current Assets	941,87	985,79	95,54
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	**408,55**	**317,98**	**128,48**
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	168,02	152,24	110,37
Jangka Panjang / Non Current Liabilities	240,53	165,74	145,12
Jumlah Ekuitas / Total Equity	**1.281,21**	**1.345,37**	**95,23**

PROYEKSI TAHUN 2022
PROJECTION FOR 2022

Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 sebagai acuan pokok Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target finansial untuk tahun 2022 didasarkan oleh berbagai asumsi kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi aktivitas Perusahaan.

The Company has prepared the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022 as the main reference for the Company in carrying out its business activities. The achievement of financial targets for 2022 is based on various assumptions of internal and external conditions that may affect the Company's activities.

Kondisi internal

1. Stagnasi penerapan air baku oleh PDAM dan Industri, disebabkan oleh kegiatan pengembangan investasi IPA maupun jaringan pipa distribusi yang sangat rendah karena keterbatasan APBD, bukan berarti permintaan air bersih dari para pelanggan PDAM rendah.
2. Peningkatan pendapatan penjualan listrik PLTA Ir. H. Djuanda melalui porsi penjualan kepada pelanggan Non PLN diharapkan dapat tercapai di tahun 2022.
3. Tarif Jual Tenaga Listrik ke PT PLN (Persero) rata-rata sebesar Rp346,00/kWh (atau naik 2,37% dari asumsi tarif tahun 2021).
4. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Pemakaian Sendiri rata- rata sebesar Rp825,00/kWh.
5. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Industri/Swasta rata-rata sebesar Rp825,00/kWh (atau turun rata-rata sebesar 7% dari asumsi tarif 2019).

Internal conditions

1. Stagnation in the application of raw water by PDAMs and industry, due to the very low WTP investment development activities and distribution pipelines due to budget constraints, does not mean that the demand for clean water from PDAM customers is low.
2. Increase in sales revenue of HEPP Ir. H. Djuanda through the portion of sales to Non PLN customers is expected to be achieved in 2022.
3. The average selling rate of electricity to PT PLN (Persero) is IDR 346.00/kWh (or an increase of 2.37% from the assumed tariff in 2021).
4. The average selling rate of electricity for own use is IDR 825.00/kWh.
5. The average selling rate of electricity to industry/ private is IDR 825.00/kWh (or an average decrease of 7% from the 2019 tariff assumption).

6. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air:
   - PAM Jaya sebesar Rp294,68/m³;
   - PDAM Kabupaten/Kota sebesar Rp130,81/ m³;
   - Industri dan PT Sang Hyang Seri sebesar Rp224,71/ m³;
7. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air ke PLTA:
   - BPJSDA PLTA Djuanda sebesar Rp85,28/ kWh;
   - BPJSDA PLTA Saguling sebesa Rp14,01/ kWh;
   - BPJSDA PLTA Cirata sebesar Rp45,69/ kWh;
   - BPJSDA PLTA Rajamandala sebesar Rp5/ kWh;
8. Tarif jual rata-rata Air Bersih adalah sebagai berikut:
   - Air Bersih Industri Rp7,311,45/m³;
   - Air Bersih Penduduk/Perumahan Rp1.818,00/m³;
   - Air Bersih curah Rp3,276,00/m³;
9. Tarif Jasa Laboratorium rata-rata sebesar Rp740.900/ sampel
10. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
    - Galon 19 liter sebesar Rp12,000,00/galon;
    - Botol 600 ml sebesar Rp37,500,00/dus;
    - Botol 330 ml sebesar Rp32,000,00/dus;
    - Gelas 240 ml sebesar Rp20,000,00/dus.

Kondisi eksternal

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 mengikuti asumsi ekonomi makro pada RAPBN tahun 2022 beserta Nota Keuangan yang disampaikan tanggal 16 Agustus 2020 dan perubahan asumsi kurs RAPBN 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 16 Agustus 2020 serta tercantum dalam Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2021, adalah sebagai berikut :
   - Pertumbuhan ekonomi 5,50%;
   - Tingkat laju inflasi kisaran 3,00%;
   - Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp14.600/US$;
   - Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 7,90%.
2. Menurut Badan Meterologi Klimatologi Geofisika (BMKG) bahwa awal musim hujan 2021 pada 36 Zona Musim (ZOM) Jawa, diprakirakan umumnya berkisar pada bulan Januari dan Februari 2021 dengan curah Bawah Normal (N) hingga Normal (N). Berdasarkan prakiraan tersebut, Simulasi Operasi Waduk Seri Citarum untuk tahun 2021 sebagaimana lampiran RKAP ini, dibuat dengan menggunakan asumsi- asumsi sebagai berikut:

6. Tariffs/Fees for Water Resources Management Services:
   - PAM Jaya Rp294.68/m³;
   - Regency/City PDAMs amounting to Rp130.81/ m³;
   - Industry and PT Sang Hyang Seri Rp224.71/m;
7. Tariffs/Fees for Water Resources Management Services to HEPP:
   - BPJSDA PLTA Djuanda Rp85.28/kWh;
   - BPJSDA PLTA Saguling as much as Rp14.01/ kWh;
   - BPJSDA PLTA Cirata amounting to Rp45.69/ kWh;
   - BPJSDA PLTA Rajamandala amounting to Rp5/ kWh;
8. The average selling rate of Clean Water is as follows:
   - Industrial Clean Water Rp7.311.45/m³;
   - Residential/Housing Clean Water Rp1.818.00/m³;
   - Clean water in bulk Rp3.276.00/m³;
9. The average laboratory service rate is Rp 740,900/ sample
10. Bottled Drinking Water (AMDK):
    - 19 liter gallon of Rp12.000.00/gallon;
    - 600 ml bottle for Rp37.500.00/box;
    - 330 ml bottle for Rp32.000.00/box;
    - 240 ml glass Rp20.000.00/box.

External circumstances

1. The macroeconomic assumptions of the 2022 RAPBN along with the Financial Note submitted on 16 August 2020, and changes to the 2021 RAPBN exchange rate assumption in the Working Meeting of the Indonesian House of Representatives Budget Board on 16 August 2020 and listed in the Shareholders' Aspirations for 2021, are as follows:
   - 5.50% economic growth;
   - 3.00% inflation rate;
   - Rupiah exchange rate of Rp. 14,600/US$;
   - 7.90% average 3-month SPN interest rate
2. The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) predicts that the start of the 2021 rainy season in Java's 36 Seasonal Zones (ZOM) will be between January and February 2021, with rainfall ranging from Below Normal (N) to Normal (N). The Citarum Series Reservoir Operation Simulation for 2021, which is attached to this RKAP, was created using the following assumptions:

- Tingkat keandalan debit diklasifikasikan dalam kondisi normal, sehingga ditetapkan untuk pemberian air dari waduk Ir. H. Djuanda tahun 2020 pada posisi TMA awal ±93,19 dpl, dengan produksi listrik PLTA Ir. H. Djuanda sebesar 948,89 juta kWh dan 19,00 juta kWh untuk PLT Mini Hidro.
- Kebutuhan pengairan 2021 terpenuhi.
- Kebutuhan ketenagalistrikan di atas 80 MW setiap bulannya.
- Volume ketiga waduk menganut Equal Sharing.

- The discharge reliability level is classified under normal conditions, so it is determined to provide water from the Ir. H. Djuanda in 2020 at the initial TMA position of ±93.19 above sea level, with hydropower production of Ir. H. Djuanda of 948.89 million kWh and 19.00 million kWh for PLT Mini Hydro
- The need for transportation in 2021 has increased.
- Need for 80 MW of ketenagalistrikan every month.
- The volume of each waduk is shared equally.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Perusahaan telah menetapkan target finansial untuk tahun buku 2022 sebagai berikut :

Based on these conditions, the company has set a financial goal for the year 2022, which is listed below.

Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Comparison between Realization in 2021 and Projection for 2022

URAIAN RKAP 2021 / Description RKAP 2021	REALISASI TAHUN 2021 Realization in 2021	RKAP 2022	KENAIKAN/(PENURUNAN) / The increase/(decrease)	
			NOMINAL / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenue	856,518	902,761	46,243	5.40
Laba Bruto / Gross Profit	311,831	358,533	46,702	14.98
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	144,582	164,480	19,898	13.76
Laba Bersih Tahun Berjalan / Profit for the Year	107,446	143,920	36,474	33.95
Aset / Assets	1,689,754	1,793,153	103,399	6.12
Liabilitas / Liabilities	408,547	316,293	-92,254	-22.58
Ekuitas / Equity	1,281,207	1,476,859	195,652	15.27

ASPEK PEMASARAN
MARKETING ASPECT

Pangsa Pasar

Listrik
Sampai dengan tahun 2021, pembeli listrik PLTA masih didominasi oleh PT PLN (Persero). Namun, Perusahaan terus berupaya memberikan pasokan listrik kepada pelanggan non-PLN di sekitar wilayah Jatiluhur sebagai upaya diversifikasi pelanggan dengan memperhatikan serta mengupayakan perijinan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Air Baku dan Air Bersih
Sampai dengan tahun 2021, pertumbuhan permintaan pemanfaatan Air Baku dari industri mengalami stagnasi, tetapi di sisi lain permintaan pemenuhan kebutuhan air bersih terus meningkat

Market Share

Electricity
Until 2021, Hydropower Plant power buyers were still dominated by PT PLN (Persero), but the Company continued providing electricity to non-PLN customers around the Jatiluhur as customer diversification effort by paying attention and seeking new licenses according to the provisions.

Raw Water and Clean Water
Until 2021, demand growth for Raw Water Utilization from industry has stagnated but on the other hand demand for water supply kept increasing along with population growth and the

seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terbukanya peluang kerja sama dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia Air Bersih.

opening of opportunity to cooperate with PDAM as a provider of Clean Water.

Jasa Laboratorium

Pengguna Jasa Laboratorium adalah industri, PDAM dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laboratorium dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Sampai dengan tahun 2021, penetrasi pasar untuk segmen jasa laboratorium dikhususkan ke beberapa industri guna menambah pengguna jasa laboratorium. Adapun sampai dengan akhir tahun 2021, terdapat 8.859 sampel yang diuji di Laboratorium PJT II, meningkat 11,02% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 7.980 sampel.

Laboratory Services

Users of Laboratory Services were industry, PDAM and Government Institutions in PJT II working area. However, the Company continuously managed to improve the quality of laboratory and cooperate with local government. Until 2021, market penetration conducted by laboratories to several industrial areas could increase laboratory service users. As of the end of 2021, there were 8.859 samples tested in the Laboratory of PJT II, an increase of 11,02% compared to 7.980 in 2020.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pangsa pasar produk AMDK adalah Industri, Perorangan dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas AMDK dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Pada tahun 2021, penetrasi pasar untuk segmen AMDK dilakukan melalui penguatan sinergi BUMN untuk membuka pasar di tengah maraknya merek-merek AMDK yang terlebih dahulu beredar di masyarakat.

Bottled Drinking Water (AMDK)

The market share of AMDK products are Industry, Individual and Government Institution in PJT II working area. However, the Company has continuously worked to improve the quality of AMDK and worked with local governments. Until 2021, the market penetration made by AMDK segment through the synergy of SOEs was an effort to open the market amid the rise of AMDK brands that have been circulating in the community.

Kepariwisataan

Pengguna jasa Pariwisata di kawasan waduk Jatiluhur adalah Industri, masyarakat umum, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik kawasan pariwisata Jatiluhur dengan mengikutsertakan peran pihak-pihak swasta dalam pemasarannya.

Tourism

Users of Tourism Services in Jatiluhur reservoir area are Industry, general public, and Government Institution in PJT II working area. However, the Company continues to increase the attractiveness of Jatiluhur tourism area by involving the private sector in its marketing activities.

Pemanfaatan Lahan

Sampai dengan tahun 2021, pangsa pasar pemanfaatan lahan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemanfaatan lahan untuk pertanian dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian. Pengguna lahan milik PJT II masih didominasi oleh Industri, PDAM, Perorangan, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan penatagunaan lahan sesuai peruntukan, seperti optimalisasi pengusahaan dan peruntukan lainnya.

Land Utilization

Until 2021, the market share of land use was divided into two categories: land use for agriculture and land use for non-agricultural activities. Land users belonging to PJT II were still dominated by Industrial, PDAM, Individual, and Government Institution in PJT II working area. However, the Company managed to continuously improve the stewardship of the land according to designation such as for the optimization of the business.

Strategi Pemasaran

Perusahaan melakukan berbagai kegiatan pemasaran menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (untuk paragraf pembuka) serta bekerja sama dengan instansi terkait. Berikut adalah strategi dan kegiatan pemasaran yang dilakukan selama tahun 2020:

1. Pariwisata
   a. Digital Marketing
   b. Kolaborasi dengan ekosistem pariwisata
   c. Infrastruktur IT untuk Pariwisata
   d. Upgrading bisnis proses Pariwisata berbasis IT
   e. Penerapan Cashless Payment
   f. Pemenuhan Sertifikasi kesiapan New Normal (Safeguard)
   g. Standarisasi Hospitality (SDM & Infrastruktur)
   h. Sertifikasi Hotel Bintang
2. AMDK
   a. Pemasaran akan dilakukan dengan menambahn/ meningkatkan target pemasaranyang sudah ada (intensifikasi) di kab. Purwakarta, Subang dan Karawang (Purwasuka) dan Jabodetabek dengan pendekatan agen-agen loyal.
   b. Melakukan ekspansi pemasaran ke pelanggan- pelanggan baru (ekstensifikasi) antar lain Pemda Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi yang menjadi jalur distribusi eksisting.
   c. Melakukan ekspansi ke BUMN-BUMN Karya (Konstruksi) dan lainnya, serta Kementrian/ Lembaga/Badan di Jakarta. Mengingat terdapat agen/gudang milik PJT II di Jakarta (Cempaka Putih).
3. Laboratorium
   Mengembangkan pasar dengan melakukan pendekatan ke Lab-Lab milik Pemda. Kab/Koat untuk menerima kelebihan/limpasan sample yang tidak dapat dilaksanakan antara lain Lab. Dinas LH Kab. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi dan DKI yang satu jalur dengan pelanggan yang ada saat ini (untuk efesiensi beban sampling).

Marketing Strategy

The company carries out various marketing activities with presentations, promotions, exhibitions, making booklets and leaflets or information to various parties and cooperating with relevant agencies. The following are strategies and marketing activities carried out during 2020 :

1. Tourism
   a. Digital Marketing
   b. Collaboration with the tourism ecosystem
   c. IT Infrastructure for Tourism
   d. IT-based Tourism business process upgrading
   e. Application of Cashless Payment
   f. Fulfillment of New Normal readiness certification (Safeguard)
   g. Hospitality Standardization (HR & Infrastructure)
   h. Star Hotel Certification
2. AMDK
   a. Marketing will be done by adding/ increasing the existing marketing targets (intensification) in the district. Purwakarta, Subang and Karawang (Purwasuka) and Jabodetabek with loyal agents approach.
   b. Expansion of marketing to new customers (extensification) including the Regional Government of Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi and Bekasi City which are the existing distribution channels.
   c. Expansion to BUMN-BUMN Karya (Construction) and others, as well as Ministries/Institutions/ Agencies in Jakarta. Considering that there is an agent/ warehouse owned by PJT II in Jakarta (Cempaka Putih).
3. Laboratory
   Develop Padar by approaching the Labs owned by the Regional Government. District/ Koat to receive excess/runoff samples that cannot be implemented include Lab. District LH Department. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi and DKI are in the same line with existing customers (for sampling load efficiency).

4. Penfaatan lahan
   a. Mengadakan evaluasi atas perpanjangan izin pemanfaatan lahan;
   b. Pemasangan patok dan papan larangan;
   c. Mengadakan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan lahan;
   d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk reinventarisasi;
   e. Membuat skala prioritas penyelesaian masalah;
   f. Selektif dengan memperhatikan lingkungan; dan
   g. Pembuatan sertifikat lahan.

4. Land use
   a. Conduct an evaluation of the extension of the land use permit;
   b. Installation of stakes and prohibition boards;
   c. Carry out land measurement, mapping, and recording;
   d. Carry out coordination with relevant agencies for reinventory;
   e. Making a priority scale for problem solving;
   f. Selective with regard to the environment; and
   g. Making land certificates.

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDENDS POLICY

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

The purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting Government program policies in the field of economy and national development in general, especially in the field of Business and Water Resources Management and optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on the principles of sound company management.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, operasi Perusahaan turut diorientasikan pada perolehan laba guna meningkatkan nilai bagi Pemilik Modal dengan tetap memperhatikan efektivitas operasi dan efisiensi beban sehingga dapat menghasilkan laba yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Modal dalam bentuk dividen.

Based on the said aims and objectives, the Company's operations are also oriented towards earning profits in order to increase the value of the Capital Owners while still taking into account the effectiveness of operations and expenses efficiency to generate profits that can be distributed to the Capital Owners in the form of dividends.

Surat Menteri BUMN Nomor: S-431/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tahun 2019 menetapkan penyetoran dividen sebesar Rp20,764 juta untuk kinerja keuangan tahun buku 2019. Pembayaran dividen tahun buku dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020. Adapun penyetoran dividen untuk kinerja keuangan tahun buku 2020 akan diputuskan pada tahun 2021.

Letter of Minister of SOE No: S-431/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 Regarding the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of Jasa Tirta II Public Company (Perum) Jasa Tirta II Year 2019 stipulates the payment of dividends of Rp20.764 million for the financial performance of the 2019 financial year. The payment of the dividend for the financial year will be made on July 22, 2020. The payment of dividends is for the financial performance The 2020 financial year will be decided in 2021.

Tabel Dividen 5 (Lima) Tahun Terakhir Dividen
Table for the Last 5 (Five) Years

DATA PENDUDUK / Population Date	2020*	2019	2018	2017	2016
Laba Bersih (Rp juta) / Net Profit (Rp million)	123.960	153.809	166.596	174.551	170.646
Dividen (Rp juta) / Dividends (Rp million)	-	20.764	41.649	17.455	8.532
Rasio Dividen / Dividend Ratio	-	13,5%	40%	10%	5%
Tanggal Pengumuman Dividen / Dividend Announcement Date	-	26 Juni 2020/ June 26, 2020	07 Mei 2019 / May 07, 2019	04 Mei 2018 / May 04, 2018	30 Mei 2017 / May 30, 2017
Tanggal Pembayaran Dividen / Dividend Payment Date	-	22 Juli 2020/ July 22, 2020	Mei 2019 / May 29, 2019	16 Mei 2018 / May 16, 2018	08 Juni 2017 / June 08, 2017

*) Berdasarkan surat persetujuan dan pengesahan laporan keuangan No S-463/MBU/06/2021, pemilik modal (Menteri BUMN) menetapkan penggunaan laba tahun berjalan seluruhnya sebagai laba ditahan. /
Based on the letter of approval and ratification of the financial statements No. S-463/MBU/06/2021, the owner of the capital (Minister of SOEs) determines the use of the current year's profit entirely as retained earnings.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (MESOP)

MANAGEMENT AND EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM (MESOP)

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di mana seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II tidak memiliki program tersebut.

Public Company, hereinafter referred to as PERUM, is a State-Owned Enterprise as regulated in Law No. 19 of 2003 in which the entire capital is owned by the State and not divided into shares. Therefore, Perum Jasa Tirta II does not have such program.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Sebagai Perusahaan Umum, Perum Jasa Tirta II tidak melakukan aktivitas terkait penawaran umum di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak ada informasi terkait dengan perolehan dana, rencana penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RPB atas penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

As a Public Company, Perum Jasa Tirta II does not conduct activities related to public offerings on the Indonesia Stock Exchange, therefore, there is no information related to the acquisition of funds, planned use of funds, balance of funds, and the date of AGMS approval for the use of funds from the public offering.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION AND RESTRUCTURING OF DEBT/CAPITAL

Investasi
Tidak terdapat investasi material yang nilainya melebihi 20% dari ekuitas perusahaan.

Ekspansi
Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak melakukan ekspansi sehingga tidak terdapat informasi terkait ekspansi yang relevan untuk diungkapkan.

Divestasi
Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak melakukan divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait divestasi yang relevan untuk diungkapkan.

Penggabungan/Peleburan usaha
Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha sehingga tidak terdapat informasi terkait penggabungan/peleburan usaha yang relevan untuk diungkapkan.

Akuisisi
Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak melakukan akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait akuisisi yang relevan untuk diungkapkan.

Investment
There are no material investments whose value exceeds 20% of the company's equity.

Expansion
As of December 31, 2021, the Company did not conduct an expansion, thus, there was no relevant expansion- related information to be disclosed.

Divestment
As of December 31, 2021, the Company did not conduct a divestment, thus, there was no relevant divestment- related information to be disclosed.

Business Merger/Consolidation
As of December 31, 2021, the Company did not conduct a business merger/consolidation, thus, there was no relevant business merger/consolidation-related information to be disclosed.

Acquisition
As of December 31, 2021, the Company did not conduct an acquisition, thus, there was no relevant acquisition- related information to be disclosed.

Restrukturisasi utang/Modal

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang/modal sehingga tidak terdapat informasi terkait restrukturisasi utang/modal yang relevan untuk diungkapkan.

Debt/Capital Restructuring

As of December 31, 2021, the Company did not conduct debt/capital restructuring, thus, there was no relevant debt/ capital restructuring-related information to be disclosed.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND / OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES / RELATED PARTIES

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
   1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

Throughout 2021, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (2015 improvement), concerning Disclosure of Related Parties. A related party is a person or entity that is related to the reporting entity :

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   1) Has control or joint control over the reporting entity;
   2) Has significant influence over the reporting entity;
   3) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   1) The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir a.
7) Orang yang diidentifikasi dalam butir a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
8) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

3) Both entities are joint venture of the same third party.
4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
7) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity)
8) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Nama Pihak, Sifat hubungan, dan Jenis Transaksi Berelasi

Name of Party, nature of Relationship and Type of Related Transaction

NO.	PIHAK-PIHAK BERELASI Related Parties	SIFAT HUBUNGAN / Nature of Relationship	JENIS TRANSAKSI Type of Transaction
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R.I	Giro / Bank Account
2.	PT Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R.I	Giro / Bank Account
3.	PT Bank BNI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / Financial institution controlled by The Government R.I	Giro / Bank Account
4.	PT Bank BTN (Persero) Tbk	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Giro / Bank Account
5.	PT PLN (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Piutang Usaha / Account Receivable
6.	PT Pertamina (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Piutang Usaha / Account Receivable
7.	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Piutang Usaha / Account Receivable
8.	PT Indra Karya (Persero)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Utang Usaha / Accounts Payable
9.	PT BUMN Hijau Lestari	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Utang Usaha / Accounts Payable
10.	Care LPPM IPB	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Utang Usaha / Accounts Payable
11.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Utang Usaha / Accounts Payable
12.	Hotel Indonesia Group	Entitas Lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI / Other entities controlled by the Government of the R.I	Utang Usaha / Accounts Payable

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :
Details of balances and transactions with related parties in 2021 and 2020 are as follows:

URAIAN / Description	2021		2020	
	RP (JUTA) Rp (million)	% TERHADAP JUMLAH ASET % to Total Assets	RP (JUTA) Rp (million)	% TERHADAP JUMLAH ASET % to Total Assets
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	452.331	26,77	518.162	30,66
Piutang Usaha / Trade Receivables	72.321	4,28	64.532	3,82
Piutang Usaha yang Belum Difakturkan / Unbilled Receivables	211.008	12,49	165.646	9,80
Utang Usaha / Accounts Payable	12.296	0,73	43.121	2,55

Manajemen menganalisis bahwa seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mendorong kinerja finansial pada tahun buku 2021 dan 2020.

Management analyzes that all transactions with Related Parties are needed to support the efficiency of the Company's operational activities which can propel financial performance in the 2021 and 2020 fiscal year.

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN
AMENDMENT TO STATUTORY PROVISIONS THAT HAS SIGNIFICANT IMPACT

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG Amendment of Law	PERIHAL Subject	DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN Impact on the Company
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.113 tanggal 10 / Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 113 dated 10	Pembentukan holding Danareksa / The establishment of the Danareksa holding	November tahun 2021 tentang pembentukan holding Danareksa yang berdampak Akan dilaksanakan perubahan anggaran dasar perusahaan. / The formation of the Danareksa holding has an impact in November 2021. Changes to the company's articles of incorporation will be made.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Catatan 2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anaknya.

Changes in accounting policies are presented in Note 2 in the Notes to the Consolidated Financial Statements of Perum Jasa Tirta II and its Subsidiaries.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan usaha Perusahaan Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Manajemen menilai bahwa Perusahaan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari stabilitas kinerja operasional dan keuangan setiap tahunnya.

Assessment Manajemen akan Kelangsungan usaha Tahun 2021

Analisis terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dilakukan melalui assessment terhadap beberapa indikator, yaitu :

Potential Matters that have a Significant effect on the Company's Business Continuity in 2021

Throughout 2021, Management considers that the Company does not have matters that have the potential to significantly influence its business continuity. This can be seen from the stability of operational and financial performance each year.

Management Assessment on Business Continuity in 2021

Analysis on the Company's business continuity is carried out through an assessment of several indicators, namely:

1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
2. Penilaian tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan kriteria Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/ MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
3. Hasil perhitungan Z-score model tahun 2021; dan
4. Gugatan atau tuntutan hukum yang dihadapi.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan assessment

Asumsi kelangsungan usaha terutama disasarkan pada upaya internal Perusahaan dalam memperkuat kinerja operasionalnya. Uraian mengenai analisa tingkat kesehatan Perusahaan dan penilaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2021 untuk mendukung keberlangsungan usaha Perusahaan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan yang Diterbitkan KAP

Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RSM Indonesia menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material baik pada posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. KAP tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2021.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan berdasarkan pada kriteria dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan penilaian tersebut, Perum Jasa Tirta II dalam tahun buku 2021 termasuk dalam kategori SEHAT dengan klasifikasi AA dengan total skor 86,73.

1. Financial statements issued by the Public Accounting Firm (KAP);
2. The evaluation of the soundness of the Company based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/ MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment on the Health Level of the State-Owned Enterprises;
3. The results of the 2021 model Z-score calculation; and
4. Lawsuits faced.

Assumptions used by Management in Conducting Assessments

The assumption of business continuity is mainly based on the Company's internal efforts in strengthening its operational performance. A description of the Company's soundness analysis and the 2021 Key Performance Indicator (KPI) assessment to support the Company's business sustainability in the future is as follows.

Financial Statements Issued by KAP

Financial Statements issued by the Public Accounting Firm (KAP) RSM Indonesia stated that the Company's financial statements have fairly presented in all material matters both in the financial position, results of operations and cash flow. The KAP provided an unqualified opinion on the 2021 Company Financial Statement.

Company Health Level

The company's health level assessment based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment on the Health Level of the State-Owned Enterprises; Based on this assessment, Perum Jasa Tirta II in 2021 fiscal year is included in the HEALTHY category with AA classification with a total score of 86.73.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2021
Table of Company Health Level in 2021

URAIAN / Description	SKOR REALISASI 2021 / 2021 Realization Score	SKOR RKAP 2021 / 2021 RKAP Score
1. Aspek Keuangan / Financial Aspect		
a. Return On Equity (ROE)	10,50	10,50
b. Return On Investment (ROI)	8,00	7,00
c. Rasio Kas / Cash Ratio	3,00	3,00
d. Rasio saat ini / Current Ratio	4,00	4,00
e. Periode Koleksi (CP) / Collection Period (CP)	2,50	3,00
f. Perputaran Persediaan (PP) / Inventory Turnover (PP)	4,00	4,00
g. Perputaran Aset Total (TATTOO) / Total Assets Turn Over (TATO)	1,50	1,50
h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Assets / Ratio of Total Equity to Total Assets	4,25	4,25
Jumlah Aspek Keuangan / Number of Financial Aspects	**37,75**	**37,25**
2. Aspek Operasional / Operational Aspect		
a. Pelayanan Kepada Masyarakat / Community Service	14,98	15,00
b. Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah / Results of Implementation of Government Assignments	10,00	10,00
c. Efisiensi Produksi & Produktivitas / Production Efficiency & Productivity	5,00	5,00
d. Kepedulian Terhadap Lingkungan / Concern for the environment	5,00	5,00
Jumlah Aspek Operasional / Number of Operational Aspects	**34,98**	**35,00**
3. Aspek Administrasi / Administrative Aspect		
a. Laporan Perhitungan Tahunan / Annual Calculation Report	3,00	3,00
b. Rancangan RKAP / RKAP Draft	3,00	3,00
c. Laporan Periodik / Periodic Report	3,00	3,00
d. Kinerja TJSL / TJSL Performance :		
- Efektifitas Penyaluran / Channeling Effectiveness	3,00	3,00
- Kolektibilitas Pengembalian / Return Collectibility	2,00	3,00
Jumlah Aspek Administrasi / Number of Administrative Aspects	**14,00**	**15,00**
Total Skor / Total Score	**86,73**	**87,25**
Tingkat Kesehatan / Health Level	**(Sehat "AA")**	**(Sehat "AA")**

Analisis Key Performance Indicator (KPI)

Perhitungan KPI yang digunakan Perusahaan meliputi performa Keuangan dan Pasar; Fokus Pelanggan; Efektivitas Produk & Proses; Fokus Tenaga Kerja; Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan; dan Agent of Development (AOD). Pada tahun 2021, skor KPI yang diraih oleh Perusahaan berdasarkan indikator-indikator tersebut tercatat sebesar 88,73 dari jumlah keseluruhan sebesar 100.

Key Performance Indicator Analysis (KPI)

KPI calculations used by the Company include Financial and Market performance; Customer Focus; Product & Process Effectiveness; Workforce Focus; Leadership, Governance & Community Responsibility; and Agent of Development (AOD). In 2021, KPI scores achieved by the Company based on these indicators were recorded at 88.59 out of a total of 100.

Halaman ini sengaja di kosongkan / This page has been intentionally left blank


BUMN
KILAS KINERJA PERUSAHAAN
Jasa Tirta I | Water For Wellness
Jumlah Pendapatan Usaha
Jumlah Laba Usaha
2016
2017



TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance /GCG) telah menjadi landasan yang kuat bagi Perum Jasa Tirta II untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness yang merupakan komitmen kuat Perum Jasa Tirta II , bukan hanya demi kepentingan Pemilik Modal (shareholders) namun bagi seluruh Pemilik Modal (stakeholders). Oleh karenanya Perum Jasa Tirta II selalu menjaga kepercayaan, kredibilitas serta upaya kontinyuitas terkait produk dan jasa perPerusahaan an yang mana menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan .

Good Corporate Governance (GCG) implementation has established a solid platform for Perum Jasa Tirta II to deal with future changes in the business environment. The principles of GCG—Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness—are consistently taken into account by the Supervisory Board and the Board of Directors when making strategic decisions. GCG represents a strong commitment by Perum Jasa Tirta II to protect all owners' interests, not just those of the Capital Owners (shareholders). Capital (stakeholders). As a result, Perum Jasa Tirta II consistently upholds credibility, trust, and continuity efforts in relation to the Company's goods and services, all of which are crucial for the growth and continuation of the Company's commercial enterprise.

PJT II berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pemilik Modal Perusahaan;
b. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
c. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para Pemilik Modal lainnya;
d. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
e. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan ; dan
f. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Karyawan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemilik Modal Perusahaan.

PJT II is dedicated to applying GCG principles in accordance with the following goals:

a. Managing and directing good relations between the Supervisory Board, Board of Directors, and all of the Company's Capital Owners;
b. Increasing accountability to stakeholders;
c. Achieve maximum growth and returns to boost the company's prosperity and realize the value of the capital owners over time without sacrificing the interests of other capital owners;
d. Support the company's internal control and development activities;
e. Improving the work culture; and
f. Making the company value-added, which includes enhancing the welfare of all company employees and raising the benefits for the company's shareholders.

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di bidang perPerusahaan.

GCG is implemented in the Firm's environment based on a shared commitment from all levels of management and staff to follow and comply with all applicable rules and regulations as well as generally recognized ethical standards in the industry per company.

Dalam melaksanakan implementasi GCG, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi secara terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG.

In order to implement GCG, Perum Jasa Tirta II engages in ongoing socialization that tries to convey and internalize numerous policies, programs, and GCG-related activity implementation in order to help people understand how important GCG is.

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independesi dan Kewajaran.

To successfully protect the Capital Owners, the Company has incorporated GCG concepts and practices into the management and operation of its business. Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness are among the GCG's guiding ideals.

1. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Perum Jasa Tirta II memiliki nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
4. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan . Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan .
5. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan antar organ Perusahaan yaitu Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal dan Dewan Pengawas serta Direksi.
6. Perum Jasa Tirta II memiliki pedoman tata kerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
7. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan dengan stakeholders.
8. Perum Jasa Tirta II dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1. The vision and objectives of Perum Jasa Tirta II are crystal clear and grounded in reality.
2. Perum Jasa Tirta II abides with all relevant laws and rules.
3. Perum Jasa Tirta II has core values that characterize the organization's upright conduct in conducting business.
4. Perum Jasa Tirta II has developed a code of conduct and corporate ethics. Continuous and consistent observance of the company's code of conduct and business ethics results in the development of a corporate culture that embodies those ideals.
5. The Joint Discussion Meeting with the Capital Owners, the Supervisory Board, and the Board of Directors have a governance connection with Perum Jasa Tirta II.
6. Perum Jasa Tirta II contains instructions for the Supervisory Board and the Board of Directors' work practices in carrying out their responsibilities.
7. Stakeholders and Perum Jasa Tirta II have a governance connection.
8. Perum Jasa Tirta II must be concerned about protecting the environment and natural resources as part of its duty as an intermediary organization and a member of the business community.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
BASIC APPLICATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Perum Jasa Tirta II senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola Perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata Kelola Perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KoRPBi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta II;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

By making use of numerous pertinent laws, Perum Jasa Tirta II is constantly devoted to adopting strong corporate governance. The following laws and rules form the foundation for achieving excellent corporate governance:

- Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
- Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Access to Public Information;
- Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 1974 regarding Irrigation;
- Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering;
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
- Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 Concerning Amendments; to
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 Concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Governmental Regulations

- Governmental Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
- Governmental Regulation Number 7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II.

Regulations for the Minister of State for State-Owned Enterprises include:

PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

- PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to Regulations for the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S- 16/S.MBU/2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Lainnya

- Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: 1/ DP/68/KBS/10/2019 & KBS-01/ DIR/10/2019 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Perum Jasa Tirta II;
- Peraturan direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD- 23/DIR/08/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan Perum Jasa Tirta II;
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite National Kebijakan Governance;
- Pedoman Governansi Korporat dalam Badan Usaha Milik Negara OECD.

Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan GCG dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi Leading Regional Perusahaan di masa mendatang. Manajemen Perum Jasa Tirta II selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian tujuan Perusahaan.

- Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises;
- Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number S-16/S.MBU/2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Other Regulations

- Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company Number: 1/DP/68/KBS/10/2019 & KBS-01/ DIR/10/2019 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance Corporate Governance) Perum Jasa Tirta II;
- Regulation of the board of directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD- 23/DIR/08/2019 concerning Guidelines for the Management of Subsidiaries of Perum Jasa Tirta II;
- General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Governance Policy Committee;
- Guidelines for Corporate Governance in OECD State-Owned Enterprises.

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG in realizing its vision and mission, as well as realizing business growth and acceleration in all segments to become the Company's Leading Regional in the future. The management of Perum Jasa Tirta II always provides encouragement so that all employees are consistent in implementing GCG principles for each task and responsibility implementation to achieve the Company's goals.

PRINSIP-PRINSIP UTAMA PENERAPAN GCG
MAIN PRINCIPLES OF GCG IMPLEMENTATION

Perum Jasa Tirta menilai pentingnya penerapan dan pelaksanaan best practices GCG dengan berlandaskan pada kepatuhan dan standar yang berlaku. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/ MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, penerapan tata kelola Perusahaan berprinsip pada prinsip-prinsip dasar, yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), Kewajaran (Fairness), dan Sikap Kepedulian (Social Awareness) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Pengawas dan Direksi sampai pada seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II.

Based on compliance and applicable standards, Perum Jasa Tirta evaluates the significance of implementing and applying GCG best practices. The implementation of corporate governance is based on the fundamental principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence), Fairness, and Social Awareness in every business activity. Comply with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/ MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in BUMN.

PRINSIP GCG GCG Principles	DEFINISI Definition	BENTUK IMPLEMENTASI Implementation
Transparansi / Transparency	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang diatur dalam regulasi, tetap juga hal penting lainnya dalam pengambilan keputusan oleh Pemilik Modal dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The company takes the initiative to disclose not only the problems required by laws and regulations, but also matters that are important for decision making by Capital Owners and other stakeholders.	1. Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II memuat informasi penting dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II, antara lain tetapi tidak terbatas kepada: Perum Jasa Tirta II Annual Report contains important information in the management of Perum Jasa Tirta II, including but not limited to: a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perum Jasa Tirta II; Vision, Mission, Objectives, Business Objectives, and Strategy of Perum Jasa Tirta II; b. Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor; Financial condition of audit results by external auditors; c. Susunan pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas); Management composition (Board of Directors and Supervisory Board); d. Informasi Pemilik Modal Pengendali; Information on Controlling Capital Owners. e. Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas beserta anggota keluarganya dan Perum Jasa Tirta II lainnya memiliki benturan kepentingan; Share ownership by members of the Board of Directors and the Supervisory Board and their family members and Perum Jasa Tirta II who have a conflict of interest; f. Sistem manajemen risiko; Risk Managemet System g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal; Internal supervision and control system; h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya; System and implementation of GCG and the level of compliance; i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi; Important events that can affect the condition; j. Biodata anggota Direksi dan Dewan Pengawas; Profile of members of the Board of Directors and Supervisory Board; k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board; l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Pengawas. Meetings held by the Directors and Supervisory Board. 2. Informasi penting kepada stakeholders, antara lain: Important information to stakeholders, including: m. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemilik Modal; Quarterly reports containing routine management reports, submitted to the Capital Owners; n. Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; Procurement procedures and relations with partners; o. Ketaatan dalam pembayaran pajak; Compliance with tax payments; p. Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB. HR management mechanism, in accordance with PKB.

PRINSIP GCG GCG Principles	DEFINISI Definition	BENTUK IMPLEMENTASI Implementation
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perum Jasa Tirta II menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. Perum Jasa Tirta II guarantees that every party concerned has fair treatment in accordance with the applicable laws and regulations.	1. Pemilik Modal berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; The Capital Owner has the right to attend and vote in the RPB in accordance with the applicable provisions; 2. Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan; Perum Jasa Tirta II will treat all partners fairly and transparently; 3. Perum Jasa Tirta II akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap karyawan sesuai dengan kemampuan Perum Jasa Tirta II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perum Jasa Tirta II will provide good and safe working conditions for each employee in accordance with Perum Jasa Tirta II capabilities and applicable laws and regulations. 4. Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal usul, jenis kelamin, atau hal- hal yang tidak berkaitan dengan kinerja. Perum Jasa Tirta II will treat every employee fairly and be free from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender or other matters that have no relation to performance
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perum Jasa Tirta II meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Organ and the entire ranks of Perum Jasa Tirta II so that the management of Perum Jasa Tirta II is carried out effectively. Perum Jasa Tirta II believes that accountability is related to the existence of a system that controls relations between individuals and or organs in Perum Jasa Tirta II and the relationship between Perum Jasa Tirta II and interested parties.	1. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perum Jasa Tirta II (Direksi, Dewan Pengawas, SPI, Sekper, dan organ struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (Corporate Values), dan strategi Perum Jasa Tirta II; Sets out the details of the duties and responsibilities of each organ of Perum Jasa Tirta II (Directors, Supervisory Board, SPI, CORSEC and other Structural Organ) and all employees clearly and in harmony with Perum s vision, mission, values Jasa Tirta II (corporate values), and the strategy of Perum Jasa Tirta II. 2. Berupaya agar semua organ Perusahaan dan seluruh karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; Strive to ensure that all organs of the Company and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities and roles in the implementation of GCG; 3. Menciptakan sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan; Creates an effective internal control system in managing the Company. 4. Menyelenggarakan RPB untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, persetujuan laporan tahunan, penetapan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan; Carrying out RPB to ratify long-term plans, annual budget plans, approval of annual reports, determination of profit sharing and dividends paid; 5. Pemenuhan check and balances Direksi dan Dewan Pengawas yang sesuai dengan prinsip GCG. Fulfilment of checks and balances of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with GCG principles.

PRINSIP GCG GCG Principles	DEFINISI Definition	BENTUK IMPLEMENTASI Implementation
Pertanggung jawaban Responsibility	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perum Jasa Tirta II bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang- undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta aspek lainnya. Compliance in the management of Perum Jasa Tirta II with applicable laws and regulations and sound corporate principles. Perum Jasa Tirta II is responsible for complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, unfair business competition, occupational safety and health, and other aspects.	1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik; Carry out tax obligations properly; 2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; Comply with the provisions of the laws on occupational safety and health and the environment; 3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi; Carry out the obligation of fostering the surrounding community, for example by participating in fostering small businesses and cooperatives. 4. Melaksanakan UU Tenaga Kerja, UU Jasa Konstruksi, pedoman GCG, dan regulasi lainnya; Implement the Manpower Act, Construction Services Law, GCG guidelines, and other regulations; 5. Community Development (0,3% dari anggaran) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak mampu. Community Development (0.3% of the budget) as a form of concern for the community in improving the welfare of the lives of disadvantaged people.
Kemandirian Independence	Pengelolaan Perusahaan yang profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian secara optimal mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas seluruh organ Perusahaan dan pengelolaan terbaik bagi Perum Jasa Tirta II. Professional company management without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles. The optimal implementation of the principle of independence is able to optimize the implementation of the duties of all Company organs and the best management for Perum Jasa Tirta II.	1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing organ dan tidak saling mendominasi satu sama lain; Mutual respect for the rights, obligations, duties, authority, and responsibilities of each organ and not dominating each other; 2. Tidak mencampuri pengurusan Perusahaan selain organ yang berkepentingan; Do not interfere in the management of the Company other than organs of interest; 3. Selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II. Always avoid conflicts of interest in making decisions made by the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II.
SikapKepedulian Social Awareness	Rasa peduli kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial. A sense of caring for the community and the environment through humanitarian and social activities.	Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) setiap tahunnya dengan membidik isu-isu lingkungan dan sosial yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. The implementation of Corporate Social Responsibility activities every year by targeting environmental and social issues that are relevant to the needs of stakeholders.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUM JASA TIRTA II

STRUCTURE AND GOVERNANCE MECHANISM OF PERUM JASA TIRTA II

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT), Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemilik Modal (RPB), Dewan Pengawas dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system), yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

The General Meeting of Capital Owners (GMS), the Supervisory Board, and the Board of Directors are the Company's organs according to Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2007 regulating Limited Liability Companies (UU PT). The Supervisory Board and the Board of Directors, who have specific powers and duties in accordance with their respective roles as prescribed by the articles of association and applicable laws and regulations, make up the two-tier management structure.

Perum Jasa Tirta II telah menetapkan Road Map GCG tahun 2010-2017 sebagai grand strategy dan millestone implementasi GCG sampai tahun 2022 menuju tata kelola Perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Tahapan Road Map GCG Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut :

The 2010-2017 GCG Road Map, designed by Perum Jasa Tirta II, serves as the overarching strategy and cornerstone for GCG implementation up until 2018 in the direction of sustainable corporate governance by integrating elements of compliance, internal control, risk management, and CSR. The following are the stages of the Perum Jasa Tirta II GCG Road Map:



Perum Jasa Tirta II merancang dan terus menyempurnakan model yang selaras serta saling melengkapi antara struktur GCG, kebijakan (soft structure) dan mekanisme implementasi GCG Perusahaan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung dan memenuhi berbagai aspek khususnya yang terkait dengan kepatuhan, pencapaian kinerja dan tanggung jawab kepada lingkungan serta masyarakat.

Models that align and complement GCG structure, policy (soft structure), and GCG execution method Company were created and refined by Perum Jasa Tirta II. This is anticipated to be able to support and address a variety of needs, including those linked to compliance, performance attainment, and social and environmental responsibility.

STRUKTUR ORGAN PERUM JASA TIRTA II
ORGANS STRUCTURE OF PERUM JASA TIRTA II

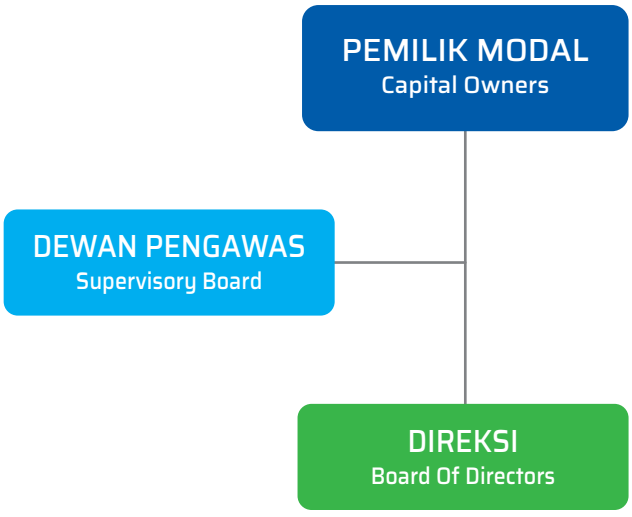
Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di Perum Jasa Tirta II berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Perum Jasa Tirta II yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional.

Secara umum, kegiatan Perusahaan dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas mewakili pemilik modal mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Perusahaan, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.

All levels of management and staff of Perum Jasa Tirta II have a shared commitment to uphold and uphold all applicable rules and regulations, which serves as the foundation for the execution of good corporate governance. This began during the height of Perum Jasa Tirta II's management, which was carried out by an impartial and competent Supervisory Board and Board of Directors.

In general, the Company's activities are carried out by the Board of Directors. The Supervisory Board, representing the owners of capital, reviews policies and carries out supervision and provides advice on the management of the Company, while the Board of Directors leads the implementation of policies, procedures, and day-to-day management.

Struktur Organ Utama Perusahaan /
Company Main Organ Structure



KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUM JASA TIRTA II
PERUM JASA TIRTA II GOVERNANCE POLICY

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II has developed and implemented operational policies for all work units in accordance with corporate governance principles in order to improve the quality and scope of sustainable governance implementation.

Kebijakan Tata Kelola

Penerapan GCG Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perPerusahaan an. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) antara lain:

- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
- Charter Dewan Pengawas
- Charter Direksi
- Charter Komite Audit
- Charter Komite Pemantau Resiko
- Charter Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
- Charter Internal Audit
- Code of Conduct
- Kebijakan dan SOP Lainnya

Policy on Governance

Perum Jasa Tirta II is carried out optimally by strengthening various GCG policies and manuals to achieve best practices, reliable systems, and procedures in accordance with company business developments and regulations. Perum Jasa Tirta II supplements GCG implementation with various policies and Standard Operating Procedures (SOP), including:

- Preparation of Good Corporate Governance Guidelines;
- Supervisory Board Charter
- Board of Directors Charter
- Audit Committee Charter
- Risk Monitoring Committee Charter
- Charter of the Remuneration and Nomination Committee
- Charter of the Director in Charge of Compliance Function and Compliance Work Unit with the Supervisory Board
- Charter of Internal Audit
- Code of Conduct
- Other Policies and SOPs

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN
THE CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Perum Jasa Tirta II merupakan grand strategy dan millstone implementasi GCG sampai tahun 2021 menuju tata kelola Perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan

Perum Jasa Tirta II is a grand strategy and cornerstone of GCG implementation until 2021 that integrates aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The following are the stages of Perum Jasa Tirta II's Corporate Governance Roadmap:

Soft Structure dan Kelengkapan Kebijakan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik- praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan.
Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai pedoman dan Standard Operating Procedures (SOP) antara lain:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
- Board Manual
- Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
- Pedoman Manajemen Risiko
- SPI Charter
- Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)
- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Benturan Kepentingan
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi
- Pedoman Pengendalian Intern
- Komite Audit Charter
- Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan

GCG Policies' Soft Structure and Completeness

The optimal implementation of GCG in Perum Jasa Tirta II is accomplished by strengthening various GCG policies and manuals in order to achieve best practices, dependable systems, and procedures in accordance with business developments and Company regulations.

- Code of Corporate Governance
- Board Manual
- Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct
- Risk Management Guidelines
- SPI Charter
- Guidelines for Management of Complaints of Violations (Whistleblowing System)
- Guidelines for Gratification
- Guidelines for Conflicts of Interest
- Guidelines for Information Technology Governance
- Internal Control Guidelines
- Audit Committee Charter
- Subsidiary Management Guidelines

TUJUAN PENERAPAN GCG
Targets OF GCG IMPLEMENTATION

Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan prinsip- prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

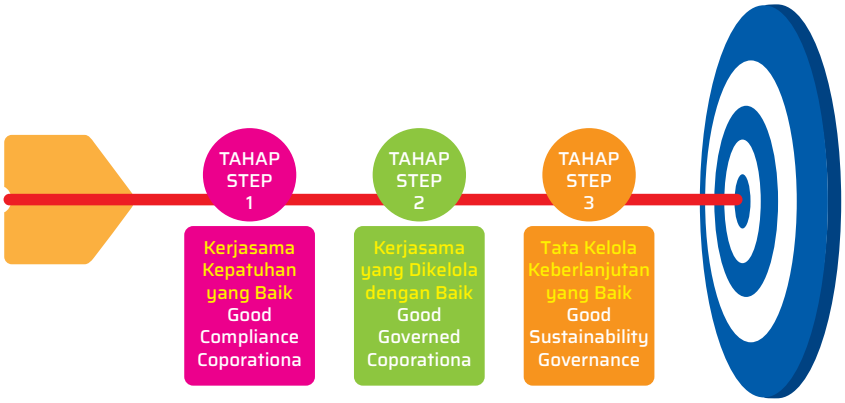
1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan , serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para Pemilik Modal lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pemilik Modal Perusahaan ;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan ;
4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG principles in accordance with the following goals:

1. To achieve maximum growth and returns in order to increase the Company's prosperity and to realize the long-term value of the Capital Owners without sacrificing the interests of other Capital Owners;
2. Managing and directing good relations among Capital Owners, the Supervisory Board, the Board of Directors, and all Capital Owners of the Company;
3. Assisting with internal control and development activities at the company;
4. Improved resource management;
5. Increase stakeholder accountability;

6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan ; dan
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemilik Modal Perusahaan.

6. Improving the Company's work culture; and
7. Adding value to the Company by improving the welfare of all people.
   The company strives for greater convenience for Company Capital Owners.



Governance Structure

Governance structure mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan demi menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Perum Jasa Tirta II melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Perum Jasa Tirta II memenuhi jumlah Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Perum Jasa Tirta II juga membentuk Satuan Pengawasan Intern dan Pengendalian Kinerja Sistem Manajemen. Struktur organisasi yang dimiliki didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan sarana Informasi dan Teknologi (IT) hingga aturan yang mengatur kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II seperti kebijakan, SOP, surat edaran internal harus dipatuhi semua organ Perusahaan .

Governance Process

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan organ Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun proses yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, penerapan sistem reward dan punishment secara konsisten, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud.
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Pedoman Good Corporate Governance disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan

Structure of Governance

Governance structure refers to the structure and infrastructure of corporate governance used to produce results that meet stakeholder expectations. Perum Jasa Tirta II has completed its organizational structure in accordance with the provisions and requires support for its operational activities, beginning at the highest level and working down. The number of Supervisory Boards at Perum Jasa Tirta II is in accordance with the applicable laws and regulations. Furthermore, Perum Jasa Tirta II established an Internal Control Unit as well as Management System Performance Control. Its organizational structure is supported by adequate facilities and infrastructure, including the availability of Information and Technology (IT) facilities to the rules governing Perum Jasa Tirta II's operational activities such as policies, SOPs, internal circulars that must be followed by all Company organs.

Process of Governance

The governance process is a method or mechanism used by the organs of the company to carry out their functions and duties. The process can take the form of coordinating meetings of the Supervisory Board, Board of Directors, and Committees, as well as the consistent application of reward and punishment systems and policies to prevent fraud. The implementation of the GCG principles contained in the Good Corporate Governance Guidelines is disseminated to all employees

tujuan agar seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas. Sedangkan proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian sendiri (Self Assessment) atas pelaksanaan GCG Perum Jasa Tirta II setiap semester.

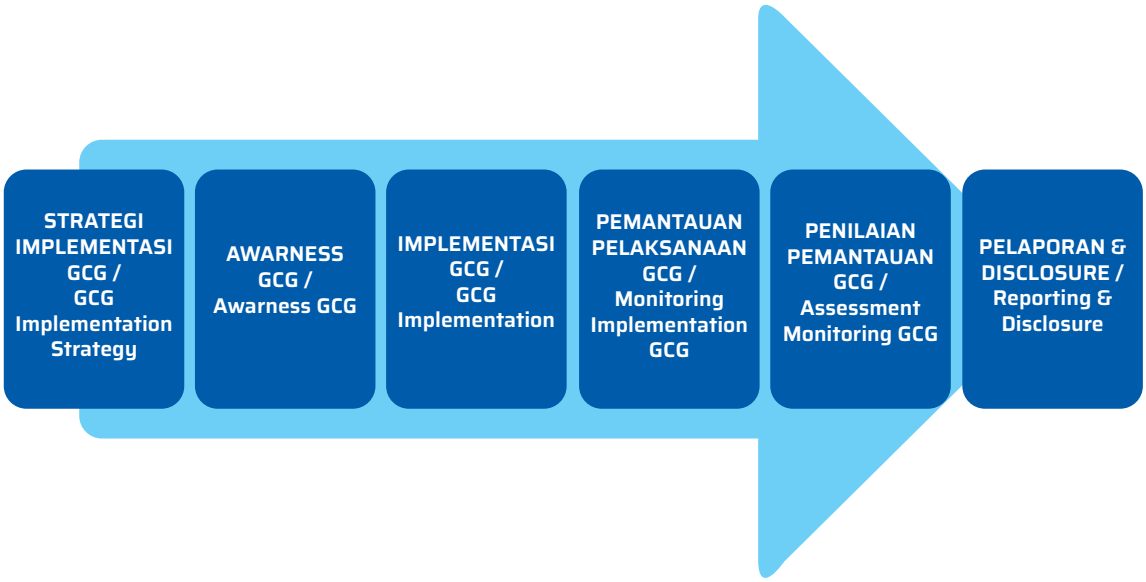
Governance Outcome

Governance outcome merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan dan infrastruktur tata kelola Perusahaan . Dalam menilai dan mengevaluasi governance outcome, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara internal melalui self assessment dan secara eksternal oleh pihak independen. Merangkum ketiga kerangka utama tersebut, penerapan GCG kemudian diimplementasikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

with the goal of understanding and implementing GCG principles in carrying out their duties at all levels of Perum Jasa Tirta II. Meanwhile, every semester, the evaluation process for the implementation of Perum Jasa Tirta II GCG is carried out through a self-assessment process.

Governance Outcome

The governance outcome is the result of the process of implementing GCG principles, which is supported by corporate governance adequacy and infrastructure. The Company assesses the implementation of GCG internally through self-assessment and externally by independent parties when assessing and evaluating governance outcomes. After summarizing the three main frameworks, GCG implementation proceeds through the following stages:



Strategi Implementasi GCG

Strategi implementasi GCG dirancang agar mampu mendorong penerapan GCG Perusahaan yang konsisten dan efektif serta sesuai dengan business plan maupun strategic plan yang dimiliki Perusahaan. Strategi implementasi GCG Perum Jasa Tirta II selama tahun 2017 sampai 2021 dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

Strategy for GCG Implementation

The GCG implementation strategy is intended to encourage the consistent and effective implementation of the Company's GCG in accordance with the business plan and strategic plan owned by the Company. The following initiatives were implemented as part of Perum's GCG implementation strategy Jasa Tirta II from 2017 to 2021.

1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham;
2. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas , Direksi dan Komite;
3. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
4. Efektivitas penanganan pengaduan konsumen ;
5. Peningkatan fungsi kepatuhan;
6. Peningkatan Teknologi Informasi yang memadai.

GCG Awareness

Tahapan Awareness GCG bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi GCG dalam proses bisnis Perum Jasa Tirta II sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama insan Perum Jasa Tirta II dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang berkelanjutan. Kegiatan awareness GCG dilakukan mulai dari karyawan baru melalui Pendidikan Dasar PerPerusahaan an sampai dengan dilaksanakannya GCG refreshment bagi karyawan. Selain itu, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi GCG melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi GCG. Pelaksanaan awareness GCG tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang diperlukan dalam kegiatan assessment GCG maupun penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report).

Implementasi GCG

Implementasi GCG secara umum diformulasikan dalam bentuk revitalisasi proses bisnis, serta kegiatan lain yang diwujudkan dalam beberapa aktivitas, antara lain :

1. Menata struktur organisasi yang sejalan dengan praktek terbaik dalam tata kelola Perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan ;
2. Menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan Perusahaan , mencakup bidang dana, bidang kredit dan pengendalian internal;
3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Self Assessment GCG dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Self Assessment sebelumnya; dan

1. Safeguarding shareholder rights;
2. Optimizing the roles and functions of the Supervisory Board, Board of Directors, and Committees;
3. Enhancements to risk management and internal control functions;
4. Increased efficiency in handling consumer complaints;
5. Improved compliance function;
6. Adequate information technology advancement.

GCG Awareness

The GCG Awareness stage aims to introduce and explain the importance of GCG implementation in Perum Jasa Tirta II's business processes in order to raise awareness among Perum Jasa Tirta II personnel about the importance of implementing sustainable corporate governance. GCG awareness activities are carried out beginning with new employees and progressing to the implementation of GCG refreshment for employees through the Company's Basic Education. Furthermore, Perum Jasa Tirta II disseminates GCG through various print and electronic media and coordinates with parties interested in GCG socialization activities. The implementation of GCG awareness is documented in the form of a formal report as evidence for GCG assessment activities and the Annual Report (Annual Report).

Implementation of GCG

GCG implementation is generally formulated in the form of revitalizing business processes, as well as other activities manifested in several activities, such as:

1. Organizing an organizational structure that is in line with best practices in corporate governance to improve the Company's performance;
2. Developing and improving various policies and procedures for the Company's management, covering the areas of funds, credit, and internal control;
3. Implement the GCG Self Assessment recommendations and evaluate the implementation of the previous Self Assessment recommendations; and

4. Menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, seperti menyusun dan meng-update secara berkala Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Pengawas , serta mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Disamping itu Perum Jasa Tirta II telah merancang kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk di dalamnya sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran.

Monitoring Implementasi GCG

Dewan Pengawas secara aktif melakukan pengawasan atas efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh Direksi dengan dibantu Komite Audit. Selain itu, Direksi secara terus-menerus memastikan dan memonitor implementasi GCG berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan, mulai dari tahapan awareness sampai dengan pelaporan. Proses monitoring atas implementasi tersebut dilakukan guna memastikan keberhasilan pelaksanaannya dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pelaksanaan monitoring GCG ini didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan assessment GCG maupun penyusunan Annual Report.

Assessment Monitoring GCG

Dalam Upaya Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Penerapan GCG, Perum Jasa Tirta II Secara Berkala Melakukan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Untuk Mengukur Pelaksanaan GCG Yang Mendasar Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Perusahaan Umum.

Pelaporan dan Disclosure

Laporan Implementasi GCG Perusahaan merujuk pada ketentuan, pelaksanaan kegiatan GCG Perum Jasa Tirta II selama 1 (satu) tahun juga terdapat dalam Laporan Tahunan, dengan cakupan informasi GCG sesuai dengan standar pengungkapan informasi.

4. Creating and maintaining an ethical and responsible work culture climate, such as compiling and updating the Statement of Independence of the Board of Directors and the Supervisory Board, and coordinating the signing of the Statement of Compliance with the Code of Conduct. Furthermore, Perum Jasa Tirta II has created a fraud control system policy, which includes a reporting violation protection system.

GCG Implementation Monitoring

The Supervisory Board actively monitors the effectiveness of GCG implementation by the Board of Directors, with assistance from the Audit Committee. Furthermore, the Board of Directors continuously ensures and monitors GCG implementation in accordance with the established strategy, from awareness to reporting. The implementation monitoring process is carried out to ensure the success of its implementation by coordinating with interested parties. Furthermore, GCG monitoring implementation is documented in the form of a formal report as evidence that will later be required in GCG assessment activities and the preparation of the Annual Report.

GCG Monitoring Evaluation

Perum Jasa Tirta II Conducts Periodic Self-Assessment to Measure Basic GCG Implementation Regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies in an Effort to Maintain and Improve the Quality of GCG Implementation.

Disclosure and Reporting

The GCG Implementation Report of the Company refers to the provisions, the implementation of GCG activities of Perum Jasa Tirta II for 1 (one) year is also contained in the Annual Report, with the scope of GCG information in accordance with information disclosure standards.

PENILAIAN PENERAPAN GCG
GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Sebagai bagian dari tujuan penerapan GCG yang berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II melakukan mekanisme penilaian penerapan GCG guna menilai kualitas penerapan GCG, memperoleh rekomendasi perbaikan kinerja dan implementasi di masa mendatang, serta memelihara kredibilitas dan akuntabilitas Perusahaan di mata Pemilik Modal dan pemangku kepentingan.

Penilaian (Assessment) GCG dilakukan setiap dua tahun oleh konsultan independen dengan mengacu kepada kriteria dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola.

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Selain melakukan penilaian GCG berlandaskan kriteria tersebut, Perusahaan juga mempertimbangkan capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Key Performance Indikator (KPI) dalam menilai kualitas dan keberhasilan implementasi selama tahun buku.

Pada tahun 2021, penilaian GCG dilakukan Informasi mengenai hasil pencapaian penilaian GCG, KPKU, dan KPI Perum Jasa Tirta II dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Perum Jasa Tirta II conducts a GCG implementation assessment mechanism to assess the quality of GCG implementation, obtain recommendations for future performance improvement and implementation, and maintain the Company's credibility and accountability in the eyes of Capital Owners and stakeholders.

An independent consultant conducts GCG Assessment every two years in accordance with the criteria in the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK16/S-MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Governance Implementation.

BUMN has a good company (good corporate governance). In addition to conducting GCG assessments based on these criteria, the Company evaluates the quality and success of implementation during the fiscal year based on the accomplishments of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and Key Performance Indicators (KPI).

The GCG assessment will be completed in 2021. The following table contains information on Perum Jasa Tirta II's achievement of the GCG, KPKU, and KPI assessments.

Tabel Penilaian GCG, KPKU, dan KPI Perum Jasa Tirta II Tahun 2018 -2021
Table of GCG, KPKU, and KPI Assessments of Perum Jasa Tirta II 2018-2021

GCG
GCG

Tahun	2021	2020	2019	2018
Target / Target	85	85	85	90
Realisasi / Realization	83,6013	83,699	81,653	79,72

KPI
KPI

Tahun	2021	2020	2019	2018
Target / Target	100	100	100	100
Realisasi / Realization	83,6013	80,33	86,85	85,94

Penilaian GCG berdasarkan kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata
2. Pemilik Modal dan RPB/Pemilik Modal;
3. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya

GCG assessment based on regulated criteria in the Secretary of the Ministry BUMN Number SK-16 / S. MBU / 2012 Decree on Indicators/Assessment and Evaluation of GCG implementation in SOEs consists of 6 (six) factors / aspects of GCG implementation, which are as follows:

1. Commitment to Governance Implementation
2. Capital Owner and GMS/Capital Owner;
3. Board of Trustees/Board of Directors;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Factors

PENILAIAN PENERAPAN GCG
GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Komitmen menjadi unsur yang penting dalam implementasi GCG, karena dibutuhkan usaha yang keras dan konsistensi untuk memenuhi standar best practices dan peraturan yang berlaku. Sehingga akan implikasi pada kinerja dan menjadi Perusahaan yang beretika serta berkepedulian sosial sebagai warga negara yang baik. Komitmen Perum Jasa Tirta II agar penerapan GCG berjalan dengan baik diantaranya sebagai berikut:

1. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis;
2. Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perum Jasa Tirta II memiliki nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan yang baik dalam pelaksanaan usahanya;
4. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan . Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan ;
5. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan antar organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
6. Perum Jasa Tirta II memiliki pedoman tata kerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya;
7. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan dengan stakeholders;
8. Perum Jasa Tirta II dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu, komitmen GCG Perum Jasa Tirta II diwujudkan dengan konsisten menerapkan dan melakukan pemutakhiran implementasi program-program rutin lain yang mendukung implementasi GCG Perum Jasa Tirta II .

Commitment is essential in the implementation of GCG because meeting best practice standards and applicable regulations requires hard work and consistency. As a result, it will have an impact on performance and become an ethical and socially conscious company as a good citizen. The following are Perum Jasa Tirta II's commitments to ensure the smooth implementation of GCG:

1. Perum Jasa Tirta II has a clear and realistic vision and mission formulation;
2. Perum Jasa Tirta II complies with applicable laws and regulations;
3. Perum Jasa Tirta II has corporate values that describe the company's good moral attitude in carrying out its business;
4. Perum Jasa Tirta II has developed a business ethics and corporate code of conduct. Business ethics and a code of conduct are followed continuously and consistently, resulting in the formation of a corporate culture that reflects the Company's values.
5. Perum Jasa Tirta II governs the relationships between the Company's organs, namely the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board, and the Board of Directors;
6. Perum Jasa Tirta II has guidelines for the work procedures of the Supervisory Board and the Board of Directors in carrying out their roles and duties;
7. Perum Jasa Tirta II has a governance relationship with stakeholders;
8. Perum Jasa Tirta II, as an intermediary institution and member of the business world, must be concerned about and actively participate in the preservation of natural resources and the environment.

Furthermore, Perum Jasa Tirta II's GCG commitment is realized through the consistent implementation and updating of other routine programs that support the implementation of Perum Jasa Tirta II's GCG.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN
IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah Perusahaan . Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan Perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).

A solid foundation is required for a company to achieve long-term growth. As a result, good governance must be implemented consistently and sustainably as the primary framework for the Company's growth, based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professionalism, and Fairness.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola di Perum Jasa Tirta II dapat diuraikan sebagai berikut.

The following describes the application of governance principles at Perum Jasa Tirta II.



Mekanisme Tata Kelola Perum Jasa Tirta II

Mekanisme tata kelola Perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Proses penerapan corporate governance melekat pada struktur corporate governance sebagai berikut.

Perum Jasa Tirta II Governance Mechanism

The process of applying corporate governance principles, supported by adequate governance structures and infrastructure, to produce outcomes that meet stakeholder expectations is referred to as the corporate governance mechanism. As shown below, the process of implementing corporate governance is linked to the corporate governance structure.

PEMILIK MODAL DAN PENGENDALI
CAPITAL OWNER AND CONTROL

Perum Jasa Tirta II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang 100% modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia oleh karena itu Menteri BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku pemilik modal merupakan pengendali Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2010. Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal Negara pada Perum Jasa Tirta II, jumlahnya sebesar Rp164.547.635.935,-

Perum Jasa Tirta II is a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a Public Company (Perum), with the Republic of Indonesia owning the entire capital. According to Government Regulation Number 7 of 2010, the Minister of BUMN, as the representative of the Government and the owner of capital, is the controller of the Company. The total value of the State's equity participation in Perum Jasa Tirta II is Rp. 164,547,635,935,-, which is the amount of the Company's capital.

RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB)
JOINT DISCUSSION MEETING (RPB)

Perum Jasa Tirta II yang berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) membuat Perum Jasa Tirta II tidak memiliki Rapat Umum Pemegang Saham. Namun demikian, Perum Jasa Tirta II tetap melaksanakan pertemuan dengan Pemilik Modal yakni Negara yang diwakili oleh Kementerian BUMN setiap tahunnya dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Perum Jasa Tirta II is a Public Company (Perum), so it does not have a General Meeting of Shareholders. However, every year in the Joint Discussion Meeting, Perum Jasa Tirta II continues to meet with the Capital Owners, namely the State, which is represented by the Ministry of SOEs (RPB).

Selama tahun 2021, Perum Jasa Tirta II melaksanakan 1 (satu) kali RPB Tahunan dan 1 (satu) RPB yakni RPB Pengesahan Laporan Keuangan 2020 dan 1(satu) RPB Revisi RKAP 2021.

Perum Jasa Tirta II implements 1 (one) Annual RPB, 1 (one) RPB for Ratification of 2020 Financial Statements, and 1 (one) RPB Revised RKAP 2021 in 2021.

Pelaksanaan RPB yang Dilaksanakan pada Tahun 2021
Implementation of RPB to be Implemented in 2021

TANGGAL SURAT Letter Date	TANGGAL PELAKSANAAN Implementation Date	PERIHAL Agenda	PESERTA UNDANGAN Invited Participants	TEMBUSAN Copy	HASIL Output
11/5/20	11/13/20	Pembahasan Teknis RKAP 2021 dan RJPP PJP II. / RKAP 2021 and RJPP PJP II technical discussion	Asdep Keuangan Asdep Bidang Manrisk & Kepatuhan Direksi PJT II Direksi PT Dana Reksa (Persero) Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) / Manrisk and Compliance Division Director of PJT II Directors of PT Dana Reksa (Persero) Directors of PT Asset Management Companies (Persero)	Wakil Mentri BUMN II Deputi Bidang Keuangan dan Manrisk / Deputy Minister of SOEs II for Finance and Manrisk	Pengesahan RKAP tahun 2021 Nomor S-55/MBU/01/2021 29 Januari 2021 Buku RKAP memuat tentang : 1. Surat Pengesahan RKAP 2021 2. Kontrak Manajemen Direksi PJT II 3. Undangan Rapat Pembahasan RKAP 2021 & daftar Hadir 4. Surat Penyampaian Buku RKAP 2021 ke Kementrian BUMN dan Kementrian PUPR 5. Tanggapan Dewas PJT II atas RKAP 2021 dan Ukuran indikator penilaian aspek operasional atas RKAP 2021 6. Kontrak Manajemen dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta KPKU Dewas PJT II 7. Aspirasi Pemegang Saham / Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP 2021 8. Presentasi Bahan Pengesahan RKAP 2021 9. Buku RKAP 2021 10. Risalah Rapat Pembahasan RKA-PKBL PJT II tahun 2021 Ratification of the 2021 RKAP Number S-55/MBU/01/2021 January 29th, 2021 RKAP book contains: 1. 2021 RKAP Approval Letter 2. Management Contract of PJT II Directors 3. Invitation and Attendance List for the 2021 RKAP Discussion Meeting 4. Submission of the 2021 RKAP Book to the Ministries of BUMN and PUPR 5. PJT II Council Response to RKAP 2021 and Indicator Measures for Evaluating RKAP 2021 Operational Aspects 6. Management Contracts and Budget Work Plans (RKA) and KPKU Dewas PJT II 7. Shareholders' / Capital Owners' Aspirations for RKAP 2021 Preparation 8. Presentation of Materials for RKAP 2021 Ratification 9. RKAP 2021 Book 10. PJT II RKA-PKBL Discussion Meeting Minutes in 202

TANGGAL SURAT Letter Date	TANGGAL PELAKSANAAN Implementation Date	PERIHAL Agenda	PESERTA UNDANGAN Invited Participants	TEMBUSAN Copy	HASIL Output
9/21/21	9/21/21	Pembahasan Revisi RKAP 2021 PJT II Yang Mengundang / Penandatangan YB Priyatmo (Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi Media / Discussion on Revised RKAP 2021 PJT II Inviting / Signing YB Priyatmo (Asdep for Media Telecommunication Services)	Asdep Keuangan Asdep Bidang Manrisk & Kepatuhan Direksi PJT II Direksi PT Dana Reksa (Persero) / Deputy Assistant for Finance Sector Assistant for Manrisk & Compliance Directors PJT II Directors PT Dana Reksa (Persero)	Wakil Mentri BUMN II Deputi Bidang Keuangan dan Manrisk / Deputy Minister of BUMN II Deputy for Finance and Manrisk	Surat Persetujuan Revisi RKAP 2021 dan KPI PJT 2 S-822/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Penandatangan Menteri BUMN Tembusan: Menteri PUPR, Wamen 2, Deputi bidang hukum & Perundangan, deputi Bid. Manrisk, Dewas PJT II, Direksi Dana Reksa Buku Revisi RKAP Memuat : 1. Surat Persetujuan Revisi RKAP 2021 2. Tanggapan Dewas atas usulan Revisi RKAP 2021 3. Kontrak Manajemen Revisi RKAP 2021 4. Undangan Rapat Pembahasan Revisi RKAP 2021 5. Surat Usulan Revisi RKAP 2021 6. Presentasi Revisi RKAP 7. Buku Revisi RKAP 2021 8. Lampiran Approval Letter for Revised RKAP 2021 and KPI PJT 2 S-822/MBU/10/2021 dated October 29, 2021, Signing of the Minister of SOEs. Manrisk, PJT II Board of Trustees, Directors of Mutual Funds RKAP Revised Book Contains: 1. Approval Letter for 2021 RKAP Revision 2. Board's Response to the 2021 RKAP Revision Proposal 3. Management Contract for 2021 RKAP Revision 4. Invitation for a 2021 RKAP Revision Discussion Meeting 5. Proposed Revision Letter RKAP 2021 6. Presentation of Revised RKAP 7. Book of Revised RKAP 2021 8. Attachment
	28-Apr-21	Menindaklanjuti Laporan tahunan Tahun Buku 2020 yang telah disubmit Rapat Teknis Pembahasan Laporan Tahunan TahunBuku 2020 / Following up on the Annual Report for Fiscal Year 2020 that has been submitted. Technical Meeting for Discussion of Annual Report for Fiscal Year 2020			S-463/MBU/06/2021 Tanggal 30 Juni 2022 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Keuangan Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tahun Buku 2020 S-463/MBU/06/2021 Date 30 June 2022 Approval of Annual Report and Financial Ratification of the Financial Statements of Jasa Tirta II Public Company (Perum) for Fiscal Year 2020

Tindak Lanjut Hasil Keputusan RPB Tahun Sebelumnya

Perum Jasa Tirta II telah menindaklanjuti dan merealisasikan seluruh keputusan RPB tahun sebelumnya dan tidak terdapat keputusan RPB yang belum dilaksanakan.

Follow-up on the RPB Decision from the Previous Year

Perum Jasa Tirta II has followed up on and implemented all RPB decisions made in the previous year, and no RPB decisions have not been implemented.

DEWAN PENGAWAS
SUPERVISORY BOARD

Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha Perusahaan.

The Supervisory Board serves as a watchdog, whereas the Board of Directors is in charge of developing and implementing strategies to achieve the Company's business goals and objectives.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari satu orang ketua dan beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan .

Supervisory Board Size and Composition

The Supervisory Board is composed of one chairman and several members, the number of whom is adjusted to allow for effective, precise, and timely decision making in accordance with the needs of the Company.

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK-092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/ MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK- 392/

In accordance with the Minister of State-Owned Enterprises' Decree Number: SK-4/MBU/01/2020 dated January 3, 2020, SK-092/MBU/03/2020 dated March 23, 2020, SK-340/MBU/10/2020 dated October 21, 2020,\

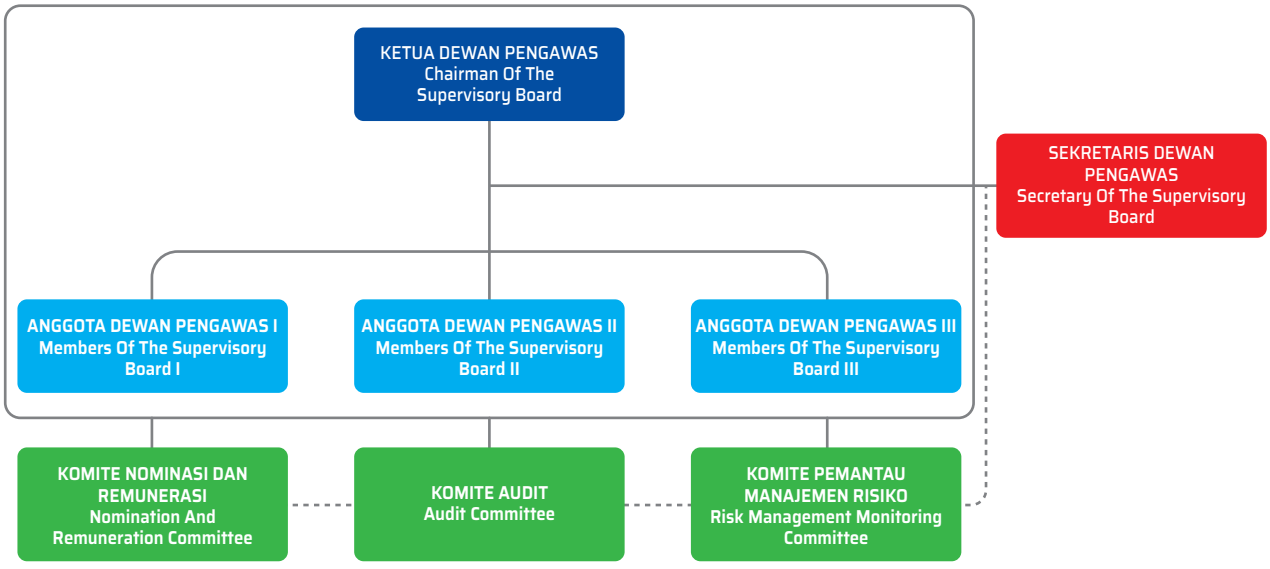
MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

SK-392/MBU/12/2020, dated December 15, 2020, regarding the dismissal and appointment of members of Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board. The number and composition of Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board in 2020 are as follows:

No.	NAMA Name	JABATAN Position	TUGAS Job
1.	**Kelik Wirawan Wahyu Widodo**	Ketua Dewan Pengawas Chairman of the Supervisory Board	Mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi seluruh Dewan Pengawas serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan. / Coordinate all duties and functions of the entire Supervisory Board and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business.
2.	**Muhamad Sofwan**	Anggota Dewan Pengawas Independen Independent Supervisory Board Member	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Hukum, SDM dan Hubungan Antar Lembaga. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the fields of Law, Human Resources and Inter-Institutional Relations.

No.	NAMA Name	JABATAN Position	TUGAS Job
3.	**Nuning Sri Rejeki Wulandari**	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Aset dan Keuangan. / Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the field of Assets and Finance.
4.	**Romy Marcandi**	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko. Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the field of Business Development and Risk Monitoring.

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PEGAWAS
Organizational Structure Of The Supervisory Board



Kriteria Dewan Pengawas

Kendati Pemilik Modal memiliki wewenang untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas wajib memperhatikan kriteria-kriteria yang diatur dalam Pedoman Kerja, Anggaran Dasar, maupun peraturan dan regulasi lain yang berlaku.
Kriteria Dewan Pengawas antara lain meliputi :

1. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit;
2. Orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
3. Mantan anggota Direksi BUMN yang sudah tidak menjabat anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan perundang-undangan lain yang melarangnya;
4. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah- masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. Komposisi Dewan Pengawas paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas Independen;
6. Komposisi Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, serta dapat bertindak secara independen;
7. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur- unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, maupun kementerian dan pimpinan departemen/lembaga lain yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan ;
8. Antar anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi demikian, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut;

Supervisory Board Evaluation Criteria

Although the Capital Owner has the authority to appoint Supervisory Board members, the appointment and determination of the Supervisory Board must adhere to the criteria outlined in the Work Guidelines, Articles of Association, and other applicable rules and regulations. The following are the Supervisory Board criteria:

1. A person who is legally capable and has never been declared bankrupt, or a member of the Board of Directors or Supervisory Board who is found guilty of causing a company or public corporation to be declared bankrupt;
2. People who have never been punished for committing a financial crime against the state;
3. A former member of the BUMN's Board of Directors who has not served as a member of the BUMN's Board of Directors for at least one year, except for certain considerations decided by the Minister in order to maintain the sustainability of the BUMN's restructuring program, as long as no other statutory provisions prohibit it;
4. Have integrity, dedication, and understanding of the Company's management issues related
5. The composition of the Supervisory Board includes at least 20% (twenty percent) members of the Independent Supervisory Board;
6. The Supervisory Board's composition must be such that it can make effective, timely decisions and act independently;
7. Members of the Supervisory Board may include elements from the Technical Minister, the Minister of Finance, and other ministries and heads of departments/institutions whose activities are directly related to the Company;
8. Members of the Supervisory Board and the Board of Directors are prohibited from having family or marital relations up to the third degree, either straight or sideways. In such a case, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.

9. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangka sebagai:
    1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta;
    2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
10. Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah;
11. Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan , selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Dewan Pengawas;
12. Masa jabatan Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
    1. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
    2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;
    3. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

(i) Meninggaldunia;
(ii) Masa jabatan berakhir;
(iii) Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri;
(iv) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan peraturan perundang- undangan lainnya; Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggotaDewan Pengawas, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan tersebut, Menteri sudah harus mengisi kekosongan jabatan tersebut.

9. Members of the Supervisory Board are not permitted to hold the following positions:
    1. Board of Directors in BUMN, BUMD, and Private Owned Enterprises;
    2. Other positions in accordance with the provisions of the legislation;
    3. Other positions that may cause a conflict of interest;
10. Members of the Supervisory Board are not permitted to serve as administrators of political parties, candidates for legislative members, legislative members, candidates for Regional Heads, candidates for Deputy Regional Heads, Regional Heads, and/or Deputy Regional Heads;
11. Members of the Supervisory Board are not permitted to benefit personally from the Company's activities, other than the income received as a member of the Supervisory Board.
12. The Supervisory Board's term of office is governed as follows:
    1. Members of the Supervisory Board are appointed for a five-year term and may be reappointed for a one-year term.
    2. Members of the Supervisory Board may be dismissed before their term expires based on the Minister's decision, which must be justified;
    3. The position of a member of the Supervisory Board terminates when:

(i) the member dies;
(ii) the term of office expires; or
(iii) the member is dismissed by the Minister.
(iv) No longer meets the requirements for membership on the Supervisory Board under Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II and other laws and regulations; In the event of a vacancy on the Supervisory Board, the Minister must fill the vacancy within 30 (thirty) days at the latest from the end of the term of office.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas sebagai organ Perusahaan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran serta rekomendasi kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri, dan peraturan perundang- undangan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan ;
2. Melakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance yang diterapkan di Perusahaan ;
3. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan ;
4. Bertanggung jawab penuh kepada Pemilik Modal;
5. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan .

Wewenang Dewan Pengawas

1. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perusahaan , dalam hal ini melihat buku-buku, surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perusahaan ;
2. Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan ;
3. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

Supervisory Duties and Responsibilities

The Supervisory Board, as an organ of the Company, is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors on the management of the Company, as well as ensuring that GCG principles are properly implemented. The Supervisory Board's duties, responsibilities, and authorities are as follows:

Responsibilities and Duties

1. Oversee management policies, the general course of management for the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and provide advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Term Plan Company Length (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and Ministerial Decrees, and laws and regulations in accordance with the Company's purposes and objectives;
2. Monitoring the effectiveness of the Company's implementation of Good Corporate Governance;
3. Fully responsible for the supervision of the Company in the interests and objectives of the Company;
4. Fully responsible to the Capital Owner;
5. Each member of the Supervisory Board is personally liable for the Company's loss if the person is guilty or negligent in carrying out his duties in the interests and business of the Company.

The Supervisory Board's Authority

1. Obtain adequate access to Company information, in this case by reviewing the books, securities, and assets;
2. Obtaining an explanation from the Board of Directors and/or other officials on all issues concerning the Company's management;
3. Evaluating the accuracy of information prepared for other parties, particularly in financial reports and annual reports; and
4. Being aware of all policies and actions implemented and to be implemented by the Board of Directors.

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan, dengan menyebutkan alasannya;
7. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan ;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan , jika dianggap perlu;
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan RPB.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas berjalan dengan baik, Perum Jasa Tirta II telah menyusun Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas merupakan hasil modifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik GCG, hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemilik Modal, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan .

Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas memuat petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan , sehingga dapat terciptanya standar kerja yang tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas meliputi penjelasan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab serta hak dan wewenang Dewan Pengawas, keanggotaan Dewan Pengawas, komposisi Dewan Pengawas dan masa jabatannya, standar penilaian kinerja Dewan Pengawasan, kebijakan independensi bagi Pengawas Independen, mekanisme rapat Dewan Pengawas, penjelasan komite-komite di bawah Dewan Pengawas, dan tata laksana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

5. Inviting the Board of Directors and/or other officials with knowledge of the Board of Directors to attend the Supervisory Board meeting;
6. Dismiss members of the Board of Directors temporarily in accordance with the provisions, stating the reasons;
7. Establish other committees other than the audit committee, if deemed necessary by the Company's ability;
8. Using experts for specific matters and for a specific period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
9. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws, regulations, and RPB decisions.

Supervisory Guidelines and Rules

To ensure the proper implementation of the Supervisory Board's functions, duties, and responsibilities, Perum Jasa Tirta II compiled a Board Manual, which was ratified in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II on Governance Principles Dated 30 October 2019, Good Corporate Governance No. 1/DP/68/KBS/10/2019. The Supervisory Board's work guidelines and rules are a modification of various applicable regulations and GCG best practices, corporate law, applicable laws and regulations, capital owner directives, and provisions of the Company's Articles of Association.

The Supervisory Board's work guidelines and rules contain instructions for the Supervisory Board's work procedures for each member of the Supervisory Board in carrying out their duties in accordance with the Company's vision and mission, so that high work standards can be established and in accordance with GCG principles The Supervisory Board's work guidelines and rules include an explanation of the functions, duties, obligations, and responsibilities, as well as the Supervisory Board's rights and authorities, the membership of the Supervisory Board, the composition of the Supervisory Board and the term of office, standards for evaluating the Supervisory Board's performance, policies independence for the Independent Supervisor, and the mechanism.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Prosedur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan dalam yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Dewan Pengawas
   1. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
   2. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
   3. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
   4. Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
2. Pemberhentian Dewan Pengawas
   1. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri BUMN, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas :
      - Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
      - Tidak melaksanakan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku;
      - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan ;
      - Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;
      - Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
      - Mengundurkan diri.
   2. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin a diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri :
      - Pembelaan diri dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara

Supervisory Board Appointment and Removal

The Ministry of SOEs handles the appointment and dismissal of the Supervisory Board within Perum Jasa Tirta II in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures. Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises are appointed and dismissed. The following is the procedure for appointing and dismissing the Supervisory Board:

1. Formation of the Supervisory Board
   1. The Minister of SOEs appoints and dismisses members of the Supervisory Board;
   2. Members of the Supervisory Board are appointed for the same term of office as members of the Board of Directors and may be reappointed for one (one) term of office;
   3. The appointment of members of the Supervisory Board does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors;
   4. If deemed necessary, the Minister of SOEs may request input from the Technical Minister in the context of appointing the Supervisory Board.
2. Dissolution of the Supervisory Board
   1. Members of the Supervisory Board may be dismissed by the Minister of SOEs before the end of their term of office if they:
      - Fail to carry out their duties properly;
      - Failure to comply with current laws and regulations;
      - Engaging in actions that are detrimental to the Company;
      - Being found guilty by a court decision with permanent legal consequences;
      - Death or permanent disability;
      - Resign.
   2. The decision to dismiss, as mentioned in point a, is made after the person in question has been given the opportunity to defend himself:
      - Self-defense is carried out in writing and submitted to the Minister of BUMN within 1 (one) month of the date the member of the Supervisory Board concerned is notified in writing by the Minister of BUMN regarding the planned termination;

tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut;
- Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya; Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Menteri BUMN tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;
- Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian dari Menteri BUMN.

- The member of the Supervisory Board concerned will continue to carry out his/her duties as long as the dismissal plan is still in process; If the Minister of SOEs does not make a decision to dismiss the member of the Supervisory Board within 2 (two) months of the date of submission of the self-defense, the planned dismissal will be cancelled;
- His position as a member of the Supervisory Board ends with the issuance of a decision on the dismissal of the Minister of SOEs.

Program Orientasi bagi Anggota Dewas Baru

Anggota Dewan Pengawas yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II . Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi program orientasi yang telah diberikan kepada Dewan Pengawas baru antara lain sebagai berikut :

1. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas .

Program orientasi yang dilaksanakan dapat disampaikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan . Selama tahun 2020, tidak terdapat Dewan Pengawas yang baru diangkat sehingga program pengenalan/orientasi tersebut tidak dilaksanakan manajemen pada tahun 2020.

New Board Member Orientation Program

New members of the Supervisory Board are given an orientation/introduction program to Perum Jasa Tirta II. The Corporate Secretary is in charge of putting the orientation program into action. The following are the orientation program materials provided to the new Supervisory Board:

1. A summary of Perum Jasa Tirta II's objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, strategic risks, and issues.
2. Perum Jasa Tirta II's application of GCG principles
3. Details on delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, and the Audit Committee.
4. Information on the Supervisory Board's duties and responsibilities.

Presentations, meetings, visits to branch offices, and a review of documents and other programs in accordance with Company policy can all be used to deliver the orientation program. Because there was no newly appointed Supervisory Board in 2020, management did not implement the introduction/orientation program.

Kebijakan Suksesi Dewan Pengawas

Dalam menjamin kecukupan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas, Perum Jasa Tirta II menjalankan kebijakan suksesi Dewan Pengawas yang dilaksanakan dengan tunduk pada regulasi yang berlaku dan ketentuan internal yang disusun Perusahaan . Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sumber bakal calon Dewan Pengawas berasal dari :

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; dan/atau
4. Sumber lain.

Dalam mendukung kebijakan suksesi tersebut, Perum Jasa Tirta II tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas, hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fut & Proper Test), program pengenalan dan orientasi bagi anggota Dewan.

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas , Direksi, dan Pemilik Modal Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal Utama dan/ atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas ; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemilik Modal Utama dan/atau Pengendali.

Supervisory Board Succession Policy

Perum Jasa Tirta II implemented a succession policy for the Supervisory Board to ensure the adequacy of the number and composition of the Supervisory Board, which was carried out in accordance with the applicable regulations and internal regulations prepared by the Company. According to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, candidates for the Supervisory Board shall come from the following sources:

1. Former SOE Directors;
2. Supervisory Board / Supervisory Board of SOEs;
3. Structural Officials Perum Jasa supports the succession policy.
4. Additional sources

In order to support the succession policy, Perum Jasa Tirta II continues to focus on meeting the qualification requirements of prospective Supervisory Board members, the results of the Fit and Proper Test, and introduction and orientation programs for Board members.

Supervisory Board Affiliation

Affiliate relationships between members of the Supervisory Board and other members of the Supervisory Board are among the criteria for :

1. Relationships of affiliation between members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Owners of Controlling Capital.
2. Relationship of affiliation between members of the Supervisory Board and the Board of Directors.
3. Affiliation relationship between Supervisory Board members and Main and/or Controlling Capital Owners.
4. Affiliation relationship between Board of Directors members and Supervisory Board members; and
5. Affiliation relationship between Board of Directors members and the Main and/or Controlling Capital Owner.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) Dewan Pengawas

Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Dewan Pengawas telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Hingga 31 Desember 2021 Perum Jasa Tirta II tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek manapun dan tidak pernah melakukan program kepemilikan saham untuk manajemen (Management Stock Option Program / MSOP) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Option Program / ESOP). Sehingga tidak ada saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II telah memenuhi persyaratan jumlah yang diatur dalam ketentuan GCG Perusahaan yang menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Independen sekurang-kurangnya 20% dari seluruh anggota Dewan Pengawas yang ada. Jumlah Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II adalah 1 (satu) orang. Masing-masing Dewan Pengawas telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menunjukkan independensi Dewan Pengawas.

Kriteria Penentuan Dewan Pengawas Independen

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Pengendali atau hubungan dengan Perusahaa Perusahaan menerapkan kriteria pemilihan Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi :

Fit and Proper Testing The Supervisory Board

Perum Jasa Tirta II strives to ensure that all Supervisory Board members have the integrity, competence, reputation, and experience required to carry out their respective functions and duties. All members of the Supervisory Board have passed the Fit & Proper Test to ensure that their background of competence, expertise, reputation, and work experience is appropriate for the needs of the position.

Supervisory Board for Share Ownership

As of December 31, 2021, Perum Jasa Tirta II had never conducted a public offering of shares on any stock exchange, nor had it ever conducted a share ownership program for management (Management Stock Option Program / MSOP) or an employee stock option program (Employee Stock Option Program / ESOP). As a result, no shares are owned by members of the Supervisory Board.

Independent Supervisory Board

The Independent Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II has met the number requirements stipulated in the Company's GCG, which states that the number of Independent Supervisory Board must be at least 20% of all existing Supervisory Board members. The number of Independent Supervisory Board appointed by Perum Jasa Tirta II is 1 (one). To demonstrate the Supervisory Board's independence, each member has signed a Statement Letter.

Selection Criteria for the Independent Supervisory Board

All members of the Supervisory Board have no financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Company. The Company selects the Supervisory Board in accordance with Decision Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN), which includes the following criteria:

- Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi;
- Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak memiliki keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau Perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya. yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Dewan Pengawas

Dalam memenuhi persyaratan independensi Dewan Pengawas yang disyaratkan, Dewan Pengawas dipastikan telah memenuhi kriteria kualifikasi dalam hal administratif dan kepatuhan serta dinyatakan dalam kondisi sesungguhnya terkait pribadi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria non administratif yang disyaratkan dan dipenuhi anggota Dewan Pengawas yaitu Dewan Pengawas diharuskan untuk bebas dari hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan satu sama lain hingga derajat ketiga secara vertikal maupun horizontal, bebas benturan kepentingan pribadi, dan memenuhi komitmen untuk tidak memanfaatkan Perusahaan demi kepentingan pribadi.

Mengukuhkan kriteria tersebut, Dewan Pengawas menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan independensi dan integritas yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Pemeliharaan hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan untuk menjaga agar kedua organ dapat menjalankan check and balances dengan efektif dan efisien demi terciptanya kemajuan Perusahaan . Adapun mekanisme hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui :

- Not serving as a Board of Directors in an affiliated company;
- Not working for the Government, including in departments, institutions, and the military within the last three years;
- Not working in the relevant BUMN or affiliate within the last three years;

- Has no financial relationship, either directly or indirectly, with the relevant BUMN or the company that provides services and products to the relevant BUMN and its affiliates. which may affect its ability to act independently.

Supervisory Board Declaration of Independence

In fulfilling the Supervisory Board's required independence requirements, it is ensured that the Supervisory Board has met the qualification criteria in terms of administrative and compliance and is stated in actual conditions regarding the personal of the Supervisory Board members in accordance with the specified criteria.

Non-administrative criteria that members of the Supervisory Board must meet include being free from family relationships or marital ties with each other up to the third degree vertically or horizontally, being free from personal conflicts of interest, and fulfilling commitments not to use the Company for personal gain.

Confirming these criteria, the Supervisory Board signed an Integrity Pact as a form of independence and integrity statement required by applicable laws and regulations.

Working Relationships of the Supervisory Board and the Board of Directors

The working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is maintained to ensure that the two organs can carry out checks and balances effectively and efficiently for the creation of the Company's progress. The mechanism of the working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is carried out through:

- Terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko yang tepat dan cermat;
- Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemilik Modal;
- Terlindunginya kepentingan Pemilik Modal secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Pemilik Modal dalam menetapkan komposisi Dewan Pengawas senantiasa memperhatikan unsur keberagaman, baik dari segi latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin guna menghadirkan pendekatan yang solutif dan beragam dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di Perusahaan.

Kebijakan penetapan persyaratan komposisi anggota Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas tercermin dari latar belakang pendidikan, keahlian, usia, dan jenis kelamin yang dapat yang terdapat dalam profil dewan pengawas pada bagian profil dalam laporan ini.

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara berkala menyelenggarakan rapat internal Dewan Pengawas maupun rapat gabungan bersama Direksi dan komite-komite. Adapun rapat Dewan Pengawas dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengawasan, penyusunan saran dan rekomendasi atas kegiatan operasional, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Pengawas. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri paling sedikit 75%

- Implementation of appropriate and careful internal control and risk management;
- Achieving a reasonable return for Capital Owners;
- Protecting the Capital Owner's interests in a reasonable manner;
- Implementation of leadership and management succession across all organizational lines;
- Completion of GCG implementation.

The Diversity of the Capital Owners

Supervisory Board In determining the composition of the Supervisory Board, the elements of diversity, both in terms of educational background, expertise, work experience, age, and gender, are always considered in order to present a solution-oriented and diverse approach in decision making and problem solving in the Company.

The policy for determining the requirements for the composition of the Supervisory Board members refers to the provisions of Minister of SOE Regulation No. PER02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The educational background, expertise, age, and gender of the Supervisory Board's members are reflected in the supervisory board profile in the profile section of this report.

Meetings of the Supervisory Board

The Supervisory Board holds internal Supervisory Board meetings on a regular basis, as well as joint meetings with the Board of Directors and committees. Meanwhile, the Supervisory Board meeting is used as a medium for discussion and discussion of various supervisory needs, preparing suggestions and recommendations on operational activities, and making Supervisory Board decisions.

The Supervisory Board is required to hold a meeting at least once a month, attended by a majority of all Supervisory Board members. Each Supervisory Board member must attend at least 75%

dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Pengawas. Keputusan rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode voting. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

of the total number of Supervisory Board meetings. The Supervisory Board meeting's decisions are carried out in accordance with the principle of deliberation to reach consensus, and if deliberation to reach consensus fails, the decision is made using the voting method. The meeting's results are recorded in the minutes of the meeting, including dissenting opinions and their reasons, signed by all participants present, and properly documented.

Agenda Rapat Dewan Pengawas

Agenda for the Supervisory Board Meeting

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan beberapa kali rapat yang diuraikan sebagai berikut:

Several meetings of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II were held in 2021, as follows:

a) Rapat Internal Dewan Pengawas / Supervisory Board Internal Meetings

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
1.	11 Januari 2021 January 11, 2021	• Pembahasan pembagian tugas Dewan Pengawas Discussion on the division of duties of the Supervisory Board • Pembahasan draft Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Discussion on the draft Supervisory Report of the Supervisory Board • Kunjungan Lapangan ke Bendung Bekasi Field Visit to Bekasi Weir
2.	11 Februari 2021 February 11, 2021	• Paparan KAP atas hasil Audit Perusahaan Tahun 2020 KAP's exposure to the results of the 2020 Company's Audit • Pembahasan Agenda Ragab Februari Discussion on the February Ragab Agenda • Lain-lain Etc.
3.	25 Februari 2021 February 25, 2021	Pembahasan Sistem SDM di PJT II Discussion of the HR System at PJT II
4.	4 Maret 2021 March 4, 2021	• Perkenalan Calon Sekretaris Dewan Pengawas baru; Introduction of the new Supervisory Board Secretary Candidate; • Paparan dan Penjelasan dari Direktur Pengembangan Usaha terkait PKS Hotel dan Bungalow Exposure and Explanation from the Director of Business Development regarding PKS Hotels and Bungalows
5.	8 Maret 2021 March 8, 2021	Pembahasan Usulan Talenta PJT II PJT II Talent Proposal Discussion
6.	9 April 2021 April 9, 2021	• Peresmian Ruang Kerja Dewan Pengawas Inauguration of the Supervisory Board's Office • Pisah Sambut Sekretaris Dewan Pengawas Farewell to the Secretary of the Supervisory Board • Rapat Internal Konsolidasi Organ Dewan Pengawas Internal Consolidation Meeting of Supervisory Board Organs • Lain-lain Etc.

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
7.	21 April 2021 April 21, 2021	• Pengembangan Kompetensi dan Benchmark Competency Development and Benchmark • Progres Laporan Kinerja Bulanan dan Tindaklanjut Temuan BPK Progress of Monthly Performance Reports and Follow-up to BPK's Findings • Monitoring Investasi dan Manajemen Risiko Investment Monitoring and Risk Management • Komite Nominasi dan Remunerasi dan Piagam Komite Nomination and Remuneration Committee and Committee Charter • Usulan Agenda Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Proposed Joint Discussion Meeting Agenda (RPB) • Lain-lain Etc
8.	21 Mei 2021 May 21, 2021	• Rencana Pengembangan Kompetensi Competency Development Plan • Draft Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Draft Nomination and Remuneration Committee Charter • Evaluasi Kinerja TW I tahun 2021 TW I Performance Evaluation in 2021 • Penyesuaian Pedoman Internal Perusahaan Adjustment of the Company's Internal Guidelines
9.	21 Juni 2021 June 21, 2021	• Kinerja Operasional Bulanan Monthly Operational Performance • Tindaklanjut Profil Risiko dan Investasi Follow-up on Risk and Investment Profile • Update Pedoman Internal Perusahaan Update Company Internal Guidelines • Lain-lain Etc
10.	19 Juli 2021 July 19, 2021	• Kinerja Operasional Produksi bulan Juni Production Operational Performance for June • Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Semester I Tahun 2021 Supervisory Board Supervisory Report Semester I Year 2021 • Lain-lain Etc
11.	19 Agustus 2021 August 19, 2021	• Tindak Lanjut Pengadaan KAP Follow-up on Procurement of KAP • Persetujuan Road Map Manajemen Risiko Tahun 2021-2024 Approval of the 2021-2024 Risk Management Road Map • Lain-lain Etc
12.	23 September 2021 September 23, 2021	• Kinerja Keuangan bulan Agustus 2021 Financial Performance for August 2021 • Update Pengadaan KAP KAP Procurement Update • Komponen Utama RKA Dewan Pengawas 2022 Main Components of RKA Supervisory Board 2022 • Usulan Kunjungan Kerja 2021 Proposed Working Visit 2021 • Lain-lain Etc

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
13.	26 Oktober 2021 October 26, 2021	• Kinerja bulan September 2021 Performance for September 2021 • Progres dan Tindaklanjut Pengadaan KAP KAP Procurement Progress and Follow-up • Lain-lain Etc
14.	29 November 2021 November 29, 2021	• Kinerja bulan Oktober 2021 Performance for October 2021 • Pengelolaan Risiko dan Investasi Risk and Investment Management • Lain-lain Etc
15.	21 Desember 2021 December 21, 2021	• Self Assessment Dewan Pengawas Self-Assessment of the Supervisory Board • Kinerja s/d bulan November 2021 Performance until November 2021 • Realisasi dan Prognosa Investasi 2021 Investment Realization and Prognosis 2021 • Lain-lain Etc

b) Rapat Gabungan Bersama Direksi / Joint Meeting with the Board of Directors

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
1.	22 Januari 2021 January 22, 2021	• Pembahasan tindak lanjut pending matters ragab bulan Desember 2020 Discussion on follow-up on pending matters for December 2020 • Laporan Kinerja tahun 2020 (unaudited) Performance Report 2020 (unaudited) • Progres Investasi tahun 2021 baik usulan yang baru maupun yang carry over / Investment Progress in 2021, both new and existing proposals carry over • Upaya antisipasi TMA Waduk Djuanda Anticipation of Djuanda Reservoir TMA • Penyampaian Hasil Self Assessment Penerapan GCG tahun 2020 Submission of Self-Assessment Results of GCG Implementation in 2020 • Dan lain-lain And others
2.	18 Februari 2021 February 18, 2021	• Laporan Keuangan PJT II tahun 2020 (Unaudited) PJT II Financial Statements 2020 (Unaudited) • Progres Investasi yang sedang berjalan Ongoing investment progress • Laporan Kinerja Bulan Januari 2021 January 2021 performance report • Lain-lain Etc

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
3.	19 Maret 2021 March 19, 2021	• Pembahasan Kinerja bulan Februari Berdasarkan KPI Discussion of February Performance Based on KPI • Pembahasan Progres Penyelesaian Temuan Audit BPK, KAP dan SPI Discussion Progress Settlement of BPK Audit Findings, KAP and SPI • Pembahasan Progres Penyelesaian Piutang Perusahaan Discussion of the Progress of Complete Receivables • Pembahasan Perencanaan Investasi 230210 dan Carry over Onvestasi tahun sebelumnya / Discussion of Investment Planning 230210 and Carry Over Onvest the previous year • Pembahasan Pending matters Discussion of Pending Matters • Pembahasan terkait keikutsertaan PJT II dalam Proyek SPAM Batam Discussion related to the participation of PJT II in the Batam SPAM project • Lain-lain Etc
4.	27 April 2021 April 27, 2021	• Exit meeting KAP Exit Meeting KAP • Laporan Keuangan Trwulan I tahun 2021 dan capaian KPI Financial Statements of Trwulan I Year 2021 and KPI achievements • Progres Investasi yang sedang berjalan dan carry over The progress of the ongoing investment and carry over • Perkembangan Asset Lahan untuk mess atlet dan Pusat Pelatihan Dayung Nasional / Development of land assets for athlete mess and training centers National rowing • Lain-lain (a.i Pembahasan rencana Kerjasama dengan HIG) Others (a.I Discussion of Cooperation Plans with Hig)
5.	31 Mei 2021 May 31, 2021	• Pencapaian KPI Achievement of KPI • Proggres Kinerja s/d April Performance program to April • Lain-lain Etc
6.	1-2 Juli 2021 July 1-2, 2021	• Pembahasan Kinerja Keuangan & Operasional Discussion of financial & operational performance • Pembahasan Investasi Discussion of investment • Tindaklanjut Temuan BPK Follow up BPK's findings • Penangangan Covid-19 di lingkungan PJT II Covid-19 handling in PJT II Environment
7.	6 Agustus 2021 August 6, 2021	• Evaluasi Kinerja Semester I Evaluation of Semester I Performance • Realisasi KPI Semester I Realization of KPI Semester I • Prognosa RKAP 2021 Prognosis of RKAP 2021 • Lain-lain Etc

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
8.	2 September 2021 September 2, 2021	• Evaluasi Kinerja Bulan Agustus Performance in November 2021 and Prognosis of RKAP in 2021 August performance evaluation • Revisi Investasi Investment revision • Permohonan Persetujuan Kerjasama dengan PT HIG Application for approval of cooperation with PT HIG • Lain-lain Etc
9.	29 September 2021 September 29, 2021	• Evaluasi Kinerja Keuangan Evaluation of financial performance • Evaluasi Kinerja Investasi Evaluation of investment performance • Kesiapan Re-aktivasi JVR JVR reactivation readiness • Lain-lain Etc
10.	26 Oktober 2021 October 26, 2021	• Kinerja Keuangan s.d September 2021 Financial performance to September 2021 • Pembahasan RKAP Tahun 2022 Discussion of RKAP in 2022 • Program Investasi Tahun 2022 Investment Program in 2022
11.	30 November 2021 November 30, 2021	• Evaluasi Kinerja Keuangan dan Investasi sampai dengan bulan Oktober 2021 / Evaluation of financial and investment performance up to the month October 2021
12.	23 Desember 2021 December 23, 2021	• Kinerja bulan November 2021 dan Prognosa RKAP tahun 2021 Performance in November 2021 and Prognosis of RKAP in 2021 • Progres Investasi Investment progress • Implementasi Pengendalian / Mitigasi Risiko tahun 2021 Implementation of Risk Control / Mitigation Year 2021 • Potensi Pengembangan SPAM Potential for SPAM Developmen

c) Rapat Lain-lain

Selain rapat internal dan rapat gabungan bersama Direksi, Dewan Pengawas juga melakukan rapat selaku Komite, sebagai berikut:

1) Rapat Komite Audit

Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan mengikutsertakan perwakilan manajemen Perum Jasa Tirta II. Adapun rincian rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

c) Other Meetings

In addition to internal meetings and joint meetings with the Board of Directors, the Supervisory Board also holds meetings as a Committee, as follows:

1) Audit Committee Meetings

The Audit Committee has held 12 (twelve) meetings by involving representatives of the management of Perum Jasa Tirta II. The details of the Audit Committee meeting are as follows:

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
1.	26 Januari 2021 January 26, 2021	• Telaah Komite Audit terkait Revisi RKAP 2021 Audit Committee Review of the RKAP Revision for 2021 • Telaah Komite Audit terkait Laporan Keuangan tahun 2020 Audit Committee Review of the 2020 Financial Statements • Tindaklanjut Audit Memorandum KAP Follow-up on the KAP Audit Memorandum • Lain- lain Others
2.	11 Februari 2021 February 11, 2021	• Pemaparan progres Hasil Audit KAP tahun 2020 Presentation on the Status of KAP Audit Results in 2020 • Pemaparan progres Tindak Lanjut Hasil Audit SPI dan Eksternal Presentation on the Status of SPI and External Audit Results Follow-up
3.	15 April 2021 April 15, 2021	• Percepatan penyusunan laporan kinerja bulanan/triwulanan Acceleration of monthly and quarterly performance reports • Pembahasan temuan BPK Tentang Pengadaan Kabel Minyak yang merugikan negara, dan upaya tindak lanjutnya. Discussion of BPK's findings on the procurement of oil cables that are harmful to the state, as well as follow-up efforts.
4.	30 April 2021 April 30, 2021	• Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK-RI; Monitor BPK-RI Audit Recommendations; • Tindaklanjut Audit Pemeriksaan KAP; Monitor KAP Audit; • Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan SPI Monitor SPI Inspection Recommendations • Lain-lain Others

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
5.	19 Mei 2021 May 19, 2021	• Pembahasan telaah & draft tanggapan laporan Triwulan-I tahun 2021; Deliberation on the review and draft response to the 2021 Quarter-I report; • Lain-lain. Others
6.	16-17 Juni 2021 June 16-17, 2021	• Pembahasan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) tahun 2021 Deliberation on the 2021 Corporate Governance Guidelines (GCG) • Lain-lain. Others.
7.	14 Juli 2021 July 14, 2021	• Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK-RI; Follow-up on BPK-RI Audit Recommendations; • Tindak lanjut Audit Pemeriksaan KAP; Follow-up on KAP Audit Audit; • Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan SPI; Follow-up on SPI Inspection Recommendations; • Tindak lanjut temuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); Follow-up on Anti-Bribery Management System (SMAP) findings; • Tindak lanjut temuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001; Follow-up on ISO 9001 Quality Management System findings; • Tindak lanjut temuan Sistem Manajemen Mutu Eksternal; Follow-up on External Quality Management System findings; • Lain-lain. Others.
8.	19 Agustus 2021 August 19, 2021	• Pembahasan Prognosa Kinerja Perusahaan 2021; A discussion of the company's performance forecast for 2021; • Pembahasan Dokumen Pengadaan KAP 2021. A discussion of the 2021 KAP Procurement Documents.
9.	22 September 2021 September 22, 2021	• Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2021; Performance evaluation for August 2021; • Persiapan Assessment GCG Dewan Pengawas Tahun 2021; GCG Assessment for the 2021 Supervisory Board; • Lain-lain. Others.
10.	25 Oktober 2021 October 25, 2021	• Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK-RI; Follow-up on BPK-RI Audit Recommendations; • Tindak lanjut Audit Pemeriksaan KAP; Follow-up on KAP Audit Recommendations; • Tindak lanjut Rekomendasi Pemeriksaan SPI; Follow-up on SPI Inspection Recommendations; • Tindak lanjut temuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); Follow-up on Anti-Bribery Management System (SMAP) findings; • Tindak lanjut temuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001; Follow up the findings of the ISO 9001 Quality Management System; • Laporan Progres PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) SPI s.d. Triwulan III/2021; Progress Report PKPT (Annual Monitoring Work Program) SPI s.d. Quarter III/2021; • Lain-lain. Others.

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
11.	23 November 2021 November 23, 2021	• Pembahasan Kinerja Produksi dan Pendapatan sampai dengan bulan Oktober 2021; / Discussion of production and income performance until October 2021; • Lain-lain. Etc.
12.	20 Desember 2021 December 20, 2021	• Pembahasan Kinerja Produksi dan Pendapatan sampai dengan bulan November 2021; / Discussion of production and income performance until November 2021; • Lain-lain. Etc.

2) Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan mengikutsertakan perwakilan manajemen Perum Jasa Tirta II. Adapun rincian Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dimaksud adalah sebagai berikut:

2) Risk Management Monitoring Committee meetings

The Risk Management Monitoring Committee met 11 times with representatives from Perum Jasa Tirta II's management. The following are the specifics of the aforementioned Risk Management Monitoring Committee Meeting:

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
1.	19 Januari 2021 January 19, 2021	• Pembahasan Profil Risiko dan realisasi Pengendalian Risiko PJT II Discussion of risk profile and realization of PJT II risk control
2.	23 Februari 2021 February 23, 2021	• Pembahasan review Pedoman Manajemen Risiko dan Pros 56/KBS-01/DU/12/2020 / Discussion of Review of Risk Management Guidelines and Pros 56/KBS-01/DU/12/2020 • Monitoring pelaksanaan pengendalian risiko Monitoring the implementation of risk control
3.	17 Maret 2021 March 17, 2021	• Pembahasan realisasi program investasi carry over tahun 2019 dan 2020 ke tahun 2021 / Discussion of the realization of the Carry Over Investment Program in 2019 and 2020 to 2021 • Pembahasan realisasi program investasi tahun 2021 Discussion of the realization of the Investment Program in 2021
4.	19 April 2021 April 19, 2021	• Realisasi Proggrem Investasi carry over tahun 2019 dan 2020 ke tahun 2021 / Realization of Carry Over Investment Program in 2019 and 2020 to 2021 • Realisasi Program Investasi tahun 2021 / Realization of Investment Program in 2021 • Realisasi kegiatan pengendalian risiko strategis tahun 2021 Realization of Strategic Risk Control Activities in 2021

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
5.	20 Mei 2021 May 20, 2021	• Realisasi investasi carry over tahun 2019 dan 2020 ke tahun 2021; Realization of Carry Over Investment in 2019 and 2020 to 2021; • Realisasi program investasi tahun 2021. Realization of investment programs in 2021.
6.	28 Mei 2021 May 28, 2021	• Update Pedoman Manajemen Risiko; Update Risk Management Guidelines; • Realisasi implementasi mitigasi risiko dan kendala yang dihadapi; Realization of the implementation of risk mitigation and obstacles encountered; • Realisasi program RKT I dan Rencana Kerja Triwulan II Divisi PKRSM. Realization of RKT I Program and Work Plan for Quarter II PKRSM Division.
7.	16-17 Juni 2021 June 16-17, 2021	• Pembahasan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) tahun 2021 Discussion of Corporate Governance Guidelines (GCG) in 2021 • Lain-lain Etc
8.	15 Juli 2021 July 15, 2021	• Progres Perencanaan Manajemen Risiko Klaster Danareksa-PPA; Danareksa - PPA's Cluster Risk Management Planning Progress; • Progres Penyusunan Roadmap Manajemen Risiko; Progress for the preparation of risk management roadmaps; • Pemahaman Pola Operasi Waduk & PLTA. Understanding the Operation Pattern of Reservoir & PLTA.
19.	18 Agustus 2021 August 18, 2021	• Realisasi Program Investasi Carry Over Tahun 2019 dan 2020; Realization of Carry Over Investment Program in 2019 and 2020; • Realisasi Program Investasi Tahun 2021; Realization of the Investment Program in 2021; • Realisasi Pengendalian Risiko Strategis Tahun 2021. Realization of Strategic Risk Control Year 2021.
20.	16 September 2021 September 16, 2021	• Kesiapan Asesmen Tingkat Maturitas Risiko Tahun 2021; Readiness of Risk Maturity Level Assessment in 2021; • Realisasi Rencana Mitigasi Top Risk Tahun 2021. Realization of the Top Risk Mitigation Plan in 2021.
21.	12 November 2021 November 12, 2021	• Proses Penyusunan Profil Risiko dalam RKAP 2022; The process of preparing a risk profile in RKAP 2022; • Profil Risiko RKAP 2022; RKAP Risk Profile 2022; • Progres Investasi Tahun 2021 dan Carry Over Tahun 2019 & 2020. Investment Progress in 2021 and Carry Over in 2019 & 2020.
22.	20 Desember 2021 December 20, 2021	• Hasil Pengukuran Tingkat Maturitas Risiko Tahun 2021; Results of measurement of risk maturity in 2021; • Realisasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021; Realization of the implementation of risk management in 2021; • Realisasi Program Investasi dan Prognosa Akhir 2021. Realization of the Investment and Prognosis Program at the end of 2021.

3) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Pengawas selaku Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

3) Meeting of the Nomination and Remuneration Committee

The Board of Trustees, acting as the Nomination Committee and Remuneration Committee, met four times, with the following details:

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	AGENDA RAPAT Meeting Agenda
1.	8 Maret 2021 March 8, 2021	• Pengusulan Talenta Perum Jasa Tirta II dan Penilaian Dewan Pengawas terhadap Direktur yang menjabat saat ini. Proposing Talenta Perum Jasa Tirta II and Assessment of the Supervisory Board of the Director who is currently in office.
2.	29 April 2021 April 29, 2021	• Usulan Penghasilan Organ Pendukung Dewan Pengawas. Proposed Income Organ Supporting the Supervisory Board.
3.	18 Mei 2021 May 18, 2021	• Usulan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2021 serta Tantiem Tahun Buku 2020. Proposed salary/honorarium of the Board of Directors and Board of Trustees of the Fiscal Year 2021 and Tantiem Fiscal Year 2020.
4.	07 Juli 2021 July 07, 2021	• Finalisasi Piagam Komite. Finalization of Committee Charter. • Nominated Talent Subklaster BUMN Sumber Daya Air. Nominated talent subclaster BUMN Water Resources.

Penyampaian Tanggapan/Persetujuan

Dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan pemberian tanggapan dan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN, Dewan Pengawas telah menerbitkan 36 (tiga puluh enam) surat selama Tahun 2021, antara lain:

Response/Consent Submission

To carry out tasks related to granting responses and board approvals Supervisors in accordance with the provisions of the Budget Company Basis and Regulation of the Minister of SOEs, The Board of Trustees issued 36 (three twenty-six) letters during 2021, including:

No.	NOMOR SURAT Reference Number	TANGGAL RAPAT Meeting Date	PERIHAL Regarding
1.	S-03/DP/2021	25 Januari 2021 January 25, 2021	Tanggapan atas Revisi Usulan RKAP Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 / Response to the revision of the proposal of RKAP Perum Jasa Tirta II in 2021
2.	S-06/DP/2021	02 Maret 2021 March 02, 2021	Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan PKS Hotel, Bungalow dan Restoran antara PJT II dengan PT HIG / Responses to the application for approval of the PKS Hotel, Bungalow and Restaurant between PJT II and PT HIG
3.	S-07/DP/2021	12 Maret 2021 March 12, 2021	Surat Dukungan dalam rangka keikutsertaan lelang pengelolaan SPAM Hulu BP Batam / Letter of Support in the Framework of BP Batam SPAM Management Auction Auction
4.	S-08/DP/2021	12 Maret 2021 March 12, 2021	Pengusulan Talenta PJT II pada sistem Talent Management BUMN / Proposal of Talent PJT II in the BUMN talent management system
5.	S-10/DP/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan PKS Hotel, Bungalow dan Restoran antara PJT II dengan PT HIG Responses to the application for approval of the PKS Hotel, Bungalow and Restaurant between PJT II and PT HIG
6.	S-11/DP/2021	23 Maret 2021 March 23, 2021	Arahan Dewan Pengawas terkait Realisasi Investasi Carry Over Tahun 2021 / Directions of the Supervisory Board related to the realization of Carry Over Investment in 2021
7.	S-12/DP/2021	29 Maret 2021 March 29, 2021	Laporan Tugas Pengawas dan Realisasi KPI Dewan Pengawas PJT II Tahun 2020 / Report on Supervisory and Realization of KPI PJT II Supervisory Board of 2020
8.	S-13/DP/2021	31 Maret 2021 March 31, 2021	Tanggapan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 (Audited) / Response to the annual report of the 2020 fiscal year (audited)
9.	S-16/DP/2021	26 April 2021 April 26, 2021	Tanggapan atas Usulan Agenda Rapat Pembahasan Bersama (RPB) / Response to the Proposed Agenda of Joint Discussion Meeting (RPB)

No.	NOMOR SURAT Reference Number	TANGGAL RAPAT Meeting Date	PERIHAL Regarding
10.	S-16/DP/2021	11 Mei 2021 May 11, 2021	Penyampaian Pelaporan Evaluasi Kinerja Bulanan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Submission of monthly performance evaluation reporting and completion of BPK RI recommendations
11.	S-17/DP/2021	17 Mei 2021 May 17, 2021	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) KPBU SPAM Regional Jatiluhur I / Responses to Approval for Approval for the Establishment of the Special Work Unit (UKK) of the SPAM Regional PPP Jatiluhur I
12.	S-18/DP/2021	18 Mei 2021 May 18, 2021	Rekomendasi atas Usulan Kenaikan Gaji Dasar Honorarium Tahun 2021 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2020 / Recommendations on the proposed increase in the basic salary of honorarium in 2021 and the granting of tantiem fiscal year 2020
13.	S-19/DP/2021	24 Mei 2021 May 24, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I PJT II Tahun 2021 / Responses to Management Report Quarter I PJT II of 2021
14.	S-21/DP/2021	24 Mei 2021 May 24, 2021	Usulan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 / Proposed approval and ratification of the annual report of the fiscal year 2020
15.	S-23/DP/2021	23 Juni 2021 June 23, 2021	Persetujuan Perubahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) PJT II / Approval of Changes in Good Corporate Governance Guidelines (GCG) PJT II
16.	S-24/DP/2021	05 Juli 2021 July 05, 2021	Persetujuan Perubahan Nomenklatur Divisi Umum dan PKBL menjadi Divisi Umum dan TJSL / Approval of Changes to the Nomenclature of the General Division and PKBL to the General Division and TJSL
17.	S-27/DP/2021	28 Juli 2021 July 28, 2021	Tanggapan tertulis atas Usulan Penghapusbukuan Aset Bangunan Berupa 5 (lima) Kamar Tipe Deluxe PJT II. / Written response to the proposed eraser of building assets in the form of 5 (five) rooms of Deluxe PJT II.
18.	S-28/DP/2021	30 Juli 2021 July 30,2021	Penyiapan Dokumen Kelengkapan Pengadaan KAP Tahun Buku 2021. / Preparation of documents for the completeness of the procurement of KAP Year 2021.
19.	S-29/DP/2021	03 Agustus 2021 August 03, 2021	Pinjam Pakai atas Pemanfaatan Lahan Milik PJT II untuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I. / Borrowing use of land use owned by PJT II for the SPAM Regional PPP Project Jatiluhur I.

No.	NOMOR SURAT Reference Number	TANGGAL RAPAT Meeting Date	PERIHAL Regarding
20.	S-30/DP/2021	09 Agustus 2021 August 09, 2021	Pelaksanaan Pemantauan Manajemen Risiko Semester I Tahun 2021. / Implementation of Risk Management Monitoring in Semester I of 2021.
21.	S-31/DP/2021	10 Agustus 2021 August 10, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I PJT II Tahun 2021. / Response to the 2021 PJT II Semester I Management Report.
22.	S-32/DP/2021	13 Agustus 2021 August 13, 2021	Penyampaian Dokumen Hasil Assesment Nominated Talent. / Submission of Nominated Talent Assessment Results Documents.
23.	S-33/DP/2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Persetujuan Road Map Manajemen Risiko PJT II Tahun 2021-2. / Approval of PJT II Risk Management Road Map 2021-2.
24.	S-34/DP/2021	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Pelaksanaan Assessment Implementasi GCG PJT II Tahun 2021. / Implementation of the 2021 PJT II GCG Implementation Assessment.
25.	S-35/DP/2021	25 Agustus 2021 August 25, 2021	Persetujuan Dokumen Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian PJT II Tahun Buku 2021. / Approval of Public Accountant Office Services Procurement Documents (KAP) Examination of the Consolidated Financial Statements of PJT II for the 2021 Fiscal Year.
26.	S-36/DP/2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021	Optimalisasi Aset Idle PJT II. / PJT II Idle Asset Optimization.
27.	S-38/DP/2021	02 September 2021 September 02, 2021	Tanggapan atas Kerjasama Pengelolaan Hotel, Bungalow dan Restoran antara Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan PT Hotel Indonesia Group (HIG). / Response to Hotel, Bungalow and Restaurant Management Cooperation between Perum Jasa Tirta II (PJT II) and PT Hotel Indonesia Group (HIG).
28.	S-40/DP/2021	09 September 2021 September 09, 2021	Penyampaian Hasil Assessment Nominated Talent. / Submission of Nominated Talent Assessment Results.
29.	S-41/DP/2021	27 September 2021 September 27, 2021	Usulan Permohonan Persetujuan dan Penetapan Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2021. / Proposed Application for Approval and Determination of Public Accounting Firm (KAP) Service Providers for Examination of the Consolidated Financial Statements of Perum Jasa Tirta II for the 2021 Fiscal Year.

No.	NOMOR SURAT Reference Number	TANGGAL RAPAT Meeting Date	PERIHAL Regarding
30.	S-42/DP/2021	27 September 2021 September 27, 2021	Persetujuan Perubahan Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Jasa Tirta II. / Approval of Changes in Nomenclature, Duties and Functions of Organizational Structure and Work Procedures of Perum Jasa Tirta II.
31.	S-43/DP/2021	29 September 2021 September 29, 2021	• Tanggapan atas Usulan Revisi RKAP Tahun 2021 Perum Jasa Tirta II. / Response to the Proposed Revision of the 2021 RKAP of Perum Jasa Tirta II. • Penyampaian Hasil Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). / Submission of Procurement Results of Public Accounting Firm (KAP) Services.
32.	S-45/DP/2021	26 Oktober 2021 October 26, 2021	Penyampaian Hasil Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). / Submission of Procurement Results of Public Accounting Firm (KAP) Services.
33.	S-46/DP/2021	27 Oktober 2021 October 27, 2021	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Pengawas Tahun 2022. / Submission of the Work Plan and Budget (RKA) and Key Performance Indicators (KPI) of the Supervisory Board for 2022.
34.	S-47/DP/2021	10 November 2021 November 10, 2021	Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021 PJT II. / Response to the Quarter III Management Report 2021 PJT II.
35.	S-49/DP/2021	01 Desember 2021 December 01, 2021	Arahan Dewan Pengawas terkait Pengelolaan Risiko dan Investasi. / Directions of the Supervisory Board regarding Risk and Investment Management.
36.	S-50/DP/2021	14 Desember 2021 December 14, 2021	Penyampaian Kuisioner Fraud Rsk Assessment Dewan Pengawas. / Submission of the Supervisory Board Fraud Risk Assessment Questionnaire.

Kunjungan Lapangan

Dewan Pengawas telah mengadakan kunjungan lapangan ke Divisi/Unit Usaha sebanyak 6 (enam) kali sebagai evaluasi dan monitoring pengelolaan perusahaan, yaitu:

Field Trips

The Board of Trustees has made field visits to Divisions / Business Units as many as 6 (six) times in order to evaluate and monitor management company, i.e.

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	TUJUAN Goal	AGENDA Agenda
1.	11 Januari 2021 January 11, 2021	Unit Usaha Wilayah I Bendung Bekasi / Bekasi Dam Region I Business Unit	Tugas dan fungsi, Rencana Kerja 2021, Masalah yang dihadapi, Rencana tindak lanjut / Duties and functions, 2021 Work Plan, Problems encountered, Follow-up plans
2.	19 Februari 2021 February 19, 2021	Unit Usaha Pariwisata dan Hotel / Tourism and Hotel Business Unit	Tugas dan fungsi, Rencana Kerja 2021, Masalah yang dihadapi, Rencana tindak lanjut / Duties and functions, 2021 Work Plan, Problems encountered, Follow-up plans
3.	27 Juli 2021 July 27, 2021	Unit Usaha PLTA / PLTA Business Unit	• Alur proses bisnis PLTA; / Hydropower business process flow; • Pemeliharaan dan Permasalahan yang dihadapi; / Maintenance and Problems faced; • Evaluasi kinerja Semester I 2021 Unit Usaha PLTA; / Performance evaluation of Semester I 2021 PLTA Business Units; • Prognosa kinerja Unit Usaha PLTA sampai dengan akhir Desember 2021. Performance forecast of the Hydropower Business Unit until the end of December 2021.
4.	8 - 9 Oktober 2021 October 8 - 9, 2021	Unit Wilayar IV (Situ Cisanti KM Nol Sungai Citarum) dan Divisi Umum & TJSL (Program BioGas) TJSL / Wilayar Unit IV (Situ Cisanti KM Zero Citarum River) and General & TJSL Division (BioGas Program) TJSL	• Penjelasan kondisi hulu Sungai Citarum; / Explanation of the condition of the upper Citarum River; • Permasalahan dan tantangan yang dihadapi; / Problems and challenges faced; • Pelaksanaan Program TJSL BioGas; / Implementation of the BioGas CSR Program; • Monitoring dan Evaluasi Program TJSL 2021. Monitoring and Evaluation of TJSL 2021 Program.

No.	TANGGAL RAPAT Meeting Date	TUJUAN Goal	AGENDA Agenda
5.	20 November 2021 November 20, 2021	Unit Wilayah II (Aset Lahan Bongas dan Bendung Walahar) / Regional Unit II (Land Assets for Bongas and Walahar Weir)	• Penjelasan kondisi asset dan permasahalan yang dihadapi; / Explanation of asset condition and problems encountered; • Rencana pengembangan/ pemanfaatan asset; / Expansion plan/ asset utilization; • Monitoring dan evaluasi kinerja Unit Wilayah II; / Monitoring and evaluation of Regional Unit II performance; • Penjelasan dampak/manfaat operasi Bendung bagi masyarakat. Explanation of impacts/benefits Weir operation for the community.
6.	27 Desember 2021 December 27, 2021	SPAM Marunda / SPAM Marunda	• Penjelasan umum operasional SPAM Marunda; / General explanation of Marunda SPAM operations; • Permasalahan dan tantangan yang dihadapi; / Problems and challenges faced; • Monitoring dan Evaluasi Kinerja SPAM Marunda. / Monitoring and Evaluation of Marunda SPAM Performance.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Pengawas kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu :

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Pengawas , yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Rapat Dewan Pengawas (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Pengawas dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi.

Implementation of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities

Advice to the Board of Directors: Frequency and Procedures

The Supervisory Board provides advice to the Board of Directors both formally and informally through meetings. Formal meetings are divided into three types:

1. Committee Meetings, which are overseen by the Supervisory Board and include Audit Committee Meetings, Risk Monitoring Committee Meetings, and Remuneration and Nomination Committee Meetings.
2. Supervisory Board Meeting (RAKOM) is an internal meeting of the Supervisory Board and/ or by inviting the relevant field's Director.
3. Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors (RAKOMDIR), i.e. Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors.

Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Implementasi Strategi Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, oleh karenanya Dewan Pengawas senantiasa berusaha menambah dan memutakhirkan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kesempatan bagi untuk mengikuti berbagai pendidikan khusus, pelatihan, workshop, seminar, dan/ atau conference baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya ditanggung oleh Perum Jasa Tirta II.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas selama tahun 2020 telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab "Profil Perusahaan", sub bab "Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan , dan Satuan Pengawasan Intern".

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

Implementation of Corporate Strategy Competency Development Supervisory Board

Supervisory's Board

The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, so the Supervisory Board is constantly attempting to add and update its knowledge or competence. To facilitate the implementation of improving the Supervisory Board's competence, the Company provides opportunities for Perum Jasa Tirta II to participate in various special education, training, workshops, seminars, and/or conferences held both domestically and abroad.

This Annual Report, chapter "Company Profile," subchapter "Education and/or Training," contains information about the Supervisory Board's participation in a competency development program during 2020.

Implementation of the Supervisory Board's Duties

For the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies, the Supervisory Board's duties and responsibilities are as follows:

1. Ensuring that Good Governance is implemented in all business activities of the Company at all levels or levels of the organization.
2. Oversee the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities and provide advice to the Board of Directors.
3. The Supervisory Board is responsible for directing, monitoring, and evaluating the Company's strategic policies.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan melalui self assessment atas kinerja Dewan Pengawas dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RPB.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh pemegang saham. Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi berdasarkan berbagai aspek sebagaimana diuraikan sebagai berikut,

1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pelaksanaan penilaian dilakukan secara berkala.
2. Hasil Self Assessment GCG Penilaian kinerja Dewan Pengawas dapat diukur dari hasil pencapaian self assessment GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya. Pelaksanaan self assessment GCG merujuk pada Peraturan Perusahaan Indonesia.
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan:
   a. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Pengawas merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.
   b. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing Anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II .
   c. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka perlaksanaan atas GCG.

Supervisory Board Performance Evaluation

The Supervisory Board's Performance Assessment is carried out through a self-assessment of the Supervisory Board's performance and is reported and accounted for at the GMS.

Procedure for Carrying Out the Supervisory Board's Performance

Evaluation The shareholders conduct the Supervisory Board's performance evaluation. The Supervisory Board's performance is evaluated based on a number of factors, which are detailed below.

1. Overseeing the implementation of the Board of Directors' General Policy (KUD). The assessment is done on a regular basis.
2. GCG Self-Assessment Findings The Supervisory Board's performance can be assessed using the results of the GCG self-assessment achievement, Particularly in evaluating aspects of the Supervisory Board and its supporting organs. The GCG self-assessment implementation is based on the Indonesian Company Regulations.
3. Accountability for the Annual Report and Work Report of the Company:
   a. In its capacity as a supervisor, the Supervisory Board submits a supervisory responsibility report on the Company's management to the Board of Directors. The Supervisory Board's supervisory report is included in the Annual Report, which is submitted to the RPB for approval.
   b. With the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements, the RPB has given each Member of the Supervisory Board full release and discharge of responsibilities insofar as these matters are reflected in the Annual Report, without reducing the Members of the Supervisory Board's responsibility in the event of criminal acts or errors and/or omissions that cause losses to third parties, which can be fulfilled with Perum Jasa.
   c. The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of the Supervisory Board's accountability for the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.

4. Penilaian Mandiri (Self Assessment) Dewan Pengawas Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Pengawas dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemilik Modal. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolegial maupun individual. Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema dan besaran remunerasi dan kompensasi Dewan Pengawas maupun pertimbangan dalam penunjukan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Prosedur penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal dilakukan melalui penyelenggaraan RPB, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.

2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II.
3. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka pelaksanaan GCG.

4. Supervisory Board Self-Assessment
The disclosure of the Supervisory Board's self-evaluation policy is done not only to meet the transparency requirement, but also as a form of accountability for implementation.

Supervisory Board Performance Evaluation

The Capital Owner is in charge of the Supervisory Board's performance evaluation. The Supervisory Board's performance is evaluated and assessed as a whole, taking into account both collegial and individual performance. The results of the Capital Owners' evaluation of the Supervisory Board's performance become an integral part of determining the Supervisory Board's remuneration and compensation scheme and amount, as well as considerations in the re-appointment of the members of the Supervisory Board concerned.

Procedure for Supervisory Board

Performance Evaluation The Capital Owner evaluates the performance of the Supervisory Board through the implementation of RPB, which uses the following mechanism:

1. The Supervisory Board, in its capacity as a supervisor, submits a report on the Board of Directors' responsibility for supervision of the Company's management. This report is included in the Annual Report, which is forwarded to the RPB for approval.

2. With the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements, the RPB has granted full release and discharge of responsibilities to each member of the Supervisory Board insofar as these matters are reflected in the Annual Report, without prejudice to the members of the Supervisory Board's responsibility in the event of a criminal act or error and/or negligence that causes losses to third parties that can be met with Perum Jasa Tirta II's assets
3. The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of supervision over the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pemilik Modal menilai dan mengevaluasi kinerja pengawas Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain :

1. PengawasanterhadaprealisasiKebijakanUmum Direksi (KUD) yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian mandiri (self-assessment) GCG pada aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dilakukan oleh Pemilik Modal.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil keputusan RPB, Pemilik Modal menilai Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Pengawas atas pengawasan yang dilakukan hingga akhir tahun buku.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing komite Dewan Pengawas secara rutin setiap tahun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas organ pendukung Dewan Pengawas. Masing-masing komite Dewan Pengawas dinilai dan dievaluasi berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas komite yang mencakup realisasi pelaporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, frekuensi kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan dalam tugasnya membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Pengawas yang pada tahun buku 2021 telah dilaksanakan dengan baik.

Criteria for Capital Owners Supervisory Board Performance

Assessment assesses and evaluates the Supervisory Board's supervisory performance by taking into account several criteria, including:

1. Periodic supervision of the implementation of the Board of Directors General Policy (KUD);
2. Self-assessment of GCG on aspects of the Supervisory Board and its supporting organs using the applicable laws and regulations;
3. Accountability for the Annual Report and Work Report of the Company

The Capital Owner is the party conducting

The assessment of the Supervisory Board's performance in the Joint Discussion Meeting (RPB).

Results of the Supervisory Board's Performance Evaluation

Based on the RPB decision, the Capital Owner determined that the Supervisory Board had carried out its duties properly and granted the Supervisory Board full waiver of responsibility for the supervision performed until the end of the fiscal year.

Evaluation of the Supervisory Board Committee's Performance

Every year, the Supervisory Board conducts performance assessments of each committee of the Supervisory Board as a material consideration in order to improve the quality of the Supervisory Board's supporting organs' duties implementation. Each Supervisory Board committee is assessed and evaluated based on the performance of the committee's task implementation, which includes the realization of reporting on the implementation of the committee's duties in accordance with their respective responsibilities, the frequency of meeting attendance, and recommendations given in their duties to assist the implementation of the Supervisory Board's supervisory and advisory functions, which in the fiscal year 2001.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perum Jasa Tirta II . Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan apabila :

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
4. Melanggar ketentuan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengundurkan diri Selain itu, jabatan anggota Dewan Pengawas juga dapat berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
   c. Masa jabatannya berakhir; dan
   d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RPB.

Mechanism for Supervisory Board Resignation and Dismissal

According to the Articles of Association of Perum Jasa Tirta II, all members of the Supervisory Board must have adequate integrity, competence, and reputation. Members of the Supervisory Board may be dismissed if they:

1. Are unable to carry out their duties properly;
2. Are found guilty by a court decision with permanent legal force;
3. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the state;
4. Violate the provisions of the articles of association or applicable laws and regulations.
5. Resigning Furthermore, a member of the Supervisory Board's position may be terminated if they:
   a. die;
   b. No longer meets the requirements for membership on the Supervisory Board under the provisions of the articles of incorporation and applicable laws and regulations;
   c. His term of office expires;
   d. Dismissed based on the GMS decision.

DIREKSI
DIRECTORS' BOARD

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan . Direksi mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi

The Board of Directors is fully responsible for the Company's management, as well as the development and implementation of strategies and policies within the Company in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the powers and responsibilities set forth in the Articles of Association as well as the applicable laws and regulations. The Board of Directors' duties and responsibilities are outlined in the Company's articles of incorporation.

Jumlah dan Komposisi Direksi / Number and Composition of Directors

No.	NAMA Name	JABATAN Position	KEP. MENTERI TENTANG PENGANGKATAN Kep. Menteri Tentang Pengangkatan	KETERANGAN Description
1.	**Imam Santoso**	Direktur Utama President Director	SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 SK-350/MBU/10/2020 27 October 2020	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020
2.	**Haris Zulkarnain**	Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Director of Finance & Human Resources	SK- 222/MBU/08/2018 1 Agustus 2018 SK-222/MBU/08/2018 August 1, 2018	Sejak 1 Agustus 2018 sampai dengan 29 Desember 2021 / Since August 1, 2018 until December 29, 2021
3.	**Anton Mardiono**	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	SK-196/MBU/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 SK-196/MBU/06/2020 June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / Since June 11, 2020 until now
4.	**Indriani Widiastuti**	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	SK-196/MBU/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 SK-196/MBU/06/2020 June 11, 2020	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan 29 Desember 2021 / From 11 June 2020 to 29 December 2021
5.	**Indriani Widiastuti**	Direktur Keuangan ,Sumber Daya Manusia & MANRISK Director of Finance, Human Resources & MANRISK	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan / SK 420/MBU/12/2021 Dated December 29, 2021 concerning the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)	Sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d Sekarang / From December 29, 2021 to now
6.	**Dikdik Permadi Yoffana**	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II / SK 420/MBU/12/2021 Dated December 29, 2021 concerning the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)	Sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d Sekarang / From January 29, 2021 to now

Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kelola perusa 1.

Board of Directors Evaluation Criteria

All members of the Board of Directors meet the criteria outlined in the applicable laws and regulations, as well as the corporate governance guidelines.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah:

a. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
b. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, tidak berlaku mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
c. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan Lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
d. Antar anggota dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut.
e. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
    1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
    2. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan
    3. Pengawas pada BUMN.
    4. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.
    5. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanga
    6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
    7. Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.

People who can be appointed to the Board of Directors are:

a. Individuals who can carry out legal actions and have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Supervisory Board who are found guilty of causing a company or Perum to be declared bankrupt or people who have never been convicted of committing a crime that is detrimental to the state's finances.

b. Members of the Board of Directors are appointed using a fit and proper test mechanism administered by a team and/or professional institution established and/or appointed by the Minister. The fit and proper test mechanism does not apply in the case of reappointment to the same position for members of the Board of Directors who are considered capable of carrying out their duties well during their term of office.
c. Candidates for Board of Directors who have been declared to have passed the fit and proper test, as well as members of the Board of Directors who have been reappointed, must sign a management contract before being appointed to the Board of Directors.
d. It is prohibited to have blood relations or marital relations up to the third degree between members and between members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, either in a straight line or a sideways line. If such circumstances arise, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.

e. Board members are not permitted to hold concurrent positions as:
    1. Members of the Board of Directors in BUMN, BUMD, or privately owned enterprises.
    2. Supervisory Board Member
    3. Supervisory Board Member in BUMN
    4. Positions in central or regional government agencies or institutions with structural and functional responsibilities.
    5. Other positions as defined by applicable laws and regulations
    6. Other positions that could lead to conflicts of interest
    7. Members of the Board of Directors are not permitted to serve as administrators of political parties, candidates for legislative members, members of the legislature, candidates for regional heads, or members of the legislature.

8. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan. Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021.
Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan ;
2. Direksi menyusun rencana kerja jangka panjang (Corporate Plan), Rencana Bisnis Perusahaan (Business Plan), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemilik Modal untuk mendapatkan persetujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemilik Modal;
4. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (Surat Keputusan AI), auditor eksternal, hasil audit atau hasil audit lain;
6. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan ;
7. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sehat;
8. Direksi menyediakan atau memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Adapun penetapan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

candidates for regional heads, deputy regional heads, and/or regional heads
8. Members of the Board of Directors are not permitted to benefit personally from the Company's activities other than the income received as a member of the Board of Directors.

Board of Directors Duties and Responsibilities

The Board of Directors is fully responsible for the Company's management, as well as the development and implementation of strategies and policies within the Company in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the authorities and responsibilities outlined in Government Regulation No. 7 of 2021's Articles of Association.
The Board of Directors' duties and responsibilities include the following:

1. The Board of Directors is fully responsible for the Company's management implementation;
2. The Board of Directors develops a long-term work plan (Corporate Plan), a Company Business Plan (Business Plan), and a Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
3. The Board of Directors submits an annual report to the General Meeting of Capital Owners for approval as a form of accountability for the implementation of the Board of Directors' duties to the Capital Owners;
4. The Board of Directors incorporates GCG principles into all aspects of the Company's operations at all levels or levels of the organization;
5. The Board of Directors follows up on internal audit findings and recommendations (AI Decision Letter), external auditors, audit findings, or other audit findings;
6. The Board of Directors develops the Company's risk management policies and strategies and is responsible for putting those policies and strategies into action.
7. It is the responsibility of the Board of Directors to develop and maintain an effective internal control system, as well as to ensure that the system runs smoothly and securely.
8. The Board of Directors provides or provides the Supervisory Board with accurate, relevant, and timely data and information.

The Board of Directors has determined the division of tasks and delegation of authority as follows:

Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Utama / President Director	Direktur Utama mempunyai tugas untuk melaksanakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian di Bidang Keuangan, SDM, Operasi dan Pemeliharaan, Pengembangan Usaha, Kesekretariatan, Pengawasan Intern, Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen Perusahaan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The President Director has the duty to carry out the management of the Company which includes guidance, supervision, control in the fields of Finance, Human Resources, Operations and Maintenance, Business Development, Secretariat, Internal Control, Performance Control and Company Management System in order to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the President Director has the following functions: a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Keuangan dan Manajemen Risiko; / Establish the Company's management policies in the Management of Financial and Risk Management tasks; b. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Operasi dan Pemeliharaan; / Establishing the Company's management policy in the Management of Operation and Maintenance tasks; c. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Pengembangan usaha yang meliputi kebijakan: Pengembangan Usaha; / Establishing company management policies in the management of business development tasks which include the following policies: Business Development; d. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Direktur Operasi dan Pemeliharaan dan Direktur Pengembangan Usaha; / Improve coordination and working relationships with the Director of Finance, HR and Risk Management, Director of Operations and Maintenance and Director of Business Development; e. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; / Establishing the Company's management policy; f. Melakukan pembinaan dan pengendalian tugas Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen; / Conducting coaching and controlling the duties of the Corporate Secretariat, Internal Control Unit, Performance Control Division and Management System; g. Melakukan pembinaan hubungan dengan instansi pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat yang berkaitan dengan tugas Perusahaan; / Conducting relationship development with government agencies, private sector and community related to the Company's duties; h. Melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan / Implementing Good Corporate Governance; and i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri dan Menteri Teknis. / Submit a report on the results of the implementation of tasks to the Government in this case the Minister and the Technical Minister. **Susunan Organisasi** / Organization Structure Direktur Utama membina, mengawasi dan mengendalikan para Direktur dan Unit Kerja sebagai berikut: / The President Director fosters, supervises and controls the following Directors and Work Units: a. Direktorat Keuangan SDM dan Manajemen Risiko; / b. Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; / Directorate of Operations and Maintenance; c. Direktorat Pengembangan Usaha; / Directorate of Business Development; d. Sekretariat Perusahaan; / Corporate Secretariat; e. Satuan Pengawasan Intern; dan / Internal Control Unit; and f. Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen. /

Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko / Director of Finance, HR and Risk Management	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The Director of Finance, HR and Risk Management has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on the company's strategic planning activities which include RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and development of ICT to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Finance, HR and Risk Management has the following functions: a. Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; b. Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Fostering, controlling and supervising management in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; c. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; d. Menyampaikan laporan kinerja di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / Submit a performance report in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human Resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development; e. Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Keuangan dan SDM; dan / Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, Company Long Term Plan (RJPP) and Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Finance and HR; and f. Mengkoordinasikan ketersediaan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). / Coordinate the availability of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Budget Work Plan (RKAP). **Susunan Organisasi** / Organization Structure Direktur Keuangan dan SDM membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / The Director of Finance and HR fosters, supervises and controls the following Work Units: a. Divisi Rencana Strategis dan Teknologi Informasi Komunikasi; / Division of Strategic Planning and Information and Communication Technology; b. Divisi Keuangan dan Akuntansi; / Finance and Accounting Division; c. Divisi Sumber Daya Manusia; / Human Resources Division; d. Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / General Division and Social and Environmental Responsibility; e. Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan; / Inventory, Asset Control and Archives Division; f. Unit Layanan Pengadaan; dan / Procurement Service Unit; and g. Unit Layanan Diklat. / Training Service Unit.

Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Operasi dan Pemeliharaan / Director of Operation and Maintenance	Direktur Operasi dan Pemeliharaan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan saran prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; untuk memenuhi maksud dan tujuan Perushaaan. / The Director of Operations and Maintenance has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on planning and controlling activities for the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Operations and Maintenance has the following functions: a. Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasaran ketenagalistrikan; ; pengelolaan SPAM regional 1, pengelolaan laboratorium; / Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of natural resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; ; regional SPAM management 1, laboratory management b. Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan saran prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan SPAM regional 1 dan laboratorium; / Fostering, controlling and supervising management in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; SPAM Regional 1 and laboratory management; c. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan saran prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; SPAM Regiopnal 1 , pengelolaan laboratorium; / Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; SPAM Regional 1 ; laboratory management; d. Menyampaikan laporan kinerja di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; Pengelolaan SPAM Regional 1; pengelolaan laboratorium; / Submitting performance reports in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of water resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; management SPAM Regional 1; laboratory management; e. Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. / Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Operations and Maintenance Directorate. **Susunan Organisasi** / Organization Structure Direktur Operasi dan Pemeliharaan membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / The Director of Operations and Maintenance fosters, supervises and controls the following Work Units: a. Divisi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik; / Division of Operation and Maintenance of Water Resources and Electrical Resources; b. Divisi Supervisi Teknis; / Technical Supervision Division; c. Unit Wilayah I; / Regional Unit I; d. Unit Wilayah II; / Region II Units; e. Unit Wilayah III; / Regional Unit III; f. Unit Wilayah IV; / Region IV Units; g. Unit PLTA; / Hydropower Units; h. Unit Kerja Khusus SPAM Regional Jatiluhur 1 dan / Jatiluhur Regional SPAM Special Work Unit 1 and i. Unit Layanan Laboratorium. / Laboratory Service Unit.

Jabatan / Position	Uraian Tugas dan Wewenang / Description of Duties and Authorities
Direktur Pengembangan Usaha / Director of Business Development	Direktur Pengembangan Usaha memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan; Pengusahaan Pariwisata dan Hotel untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / The Director of Business Development has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on Business Development activities; Commercial and Customer Service; Tourism and Hotel Business to fulfill the purposes and objectives of the Company. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengembangan Usaha mempunyai fungsi: / In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Business Development has the following functions: a. Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development of AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; b. Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Fostering, controlling and supervising management in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; c. Meningkatkan koordiansi dan hubugnan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Improve coordination and work relations with Stakeholders in carrying out tasks in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; d. Menyampaikan laporan kinerja di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Submit performance reports in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; e. Bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / Business Development Sector; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets; f. Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Pengembangan Usaha. / Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Business Development. **Susunan Organisasi** / Organization Structure Direktur Pengembangan Usaha membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / The Director of Business Development fosters, supervises and controls the following Work Units: a. Divisi Pengembangan Usaha; / Business Development Division; b. Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan; dan / Commercial and Customer Service Division; and c. Divisi Usaha Pariwisata dan Hotel. / Tourism and Hotel Business Division.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi yang memuat tata laksana kerja Direksi serta tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis dengan pembagian tugas yang jelas. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi tersebut telah dimuat dalam Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pokok-pokok yang dimuat dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi telah diselaraskan dengan visi dan misi Perum Jasa Tirta II serta standar kerja yang tinggi sesuai best practices GCG dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip GCG. Pedoman dan tata tertib Direksi antara lain mengatur mengenai :

Ketentuan Umum

- Pembagian tugas dan wewenang Direksi
- Susunan Direksi
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab
- Waktu dan Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Etika kerja Direksi
- Perjalanan dinas
- Laporan
- Pengangkatan dan Pemberhentian

Guidelines and Work Rules of the Board of Directors

The implementation of the Board of Directors' functions, duties, and responsibilities is guided by the Board of Directors' Work Guidelines and Code of Conduct, which contain the Board of Directors' work procedures and the stages of activities in a structured and systematic manner with a clear division of tasks. The Board Manual contains the guidelines and work procedures for the Board of Directors, which were ratified in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company regarding Guidelines for Good Corporate Governance Number: 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The points contained in the Board of Directors' work guidelines and regulations have been harmonized with the vision and mission of Perum Jasa Tirta II, as well as high work standards in accordance with GCG best practices, by taking into account corporate law principles, provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and GCG principles. Among other things, the Board of Directors' guidelines and rules of conduct govern:

General Requirements

- Board of Directors' Duties and Authorities
- Board of Directors' Composition
- Board of Directors' Duties, Authorities, and Responsibilities
- Board of Directors' Time and Work
- Board of Directors' Meetings
- Board of Directors' Work Ethics
- Business Trips
- Reports
- Appointment and Rejection

MEKANISME PENGANGKATANDIREKSI
BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT MECHANISM

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi. Adapun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi adalah sebagai berikut:

Mechanisms and procedures for the appointment and dismissal of the Board of Directors refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-03/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors and State-Owned Enterprises. The provisions outlined in these regulations are then incorporated into the Board of Directors' work guidelines and rules. The following is the procedure for appointing and dismissing members of the Board of Directors:

Pengangkatan Direksi

- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis;
- Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas melalui surat penunjukan yang disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam jangka waktu paling lambat
  2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Dewan Pengawas, Menteri BUMN menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang;
- Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- Pemberhentian Direksi Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:
  (i) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  (ii) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  (iii) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan;
  (iv) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan ;
  (v) Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  (vi) Meninggal dunia; Mengundurkan diri.

Board of Directors Appointment

- Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Minister of BUMN;
- Members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years and can be appointed again for 1 (one) time the following term of office;
- When deemed necessary, the BUMN Minister can request input from the Technical Minister in the framework of the appointment of the Board of Directors;
- If one or more members of the Board of Directors are permanently unable to carry out their duties, or if a position is vacant and the replacement has not been appointed or has not yet assumed the position, the position is assumed by another member of the Board of Directors who is temporarily appointed by the Board of Supervisors via a letter of appointment submitted to the Minister of BUMN by the latest late 14 (fourteen) days. The Minister of BUMN appoints new members of the Board of Directors to fill vacant positions within 2 (two) months of receiving notification from the Board of Supervisors;
- If all of the members of the Board of Directors are permanently unable to carry out their duties, or if the position of the Board of Directors is completely vacant and has not been filled, the Company's management is temporarily carried out by the Board of Supervisors.
- Board of Directors Dismissal Members of the Board of Directors may be removed from office before the end of their term.

(i) The management contract stipulates that he is unable to fulfill his obligations.
(ii) Unable to perform his duties well;
(iii) Failure to implement legislative and/ or regulatory provisions;
(iv) Involved in actions detrimental to the Company;
(v) Found guilty by a court decision with permanent legal force;
(vi) Died; Resigned.

- Keputusan pemberhentian karena alasan (i) sampai (vii) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya, dan bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri kepada Menteri BUMN tidak memberikan keputusannya, maka rencana tersebut menjadi batal;
- Pemberhentian karena alasan (v) tersebut di atas merupakan pemberhentian tidak hormat;
- Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri BUMN jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;

- Termination decisions based on reasons I to (vii) are made after the individual has been given an opportunity to defend himself. Self-defense is submitted in writing to the Minister of BUMN within 1 (one) month of the member of the Board of Directors concerned being notified in writing of the termination plan by the Minister of BUMN. Plan termination the member of the Board of Directors concerned can continue his duties, and if he does not provide the decision within 2 (two) months from the date of submission of the self-defense to the Minister of BUMN, then the plan becomes void;
- Termination due to reason (v) above is a dishonorable termination;
- His position as a member of the Board of Directors ends with the Minister of BUMN issuing a termination decision based on the Minister's Decision stating the reasons;

Program Orientasi Direksi Baru

Program orientasi atau pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lebih senior. Adapun materi program orientasi yang diberikan kepada Direksi baru meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II;
2. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi yang dilaksanakan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

New Director Orientation Program

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time receive an orientation or introduction program on Perum Jasa Tirta II.
Senior members of the Board of Directors oversee the implementation of the orientation program material The orientation program for new Board of Directors covers the following topics:

1. Perum Jasa Tirta II's implementation of GCG principles;
2. A summary of Perum Jasa Tirta II's activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and strategic issues;
3. Evidence of delegated authority;
4. A description of the Board of Directors' duties and responsibilities.

Orientation programs in the form of presentations, meetings, visits to branch offices, and document review, as well as other programs in accordance with Company policy, are implemented.

Selain itu juga diperhatikan tingkat kehadiran dan efektivitas anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan Perum Jasa Tirta II kepada Direksi baru.
Pada tahun 2021, terdapat anggota Direksi yang baru diangkat yaitu Bapak Imam Santoso sebagai Direktur Utama, Ibu Indriani Widyastuti sebagai Direktur Pengembangan Usaha, dan Bapak Anton Mardiyono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Para direksi telah mengikuti rangkaian program pengenalan Perum Jasa Tirta II dengan baik.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka memastikan bahwa Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang disyaratkan, Perusahaan memiliki kebijakan suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jasa Tirta II mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas :
    1. a) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
    2. b) Direksi anak Perusahaan BUMN/ Perusahaan patungan BUMN;
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Pejabat BUMN lain dan sumber lainnya.

Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemanggilan terhadap calon anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
2. Melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan lembaga profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian lembaga profesional, jika pengujian menggunakan lembaga profesional;

Furthermore, the level of attendance and effectiveness of Board of Directors members in participating in a series of programs introducing Perum Jasa Tirta II to the new Board of Directors is taken into account.
Mr. Imam Santoso as President Director, Mrs. Indriani Widyastuti as Director of Business Development, and Mr. Anton Mardiyono as Director of Operations and Maintenance were all appointed to the Board of Directors in 2021. The directors have used a series of programs to effectively introduce Perum Jasa Tirta II.

Succession Policy for the Board of Directors

To ensure that the Company is managed by management with the necessary skills and competencies, the Company has a Board of Directors succession policy in place, with the determination of candidates for the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II referring to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-03/ MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of Stat Candidates for the Board of Directors can be found in the following places:

1. Directors of SOEs;
2. Supervisory Board / Supervisory Board of SOEs;
3. BUMN talents comprised of:
    1. a) Officials one level below the Board of Directors or officials with special accomplishments;
    2. b) Directors of subsidiaries of BUMN/BUMN joint venture companies;
4. Ministry of SOEs talents;
5. Other BUMN officials and sources

The Board of Directors is chosen by an Evaluation Team appointed by the Minister based on proposals from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry. The Evaluation Team's selection procedure is as follows:

1. Calling for candidates for members of the Board of Directors who are on the Minister-approved Candidate List to take the Fit and Proper Test (UKK);
2. Conduct testing on candidates for Board of Directors members if no professional institution is used;
3. Evaluate the results of testing conducted by professional institutions, if testing is conducted by professional institutions;

4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan;
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
6. Menyampaikan seluruh dokumen Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)

Direksi Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Direksi telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Rapat Direksi

Direksi secara berkala menyelenggarakan rapat internal Direksi maupun rapat gabungan bersama Dewan Pengawas. Adapun rapat Direksi dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengelolaan Perusahaan, kegiatan operasi, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi. Keputusan rapat Direksi dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode voting. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

Selama tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal secara offline maupun online sebanyak 14 kali.

4. Make decisions and provide recommendations on the assessments conducted;
5. Determine the final result of the evaluation, which is signed by the Chair and Deputy Chair of the Evaluation Team and submitted to the Minister for stipulation;
6. Submit all Fit and Proper Test (UKK) documents to the Ministry's Secretary for administration;
7. Perform any other tasks assigned by the Minister to expedite the Fit and Proper Test (UKK) process.

The Fit and Proper Test

Perum Jasa Tirta II's Board of Directors works hard to ensure that all members of the Board of Directors have the integrity, competence, reputation, and experience required to carry out their respective functions and duties. All members of the Board of Directors have passed the Fit & Proper Test to ensure that their background of competence, expertise, reputation, and work experience is appropriate for the needs of the position.

Meetings of the Board of Directors

Directors hold internal Board of Directors meetings as well as joint meetings with the Supervisory Board on a regular basis.
Meanwhile, the Board of Directors' meeting serves as a forum for discussion and debate on a variety of topics related to the Company's management, operational activities, and decision-making authority.

The Board of Directors is required to hold a meeting at least once a month, attended by a majority of all Board of Directors members. Each member of the Board of Directors must attend at least 75% of the total number of Board of Directors meetings. Decisions of the Board of Directors meeting are carried out in accordance with the principle of deliberation to reach consensus, and if consensus is not reached, the decision is made in accordance with the law.
The meeting's results are recorded in the minutes of the meeting, including dissenting opinions and their reasons, signed by all participants present, and properly documented.

The Board of Directors held 14 internal meetings in 2021, both offline and online.

No.	NAMA Name	JABATAN Position	RAPAT / Meeting					
			DIREKSI / Direktor			GABUNGAN / Combined		
			JUMLAH RAPAT Number of Meetings	JUMLAH KEHADIRAN Number of Attendance	%	JUMLAH RAPAT Number of Meetings	JUMLAH KEHADIRAN Number of Attendance	%
1.	**Imam Santoso**	Direktur Utama President Director	12	12	100,00	12	12	100,00
2.	**Haris Zulkarnaen***	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	12	12	100,00	12	12	100,00
3.	**Indriani Widiastuti**	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	12	12	100,00	12	12	100,00
4.	**Anton Mardiyono**	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	12	12	100,00	12	12	100,00
	JUMLAH / Total		**48**	**48**	**100,00**	**48**	**48**	**100,00**

*Menjabat sampai dengan 29 Desember 2021 / Served until December 29, 2021

Keberagaman Komposisi Direksi

Perum Jasa Tirta II mengedepankan pentingnya penyesuaian diri di industri dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan profesional secara komprehensif, termasuk dalam tingkatan manajemen kunci. Dalam hal ini, Perusahaan memperhatikan keberagaman komposisi dan karakteristik Direksi berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian guna meng-hadirkan solusi pemecahan masalah yang beragam dari berbagai perspektif sesuai dengan keahliannya masing-masing.

The Board of Directors is diverse in its composition

Perum Jasa Tirta II emphasizes the importance of industry adaptation by comprehensively preparing reliable and professional Human Resources (HR), including at key management levels. In this case, the Company emphasizes the diversity of the Board of Directors' composition and characteristics based on age, educational background, work experience, and expertise in order to present various problem-solving solutions from various perspectives based on their respective expertise.

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Pengawas .

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Pengawas dan/atau Pemilik Modal Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan , sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Board of Directors Affiliation

Directors always act independently, in the sense that there are no conflicts of interest that could impair their ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to one another and in relation to the Supervisory Board.

The Board of Directors has no financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Directors, Supervisory Board, and/or Controlling Capital Owner, and they can carry out their duties and responsibilities independently.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.
Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

The Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or other Director in State-Owned, Regional, and Private Enterprises, as well as other positions related to the Company's management, structural positions, and other functional positions. in central and local government agencies/institutions, as well as other positions, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations

The table below shows the independence of the Board of Directors:

NAMA Name	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN Family Relations with						HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN Financial Relations with						KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN PERUSAHAAN LAIN Management and Share Ownership with Other Companies					
	DEWAN PENGAWAS Supervisory Board		DIREKSI Board of Director		PEMILIK MODAL Capital Owners		DEWAN PENGAWAS Supervisory Board		DIREKSI Board of Director		PEMILIK MODAL Capital Owners		DEWAN PENGAWAS Supervisory Board		DIREKSI Board of Director		PEMILIK MODAL Capital Owners	
	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO	YA YES	TIDAK NO
Imam Santoso	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Haris Zulkarnaen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anton Mardiyono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Indriani Widiastuti	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Pengawas /Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;

Board of Directors Policy on Concurrent Positions

Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as: According to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOE Number PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February 2015, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and/or Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Supervisory Board / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Administrators of political parties and/or legislative candidates/members;

5. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

5. Positions that may cause conflicts of interest and/or other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations;
6. Legislative candidates or regional head/deputy regional heads.

Information regarding the concurrent positions of members of the Directors is presented in the following table:

NAMA Name	JABATAN Position	JABATAN PADA PERSEROAN LAIN Position in Other Companies	NAMA PERSEROAN Name Company
Imam Santoso	Direktur Utama President Director	Tidak Ada No Position	Tidak Ada No Position
Didik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Development Director	Tidak Ada No Position	Tidak Ada No Position
Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan, SDM dan MR Director of Finance, HR and MR	Tidak Ada No Position	Tidak Ada No Position
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	Komisaris Commissioner	PT. Jasa Tirta Luhur
Haris Zulkarnain*	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Komisaris Utama President Commissioner	PT. Jasa Tirta Luhur

* Menjabat sampai dengan 29 Desember 2021 / Served until December 29, 2021

Kepemilikan Saham Direksi

Hingga 31 Desember 2021, Perum Jasa Tirta II tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek manapun dan tidak pernah melakukan program kepemilikan saham oleh manajemen (Management Stock Option Program / MSOP) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan (Employee Stock Option Program / ESOP). Sehingga tidak ada saham yang dimiliki oleh Direksi.

Share Ownership of the Board of Directors

As of December 31, 2021, Perum Jasa Tirta II has never conducted a public offering of shares on any stock exchange and has never conducted a share ownership program by management (Management Stock Option Program / MSOP) as well as employee stock ownership program (Employee Stock Option Program / ESOP). So that there are no shares owned by the Board of Directors.

NAMA Name	JABATAN Position	KEPEMILIKAN SAHAM DI / Share Ownership in	
		Perum Jasa Tirta II	PERUSAHAAN LAIN Other Companies
Imam Santoso	Direktur Utama President Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Didik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Development Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan, SDM dan MR Director of Finance, HR and MR	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations and Maintenance	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Haris Zulkarnain*	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing

* Menjabat sampai dengan 29 Desember 2021 / Served until December 29, 2021

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2021, antara lain sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menjalankan pengelolaan Perusahaan dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Perusahaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan senantiasa memperhatikan visi, misi, dan tujuan Perusahaan . Uraian pelaksanaan tugas Direksi selama tahun buku 2021 adalah sebagai berikut :

- Direksi telah menetapkan kebijakan terkait kepengurusan Perusahaan ;
- Direksi telah mengambil keputusan dalam mewakili Perusahaan ;
- Direksi telah melakukan pengembangan Perusahaan dan Entitas Anak melalui keputusan yang dibuat selama tahun 2021.

Decisions and Implementation of Duties of the Board of Directors

Decisions of the Board of Directors that have been issued during 2021, among others, are as follows.

Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors in 2021

Throughout 2021, the Board of Directors has carried out the management of the Company based on the Company's Work Plan and Budget as well as the Long-Term Corporate Plan that has been determined by always paying attention to the Company's vision, mission and goals. The description of the implementation of the duties of the Board of Directors during the 2021 financial year is as follows:

- The Board of Directors has established policies related to the management of the Company;
- The Board of Directors has made a decision to represent the Company;
- The Board of Directors has developed the Company and its Subsidiaries through decisions made during 2021.

Penilaian Kinerja Direksi

Perum Jasa Tirta II melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja Direksi melalui beberapa metode, yaitu mekanisme penilaian GCG, khususnya aspek Direksi dan metode penilaian Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG

Perusahaan melakukan penilaian atas implementasi GCG aspek Direksi yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian kinerja Direksi melalui assessment GCG aspek Direksi mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan, antara lain kontribusi Direksi dalam penyusunan rencana pengembangan Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang, penetapan strategi dan inisiatif pengelolaan Perusahaan , pemenuhan target kinerja Perusahaan, penyelenggaraan rapat, pemberian keputusan Direksi, dan sejumlah kriteria lainnya.

Pada tahun 2021, hasil assessment GCG aspek Direksi Perum Jasa Tirta II meraih skor 30,0885 atau terealisasi 85,97% dari bobot aspek Direksi sebesar 35,00. Skor tersebut memperoleh predikat penilaian “Baik”.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Selain melalui assessment GCG, tolok ukur penilaian kinerja Direksi memperhitungkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan berpedoman pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI pada BUMN.

Board of Directors Performance Evaluation

Perum Jasa Tirta II conducts periodic assessments of the Board of Directors’ performance using several methods, including the GCG assessment mechanism, specifically the Board of Directors’ aspects, and the Key Performance Indicator (KPI) assessment method determined by the Ministry of SOEs.

Board of Directors Performance Evaluation Based on the GCG Assessment

The Company evaluates the implementation of GCG aspects of the Board of Directors in accordance with the framework of reference for the implementation of the GCG assessment developed by the Ministry of State-Owned Enterprises based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The GCG assessment of the aspects of the Board of Directors takes into account relevant criteria, such as the contribution of the Board of Directors in the preparation of short-term and long-term Company development plans, the determination of strategies and initiatives for managing the Company, meeting the Company’s performance targets, holding meetings, making decisions, and a variety of other criteria.

In 2021, the GCG assessment for the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II achieved a score of 30.0885, or 85.97 percent of the Board of Directors’ weight of 35.00. The score received a “Good” evaluation predicate.

Performance Evaluation of the Board of Directors Using Key Performance Indicators (KPI)

In addition to the GCG assessment, the performance assessment benchmarks of the Board of Directors take into account the achievement of Key Performance Indicators (KPI) based on the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) based on the Ministry of SOE Letter No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs in BUMN.

Kriteria yang dinilai berdasarkan KPKU mencakup 6 (enam) indikator utama, yaitu Keuangan dan Pasar, Fokus Pelanggan, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan, dan Agent of Development (AOD).

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan :

1. Mengundurkan diri;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RPB dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi

Dewan Pengawas dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dan beberapa fasilitas lainnya sebagai bayaran atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan penetapan, skema, dan prosedur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas , dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengikuti kaidah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas melakukan kajian mengenai remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi, baik dilakukan secara mandiri atau dapat meminta bantuan dari pihak independen;
2. Dewan Pengawas mengusulkan penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada kepada pemilik modal;

Finance and Markets, Customer Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Governance Leadership and Community Responsibility, and Agent of Development are among the criteria assessed using the KPKU (AOD).

Board of Directors Resignation and Dismissal Mechanism

Dismissal can be carried out if the member of the Board of Directors in question:

1. Resigns;
2. No longer meets the requirements of the applicable legislation;
3. Dies; or
4. Is dismissed based on the RPB's decision, with reasons given.

The Supervisory Board's Remuneration Policy

The Supervisory Board and the Board of Directors are entitled to remuneration and other benefits in exchange for carrying out their duties and responsibilities. The policy for determining, schemes, and remuneration procedures for the Supervisory Board and the Board of Directors refers to the provisions stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 regarding Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Boards, and Supervisory Boards of State-Owned Enterprise

Procedure for Determining Supervisory Board and Board of Directors Remuneration

The following rules govern the procedure for determining the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors:
1. The Supervisory Board reviews the remuneration received by the Supervisory Board and the Board of Directors, either independently or by requesting assistance from an independent party;

2. The Supervisory Board proposes to determine the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors to the owners of capital;

3. Pemilik Modal selanjutnya mengkaji dan menelaah usulan dari Dewan Pengawas;
4. Pemilik Modal menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi.

Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan tingkat perolehan keuntungan Perusahaan pada tahun buku;
2. Prestasi dan capaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
3. Pencapaian prestasi kerja dan KPI individual;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan .

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Ketentuan penentuan struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur adalah 85% dari Direktur Utama;
2. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 90% dari Ketua Dewan Pengawas;
3. Tantiem Direktur dan Ketua Dewan Pengawas masing-masing 85% dan 45% dari tantiem Direktur Utama;
4. Tantiem anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas;
5. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 mengacu pada ketetapan Nomor SR-143/WK2.MBU.C/10/2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II;
6. Pembayaran dihitung dengan memperhitungkan masa kerja efektif pada tahun buku. Pajak penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima.

3. The Capital Owner shall further review and review the proposal from the Supervisory Board;
4. The Capital Owner shall determine the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors;

Indicators of Remuneration Determination

The following indicators are considered when determining remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. The Company's financial performance and profitability in the fiscal year;
2. The Supervisory Board's and Board of Directors' achievements and performance achievements in accordance with their duties and responsibilities;
3. Meeting work performance and individual KPIs;
4. Taking into account the Company's long-term goals and strategies.

Structure of the Supervisory Board and the Board of Directors' Remuneration

The following provisions govern the structure of the Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. The Director's salary is 85 percent that of the President Director.
2. The Honorarium for Members of the Supervisory Board is 90% of the Chairperson of the Supervisory Board;
3. Bonuses for the Director and Chairman of the Supervisory Board are 85% and 45% of the bonuses for the President Director, respectively.
4. The bonus for Supervisory Board members is 90% of the bonus for the Chairman of the Supervisory Board.
5. Allowances and facilities for the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Year 2020 refers to the stipulation Number SR-143/WK2.MBU.C/10/2021 dated October 1, 2021 regarding the determination of the income of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II;
6. Payment is calculated by taking the effective working period in the financial year into account of income tax (PPh) on bonuses.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN PENGAWAS Remuneration Structure of Supervisory Board	STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI Remuneration Structure of Board of Directors
• Honorarium / Honorarium • Fasilitas / Facilities: a) Transportasi / Transportation b) Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance c) Tantiem / Tantiem d) Premi Asuransi / Insurance Premium • Bantuan Hukum / Legal Assistance	• Gaji / Honorarium • Fasilitas / Facilities: a) Tunjangan Hari Raya (THR) / Holiday Allowance (THR) b) Tunjangan Asuransi / Insurance Benefits c) Tunjangan Rumah Jabatan / Housing Allowance

Rincian Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Tahun 2021

Informasi mengenai rincian struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Remuneration details for the Supervisory Board and the Board of Directors in 2021

The following table contains information on the details of the remuneration structure, including the components of remuneration and the nominal amount of remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors:

PENGHASILAN BRUTO / Gross Income							
No.	NAMA Name	GAJI Honor	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB Other Benefits, Overtime Money, Etc	HONOR Honor	NATURA Naturra	THR THR	JUMLAH BRUTO Total Bruto
	DIREKSI						
1.	IMAM SANTOSO	1,223,000,000	270,000,000	0	0	101,000,000	1,594,000,000
2.	HARIS ZULKARNAIN	945,391,935	245,322,580	0	0	85,850,000	1,276,564,515
3.	ANTON MARDIYONO	1,039,550,000	270,000,000	0	0	85,850,000	1,395,400,000
4.	INDRIANI WIDIASTUTI	1,039,550,000	270,000,000	0	0	85,850,000	1,395,400,000
	DEWAN PENGAWAS						
5.	KELIK WIRAWAN WAHYU WIDODO	0	110,070,000	550,350,000	0	45,450,000	705,870,000
6.	MOHAMAD SOFWAN	0	99,063,000	495,315,000	0	40,905,000	635,283,000
7.	NUNING SRI REJEKI W.	0	99,063,000	495,315,000	0	40,905,000	635,283,000
8.	ROMY MARCANDI	0	99,063,000	495,315,000	0	40,905,000	635,283,000
	YUSUF ABDULLAH MUSTHOFA	0	30,300,000	151,500,000	0	15,150,000	196,950,000

ORGAN PENDUKUNG DEWAN PENGAWAS

SUPPORTING ORGANS OF THE SUPERVISORY BOARD

Organ dan Komite di bawah Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan , Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite-komite di bawah Dewan Pengawas . Komite-komite di bawah Dewan Pengawas terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Pengawas tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ Dewan Pengawas yang diangkat oleh Perusahaan yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan protokoler Dewan Pengawas demi terciptanya fungsi Kesekretariatan Dewan Pengawas yang berjalan efektif, efisien dan mendukung kelancaran aktivitas Dewan Pengawas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pengawas telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Job Description. Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pengawas.

The Supervisory Board's Organs and Committees

The Supervisory Board is assisted in supervising the Company by the Secretary of the Supervisory Board and the Committees under the Supervisory Board. The Supervisory Board's committees are the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. The Supervisory Board's organs and committees are described below.

The Supervisory Board Secretary

The Secretary of the Supervisory Board is an organ of the Supervisory Board appointed by the Company to assist in the smooth administration of the Supervisory Board's duties and responsibilities. The Secretary of the Supervisory Board is responsible for coordinating the identification, planning, and implementation of strategies for managing the Supervisory Board's secretarial and protocol activities in order to create an effective, efficient, and effective Supervisory Board Secretarial function and to support the smooth operation of the Supervisory Board's activities.

The Secretary of the Supervisory Board has been provided with Work Guidelines known as Job Descriptions to help him carry out his duties. The Secretariat of the Supervisory Board performs the duties of the Secretary of the Supervisory Board.

Profil Sekretaris Dewan Pengawas
Profile of the Secretary of the Supervisory



YUSUF ABDULLAH MUSTHOFA
Sekretaris Dewan Pengawas
Secretary of Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : KEP-05/DEWAS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. /
Indonesian citizen, residing in Jakarta. He served as the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II in accordance with the Supervisory Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II's Decree Number: KEP-05/DEWAS/III/2021 dated March 30, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Kehadiran Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan ;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas;
7. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
10. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas

Penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas mengacu pada Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas yang tercantum dalam Board Manual Board of Commissioners & Board of Directors yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik .

The Secretary of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities

The Secretary of the Supervisory Board's attendance has the following duties and responsibilities:

1. Meeting preparation, including the Supervisory Board's meeting material (briefing sheet);
2. Keep minutes of the Supervisory Board meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Managing the Supervisory Board's documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;
4. Creating the Supervisory Board's Work Plan and Budget;
5. Writing Supervisory Board reports;
6. Carrying out other Supervisory Board duties;
7. Ensure that the Supervisory Board abides by the laws and regulations, as well as the GCG principles;
8. Provide information requested by the Supervisory Board on a regular basis and/or at any time;
9. Coordinate Committee members as needed to expedite Supervisory Board duties;
10. Serve as the Supervisory Board's liaison officer with other parties.

Work Instructions for the Supervisory Board Secretary The

Implementation of functions and duties and responsibilities of the Supervisory Board Secretary refers to the Work Guidelines for the Secretary of the Supervisory Board, which are listed in the Board Manual of the Board of Commissioners & Board of Directors and are stipulated by a Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Companies (PERUM).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2021, Sekretaris Dewan Pengawas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Pengawas, meliputi:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan pelaksanaan tata tertib Direksi dan prinsip-prinsip GCG secara tertib dan patuh.
2. Membuat risalah rapat baik internal maupun rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi dan mendokumentasikannya dengan baik.
3. Menjalankan proses administrasi dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya.
4. Menyampaikan dan membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas selama tahun 2021.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Pengawas secara akurat dan tepat waktu.
6. Menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Pengawas apabila dibutuhkan.
7. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
8. Menjalankan fungsi penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain yang berkepentingan.

Implementation of the Supervisory Board Secretary's Duties

During 2021, the Secretary of the Supervisory Board engaged in a variety of activities to support the Supervisory Board's supervisory function, including:

1. Assisting the Supervisory Board in the orderly and obedient implementation of the Board of Directors' governance orderliness and the GCG principles.
2. Take and properly document minutes of all internal and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors.
3. Manage the administrative process for the Supervisory Board's documents, including incoming and outgoing letters, as well as other documents.
4. Submit and draft the Supervisory Board's Work Plan and Budget for 2021.
5. Prepare and submit accurate and timely reports to the Supervisory Board.
6. If necessary, provide information to the Supervisory Board.
7. If necessary, coordinate Committee members in order to expedite the Supervisory Board's duties.
8. Serve as the Supervisory Board's liaison officer with other interested parties.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2021, dikarenakan oleh pandemic Covid-19 maka Perum Jasa Tirta II tidak melaksanakan pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas .

Supervisory Board Secretary Competency Development

Due to the Covid-19 pandemic in 2021, Perum Jasa Tirta II did not carry out the Supervisory Board Secretary competency development.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dengan memperhitungkan capaian tugas dan tanggung jawab sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan manajemen Perusahaan dan fungsi kesekretariatan lainnya. Selama tahun 2021, Dewan Pengawas menilai bahwa Sekretaris Dewan Pengawas telah dilakukan dengan baik dan memuaskan.

Evaluation of the Supervisory Secretary's Performance

Board The Supervisory Board is responsible for assessing and evaluating the Secretary of the Supervisory Board's performance, taking into account the accomplishments of the duties and responsibilities as a liaison between the Supervisory Board and the Company's management, as well as other secretarial functions. The Supervisory Board considered the Secretary of the Supervisory Board to have performed well and satisfactorily in 2021.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai salah satu organ kelengkapan Dewan Pengawas yang berfungsi untuk memastikan terselenggaranya prinsip- prinsip GCG, pengendalian internal, proses audit, dan pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as one of the organs of the Supervisory Board that functions to ensure the implementation of GCG principles, internal control, audit processes, and monitoring compliance with laws and regulations in every business activity at all levels in the Company's organization. In carrying out its duties, the Audit Committee is independent and reports to the Supervisory Board.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Basis for the Establishment of the Audit Committee

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as a form of compliance with the laws and regulations, namely:

1. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to PER-1/ MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
2. Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Selama tahun 2021, tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit Perum Jasa Tirta II. Jumlah anggota Komite Audit Perum Jasa Tirta II pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari anggota dewan pengawas sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal independen yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan korporasi.

Number and Composition of the Audit Committee

In 2021 there were no changes in the membership of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II. The number of members of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II in 2021 is 3 (three) people, consisting of a member of the supervisory board as the Chairman of the Committee and 2 (two) members of the Audit Committee from independent external parties who are experts in accounting and corporate finance.

Profil Komite Audit
Profile of Audit Committee



NUNING SRI REJEKI WULANDARI

Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas)
Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)

Profil Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari telah dimuat dalam Laporan Tahunan ini, bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Profil Dewan Pengawas'.
Profile of Mrs. Nuning Sri Rejeki Wulandari has been provided in this Annual Report on 'Company Profile' chapter, 'Profile of Supervisory Board' sub-chapter.

NAMA / Name	JABATAN Position	DASAR PENETAPAN Basis of Appointment Position	KEAHLIAN Expertise	MASA JABATAN Terms of Office
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas) Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)	Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-83/DEWAS/XI/2020 / Supervisory Board Decree: KEP-83/ DEWAS/XI/2020	Pengelolaan Barang Milik Negara / State Property Management	5 tahun 5 years



WAWAN SAEFUL ANWAR

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth:
Garut, 12 Maret 1957 / March 12, 1957
Usia / Age : 62 tahun / 62 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II SK nomor: KEP-80/DEWAS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit dan Nomor: KEP- 72/ DEWAS/ XI/2017 tanggal 7 November 2017. / Decision of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II SK number: KEP-80/DEWAS/X/2020 dated October 14, 2020 concerning the Extension of the Audit Committee's Term of Service and Number: KEP- 72/DEWAS/XI/2017 dated November 7, 2017.

Riwayat Pendidikan / Education
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. / Bachelor's Degree in Economics Majoring in Accounting from Universitas Padjadjaran, Bandung.

Riwayat Jabatan / Career History
Beliau mengawali kariernya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987 – 2013), Komite Audit di PT Pindad (Persero) (2013 – 2017), Kantor Akuntan Publik HLB Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan (2014 – 2017), Tenaga Ahli di ITDC (2017), Komite Audit di Perum Jasa Tirta II (2017 – sekarang). / He started his career at the Financial and Development Supervisory Board (BPKP)(1987-2013), Audit Committee of PT Pindad (Persero) (2013- 2017), at Public Accounting Firm HLB Hadori, Sugiarto, Adi & Associates (2014-2017), Expert at ITDC (2017), and as Audit Committee in Perum Jasa Tirta II (2017-present).

Pelatihan yang Pernah Diikuti / Trainings
Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Seminar atau Pelatihan Tenaga Pengawas/Akuntan, Perpajakan, Penyidikan/ Pengusutan, Training for Trainers, Audit Operasional, Good Corporate Governance (GCG), TOT Membangun Pemahaman GCG, TOT Instruktur Jabatan Fungsional Auditor, TOT Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP bagi Satgas Pusat, TOT atas Modul dan Limited Hearing SPIP, Overseas Training on Developing Performance Measurement in Public Sector, Professional Internal Auditor (PIA), Fraud Audit (Audit Kecurangan/Audit Forensik). / Seminar or training of Supervisors/ Accountant, Taxation, Investigation/Investigation, Training of Trainers, Operational Audit, Good Corporate Governance (GCG), TOT Building GCG Understanding, TOT Instructor Functional Auditor Position TOT Task Force of Government Internal Control System (SPIP), SPIP for Central Task Force, TOT on Module and Limited Hearing SPIP, Overseas Training on Developing Performance Measurement in Public Sector, Professional Internal Auditor (PIA), and Fraud Audit.

NAMA / Name	JABATAN Position	DASAR PENETAPAN Basis of Appointment Position	KEAHLIAN Expertise	MASA JABATAN Terms of Office
Wawan Saeful Anwar	Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)	Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-72/DEWAS/ XI/2017 tanggal 7 November 2017 / Decree of Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II No. KEP-72/DEWAS/ XI/2017 dated November 7, 2017	Akuntansi dan Keuangan Accounting and Finance	3 tahun 3 years

Profil Anggota Komite Audit
Profile of Audit Committee Member



AGUS WALUYO

Tempat, Tanggal Lahir (Usia): KAB.CILACAP, 23 Agustus 1973 /
Date of Birth (Age): 23 August 1973, KAB. CILACAP
Pangkat:Penata Tk. I III / Rank: Tk. I, III/D

Riwayat Penugasan: / Assignment History:
- Anggota Komite PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Juni 2019 - sekarang) / Member of the Committee of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (June 2019 - present).
- Anggota Komite PT Angkasa Pura I (Persero) (Oktober 2015 - Juni 2019) / PT Angkasa Pura I (Persero) Committee Member (October 2015 - June 2019) S1 - SE.

Pendidikan Terakhir: S1 - SE / Last Education: S1 - SE

Riwayat Pendidikan: / Educational Background:
- S1 STIE Widya Wiwaha (2009, Jalan Sorosutan, Yogyakarta) S1 STIE Widya Wiwaha (2009, Jalan Sorosutan, Yogyakarta)
- D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1994, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Banten 15222) / D3 State Accounting College Jakarta (1994, Jalan Bintaro Utama Sector V, South Tangerang, Banten 15222)

Riwayat Jabatan:
- Auditor Ahli Muda (09 Juni 2020 - sekarang) / Young Expert Auditor (09 June 2020 - present)
- Auditor Muda (22 Oktober 2015 - 08 Juni 2020) / Young Auditor (22 October 2015 - 08 June 2020)
- Auditor Penyelia (05 Mei 2015 - 21 Oktober 2015) / Auditor in Charge (05 May 2015 - 21 October 2015)

Riwayat Pelatihan: / History of Training:
- Individual Leadership Training: Workskills - Steps to Your Success - ELEVATE / Individual Leadership Training: Workskills - Steps to Success - ELEVATE
- Diklat Sertifikasi Auditor Muda - Pusdiklatwas BPKP / Pusdiklatwas BPKP Young Auditor Certification Training
- Diklat SPIP - Pusdiklatwas BPKP / BPKP Pusdiklatwas SPIP Training
- Diklat Sertifikasi Auditor Ahli - Pusdiklatwas BPKP / BPKP TMT Expert Auditor Certification Training

TMT Pensiun: 23 September 2031 /
Retirement date: September 23rd

Selama tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan dan program sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan tahun 2021
2. Pertemuan Rutin Triwulanan dan Koordinasi dengan SPI
3. Rapat Internal Dewan Pengawas
4. Rapat Gabungan Dewan Pengawas & Direksi

5. RKAP 2021 dan RJPP 2020-2024 harus sejalan dengan Tugas dalam PP 7 tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan tentang pengusahaan dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah Kerja.
6. Dalam melaksanakan investasi agar dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dan melihat Analisa risko strategis yang berpengaruh kepada penugasan perusahaan dalam PP 7 tahun 2010.
7. Perlunya melihat kembali urgensi Project Investasi agar dana Investasi yang dilaksanakan dapat memberikan value added bagi perusahaan dan menjadi penunjang dalam rangka Penugasan Pemerintah yang termuat dalam PP 7 tahun 2010.

Kriteria Komite Audit

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki independensi, integritas, akhlak, dan moral yang baik. Selain itu, anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas, hak, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan auditor internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan ;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya;

During 2021, the Audit Committee has carried out the following activities and programs:

1. Evaluation of Company Performance in 2021
2. Regular Quarterly Meetings and Coordination with SPI
3. Internal Meetings of the Supervisory Board
4. Joint Meetings of the Board of Supervisors & Directors
5. RKAP 2021 and RJPP 2020-2024 must be in line with the Tasks in PP 7 of 2010 article 4 paragraph (1) and paragraph (2) which states about the exploitation and part of the task of managing water resources in the Work area.
6. In carrying out investments, it must be carried out with the principles of efficiency and prudence and look at the strategic risk analysis that affects the company's assignment in PP 7 of 2010.

7. The need to reconsider the urgency of the Investment Project so that the Investment funds implemented can add value to the company and serve as a support for the Government Assignments outlined in PP 7 of 2010.

The Audit Committee

Criteria The general requirements for appointment to the Audit Committee are independence, integrity, good character, and morals. Members of the Audit Committee also have experience in finance and accounting.

Audit Committee Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the following duties, rights, and responsibilities in carrying out its functions:

1. Assisting the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the External Auditor's and Internal Auditor's duties;
2. Evaluating activity implementation as well as the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and the External Auditor; 3. Make recommendations for improving the management control system and putting it into action.
4. Ensure that all information issued by the Company is subject to a satisfactory review procedure.
5. Identifying matters that require the Supervisory Board's attention and other Supervisory Board duties;

6. Melaksanakan tugas lainnya dan Dewan Pengawas, berupa namun tidak terbatas pada:
7. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan , serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan , laporan manajemen dan informasi lainnya;
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan ;
9. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan ;
10. Mengkaji kecukupan fungsi pemeriksaan internal, termasuk jumlah pemeriksa, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan;
11. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor;
12. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Pengawas;
13. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan;
14. Melakukan klarifikasi dengan Direksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan dan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
15. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit;
16. Anggota Komite Audit yang bukan Dewan Pengawas berhak mendapatkan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan Dewan Pengawas yang maksimum nilainya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

6. Carry out other Supervisory Board duties, including but not limited to:
7. Examining information about the company, such as the Long Term Plan, Work Plan, and Company Budget, as well as management reports and other information;
8. Examining the Company's compliance with laws and regulations pertaining to its activities;
9. Reviewing Company-related complaints;
10. Examining the internal audit function's adequacy, including the number of examiners, annual work plans, and completed assignments;
11. Examine the external audit's adequacy, including the audit plan and the number of auditors;
12. Based on a written assignment letter from the Supervisory Board, the Audit Committee may access records or information about employees, funds, assets, and other Company resources related to the performance of their duties and report the results to the Supervisory Board in writing.
13. Prepare and submit to the Supervisory Board an annual work program to be determined before the current fiscal year;
14. Clarify with the Board of Directors their responsibilities in carrying out their duties in accordance with the annual work program, and report in writing to the Supervisory Board with recommendations if necessary;
15. Prepare quarterly and annual reports for the Supervisory Board that are signed by at least the Chairman of the Audit Committee and one Audit Committee member.
16. Audit Committee members who are not members of the Supervisory Board are entitled to an honorarium at the expense of the Company, the amount of which is determined by the Supervisory Board and has a maximum value of 20% (twenty percent) of the President Director's salary.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: 84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang pengangkatan Ketua Komite Audit Perum Jasa Tirta II dan Nomor KEP-02/DEWAS/II/2021 Februari 2021 tentang pengangkatan anggota Komite Audit Perum Jasa. Pemberhentian

Auditor Appointment and Removal

Committee The Audit Committee was appointed and dismissed in accordance with Supervisory Board Decision Number: 84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the appointment of the Chairman of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II and Number KEP-02/DEWAS/II/2021 dated February 20, 2021 regarding the

anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

appointment of members of Perum Jasa's Audit Committee. Members of the Audit Committee may be dismissed if they complete their term of office and are dismissed by the Supervisory Board for failing to meet predetermined performance standards and/or being incompetent in carrying out their duties.

Independensi Komite Audit

The Audit Committee's independence

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, dibuktikandengantidakmemilikihubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, dan/atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Utama/Pengendali.

All members of the Audit Committee have met the independence criteria, as evidenced by the absence of financial, management, share ownership, family, and/or other relationships that could impair their ability

ASPEK INDEPENDENSI / Independence Aspect	Hartanto	Wawan Saeful Anwar	Royza Fauzi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / No Financial relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / No family relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perum Jasa Tirta II, Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan / No managerial relation in Perum Jasa Tirta II, subsidiaries or Joint Ventures	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perum Jasa Tirta II / No shareholding in Perum Jasa Tirta II	√	√	√

Piagam Komite Audit

The Perum Audit Committee's Charter

Perum Jasa Tirta II membekali Komite Audit dengan Piagam (Charter) Komite Audit sebagai pedoman tata laksana kerja Komite Audit sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/ DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Adapun piagam tersebut memuat dan mengatur aspek- aspek pelaksanaan tugas Komite Audit, di antaranya visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, kode etik, persyaratan auditor, pelaksanaan rapat, dan mekanisme kerja lainnya.

The Audit Committee Charter is provided by Jasa Tirta II as a guideline for the Audit Committee's work, as stipulated by the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance No. 1/ DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The charter includes and governs aspects of the Audit Committee's duties, such as the vision and mission, structure and position, duties and responsibilities, authority, work relations, code of ethics, auditor requirements, holding meetings, and other working mechanisms.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala dengan auditor eksternal setidaknya satu kali dalam 1 (satu) tahun guna membahas progres pemeriksaan audit. Komite Audit juga dapat mengundang manajemen Perusahaan melalui Satuan Pengawasan Intern untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan proses audit.

Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan disebutkan alasannya. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir dalam rapat

Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee meets with external auditors on a regular basis at least once a year to discuss the audit examination's progress. The Audit Committee may also request information from the Company's management via the Internal Audit Unit to support the audit process.

All decisions made at the meeting are properly recorded and documented in the meeting minutes, including dissenting opinions, and the reasons are stated. The meeting minutes are signed by the chairman and distributed to all members of the Audit Committee, both present and unable to attend the meeting.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan audit Perusahaan , Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi Komite Audit untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit selama tahun 2021 telah dipaparkan dalam bab Profil Perusahaan, sub bab Pendidikan dan/ atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan , dan Satuan Pengawasan Intern dalam Laporan Tahunan ini.

Audit Committee Competency Development

To improve the Audit Committee's competence in carrying out the Company's audit supervisory function, Perum Jasa Tirta II provides the Audit Committee with the most opportunities to attend training, education, seminars, and/or workshops in accordance with the required competencies. In this Annual Report, information about the Audit Committee's competency development program for 2020 is presented in the Company Profile chapter, Education and/or Training sub-chapter for the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

Remunerasi Komite Audit

Struktur dan jumlah remunerasi Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari honorarium sebesar 20% dari pendapatan Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER- 12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas / Dewan Pengawas BUMN.

Audit Committee Compensation

The Supervisory Board has determined the structure and amount of the remuneration of the Audit Committee that is not a member of the Supervisory Board, which consists of an honorarium of 20% of the President Director's income in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs PER-12/ MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Board SOE Supervisor.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Pengawas . Peraturan BUMN mewajibkan Perusahaan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Perusahaan dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor : KEP-04/DEWAS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Nomor: KEP-86/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2021 tentang Pembentukan Komite Dewan Pengawas Nominasi dan Remunerasi Perum Jasa Tirta II, maka susunan keanggotaan Komite Dewan Pengawas sebagai berikut:

Ketua
Kelik Wirawan Wahyu W
Anggota:
1. Nuning Sri Rejeki Wulandari
2. Mohamad Sofwan

Adapun Profil Ketua dan Anggota Komite terdapat dalam profil dewan pengawas dalam laporan tahunan ini.

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
2. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
3. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
4. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;

Nomination and Remuneration Committee

The Remuneration and Nomination Committee was formed to assist the Board of Directors and the Supervisory Board in carrying out its functions and duties related to the remuneration and nomination of members of the Board of Directors and the Supervisory Board. As part of the implementation of GCG, SOE regulations require the Company to establish a Remuneration and Nomination Committee so that the Company can be managed on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Foundation for the Remuneration and Nomination Committee

The membership of the Supervisory Board Committee is as follows, according to the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-04/DEWAS/II/2021 dated February 25, 2021 concerning Amendment to the Decree (SK) of the Supervisory Board Number: KEP-86/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2021 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Supervisory Board Committee of Perum Jasa Tirta :

Chairman
Kelik Wirawan Wahyu W
Member:
1. Nuning Sri Rejeki Wulandari
2. Mohamad Sofwan .

The Chair's and Committee members' profiles are listed on the supervisory board profile in this annual report.

Concerning the Nomination function:

1. Make recommendations to the Supervisory Board on:
2. The composition of positions on the Board of Directors and/or the Supervisory Board;
3. The policies and criteria required in the Nomination process; and
4. performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board.

5. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas; dan
7. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.

5. Assist the Supervisory Board in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board using the benchmarks prepared as evaluation material;
6. Make recommendations to the Supervisory Board about the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board; and
7. Make proposals to the Supervisory Board about candidates who meet the requirements for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board to be submitted to the Capital Owners.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai struktur Remunerasi;

1. kebijakan atas Remunerasi; dan
2. besaran atas Remunerasi;

Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Realisasi Kegiatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Tahun 2021

Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2021 mengadakan 4 kali rapat pada tanggal 29 April 2020 dan 7 Oktober tahun 2021 dalam rangka Pengusulan Talenta Perum Jasa Tirta II pada sistem Talent Management BUMN.

Concerning the Remuneration function:

Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the structure of the Remuneration;

1. Remuneration policy; and
2. the amount of Remuneration;

Assist the Supervisory Board in assessing performance in relation to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board.

Realization of Nomination and Remuneration Committee Activities in 2020

The Nomination and Remuneration Committee met four times in 2021, on April 29, 2020 and October 7, 2021, to propose Perum Jasa Tirta II's talents to the BUMN Talent Management system.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor : KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II I.29 dan Nomor : KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Based on the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Decree Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning the Appointment of the Chairperson of the Risk Management Monitoring Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II I.29 and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 concerning the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company:



ROMMY MARCANDI
Ketua / Chairman

Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 17 Januari 1976 /
Date and place of birth: January 17, 1976, Malang

Jabatan Saat Ini: / Current Position:
Pada tahun 2021 pernah menjabat sebagai PLT Asdep Manajemen Risiko selanjutnya Kabid PMN PSO sampai dengan saat ini. / In 2021, he served as PLT Assistant for Risk Management and then Head of PMN PSO until now.

Riwayat Pendidikan: / Educational Background:
Strata II (S2): Universitas Pembangunan Nasional /
S2 (Strata II): National University of Development

Sertifikasi/Kursus: / Certification/Course:
- Pemeriksa Piutang Negara (Diklat Polri - Tahun 2001) / Auditor of State Receivables (Polri Training and Education - 2001)
- Restrukturisasi Piutang Negara (UGM - Tahun 2002) / Restructuring of State Receivables (UGM - 2002)
- Asset Apprasial for Financial Restructuring&Regional Autonomy (Queensland University of Technology -Tahun 2007) / Appraisal of Assets for Financial Restructuring and Regional Autonomy (Queensland University of Technology -Year 2007)
- Stengthening Private Sector Involvement in Public Asset Creation&Management (Queensland University of Technology - Tahun 2015) / Increasing Private Sector Participation in Public Asset Creation and Management (Queensland University of Technology -Year 2015)



KANDIANAWATI
Anggota / Member

Lahir di Jakarta, June 13, 1977. Sarjana dari Universitas Indonesia pada 2000 dan Master dari IPB pada 2019. Memiliki pengalaman kerja di PAM Jaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Influx, INC dan PT Aetra Air Tangerang. Memiliki Kehalian bidang Manajemen risiko, GCG, Manajemen Air dan lain lain. /
Born in Jakarta, June 13, 1977. In 2000, she received a bachelor's degree from the University of Indonesia, and in 2019, she received a master's degree from IPB. Previously worked for PAM Jaya, the National Development Planning Agency, Influx, INC, and PT Aetra Air Tangerang. Has knowledge of risk management, GCG, water management, and other areas.

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Pengawas;
2. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko;
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, termasuk kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya, serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang telah diambil Direksi terkait dengan manajemen risiko;
4. Melakukan penelahaan atas informasi mengenai Perusahaan , Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
5. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara berkala serta memantau potensi risiko yang dihadapi Perusahaan dan implementasi mitigasinya;
6. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan sasaran kinerja dan bidang usaha Perusahaan ;
7. Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Pengawas untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam hal manajemen risiko;

The Risk Management Monitoring Committee's Responsibilities

1. Prepare and submit an annual work plan to the Supervisory Board for approval, and report to the Supervisory Board on its implementation.
2. Make recommendations to the Supervisory Board on the development and improvement of the Risk Management Monitoring Committee Charter.
3. Evaluate the Board of Directors' risk management policies and strategies, including the suitability of policies and their implementation, and make recommendations to the Supervisory Board on risk management policies adopted by the Board of Directors.
4. Examining information about the company, the Long Term Plan (RJPP), and the Work Plan and Budget (RKAP)
5. Evaluate and analyze risk profile reports on a regular basis, as well as monitor the Company's potential risks and mitigation efforts.
6. Reviewing the Company's risk management policies in relation to the Company's performance targets and business fields;
7. Make suggestions and/or recommendations to the Supervisory Board for necessary improvements and risk management improvements;

8. Membantu Dewan Pengawas dalam hal pengawasan kepatuhan Direksi terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk jika ada potensi benturan kepentingan;
9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya

Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2021

Secara umum, program kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berjalan secara optimal. Komite Pemantau Manajemen Risiko secara periodik melakukan pembahasan dengan unit kerja yang membidangi manajemen risiko, dan sudah mengadakan rapat sebanyak 12 kali.

Tata Cara Penggantian Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Pengawas dari Pihak Independen dijelaskan sebagai berikut,

1. Anggota Komite dipilih dan ditetapkan berdasarkan notulen Rapat Dewan Pengawas ;
2. Pemilihan dan Penetapan Anggota Komite, salah satunya didasarkan pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Pemilihan dan Penetapan Anggota Komite sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Dewan Pengawas , diputuskan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan disampaiakan kepada Direksi untuk dilakukan Pengangkatan sebagai Anggota Komite;
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sesuai dengan masa jabatannya ataupun sebelum akhir masa jabatannya;
5. Terhadap keanggotaan Komite yang berakhir sesuai dengan masa jabatannya, dapat dilakukan pengangkatn kembali oleh Direksi, berdasarkan surat rekomendasi pengangkatan kembali yang disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi;
6. Dalam hal keanggotaan komite berakhir sebelum masa jabatannya, disebabkan salah satu faktor sebagai berikut :

8. Assist the Supervisory Board in supervising the Board of Directors' compliance with prevailing laws and regulations, including if there is a potential conflict of interest;
9. Carry out other Supervisory Board duties as long as they are within the scope of the Supervisory Board's duties and obligations as defined by the provisions of the applicable laws and regulations;
10. Submit a report to the Supervisory Board on the implementation of special tasks for further realization

Risk Management Monitoring Committee's activities in 2021.

In general, the Risk Management Monitoring Committee's activity program can run smoothly. The Risk Management Monitoring Committee meets 12 times a year to discuss risk management with the work unit in charge of risk management.

Procedures for Committee Substitution in the Supervisory Board

The procedures for replacing members of the Supervisory Board's Committees with independent parties are as follows:

1. Committee members are elected and determined based on the minutes of the Supervisory Board Meeting;
2. Committee Member Selection and Appointment, one of which is based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendation;
3. The selection and appointment of Committee Members, as stated in the Supervisory Board Meeting Minutes, shall be decided by a Supervisory Board Decision and submitted to the Board of Directors for appointment as a Committee Member.
4. Committee membership may end in accordance with their term of office or before the end of their term of office;
5. For Committee membership that ends in accordance with their term of office, the Board of Directors may reappointment, based on a letter of recommendation for reappointment submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors;
6. If committee membership ends before the end of their term of office, it is due to one of the following reasons:

a. Anggota Komite berdasarkan evaluasi penilaian kinerja oleh keputusan rapat Dewan Pengawas, dinilai melalaikan tuga dan tanggungjawabnya sehingga dianggap tidak cakap untuk menjadi komite.
b. Melanggar tata tertib kerja komite serta melanggar ketentuan internal Perusahaan lainnya.
c. Terbukti melakukan tinfakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau merusak citra Perusahaan.

a. Committee members are deemed incompetent to serve on committees based on the evaluation of the performance appraisal by the Supervisory Board meeting.

b. Violate the committee's work rules and other internal Company regulations.

c. Proven to take actions that are detrimental to the Company or its image.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai public relation/ Corporate communication, institution relations, GCG implementation, monitoring pencapaian Key Performance Indicator (KPI), monitoring pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Ruang lingkup tugas Sekretaris Perusahaan meliputi Kesekretariatan Direksi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, serta Hubungan Internasional.

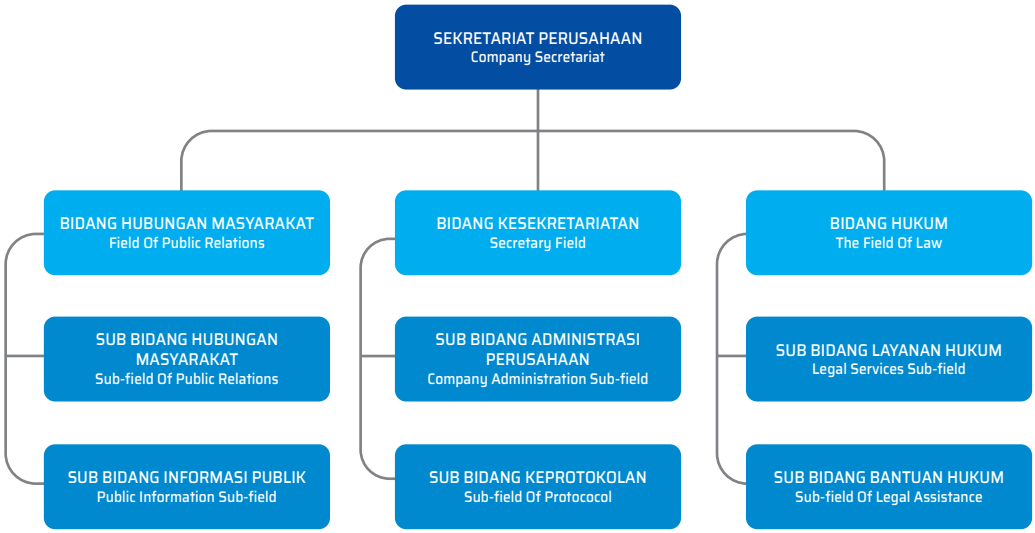
The mission of Perum Jasa Tirta II's Corporate Secretary is to consistently and continuously support the creation of a good corporate image through the management of effective communication programs to all stakeholders. The Corporate Secretary's main function is to assist the Board of Directors' duties, which include public relations/Corporate communication, institution relations, GCG implementation, monitoring the achievement of Key Performance Indicators (KPI), monitoring the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities, and document administration. The Corporate Secretary reports directly to the President Director and is responsible for assisting in the creation of a positive corporate image through effective communication programs with all stakeholders. The Corporate Secretary reports directly to the President Director and is responsible for assisting in the creation of a positive corporate image through effective communication programs with all stakeholders. The Corporate Secretary's responsibilities include Board of Directors Secretariat, Public Relations, Inter-Agency Relations, and International Relations.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditetapkan pada Struktur Organisasi Peraturan direksi Perusahaan Umum (Perus Jasa Tirta II) Nomor PRD-17/DIR/12/2021, tentang Struktur Organisasi, dan tata kerja Perusahaan umum Jasa Tirta II struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Organization

As stipulated in the Organizational Structure of the Board of Directors of a Public Company (Perus Jasa Tirta II) Number PRD-17/DIR/12/2021, regarding the Organizational Structure and working procedures of Jasa Tirta II Public Company, the organizational structure of the Corporate Secretary is as follows:



Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile



NANDANG MUNANDAR
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Kewarganegaraan: Indonesia /
Citizenship: Indonesian
Tempat Tanggal Lahir: Purwakarta, 12 Februari 1972 /
Place, Date of Birth / Purwakarta, Februari 12, 1972
Usia: 49 tahun / Age: 49 years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Keputusan Direksi Nomor KPT-27/DIR/02/2020. /
Decree of Board of Directors NO. KPT- 27/DIR/02/2020.

Riwayat Pendidikan / Education
Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP (1997) dan Magister Akuntansi dari Budi Luhur Jakarta (2010) /
Obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP (1997) and Master of Accounting from Budi Luhur Jakarta (2010).

Riwayat Jabatan / Career History
Saat ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Maret 2020 – sekarang). Kepala Divisi SDM di Perum Jasa Tirta II (Februari 2019 - Februari 2020) /
Currently, he serves as Corporate Secretary (March 2020 – present). Head of HR Division at Perum Jasa Tirta II (February 2019 - February 2020).

Kualifikasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan wajib memenuhi kriteria kualifikasi yang disyaratkan, antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan , hubungan masyarakat, keterampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Corporate Secretary Qualifications

The Corporate Secretary must meet the required qualification criteria, which include knowledge of Company regulations, public relations, administrative skills, and experience that supports the execution of his duties. Furthermore, in order to carry out his duties and responsibilities, the Corporate Secretary must have academic qualifications and adequate competence.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Corporate Secretary Appointment and Removal

The Board of Directors appoints and dismisses the Corporate Secretary based on the Company's internal mechanism, with the approval of the Supervisory Board.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Menghadiri rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat;
2. Menyiapkan Daftar Khusus, yaitu daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi beserta keluarganya sebagai sebuah dokumen benturan kepentingan;
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan atau kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
5. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan ;
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yangbersifat rutin maupun non-rutin;
7. Menindaklanjuti setiap keputusan rapat Direksi dan memantau tindak lanjut hasil rapat;
8. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Corporate Secretary's Duties and Responsibilities

1. Attend Board of Directors meetings and prepare meeting minutes;
2. Create a Special Register, which is a list of the share ownership of members of the Supervisory Board and members of the Board of Directors, as well as their families, as a conflict of interest document.
3. In charge of carrying out the Joint Discussion Meeting (RPB);
4. Prepare the necessary materials related to Board of Directors reports or routine activities to be submitted to external parties;
5. Prepare the necessary materials or materials related to matters requiring a decision from the Board of Directors regarding the Company's management;
6. Facilitate both routine and non-routine Board of Directors meetings.
7. Follow up on every decision made at the Board of Directors meeting and monitor the meeting's outcomes;
8. Ensure that the Company complies with disclosure regulations in accordance with the implementation of GCG principles.
9. Provide information requested by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular and/or as-needed basis;

10. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan ;
11. Menyelenggarakan program pengenalan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat;
12. Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan strategis pengelolaan Perusahaan serta menyusun program dan pelaksanaannya antara lain di bidang hukum, humas, pendidikan masyarakat;
13. Memastikan tersedianya informasi yang boleh diakses oleh Pemilik Modal sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan;
14. Memastikan bahwa Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Pengawas apabila diminta oleh Dewan Pengawas;
15. Mengkoordinasikan isu strategis Perusahaan lintas biro/divisi;
16. Menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Menjadi penghubung (liaison officer); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan , termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemilik Modal, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan RPB.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perum Jasa Tirta II membekali pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informasi. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Sekretaris Perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab "Profil Perusahaan", sub bab "Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan , dan Satuan Pengawasan Intern".

10. Administering and storing Company documents;
11. Organizing an orientation program for newly appointed Supervisory Board members;
12. Assisting the Board of Directors in determining strategic policies for the Company's management, as well as preparing and implementing programs in the fields of law, public relations, and public education;
13. Ensuring the availability of information that Capital Owners can access in accordance with the reasonable needs of stakeholders;
14. Ensuring that Perum Jasa Tirta II complies with the regulations regarding applicable disclosure requirements and is required to provide information related to its duties to the Board of Directors on a regular basis and to the Supervisory Board if requested by the Supervisory Board;
15. Coordinate the Company's strategic issues across bureaus/divisions;
16. Submit an Annual Report to the Board of Directors on the implementation of its duties.

The Corporate Secretary's Duties

1. Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in accordance with the implementation of GCG principles;
2. Provide information needed by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular basis and/or at any time if requested;
3. Become a liaison officer; and
4. Administer and store Company documents, including but not limited to the Register of Capital Owners, Special Register, and minutes of Board of Directors meetings, Supervisory Board meetings, and Executive Committee meetings.

Competency Development of the Corporate Secretary

Perum Jasa Tirta II equips the Corporate Secretary's knowledge and competence through participation in formal and informational training and education. This Annual Report includes information about the Corporate Secretary's training and education program in the chapter "Company Profile," subchapter "Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit."

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021

Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja, antara lain:

1. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
2. Penyelenggaraan kegiatan Rapat Direksi serta rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
3. Mendokumentasikan dan membuat risalah rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
4. Menyusun pembuatan Annual Report dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2021;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan assessment GCG;
6. Mendukung sosialisasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan ;
7. Penyelenggaraan kegiatan terkait corporate communication melalui publikasi, press release, kegiatan sponsorship, corporate branding dan kegiatan lainnya;
8. Pemeliharaan hubungan Perusahaan dengan regulator.

Report on the Execution of the Corporate Secretary's Duties in 2021

Various activities and work programs were carried out by the Corporate Secretary in 2021, including:

1. Setting up a Joint Discussion Meeting (RPB);
2. Organizing the activities of the Board of Directors Meeting, as well as joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors;
3. Documenting and recording the Board of Directors Meeting and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors;
4. Prepare the Annual Report and the Sustainability Report for the fiscal year 2021;
5 Coordination of the GCG assessment implementation;
6. Supporting the socialization of GCG implementation within the Company;
7. Organizing corporate communication activities such as publications, press releases, sponsorship, corporate branding, and other activities;
8. Maintaining the Company's relationship with regulators.

AKSES DAN KETERBUKAAN INFORMASI
INFORMATION ACCESS AND DISCLOSURE

Komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyampaian informasi terkini terkait setiap perkembangan yang terjadi secara akurat, tercatat, diolah, dan dirangkum menjadi sebuah laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penyebaran informasi kepada semua Pemilik Modal Perusahaan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para Pemilik Modal terhadap kebijakan dan kegiatan Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II telah menyediakan berbagai akses informasi melalui sarana dan media sebagai berikut:

Perum Jasa Tirta II's commitment to the principle of transparency and compliance with applicable laws and regulations related to information disclosure is manifested in the accurate recording, processing, and summarization of any developments that occur into a report submitted to stakeholders.

The dissemination of information to all Company Capital Owners is an important part of increasing the principle of information transparency both internally and externally, which is expected to help maintain and increase Capital Owners' knowledge, understanding, and positive perceptions of Perum Jasa Tirta II's policies and activities. Perum Jasa Tirta II has made information available through the following channels and media:

Website Perusahaan:
www.jasatirta2.co.id
Kontak Sekretaris Perusahaan:
Telp. : (0264) 201972
Fax. : (0264) 201971
Email : pjt2@jasatirta2.co.id

Media Sosial
Instagram : jasatirta2
Facebook : Perum Jasa Tirta
Twitter : humas_pjt2
YouTube : Humas PJT II

Company Website:
www.jasatirta2.co.id
Corporate Secretary Contact
Telp. : (0264) 201972
Fax. : (0264) 201971
Email : pjt2@jasatirta2.co.id

Social Media
Instagram : jasatirta2
Facebook : Perum Jasa Tirta
Twitter : humas_pjt2
YouTube : Humas PJT II

Keterbukaan Informasi dan Data Perusahaan

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perum Jasa Tirta II secara berkala menyebarluaskan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja yang sejalan dengan kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator, yakni sebagai berikut:

Company Information and Data Disclosure

As a form of transparency to the public, Perum Jasa Tirta II disseminates material information regarding activities and performance on a regular basis, in accordance with the regulator's obligation to fulfill the established information disclosure requirements, which are as follows:

BENTUK KETERBUKAAN INFORMASI Forms Of Information Disclosure	JUMLAH / Total
LAPORAN TAHUNAN / Annual Report	1
LAPORAN BERKELANJUTAN / Sustainability Report	1

Website Perusahaan

Perum Jasa Tirta II memiliki situs website resmi yaitu www. jasatirta2.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Situs tersebut menyajikan informasi mengenai profil dan sejarah Perusahaan, informasi mengenai manajemen Perseroa, layanan, informasi kinerja keuangan, berita terkini mengenai Perusahaan , serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi lainnya.

The Company's Website

Perum Jasa Tirta II has an official website, which can be accessed by all stakeholders, namely www. Jasatirta2.co.id. The site contains information on the Company's profile and history, information on the Company's management, services, financial performance data, the most recent news about the Company, and a variety of other information disclosure documents.

Laporan Tahunan

Perum Jasa Tirta II menerbitkan Laporan Tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Perusahaan di tahun buku. Laporan Tahunan didistribusikan kepada Pemilik Modal dan segenap Pemilik Modal lainnya. Dalam penyusunannya, Laporan Tahunan telah mengikuti kriteria dan ketentuan yang berlaku serta diikutsertakan dalam ajang Annual Report Awards (ARA).

Report Annual

Perum Jasa Tirta II issues an Annual Report, which serves as official documentation of the Company's performance accomplishments during the fiscal year. The Capital Owners and all other Capital Owners receive the Annual Report. The Annual Report was prepared in accordance with the applicable criteria and conditions, and it was selected for the Annual Report Awards (ARA).

Aktivitas Hubungan Investor

Perum Jasa Tirta II berupaya menjaga hubungan yang sinergis dengan Pemilik Modal dan Pemilik Modal melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kinerja Perusahaan secara berkala baik secara formal maupun informal.

Activities in Investor Relations

Perum Jasa Tirta II seeks to maintain a synergistic relationship with Capital Owners and Capital Owners by formally and informally meeting the Company's performance reporting obligations on a regular basis.

Komunikasi Internal

Perum Jasa Tirta II senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada karyawan melalui berbagai media komunikasi dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja. Hubungan komunikasi dengan pihak internal Perusahaan dilakukan melalui penyediaan buletin dan penyebaran email blasting internal untuk menyampaikan informasi material bagi internal Perum Jasa Tirta II.

Communication within the organization

Perum Jasa Tirta II always encourages two-way communication with employees via various communication channels in order to foster an environment conducive to performance achievement. Communication with the Company's internal parties is carried out through the distribution of internal email blasts and the distribution of bulletins to convey material information to the internal parties of Perum Jasa Tirta II.

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
INTERNAL SUPERVISION UNIT

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Perum Jasa Tirta II already has an Internal Audit Function which is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) and Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II. In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for trustworthy management, acts professionally, objectively, and independently so that it can provide added value to the achievement of the Company's goals through efforts to increase the effectiveness of risk management, compliance with laws and regulations and good corporate governance. good (Good Corporate Governance).

Struktur dan Kedudukan SPI

SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan .

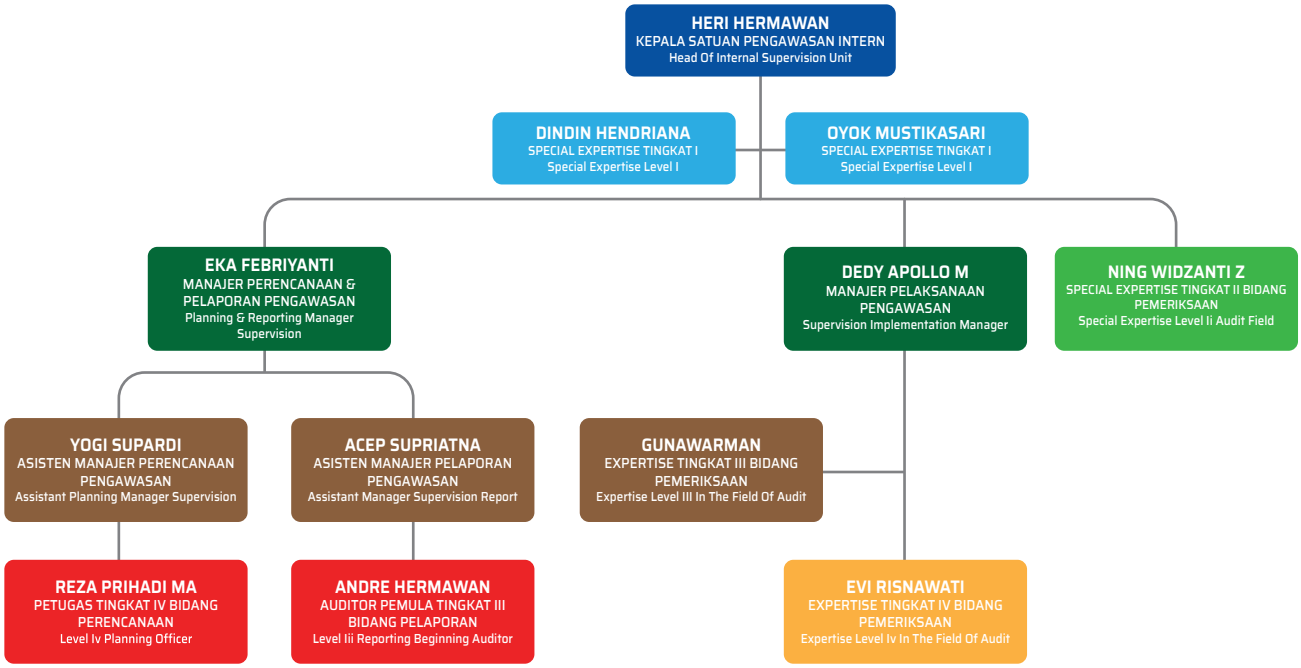
Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-17/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

Structure and Position of SPI

SPI has a direct position under the President Director to guarantee as required by Laws and Government Regulations. The appointment of the Head of SPI by the President Director must meet the qualifications and competencies and obtain the approval of the Supervisory Board as the representative of the owner of the Company.

As stipulated in the organizational structure of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum) Regulation Number: PRD-17/DIR/12/2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Jasa Tirta II Public Company, the Organizational Structure of the Internal Audit Unit is as follows:

STRUKTUR ORGANISASI KARYAWAN SATUAN PENGAWASAN INTERN PERUM JASA TIRTA II
EMPLOYEE ORGANIZATIONAL STRUCTURE PERUM JASA TIRTA II INTERNAL SUPERVISION UNIT



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan SPI

SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.

Parties Appointing and Dismissing SPI

The SPI is led by a Head of SPI, who is appointed and dismissed by the President Director with the Supervisory Board's approval.

Jumlah dan Komposisi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2021, personil SPI berjumlah 12 (dua belas) orang dengan 1 (satu) orang Kepala SPI, 10 orang auditor, dan 1 orang petugas Tata Usaha (TU)

SPI Personnel Number and Composition

SPI personnel are 12 (twelve) as of December 31, 2021, with 1 (one) Head of SPI, 10 auditors, and 1 Administrative officer (TU)

Profil Kepala SPI
Profile of Head of SPI



HERI HERMAWAN
Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) / Head of Internal Audit Unit (SPI)

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Keputusan Direksi Nomor 1/82/KPTS/2016 untuk periode 2016 sampai sekarang. / Decree of the Board of Directors No. 1/82/KPTS/2016 for period of 2016 - present

Riwayat Pendidikan / Education
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / Bachelor's Degree in Economics Majoring in Management from Universitas Islam Bandung (1997).

Riwayat Jabatan / Career History
Special Expertise Tingkat IV Bidang Evaluasi & Pelaporan (2001), Asisten Manajer Tata Operasional (2003), Kepala Seksi Pemasaran (2006), Manajer Unit Kepariwisataan (2008), Kepala Unit Kepariwisataan, Unit Pariwisata (2011), General Manager Kepariwisataan (2013), Kepala Divisi Satuan Pengendali Kinerja Korporasi (2014), dan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II (2016 – sekarang). / Special Expertise Level IV. Evaluation & Reporting (2001), Assistant Operational Manager (2003), Head of Marketing Section (2006), Head of Hotel and Marketing Section (2008), Tourism Unit Manager (2008), Head of Tourism Unit, Tourism Unit (2011), General Manager of Tourism (2013), Head of Corporate Performance Control Unit Division (2014), Head of the Internal Audit Unit (2016 –present).

Pelatihan yang Diikuti / Trainings
Seminar dan Pengukuhan PIA, Diklat Pengelolaan Tugas-tugas Audit, Diklat Audit Kecurangan (Fraud Audit), Diklat Komunikasi dan Psikologi Audit, Diklat Audit Operasional, Diklat Dasar-dasar Audit, Pelatihan Cascading KPI Individual, TOT Pelaksanaan ABK, Training of Trainers Pelaksanaan Analisa Beban Kerja, Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Worskhop Peranggaran (Budgeting) di Lingkungan PJT II, Pelatihan Kepemimpinan atas Jasa dan Ketekunan, Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Motivation to Quality Based on Spiritual Power, Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang, Pelatihan Penanggulangan Bencana pada BUMN/BUMD, Pelatihan Penggunaan Teknologi Internat dan Jaringan Komputer, Seminar Born to Win, Seminar Lokakarya Tax Reform & Petunjuk Umum Pengisian SPT, Pelatihan Cost Control bagi Hotel dan Restoran, Seminar Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam, Implementasi dan Audit Internal ISO 9001:2008, dan Pelatihan TOT Pelaksanaan ABK. / Seminar & Inauguration of PIA, Training on the Management of Audit Duties, Fraud Auditing Training, Training for Audit Communication and Psychology, Operational Audit Training, Basic Audit Training, Individual KPI Cascading Training, TOT Implementation of ABK, TOT Implementation of Workload Analysis, HSE Training, Workshop on Budgeting in PJT II Environment, Senior Leadership Training, Training on Service and Persistence Award, Training of Guidelines on Procurement of Goods/Services Implementation, Training of Motivation to Quality Based On Spiritual Power, Training of Guidelines on Inventory, Training on Disaster Management in SOE/ROE, Training on Use of Internet Technology and Computer Network, Born to Win seminar, Workshop Seminar on Tax Reform & General Instruction of SPT Filling, Cost Control Training for Hotels and Restaurants, Upgrading Seminar P-4 Supporting 25 Hours, Implementation and Internal Audit ISO 9001-2008, TOT of ABK Implementation.

Sertifikasi Personil SPI

Sampai dengan 31 Dese mber 2021, Perum Jasa Tirta II memiliki beberapa auditor tersertifikasi sebagai berikut:

SPI Personnel Certification

Perum Jasa Tirta II has the following certified auditors as of December 31, 2021:

NAMA Name	JABATAN Position	SERTIFIKASI Certificate	INSTITUSI PEMBERI SERTIFIKAT Certified by
Heri Hermawan	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	Profesional Internal Auditor Professional Internal Auditor	PPAK
Eka Pebriantii	Manajer Perencanaan & Pelaporan Pemeriksaan Audit Reporting & Planning Manager	Profesional Internal Auditor Professional Internal Auditor	PPAK
Dedy Apollo M	Manajer Pelaksana Pemeriksaan Audit Implementation Manager	Profesional Internal Auditor Professional Internal Auditor	PPAK
Yogi Supardi	Asisten Manajer Perencanaan Planning Manager Assistent	Profesional Internal Auditor Professional Internal Auditor	PPAK

Piagam SPI

Landasan SPI Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Internal Audit Charter yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat kriteria minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal, sehingga dapat tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Charter of the SPI

In carrying out its duties and functions, Perum Jasa Tirta II has an Internal Audit Charter based on the Decree of the Minister of SOEs No. Kep-117/M- MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of Decree of the Minister of SOEs No. Kep-117/M- MBU/2002 regarding the Adoption of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises' Decree No. SK16/S. MBU/2012 on Indicators/ Parameters for Assessing and Evaluating Good Corporate Governance Implementation. The Internal Audit Charter is prepared as a standard guideline that contains minimum criteria regarding the Internal Audit function that must be carried out by the Company and aspects related to the implementation of Internal Audit, in order to create a common understanding and basis regarding the level of maintenance of all parties related to the Company's interests and commitments.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The contents of the SPI charter are as follows in carrying out the duties, functions, and responsibilities as agreed in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance

Visi dan Misi SPI

Vision and Mission

Visi

Menjadi unit kerja dan mitra yang dapat memberikan fungsi pengawasan, konsultansi dan katalisator secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi atas upaya pencapaian target-target Perusahaan.

Vision

To become a work unit and a partner capable of providing professional supervision, consulting, and catalytic functions in order to contribute to efforts to achieve the Company's goals.

Misi

- Mengendalikan kegiatan Perusahaan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan
  - Memberikan saran konstruktif dan terjangkau atas pelaksanaan kegiatan Perusahaan
  - Membantu memberikan percepatan dalam upaya pelaksanaan alur proses sistem manajemen

Mission

- Managing the Company's activities in terms of regulatory compliance;
  - Providing constructive and affordable advice on the implementation of the Company's activities; and
  - Assisting in the acceleration of efforts to implement the management system process flow.

Tugas dan Tanggung Jawab, dan Fungsi SPI

SPI's Duties and Responsibilities,

Tugas SPI adalah melaksanakan sebagian tugas Perusahaan di bidang pengawasan terhadap operasional Perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II SPI mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

as well as Functions The operations of the Company are governed by the Regulation of the Board of Directors of the Jasa Tirta II SPI has the following responsibilities and functions in carrying out these tasks:

1. Pengelolaan risiko, program kerja, dan Key Performance Indicator (KPI) SPI;
2. Penyusunan, review, dan sosialisasi aturan/ pedoman/ prosedur;

1. Risk management, work plans, and SPI Key Performance Indicators (KPI);
2. Rules/guidelines/procedures preparation, review, and dissemination;

1). Pemeriksaan (audit) operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (POTT) dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2). Pemeriksaan (audit) internal sistem manajemen mutu;
3). Evaluasi pengendalian internal;
4). Penilaian program jaminan kualitas (quality assurance) SPI;
5). Piagam SPI (SPI Charter)

3. Penyusunan usulan RKAP termasuk kelengkapan dokumen namun tidak terbatas pada Project Dogest Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan RAB untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan;
5. Penyusunan rencana paket pengadaan barang/jasa berdasarkan RKAP;
6. Pembuatan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
7. Penyiapan naskah Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
8. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI;
9. Pelaksanaan pemeriksaan operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan internal sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pendampingan kegiatan pemeriksaan/ penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi;
11. Monitoring dan evaluasi atas progres tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal;
12. Penyelenggaraan pemeriksaan sistem manajemen mutu oleh pihak eksternal;
13. Penyelenggaraan Penilaian atau Assessment Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang

1). Operational and financial audits, audits with a specific purpose (POTT), and monitoring of follow-up evaluations of inspection results;
2). Internal audit (audit) of the quality management system;
3). Internal control evaluation;
4). Evaluation of SPI's quality assurance program
5). SPI Charter

3. Preparation of RKAP proposal, including but not limited to Project Dogest Terms of Reference (KAK) and RAB for consulting services work in accordance with applicable regulations.
4. Execution of goods/services procurement in accordance with authority;
5. Development of a package plan for the acquisition of goods/services based on the RKAP;
6. Preparation of the procurement plan document, including but not limited to the Terms of Reference (KAK), Self Estimated Price (HPS), and Draft Contract for consulting services work in accordance with the applicable procurement guidelines for goods and services;
7. Writing a Memorandum of Understanding (MoU) and/or a Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions;
8. SPI Annual Audit Work Program (PKPT) preparation;
9. Conduct operational and financial audits, audits with specific objectives, and internal quality management system audits in accordance with applicable regulations;
10. Assisting external parties with inspection/ assessment activities in accordance with their duties and functions;
11. Monitoring and evaluating the progress of follow-up on the findings of internal and external audits;
12. Inspection of the quality management system by third parties;
13. Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation Assessment or External

Baik (Good Corporate Governance/GCG) yang dilakukan oleh pihak eksternal;
14. Evaluasi (self assessment) implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko;
15. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan ;
16. Penyelenggaraan penilaian program jaminan kualitas (quality assurance) kinerja SPI;
17. Fungsi konsultansi perbaikan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
18. Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang pengawasan dengan Komite Audit;
19. Memonitor tindaj lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
20. Pengendalian bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
22. Pengelelolaan dan pertanggungjawaban uang muka kerja unit kerja

Assessment;
14. Self-assessment of Good Corporate Governance implementation and risk management;
15. Evaluation of the effectiveness of the Company's internal control implementation;
16. Implementation of a quality assurance program to assess SPI performance;
17. Consultancy function for internal control system improvement, risk management, and Good Corporate Governance.
18. Organizing coordination meetings in the field of supervision with the Audit Committee;
19. Monitoring follow-up on the reported results of the examination;
20. Control of evidence of work implementation of duties and functions;
21. Preparation of reports on the results of work implementation of duties and functions; and
22. Work unit advancement management and accountability

Kode Etik SPI

Panduan pelaksanaan tugas SPI senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku dan etika pelaksanaan audit yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, tujuan serta visi misi Perusahaan . Dalam mendukung tujuan tersebut, SPI memiliki Kode Etik yang mengatur standar etika yang wajib dimiliki oleh setiap auditor internal, antara lain:

1. Jujur, objektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Loyal terhadap profesi, Perusahaan , dan unit SPI;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal pemeriksa atau Perusahaan ;
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Perusahaan , atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuan untuk dapat melakukan tugas

SPI Code of Ethics

Guidelines for carrying out SPI duties always refer to the provisions of conduct and ethics for auditing in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, the Company's objectives, vision, and mission. In SPI has a Code of Ethics that regulates ethical standards that must be owned by every internal auditor, including:

1. Honest, objective, and sincere in carrying out their duties and fulfilling their responsibilities;
2. Loyal to the profession, the Company, and the SPI unit;
3. Must not be involved in actions or activities that can bring the internal audit profession or the Company into disrepute.
4. Refrain from activities that may create a conflict of interest with the Company, or activities that may create prejudice that calls into question the ability to carry out tasks and responsibilities objectively;

dan tanggung jawab secara objektif;
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari unit kerja yang diperiksa, pegawai, ataupun mitra bisnis Perusahaan yang patut diduga dapat memengaruhi pertimbangan profesional;
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan Perusahaan;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan ;
9. Mengungkapkan semua fakta untuk menghindari distorsi informasi dan praktik-praktik yang melanggar hukum;
10. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya serta mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

Pengembangan Kompetensi SPI

Dalam mengakomodasi kebutuhan audit internal yang dinamis, Perum Jasa Tirta II memberikan program pengembangan kompetensi bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) secara sistematis dan berjenjang melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Adapun pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal diselenggarakan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/ lokakarya yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan audit. Sementara perkembangan kompetensi yang dilaksanakan secara internal dikelola oleh Perusahaan sendiri.

Informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang diikuti SPI selama tahun 2021 telah dimuat dalam Laporan Realisasi PKPT Tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Audit Internal

5. Not accepting any form of compensation from the audited work units, employees, or business partners of the Company that is reasonably suspected of influencing professional judgment;
6. Carrying out all assignments using professional competence;
7. Fully complying with the Internal Audit Professional Standards, Company policies, and regulations;
8. Not using the information obtained for personal gain, violating the law, or causing harm to the Company;
9. Disclosing all facts to avoid information distortion and illegal practices;
10. Constantly improving their skills, effectiveness, and quality of duty execution and participation in continuing professional education.

SPI Competency Enhancement

Perum Jasa Tirta II offers competency development programs for internal auditors in order to meet the changing needs of the profession.

Internal control (SPI) is systematic and tiered, with both internal and external competency development programs.

Meanwhile, competency development in external institutions is accomplished through formal training in the form of audit-related courses or seminars/ workshops. Meanwhile, internal competency development is managed by the company itself.

The 2021 PKPT Realization Report includes information about the training and education that SPI received in 2021.

Internal Audit Implementation Report 2021

Tahun 2021

Program Monitoring dan Evaluasi

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaima Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan.

Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-18/DIR/11/2020 dan PRD-19/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Monitoring and Evaluation

The Internal Audit Unit (SPI) performs the Internal Audit Function of Perum Jasa Tirta II in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN), and Government Regulation Number 7 of 2010.

In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for trustworthy management, acting professionally, objectively, and independently in order to add value to the achievement of the Company's objectives through efforts to improve risk management effectiveness, compliance with laws and regulations, and good corporate governance (Good Corporate Governance) SPI reports directly to the President Director to ensure compliance with government regulations The appointment of the Head of SPI by the President Director must meet the qualifications and competencies, as well as obtain the approval of the Supervisory Board as the Company's representative.

According to the organizational structure specified in the Regulation of the Board of Directors of the Jasa Tirta II Public Company (Perum) Numbers: PRD-18/DIR/11/2020 and PRD19/DIR/11/2020 Concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Jasa Tirta II Public Company (Perum).

Kinerja Satuan Pengawasan Intern Tahun 2021
Internal Audit Unit Performance in 2021

No.	URAIAN Description	DASAR PENUGASAN DAN WAKTU PELAKSANAAN Basis of Assignment and Implementation Time	MAKSUD DAN TUJUAN Purpose and Objectives	HASIL AUDIT Audit Results
1.	Pemeriksaan Operasional dan Keuangan I Tahun 2021 / Operational and Financial Examination I Year 2021	SPN Direktur Utama nomor: SPN- 32/DU/05/2021 tanggal 23 Mei 2021 periode pelaksanaan selama 49 (empat puluh Sembilan) hari. / SPN President Director number: SPN-32/DU/05/2021 dated May 23, 2021, the implementation period is 49 (forty-nine) days.	Memastikan kegiatan Pemeriksaan Operasional dan Keuangan telah sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku guna mecapai tujuan perusahaan. / Ensure that Operational and Financial Audit activities are in accordance with applicable criteria and rules in order to achieve company goals.	Laporan Hasil Pemeriksaan Opersinoal & Keuangan I nomor: ND.LHP-180/SPI.DUPW/09/2021 tanggal 3 September 2021 / Operational & Financial Audit Report I number: ND.LHP-180/SPI.DUPW/09/2021 dated 3 September 2021
2.	Pemeriksaan Operasional dan Keuangan II Tahun 2021 / Operational and Financial Examination II 2021	SPN Direktur Utama nomor : SPN- 62/DU/05/2021 tanggal 18 Oktober 2021 periode pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari. / SPN President Director number: SPN-62/DU/05/2021 dated October 18, 2021, the implementation period is 45 (forty five) days.	Memastikan kegiatan Pemeriksaan Operasional dan Keuangan telah sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku guna mecapai tujuan perusahaan. / Memastikan kegiatan Pemeriksaan Operasional dan Keuangan telah sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku guna mecapai tujuan perusahaan.	Laporan Hasil Pemeriksaan Opersinoal & Keuangan II nomor : ND.LHP-318/SPI.DUPW/12/2 021 tanggal 31 Desember 2021 / Report on Results of Operational & Financial Examination II number: ND.LHP-318/SPI.DUPW/12/2021 dated December 31, 2021
3.	Audit Internal SMM ISO 9001:2015 / Internal Audit QMS ISO 9001:2015	Berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN- 53/DU/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dilaksanakan dari tanggal 30 Agustus s.d. 17 September 2021. / Based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-53/DU/08/2021 dated 26 August 2021 which was held from 30 August to 30 August 2021. 17 September 2021.	Mengevaluasi dan menguji implementasi penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Perusahaan dan memberikan rekomendasi dan peluang melakukan perbaikan. / Evaluating and testing the implementation of the Quality Management System within the Company and providing recommendations and opportunities for improvement.	Laporan Hasil Audit Internal ke-46 nomor : ND-195/SPI.DU/PW/09/ 2021 tanggal 17 September 2021. / 46th Internal Audit Report number : ND-195/SPI.DU/PW/09/2021 dated 17 September 2021.

No.	URAIAN Description	DASAR PENUGASAN DAN WAKTU PELAKSANAAN Basis of Assignment and Implementation Time	MAKSUD DAN TUJUAN Purpose and Objectives	HASIL AUDIT Audit Results
4.	Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 / Internal Audit Anti Management System Bribery (SMAP) ISO 37001:2016	Berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor : SPN-52/DU/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dilaksanakan dari tanggal 30 Agustus s.d. 17 September 2021. / Based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-52/DU/08/2021 dated 26 August 2021 which was held from 30 August to 30 August 2021. 17 September 2021.	Mengevaluasi SMAP telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan standar ISO 37001:2016 dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SMAP di lingkugan perusahaan. / Evaluating that SMAP has been implemented effectively and in accordance with the ISO 37001:2016 standard and provides recommendations for continuous improvement in the implementation of SMAP within the company.	Laporan Hasil Audit Internal SMAP ke-2 nomor : ND-199/SPI.DU/PW/09/ 2021 tanggal 21 September 2021. / 2nd SMAP Internal Audit Report number : ND-199/SPI.DU/PW/09/2021 dated 21 September 2021.
5.	Self Assessment Quality Assurance SPI. / Self Assessment Quality Assurance SPI.	Berdasarkan Surat Penugasan Kepala SPI Nomor : SPN-03/KA.SPI/02/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang dilaksanakan dari tanggal 1 s.d. 31 Maret 2021. / Based on the Assignment Letter of the Head of SPI Number: SPN-03/KA.SPI/02/2021 dated February 19, 2021, which was carried out from the 1st to the last. March 31, 2021.	Memperoleh gambaran penerapan penjaminan mutu SPI yang telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-uindangan, standar profesi auditor internal dan kebijakan internal perusahaan serta praktik terbaik proses kegiatan./ Obtain an overview of the implementation of SPI quality assurance that has complied with the provisions of laws and regulations, professional standards of internal auditors and company internal policies as well as best practices of activity processes.	Laporan Self Assessment Quality Assurance (Penilaian Penjaminan Mutu) SPI dilingkungan PJT II nomor : ND- 02/SPI.DU.2/PW/04/ 2021 tanggal 9 April 2021, dengan kesimpulan hasil pengukuran terhadap penerapan penjaminan mutu SPI PJT II periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 berpredikat BERMUTU. / Self Assessment Quality Assurance Report (Assessment of Quality Assurance) of SPI in the PJT II environment number: ND-02/SPI.DU.2/PW/04/2021 dated April 9, 2021, with the conclusion of the measurement results on the implementation of SPI PJT II quality assurance for the period of January 1st s.d. December 31, 2020 predicated QUALITY.

No.	URAIAN Description	DASAR PENUGASAN DAN WAKTU PELAKSANAAN Basis of Assignment and Implementation Time	MAKSUD DAN TUJUAN Purpose and Objectives	HASIL AUDIT Audit Results
6.	Resertifikasi ISO 9001:2015. / ISO 9001:2015 Recertification	Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK-1/SEKPER.DU/02/ 2021 tanggal 3 Februari 2021. / Based on the Work Order Number: SPK-1/SEKPER.DU/02/2021 dated February 3, 2021.	Mendapatkan bukti pengakuan organisasi telah menerapkan sistem untuk mengikuti dinamika perubahan tentang pengelolaan proses bisnis perusahaan serta tuntutan kepuasan dari stakeholder, melalui Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal ISO 9001:2015. / Obtaining evidence that the organization has implemented a system to keep up with the dynamics of changes regarding the management of the company's business processes and the demands of satisfaction from stakeholders, through Internal Quality Assurance and ISO 9001:2015 External Quality Assurance.	Sertifikasi nomor : 2701001 Certification number : 2701001
7.	Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan. / Monitoring & Evaluation of Follow-up Examination.	1) Triwulan I berdasarkan Nota Dinas Ka.SPI No.53/SPI.DU/PW/03/ 2021 tanggal 16 Maret 2021, dilaksanakan dari tanggal 22 s.d. 31 Maret 2021. / Quarter I based on the Memorandum of Service of the Head of the SPI No. 53/SPI.DU/PW/03/ 2021 on March 16, 2021, will be held from the 22nd to the d. March 31, 2021. 2) Triwulan II berdasarkan Nota Dinas Ka.SPI No. ND- 91/SPI.DU/PW/06/2 021 tanggal 10 Juni 2021 dilaksanakan dari tanggal 21 s.d. 30 Juni 2021. / Quarter II based on the Memorandum of Service of the Head of the SPI No. ND-91/SPI.DU/PW/06/2 021 June 10 2021 will be held from 21 s.d. June 30, 2021.	Melakukan evaluasi kesesuaian kendala atau hambatan atas tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja auditee sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan memberikan saran tindak lanjut agar sesuai dengan rekomendasi temuan. / Evaluating the suitability of constraints or obstacles to follow-up improvements has been carried out by the auditee work unit in accordance with the recommendations of the findings of the examination and provides suggestions follow up to fit with the recommended findings.	1) Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Periode Tw.I nomor : ND-62/SPI.DU/PW/0 4/2021 tanggal 15 April 2021. / Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Inspection Results for Q1 Period number: ND-62/SPI.DU/PW/0 4/2021 dated April 15, 2021. 2) Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Periode Tw.II nomor : ND- 115/SPI.DU/PW/ 07/2021 tanggal 12 Juli 2021. / Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Inspection Results for Tw.II Period number: ND-115/SPI.DU/PW/ 07/2021 dated July 12, 2021.

No.	URAIAN Description	DASAR PENUGASAN DAN WAKTU PELAKSANAAN Basis of Assignment and Implementation Time	MAKSUD DAN TUJUAN Purpose and Objectives	HASIL AUDIT Audit Results
		3) Triwulan III berdasarkan Nota Dinas Ka.SPINo.ND-197/SPI.DU/PW/09/2021 tanggal 21 September 2021, dilaksanakan dari tanggal 20 s.d. 30 September 2021. / Quarter III based on Office Memorandum of Head of SPINo.ND-197/SPI.DU/PW/09/2021 dated September 21, 2021, implemented from the 20th to the 20th. 30 September 2021. 4) Triwulan IV berdasar- kan Nota Dinas Ka. SPI no. ND- 302/SPI.DU/PW/12/2021 tgl. 13 Desember 2021, dilaksanakan dari tanggal 21 s.d. 31 Desember 2021. / Quarter IV based on the Memorandum of Service of Ka. SPI No. ND-302/SPI.DU/PW/12/2021 date December 13, 2021, will be held from the 21 s.d. December 31, 2021.		3) Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Periode Tw.III nomor: ND-251/SPI.DU/PW/10/2021 tagl 5 Oktober 2021. / Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Inspection Results for the Quarter III Period number: ND-251/SPI.DU/PW/10/2021 dated October 5, 2021. 4) Lap Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Periode Tw.IV nomor : ND- 302/SPI.DU/PW/12/2021 tgl 13 Des 2021. / Monitoring & Evaluation Lap of Follow-up Examination Results for Q4 Period number: ND-302/SPI.DU/PW/12/2021 on 13 Dec 2021.
8.	Evaluasi Manajemen Risiko. Evaluasi Manajemen Risiko.	Berdasarkan Surat Perintah Tugas Monitorin & Evaluasi Manajemen Risiko Kepala SPI No. ND.SPTME-66/SPI.DU/PW/04/2021 tanggal 20 April 2021, dilaksanakan dari tanggal 22 s.d. 30 April 2021. / Based on the Warrant of Monitoring & Evaluation of Risk Management of the Head of SPI No. ND.SPTME-66/SPI.DU/PW/04/2021 dated 20 April 2021, held from 22 s.d. April 30, 2021.	Mengevaluasi penerapan manajemen risiko untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko oleh unit pengelola risiko, pemahaan budaya risiko dan kepatuhan unit pemilik risiko dilingkungan perusahaan. / Evaluating the implementation of risk management to determine the implementation of risk management activities by the risk management unit, understanding the risk culture and compliance of the risk owner unit within the company.	Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko nomor : ND- 03/SPI.DU.2/PW/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, dengan kesimpulan bahwa skor pemahaman penerapan pengelolaan atas roadmap manrisk 86,14%. Penyampian Telaahan Staf. / Risk Management Evaluation Results Report number: ND-03/SPI.DU.2/PW/05/2021 dated 18 May 2021, with the conclusion that the score for understanding the implementation of management on the risk roadmap is 86.14%. Staff Review Submission.
9.	Telahaan Staf Telahaan Staf	Berdasarkan Keputusan Direksi No. KPT-17/DIR/02/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan SPI PJT II Tahun 2021. / Based on the Decree of the Board of Directors No. KPT-17/DIR/02/2021 dated February 2, 2021 regarding the 2021 SPI PJT II Annual Supervision Work Program.	Memenuhi aspek kepatuhan (compliance) perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta pemetaan risiko strategis perusahaan. / Fulfill the company's compliance aspects with regulations and laws as well as the company's strategic risk mapping.	

Register Risiko SPI

Register Risiko SPI

No.	KENDALA YANG DIHADAPI Obstacles encountered	MITIGASI Mitigation
1.	Tingkat kepatuhan unit kerja masih reendah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perusahaan. Tingkat kepatuhan unit kerja masih reendah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perusahaan.	SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Opersional & Keuangan I dan II, Audit ISO 37001 : 2016 SMAP Audit ISO 9001 : 2015 SMM, dan Quality Assurance. SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Opersional & Keuangan I dan II, Audit ISO 37001 : 2016 SMAP Audit ISO 9001 : 2015 SMM, dan Quality Assurance.
2.	Pelaksanaan kegiatan Audit internal ISO belum dilaksanakan secara maksimal.hasil kegiatan Audit tidak optimal. Pelaksanaan kegiatan Audit internal ISO belum dilaksanakan secara maksimal.hasil kegiatan Audit tidak optimal.	SPI telah mengusulkan dan melaksanakan Pendidikan & Pelatihan. SPI telah mengusulkan dan melaksanakan Pendidikan & Pelatihan.
3.	Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan oleh auditor SPI tidak objektif sesuai kondisi temuan. Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan oleh auditor SPI tidak objektif sesuai kondisi temuan.	SPI telah melaksanakan monitorting & evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal, Rapat Koordinasi dengan Komite Audit dan Evaluasi Manajemen Risiko. SPI telah melaksanakan monitorting & evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal, Rapat Koordinasi dengan Komite Audit dan Evaluasi Manajemen Risiko.
4.	Pelaksanaan pengendalian internal perusahaan belum berdasarkan pedoman pelaksanaan. Pelaksanaan pengendalian internal perusahaan belum berdasarkan pedoman pelaksanaan.	SPI telah melaksanakan telaahan/ kajian staf Bidang Pengawasan pada bulan Februari 2022. SPI telah melaksanakan telaahan/ kajian staf Bidang Pengawasan pada bulan Februari 2022.
5.	Target budget deviation tidak tercapai. Target budget deviation tidak tercapai.	Kegiatan Pengawasan berdasarkan ketersedian anggaran. (Dilaksanakan Tentative apabila sangat diperlukan). Kegiatan Pengawasan berdasarkan ketersedian anggaran. (Dilaksanakan Tentative apabila sangat diperlukan).

AUDIT EKSTERNAL
EXTERNAL AUDIT

Penguatan terhadap independensi dan akuntabilitas pemeriksaan audit dilakukan dengan melibatkan Auditor Eksternal. Auditor eksternal dalam hal ini merupakan pihak independen profesional dalam melakukan audit, baik audit laporan keuangan, audit terkait mutu (Sistem Manajemen Mutu), audit Sistem Manajemen Keselamatan dan KeseSistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, hatan Kerja (SMK3), maupun kegiatan audit lainnya.

The External Auditor is used to strengthen the independence and accountability of audit audits. In this case, the external auditor is a professional independent party who conducts audits, including financial statement audits, quality-related audits (Quality Management System), audits of Safety Management Systems and Quality Management Systems) ISO 9001:2015 and ISO 37001:2016, work safety (SMK3), and other audit activities.

Khusus dalam menangani audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan prosedur penunjukan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kriteria independensi dan bebas benturan kepentingan, standar profesional akuntan publik, dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang wajib dipenuhi oleh KAP.

The Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) to handle the audit of financial statements, taking into account the appointment procedure in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, criteria for independence and free of conflict of interest, professional standards of public accountants, and cooperation agreements, as well as the audit scope, must be met by KAP.

Ruang Lingkup Audit Kantor Akuntan Publik

1. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
   - Laporan Posisi Keuangan
   - Laporan Laba Komprehensif
   - Laporan Perubahan Ekuitas
   - Laporan Arus Kas
   - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian internal yang ditemukan selama audit dalam bentuk Management Letter & laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian Internal.
3. Jasa lainnya.

Laporan review penilaian tingkat kesehatan Laporan review atas laporan key performance indicators.

Audit of a Public Accounting Firm

1. The Audit of Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31, 2021 seeks to provide the accountant's opinion on the fairness of financial statements such as:
   - Statement of Financial Position
   - Statement of Comprehensive Income
   - Statement of Changes in Equity
   - Statement of Cash Flows
   - Financial Statement Notes
2. Provide recommendations in the form of Management Letters and reports on compliance with laws and regulations and internal control on weaknesses in the internal control structure discovered during the audit.
3. Additional services

Report on the Health Level Assessment Review Examine reports on key performance indicators.

Laporan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL).

Report on the Partnership and Community Development Program (TJSL) funds management.

Partisipasi dalam Asosiasi Internal Audit

Membership in the Internal Audit Association

NAMA KEGIATAN/ORGANISASI Nama Kegiatan/organisasi	JABATAN Position	WAKTU Time
Ikatan Auditor (BPK) Ikatan Auditor (BPK)	Anggota / Anggota	-

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan

the name of Public Accounting Firms

Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan yang bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan audit dan menyajikan laporan keuangan tahunan adalah sebagai berikut,

The public accounting firm's accountant and the name of the accountant who works with Perum Jasa Tirta II to conduct audits and present

TAHUN Year	KANTOR AKUNTAN PUBLIK Public Accounting Firm	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant	OPINI Opinion
2021	KAP Amir Abadi Jusuf Mawar & Rekan (RSM Indonesia)	Endang Pramuwati, SE, M.Ak, CA., CPA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2020	KAP Djoko, Sidik & Indra	Drs. Abubakar Sidik, MS., CA., CPA.	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain Unmodified opinion with other matters paragraph
2019	KAP Djoko, Sidik & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2018	KAP Djoko, Sidik & Indra	Drs. Djoko Sutardjo, Ak., CA., CPA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph
2017	KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan	Drs. Salam Manan, Ak., MM, CPA., CA	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain Unmodified opinion with other matters paragraph

Selain Kantor Akuntan Publik, terdapat juga Auditor Eksternal lain yang melakukan audit sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perum Jasa Tirta II, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang salah satu tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada bidang kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN) di antaranya melalui audit atas kinerja Perusahaan dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

In addition to the Public Accounting Firm, other External Auditors conduct audits in connection with the implementation of Perum Jasa Tirta II's business activities, namely the Supreme Audit Agency (BPK RI), one of whose duties is to examine the management and responsibility of State finances in the separated State assets (BUMN) sector, including through an audit of the Company's performance.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan suatu Perusahaan . Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tepat dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara Efisien, Efektif, dan Ekonomi (3E), mengamankan investasi dan aset Perusahaan , menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian.

The Internal Control System is an important tool in business management. The proper implementation of the Internal Control System can help the Board of Directors manage the Company's business more efficiently, effectively, and economically (3E), secure the Company's investments and assets, ensure the availability of reliable financial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, and reduce the risk of loss.

Ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) mengharuskan Direksi BUMN menetapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 01/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance jo. Regulation Number: PER-01/MBU/2011 of the Minister of SOEs dated August 1, 2011 Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) jo. Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) jo.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu BUMN strategis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, berkomitmen menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif yang diawali dengan merancang dan menetapkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal.

In this regard, Perum Jasa Tirta II, as one of the strategic SOEs in the field of Water Resources Management, is committed to implementing an effective Internal Control System, which begins with the design of a system and establishing General Guidelines for Internal Control Systems.

Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perusahaan , keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat menjaga dan mengamankan aset Perusahaan , mengurangi dampak/kerugian penyimpangan termasuk kecurangan fraud; menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku; menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan ; meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada organisasi secara menyeluruh.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengelolaan Perusahaan , antara lain Dewan Pengawas, Direksi, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Pejabat, dan karyawan Perum Jasa Tirta II, dan pihak eksternal lainnya yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang andal dan efektif, agar tujuan keterlibatan mereka terjaga secara aman, berhasil guna, dan berdaya guna.

Internal Control's Purpose

Internal Control System is an integrated process that is linked to actions and activities that are carried out continuously by the leadership and all employees to provide adequate assurance on the achievement of the Company's organizational goals through effective and efficient activities, ensuring the security of the Company's assets, the reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations.

The purpose of the Internal Control System is to provide assurance that any implementation of activities within the Company can maintain and secure the Company's assets, reducing the impact/loss of irregularities including fraudulent fraud; and ensuring the implementation of all the Company's business activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the Company's management, including the Supervisory Board and the Board of Directors, Internal Control Unit (SPI), officers and employees of Perum Jasa Tirta II, and other external parties with an interest in the implementation of a reliable and effective Company Internal Control System, so that their involvement's objectives are met in a safe, effective, and efficient manner.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kerangka sistem pengendalian internal PJT II telah sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal PJT II dalam membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Adapun sistem pengendalian internal PJT II terdiri dari lima unsur pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk kondisi yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengembangkan dan melaksanakan kompetensi, independensi, integritas, serta patuh pada peraturan yang berlaku di Perusahaan ;
2. Penilaian Risiko merupakan tindakan untuk menentukan pengaruh negatif suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan bila terjadi akan menghalangi pencapaian tujuan Perusahaan ;
3. Kegiatan Pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada secara konsisten dipatuhi;
4. Informasi dan Komunikasi yang meliputi unsur pengendalian yaitu penggunaan informasi yang relevan, komunikasi internal, dan eksternal;
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal pada Perusahaan berjalan dengan baik.

Framework for Internal Control Systems

The internal control system framework of PJT II is based on an internationally recognized framework, namely the Treadway Commission's Committee of Sponsoring Organizations (COSO). The internal control system, according to COSO, is a process that involves the Supervisory Board, the Board of Directors, and other personnel. This is consistent with PJT II's internal control system, which involves all existing resources in the development of an organizational control system. The PJT II internal control system is made up of five control elements:

1. Control environment, which is realized in the form of conditions that can create a conducive working environment, develop and implement competence, independence, and integrity in the Company, and comply with applicable regulations;
2. Risk assessment is an action that determines the negative impact of an unexpected event and how it will impede the achievement of the Company's objectives if it occurs.
3. Control activities include the development of control policies and procedures, as well as a verification process to ensure that existing policies and procedures are followed consistently.
4. Information and Communication, which includes control elements such as the use of relevant information as well as internal and external communications;
5. Inspecting the Internal Control System to ensure that the Company's internal control system is functioning properly.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal PJT II merupakan kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat :

System of Financial and Operational Control

The internal control system at PJT II is an organizational framework and work procedures for financial and non-financial operations that can provide assurance that every activity carried out within the Company can:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan ;
2. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis PJT II sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional PJT II;
6. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management) pada organisasi secara menyeluruh.

1. Maintain and secure the Company's assets;
2. Reduce financial impact/losses, irregularities, including fraud/fraud; and
3. Ensure the implementation of all PJT II business activities in accordance with applicable laws and regulations.
4. Provide accurate, complete, and timely financial and management information;
5. Improve efficiency, effectiveness, and economy in PJT II operational activities;
6. Improve the overall effectiveness of risk management (risk management).

Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2021

Dalam pemantauan sistem pengendalian internal, terdapat tiga komponen yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta evaluasi dan komunikasi kelemahan untuk perbaikan.

Sepanjang tahun 2021, PJT II telah melaksanakan monitoring evaluasi di mana dilakukan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan operasional Perusahaan . Evaluasi tersebut mencakup proses penilaian atas capaian kualitas pengendalian intern dalam jangka waktu satu tahun buku. Kemudian dilakukan evaluasi terpisah oleh Satuan PengawasanIntern (SPI) PJT II dan pihak eksternal yaitu auditor eksternal serta dilakukan audit atau self assessment yang diidentifikasi oleh SPI dan pihak lain untuk dilaporkan kepada Direksi.

Evaluation of the Internal Development System for 2021

There are three components in the internal system development process: continuous evaluation, separate evaluation, and evaluation and communication of weaknesses for improvement.

PJT II has conducted monitoring and evaluation throughout 2021, in which an assessment of the quality of the internal control system performance is carried out on a continuous basis and integrated into the Company's operational activities. The evaluation process includes assessing the achievement of internal control quality over the course of a fiscal year. The Internal Control Unit (SPI) of PJT II and an external party, namely the external auditor, then conduct a separate evaluation, and an audit or self-assessment is conducted, which is identified by SPI and other parties and reported to the Board of Directors.

HUBUNGAN DENGAN PEMILIK MODAL
RELATIONSHIP WITH CAPITAL OWNER

Perusahaan berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dalam berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan etika guna memenuhi tanggung jawabnya kepada para Pemilik Modal dan Pemilik Modal.

Untuk itu, Perum Jasa Tirta II senantiasa menjaga hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingannya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Hubungan baik tersebut dilaksanakan dalam kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pemilik Modal adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung

In order to fulfill its responsibilities to Capital Owners and Capital Owners, the Company is committed to always complying with applicable laws and regulations and upholding the Company's values in interacting and behaving in accordance with ethics. As a result, Perum Jasa Tirta II strives to maintain positive relationships with all of its stakeholders in order to ensure business continuity.

This positive relationship is maintained in accordance with all applicable laws and regulations. Capital Owners are individuals or entities who have a direct or indirect interest in the Company.

Stakeholder primer merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung pada suatu kebijakan, program, dan proyek Perusahaan. Tanpa partisipasi berkelanjutan dari stakeholder primer, Perusahaan tidak dapat bertahan. Adapun contoh stakeholder primer yaitu Pemilik Modal (Kementerian BUMN, Kementerian PUPR), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen (PDAM DKI Jakarta, PDAM Kabupaten/Kota, PLN, dan konsumen lainnya), penyalur, pesaing atau rekanan.

Primary stakeholders are the most important decision-makers because they have a direct interest in the Company's policies, programs, and projects. The Company cannot survive without the continuous participation of its primary stakeholders. Capital Owners (Ministry of BUMN, Ministry of PUPR), creditors, employees, suppliers, consumers (PDAM DKI Jakarta, PDAM Regency/City, PLN, and other consumers), distributors, competitors, or partners are examples of primary stakeholders.

Stakeholder sekunder tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Akan tetapi, pihak ini memiliki kepedulian (concern) sehingga turut berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal Pemerintah. Stakeholder ini juga didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Perusahaan tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan Perusahaan. Adapun yang termasuk dalam stakeholder sekunder adalah Pemerintah setempat (Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemda Kab. Purwakarta, pemerintah asing (JICA), kelompok

Secondary stakeholders are those who are not directly involved in a policy, program, or project. This party, however, has a concern (concern), which influences people's attitudes and the government's legal decisions. These stakeholders are also defined as parties who have an influence over or are influenced by the Company but are not involved in transactions with the Company. Secondary stakeholders include local governments (DKI Jakarta Provincial Government, West Java Provincial Government, Purwakarta Regency Government), foreign governments (JICA),

sosial (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), media massa, dan pihak lainnya.

Stakeholder kunci memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Adapun yang termasuk dalam stakeholder kunci adalah Pemerintah Kabupaten (Pemprov DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Karawang, DPRD, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan stakeholders, Perusahaan harus memperhatikan pola hubungannya, antara lain :

- Pola hubungan Perusahaan dengan pemilik
  Pemilik Modal seperti Pemilik Modal bersifat pola hubungan yang proaktif (proactive), di mana Perusahaan cenderung berusaha untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan para stakeholders. Hal ini diimplementasikan dengan membentuk departemen khusus yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan :
  - Bidang Hubungan Masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hubungan Perusahaan dengan para stakeholders, media massa, LSM, dan masyarakat pada umumnya.
  - Government Relation Officer yang berfungsi sebagai pejabat yang ditunjuk khusus untuk menjadi penghubung antara Perusahaan dengan stakeholders Pemerintah seperti Kementerian PUPR, Kementerian BUMN maupun instansi Pemerintah lainnya.
  - Perusahaan juga membentuk tim-tim khusus yang berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu yang menjadi para Pemilik Modal utama, contohnya Tim Pengembangan Wilayah, Tim Pembentukan Anak Perusahaan , Tim Percepatan Proyek SPAM Jatiluhur, dan sebagai sebagainya.

Social media groups (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), mass media, and other parties are involved.

Key stakeholders are legally empowered to make decisions. According to its level, the stakeholder in question is the executive element, the legislature, and the agency. The Regency Government (DKI Jakarta Provincial Government, Bekasi City Government, Bekasi Regency Government, Karawang Regency Government, DPRD, and the agency that directly supervises the project in question) are the key stakeholders.

Relationship Patterns with Stakeholders

To achieve balance in stakeholder management, the Company must pay attention to the pattern of the relationship, among other things:

- The relationship pattern between the Company and the owners of the Capital Owners, such as the Capital Owners, is a proactive relationship pattern in which the Company tries to anticipate the stakeholders' interests. in the capacity of Corporate Secretary:
  - Public Relations, which is responsible for maintaining the Company's relationships with stakeholders, the media, non-governmental organizations, and the general public.
  - A Government Relations Officer who serves as a specially appointed official to serve as a public relations officer between the Company and government stakeholders such as the Ministry of PUPR, the Ministry of SOEs, and other government agencies.
  - The Company also forms special teams whose function is to identify issues that are important to the Capital Owners, such as the Regional Development Team and Subsidiary Formation, team Jatiluhur SPAM Project Acceleration, and so on.

- Pola Hubungan yang Interaktif (interactive) tercermin antara hubungan Perusahaan dengan para pelanggannya. Dengan adanya Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan serta kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap semester, Perusahaan menggunakan pendekatan interaktif untuk mendapatkan masukan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan.

  Perusahaan juga membuka komunikasi dengan para stakeholders melalui berbagai media (surat, telepon, email, media sosial) serta memiliki prosedur untuk menangani keluhan dari para stakeholders khususnya pelanggan, yaitu dengan ditetapkannya Prosedur No. 37 tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk:
  - Mengetahui respons stakeholders maupun pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
  - Menangani dan mengevaluasi keluhan pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
  - Menjadikan umpan balik pelanggan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.

- Interactive Relationship Pattern (interactive) is reflected in the Company's relationship with its customers, for example. The Company uses an interactive approach to obtain input and fulfill customer needs, with the Commercial and Customer Service Division and customer satisfaction survey activities conducted every semester.

  The company also initiates communication with stakeholders via various media (letters, phone, email, and social media) and has procedures in place to handle complaints from stakeholders, particularly customers, namely the implementation of Procedure No. 37 of 2018. This aims to:

  - Determine stakeholders' and customers' reactions to PJT II products and services;
  - Handle and evaluate customer complaints about PJT II products and services;
  - Use customer feedback to inform management decisions about how to improve the Company's performance.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Pelaksanaan aktivitas bisnis Perum Jasa Tirta II tidak terlepas dari berbagai eksposur risiko yang memiliki potensi dampak terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam mengantisipasi risiko tersebut, Perum Jasa Tirta II memiliki Sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagai salah satu komponen penting dalam manajemen dan memastikan Perusahaan dalam keadaan sehat, aman, dan baik, sehingga seluruh aktivitas usaha dapat membawa Perusahaan pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perum Jasa Tirta II memiliki komitmen kuat yang secara berkelanjutan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yang terpadu dan komprehensif, yang bertujuan untuk melindungi Perusahaan dari risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, Perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan praktik terbaik manajemen risiko di seluruh kegiatan operasional, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Seluruh elemen Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan risiko dengan risikonya masing-masing, sehingga dalam mendukung keberhasilannya dibutuhkan kebijakan- kebijakan yang mengatur setiap prosedur dan mekanisme manajemen risiko. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan Perusahaan ;
2. Menjadikan Manajemen Risiko sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran

The execution of Perum Jasa Tirta II's business activities is inextricably linked to various risk exposures that may have an impact on the Company's long-term viability. Perum Jasa Tirta II has an effective Risk Management System as an important component in management to anticipate these risks and ensure the Company is in a healthy, safe, and good condition, so that all business activities can bring the Company to the mission and goals that have been set.

Perum Jasa Tirta II is committed to continuously developing and improving the framework of an integrated and comprehensive risk management system, with the goal of protecting the Company from risks that have a negative impact on the achievement of objectives and exploring opportunities to increase benefits for all stakeholders.

Policy on Risk Management

In order to improve the effectiveness and efficiency of risk management, the Company must implement best risk management practices in all operational activities, both internal and external. All elements of the Company play a role in risk management with their respective risks, so policies that regulate each risk management procedure and mechanism are required to support its success. These policies include:

1. Implementing integrated risk management in accordance with Good Corporate Governance in order to achieve the Company's Vision, Mission, and Objectives; and
2. Making Risk Management the foundation for the preparation of financial statements.

Perusahaan (RKAP) berbasis risiko untuk mencapai realisasi setiap proses secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kesadaran budaya risiko dalam keseharian kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik bisnis Perusahaan dan pengambilan keputusan;
4. Menjadikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (risk based audit) dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas;
5. Menginformasikan, mengelola, dan melakukan pengendalian serta penanganan (mitigasi) risiko secara berkala sebagai dasar upaya perbaikan berkesinambungan dalam penerapan manajemen risiko.

a risk-based Corporate Budget Work Plan (RKAP) to achieve the realization of each process effectively and efficiently;
3. Increase awareness of risk culture in daily work so that it becomes an integrated part of the Company's business practices and decision making;
4. Making the results of identification, analysis, evaluation, and risk management the basis for inspection and supervision (risk based audit) in order to improve performance and accountability;
5. Informing, managing, and controlling and managing (mitigating) risks on a regular basis as the basis for continuous improvement efforts in the implementation of risk management.

Pengelola Manajemen Risiko

Pengelolaan Manajemen Risko Perum Jasa Tirta II tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko dan STOK

Bidang Manajemen Risiko Perusahaan

(1) Bidang Manajemen Risiko Perusahaan melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang manajemen risiko perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Manajemen Risiko Perusahaan mempunyai fungsi

a. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko, program kerja dan KPI Bidang Manajemen Risiko Perusahaan,
b. Menyiapkan, mengarah dan mengevaluasi penyusunan road man manajemen risiko Perusahaan;

Risk Management Manager

Perum Jasa Tirta II's Risk Management Management is contained in the Risk Management Guidelines and STOK

Corporate Risk Management

(1) Field of Corporate Risk Management carrying out the main duties in the activity prepare, direct, evaluate, and report on applicable activities in areas of enterprise risk management in accordance with the Company's rules

(2) In carrying out the tasks as referred to in paragraph (1), the Company's Risk Management Division has the functions of

a. Prepare, direct and evaluate risk management, work programs and KPIs for the Company's Risk Management Division,

b. Prepare, direct and evaluate the preparation of the Company's risk management road man;

c. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan, reviu, dan melaksanakan sosialisasi aturan pedoman/ prosedur terkait manajemen risiko Perusahaan d menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kelengkapan dokumen usulan RKAP namun tidak terbatas pada Project Digest, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan penyusunan RKAP yang berlaku,
e. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan rencana paket pengadaan barang/jasa sesuai batas kewenangan Divisi Rencana Strategi, Manajemen Risiko dan teknologi Informasi Komunikasi
f. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendin/ HPS (Owner Estimate) dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku,
9. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan naskah Memorandum Of Understanding (MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan. fungsi
h. Menganalisis konteks internal dan eksternal Perusahaan
i. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan ruang lingkup dan kriteria risiko Perusahaan,
j. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan daftar risiko Perusahaan
k. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan rencana pengendalian danmitigasi risiko Perusahaan,
I. Menganalisis risiko investas erusahaan,
m. Melaksanakan pemantauan dan tinjauan pengelolaan risiko
n. Mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan pengelolaan risiko Perusahaan,

c. Prepare, direct, and evaluate the preparation, review, and socialization of risk management guidelines/procedures for the Company
d. Prepare, direct, and evaluate the completeness of the RKAP proposal document (including, but not limited to, the Project Digest, Terms of Reference (KAK), and Detailed Budget (RAB)) for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable RKAP preparation
e. Prepare, direct, and evaluate the preparation of the package plan for the procurement of goods/services in accordance with the Division of Strategic Planning, Risk Management, and Information Communication Technology's authority limits.
f. Prepare, direct, and evaluate the completeness of the procurement plan document, including but not limited to the Terms of Reference (KAK), the Estimated Price Sendin / HPS (Owner Estimate), and the Draft Contract for the work of consulting services in accordance with the provisions of the current procurement of goods and services,
g. Draft, direct, and assess a Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions
h. Aanalyze the Company's internal and external context
i. Prepare, direct, and evaluate the Company's scope and risk criteria
j. Prepare, direct, and evaluate the risk register for the company
k. Prepare, direct, and evaluate the Company's risk control and mitigation plan,
I. Examine the investment risk of the company,
m. Carry out risk management monitoring and review
n. Communicate with and consult with the Company's risk management team

o. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan draft laporan pengelolaan Perusahaan, risiko Perusahaan,

p. Melaksanakan assesment maturity manajemen risiko,
q. Mengendalikan bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, dan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 7 karyawan Perum Jasa Tirta II telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko, 2 karyawan bersertifikat Certified Risk Management Profesional (CRMP) dan 5 karyawan bersertifikat Certified Risk Management Organization.

Roadmap Manajemen Risiko

Perusahaan telah menetapkan arah pengembangan manajemen risiko dengan mengacu pada roadmap manajemen risiko 2015 – 2021

Infrastruktur Manajemen Risiko

Penyusunan infrastruktur dan proses manajemen risiko menjadi perangkat bagi Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam setiap proses bisnis Perusahaan . Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi Perusahaan untuk memetakan potensi peluang maupun kerugian, sehingga proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan dapat menimbang serta mengefektifkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di lingkungan Perum Jasa Tirta II berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

o. Prepare, direct, and evaluate the preparation of draft reports on Company management, Company risks,
p. Conduct risk management maturity assessment,
q. Control evidence of work implementation of duties and functions, and prepare, direct, and evaluate the preparation of reports in accordance with the duties and functions

Certification in Risk Management

As of the end of 2021, 7 Perum Jasa Tirta II employees already have Risk Management Certification, 2 are certified Risk Management Professionals (CRMP), and 5 are certified Risk Management Organizations. By referring to the 2015-2021 risk management roadmap.

Risk Management Roadmap

the Company has determined the direction of risk management development 2015 - 2021.

Infrastructure for Risk Management

The establishment of risk management infrastructure and processes allows the company to identify, measure, monitor, and report on potential risks encountered in each process. Company matters. This aims to provide the Company with a comprehensive picture to map potential opportunities and losses, so that the decision-making process and policy formulation can weigh and make every policy and decision taken effective.

The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, guides the implementation and development of risk management within Perum Jasa Tirta II.

(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun proses dan penerapan manajemen risiko Perum Jasa Tirta II dibagi menjadi proses dasar, proses inti, dan proses penunjang.

The risk management process and application at Perum Jasa Tirta II are divided into three parts: basic processes, core processes, and supporting processes.

Proses Dasar

The Fundamental Procedure

Proses dasar manajemen risiko meliputi kegiatan membangun lingkungan intern yang kondusif untuk berlangsungnya proses risiko berikutnya, serta menyusun konteks untuk menempatkan proses inti manajemen risiko. Dalam mendukung proses dasar tersebut, PJT II telah memiliki aplikasi berbasis web simrisk.jasatirta2.co.id. Adapun dalam implementasi proses dasar, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

The basic risk management process includes activities to create a conducive internal environment for the next risk process to occur, as well as setting up a context for placing risks. Core risk management processes PJT II has a web-based application simrisk.jasatirta2.co.id to help with this basic process.

- Dalam membangun lingkungan manajemen risiko, Direksi menetapkan kebijakan/ pedoman manajemen risiko, membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko melalui sosialisasi kepada risk owner, menyiapkan organisasi/fungsi yang menangani manajemen risiko serta menyediakan sumber daya yang menangani manajemen risiko.
- Dalam penyusunan konteks risiko, Divisi PKRSM dan/atau risk owner menyusun dan mempelajari hubungan/kaitan peristiwa risiko yang mungkin terjadi terhadap sasaran kegiatan rutin maupun kegiatan non rutin (proyek/investasi) sebagai dasar kegiatan identifikasi risiko.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan strategi Perusahaan dan perlu pengelolaan secara berlanjut terhadap kemungkinan terjadinya, dampak, serta pengaruhnya bagi kelangsungan usaha Perusahaan untuk kemudian dikelompokkan dalam risiko strategis.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan kegiatan tertentu dari operasional tahunan Perusahaan dan pengelolaannya diperlukan sesuai dengan tingkat kualitas nilai risikonya, dikelompokkan dalam risiko operasional.
- Risiko strategis maupun risiko operasional secara tertulis dikompilasi dalam Dokumen Register Risiko.

- In developing a risk management environment, the Board of Directors establishes risk management policies/guidelines, generates and maintains a risk-aware culture through socialization to risk owners, prepares organizations/functions that handle risk management, and provides risk management resources.
- To prepare the risk context, the PKRSM Division and/or risk owner compiles and studies the relationship/linkage of risk events that may occur to the targets of routine and non-routine activities (projects/investments) as the foundation for risk identification activities.
- Strategic risks are routine activity risks that are related to the Company's strategy and must be managed continuously on the possibility of occurrence, impact, and impact on the Company's business continuity.
- Routine activity risks are associated with certain activities of the Company's annual operations, and their management is required in accordance with the risk value's quality level, and are classified as operational risk. The Risk Register Document compiles written strategic and operational risks.
- The risk context is used to determine the level of qualitative and quantitative criteria associated with the level of impact and risk occurring.

- Konteks risiko digunakan untuk menetapkan level kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang dikaitkan dengan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

Proses Inti

Proses inti manajemen risiko secara garis besar meliputi kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko, serta tanggapan/tindak lanjut terhadap risiko. Setelah melalui tahap analisis dan evaluasi risiko, Perusahaan menyusun rencana tindakan untuk memitigasi risiko yang nilainya tinggi dengan mengacu pada daftar atau register risiko serta risiko strategis Perusahaan . Rencana tindakan ini digunakan sebagai bahan analisis manfaat dan biaya sebelum manajemen memutuskan memberikan tanggapan/perlakuan terhadap risiko. Berikut adalah proses dan penerapan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II :

1. Pelaksanaan Identifikasi Risiko
   - Identifikasi risiko dilaksanakan dengan mengamati indikasi risiko, sumber dan penyebab terjadinya risiko, jenis kegiatan yang terpengaruh risiko, akibat dan konsekuensi (biaya) bila terjadi risiko tersebut, serta pendokumentasian risiko.
   - Indikasi risiko dideteksi dari masalah yang timbul di masa lalu atau selama periode berjalan, baik kasus-kasus internal maupun kasus eksternal yang sejenis, tingkat kerumitan proses suatu kegiatan, adanya perubahan peraturan atau perubahan proses kegiatan, serta opini pakar dan masyarakat.
   - Sumber risiko secara garis besar dapat berasal dari risiko lingkungan, risiko proses, dan risiko informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan ISO 31000:2018. Risiko proses dan risiko informasi merupakan risiko internal Perusahaan yang

Fundamental Procedures Risk identification, risk analysis, and risk evaluation, as well as response/follow-up, are the core processes of risk management.

- Strategic risks are routine activity risks that are related to the Company's strategy and must be managed continuously on the possibility of occurrence, impact, and impact on the Company's business continuity.

Fundamental Procedures

Risk identification, risk analysis, and risk evaluation, as well as response/follow-up, are the core processes of risk management. against risk. Following the risk analysis and evaluation stage, the Company develops an action plan to mitigate high-value risks by consulting the risk register or register of risks as well as the Company's strategic risks. Before management decides to respond to/ treat risks, this action plan is used as material for an analysis of benefits and costs. The process and implementation of Perum Jasa Tirta II Risk Management are as follows:

1. Risk Identification Implementation
   - Risk identification is accomplished by observing risk indicators, risk occurrence sources and causes, risk-affected activities, consequences and consequences (costs) if the risk occurs, and risk documentation.
   - Risk indicators are detected from problems that occurred in the past or during the current period, both Internal and external cases, the level of complexity of an activity's process, changes in regulations or changes in the activity process, as well as expert and community opinions
   - According to ISO 31000:2018, risk sources for decision making can include environmental risk, process risk, and information risk. Process risk and information risk are internal risks to the company that are generally still under management control

umumnya masih dalam kendali manajemen (controllable). Risiko lingkungan sebagian besar berasal dari eksternal yang umumnya bersifat di luar kendali manajemen (uncontrollable).

- Risiko yang sifatnya controllable dapat disusun action plan-nya secara langsung, sedangkan risiko yang sifatnya uncontrollable perlu dilaporkan atau dikoordinasikan dengan pejabat eksternal yang terkait.
- Risiko yang diidentifikasi adalah risiko awal (risiko inherent) yang belum ditindaklanjuti dengan action plan.

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko
   - Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko digunakan untuk mengetahui tingkat besarnya risiko yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh risiko terhadap tujuan Perusahaan , serta untuk menyusun prioritas risiko yang memerlukan perlakuan tertentu.
   - Besaran nilai risiko merupakan hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan taksiran besarnya nilai dampak bila peristiwa risiko benar-benar terjadi.
   - Nilai risiko dinilai melalui perhitungan Nilai Kemungkinan dan Nilai Dampak. Nilai Kemungkinan yang dimaksud adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan Nilai Dampak adalah penilaian dampak dari risiko yang dapat diukur dari sasaran atau tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI).
3. Penilaian Tingkat Risiko
   - Penilaian risiko ditentukan dengan perkalian antara nilai kemungkinan dan nilai dampak. penilaian tingkat risiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan risiko.
   - Skala rating untuk kolom kemungkinan terjadinya dan kolom dampak dari peristiwa risiko yang paling kecil dimulai dengan level 1 sedangkan yang paling besar dinilai dengan level 5, karena rumus/notasi risiko adalah nilai dampak dikalikan nilai kemungkinan

(controllable). The majority of environmental risks come from outside sources that are generally beyond management's control (uncontrollable).

- Controllable risks can be directly prepared for action plans, whereas uncontrollable risks must be reported or coordinated with appropriate external officials.

- The identified risk is the inherent risk that has not been followed up on with an action plan.

2. Risk Assessment and Evaluation
   - Risk Analysis and Risk Evaluation are used to determine the level of risk, which can indicate the magnitude of risk's impact on the Company's objectives, as well as to prioritize risks that require specific treatment.
   - The magnitude of the risk value is the product of the probability of a risk occurring multiplied by the estimated value of the impact if the risk event occurs.
   - Risk value is calculated using the Likelihood Value and Impact Value. The Likelihood Value is the likelihood of an event occurring, while the Impact Value is an assessment of the risk's impact based on the Company's goals or objectives as stated in the Key Performance Indicators (KPI).
3. Risk Assessment
   - The risk level is calculated by multiplying the probability value by the impact value.
   - The rating scale for the probability column and the impact column for the smallest risk event starts at level 1, while the largest is rated at level 5, because the risk formula/ notation is the impact value multiplied by the

maka nilai peristiwa risiko berkisar antara 1 sampai dengan 25.
- Pengendalian Risik

4. Proses pengendalian risiko melibatkan komparasi nilai risiko yang muncul dan analisis proses prioritas dan persyaratan yang ada. Berdasarkan hasil penilaian risiko, makan dilakukan pengendalian risiko sesuai dengan tingkat risiko dan menentukan prioritasnya dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

probability value, and the risk event value ranges from 1 to 25.
- Risk Management

4. The risk management process entails comparing the value of emerging risks as well as analyzing priority processes and existing requirements. Risk control is carried out based on the results of the risk assessment and determines the priority by using the following provisions:

TINGKAT RISIKO Risk Level	PENGENDALIAN RISIKO Risk Control
Ekstrim/Strategis / Extreme/Strategic	Memerlukan tindakan segera karena sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian dan hancurnya Perusahaan. Requires immediate action because the distribution of potential risks allows the loss and collapse of the Company.
Tinggi / High	Memerlukan tindakan cepat (maksimal 3 bulan), karena potensi dampaknya melemahkan organisasi. Requires quick action (maximum 3 months) because the potential impact weakens the organization.
Sedang / Moderate	Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan (antara 3 – 6 bulan). Risiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya kegagalan proses. Requires treatment with an action plan (between 3 - 6 months). This risk is acceptable, but efforts are needed to reduce the likelihood of process failure.
Rendah / Low	Merupakan batas risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan, namun selalu memantau dan mengevaluasi risiko tersebut. Risk limit that is acceptable to the Company, but the Company always monitors and evaluates the risk.
Sangat Rendah / Very Low	Dikaji, dipantau, dan dievaluasi minimal setahun sekali. Is reviewed, monitored, and evaluated at least once a year.

Proses Penunjang

Proses penunjang manajemen risiko meliputi kegiatan pemantauan dan pengkajian ulang (review), komunikasi, konsultasi, dan pendokumentasian.

1. Pemantauan & Kaji Ulang (Monitoring & Review) Pemantauan terhadap risiko yang berprioritas tinggi harus dievaluasi lebih sering.
2. Pemantauan atas efektivitas implementasi pengelolaan risiko pada unit-unit fungsional organisasi (risk owner) harus dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh pimpinan unit yang bertanggungjawab.

Supporting Processes

Processes that help Monitoring and review activities, communication, consultation, and documentation are examples of risk management support processes.

1. Monitoring and Review (Monitoring and Review) High-priority risks should be monitored more frequently.
2. The responsible unit leader must independently (self-assess) monitor the effectiveness of risk management implementation in the functional units of the organization (risk owner).

3. Pengkajian ulang risiko meliputi pengkajian perubahan status tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dikaitkan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal, serta perubahan rencana tindakan.
4. Pelaporan monitoring dan pengkajian ulang disampaikan kepada Direksi, paling tidak setiap tahun, mencakup efektivitas rencana tindakan, analisa manfaat dan biaya mitigasi, perubahan prioritas risiko, dan posisi nilai total risiko saat ini dibandingkan periode yang lalu.

5. Evaluasi penerapan manajemen risiko Perusahaan dapat dilakukan secara mandiri (self assessment) atau oleh pihak eksternal.
6. Evaluasi penerapan manajemen risiko secara mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan check list, questionnaire, atau flowcharting.

Komunikasi dan Pelaporan

Penerapan manajemen risiko harus disampaikan kepada karyawan operasional meliputi sosialisasi untuk membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko, meliputi pemahaman secara bertahap, membangkitkan partisipasi pengamatan indikasi risiko serta partisipasi dalam usulan rencana tindakan (action plan).

- Komunikasi internal manajemen risiko antar risk owner meliputi kemungkinan terjadinya risiko yang sama, kejadian pengulangan atau risiko baru termasuk rencana tindakannya, pembandingan nilai dampak dari risiko yang sejenis serta pelaporan kepada Atasan atau Direksi untuk memperoleh pertimbangan rencana tindakan dan keputusan perlakuan risiko.
- Komunikasi internal manajemen risiko kepada Divisi PKRSM dan SPI, meliputi proses inti manajemen risiko, sebagai alat pemantauan dan saran pengembangan manajemen risiko serta bahan pelaksanaan audit berbasis risiko.
- Komunikasi eksternal manajemen risiko kepada Dewan Pengawas meliputi risiko-risiko strategis dalam daftar prioritas

3. Changes in the status of the impact level and the level of possibility of the occurrence of risks associated with changes in internal and external conditions, as well as changes in action plans, are assessed as part of the risk assessment.
4. Monitoring and review reports covering the effectiveness of the action plan, analysis of the benefits and costs of mitigation, changes in risk priorities, and the position of the current total risk value compared to the previous period are submitted to the Board of Directors at least annually.
5. The Company's risk management implementation can be evaluated independently (self-assessment) or by third parties.
6. Independent evaluation of risk management implementation can be done using a check list, questionnaire, or flowcharting.

Reporting and communication

Risk management must be communicated to operational employees, including socialization, in order to generate and maintain a risk-aware culture, which includes gradual understanding, increasing participation in observing risk indicators, and participation in proposed action plans.

- Internal risk management communication among risk owners includes the possibility of the same risk, recurrence or new risks, as well as the action plan, a comparison of the impact value of similar risks, and reporting to superiors or the Board of Directors to obtain consideration of action plans and risk treatment decisions.
- Internal risk management communication to the PKRSM and SPI Division, covering the core risk management process,
- External risk management communication to the Supervisory Board includes strategic risks in the Company's risk priority list, action plans,

risiko Perusahaan , rencana tindakan serta keputusan perlakuan risiko oleh Direksi.

- Komunikasi eksternal kepada pemilik modal mencakup perlakuan khusus mengenai risiko strategis, serta rencana tindakan dan perlakuan risiko oleh Direksi, maupun pelaporan manajemen risiko sebagai bagian materi RKAP dan laporan tahunan Perusahaan .
- Dalam hal keterbukaan informasi penerapan manajemen risiko, Direksi harus memperhatikan komunikasi kepada publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.

3. Konsultasi
   - Konsultasi dilakukan untuk membantu unit-unit pemilik risiko, terutama dalam mengidentifikasi dan asesmen risiko.
   - Konsultasi internal dilakukan oleh Divisi PKRSM dan/atau SPI.
   - Untuk pertama kali Perusahaan mendesain sistem manajemen risiko, pelaksanaan self assessment serta pengembangan konsep manajemen risiko lebih lanjut (misalnya audit internal berbasis risiko), konsultasi dapat dilaksanakan oleh konsultan eksternal atau pakar bidang khusus yang terkait.
4. Pendokumentasian
   - Pendokumentasi manajemen risiko dilakukan melalui aplikasi simrisk.jasatirta2.co.id.
   - Pendokumentasian manajemen risiko dilaksanakan oleh risk owner dan Divisi PKRSM.
   - Risk Owner mendokumentasikan identifikasi risiko di unitnya masing-masing, meliputi uraian indikasi risiko, sumber, penyebab dan akibat risiko serta kertas kerja penetapan kriteria skala rating tingkat kemungkinan, tingkat dampak risiko secara ordinal, dan uraian perhitungan secara nominal.
   - Divisi PKRSM mendokumentasikan rekapitulasi risiko, kertas kerja penggabungan dan eliminasi risiko, register risiko, prioritas risiko, keputusan Direksi

and risk treatment decisions by the Board of Directors.

- External risk management communication to capital owners includes special treatment of strategic risks, as well as action plans and risk treatment decisions by the Board of Directors.
- In terms of information disclosure on risk management implementation, the Board of Directors must prioritize public communication in accordance with Law Number 14 of 2009 on Information Disclosure to the Public.

3. Consultation
   - Consultation is carried out to assist risk owner units, particularly in risk identification and assessment.
   - The PKRSM and/or SPI Division conduct internal consultations.
   - When the company is designing a risk management system for the first time, conducting self-assessment, and developing additional risk management concepts (e.g. risk-based internal audit), external consultants or specialists in the relevant field can provide consultations.
4. Documentation
   - Risk management documentation is carried out using the simrisk.jasatirta2 application.co.id.
   - Risk management documentation is completed by the risk owner and the PKRSM Division.
   - Risk Owners document risk identification in their respective units, including descriptions of risk indicators, risk sources, causes, and effects, as well as working papers for determining rating scale criteria for likelihood level, risk impact level on an ordinal basis, and a description of nominal calculations.
   - The PKRSM Division records risk recapitulation, risk combination and elimination working papers, risk registers, risk priorities, Board of Directors decisions

tentang perlakuan risiko, pelaporan/ surat-surat internal dan eksternal yang terkait dengan kegiatan manajemen risiko.

on risk treatment, and internal and external risk management reporting/letters.

Dalam pengelolaan risiko, terdapat 3 (tiga) komponen yang saling terkait, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses pengelolaan risiko.

Risk management consists of three (three) interconnected components: risk management principles, risk management framework, and risk management processes.

Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

This risk management framework is outlined in policies, procedures, authorities, and other provisions, as well as various risk management tools that are applicable throughout the scope of the project.

Proses Manajemen Risiko

Process of Risk Management

1. Komunikasi dan Konsultasi
   Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko sementara, konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan untuk komunikasi dan konsultasi adalah metode matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed) untuk mendeteksi tingkat keterlibatan para pihak dalam setiap tahap proses manajemen risiko.
2. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
   Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai.
   - Ruang lingkup manajemen risiko meliputi Regular Objective Direktorat/Divisi/Unit Usaha/ Anak Perusahaan dan Specific Objective/khusus
   - Konteks risiko meliputi Konteks Eksternal dan Konteks Internal
   - Kriteria risiko disesuaikan dengan konteks risiko
3. Asesmen/Penilaian Risiko
   Penilaian risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis

1. Consultation and communication
   Communication is used to raise risk awareness and understanding, while consultation is used to gather feedback from information needed for decision making. The RACI matrix method (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) is used for communication and consultation to determine the level of involvement of the parties in each stage of the risk management process.

2. Criteria, Scope, and Context The goal of defining the scope, context, and criteria is to adapt the risk management process, allowing for effective risk assessment and risk treatment.
   - The scope of risk management includes the Directorate/Division/Business Unit/ Subsidiaries' Regular Objectives as well as Specific Objectives/Special Objectives.
   - The risk context includes both the external and internal contexts.
   - The risk criteria are tailored to the risk environment.

3. Risk Evaluation/Assessment Risk assessment is a systematic approach to identifying and analyzing the uncertainties that may exist in achieving the

ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran Perusahaan . Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.

4. Perlakuan Risiko
   Perlakuan risiko melibatkan proses berulang meliputi:
   - Formulasi dan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko;
   - Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko;
   - Penilaian keefektifan perlakuan risiko;
   - Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.

5. Pemantauan dan Tinjauan
6. Pemantauan dan tinjauan dilakukan secara periodik secara teratur dalam tahun berjalan minimal per triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun mekanisme pemantauan dan tinjauan dilakukan dengan cara self-assessment, audit internal atau eksternal, Forum Group Discussion/Executive Briefing, dan/atau umpan balik dari karyawan dan stakeholder
7. Pencatatan dan Pelaporan
8. Mekanisme proses pencatatan dan pelaporan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada manrisk. jasatirta2.co.id.

Register Risiko dan Profil Risiko Strategis Perusahaan

Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Key Risk Indicators

- Risk Appetite
  Perusahaan hanya mengelola risiko strategis dan risiko tinggi, karena memerlukan tindakan segera, sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian, hancurnya Perusahaan, potensi dampaknya melemahkan organisasi. Risiko tersebut dapat dialihkan ke pihak lain.
- Risk Tolerance
  Perusahaan menetapkan risk tolerance, yaitu batasan kuantitatif untuk menentukan kelompok

Company's goals. Risk identification, risk analysis, and risk evaluation are all components of risk assessment.

4. Risk Treatment Risk treatment is an iterative process that includes:
   - Formulating and selecting risk treatment options;
   - Planning and implementing risk treatment;
   - Assessing risk treatment effectiveness; and
   - Deciding whether the remaining risk is acceptable.
5. Monitoring and Evaluation
6. Monitoring and review are conducted on a regular basis in the current fiscal year, at least quarterly, and at any time if necessary. Self-assessment, internal or external audits, Forum Group Discussion/Executive Briefing, and/or feedback from employees and stakeholders are used to carry out the monitoring and review mechanism.

7. Documentation and reporting
8. The mechanism of recording and reporting processes for risk identification, analysis, and evaluation is carried out on a regular basis using a web-based application accessible via manrisk. services tirta 2.co.id.

Risk Register and Company's Strategic Risk Profile

Risk Appetite, Risk Tolerance, and Key Risk Indicators

- Appetite for Risk
  Because it requires immediate action, the company only manages strategic and high risks. The spread of potential risks allows loss and destruction of the company, the potential impact of which weakens the organization. The risk can be passed on to a third party.
- Tolerance for Risk
  The company determines risk tolerance, which is a quantitative limit that determines which risk

risiko yang dapat ditoleransi serta yang tidak dapat ditoleransi. Risiko sedang merupakan batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan. Namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya penyebab kegagalan proses, atau menurunkan potensi dampak kegagalan proses. Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan [antara 3 – 6 bulan]. Pengendalian / mitigasi risiko oleh Risk Owner / Kepala Unit Kerja

- Key Risk Indicators
  Key Risk Indicator adalah indicator risiko utama Perusahaan yang dipilih dan dipantau sebagai pemberitahuan dini terhadap adanya perubahan yang dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.

groups can and cannot be tolerated. The risk tolerance limit that the Company can accept is moderate risk. However, efforts must be made to reduce the likelihood of the emergence of process failure causes or the potential impact of process failure. Treatment with an action plan is required [between 3 and 6 months]. Risk management/mitigation is the responsibility of the Risk Owner/Head of Work Units.

- Important Risk Indicators Key
  Risk Indicators are the Company's primary risk indicators, which are chosen and monitored to provide early warning of any changes that may pose a risk to the Company.

Profil Risiko

Profil Risiko adalah gambaran mengenai risiko utama yang ada dalam aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menginformasikan risiko -risiko yang melekat (inherent risk) pada setiap aktivitas Perusahaan dan system control terhadap risiko -risiko tersebut (risk control system).

Profile of Risk

The Risk Profile is a description of the main risks in the company's activities that aims to inform the inherent risks in each of the Company's activities as well as the risk control system (risk control system).

Daftar Register Risiko Utama Perusahaan Tahun 2021
List of Company's Main Risk Registers for 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	(K)	(D)	NILAI RISIKO Risk Value (KxD)	KUANTIFIKASI Rp / IDR quantification	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	TARGET / Target
1.	Pendapatan usaha listrik tahun 2022 sebesar Rp472.650,80 juta / Electricity business revenue in 2022 is Rp.472,650.80 million	Pola Produksi PLTA dipengaruhi ketersediaan air di Waduk Ir. H. Djuanda / The hydropower production pattern is influenced by the availability of water in the Ir. H. Juanda	3	5	15	212.692.500.000	1. Rapat Tim Koordinasi Pengelolaan Bendungan cascade Citarum (TKPBKC) Antara Perum jasa Tirta II, balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kementrian PUPR, PT.Indonesia Power dan PT.Pembangkit jawa bali untuk memastikan suplay air Bendungan Saguling, Bendungan Cirata dan Juanda. / The Citarum Cascade Dam Management Coordination Team Meeting (TKPBKC) between Perum Jasa Tirta II, the Citarum River Basin Center, the Ministry of PUPR, PT Indonesia Power and PT Pembangkit Jawa Bali to ensure water supply for the Saguling Dam, Cirata Dam and Juanda Dam. 2. Teknik Modifikasi Cuaca / Weather Modification Techniques	Januari - Desember 2021 (Rapat dilakukan setiap awal bulan) / January - December 2021 (Meetings are held at the beginning of every month)
2.	Pelaksanaan pengelolaan SDA / Management implementation natural resources	Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda tidak sesuai dengan rencana (Air Masuk Waduk Ir. H. Djuanda tidak sesuai rencana) / Realization of TMA Reservoir Ir. H. Djuanda not according to plan (Water Intake of Ir. H. Djuanda Reservoir not according to plan)	3	5	15	4.726.500.000	Rencana penanganan: / Treatment plan: 1. Teknologi Modifikasi Cuaca / TMC untuk memastikan ketersediaan air di DAS Citarum / Weather Modification Technology / TMC to make sure availability of water in the Citarum watershed	Desember 2021 / December 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	(K)	(D)	NILAI RISIKO Risk Value (KxD)	KUANTIFIKASI Rp / IDR quantification	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	TARGET / Target
							2. Konservasi di Hulu DAS Citarum untuk memelihara daerah tangkapan air hujan / Conservation in the Upper Citarum Watershed to maintain rainwater catchment areas	
3.	Pelaksanaan pengelolaan SDA / Management implementation natural resources	Gangguan pelayanan pengelolaan SDA / Disruption of natural resource management services	3	4	12	32.402.158.959	Menyusun skala prioritas pemeliharaan SDA berdasarkan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) / Develop a priority scale for natural resource maintenance based on the actual need for operation and maintenance (AKNOP)	Desember 2021 / December 2021
4.	Pendapatan usaha listrik tahun 2021 sebesar Rp472.650,80 Juta / Electricity business revenue in 2021 is IDR 472,650.80 million	Gangguan produksi dan suplai energi listrik ke jaringan interkoneksi Jawa, Madura, Bali (Jamali) PT.PLN (Persero) dan jaringan Non-PLN / Disruption of production and supply of electrical energy to the interconnection network of Java, Madura, Bali (Jamali) PT. PLN (Persero) and non-PLN networks	1	5	5	47.582.448.000	1. Pemeliharaan rutin 6 unit pembangkit / Routine maintenance of 6 generating units 2. Pemeliharaan jaringan distribusi / Distribution network maintenance 3. Penggantian sparepart 6 unit pembangkit / Replacement spare parts 6 units generator 4. Penggantian sparepart / Replacement of spare parts 5. Pemeriksaan / Overhaul	Januari - Desember 2021 (Pemeliharaan rutin dan berkala) / January - December 2021 (Regular and periodic maintenance)

Daftar Register Risiko Utama Perusahaan Tahun 2021
List of Company's Main Risk Registers for 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	(K)	(D)	NILAI RISIKO Risk Value (KxD)	KUANTIFIKASI Rp / IDR quantification	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	TARGET / Target
5.	Pendapatan usaha air baku tahun 2021 sebesar Rp309.475,58 Juta / Raw water business revenue in 2021 is IDR 309,475.58 million	Pelanggan tidak memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA) / The customer does not have a Water Resources Utilization Permit (SISDA)	1	5	5	32.084.791.000	Membentuk Tim dengan Kementerian PUPR untuk pengurusan Surat Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA), dengan tugas sebagai berikut: / Membentuk Tim dengan Kementerian PUPR untuk pengurusan Surat Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA), dengan tugas sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi penggunaan sumber daya air di wilayah sungai citarum / Using the use of water resources in the Citarum river area 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air yang telah memiliki ijin dari menteri PU dan Perumahan Rakyat / Monitoring and supervising the use of water resources that have a permit from the Minister of Public Works and Public Housing 3. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan aparat hukum dan pihak-pihak terkait / Coordinate and cooperate with law enforcement and related parties	Desember 2021 / December 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	(K)	(D)	NILAI RISIKO Risk Value (KxD)	KUANTIFIKASI Rp / IDR quantification	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	TARGET / Target
							4. Melaksanakan tindakan yang diperlukan terhadap penggunaaan sumber daya air yang tidak sesuai ketentuan dalam ijin atau penggunaan sumber daya air tanpa ijin / Carry out the necessary actions against the use of water resources that are not in accordance with the provisions in the permit or the use of water resources without a permit 5. Memberikan rekomendasi pada Kepala Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan / Provide recommendations to the Head of the Citarum River Basin as a follow-up to the results of monitoring and supervision	
6.	Piutang usaha tahun 2022 sebesar Rp.204.750,3 4Juta / Accounts receivable year 2022 amounting to Rp.204.750.3 4 Million	Piutang macet / Bad debt	1	5	5	20.475.034.000	1. Melakukan penagihan BJPSDA Sang Hyang Seri secara intensif / Intensively collect Sang Hyang Seri BJPSDA 2. Reschedule terkait pembayaran piutang PT. Sang Hyang Seri / Reschedule related to payment receivables PT. Sang Hyang Seri	Desember 2021 / December 2021

Daftar Register Risiko Utama Perusahaan Tahun 2021
List of Company's Main Risk Registers for 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	(K)	(D)	NILAI RISIKO Risk Value (KxD)	KUANTIFIKASI Rp / IDR quantification	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	TARGET / Target
7.	Perusahaan yang berfokus pada value creation (investasi pengembang an usaha) / Companies that focuses on value creation (investment in business development)	Keterlambatan proyek investasi Sistim Penyediaan Air Minum, EBT, Aset Potensial / Delay in investment projects for Drinking Water Supply System, EBT, Potential Assets	2	4	8	8.000.000.000	1. Penyusunan prosedur perencanaan teknik investasi pengembangan usaha. / Preparation of procedures for planning business development investment techniques. 2. Feasibility Study Investasi / Investment Feasibility Study	Desember 2021 / December 2021
8.	Hukum dan Kepatuhan / Law and Compliance	Peyerobotan lahan milik & lahan kelola / Seizing owned & managed land	2	4	8	5.689.841.000	1. Sertifikasi hak Guna Bangunan pada lahan milik Perusahaan. / Certificate of Building Use Rights on land owned by the Company. 2. Terpenuhinya dasar kepemilikan (Sertifikat). Fulfillment of the basis of ownership (Certificate).	Desember 2021 / December 2021
9.	Penguatan Manajemen Risiko / Management Strengthening Risk	Kurang adanya Budaya Sadar Risiko / Lack of Risk Awareness Culture	3	4	12	1.772.298.460	1. Membuat Evaluasi Implementasi Road Map Manajemen Risiko. / Evaluating the Implementation of the Risk Management Road Map. 2. Memperkuat infrastruktur Manajemen Risiko (pedoman, prosedur, instruksi kerja). / Strengthening the Risk Management infrastructure (guidelines, procedures, work instructions). 3. Meng-upgrade Sistim Informasi Manajemen Risiko (SIMRisk.jasatirta2.co.id) / Upgrading the Risk Management Information System (SIMRisk.jasatirta2.co.id)	1. Juli 2021 2. April 2021 3. Juli 2021 4. Setiap triwulan 5. Agustus 2021 6. Sekali setahun 7. Desember 2021 8. Setiap triwulan 1. July 2021 2. April 2021 3. July 2021 4. Every quarterly 5. August 2021 6. Once a year 7. December 2021 8. Every quarter

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	(K)	(D)	NILAI RISIKO Risk Value (KxD)	KUANTIFIKASI Rp / IDR quantification	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	TARGET / Target
							4. Melakukan sosialisasi dan forum diskusi tentang manajemen risiko. / Melakukan sosialisasi dan forum diskusi tentang manajemen risiko. 5. Melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli manajemen risiko (Certified Risk Management Officer/CRMO, Certified Risk Management Proffesional/CRMP, Certified Risk Governance Proffesional/CRGP, Enterprise Risk Management Certified Proffesional/ERMCP dan Certified Enterprise Risk Governance/CERG). / Melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli manajemen risiko (Certified Risk Management Officer/CRMO, Certified Risk Management Proffesional/CRMP, Certified Risk Governance Proffesional/CRGP, Enterprise Risk Management Certified Proffesional/ERMCP dan Certified Enterprise Risk Governance/CERG). 6. Risk Based Audit / Risk Based Audit 7. Asesmen Tingkat Kematangan Manajemen Risiko / Maturity Level Assessment Risk management 8. Monitoring Pengendalian Mitigasi Risiko / Risk Mitigation Control Monitoring	

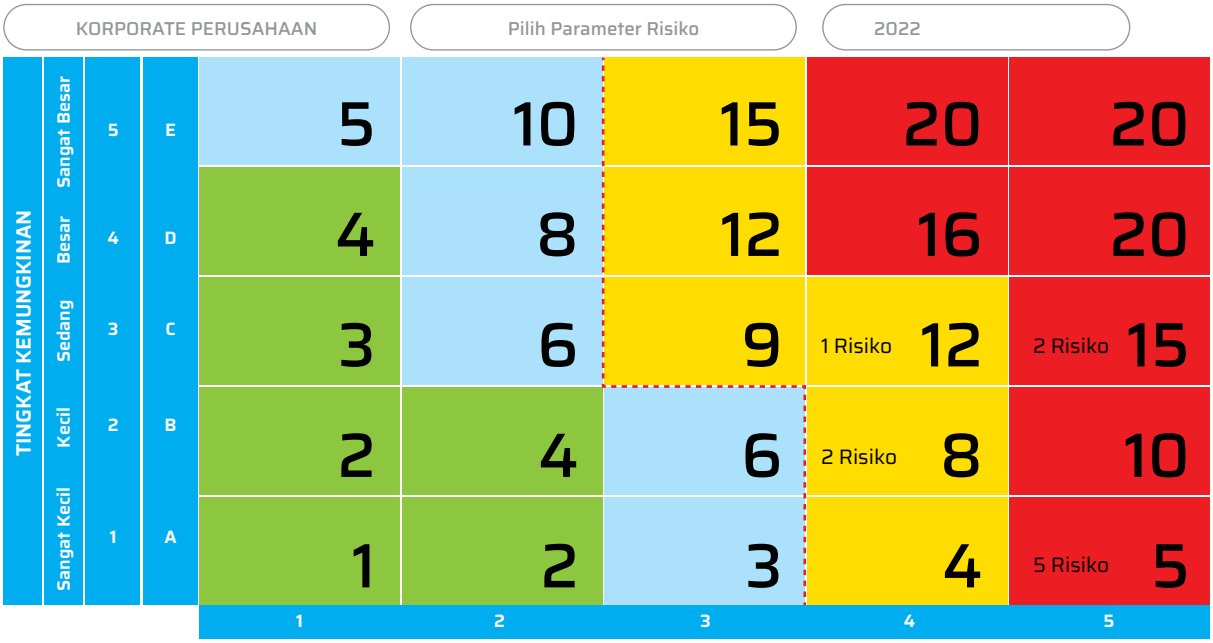
Peta Risiko

Peta risiko (risk map) adalah teknik untuk memperagakan dan menyusun tingkat risiko dengan menggambarkannya pada sumbu dampak dan kemungkinan.
Peta Risiko Utama Perusahaan tahun 2021 tertuang seperti gambar di bawah.

Risk Mapping

A risk map is a method of displaying and compiling risk levels by depicting them on the impact and likelihood axes.

The image below depicts the Company's Main Risk Map for 2021.



Analisis Risiko

Tujuan dari analisis risiko adalah memahami sifat, perilaku risiko dan peringkat risiko. Analisis risiko adalah proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan peringkat risiko, analisis risiko merupakan dasar untuk evaluasi risiko dan landasan keputusan perlakuan risiko. Analis risiko untuk menentukan nilai Kemungkinan (K) / Probabilitas dan nilai Dampak (D).

Risk Assessment

The goal of risk analysis is to comprehend the nature, behavior, and rating of risk. Risk analysis is a process for understanding the nature of risk and ranking risk; it serves as the foundation for risk evaluation and risk treatment decisions. The risk analyst will calculate the Likelihood (K) / Probability value and the Impact (D) value.

Hasil Penanganan Risiko Utama

2021

Memperkuat Infrastruktur manajemen risiko, yaitu:
- Merevisi Pedoman Manajemen Risiko / Revising the Guidelines Risk management
- Merevisi Prosedur Pengelolaan Risiko & Peluang Perusahaan / Revising Procedure Risk Management & Company Opportunity
- Mengintegrasikan ISO 9001; 2015, ISO 37001; 2016, Sistem Manajemen K3, ISO 17025 dalam proses asesmen risiko / Integrating ISO 9001; 2015, ISO 37001; 2016, OHS Management System, ISO 17025 in risk assessment process
- Upgrade Sistem Informasi Manajemen Risiko / Risk Management Information System Upgrade
- Sertifikasi Kompetensi manajemen Risiko, 10 karyawan CRMO dan 3 karyawan CRMP (BNSP), 1 karyawan ERMCP (internasional) / Risk management Competency Certification, 10 CRMO employees and 3 CRMP employees (BNSP), 1 ERMCP employee (international)
- Mempertahankan Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tingkat baik (4) / Maintaining Risk Management Maturity Level Value at a good level (4)
- Konsolidasi dengan PT Danareksa sebagai Champion Cluster / Consolidation with PT Danareksa as Champion Cluster

2022

- Upgrade Sistem Informasi Manajemen Risiko, integrasi SIMRisk dengan aplikasi DSMT dan aplikasi KPI. / Risk Management Information System upgrade, SIMRisk integration with DSMT application and KPI application.
- Sertifikasi Kompetensi manajemen Risiko, 10 karyawan CRMO, 5 karyawan CRMP, 2 karyawan CRGP, 3 karyawan ERMCP. / Risk management Competency Certification, 10 CRMO employees, 5 CRMP employees, 2 CRGP employees, 3 ERMCP employees.
- Resertifikasi ERMA 1 karyawan / ERMA recertification 1 employee
- Mempertahankan Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tingkat baik (4) / Maintaining Risk Management Maturity Level Value at a good level (4)
- Proses Business Perusahaan teritegrasi dengan Manajemen Risiko, RKAP & RKT berbasis risiko / The Company's Business Processes are integrated with Risk Management, RKAP & risk-based RKT
- Memperkuat wewenang dan tanggung jawab struktur manajemen risiko / Strengthen the authority and responsibility of the risk management structure

2023

- Upgrade Sistem Informasi Manajemen Risiko, integrasi SIMRisk dengan aplikasi Simona. / Risk Management Information System upgrade, SIMRisk integration with Simona application.
- Sertifikasi Kompetensi manajemen Risiko 10 karyawan CRMO, 5 karyawan CRMP, 2 karyawan CRGP, 2 karyawan ERMCP, 1 karyawan CERG (20 karyawan). / Risk management Competency Certification 10 CRMO employees, 5 CRMP employees, 2 CRGP employees, 2 ERMCP employees, 1 CERG employee (20 employees).
- Reserifikasi ERMCP 1 karyawan / 1 employee ERMCP reservation
- Meningkatkan Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tingkat Sangat Baik (5) / Increasing Risk Management Maturity Level Value at Very Good (5)
- Manajemen risiko sebagai budaya Perusahaan / Risk management as a corporate culture

2024

- Upgrade Sistem Informasi Manajemen Risiko, integrasi dengan aplikasi RKAP dan RKT / Risk Management Information System upgrade, integration with RKAP and RKT applications
- Sertifikasi Kompetensi manajemen Risiko 15 karyawan CRMO, 5 karyawan CRMP, 4 karyawan CRGP, 3 karyawan ERMCP, 3 karyawan CERG (30 Karyawan) / Risk management Competency Certification 15 CRMO employees, 5 CRMP employees, 4 CRGP employees, 3 ERMCP employees, 3 CERG employees (30 Employees)
- Resertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko, 10 karyawan CRMO, 3 Karyawan CRMP, 3 karyawan ERMCP, / Risk Management Competency Recertification, 10 CRMO employees, 3 CRMP employees, 3 ERMCP employees,
- Meningkatkan Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tingkat Sangat Baik (5) / Increasing Risk Management Maturity Level Value at Very Good (5)
- Manajemen Risiko sebagai budaya Perusahaan / Risk Management as Corporate Culture
- Memperkuat wewenang dan tanggung jawab struktur manajemen risiko / Strengthen the authority and responsibility of the risk management structure

Berdasarkan Rencana Strategis di atas, aktivitas kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2021, antara lain :

a. Memperkuat infrastruktur manajemen risiko, yaitu:
   - Merevisi dan menyelaraskan Pedoman Manajemen Risiko dengan kebijakan Pemilik Modal dan peraturan yang berlaku;
   - Merevisi Prosedur Pengelolaan Risiko dan Peluang Perusahaan;
   - Mengintegrasikan Sistim Manajemen Risiko ISO 31000:2018, Sistim Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistim Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, Sistim Manajemen K3 dan ISO 17025 dalam proses asesmen risiko.
   - Upgrading Sistim Informasi Manajemen Risiko (SIMRisk.jasatirta2.co.id), mempertimbangkan risk appetite, tolerance, probability, impact didefinisikan dan diukur secara jelas dan konsisten. Aanalisis biaya dan manfaat dengan tujuan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai Perusahaan, (integrasi SMAP, SMK3, SMM, ISO 17025)

b. Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko sebanyak 14 karyawan, yaitu; 3 karyawan Certified Risk Management Professional (CRMP/ BNSP), 10 karyawan Certified Risk Management Officer (CRMO/BNSP) dan 1 karyawan Enterprise Risk Management Certified Profesional/ Enterprise Risk Management Associated Profesional (ERMCP/ERMAP/Internasional).
c. Executive Briefing, Focus Group Discussion, Sosialisasi dan Workshop Manajemen Risiko.
d. Mempertahankan Nilai Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada Level Baik (Level 4 Terkelola secara Kuantitatif, skor 62,50 – 87,49).
e. Konsolidasi dengan PT Danareksa (Persero) selaku Champion Klaster BUMN.

Berdasarkan Rencana Strategis pada Tabel III. di atas, Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

According to the Strategic Plan, the following activities will be carried out in 2021:

a. Strengthening risk management infrastructure, specifically:
   - Revising and aligning Risk Management Guidelines with Capital Owner policies and regulations;
   - Revision of the Company's Risk and Opportunity Management Procedures;
   - Incorporation of the ISO 31000:2018 Risk Management System, ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, OHS Management System, and ISO 17025 into the risk assessment process.
   - Improving the Risk Management Information System (SIMRisk.jasatirta2.co.id), so that risk appetite, tolerance, probability, and impact are clearly and consistently defined and measured. Analysis of costs and benefits with the goal of capitalizing on opportunities to increase the Company's value (integration of SMAP, SMK3, QMS, ISO 17025)

b. Risk Management Competency Certification for 14 employees, including 3 Certified Risk Management Professionals (CRMP/BNSP), 10 Certified Risk Management Officers (CRMO/ BNSP), and 1 Enterprise Risk Management Certified Professional/Enterprise Risk Management Associated Professional (ERMCP/ ERMAP/International).
c. Executive Briefing, Focus Group Discussion, Socialization, and Risk Management Workshop
d. Maintaining a good level of risk management maturity (Level 4 Quantitatively Managed, score 62.50 – 87.49).
e. Consolidation with PT Danareksa (Persero) as the BUMN Cluster Champion. The Company has implemented Risk Management in accordance with the 2021 Work Plan, based on the Strategic Plan in Table III. above, with the following details:

1. Update Register Risiko Unit Kerja dan Risiko Utama Perusahaan Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan seluruh unit kerja secara online dan offline, dengan pembahasan identifikasi, analisis, evaluasi risiko dan rencana pengendalian/ mitigasi risiko unit kerja dan Perusaaan melalui RKAP;
2. Revisi Prosedur 56 tentang Pengelolaan Risiko dan Peluang Perusahaan dan Pedoman Manajemen Risiko sesuai dengan Pedoman Strategis Manajemen Risiko Holding Danareksa;
3. Forum Diskusi Manajemen Risiko / Risk Officer, dengan mengikuti Kick Off Monitoring Penerapan Manajemen Risiko anggota Holding Danareksa, diskusi dengan Tim Teknis Holding Danareksa dan mengikuti International Conference on Contemporary Risk Studies (ICONIC-RS) dengan tema Analysis of Risk Management and Corporate Governance to Corporate Performance di Universitas Pertamina;
4. Melakukan Sosialisasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja di Perum Jasa Tirta II secara online melalui media zoom meeting.
5. Melakukan Asesmen Tingkat Kematangan dan Efektivitas Manajemen Risiko tahun 2021.
6. Melaksanakan Executive Briefing Governance and Risk Management untuk meningkatkan kompetensi di bidang Manajemen Risiko yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja.
7. Penyusunan Road Map Manajemen Risiko 2021 - 2024
8. Melakukan monitoring pengendalian/ mitigasi risiko unit kerja menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRisk http://simrisk.pjt2.co.id/) dan rapat Monitoring Pengendalian Mitigasi Risiko dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang dilakukan sekali setiap bulan.

1. Update the Work Units' Risk Register and the Company's Main Risks for 2021. This activity is carried out in stages with all work units both online and offline, beginning with a discussion of risk identification, analysis, evaluation, and risk control/mitigation plans for work units and companies via RKAP.
2. Revision of Procedure 56 concerning the Management of Company Risks and Opportunities, as well as Risk Management Guidelines, in accordance with Danareksa Holdings' Strategic Risk Management Guidelines;
3. Risk Management Discussion Forum / Risk Officer, by participating in the Kick Off Monitoring of Risk Management Implementation for Danareksa Holding members, discussions with the Danareksa Holding Technical Team, and participation in the International Conference on Contemporary Risk Studies (ICONIC-RS) at Pertamina University with the theme Analysis of Risk Management and Corporate Governance to Corporate Performance;
4. Conducting Risk Management Socialization, which was attended online by all Work Units at Perum Jasa Tirta II via a media zoom meeting.
5. Assessing Risk Management Maturity and Effectiveness in 2021
6. Conducting an Executive Briefing on Governance and Risk Management to improve risk management competence, which is attended by all Work Units.
7. Development of a Risk Management Road Map for the Years 2021-2024
8. Monitoring work unit risk control/mitigation with the Risk Management Information System application (SIMRisk http://simrisk.pjt2.co.id/) and Risk Mitigation Control Monitoring meetings with the Monitoring Committee Risk Management (KPMR) once a month.

Hasil Penanganan Risiko Utama Perusahaan Tahun 2021
Results of the Company's Main Risk Management in 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	REALISASI PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Realization
1.	Pendapatan usaha listrik tahun 2022 sebesar Rp472.650,80 juta / Electricity Business Income in 2022 amounting to Rp472,650.80 million	Pola Produksi PLTA dipengaruhi ketersediaan air di Waduk Ir. H. Djuanda / Patterns of hydropower production are influenced by the availability of water in the reservoir Ir. H. Djuanda	1. Rapat Tim Koordinasi Pengelolaan Bendungan cascade Citarum (TKPBKC) Antara Perum jasa Tirta II, balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kementrian PUPR, PT.Indonesia Power dan PT.Pembangkit jawa bali untuk memastikan suplay air Bendungan Saguling, Bendungan Cirata dan Juanda. / The Citarum Cascade Dam Management Coordination Team Meeting (TKPBKC) between Perum Jasa Tirta II, the Citarum River Basin Center, the Ministry of PUPR, PT Indonesia Power and PT Pembangkit Jawa Bali to ensure water supply for the Saguling Dam, Cirata Dam and Juanda Dam. 2. Teknik Modifikasi Cuaca / Weather Modification Techniques	1. Rapat TKPBKC rutin dilaksanakan setiap bulan / The TKPBKC Meeting is routinely held every month 2. TMC sudah dilaksanakan dari tanggal 12 Maret sd 20 April 2021 (34 hari) Diperoleh: TMA (12 Maret 2021): 96,67 mdpl TMA (20 April 2021): 97,86 mdpl / TMC has been held from March 12 to 20 April 2021 (34 days) Obtained: TMA (12 March 2021): 96.67 MDPL TMA (20 April 2021): 97.86 MDPL 3. Pendapatan Usaha Listrik tahun 2021 sebesar Rp454.556.359.414 / Electricity Income in 2021 amounting to Rp454,556,359,414
2.	Pelaksanaan pengelolaan SDA / Implementation of management SDA	Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda tidak sesuai dengan rencana (Air Masuk Waduk Ir. H. Djuanda tidak sesuai rencana) / Realization of TMA Reservoir Ir. H. Djuanda does not match the plan (water entering the reservoir Ir. H. Djuanda is not according to plan)	Rencana penanganan: / Treatment plan: 1. Teknologi Modifikasi Cuaca / TMC untuk memastikan ketersediaan air di DAS Citarum / Weather Modification Technology / TMC to ensure the availability of water in the Citarum watershed 2. Konservasi di Hulu DAS Citarum untuk memelihara daerah tangkapan air hujan / Conservation in the Upper Citarum watershed to maintain rainwater catchment areas	1. TMA Waduk Ir. Djuanda Tgl 01 Januari 2022 pukul 07.00 WIB 94,20 m / TMA Reservoir Ir. Djuanda dated January 1, 2022 at 07.00 WIB 94.20 m 2. Air Masuk Waduk Ir. H. Djuanda Rencana: 441,66 juta m3 (rata- rata) Realisasi: 479,70 juta m3 (rata- rata) (108,61%) dari rencana / Water Entering Reservoir Ir. H. Djuanda Plan: 441.66 million m3 (average) Realization: 479.70 million m3 (average) (108.61%) from the plan
3.	Pelaksanaan pengelolaan SDA / Implementation of management SDA	Gangguan pelayanan pengelolaan SDA / Disruption of natural resource management services	Menyusun skala prioritas pemeliharaan SDA berdasarkan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) / Develop a priority scale for natural resource maintenance based on the actual need for operation and maintenance (AKNOP)	1. Realisasi Pemberian Air MT.I 2020/2021 dan MT.II 2021 sampai dengan RKT IV (Okt 2020-Sept 2021) sebesar 7.693 juta m3 atau mencapai 110,70% dari target RKAP sebesar 6.949,12 juta m3. / Realization of Water Giving MT.I 2020/2021 and MT.II 2021 to RKT IV (Oct 2020-Sep 2021) of 7,693 million m3 or reached 110.70% of the RKAP target of 6,949.12 million m3. 2. Realisasi MT.I tahun 2020/2021 dan MT.II tahun 2021 Darerah Irigasi Jatiluhur: Rencana: 516.377 Ha Realisasi: 569.679 Ha (110,32% dari Rencana) / Realization of MT.I Year 2020/2021 and MT.II Year 2021 Darerah Jatiluhur Irrigation: Plan: 516,377 Ha Realization: 569,679 Ha (110.32% of the plan)
4.	Pendapatan usaha listrik tahun 2022 sebesar Rp472.650,80 Juta /Electricity Income in 2022 amounting to Rp472,650.80 million	Gangguan produksi dan suplai energi listrik ke jaringan interkoneksi Jawa, Madura, Bali (Jamali) PT.PLN (Persero) dan jaringan Non-PLN / Impaired production and supply of electrical energy to the interconnection network of Java, Madura, Bali (Jamali) PT.PLN (Persero) and Non-PLN networks	1. Pemeliharaan rutin 6 unit pembangkit / Routine maintenance of 6 generating units 2. Pemeliharaan jaringan distribusi / Distribution network maintenance 3. Penggantian sparepart 6 unit pembangkit / Replacement of spare parts for 6 generating units 4. Penggantian sparepart / Replacement of spare parts 5. Pemeriksaan / Overhaul	1. Gangguan pada unit PLTA selama tahun 2021 sebanyak 87 kali. / Disorders of the PLTA unit during 2021 87 times. 2. Proses pengadaan barang/jasa untuk pengendalian risiko gangguan produksi PLTA sudah dilaksanakan pada tahun 2021 (rutin dan investasi). / The process of procuring goods/services for controlling the risk of hydropower production disruption has been carried out in 2021 (routine and investment).

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	REALISASI PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Realization
				3. Pendapatan Usaha Listrik tahun 2021 sebesar Rp454.556.359.414,- / Electricity Income Year 2021 amounting to Rp454,556,359,414,-
5.	Pendapatan usaha air baku tahun 2022 sebesar Rp309.475,58 Juta / Raw water operating revenue in 2022 amounted to Rp309,475.58 million	Pelanggan tidak memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA) / Customers do not have a Water Resources Utilization Permit (SISDA)	Membentuk Tim dengan Kementerian PUPR untuk pengurusan Surat Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA), dengan tugas sebagai berikut: / Form a team with the Ministry of PUPR for the management of Water Resources Utilization Permit (SIPSDA), with the following tasks: 1. Melakukan identifikasi penggunaan sumber daya air di wilayah sungai citarum / Identify the use of water resources in the Citarum River area 2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya air yang telah memiliki ijin dari menteri PU dan Perumahan Rakyat / Monitor and supervise the use of water resources that already have permission from the Minister of Public Works and Public Housing 3. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait / Coordinate and cooperate with law enforcement officials and related parties 4. Melaksanakan tindakan yang diperlukan terhadap penggunaaan sumber daya air yang tidak sesuai ketentuan dalam ijin atau penggunaan sumber daya air tanpa ijin / Carry out the actions needed for the use of water resources that are not in accordance with the provisions in the permit or use of water resources without permission 5. Memberikan rekomendasi pada Kepala Besar Wilayah I / Provide recommendations to the head of the large area	1. Sampai dengan 31 Desember 2021 dari total 431 pemanfaat SDA, sebanyak 211 yang sudah memiliki ijin dan 220 pemanfaat yang belum memiliki ijin (habis masa berkaku SIPSDA 69 dan yang belum memiliki ijin 151) / Until December 31, 2021 from A total of 431 SDA uses, as many as 211 who already have a permit and 220 beneficiaries who do not yet have a permit (expired SIPSDA 69 and who do not have a license 151) 2. Kordinasi dengan BBWSC terkait dengan progres penerbitan Rekomtek SIPSDA / Coordination with BBWS related to the progress of the issuance of SIPPA Rekomtek 3. Inventarisasi SIPSDA / SIPSDA inventory 4. Monitoring pelanggan yang sudah mendapatkan SIPSDA bersama BBWSC / Monitoring of customers who have get SIPSDA with BBWSC 5. Tindaklanjut hasil pemantauan dan pengawasan disampaikan kepada BBWSC / The follow -up to the results of monitoring and supervision submitted to BBWS
6.	Piutang usaha tahun 2022 sebesar Rp204.750,34 Juta / Accounts receivable in 2022 amounting to Rp204,750.34 Million	Piutang macet / Bad debts	1. Melakukan penagihan BJPSDA SangHyang Seri secara intensif / Perform intensive SangHyang Seri BJPSDA billing 2. Reschedule terkait pembayaran piutang PT. Sang Hyang Seri / Reschedule related to the payment of receivables PT. Sang Hyang Seri	1. Surat pemberitahuan jatuh tempopembayaran hutang PT SHS paling lambat 31 Maret 2022 sesuai dengan reschedule (Rp1,75 Milyar) / Notification of maturity of payment of PT SHS's debt no later than March 31, 2022 according to the rescheduling (Rp 1.75 billion) 2. Reschedule PT SHS sudah dilakukan sebanyak 4 kali (karena PT SHS belum bisa merealisasikan kewajiban), terakhir 28 Desember 2021 / PT SHS's rescheduling has been carried out 4 times (because PT SHS has not been able to fulfill its obligations), the last is 28 December 2021

No.	SASARAN KERJA / Work Target	NAMA RISIKO / Risk Name	RENCANA PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Plan	REALISASI PENGENDALIAN RISIKO / Risk Control Realization
7.	Perusahaan yang berfokus pada value creation (investasi pengembangan usaha) / Companies that focus on value creation (business development investment)	Keterlambatan proyek investasi Sistim Penyediaan Air Minum, EBT, Aset Potensial / Delay in investment projects for Drinking Water Supply System, EBT, Potential Assets	1. Melakukan penagihan BJPSDA SangHyang Seri secara intensif / Perform intensive SangHyang Seri BJPSDA billing 2. Reschedule terkait pembayaran piutang PT. Sang Hyang Seri / Reschedule related to the payment of receivables PT. Sang Hyang Seri	Revisi pedoman investasi dan prosedur perencanaan teknik investasi / Revised investment guidelines and investment engineering planning procedures
8.	Hukum dan Kepatuhan / Law and Compliance	Peyerobotan lahanmilik & lahan kelola / Seizing owned & managed land	1. Bekerjasama dengan BPN Pusat,Kejaksaan Agung dan KPK. / In collaboration with the Central BPN, the Attorney General's Office and the KPK. 2. Pengamanan Lahan dengan pematokan batas lahan / Land Security by setting land boundaries	1. Sertifikasi lahan Kalimati Bekasitelah terbit dari BPN Kota Bekasi tanggal 23 Desember 2021 / The land certification of Kalimati Bekasi has been issued from the Bekasi City BPN on December 23, 2021 2. Sertifikasi lahan Kantor Sejsi STB telah terbit dari BPN Kota Bekasi tanggal 27 Desember 2021 / Land certification for the STB Sejsi Office has been issued from the Bekasi City BPN on December 27, 2021
9.

Pemberian Dana Sosial dan Kegiatan Politik

Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan memiliki keyakinan kuat bahwa sinergi antara kegiatan CSR dan kinerja bisnis berperan penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam pelaksanaan CSR Perusahaan berpedoman kepada Keputusan Direksi tentang Pengelolaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dalam RPB untuk penggunannya.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2021 Perum Jasa Tirta II tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Political Activities and the Provision of Social Funds

The Company is dedicated to meeting its social responsibilities to the community and the environment. The Company is convinced that the synergy between CSR activities and business performance is critical to achieving long-term growth. The Company follows the Decision of the Board of Directors regarding the Management of Corporate Social Responsibility (CSR) activities in implementing CSR by first obtaining approval in the RPB for its use.

As for the provision of funds for political activities, during 2021 Perum Jasa Tirta II does not provide funds for political activities or to political parties.

Perkara Penting

Selama Tahun 2021 Perusahaan menghadapi sejumlah perkara penting berupa permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut,

Cases of Importance

During 2021, the Company faced a number of significant cases in the form of civil and criminal law issues that have been resolved (have permanent legal force) or are still being resolved, as detailed below.

No.	PERMASALAHAN HUKUM / Legal Problems	JUMLAH PERKARA / Number Of Cases
1.	Status Terbuka / Status Open	4
2.	Status Tertutup / Status Closed	11

Permasalahan Hukum

Perum Jasa Tirta II terus berupaya dalam menjalankan kegiatan usaha yang berprinsip pada kepatuhan dan prinsip korporasi yang sehat guna menghindari potensi atau dampak negatif terlibat dalam perkara hukum. Selama tahun 2021, Perusahaan terlibat perkara hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2021, Dewan Pengawas dan Direksi tidak terlibat atau menghadapi gugatan atau perkara hukum di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun.

Perkara Hukum di Entitas Anak/ Patungan

Selama tahun 2021, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak/Patungan maupun terkait dengan Dewan Pengawas dan Direksi Entitas Anak.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perum Jasa Tirta II, Dewan Pengawas, ataupun Direksi yang sedang menjabat oleh regulator dan pihak berwenang lainnya.

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu sebagai berikut :

a. Risiko Hukum yaitu resiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum yang dapat merugikan Perusahaan ;
b. Risiko Reputasi, yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat atau pihak luar akan berkurang akibat adanya persepsi negatif terhadap Perusahaan ;
c. Potensi Kerugian berupa kerugian finansial akibat adanya permasalahan/perkara hukum tersebut;

Legal Concerns

Perum Jasa Tirta II continues to strive to conduct business in accordance with compliance and sound corporate principles in order to avoid the potential or negative impact of being involved in legal cases. During 2021, the Company was involved in both civil and criminal legal cases.

Legal Concerns for the Supervisory Board and Board of Directors

Neither the Supervisory Board nor the Board of Directors were involved in or faced any lawsuits or legal cases in any judicial institution and/or arbitration body in 2021.

Subsidiary/Joint Entity Legal Cases

There were no legal cases involving Subsidiaries/ Joint Entities or the Supervisory Board and Directors of Subsidiaries in 2021.

Administrative Penalties

The regulator and other authorities imposed no administrative sanctions on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the Board of Directors who are currently serving in 2021.

Legal Issues' Impact on the Company

The following are some of the potential consequences:

a. Legal Risk is the risk posed by a lawsuit that could harm the Company;
b. Reputational Risk, which can cause the level of public trust or outside parties to be reduced due to negative perceptions of the Company;
c. Potential Losses in the form of financial losses due to the problem/legal case;

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga tanggal 31 Desember 2021 Perum Jasa Tirta II tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak terapat informasi mengenai perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak.

Important Cases Facing Subsidiaries

As of December 31, 2021, Perum Jasa Tirta II does not have any subsidiaries, so there is no information regarding important cases faced by subsidiaries.

Perkara Penting yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2021 tidak terdapat perkara penting apapun yang sedang dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II .

Important Cases Facing the Supervisory Board and the Board of Directors

During 2021 there were no important cases being faced by the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II.

Pengungkapan Sanksi Administrasi dari Regulator

Selama periode tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perum Jasa Tirta II dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.

Disclosure of Administrative Sanctions from Regulators

During the 2021 period, there were no material administrative sanctions affecting the business continuity of Perum Jasa Tirta II and no administrative sanctions imposed on the Supervisory Board and the Board of Directors.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal. Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan di Perum Jasa Tirta II. Setiap transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Setiap individu berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan Perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan Perusahaan . Dengan demikian, Perum Jasa Tirta II mengharuskan setiap individu untuk:

1. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apa pun di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan , kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Management of Conflicts of Interest

A conflict of interest is a situation in which there is a conflict between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the Board of Directors, Supervisory Board, and Capital Owners. During 2020, there were no transactions with conflicts of interest at Perum Jasa Tirta II. Every transaction is carried out in accordance with applicable regulations and always pays attention to the principles of GCG. Every individual is obliged to put the interests of the Company first and avoid any conflicts of interest in various forms with the Company. Accordingly, Perum Jasa Tirta II requires each individual to:

1. Not be allowed to hold any concurrent positions outside the Company that may cause a conflict of business interest with the Company, except in relation to employee cooperatives as regulated in the applicable laws and regulations;

2. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan;
3. Memahami dan menaati Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

2. Not be allowed to engage in business ties personally or involve family, with other parties that can lead to family, with other parties that may cause a conflict of business interest with the Company;

3. Understand and comply with the Perum Jasa Tirta II Policy;

KODE ETIK Perusahaan
CODE OF CONDUCT

Perum Jasa Tirta II menempatkan keseragaman etika dan perilaku sebagai bagian tak terpisahkan dalam menunjang integritas dan akuntabilitas dalam setiap individu Perusahaan . Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi komitmen atas terciptanya best practices GCG dan mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Untuk itu, Perum Jasa Tirta II telah mempunyai Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang dijadikan pedoman dan berlaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II mulai dari Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II dalam bekerja dan berinteraksi segenap Pemilik Modal Perusahaan .

Uniformity of ethics and behavior, according to Perum Jasa Tirta II, is an inseparable part of supporting integrity and accountability in every individual in the Company. This is to fulfill the commitment to develop GCG best practices and to support long-term business sustainability. As a result, Perum Jasa Tirta II has a Code of Conduct that serves as a guide for all personnel of Perum Jasa Tirta II, beginning with the Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II in working and interacting with all employees.

Dengan mengacu pada Budaya Perusahaan “Air Untuk Menghidupi Negeri”, segenap insan Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan Kode Etik (Code of Conduct) secara konsisten selama menjalankan kegiatan usaha serta senantiasa mendukung terlaksananya GCG yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan (corporate image) bagi seluruh pemangku kepentingan.

Company Capital’s owner. Referring to the Corporate Culture of “Water to Live the Nation,” all personnel of Perum Jasa Tirta II are committed to consistently implementing the Code of Conduct during business activities and always supporting the implementation of GCG, which will ultimately improve the Company’s image (corporate image) in the community.

Isi/Pokok Kode Etik

Pedoman Etik Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perum Jasa Tirta II memuat nilai-nilai etika dan tata perilaku sebagai suatu standar beretika dan berperilaku bagi insan Perum Jasa Tirta II yang meliputi:

- Standar Etika Usaha dalam mengatur interaksi Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, pemerintah, auditor, masyarakat, mitra binaan dan lingkungan, Serikat Pekerja, Organisasi Profesi, serta Perguruan Tinggi.
- Standar Tata Perilaku dalam mengatur sikap individu, etika kerja sama insan Perum Jasa Tirta II dengan Perusahaan , etika kerja sesama insan Perum Jasa Tirta II, perilaku sebagai atasan, perilaku sebagai bawahan, menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan , menjaga aset Perusahaan , menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mencatat data dan pelaporan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, kegiatan berpolitik, hadiah, cendera mata, donasi, komisi dan suap, dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras.
- Penerapan dan Penegakan Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku mengatur tentang organisasi, penegakan etika usaha dan tata perilaku, sanksi pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, sosialisasi dan interaksi, serta mekanisme pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku.

Code of Ethics Guidelines

The Perum Jasa Tirta II Code of Ethics Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct contains ethical values and a code of conduct as a standard of ethics and behavior for Perum Jasa Tirta II personnel, which include:

- Standards of Business Ethics in regulating interactions between companies and their employees, customers, suppliers of goods and services, business partners, government, auditors, communities, fostered partners, and the environment, labor unions, professional organizations, and universities.
- Standards of Conduct in regulating individual attitudes, ethics of cooperation between Perum Jasa Tirta II personnel and the Company, work ethics among Perum Jasa Tirta II personnel, behavior as superiors, behavior as subordinates, maintaining confidentiality of Company data and information, safeguarding Company assets, maintaining safety and occupational health (K3), recording data and reporting, avoiding conflicts of interest and abuse of office, political activities, gifts, souvenirs, donations, commissions and bribes, and abuse of narcotics and illegal drugs (drugs) and liquor.
- Standards of Business Ethics and Code of Conduct Implementation and Enforcement regulates organization, enforcement of business ethics and code of conduct, sanctions for violations of business ethics and code of conduct, socialization and interaction, and mechanisms for updating/revising business ethics and code of conduct.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penerapan Code of Conduct bagi Perusahaan yaitu:
Setiap insan Perum Jasa Tirta II memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

Purpose, Goals, and Benefits

The goal of implementing the Code of Conduct for the Company is to ensure that every employee of Perum Jasa Tirta II understands that all of the Company's activities are based on the principles of Good Corporate Governance;

- Membentuk karakter insan Perum Jasa Tirta II yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama dalam Perusahaan maupun dengan pihak lain di luar Perusahaan ;
- Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan ;
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan ;
- Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam Perusahaan ;
- Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang tepat sehingga dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara efisien, efektif, dan ekonomis (3E).

Adapun tujuan penerapan Code of Conduct bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh stakeholders, sehingga akhirnya pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku di Perusahaan ;
- Sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan ;
- Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan maupun litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh insan Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan .

Pedoman Perilaku Perum Jasa Tirta II

Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk melaksanakan praktik- praktik Good Corporate

- Creating a character for Perum Jasa Tirta II personnel who are disciplined and ethical in their interactions with others within the Company and with other parties outside the Company;
- Become a behavioral reference for individuals within the Company to carry out their respective duties and responsibilities and interact with the Company's stakeholders;
- Creating a healthy and comfortable working environment within the Company's environment;
- As a guideline that regulates, supervises, and prevents the abuse of authority and position of each individual in the Company;
- Reduce the likelihood of a deviation or component of a proper internal control system occurring so that the Board of Directors can assist in managing the Company's business in an efficient, effective, and economical manner. (3E).

The following are the goals of implementing the Code of Conduct for the Company:

- As a shared commitment to realize the vision and carry out the Company's mission in a professional and ethical manner by paying attention to all stakeholders, so that in the end, maximum work standards for all individuals are realized, and by adhering to the guidelines for the Code of Conduct's implementation.
- As a behavioral guide for all Perum Jasa Tirta II personnel that must be followed in carrying out all Company activities;
- As a guide to avoid conflicts of interest or litigation caused by Perum Jasa Tirta II personnel's negligence in carrying out all Company activities.

Perum Jasa Tirta II's Code of Conduct

Perum Jasa Tirta II, as a State-Owned Enterprise (BUMN), is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices as part of its

Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan . Pedoman Etika dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang terdapat pada Lampiran III Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II nomor : KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 ini merupakan salah satu wujud dari komitmen tersebut yang dituangkan dalam dokumen tertulis atas dasar perilaku etis yang diharapkan Perusahaan dari Insan Perusahaan yang mencakup perilaku yang harus dilakukan dan dilarang dilakukan.

efforts to improve corporate governance.
realize the vision and mission of the company The Code of Conduct (Code of Conduct) contained in Appendix III of the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company (PERUM) number: KBS-01/DIR/10/2019 dated 30 October 2019 is one manifestation of the commitment stated in a written document on the basis of the ethical behavior expected by the Company from the Company's Personnel, which includes behaviors that must be carried out and behaviors that must not be carried out.

Code of Conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan Perusahaan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Adapun komitmen-komitmen yang dimaksud adalah :

- Komitmen Terhadap Pemilik Modal
- Komitmen Terhadap Insan Perusahaan
- Komitmen Terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
- Komitmen Terhadap Pelanggan
- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa
- Komitmen Terhadap Pesaing
- Komitmen Terhadap Mitra Usaha
- Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan dan Lingkungan
- Komitmen Terhadap Media Massa, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan
- Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
- Komitmen Terhadap Anak Perusahaan

The Company's Code of Conduct is a set of commitments that are structured to influence, shape, regulate, and conform to behavior in order to achieve consistent outputs that are in accordance with the Company's work culture in achieving the vision and mission. The commitments in question are:

- Commitment to Capital Owners
- Commitment to Company Personnel
- Commitment to Government, Regional Government, and other Agencies
- Commitment to Customers
- Commitment to Goods/Services Providers
- Commitment to Competitors
- Commitment to Business Partners
- Commitment to Communities, Fostered Partners, and the Environment
- Commitment to the media, non-governmental organizations, and community organizations
- Support for Labor Unions
- Subsidiary Commitment

Pengungkapan Code of Conduct

Untuk memastikan Code of Conduct diketahui dan dijalankan oleh seluruh insan Perusahaan, Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan sosialisasi dan mendistribusikan buku Code of Conduct kepada seluruh insan Perum Jasa Tirta II dalam bentuk

Code of Conduct Disclosure

To ensure that the Code of Conduct is known and implemented by all Company personnel, Perum Jasa Tirta II has carried out socialization and distributed the Code of Conduct book in the form of a Pocket Book to all personnel of Perum Jasa

Buku Saku. Setelah sosialisasi dilakukan, seluruh insan Perum Jasa Tirta II wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan code of conduct yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

Tirta II. After the socialization process is completed, Perum Jasa Tirta II personnel are required to sign an Integrity Pact, which is a commitment by Perum Jasa Tirta II personnel to implement a code of conduct that is updated as needed.

Penegakan dan Sosialisasi Code of Conduct

Sebagai upaya penegakan atas Code of Conduct, Perum Jasa Tirta II akan memberikan sanksi terhadap insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran Code of Conduct. Bagi setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Code of Conduct, harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi.

Code of Conduct Enforcement and Dissemination

Perum Jasa Tirta II will impose sanctions on Company personnel who violate the Code of Conduct in an effort to enforce it. Every Perum Jasa Tirta II employee who becomes aware of a situation that has the potential to violate the Code of Conduct must immediately report it in writing to his superior or higher leadership, including the identity of the reporter, based on complete and accountable evidence that does not contain elements of slander and slander. personal pursuits.

Perum Jasa Tirta II akan melindungi kerahasiaan setiap insan Perum Jasa Tirta II yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perum Jasa Tirta II will protect the confidentiality of any employee who reports a violation and will immediately follow up unless the report is incorrect, in which case the whistleblower may face sanctions in accordance with applicable regulations.

Pelanggaran Code of Conduct

Pelanggaran Code of Conduct di Perum Jasa Tirta II merupakan tindakan indisipliner dan ditindaklanjuti oleh Direktur Keuangan & SDM sebagai penanggung jawab implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan . Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui terjadinya pelanggaran Code of Conduct wajib melaporkan kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan SDM, atasan langsung, dan kontak pengaduan yang bertanggung jawab untuk:

Breach of the Code of Conduct

Violations of the Code of Conduct at Perum Jasa Tirta II result in disciplinary action, which is overseen by the Director of Finance & Human Resources, who is in charge of implementing Good Corporate Governance (GCG) in the Company. Every Perum Jasa Tirta II employee who becomes aware of a violation of the Code of Conduct must report it to the work unit in charge of HR management, direct supervisor, and complaint contact, who are responsible for:

- Memonitor kepatuhan atas Code of Conduct;
- Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan;
- Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran Code of Conduct ini tidak perlu merasa khawatir karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran atas Code of Conduct ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan . Pelaksanaan Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh insan Perum Jasa Tirta II. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Perum Jasa Tirta II wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

- Divisi SDM;
- Atasan Langsung;
- Kotak Pengaduan (Whistleblowing System)

Segenap insan Perum Jasa Tirta II dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh oknum insan Perum Jasa Tirta II dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya.

Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Perusahaan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

- Monitoring compliance with the Code of Conduct;
- Recording all types of alleged violations; and
- Following up on violations that occur in accordance with applicable regulations.
- Inform the Board of Directors of any violations.

Every Perum Jasa Tirta II employee who reports a violation of this Code of Conduct does not need to be concerned because the Company will protect the reporter's identity as long as the reporting can be accounted for. Violations of this Code of Conduct will result in sanctions or rewards in accordance with the Company's rules and regulations. The implementation of the Code of Conduct is a shared commitment and responsibility of all Perum Jasa Tirta II personnel. In the event of a violation or deviation, Perum Jasa Tirta II employees must report it to:

- HR Division;
- Direct Supervisor;
- Complaint Box (Whistleblowing System)

All personnel of Perum Jasa Tirta II and external parties of the Company (Customers, Business Partners, and Community) can report violations of the Code of Conduct committed by personnel of Perum Jasa Tirta II, and the Company is required to follow up on reports that have the potential to harm materially and may damage the Company's image, such as irregularities, manipulation, and so on.

The reporter must clearly state his or her identity on the report, which must be accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report must keep the identity of the reporter private.

The company is required to follow up on every report received in accordance with the applicable procedures and mechanisms. In accordance with applicable laws and regulations, the company provides legal protection.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Code of Conduct Tahun 2021

Pemberian sanksi atas pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan oleh Pemilik Modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders lain maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila pelanggaran terkait dengan tindak pidana, maka diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman Code of Conduct.

Number of Code of Conduct Violations and Sanctions in 2021

Sanctions are imposed on employees who violate the Code of Conduct in accordance with applicable regulations, by the Board of Directors or authorized officials Meanwhile, the imposition of sanctions for violations committed by the Board of Directors and the Supervisory Board refers fully to the Company's Articles of Association and Bylaws in accordance with applicable regulations by the Capital Owners.

If the violation is committed by a partner or other stakeholder, the contract's provisions will be imposed. If the violation is related to a criminal act, it will be reported to law enforcement. Sanctions are imposed when real evidence of violations of the Code of Conduct guidelines is discovered.

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
GRATIFICATION CONTROL GUIDELINES

Gratifikasi merupakan kegiatan pemberian dan/ atau penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan (entertainment) kepada insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/ atau tanpa melalui sarana elektronik.

Gratification is the activity of giving and/or receiving gifts/souvenirs and entertainment (entertainment) to Company personnel both at home and abroad, and it can be done electronically or manually.

Perum Jasa Tirta II telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang menjadi lampiran VII Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola Perusahaan yang baik Nomor : KBS- 01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 mengenai Pedoman Gratifikasi. Pedoman tersebut memuat mengenai:

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup dan Sistematika
- Pengertian

Perum Jasa Tirta II has compiled Guidelines for Gratification Control, which is attached VII to the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding guidelines for good corporate governance Number: KBS- 01/DIR/10/2019 dated October 30, 2019. The guidelines include the following sections:

- Background
- Purpose and Objectives
- Scope and Systematics
- Definition

- Dasar Hukum
- Prinsip Dasar Gratifikasi
- Kategori Gratifikasi
- Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G)
- Tugas dan Fungsi TP3G
- Koordinasi TP3G
- Pelaporan

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Dalam menegakkan kebijakan anti gratifikasi, setiap insan Perum Jasa Tirta II dapat melaporkan indikasi pelanggaran gratifikasi dengan mengikuti tata cara sebagai berikut :

1. Setiap penerimaan hubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Direksi melalui TP3G.
2. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada TP3G dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, e-mail, website yang telah disediakan oleh Perusahaan .
3. Jangka waktu pelaporan melalui TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan .
4. Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan , maka TP3G tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Insan Perusahaan melaporkan langsung kepada Direksi dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1), TP3G meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan berdasarkan ketentuan dalam pedoman ini.

- Legal Basis
- Basic Principles of Gratification
- Gratification Category
- Team for Handling Violations and Gratification Complaints (TP3G)
- TP3G Duties and Functions
- TP3G Coordination
- Reporting Governance

Method of Gratification Reporting

In order to enforce the anti-gratification policy, any employee of Perum Jasa Tirta II may report indications of gratification violations by following the procedures outlined below:

1. Any acceptance of a bribe-like relationship with Gratification must be reported to the Board of Directors via TP3G.
2. The Gratification Report referred to in number (1) is submitted to TP3G by completely filling out the form determined by the Board of Directors and attaching Gratification documents, either in person or by post, e-mail, or website provided by the Company.
3. The reporting period via TP3G, as mentioned in number (1), is no later than 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by Company Personnel.
4. If the reporting period exceeds 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by the Company's Personnel, the report cannot be received by TP3G, and the Company's Personnel must report directly to the Board of Directors by completely filling out the form determined by the Board of Directors and attaching the required documents. concerning gratuities
5. Following receipt of the report referred to in number (1), TP3G examines the Gratification received to determine whether the Gratification received is a bribe or not in accordance with the provisions of this guideline.

6. Apabila hasil penelitian TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, TP3G menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada Direksi dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) hari kerja sej ak laporan Gratifikasi tersebut diterima.

6. If the results of the TP3G research referred to in number (5) are Gratifications that are considered bribes, TP3G submits the Gratifications to the Board of Directors within 7 (days) of receiving the Gratification report.

Pakta Integritas dan Gratifikasi

Perum Jasa Tirta II mewajibkan setiap insan Perum Jasa Tirta II untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan . Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap Perum Jasa Tirta II.

Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, penandatanganan kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dilakukan setiap tahun.

The Perum Jasa Tirta II Integrity and Gratification Pact

requires all employees to follow the provisions outlined in the Company's Code of Ethics. This is accomplished through the signing of the Integrity Pact by Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board, Directors, and permanent employees.

Every year, the signing of compliance with the Company's Code of Ethics is performed in order to maintain ongoing commitment.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Menindaklanjuti surat sekretaris kementerian BUMN Nomor : S-17S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal setifikasi ISO 37001:2016. Sistem manajemen anti penyuapan, Perusahaan telah diaudit oleh pihak eksternal dan pada tanggal 28 Desember 2020. Serta hasilnya PJT II Telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016. Oleh karena itu Perusahaan telah Menyusun Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor : PRD-16/ DIR/10/2020.

Management System for Anti-Bribery (SMAP)

Following up on the letter from the Secretary of the Ministry of SOEs dated February 17, 2020, Number: S-17S.MBU/02/2020, regarding ISO 37001:2016 certification. An external party audited the Company's anti-bribery management system on December 28, 2020. As a result, PJT II now has the ISO 37001:2016 certification. As a result, the Company developed the Anti-Bribery Management System Guidelines (SMAP), which are governed by Board of Directors Regulation Number: PRD-16/ DIR/10/2020.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
VIOLATION REPORTING SYSTEM

Tujuan penerapan praktik terbaik dan prinsip-prinsip GCG yang diarahkan pada pemeliharaan kualitas kepatuhan dikukuhkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang berperan sebagai mekanisme deteksi dini (Early Warning System) yang mampu mencegah indikasi penyimpangan dan kecurangan (fraud) di lingkungan Perusahaan . Perum Jasa Tirta II juga telah membentuk Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) sebagai dasar dalam komitmen untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan para Pemilik Modal berdasarkan asasi kewajaran dan kesetaraan.

The Whistleblowing System, which acts as an early warning system capable of preventing indications of irregularities and fraud within the Company, confirms the purpose of implementing best practices and GCG principles aimed at maintaining the quality of compliance. Perum Jasa Tirta II has also established a Whistleblowing System Guideline as a foundation for its commitment to pay attention to and protect the interests of Capital Owners in a fair and equal manner.

Dalam hal ini, Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) menjadi media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dengan berlandaskan pada kejujuran dan bukan bersifat fitnah dengan disertai bukti yang kuat.

In this case, the Whistleblowing System serves as a channel for the reporter to convey information about violations that occurred within the Company that is based on honesty rather than slander and is supported by strong evidence.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran telah ditetapkan melalui Lampiran VI Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola Perusahaan yang baik Nomor : KBS- 01/ DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Attachment VI Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding guidelines for good corporate governance established guidelines for reporting violations. KBS- 01/DIR/10/2019, dated 30 October 2019.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Whistleblowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perum Jasa Tirta II dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan .
Adapun maksud, tujuan dan manfaat Whistleblowing System, di antaranya:

Purpose, Goals, and Benefits

The Whistleblowing System is a system that manages complaints/disclosures regarding illegal behavior, unethical or inappropriate actions in a confidential, anonymous, and independent manner, with the goal of increasing the participation of Perum Jasa Tirta II personnel and other parties in disclosing violations that occur within the Company. The Whistleblowing System's goals, objectives, and benefits include the following:

- Sebagai dasar atau pedoman dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari para pemangku kepentingan;
- Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian Pengaduan Pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh para pemangku kepentingan;
- Menghindari publikasi negatif terhadap Perusahaan ;
- Mendukung asas kesetaraan (fairness) dalam hubungan antara Perusahaan dengan para Pemilik Modal sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan ;
- Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

- As a basis or guideline in dealing with Complaints of Violations from stakeholders;
- Ensuring the implementation of an effective Complaints Complaints settlement mechanism by stakeholders within an adequate period of time;
- Avoid negative publicity towards the Company;
- Support the principle of equality (fairness) in the relationship between the Company and the owners of capital as business actors and partners of the Company;
- As part of the effort to disclose various problems in the Company that do not conform to the Company's ethical standards.

Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan pada Whistleblowing System Perum Jasa Tirta II meliputi hal- hal sebagai berikut:

- Penyimpangan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di uar Perusahaan ;
- Pemerasan;
- Perbuatan curang (fraud);
- Benturan kepentingan;
- Gratifikasi

Reporting Scope

The following are examples of complaints that can be made to Perum Jasa Tirta II's Whistleblowing System:

- Violations of applicable laws and regulations;
- Abuse of position for personal gain;
- Blackmail;
- Fraud;
- Conflict of interest;
- Gratifications

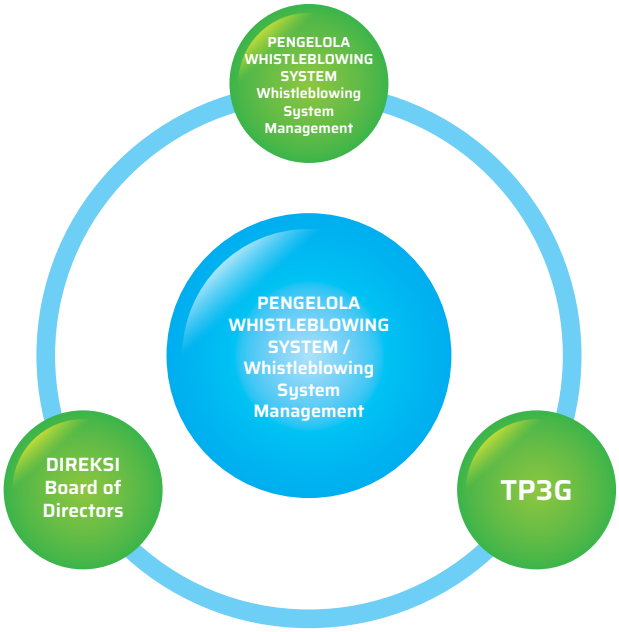
Struktur Pengelola Whistleblowing System

Pengelolaan Whistleblowing System dilakukan oleh 3 (tiga) organ, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G). Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab organ- organ tersebut dalam pengelolaan Whistleblowing System adalah sebagai berikut:

The Structure of Whistleblowing System

The Whistleblowing System is managed by three (three) organs: the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Team for Handling Violations and Gratifications (TP3G). These organs' duties and responsibilities in the management of the Whistleblowing System are as follows:

ORGAN PENGELOLA WBS / WBS Management Organs	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB / Functions and Responsibilities
Dewan Pengawas / Supervisory Board	Bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi. / Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of both the Supervisory Board, and the Board of Directors.
Direksi / Board of Directors	Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan. / Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by the Employees.



ORGAN PENGELOLA WBS / WBS Management Organs	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB / Functions and Responsibilities
Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G) / Whistleblowing Handling Team (TP3G)	• TP3G jalur Direksi adalah tim yang dibentuk oleh Direksi dan beranggotakan perwakilan dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi PKRSM serta pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Direksi adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI). / TP3G Board of Directors is a team formed by the Board of Directors and consists of representatives from the Corporate Secretary, Internal Audit Unit (SPI), Human Resources Division, PKRSM Division, and others required in accordance with their competence and expertise. TP3G of the Board of Directors is headed by the Head of Internal Audit Unit (SPI). • TP3G jalur Dewan Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dan beranggotakan perwakilan dari Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit serta pihak independen lainnya yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Dewan Pengawas adalah Anggota Dewan Pengawas. / TP3G of the Supervisory Board is a team established by the Supervisory Board and comprising representatives from members of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board, the Audit Committee and other Independent parties required in accordance with their competence and expertise. TP3G of Supervisory Board is headed by the member of Supervisory Board.

Mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pengelolaan Whistleblowing System yang sedang dikembangkan Perum Jasa Tirta II mengikuti alur sebagai berikut:

1. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan ditujukan kepada Direksi Perusahaan .
2. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi ditujukan kepada Dewan Pengawas Perusahaan .
3. Pengaduan Pelanggaran dilakukan dalam jam kerja.
4. Apabila penerima Pengaduan Pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan wajib meneruskan Pengaduan Pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan menerima setiap Pengaduan Pelanggaran yang diajukan oleh para Pemilik Modal dan/ atau Perwakilan para Pemilik Modal baik secara lisan maupun tertulis.
6. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat Pemilik Modal dan/atau perwakilan para Pemilik Modal mengajukan Pengaduan Pelanggaran.
7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis melalui website resmi Perusahaan dan/atau menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q. Direksi, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:
   Direksi Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat
8. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang

Management Mechanism of the Violation Reporting System

The management mechanism being developed by Perum Jasa Tirta II for the Whistleblowing System follows the following flow:

1. Employee complaints about alleged violations are directed to the Company Directors.
2. Complaints about alleged violations by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, members of the Supporting Organs of the Supervisory Board, and members of the Supporting Organs of the Board of Directors are directed to the Company's Supervisory Board.
3. Violation complaints are made during working hours.
4. If the person receiving the Complaint of Violations is not a member of the Board of Directors or the Supervisory Board, the person must forward the Complaint of Violation to the Board of Directors or the Supervisory Board.
5. The Company accepts any Complaints of Violations submitted orally or in writing by Capital Owners and/or Representatives of Capital Owners.
6. When Capital Owners and/or representatives of Capital Owners file a Complaint of Violation, the Company explains the policies and procedures.
7. Complaints about alleged violations committed by employees are made in writing via the Company's official website and/or by submitting an official letter addressed to the Company cq the Board of Directors, by direct delivery, or by post to the Company at the following address: Directors of Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, West Java
8. Complaints of alleged violations by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the

Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat: Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat

Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors are made in writing by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors, submitting an official letter addressed to the Supervisory Board to the Company at the following address: Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Jl. H. Agus Salim No. 69 Central Jakarta

9. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
10. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/ atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
11. Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan wajib dilengkapi dengan data (bukti pendukung).
12. Perusahaan memberikan tanda terima, jika Pengaduan Pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
13. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan para pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
    - Fotokopi bukti identitas para Pemilik Modal dan perwakilan para pemangku kepentingan;
    - Surat kuasa dari para Pemilik Modal kepada perwakilan para Pemilik Modal yang menyatakan bahwa para Pemilik Modal memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama para pemangku kepentingan. Jila perwakilan para Pemilik Modal adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

9. Written complaints of violations must be accompanied by photocopies of identification and supporting evidence, such as documents relating to the transactions carried out and/ or the Complaints of Violations that will be submitted.
10. Written infringement complaints without identifying information must be accompanied by supporting evidence documents relating to the transactions carried out and/or the infringement complaints that will be submitted.
11. Violation complaints must be accompanied by data (supporting evidence).
12. If the Complaint of Violation is submitted in writing with an identity, the company issues a receipt.
13. If the Complaint of Violations is submitted by representatives of the stakeholders, the following documents must be submitted in addition to the above:
    - Photocopies of proof of identity of the Capital Owners and representatives of the stakeholders;
    - Power of attorney from the Capital Owners to the representatives of the Capital Owners stating that the Capital Owners have authorized the representatives of the Capital Owners to act for and on behalf of the stakeholders. If the Capital Owners' representative is an institution or legal entity, the complaint must be accompanied by documentation proving that the party filing the complaint is authorized to represent the institution or legal entity.

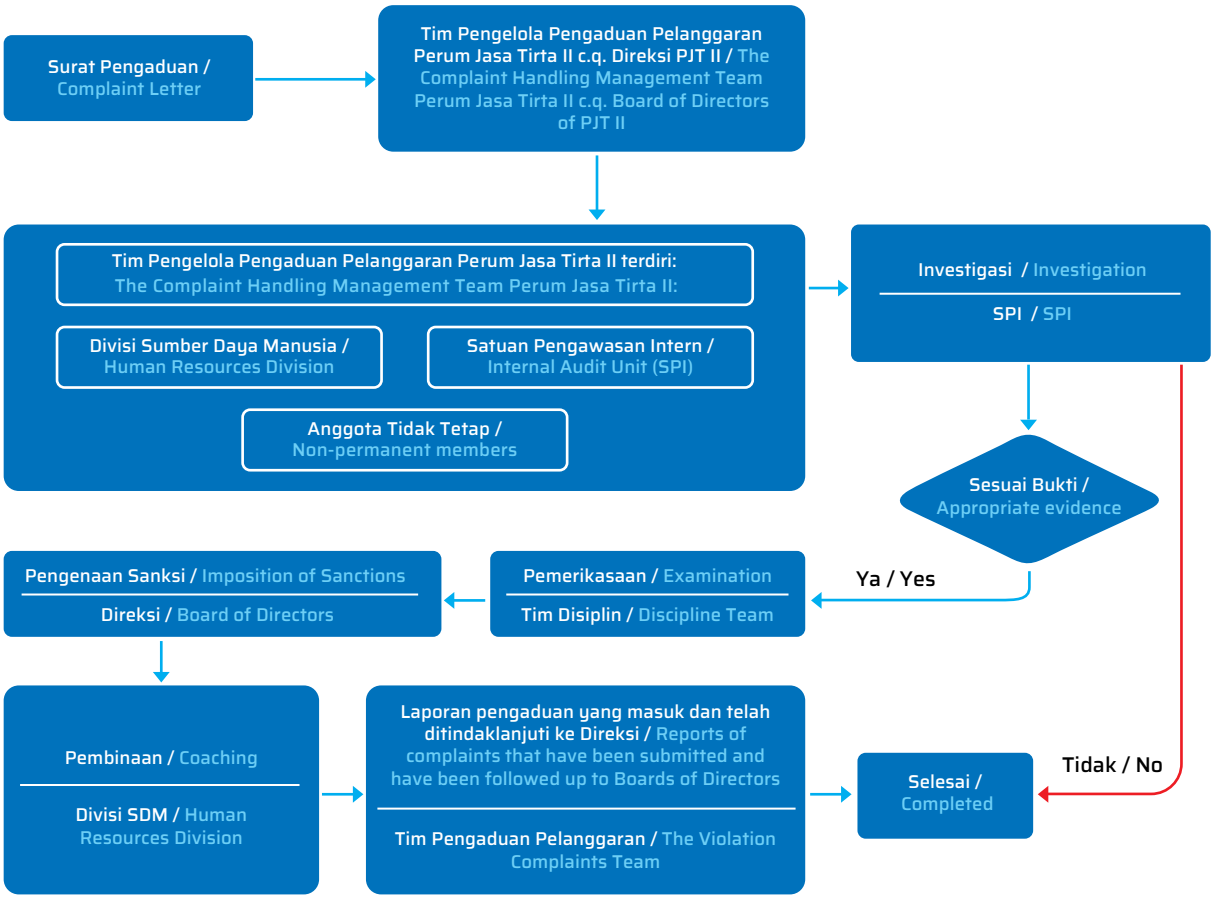
14. Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada para Pemilik Modal dan/atau perwakilan Pemilik Modal yang mengajukan Pengaduan.

Adapun bagan mekanisme pelaporan pengaduan penanganan pelanggaran digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

14. The company must provide proof of receipt of the Complaint of Violations to the Capital Owners and/or their representatives who filed the Complaint.

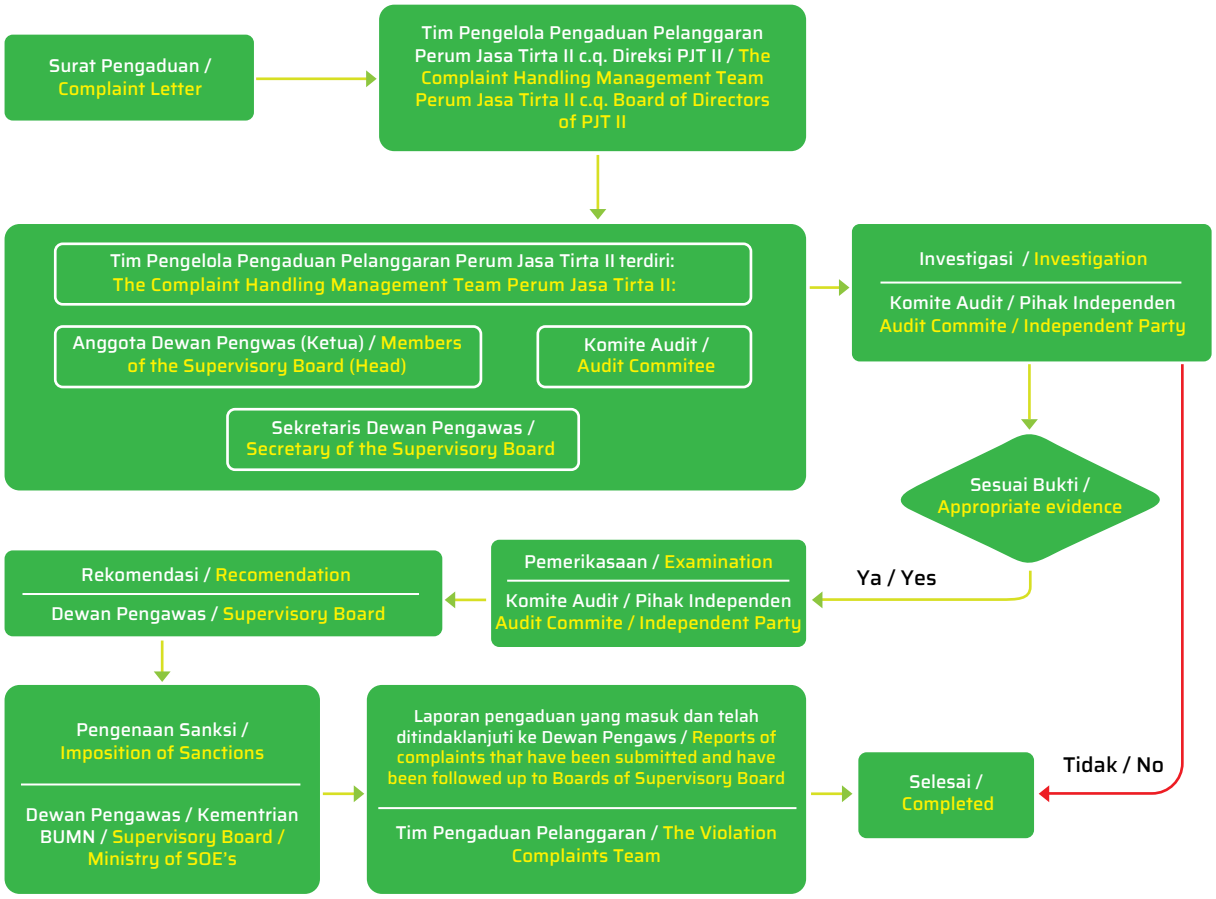
The following diagram depicts the mechanism for reporting complaints and handling violations:

Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Karyawan Perum Jasa Tirta II
Reporting Mechanism for Violations Committed by Employees



Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Direksi

Whistleblowing Mechanism for Violations Committed by Member of the Board Of Directors, Members of Supervisory Board, Supporting Organs of Supervisory Board and Board of Directors



Perlindungan bagi Pelapor

Perum Jasa Tirta II memberikan perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme Whistleblowing System. Adapun kebijakan perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan .
- Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada Perusahaan .
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan tersebut. Selain perlindungan di atas, Perum Jasa Tirta II juga akan menyediakan perlindungan hukum. Diharapkan dengan adanya jaminan perlindungan ini, akan mendorong setiap insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor dan keluarganya.

Whistleblower Protection

Whistleblowers who report alleged violations through the Whistleblowing System mechanism are protected under Perum Jasa Tirta II. The following are the whistleblower protection policies:

- The Company guarantees the whistleblower's identity.
- The Company guarantees the Whistleblower's protection from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to the Company.
- Whistleblower protection also applies to parties conducting investigations and parties providing information related to the complaint/disclosure. In addition to the aforementioned safeguards, Perum Jasa Tirta II will provide legal protection. It is hoped that this guarantee of protection will encourage all Company employees and other Whistleblowers to report violations in order to ensure the safety of the Whistleblower and his or her family.

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pengaduan Pelanggaran dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.

Processing of Violation Reports

- Based on team records, the Violation Complaint Management Team verifies incoming reports.
- If the verification results indicate that there are indications of violations accompanied by sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.
- If the verification results indicate that there are indications of violations accompanied by sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.

- Terkait Pengaduan Pelanggaran uang melibatkan oknum karyawan yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Direksi untuk diinvestigasi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Rekomendasi hasil dari investigasi yang dilakukan oleh SPI tersebut diajukan kepada Tim Disiplin untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direksi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas untuk diinvestigasi Komite Audit atau melimpahkan kepada pihak independen.
- Direksi akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Disiplin, untuk Dewan Pengawas akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Komite Audit/Independen.

- Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut karyawan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak- pihak yang terlibat.
- Dalam hal hasil investigasi yang dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Pengawas tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.

- Pelaku Pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sosialisasi Whistleblowing System

Dalam memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui kebijakan dan mekanisme Whistleblowing System, Perusahaan

- In the case of complaints of money laundering involving unscrupulous employees, the Board of Directors must follow up with them to have them investigated by the Internal Audit Unit (SPI).
- Recommendations resulting from the SPI investigation are forwarded to the Disciplinary Team for follow-up and are reported to the Board of Directors.
- In the case of Complaints of Violations involving individual members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors, the Supervisory Board must follow up with the Audit Committee to investigate or delegate it to an independent party.
- In the case of complaints of money laundering involving unscrupulous employees, the Board of Directors must follow up with them to have them investigated by the Internal Audit Unit (SPI).
- Recommendations resulting from the SPI investigation are forwarded to the Disciplinary Team for follow-up and are reported to the Board of Directors.
- In the case of Complaints of Violations involving individual members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board, and Supporting Organs of the Board of Directors, the Supervisory Board must follow up with the Audit Committee to investigate or delegate it to an independent party.
- Offenders who have been proven guilty based on the findings of the investigation will be dealt with in accordance with the applicable regulations.

Whistleblowing System Socialization

To facilitate and ensure that all Company personnel and other interested parties are aware of the Whistleblowing System policies and mechanisms, the Company Socialization and internalization

melakukan sosialisasi dan internalisasi melalui presentasi langsung kepada karyawan dan pemangku kepentingan. Sosialisasi Whistleblowing System didukung juga oleh internalisasi prinsip GCG dan materi Code of Conduct sehingga diharapkan seluruh insan Perusahaan dapat senantiasa patuh dan berlaku etis sesuai dengan peraturan Perusahaan .

are carried out through direct presentations to employees and stakeholders. Internalization of GCG principles and Code of Conduct materials also aids in the socialization of the Whistleblowing System, with the hope that all Company personnel will always comply and behave ethically in accordance with Company regulations.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2021

Selama tahun 2021, tidak terdapat pelaporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke Whistleblowing System Perum Jasa Tirta II.

Number of Complaints and Complaint Follow-Up in 2021

There were no reports of complaints of violations that entered the Perum Jasa Tirta II Whistleblowing System in 2021.

Jumlah Pengaduan

The quantity of Complaints

TAHUN/ Year	MEDIA PENYAMPAIAN / Delivery Media					KLASIFIKASI LAPORAN / Report Classification			DITINDAK LANJUTI / Follow up	SELESAI / Done
	SURAT / Letter	SUREL / Email	WEB / Web	WA / SMS	LAIN-LAIN / Etc	FRAUD	NON FRAUD	LAINNYA / Other		
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

MANAGEMENT OF ASSETS REPORTS OF STATE PROVIDERS (LHKPN)

Dukungan Perum Jasa Tirta II terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari koRPBi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan melalui pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan dan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan KoRPBi (KPK). Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi wajib lapor ditujukan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kepatuhan, kejujuran, dan integritas, serta transparansi di kalangan penyelenggara negara.

Perum Jasa Tirta II's support for a clean and free state administration free of corruption, collusion, and nepotism (KKN) is realized through the implementation and management of policies and mechanisms for submitting the State Administrators Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK). The requirement for those who are required to report assets is intended to prevent abuse of position and authority by instilling compliance, honesty, and integrity, as well as transparency, among state administrators.

Dasar Hukum LHKPN

Dasar hukum kebijakan pelaporan LHKPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KoRPBi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun di lingkup internal, kebijakan pelaporan LHKPN di lingkungan Perum Jasa Tirta II telah ditetapkan melalui PRD 18/DIR/03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. I/DIR/02/PRD-DRD/2018 tentang Pedoman Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Perum Jasa Tirta II.

LHKPN's Legal Foundation

The following laws and regulations serve as the legal foundation for LHKPN's reporting policy:

1. Law Number 28 of 1999 Concerning Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises; and
3. Law No. 13 of 2003 on Manpower.

In terms of internal scope, the LHKPN reporting policy within Perum Jasa Tirta II was established via PRD 18/DIR/03/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. I/DIR/02/PRD-DRD/2018 concerning Compliance Guidelines for Submission of State Administrators Wealth Reports (LHKPN) for Officials in Perum Jasa Tirta II.

Wajib Lapor LHKPN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Dewan Pengawas dan Direksi;
2. Pejabat struktur sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi;
3. Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi;
4. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

LHKPN Mandatory Reporting

According to the applicable laws and regulations, mandatory reporting of LHKPN within the Company includes, among other things:

1. The Supervisory Board and the Board of Directors;
2. Structural officials up to two levels below the Board of Directors;
3. Directors of Subsidiaries and/or Associated Companies; and
4. Other officials with strategic responsibilities in relation to state administrators.

Mekanisme Pelaporan LHKPN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana wajib lapor berkewajiban untuk:

1. Diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun;
3. Mengumumkan harta kekayaanya.

Mechanism for LHKPN Reporting

The mechanism for reporting Company officials' assets is carried out in accordance with Law Number 28 of 1999, which requires reporting obligations to:

1. Check assets before, during, and after serving;
2. Report his assets at the time of first serving, transfers, promotions, and retirements; and
3. Announce his assets.

Pelaksanaan Lapor LHKPN Tahun 2021

Perum Jasa Tirta II telah menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan KoRPBi (KPK) untuk tahun buku 2019 yang dilaporkan di tahun 2021 oleh pejabat Perusahaan dengan jumlah dan rekapitulasi sebagai berikut:

Implementation of the LHKPN

Report for 2021 Perum Jasa Tirta II reported the following amounts and recapitulation to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2019 fiscal year, which was reported in 2021 by Company officials:

UNIT KERJA/BISNIS/ANAK PERUSAHAAN / Business/Work Unit/Subsidiary	TOTAL WAJIB LAPOR / Total Officials	PELAPORAN 2020 / Reporting in 2020			
		TELAH MELAPORKAN / Have Report	%	BELUM MELAPORKAN / Have not Report	%
- Dewan Pengawas / Supervisory Board - Direksi / Board of Directors - BOD-1 (Struktural) / BOD-1 (Structural) - BOD-2 (Struktural) / BOD-2 (Structural)	86	85	98,84	1	1,16

Sosialisasi LHKPN

Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Socialization of the LHKPN

As part of its commitment to LHKPN compliance, the Company conducts routine socialization and training on procedures for using e-LHKPN to follow up on KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Organizing Announcements and Examining State Administrators' Assets.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Pelaksanaan dan pengelolaan barang dan jasa Perum Jasa Tirta II dilakukan melalui optimalisasi sinergi BUMN sebagai upaya pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap berprinsip pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi, fleksibilitas, jujur, adil, serta bebas dari benturan kepentingan. Penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, di mana Perusahaan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

The implementation and management of Perum Jasa Tirta II goods and services is carried out by optimizing SOE synergy in an effort to empower SOEs with the principle of mutual benefit while adhering to the principles of compliance with applicable laws and regulations, transparency, flexibility, honesty, fairness, and the absence of conflicts of interest. The appointment of providers of goods and services is done openly and through fair competition to parties who meet the requirements. The entire procurement process is carried out in accordance with clear and transparent provisions and procedures, with the Company also having its Own Estimated Price (HPS) calculated with expertise and based on accountable data.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam proses pengadaan akan menjadi mudah apabila didukung oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengadaan baik Divisi Pengadaan, Unit Kerja terkait dan Penyedia. Semua pihak haruslah bersama memahami dan serentak mengimplementasikan semua etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel) yang telah terkandung dalam pasal-pasal kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan .

The application of good corporate governance (GCG) principles in the procurement process will be easier if all components involved in the procurement process, including the Procurement Division, related Work Units, and Providers, support it. All parties must understand and implement all procurement ethics and principles (efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable) outlined in the articles of the Company's Goods and Services procurement policy.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : PER- 08/MBU/12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen menegluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor: PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor: PRD-8/DIR/03/2020 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PJT II.

Policy Legal Foundation for Goods and Services Procurement

The procurement policy used in the process refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER- 08/MBU/12/2019 concerning general guidelines for the implementation of procurement of goods and services for State-Owned Enterprises. As a result, management issued a board of directors regulation to adopt the regulation via the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the PJT II Board of Directors Regulation Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning the guidelines for the implementation of procurement of goods/services in the PJT II environment.

Prosedur dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan secara sistematis, dimulai dari rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan merencanakan transformasi sistem dalam mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan target memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh Perusahaan berpengalaman yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Procedures for the Production of Goods and Services Procurement

Procedures for the procurement of goods and services are carried out systematically within Perum Jasa Tirta II, beginning with the procurement plan, procurement process, receipt and storage, as well as the use, use, and management of assets by the relevant divisions for approval. The company intends to implement a system transformation in managing and controlling policies and activities related to the procurement of goods and services, with the goal of selecting Goods and Services Providers who are experienced and capable of providing the best service quality, competitive prices, and best after-sales guarantees, and are carried out by experienced companies with the necessary expertise.

Informasi mengenai realisasi pengadaan barang dan jasa selama tahun 2021 yang direalisasikan adalah sebagai berikut:
Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti

The following information is available regarding the procurement of goods and services during 2021: As part of its commitment to LHKPN compliance, the Company routinely conducts socialization and training related to procedures for using e-LHKPN to ensure compliance with KPK Regulation Number 07 of 2016.

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Procedures for Implementing Announcements and Examination of State Administrators' Assets.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen mengeluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor :PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor: PRD-8/DIR/03/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PJT II.

Legal Basis of Policy for the Procurement of Goods and Services

The policy applied in the process of procurement of goods and services refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises, therefore Therefore, management issued a board of directors regulation to adopt the regulation through the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the PJT II Board of Directors Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods/Services in PJT II environment.

Prosedur dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan secara sistematis, dimulai dari rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan merencanakan transformasi sistem dalam mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan target memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa. Informasi mengenai realisasi pengadaan barang dan jasa selama tahun 2021 yang direalisasikan adalah sebagai berikut:

Procedures and Realization of Goods and Services

Procurement Procedures for the procurement of goods and services within Perum Jasa Tirta II are carried out systematically, starting from the procurement plan, procurement process, receipt and storage, as well as the use, use, and management of assets by the relevant divisions for approval. The company plans a system transformation in managing and controlling policies and activities related to the procurement of goods and services with the target of selecting Goods and Services Providers who are experienced and able to provide the best service quality, competitive prices, best after-sales guarantees and are carried out by experienced companies that have the appropriate expertise. with the need for goods and services. Information regarding the realization of the procurement of goods and services during 2021 which is realized is as follows:

NO.	NAMA MITRA (BUMN/ANAK) / Partner Name (BUMN/Child)	NAMA KEGIATAN/PROYEK / Name of Activity/Project	NILAI PROYEK (DALAM RP) / Project Value (in Rp)
1.	PT. Indra Karya (Persero)	Pengawasan Rehabilitasi Gardu Induk Jatiluhur / Jatiluhur Substation Rehabilitation Supervision	589.691.300
2.	PT. Surveyor Indonesia (Persero)	Peningkatan Sistem Manajemen Aset, Tanah, Dan Properti / Asset, Land, And Property Management System Enhancement	892.800.000
3.	PT. Surveyor Indonesia (Persero)	Kematangan TI / IT Maturity	964.502.000
4.	PT. Yodya Karya (Persero)	Pengawasan Pembangunan Fasad, Interior Meeting Room dan Fecelift Gedung Graha Vidya / Pengawasan Pembangunan Fasad, Interior Meeting Room dan Fecelift Gedung Graha Vidya	410.905.000
5.	PT. Indra Karya (Persero)	Pengawasan Hydraulic Governor Unit 1 / Unit Pengatur Hidrolik Pengawasan 1	442.653.200
6.	PERUM Produksi Film Negara	Pembuatan Film Dokumenter Korporat / Corporate Documentary Filmmaking	446.380.000
7.	PT. Sucofindo Advisory Urtama	Kajian HBU / HBU study	452.870.000
8.	PT. Indra Karya (Persero) Divisi Engineering I	Perpanjangan Persetujuan Operasi Waduk Ir. H. Djuanda / Reservoir Operation Approval Extension of Ir. H. Juanda	951.885.000

PROGRAM ANTI KORUPSI
ANTI-CORRUPTION PROGRAM

Program anti korupsi dapat menjadi nilai tambah bagi Perusahaan dan memberikan keunggulan dari korporasi lainnya. Dalam menjalankan program ini Perum Jasa Tirta II menerapkan sistem dan prosedur yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur serta pengelolaan supplier secara obyektif berdasarkan kualifikasi dan kinerjanya. Disamping itu, Perum Jasa Tirta II mengeluarkan himbauan kepada seluruh vendor untuk tetap menjaga dan mendukung Perum Jasa Tirta II dengan tidak memberikan/melayani permintaan berupa imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh pejabat maupun karyawan Perum Jasa Tirta II .

Anti-corruption programs can add value to the company and give it an advantage over competitors. In carrying out this program, Perum Jasa Tirta II uses transparent systems and procedures to avoid abuse of authority, errors in procedure implementation, and objectively managing suppliers based on their qualifications and performance. Furthermore, Perum Jasa Tirta II issued an appeal to all vendors to maintain and support Perum Jasa Tirta II by not providing/serving requests in the form of rewards or gifts in any form to all Perum Jasa Tirta II officials and employees.

Kebijakan Gratifikasi

Program Pengendalian Gratifikasi merupakan program kerja sama yang dilakukan antara Perum Jasa Tirta II dengan Komisi Pemberantasan KoRPBi Republik (KPK). Adapun penerapan Program Pengendalian Gratifikasi diawali dengan penerapan budaya Perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi corporate value Perum Jasa Tirta II . Program Pengendalian Gratifikasi adalah sekumpulan perangkat dan rangkaian kegiatan serta mekanisme pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawai dari praktik gratifikasi yang dilarang.

Dalam mewujudkan komitmen Program Pengendalian Gratifikasi maka corporate value Perum Jasa Tirta II dijabarkan dalam bentuk code of conduct (etika usaha dan tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pegawai Perum Jasa Tirta II dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan . Salah satu etika perilaku yang terdapat pada code of conduct yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan (penanganan benturan kepentingan/ conflict of interest) dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan.

Program pengendalian gratifikasi terdiri dari pembuatan perangkat aturan tentang pengendalian gratifikasi, perluasan harta kekayaan pegawai, tata kerja pelaporan pengaduan (whistleblowing system), etika usaha dan tata perilaku (code of conduct) pembentukan organisasi yang mengelola pengendalian gratifikasi, kegiatan sosialisasi/ diseminasi tentang aturan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kesadaran individu dan organisasi tentang gratifikasi serta implementasi pengelolaan pelaporan penerimaan gratifikasi yang berkoordinasi dengan pihak KPK.

Policy on Gratification

The Gratification Control Program is a joint initiative of Perum Jasa Tirta II and the Republican Corruption Eradication Commission (KPK). The implementation of the Gratification Control Program begins with the establishment of a corporate culture in which there are core values or values that become Perum Jasa Tirta II's corporate values. The Gratification Control Program is a collection of tools and activities, as well as a continuous gratification control mechanism, designed to protect employees from prohibited gratification practices.

In order to fulfill the commitment of the Gratification Control Program, Perum Jasa Tirta II's corporate values are described in the form of a code of conduct (business ethics and behavior) to serve as a behavioral reference for the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II in managing the Company in order to achieve the Company's vision, mission, and objectives. One of the ethical behaviors outlined in the code of conduct is the requirement to avoid conflicts of interest (handling conflicts of interest) and abuse of office, as well as the prohibition on accepting any form of gratuity related to positions.

The gratification control program consists of developing a set of gratification control rules, expanding employee assets, working procedures for reporting complaints (whistleblowing system), Establishing an organization that manages gratification control, socialization/dissemination activities on control rules, business ethics and code of conduct gratification and raising awareness among individuals and organizations about gratification, as well as the implementation of management reporting on gratification receipt in collaboration with the KPK.

Pakta Integritas

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di Perusahaan setiap pegawai Perusahaan telah menandatangi pakta integritas untuk berkomitmen sebagi berikut :

1. Senantiasa mematuhi Hukum dan Ketentuan-Ketentuan Peraturan perundang-Undangan;
2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
3. Berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara amanah dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) guna memberikan hasil terbaik bagi Perusahaan ;
4. Tidak pernah dan tidak akan pernah membuat keputusan dan/atau memberikan perintah yang bertujuan akan memanfaatkan Perusahaan , baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan saya secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu;
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan Fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadinya tindakan Fraud dilingkungan Perusahaan dan tidak akan melakukan segala bentuk tindakan Fraud serta menghindarkan diri dari perbuatan yang mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan Fraud;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari KoRPBi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Tidak mempunyai jabatan lain pada Badan Usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan ;
8. Akan mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan di Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk juga melaksanakan Pakta Integritas, serta

Pact of Integrity

To enforce Good Corporate Governance in the Company, every employee has signed an integrity pact committing to the following:

1. Always follow the rules and regulations;
2. Act objectively and adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent, and uphold honesty and commitment;
3. Committed to carrying out duties and responsibilities in a trustworthy and professional manner in accordance with Good Corporate Governance principles in order to provide the best results for the Company;
4. I have never and will never make decisions or issue orders with the intent of taking advantage of the Company, either directly or indirectly, to benefit myself, my family, or specific groups.
5. Participate actively in fraud prevention and eradication efforts and are willing to report fraudulent actions within the Company; will not engage in all forms of fraudulent behavior; and will avoid actions that facilitate or provide opportunities for others to engage in fraudulent behavior.
6. Establishing a work environment free of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN);
7. Having no other positions in other Business Entities that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company;
8. Will invite business actors who are directly or indirectly related to the Company to participate in the implementation of the Integrity Pact, as well as inform the Company of the occurrence

menyampaikan informasi kepada Perusahaan tentang terjadinya dan ataupun indikasi adanya Fraud, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Penguru dan/atau Pekerja Perusahaan ;

9. Telah memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya :
   a. Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan ;
   b. Standar Etika Perusahaan ;
   c. Budaya Perusahaan ;
   d. Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko serta budaya Anti Fraud;
   e. Demi tercapainya tata kelola Perusahaan yang baik.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Laporan Gratifikasi Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal:

1. Telah menerima Gratifikasi;
2. Telah menolak suatu penerimaan dan/atau permintaan Gratifikasi;
3. Telah memberikan Gratifikasi;
4. Sama sekali tidak melakukan praktek Gratifikasi (dalam hal ini Pimpinan/Kepala Unit Kerja tidak menerima Laporan atas penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi, maka wajib melakukan pelaporan paling lambat setiap tanggal 15 Bulan berikutnya).

Pegawai Perusahaan atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Divisi Kepatuhan. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya. Proses pelaporan dalam program pengendalian Gratifikasi antara lain:

and/or indications of fraud, violations, or other illegal acts committed by the teacher and/or Company Workers

9. Have comprehended and are willing to carry out as effectively as possible:
   a. Good Corporate Governance Guidelines for the Company;
   b. Ethical Standards for the Company;
   c. Corporate Culture;
   d. Compliance Culture, Risk Culture, and Anti-Fraud Culture;
   e. In order to achieve good corporate governance.

Gratification Management Gratification

Control Mechanism Reporting

Report on Gratification Every Gratification Reporting Compulsory is required to submit a Gratification report in the following circumstances:

1. Received Gratification;
2. Rejected an acceptance and/or request for Gratification;
3. Given Gratification;
4. Completely not practicing Gratification (If the Head/Head of Work Unit does not receive a Report on the Acceptance and/or Granting of Gratification, it is required to report it by the 15th of the following month).

Employees of the Company or Third Parties who become aware of any violation of the provisions of this Code must immediately report the violation to the Compliance Division in accordance with the applicable provisions in the Company. The Company guarantees that the gratification reporting process will be kept confidential by Company Personnel and Third Parties. The reporting process in the Gratification control program includes the following steps:

1. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi Dalam Kedinasan kepada Divisi Kepatuhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.
2. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan penolakan atas Penerimaan Gratifikasi kepada Divisi Kepatuhan.
3. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan atas Pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.
4. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan permintaan dari Pihak Ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaaan yang terkait dengan kelancaran proses Bisnis Perusahaan kepada Unit Kerja terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Divisi Kepatuhan.
5. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan KoRPBi.
6. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan KoRPBi.
7. Divisi Kepatuhan menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi kepada Direksi setiap periode 3 (tiga) bulan.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Perusahaan senantiasa selalu mensosialisasikan terkait penerapan Gratifikasi kepada setiap insan Perusahaan melalui media elektronik seperti pada media social Perusahaan, pamphlet dan melalui penerbitan slogan-slogan anti Gratifikasi.

1. Every employee of the Company must report the receipt of Gratification which is considered a bribe and Gratification in Service to the Compliance Division no later than 7 (seven) working days after receiving the Gratification.
2. Every Employee of the Company must report the rejection of Gratification Acceptance to the Compliance Division.
3. Every employee of the company must report on giving to a third party that is not in accordance with the provisions of the gift.
4. Every Company Employee must report requests from Third Parties that lead to extortion and/or coercion related to the smooth running of the Company's Business processes to the relevant Work Units for further submission to the Compliance Division.
5. The Compliance Division submits to the Corruption Eradication Commission a Sheet for Handling of Gratification Acceptance Reports.
6. The Compliance Division submits to the Corruption Eradication Commission the Recapitulation Sheet for Handling and Follow-up on Revenue Reports, which are managed monthly.
7. Every three (three) months, the Compliance Division submits to the Board of Directors a Report on the Recapitulation of Handling and Follow-up on Reporting on Receipt and Granting of Gratification.

Policy of Gratification Socialization

The Company always socializes the implementation of Gratification to all of its employees via electronic media such as social media, pamphlets, and the publication of anti-Gratification slogans.

Laporan Gratifikasi 2021

Selama tahun 2021 pada Perum Jasa Tirta II tidak terdapat laporan gratifikasi.

Gratification Report 2021

There was no gratification report at Perum Jasa Tirta II in 2021.

Sanksi/Tindaklanjut atas Pengaduan tahun 2021

1. Fraud tahun 2018 telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 4 orang.
2. Fraud tahun 2019 telah dilakukan Pemberian Surat Peringatan (SP) sebanyak 6 orang, Mutasi sebanyak 3 orang, Demonasi sebanyak 1 orang, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 1 orang.
3. Fraud tahun 2020 telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 2 orang dan Pemberian Surat Peringatan (SP) sebanyak 1 orang.

Sanctions/Complaint Follow-up in 2021

1. As many as four people were arrested for fraud in 2018 (PHK).
2. Fraud in 2019 has resulted in as many as 6 people receiving warning letters (SP), 3 people transferring, 1 person protesting, and 1 person being fired (PHK).
3. Fraud in 2020 included the termination of employment (PHK) of up to two people and the provision of warning letters (SP) of up to one person.

Pelanggaran (Fraud) Internal

Pelanggaran (Fraud) Internal dilakukan oleh internal Perusahaan mapun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran (fraud) internal dilakukan oleh Internal Audit.

Internal Corruption

Internal fraud is committed by the internal or internal in collusion with the external of the company. Internal Audit is in charge of investigating internal fraud.

INTERNAL FRAUD / Internal Fraud	JUMLAH FRAUD YANG DILAKUKAN / Number Of Frauds Permitted					
	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS / Members Of The Supervisory Board		PEGAWAI TETAP / Permanent Employee		PEGAWAI TIDAK TETAP / Temporary Employees	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Total Penyimpangan / Total Fraud	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan / Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal Perseroan / In the process of completion in the Company's Internal	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaian / No solution yet	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum / Has been followed up through the Legal Process	0	0	0	0	0	0

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI
STOCK BUYBACK AND BOND BUYBACK

Buyback Saham

Hingga 31 Desember 2021 Perum Jasa Tirta II tidak pernah menawarkan dan/atau menjual sahamnya kepada pihak manapun, sehingga tidak pernah melakukan pembelian kembali (buyback) sahamnya.

Share Repurchase

Perum Jasa Tirta II has never offered and/or sold its shares to any party as of December 31, 2021, so it has never bought back (buyback) its shares.

Buyback Obligasi

Hingga 31 Desember 2021 Perum Jasa Tirta II tidak pernah menerbitkan obligasi, sehingga tidak pernah melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi.

Bond Purchase

Perum Jasa Tirta II had never issued bonds as of December 31, 2021, so it had never bought back (buyback) bonds.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN
COMPANY'S STRATEGIC PLAN

Rencana Strategis Perusahaan , baik jangka panjang maupun menengah telah dijelaskan pada bagian Strategi Perum Jasa Tirta II tahun 2021 Bab Analisis dan Pembahasaan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

The company's strategic plan, including the length and medium term, is described in the Perum Jasa Tirta II Strategy section 2021 Chapter Management Analysis and Language in this Annual Report.
There were no transactions in 2021 that involved a conflict of interest.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST

Selama tahun 2021, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

During 2021, there were no transactions containing conflicts of interest.

NAMA DAN JABATAN PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN / Name And Position Of Parties With Conflict Of Interest	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN / Name And Position Of Decision Makers	JENIS TRANSAKSI / Transaction Type	KETERANAGAN / Description
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Perselisihan Internal Perusahaan

Selama tahun 2021 tidak pernah terjadi perselisihan internal di dalam Perum Jasa Tirta II , sehingga tidak ada informasi mengenai perselisihan internal Perum Jasa Tirta II .

Disputes within the Company

There was no internal conflict within Perum Jasa Tirta II in 2021, so there is no information regarding the internal conflict of Perum Jasa Tirta II.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)

Perum Jasa Tirta II hingga tanggal 31 Desember 2021 tidak pernah mencatatkan sahamnya ataupun obligasi ke Bursa Efek Indoensia (BEI) ataupun bursa mnapun, sehingga tidak ada peristiwa yang berpotensi memunculkan praktik insider trading.

Insider Trading Avoidance

Perum Jasa Tirta II has never listed its shares or bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or any other exchange as of December 31, 2021, so there are no events that could lead to insider trading practices.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan

Perum Jasa Tirta II memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Perusahaan sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web BI dan Perum Jasa Tirta II .
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Perum Jasa Tirta II .
3. Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, rating agency, lembaga pengembangan perPerusahaan an, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II .
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan , yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan , Visi, Misi, Nilai Perusahaan , Komposisi dan Profil Dewan Pengawas dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata Kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II.

Financial and non-financial condition transparency

The company Perum Jasa Tirta II fulfills its transparency and publication of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations by submitting and publishing the following information through print media and the Company's website:

1. Monthly Financial Reports to Regulators, which are also available on the websites of the BI and Perum Jasa Tirta II.
2. Quarterly Financial Reports to Regulators, which are also made available in print and on the Perum Jasa Tirta II website.
3. Perum Jasa Tirta II Annual Report, which is prepared and presented in accordance with the provisions, and which is submitted to regulators, rating agencies, company development agencies, research institutions/institutions, and financial magazines, as well as being published on the Perum Jasa Tirta II website.
4. Corporate Governance Information, which includes the Annual Report on Corporate Governance, Vision, Mission, Corporate Values, Composition and Profile of the Supervisory Board and the Board of Directors, as well as internal governance regulations ranging from the Articles of Association to the Committees Charter, all of which are also available on the Perum Jasa Tirta II website.

5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Perum Jasa Tirta II , agar konsumen , investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perum Jasa Tirta II .
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Konsumen dalam menggunakan layanan perPerusahaan an yang dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

5. The Annual Report and the Perum Jasa Tirta II website publish information on the Company's products and services, including its office network, so that consumers, investors, and the general public can easily access information on Perum Jasa Tirta II's products and services.
6. Information on Complaint Submission Procedures, Information Security Policies, and Consumer Tips for Using the Company's Services published on the Perum Jasa Tirta II website for the implementation of consumer protection provisions
7. Other information aimed at assisting with information disclosure, financial education, and public services

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE
BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE

Salah satu komitmen Perum Jasa Tirta II dalam menjalankan praktik terbaik GCG diwujudkan melalui pencegahan dan minimalisasi potensi terjadinya praktik Bad Corporate Governance yang mampu membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan . Evaluasi atas keberhasilan pencegahan terjadinya praktik Bad Corporate Governance dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

One of Perum Jasa Tirta II's commitments in implementing GCG best practices is realized through the prevention and minimization of the potential for Bad Corporate Governance practices that can negatively impact the Company's business sustainability. The following description describes the evaluation on the success of preventing the occurrence of Bad Corporate Governance practices:

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Selama tahun 2021, tidak terdapat laporan terkait indikasi aktivitas kegiatan usaha Perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar.

Report on Environmentally Polluting Company Activities

There were no reports of the Company's business activities polluting the surrounding environment during 2021.

Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2021 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga sejalan dengan tidak terdapatnya teguran kepada Perusahaan terkait permasalahan perpajakan.

Report on Tax Obligation Fulfillment

The Company met all of its tax obligations in 2021. This is also consistent with the absence of a tax warning to the Company.

Kasus Terkait Buruh dan Pegawai

Selama tahun 2021 tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perusahaan dengan buruh atau pegawai Perusahaan . Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditunjukkan kepada Perusahaan telah dijabarkan dalam pembahasan informasi Permasalahan Hukum dalam Laporan Tahunan ini.

Cases Concerning Workers and Employees

There were no recorded cases involving the Company and its employees or employees of the Company in 2021. The discussion of Legal Issues information in this Annual Report includes a recapitulation of cases and lawsuits that have been made and/or presented to the Company.

Hubungan dengan Pejabat Publik dan Pejabat Pemerintah

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan pejabat publik dan pejabat Pemerintah melalui ketentuan hubungan kerja yang dimuat dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan .

Relationships with Public and Government Officials

Through the employment relationship provisions in the Company's Code of Conduct, the Company has a policy that regulates relations with public officials and government officials.



Water &
Renewable Energy
Learning Center
Managed by JASA TIRTA II & GROUP
Inspiring Innovation

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

OVERVIEW OF BUSINESS SUPPORT



Sumber Daya Manusia

Human Resources



Sumber Daya Manusia memiliki peran penting sebagai katalisator penggerak keberlangsungan usaha Perusahaan, sehingga kehadirannya dimaknai sebagai aset utama Perusahaan yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Kehadiran SDM terbaik yang profesional, kompeten, berdedikasi, dan berintegritas akan membuat Perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, Perum Jasa Tirta II telah mengembangkan kebijakan akomodatif dalam pengelolaan SDM dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis Perusahaan, di antaranya Sistem Kinerja Berbasis Kompetensi yang terdiri dari Kamus Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan, Sistem Penilaian Kinerja, Pengembangan Kompetensi Karyawan Pembinaan dan Pengembangan Karir Karyawan, Pembentukan Komite Appraisal, dan Sistem Remunerasi Karyawan. Berbekal kebijakan pengelolaan tersebut, Perusahaan optimis dapat mencetak SDM unggul yang mampu membawa Perusahaan pada pencapaian usaha yang lebih baik secara berkelanjutan.

Human Resources have an important role as a catalyst for driving the Company's business continuity, so that its presence is interpreted as the Company's main asset that requires good management. The presence of the best human resources who are professional, competent, dedicated, and with integrity will make the Company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve the vision and mission that has been set. In order to fulfill these interests, Perum Jasa Tirta II has developed an accommodative policy in HR management based on the Company's strategy and business plan, including a Competency-Based Performance System consisting of a Competency Dictionary and Position Competency Needs, Performance Assessment System, Employee Competency Development Coaching and Employee Career Development, Establishment of Appraisal Committee, and Employee Remuneration System. Armed with these management policies, the Company is optimistic that it can produce superior human resources who are able to lead the Company to achieve better business achievements on an on going basis.

STRUKTUR PENGELOLA SDM

Pengelolaan SDM di Perum Jasa Tirta II berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko. Saat ini, Kepala Divisi SDM dijabat oleh Euis Rina Rismayanti Profil beliau telah tercantum pada Laporan Tahunan ini, di bagian Profil Kepala Divisi.

HR MANAGEMENT STRUCTURE

HR management at Perum Jasa Tirta II is under the Human Resources Division, which reports to the Director of Finance, HR and Risk Management. At present, the Head of the HR Division is held by Euis Rina Rismayanti. His profile is contained in this Annual Report, in the Division Head Profile section.



TUGAS POKOK DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Pengelolaan organisasi;
- Membuat peraturan kepegawaian dan sumber daya yang meliputi pengembangan organisasi, budaya kerja, dan peraturan dan prosedur kepegawaian;
- Perencanaan karyawan;
- Pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan;
- Pembinaan pengamanan.

MAIN DUTIES OF THE HUMAN RESOURCES DIVISION

The Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has the following main duties and responsibilities:

- Organizational management;
- Issue staffing and resource regulations covering organizational development, work culture, and staffing rules and procedures;
- Employee planning;
- Employee development and training, employee welfare, health and safety;
- Security training.

PROGRAM DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Program kerja Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut :

- Memastikan rencana kerja dan anggaran yang disusulkan telah mempertimbangkan risiko;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Memastikan adanya rencana strategi jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai kebijakan dan pengelolaan organisasi, peraturan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia;
- Menjamin berjalannya kegiatan pemenuhan dan alokasi karyawan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta kebutuhan perusahaan.
- Menjamin terlaksananya program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan potensi karyawan;
- Menjamin pengelolaan data kepegawaian secara terintegritas dan berbasiskan sistem informasi;
- Memberi bimbingan teknis dan sosialisasi kepada unit kerja dalam hal pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain terkait dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Membuat pelaporan kinerja penyelenggaraan tugas- tugas sesuai dengan bidangnya.

KOMPOSISI DAN JUMLAH KARYAWAN PERUM JASA TIRTA II

Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah karyawan Perusahaan tercatat sebanyak 1.046 orang, berkurang sebanyak 34 orang dibandingkan jumlah pegawai tahun 2020 sebanyak 1.080 orang. Informasi demografi karyawan Perusahaan berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, level jabatan, kompetensi, dan status kepegawaian dimuat pada tabel-tabel berikut :

HUMAN RESOURCES DIVISION PROGRAM

The work programs of Perum Jasa Tirta II HumanmResources Division are as follows :

- Ensure that the proposed work plan and budget has taken risks into consideration;
- Carry out supervision and training of the implementation of organizational development activities, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;
- Ensure that there are short, medium and longterm strategic plans regarding organizational policies and management, staffing regulations and human resources management;
- Ensuring the fulfillment and allocation of employee activities in accordance with applicable provisions and procedures and company needs.
- Ensure the implementation of education programs, training, and employee development in accordance with company needs and employee potential;
- Guarantee the management of staffing data in an integrated and information-based system;
- Provide technical guidance and dissemination to work units in terms of organizational development, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;
- Coordinate and build work relations with other work units related to other parties in carrying out their duties;
- Prepare a performance report on the implementation of tasks in accordance with their fields.

COMPOSITION AND NUMBER OF EMPLOYEES OF PERUM JASA TIRTA II

As of December 31, 2021, the number of employees of the Company was recorded at 1,046 people, a decrease of 34 people compared to the number of employees in 2020 of 1,080 people. Demographic information of the Company's employees based on age, education, gender, position level, competence, and employment status is contained in the following tables :

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia | Employee Composition based on Age

JUMLAH KARYAWAN / NUMBER OF EMPLOYEES					
USIA / AGE	2021	2020	2019	2018	2017
18-25	50	99	147	143	191
26-35	377	356	340	243	103
36-45	316	326	328	304	244
46-55	300	299	288	241	342
> 55	3	0	1	0	132
Jumlah / Total	**1.046**	**1.080**	**1.104**	**964**	**979**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin | Employee Composition based on Gender

JUMLAH KARYAWAN / NUMBER OF EMPLOYEES					
JENIS KELAMIN / GENDER	2021	2020	2019	2018	2017
Perempuan / Female	198	198	197	178	169
Laki-laki / Male	848	882	907	786	810
Jumlah / Total	**1.046**	**1.080**	**1.104**	**964**	**979**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan | Employee Composition based on Education

JUMLAH KARYAWAN / NUMBER OF EMPLOYEES					
PENDIDIKAN / EDUCATION	2021	2020	2019	2018	2017
SD / Elementary	5	6	7	13	17
SLTP / Junior High School	6	10	12	21	27
SLTA / Senior High School	659	682	700	580	597
Diploma / Diploma	88	90	90	82	83
Sarjana / Undergraduate	244	248	250	223	211
Pasca Sarjana / Postgraduate	44	44	45	45	44
Jumlah / Total	**1.046**	**1.080**	**1.104**	**964**	**979**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan | Employee Composition based on Position

JUMLAH KARYAWAN / NUMBER OF EMPLOYEES					
JABATAN / POSITION	2021	2020	2019	2018	2017
Kepala Divisi/GM SE TK I / Head of Division/GM SE Lv I	33	34	29	27	20
Manajer/SE TK III / Manager/SE Lv II	57	58	55	54	58
Asisten Manajer/SE TK III / Assistant Manager/SE Lv III	133	136	123	124	121
Supervisor / SE TK IV / Supervisor /SE Lv IV	283	266	223	228	246
Staff	540	586	674	531	534
Jumlah / Total	**1.046**	**1.080**	**1.104**	**964**	**979**

HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan, diperlukan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan Perusahaan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II telah membentuk Serikat Karyawan sebagai wadah penyampaian aspirasi karyawan kepada Perusahaan.

Hubungan yang saling mendukung dan terpenuhinya hak serta kewajiban kedua belah pihak dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Jasa Tirta II yang merupakan hasil perundingan antara kedua belah pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PKB Perum Jasa Tirta II telah terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/ HI.00.01/00.0000.220209001/B/III/2022.

Selain itu, dalam rangka menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis sekaligus membangun keterikatan karyawan baik lini vertikal maupun horizontal, Perum Jasa Tirta II juga setiap tahunnya menyelenggarakan Gathering Perum Jasa Tirta II yang diikuti mulai dari tingkat Pelaksana sampai tingkat Direksi dan Dewan Pengawas.

Guna menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan, Perum Jasa Tirta II membentuk Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 4 guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Seiring dengan perjalanan waktu, Serikat Karyawan Jasa Tirta II selain sebagai wadah berserikat dan penghubung antara pegawai dan manajemen, juga berfungsi sebagai marwah proses bisnis Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).

Struktur organisasi pengurus Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II untuk periode 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

HARMONIOUS INDUSTRIAL RELATIONS

Perum Jasa Tirta II realizes that to increase employee productivity and involvement, harmonious industrial relations are needed between employees and the Company. Therefore, Perum Jasa Tirta II has formed an Employee Union, as a forum for delivering employee aspirations to the Company.

This mutually supportive relationship between the Employee Union and the Company is set forth in the Perum Jasa Tirta II Collective Labor Agreement (PKB) which is the result of negotiations between the two parties which contain work conditions, rights and obligations of both parties based on statutory provisions. PKB Perum Jasa Tirta II has been registered in the Decree of the Director General of Industrial Relations Development and Workers' Social Security No. KEP.4/ HI.00.01/00.0000.220209001/B/III/2022.

In addition, in order to create an atmosphere of a harmonious and dynamic work environment while at the same time building employees' ties both vertically and horizontally, Perum Jasa Tirta II also annually organizes the Perum Jasa Tirta II Gathering which starts from the level Implementing up to the level of Directors and Supervisory Board.

In order to guarantee freedom of association for employees, Perum Jasa Tirta II established the Perum Jasa Tirta II Employee Union based on 1945 Constitution article 4 to provide protection, defense of rights and interests, as well as to improve decent welfare for workers/laborers and their families. Along with the passage of time, the Tirta II Workers Employee Union, aside from being a union and liaison between employees and management, also functions as a part of the Company's business processes in accordance with the principles of good corporate governance.

The organizational structure of the management of the Perum Tirta II Employee Union for the period 2021 - 2025 is as follows:

NAMA / NAME	JABATAN / POSITION
Ir Syahril Mubarok	Ketua Umum / Chairman
Sugeng Riyanto	Sekretaris Jenderal / Secretary General
Yedi Apriyadi	Bendahara Umum / General Treasurer

REKRUTMEN KARYAWAN

Selama tahun 2021, Perusahaan telah merekrut sebanyak 5 orang. Informasi mengenai rekapitulasi tingkat perputaran karyawan Perum Jasa Tirta II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PEMPLOYEE RECRUITMENT

During 2021, the Company recruited 5 people. Information regarding recapitulation of Perum Jasa Tirta II employee turnover in 2021 is as follows :

NAMA / NAME	JABATAN / POSITION
Penambahan Karyawan / Additional Employees	5
Pengurangan Karyawan / Reduction of Employees	34
Pensiun / Retired	27
Pengunduran Diri / Resigned	-
Pemberhentian dengan tidak hormat / Dishonorable Discharge	-
Lain-lain (Meninggal Dunia) / Others (Passed Away)	12
Tingkat Perputaran Karyawan / Turn Over Rate	18

MANAJEMEN JENJANG KARIER

Sebagai bagian dari program pengelolaan dan pengembangan karyawan berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan jenjang karier karyawan guna memberikan peluang bagi insan Perusahaan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi dan potensi individual yang dimiliki. Manajemen pengembangan karier ditujukan tidak hanya sebagai perencanaan suksesi dan manpower planning bagi Perusahaan, tetapi juga sebagai salah satu upaya retensi karyawan. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menyusun proyeksi jenjang yang akan dilalui oleh karyawan selama meniti karier di Perusahaan.

Pengembangan karier karyawan melalui mutasi (promosi dan rotasi) dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek utama, antara lain hasil penilaian kinerja, kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan pengalaman kerja. Sesuai dengan kebijakan dasar dalam pengelolaan SDM, Perum Jasa Tirta II menerapkan asas kesetaraan dalam menetapkan mutasi karyawan tanpa membedabedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Pada level jabatan tertentu, Perusahaan juga mempertimbangkan kriteria kepemimpinan dan beberapa kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memerlukan kebijakan dalam mempertimbangkan sesuatu dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Komitmen Perusahaan terhadap kualitas SDM unggul diwujudkan melalui implementasi penilaian kinerja karyawan secara berkala dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II telah merancang program penilaian kinerja karyawan yang komprehensif, objektif, dan transparan. Program tersebut telah terintegrasi dan diatur dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berdasarkan pada pencapaian dan pemenuhan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan. Implementasi penilaian kinerja karyawan juga memungkinkan Perusahaan untuk menjaga komunikasi dan controlling yang tepat dan terukur dari atasan kepada karyawannya.

Penilaian kinerja dilakukan secara online yang terbagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja karyawan. Hasil penilaian kinerja karyawan selanjutnya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun proyeksi pengembangan karier, sistem remunerasi dan penghargaan, hingga sistem pengembangan kompetensi. Adapun kriteria yang turut dipertimbangkan dalam penilaian kinerja antara lain kompetensi teknis, kompetensi perilaku, cara kerja, dan output atau hasil yang dicapai berdasarkan KPI yang telah ditetapkan.

CAREER MANAGEMENT

As part of the ongoing employee management and development program, Perum Jasa Tirta II has a career path policy for employees to provide opportunities for Company people to develop themselves in accordance with the needs of positions in the organization and individual potential they possess. Career development management is aimed not only at succession planning and manpower planning for the company, but also as an effort to retain employees. The Company's management is responsible for planning and preparing projected levels that will be passed by employees during their careers at the Company.

Employee career development through mutation (promotion and rotation) is done by taking into account the main aspects, including the results of performance appraisal, company needs, competencies and work experience. In accordance with basic policies in the management of human resources, Perum Jasa Tirta II applies the principle of equality in determining employee mutations without discriminating against ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition. At a certain level of position, the Company also considers leadership criteria and several other criteria that are appropriate to the position needs that require policy in considering something and accuracy in decision making.

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

The Company's commitment to producing excellent quality human resources is realized through the implementation of employee performance appraisals on a regular and ongoing basis. In this case, the Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has designed a comprehensive, objective and transparent employee performance evaluation program. The program has been integrated and regulated in a Performance Management System (SMK) based on the achievement and fulfillment of a Key Performance Indicator (KPI) that has been determined. The implementation of employee performance appraisal also allows the Company to maintain precise and measured communication and control from superiors to their employees.

Performance appraisal is conducted online which is divided into several stages, including the stages of planning, monitoring, and measuring employee performance. The results of the employee performance appraisal will further serve as a basis for management to prepare projections for career development, remuneration and reward systems, and competency development systems. The criteria included in the performance evaluation include technical competencies, behavioral competencies, work methods, and outputs or results achieved based on established KPIS.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Menggenapi tujuan pengelolaan karyawan berkelanjutan, Perusahaan memastikan bahwa kompetensi dan keahlian karyawan senantiasa sesuai dan relevan dengan perkembangan pengetahuan dan kondisi industri yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan memberlakukan program pengembangan kompetensi karyawan. Pengembangan kompetensi menjadi salah satu bagian dari perencanaan bisnis serta kebutuhan jabatan Perusahaan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan keahlian dan kompetensi yang disyaratkan.

Adapun program pengembangan kompetensi karyawan yang diberikan berupa pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop baik yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan maupun pihak eksternal. Selama tahun 2021, Perusahaan telah merealisasikan biaya sebesar Rp3.935.896.943 untuk membekali karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Informasi mengenai jenis pelatihan, nama pelatihan, jumlah peserta, serta tanggal pelatihan dimuat dalam tabel sebagai berikut :

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Fulfilling the objectives of sustainable employee management, the Company ensures that employee competencies and expertise are always appropriate and relevant to the development of knowledge and dynamic industry conditions. To realize this goal, the Company has implemented an employee competency development program. Competency development is a part of business planning and the needs of the Company's position by adjusting to therequired expertise and competency requirements.

The employee competency development program provided is in the form of training, education, seminars, and/or workshops held both by the internal company and external parties. During 2021, the Company has spent Rp3,935,896,943 to provide education and training programs for employees. Information about the type of training, the name of the training, the number of participants, and the date of the training is contained in the following table :

Program Pengembangan Kompetensi Karyawan | Employee Competency Development Program

INDIKATOR / INDICATOR	2021	2020	2019	2018
Jumlah Pelatihan / Number of Training	84	79	62	84
Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pelatihan (dalam orang) / Number of Employees Attending Training (in person)	1931	2.575	2.514	582
Jumlah Jam Pelatihan (dalam jam) / Number of Training Hours (in hours)	34.125	34.230	41.762	2.128
Jumlah / Total	**4.233.826.955**	**3.935.896.943**	**4.479.054.458**	**2.916.276.815**

KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Remunerasi

Perum Jasa Tirta II senantiasa menjunjung asas kesetaraan (fairness) dan kompetitif (competitiveness) dengan industri sejenis dalam penyediaan remunerasi karyawan yang disesuaikan dengan faktor internal seperti bobot kerja serta faktor eksternal seperti ketentuan pengupahan yang berlaku. Perusahaan meyakini bahwa penyediaan kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan bobot kerja yang diemban mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja terbaik sekaligus menarik calon karyawan potensial serta mempertahankan karyawan terbaik di Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan pengupahan yang berlaku, struktur remunerasi yang disediakan meliputi :

EMPLOYEE WELFARE POLICY

Remuneration

Perum Jasa Tirta II always upholds the principle of fairness and competitiveness with similar industries in providing employee remuneration that is adjusted to internal factors such as work weight and external factors such as applicable wage provisions. The Company believes that providing competitive compensation in accordance with the workload carried out can encourage employees to produce the best performance while attracting potential employees and retaining the best employees in the Company.

As stipulated in the Collective Labor Agreement and applicable wage provisions, the remuneration structure provided includes:

Penghasilan tetap yang terdiri dari :
- Gaji Pokok
- Tunjangan Grade
- Tunjangan Posisi
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Khusus Pajak

Penghasilan tidak tetap berupa :
- Tunjangan kinerja I, yang terdiri dari tunjangan Jasa Produksi (Jasprod) & Insentif.
- Tunjangan hari raya keagamaan
- Tunjangan Kinerja II
- Tunjangan Penempatan Wilayah Kerja

Dalam menentukan besaran penghasilan tetap, yakni gaji pokok, Perum Jasa Tirta II mengacu pada aspek aturan hukum yang mengatur upah minimum dan kelayakan yang didasarkan pada beberapa indikator, termasuk inflasi. Sedangkan besaran penghasilan tidak tetap dihitung berdasarkan unjuk kerja perusahaan dan ketentuan yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

Pelayanan Kesehatan
Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dan keluarganya serta karyawan purnabakti beserta istri/suami dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karyawan purnabakti beserta istri/suami yang sah juga diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah memasuki masa pensiun.

Program Imbalan Pasca Kerja
Perum Jasa Tirta II menaruh perhatian kepada karyawan yang telah berkarya dan mengabdikan kontribusinya kepada Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selain program jaminan kesehatan dan pelatihan persiapan masa purnabakti, Perusahaan memberikan program pensiun guna menjamin kesejahteraan bagi karyawan setelah memasuki masa kerja. Perusahaan memiliki lembaga pengelola dana pensiun independen bagi karyawan Perum Jasa Tirta II yang pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.151/KM.17/2000 tanggal 15 Mei 2000 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000.

Selain Program Pensiun Manfaat Pasti, Perum Jasa Tirta II juga memberikan program imbalan pasca kerja manfaat pasti dalam bentuk Uang Pesangon/ Uang Jasa yang diatur dalam peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor PRD-9/DIR/06/2020 dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2019-2021.

Fixed income consisting :
- Basic salary
- Grade allowance
- Position allowance
- Family allowances
- Special Tax Allowance

Non-permanent income in the form of :
- Performance allowance I, which consists of allowances ProductionServices& Incentive.
- Religious holiday allowance
- Performance Allowance II
- Work Area Placement Allowance

In determining the amount of fixed income, namely basic salary, Perum Jasa Tirta II refers to aspects of the legal rules that regulate minimum wages and feasibility based on several indicators including inflation. Meanwhile the amount of nonfixed income is calculated based on the company's performance and applicable regulations and by taking into account the company's capabilities.

Health Services
The company includes all employees and their families and retired employees and their wives/ husbands in a health insurance program organized by the Health Social Security Organizing Agency (BPJS). For full-time employees and their legal wives/ husbands, they are included in the health insurance program for a period of 2 (two) years after retirement.

Post-employment Rewards Program
Perum Jasa Tirta II pays attention to employees who have worked and dedicated their contributions to the Company within a certain period of time In addition to the health insurance program and post-retirement preparation training, the Company provides a pension program to ensure the welfare of employees after entering service. The company has an independent pension fund management institution for employeesofPerumJasaTirt II,theestablishmentofwhichhas been determined based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP.151/KM.17/2000 dated May 15, 2000 starting from January 1, 2000.

In addition to the Defined Benefit Pension Program, Perum Jasa Tirta II also provides defined benefit postemployment benefits in the form of severance pay/ service fees, which are stipulated in the regulation of PJT II Directors' Decree Number PRD- 9/ DIR/06/2020 and Collective Labor Agreement 2019-2021.

Di samping penyediaan pengelolaan imbalan pasca kerja, Perusahaan juga memberikan pembekalan mental dan peluang pasca kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun berupa seminar dan sosialisasi peluang- peluang berwirausaha guna memotivasi karyawan untuk meraih kesejahteraan yang baik di masa pensiun.

In addition to providing post-employment benefits management, the Company also provides mental training and post-employment opportunities for employees who are entering retirement in the form of seminars and socialization of entrepreneurial opportunities to motivate employees to achieve good welfare in retirement.

PENGHARGAAN KARYAWAN

Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan pemberian penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk mencetak produktivitas dan kreativitas kerja sekaligus memelihara kebanggaan dan semangat kerja karyawan. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang terbukti telah menunjukkan kesetiaan dalam mengabdikan masa kerjanya dalam jangka waktu tertentu, meraih prestasi kerja yang luar biasa, atau telah berjasa kepada Perusahaan.

EMPLOYEE AWARD

Perum Jasa Tirta II has an award policy that aims to motivate employees to produce work productivity and creativity while maintaining employee pride and enthusiasm. Awards are given to employees who have been shown to show loyalty in dedicating their tenure to a certain period of time, achieving outstanding work performance, or have served the Company.

Jenis penghargaan yang diberikan terdiri atas Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, Satya Karya Tiga Puluh Tahun, dan Tunjangan Kinerja II berupa uang tunai dan/atau Natura sebagai bentuk penghargaan dari Direksi. Adapun prestasi yang dikategorikan layak untuk memperoleh penghargaan antara lain pelaksanaan tugas dan kewajiban secara luar biasa, penemuan temuan baru, kontribusi ekstra dari karyawan secara individual maupun kelompok, dan prestasi serta kontribusi lainnya yang dianggap berjasa bagi Perusahaan.

The types of awards that are given consist of Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, and Satya Karya Thirty Years and Performance Allowance II in the form of cash and/or Natura which is a Board of Directors award given to employees for carrying out duties and obligations outside usual, finding new findings, extra contributions from employees, both individuals and groups that are considered meritorious for the Company.

Penetapan Penghargaan | Determination of Awards

INDIKATOR / INDICATOR	BENTUK / FORM	WAKTU PEMBERIAN / TIME OF AWARDING	JUMLAH PENERIMA TAHUN 2021 (DALAM ORANG) / TOTAL AWARDEES IN 2021 (IN PERSON)
Satya Karya Sepuluh Tahun	Piagam dan Uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 10 tahun / Employees who have had continuous and uninterrupted years of services for at least 10 years	95
Satya Karya Dua Puluh Tahun	Piagam dan Uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 20 tahun / Employees who have had continuous and uninterrupted years of services for at least 20 years	108
Satya Karya Tiga Puluh Tahun	Piagam dan Uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 30 tahun / Employees who have had continuous and uninterrupted years of services for at least 30 years	0

KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER

Mengintegrasikan tujuan pengelolaan SDM yang adil dan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Perusahaan menerapkan kebijakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh karyawan tanpa membeda-bedakan gender, agama, ras, suku, golongan, maupun kondisi fisik dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, penilaian dan evaluasi kinerja, pemberian kesempatan pengembangan karier dan kompetensi, maupun pemenuhan hak remunerasi dan kompensasi.

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Menjadi bagian dari tanggung jawab Perusahaan, Perum Jasa Tirta II menempatkan pentingnya pemeliharaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sebagai prioritas. Hal ini ditujukan agar setiap karyawan dapat bekerja secara aman, nyaman, dan sehat serta bebas dari faktorfaktor yang berpotensi mengurangi produktivitas dan membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk melakukan Continuous Improvement dalam pengelolaan K3 secara menyeluruh dan difokuskan pada terciptanya kinerja K3 yang zero accident atau tingkat kecelakaan nihil.

Dalam menjamin pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di lingkungan operasional, Perum Jasa Tirta telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di salah satu unit kerja yang memiliki high risk atau potensi risiko tinggi yaitu Unit Usaha PLTA.

Selama tahun 2021, Perum Jasa Tirta II telah merealisasikan program pengembangan dan pemeliharaan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain :

1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan mengadakan seminar “Fire Behaviour” di Triwulan I Tahun 2021.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi K3 di Triwulan II, III, dan IV Tahun 2021.
3. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) RisikoTinggi di Triwulan II Tahun 2021.
4. Pelaksanaan kegiatan Donor Darah di setiap triwulan tahun 2021.
5. Pelaksanaan kegiatan Dokter Keliling di setiap triwulan ahun 2021.
6. Pelaksanaan simulasi kebakaran di unit usaha Wilayah II di Triwulan IV tahun 2021.
7. Pendistribusian kekurangan seragam tahun 2018 dan seragam wearpack tahun 2021.
8. Pelaksanaan kegiatan olahraga setiap hari Jumat.

GENDER EQUALITY POLICY

Integrating the objectives of managing human resources fairly and upholding the principles of Human Rights (HAM), the Company applies a policy of equality and justice for all employees without discriminating gender, religion, race, ethnicity, class, or physical conditions in employee recruitment and selection, assessment and performance evaluation, career opportunity and competency development opportunities, as well as fulfillment of remuneration and compensation rights.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Being part of the Company’s responsibilities, Perum Jasa Tirta II places importance on maintaining the occupational health and safety (OHS) aspects of employees as a priority. It is intended that every employee can work safely, comfortably, and healthily and free from factors that have the potential to reduce productivity and endanger themselves and the environment. Therefore, Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out Continuous Improvement in overall OHS management and is focused on creating OHS performance with zero accident or zero accident rate.

In ensuring the fulfillment of occupational health and safety aspects for employees in the operational environment, Perum Jasa Tirta has implemented Government Regulation Number 50 Year 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems, in one work unit that has a high risk, namely the Business Unit Hydropower.

During 2021, Perum Jasa Tirta II has implemented a development and maintenance program on Occupational Health and Safety (OHS) quality, including :

1. Implementation of OHS Month by holding a seminar on “Fire Behavior” in the First Quarter of 2020.
2. OHS Monitoring and Evaluation Implementation in Quarter II, III and IV of 2019.
3. Implementation of High-Risk Medical Check Up (MCU) in the Second Quarter of 2019.
4. Implementation of Blood Donation activities in each quarter of 2019.
5. The implementation of Mobile Medical Checkup activities in each quarter of 2019.
6. Implementation of fire simulations in Region II business units in Quarter IV of 2019.
7. Distribution of 2018 uniform shortages and 2019 uniform wearpack.
8. Implementation of sports activities every Friday.

LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN SDM BERBASIS KOMPETENSI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) oleh Divisi Sumber Daya Manusia. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester I Tahun 2021 dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2021 serta Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester II Tahun 2021 dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2021.
2. Survei Persepsi Karyawan meliputi Survei Kepuasan Karyawan dan Survei Keterikatan Karyawan periode Semester I Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2021 serta periode Semester II Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2021.
3. Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Triwulan I, II, dan IV Tahun 2021.
4. Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian pada Triwulan I dan III Tahun 2021.
5. Pemutakhiran Data Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada Triwulan I, II dan IV Tahun 2021.
6. Evaluasi Penilaian Calon Karyawan Triwulan II dan IV Tahun 2021.
7. Pelaksanaan Asesmen Calon Direksi pada Triwulan III Tahun 2021.
8. Pelaksanaan Asesmen Calon Manajemen Utama pada Triwulan III dan IV Tahun 2021.
9. Pelaksanaan Uji Portofolio pada Triwulan I Tahun 2021. 10.Pemberian Piagam Satya Karya pada Triwulan II Tahun 2021.
11. Pemberian Logam Mulia kepada Pensiunan PJT II pada Triwulan III dan IV Tahun 2021.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF COMPETENCY- BASED HR MANAGEMENT IN 2021

During 2021, the Company has carried out Competency Based Human Resources Management (MSDM-BK) by the Human Resources Division. The activities that have been carried out include :

1. Evaluation of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Individual Employee Competency Assessment for Semester I of 2021 was conducted in Quarter III of 2021 and Assessment of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Assessment of Employee Individal Competency for Semester II of 2021 carried out in Quarter IV of 2021.
2. The Employee Perception Survey covers the Employee Satisfaction Survey and the Employee Engagement Survey for Semester I of 2021 conducted in Quarter III 2021 and Semester II of 2021 which was conducted in Quarter IV of 2021.
3. Sudden Inspection (Sidak) in Quarter I, II, and IV of 2021. 4. Personnel Monitoring and Evaluation in Quarter I and III of 2021.
5. Updating of Certificate Data for Obtaining Family Benefits Payment (SKUMPTK) in Quarter I, II and IV of 2021.
6. Evaluation of Employee Candidates for Quarter II and IV of 2021.
7. Implementation of Assessment of Prospective Directors in Quarter III of 2021.
8. Implementation of the Main Management Candidate Assessment in Quarter III and IV of 2021.
9. Implementation of Portfolio Test in the First Quarter of 2021.
10. Award of Satya Karya Charter in the Third Quarter of 2021.
11. Awarding Logam Mulia to Retired PJT II in Quarter III and IV of 2021.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2021
Education and Training 2021

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2021 Education and Training 2021	JUMLAH Total
1.	Sertifikasi K3 Umum General K3 Certification	7
2.	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Lembaga Pelatihan (Metodologi Pengajaran) Competency Certification for Training Institute Managers (Teaching Methodology)	14
3.	Sertifikasi Kompetensi Pengembangan SDM sesuai SKKNI HR Development Competency Certification according to SKKNI	2 6
4.	Sertifikasi Auditor SMK3, Sertifikasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia SMK3 Auditor Certification, Certification of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia	1
5.	Pelatihan & Sertifikasi Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Corporate Hygiene, Health and Safety Training & Certification	3
6.	Sertifikasi Kompetensi Kerja Personil Petugas Pengambil Contoh Air (PPCA) Work Competency Certification of Water Sampling Officers (PPCA)	8
7.	Sertifikasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) First Aid Certification in Accidents (P3K)	10
8.	Sertifikasi Manajemen Risiko CRMO CRMO Risk Management Certification	3
9.	Sertifikasi Manajemen Risiko CRMP CRMP Risk Management Certification	3
10.	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Higiene Industri Muda (HIMU) Young Industrial Hygienist Training and Certification (HIMU)	6
11.	Training dan Sertifikasi Staff Remunerasi Bersertifikat BNSP BNSP Certified Remuneration Staff Training and Certification	30
12.	In House Training dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa In House Training and Certification of Procurement of Goods and Services	15
13.	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Proyek Tingkat Muda Young Level Project Management Training and Certification	37
14.	Sertifikasi Keahlian Sumber Daya Air Melalui Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Certification of Water Resources Expertise Through the Association of Indonesian Hydraulic Engineers (HATHI)	30
15.	Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Electrical Engineering Certification	15
16.	Sertifikasi Manajemen Air Minum Drinking Water Management Certification	37
17.	Sertifikasi ICT Project Manager & IT Project Supervisor ICT Project Manager & IT Project Supervisor Certification	30
18.	Digital Public Training Asesor Untuk Persiapan Digital Assessment Digital Public Training Assessors for Digital Assessment Preparation	18
19.	Pelatihan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Training	16
20.	Pelatihan Dasar-Dasar Audit Audit Fundamentals Training	2

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2021 Education and Training 2021	JUMLAH Total
21.	Pengukuhan Gelar PIA (Acep Supriatna) Inauguration of PIA Degree (Acep Supriatna)	27
22.	Bimbingan Teknis Microsoft Application Project Microsoft Application Project Technical Guidance	1
23.	Bimbingan Teknis River Basin Organization Performance River Basin Organization Performance Technical Guidance	1
24.	Pelatihan SOP Pintu Radial Ubrug Ubrug Radial Door SOP Training	28
25.	Pelatihan Keamanan Bendung dan Bendungan Dam and Dam Safety Training	11
26.	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Irrigation Network Operation and Maintenance Training	10
27.	Pelatihan Pengelolaan Data Sumber Daya Air Water Resources Data Management Training	20
28.	Bimbingan Teknis PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air PP Technical Guidance Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management Aspects of Water Quality Protection and Management	5
29.	Bimbingan Teknis Petugas Operasi & Pemeliharaan Operation & Maintenance Officer Technical Guidance	6
30.	Pelatihan Pemeliharaan Instalasi Listrik PLTA PLTA Electrical Installation Maintenance Training	25
31.	Pelatihan Programmable Logic Controller (PLC) Programmable Logic Controller (PLC) Training	23
32.	Pelatihan Topografi Bendungan Dam Topography Training	16
33.	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Dam Operation and Maintenance Training	22
34.	Pengambilan Contoh Uji Air Water Test Sampling	20
35.	Pelatihan Pemahaman Standar ISO 17025:2017 Persyaratan Kompetensi Laboratorium ISO 17025:2017 Understanding Training on Laboratory Competency Requirements	3
36.	Webinar Step by Step - Chemistry Laboratory Risk Assessment Webinar Step by Step - Chemistry Laboratory Risk Assessment	7
37.	Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri Domestic Component Level Training	20
38.	Pelatihan Marketing dan Pelayanan Pelanggan Marketing and Customer Service Training	25
39.	Pelatihan Digital Marketing in Practice Digital Marketing in Practice Training	11
40.	Pelatihan Chartered Financial Analyst Level 1 Course Chartered Financial Analyst Level 1 Cours	5

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2021 Education and Training 2021	JUMLAH Total
41.	Pendidikan Lanjutan Penilaian 1 (PLP) Properti Online - MAPPI Pusat Jakarta Continuing Education Appraisal 1 (PLP) Online Property - MAPPI Pusat Jakarta	1
42.	AKHLAK Digital Internalization (Web Online Learning) AKHLAK Digital Internalization (Web Online Learning)	100
43.	Pelatihan Standar Mutu Akreditasi LPK LPK Accreditation Quality Standard Training	4
44.	Talent Secondment di Kementrian BUMN Talent Secondment at the Ministry of BUMN	1
45.	Talent Secondment Danareksa Danareksa Secondment Talent	1
46.	Risk Management Maturity Assessment/ DEWAS Risk Management Maturity Assessment/ DEWAS	1
47.	Audit Committee/ DEWAS Audit Committee/ DEWAS	1
48.	Driving Value from Value Chain Optimization and Portofolio Management of Holding Company/DEWAS Driving Value from Value Chain Optimization and Portofolio Management of Holding Company/DEWAS	2
49.	Organization fit for Sustainable Competitive Growth/ DEWAS Organization fit for Sustainable Competitive Growth/ DEWAS	4
50.	Workshop Creating Values Komisaris & Direksi BUMN Workshop Creating Values for BUMN Commissioners & Directors	2
51.	Pelatihan Practical Behaviour Base Interview Pelatihan Practical Behaviour Base Interview	6
52.	Pelatihan Living The Grand Why Bacth I Living The Grand Why Bact I Training	100
53.	Pelatihan Living The Grand Why Bacth II Living The Grand Why Bact II Training	100
54.	Pelatihan Living The Grand Why Bacth III Living The Grand Why Bact III Training	110
55.	Talent Secondment di Kementrian BUMN Talent Secondment at the Ministry of BUMN	1
56.	Talent Secondment Danareksa Danareksa Secondment Talent	1
57.	Leveraging Digital Leadership Leveraging Digital Leadership	1
58.	Pelatihan Pembekalan Masa Purnabakti di Lingkungan PJT II Retirement Debriefing Training in PJT II Environment	40
59.	Pelatihan On Boarding Commisioner, FHCI BUMN (Dewas) On Boarding Commissioner Training, BUMN FHCI (Dewas)	1
60.	Pelatihan On Boarding Directorship, FHCI BUMN (Dir PU) On Boarding Directorship Training, MUMN FHCI (Dir PU)	1

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2021 Education and Training 2021	JUMLAH Total
61.	Peringatan Satu Tahun Core Values AKHLAK One Year Commemoration of AKHLAK Core Values	100
62.	Pelatihan Agent of Change Agent of Change Pelatihan Training	35
63.	Sertifikasi Kompetensi Kerja Untuk Sekuriti Tingkat Gada Utama Work Competency Certification for Main Gada Level Security	1
64.	Partisipasi Milenial PJT II PJT II Millennial Participation	2
65.	Program Talent Secondment Kementrian BUMN RKT IV Secondment Talent Program of the Ministry of BUMN RKT IV	1
66.	Program Talent Secondment Danareksa RKT IV Danareksa RKT IV Secondment Talent Program	1
67.	Sertifikasi Human Resource Manager Human Resource Manager Certification	2
68.	Sertifikasi Human Resource Supervisor Human Resource Supervisor Certification	3
69.	Pembekalan Calon Karyawan Tahun 2021 Debriefing of Prospective Employees in 2021	8
70.	Inhouse Agent of Change on Boarding Batch II Inhouse Agent of Change on Boarding Batch II	35
71.	Program Talent Secondment Kementrian BUMN (Perpanjangan) Ministry of BUMN Talent Secondment Program (Extension)	1
72.	Program Talent Secondment Danareksa (Perpanjangan) Danareksa Secondment Talent Program (Extension)	1
73.	Seminar Motivasi dalam Rangka Hari Ibu Motivational Seminar for Mother's Day	200
74.	Pelatihan Web Programmer Web Programmer Training	7
75.	Pelatihan Driving Execution (Manajer) Driving Execution (Manager) Training	15
76.	Pelatihan Business Acumen (GM) Business Acumen (GM) Training	22
77.	Leadership Development Program Bidang Aligning Performance for Business Leadership Development Program Aligning Performance for Business	29
78.	Pelatihan Tindaklanjut ACHI "Training Leaders Alignment Session PJT II ACHI Follow-up Training "Training Leaders Alignment Session PJT II	35
79.	Leadership Development Program Bidang Change Leadership (Managing Virtual & Remote Team) Leadership Development Program for Change Leadership (Managing Virtual & Remote Team)	27
80.	Pelatihan Effective Leadership (Visionary Leadership) Effective Leadership Training (Visionary Leadership)	35

No.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2021 Education and Training 2021	JUMLAH Total
61.	Pelatihan Building Business Partnership/ Managing Business Partnership Building Business Partnership/ Managing Business Partnership training	30
62.	Pelatihan Audio System Engineer Audio System Engineer Training	9
63.	Webinar AAI 2021 Economic Outlook 2021 di Era Pandemi: Peluang dan Ancaman Bagi Perusahaan AAI 2021 Webinar Economic Outlook 2021 in the Pandemic Era: Opportunities and Threats for Companies	10
64.	Seminar Motivasi (Online): "Menjadi Wanita Tangguh & BerAKHLAK Di Masa Kini" Motivational Seminar (Online): "Becoming a Strong & Moral Woman Today"	300
65.	Seminar Nasional Bendungan Besar Big Dam National Seminar	5

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola

Penerapan GCG Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perPerusahaan an. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan Standard Operating Procedures (SOP) antara lain:

- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance);
- Charter Dewan Pengawas
- Charter Direksi
- Charter Komite Audit
- Charter Komite Pemantau Resiko
- Charter Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
- Charter Internal Audit
- Code of Conduct
- Kebijakan dan SOP Lainnya

Perum Jasa Tirta II has developed and implemented operational policies for all work units in accordance with corporate governance principles in order to improve the quality and scope of sustainable governance implementation.

GCG Implementation Governance Policy

Perum Jasa Tirta II is carried out optimally by strengthening various GCG policies and manuals in order to achieve best practices, dependable systems, and procedures in accordance with business developments and company regulations. Perum Jasa Tirta II supplements GCG implementation with a variety of policies and Standard Operating Procedures (SOP), such as:

- Supervisory Board Charter
- Board of Directors Charter
- Audit Committee Charter
- Risk Monitoring Committee Charter
- Remuneration and Nomination Committee Charter
- Coordination Charter with Supervisory Board for Director in Charge of Compliance Function and Compliance Work Unit
- Internal Audit Charter
- Code of Conduct
- Other Policies and SOPs


Water &
Renewable Energy
Learning Center
Managed by Jasa Tirta II & Group



TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology


DASHBOARD ENERGY REVIEW
PLTA DJUANDA
TOTAL
72.00 MW
UNIT 1
24.10 MW
UNIT 2
0.00 MW
UNIT 3
24.50 MW
UNIT 4
24.30 MW
UNIT 5
0.00 MW
UNIT 6
0.00 MW
MINIHYDRO
TOTAL
1.11 MW
UNIT 1
1.11 MW
UNIT 2
0.00 MW
PLANT
PLTA DJUANDA
MINIHYDRO

Teknologi Informasi
Information Technology



Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya.

Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

The development of information technology that is growing rapidly and competition between companies is increasingly competitive requires PJT II to organize and improve the quality of services based on information technology to provide the best service to customers and the public. Because technology is the main key that enables us to provide products and services to customers, measure and track business performance, and make the right management decisions for business continuity.

In order to maintain the effectiveness and efficiency as well as the relevance of IT use, the Company strives to create sustainable innovation by taking into account business needs, both in policies, processes, and the infrastructure it owns. Supported by regular evaluation mechanisms, the presence of competent IT human resources, and careful planning, the Company is optimistic that it can move progressively towards achieving the stated vision, mission and business goals.

Pada tahun 2021, PJT II kembali melaksanakan penyesuaian IT Masterplan selaras dengan Perubahan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

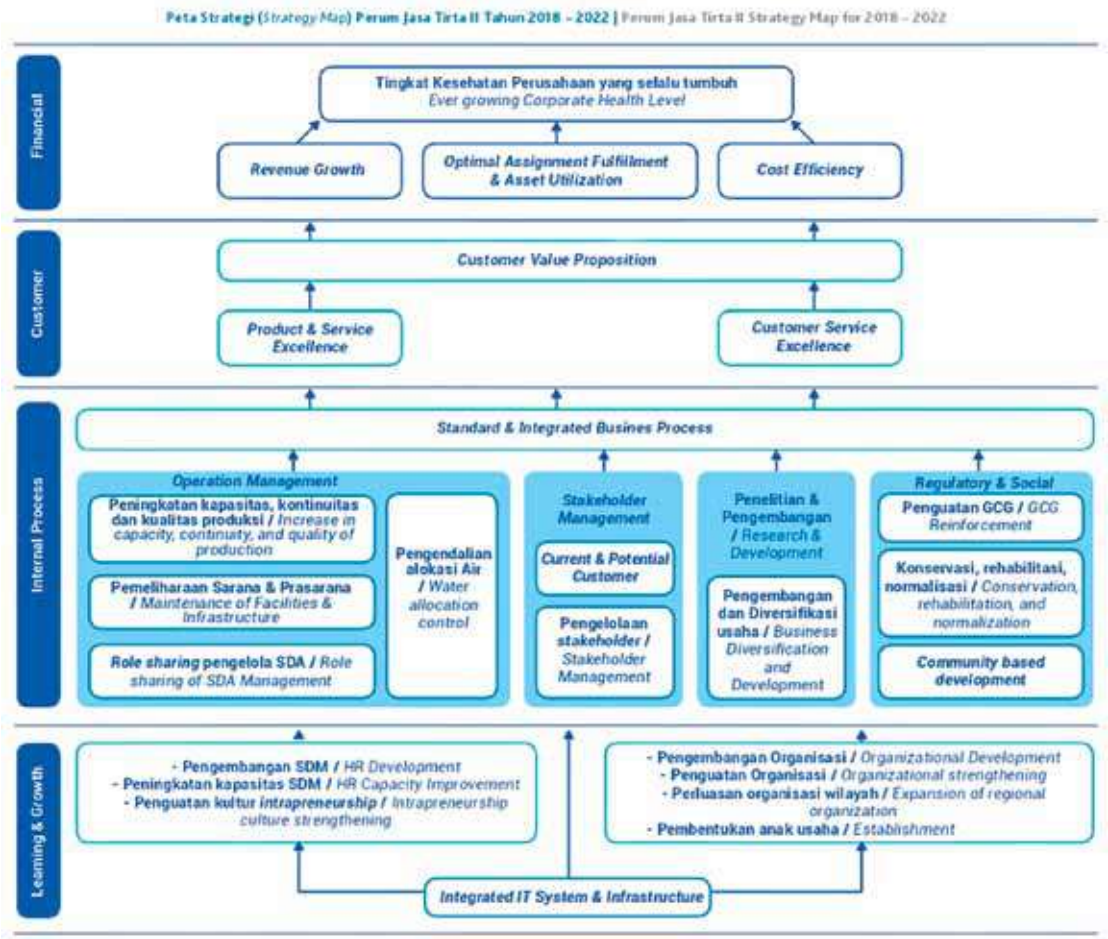
In 2021, PJT II will again carry out adjustments to the IT Master Plan in line with the Changes in the Company's Long-Term Plan (RJPP).

Didalam dokumen tersebut terdapat 3 (tiga) kategori perencanaan pengembangan IT, yang meliputi perencanaan pengembangan sistem informasi atau aplikasi, penguatan infrastruktur dan perbaikan tata kelola IT perusahaan.

In this document, there are 3 (three) categories of IT development planning, which includeplanning for information system development or applications, strengthening infrastructure and improving corporate IT governance.

Dalam rangka menyusun perencanaan pengembangan sistem informasi, maka pada tahap awal dilakukan kajian terhadap Arsitektur Bisnis PJT II sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

In order to prepare an information system development plan, at the initial stage, a study was carried out on the PJT II Business Architecture as shown in the figure below :





PETA STRATEGI TI

Tujuan Perusahaan dalam memelihara komitmen pengembangan TI secara berkelanjutan yang terarah dan terukur diwujudkan melalui penyusunan peta strategi (strategy map) TI sebagai acuan dasar yang memuat strategi utama pengembangan dan pengelolaan TI dalam proses bisnis yang dijalankan. Adapun penyusunannya didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk memperkuat lini fungsional serta arah pengembangan bisnis ke depan.

IT STRATEGY MAP

The Company's objective in maintaining IT development commitment that is directed and measurable is realized through the preparation of the IT strategy map as a basic reference that contains the main strategies for developing and managing IT in the business processes that are carried out. The preparation is based on the Company's need to strengthen functional lines and the direction of business development going forward.

RANTAI NILAI PENGELOLAAN BISNIS

Sebuah perusahaan pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mendesain, menghasilkan, memasarkan, menyajikan dan mendukung produk atau jasa yang dihasilkan. Kesatuan aktivitas tersebut direpresentasikan ke dalam suatu bentuk rantai nilai (value chain). Pendekatan rantai nilai ini membedakan aktivitas bisnis ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (1) aktivitas utama (primary activities) yang berkaitan langsung dengan core business Perusahaan; dan (2) aktivitas pendukung (supporting business) yang tidak berkaitan langsung dengan core business, tetapi pengelolaannya dapat menentukan kesuksesan aktivitas utama.

BUSINESS MANAGEMENT VALUE CHAIN

A company is basically a collection of activities carried out to design, produce, market, present and support the products or services it produces. All of these activities can be represented in the form of a value chain. This value chain approach distinguishes business activities into 2 (two) large groups, namely (1) Primary activities, which are directly related to the company's core business; and (2) supporting activities that are not directly related to the core business but their management can determine the success of the main activities.

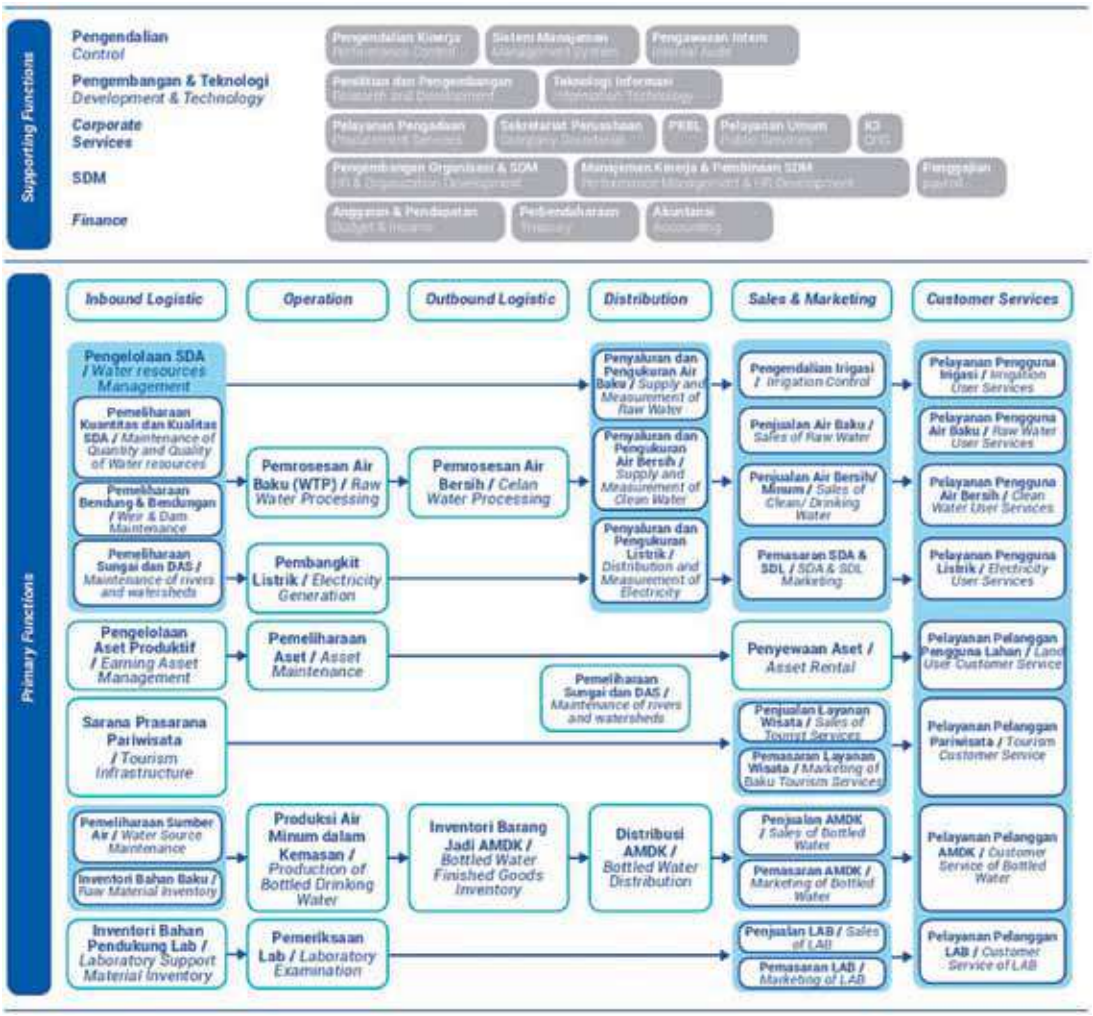
Aktivitas-aktivitas tersebut dikelola oleh perusahaan menggunakan instrumen unit/fungsi bisnis yang dimuat dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, guna memahami bisnis yang dikelola Perum jasa Tirta II maka perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh fungsi bisnis yang terdapat di Perusahaan sehingga dapat dianalisis sejauh mana kebutuhan fungsi, dukungan, dan infrastruktur TI bagi kelancaran operasional bisnis yang dijalankan.

These activities are managed by the company using business unit/function instruments contained in the organizational structure responsible for managing the effectiveness and efficiency of overall business activities. Thus, in order to understand the business managed by Perum Jasa Tirta II, it is necessary to identify all business functions in the Company so that it can be analyzed the extent to which the needs of functions, support, and IT infrastructure for the smooth running of business operations are run.

Adapun model rantai nilai bisnis Perum Jasa Tirta II diuraikan dalam arsitektur bisnis sebagai berikut:

The Perum Jasa Tirta II business value chain model is described in the business architecture as follows:

Peta Strategi (Strategy Map) Perum Jasa Tirta II Tahun 2018-2022 / Strategic Map (Strategy MAp) Perum Jasa Tirta II 2018-2022



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI / IT MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE



TATA KELOLA DAN MANAJEMEN TI

Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Perum Jasa Tirta II diarahkan pada pemenuhan best practices Good Corporate Governance (GCG) dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, regulasi eksternal relevan lainnya, serta peraturan internal Perusahaan. Analisis dilakukan terhadap ketiga komponen tata kelola, yaitu (1) Struktur Tata Kelola TIK Korporat; (2) Proses tata kelola TIK; dan (3) Struktur Organisasi Pengelola TI.

Struktur Tata Kelola TIK Korporat Struktur tata kelola TIK Korporat diorientasikan dan diarahkan pada optimalisasi investasi dan infrastruktur TI sehingga manfaat yang dihasilkan dapat terasa dan berdampak positif bagi proses dan aktivitas bisnis secara keseluruhan.

PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG TI

Sejalan dengan pengembangan teknologi informasi, Perusahaan turut menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pengembanga kompetensi SDM di bidang TI. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya.

Dalam mendukung tujuan tersebut, Perusahaan telah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya TI yang mengatur tatanan pengelolaan sumber daya TI Perum Jasa Tirta II yang menjamin efektivitas dan efisiensi produk TI yang dihasilkan. Kebijakan tersebut terdiri dari :

- Prosedur pengelolaan SDM TI
- Prosedur pengelolaan data/informasi
- Prosedur pengelolaan hardware/software
- Prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (data center dan jaringan komputer)

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA)

PJT II sebagai perusahaan umum mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan SDA di wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan SDA di wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2010.

Untuk menunjang penugasan tersebut, PJT II membangun Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) sejak tahun 2013 yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi pengelolaan SDA di seluruh wilayah kerja.

Data-data yang tersedia pada SISDA tersebut antara lain meliputi :

IT GOVERNANCE AND MANAGEMENT

Management of Information Technology in Perum Jasa Tirta II is directed at meeting the best practices of Good Corporate Governance (GCG) by referring to SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/02/2018 concerning Principles of Information Technology Governance in the Ministry of State-Owned Enterprises, external regulations other relevant, and internal company regulations. The analysis was carried out on the three components of governance, namely (1) Corporate ICT Governance Structure; (2) ICT governance processes; and (3) IT Management Organizational Structure.

Corporate ICT governance Structure The corporate ICT governance structure is oriented and directed at optimizing IT investment and infrastructure so that the benefits generated can be felt and have a positive impact on the overall business processes and activities.

HR DEVELOPMENT IN IT FIELD

In line with the development of information technology, the Company also pays attention to meeting the needs of developing HR competencies in the IT field. This is intended to prepare competent human resources and able to adapt to technological developments, both in terms of knowledge and skills.

In support of these objectives, the Company has prepared an IT resource management policy that governs the management of Perum Jasa Tirta II's IT resources that ensures the effectiveness and efficiency of IT products generated. The policy consists of :

- IT HR management procedures
- Data/information management procedures
- Hardware/software management procedures
- Information technology infrastructure management procedures (data center and computer networks)

WATER RESOURCES INFORMATION SYSTEM (SISDA)

PJT II as a public company is assigned to carry out its duties and responsibilities in the exploitation of water resources in the river area and some of the tasks and responsibilities in the field of water resource management in the working area according to Government Regulation No. 7 of 2010.

To support this assignment, PJT II has built a Water Resources Information System (SISDA) since 2013 which is used to obtain information on the management of water resources in all working areas.

The data available on the SISDA include :

Data Spasial
- DAS dan Sub DAS WS
- Citarum dan sebagian WS Ciliwung – Cisadane
- Jaringan hidrologi
- Prasarana SDA

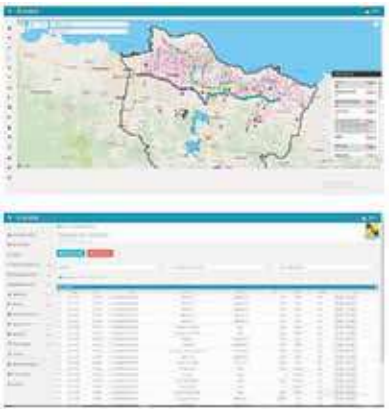
Data Tabular
- Debit air di pos hidrologi
- Debit air di bending
- Data curah hujan
- Iklim
- Pengusahaan air baku
- Data kualitas air
- Batimetri Waduk Ir. H. Djuanda

Model
- Simulasi debit sesaat
- Simulasi debit harian

Spatial Data
- Watershed and sub-watershed for WS
- Citarum and part of WS Ciliwung – Cisadane
- Hydrological network
- Water Resources Infrastructure

Tabular Data
- Water discharge at the hydrology post
- Water discharge in bending
- Rainfall data
- Climate
- Raw water exploitation
- Water quality data
- Bathymetry of Ir. H. Juanda

Model
- Simulation of instantaneous discharge
- Daily debit simulation





Pengembangan SISDA terus dilakukan sebagai satu kesatuan sistem informasi yang menampung data pantau operasi sarana prasarana SDA sehingga dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi serta analisis sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan (Decision Support System (DSS).

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS).





PJT II juga memiliki Network Operation Center (NOC) yang merupakan perangkat infrastruktur untuk melakukan kontrol baik pengawasan maupun pengendalian aktivitas jaringan sekaligus memastikan agar jaringan data center SISDA tetap berfungsi baik. Dengan kata lain, NOC ini merupakan ruang kendali DSS.

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS).



Bertepatan dengan peringatan hari jadi PJT II yang ke 53, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah diluncurkan aplikasi SISDA berbasis smartphone. Di tahun 2020 ini dilakukan investasi pemasangan telemetri hidrometri berbasis Internet of Things (IoT) melalui pekerjaan West-East Tarum Canal Water Security System and Bekasi Flood Warning System di 14 lokasi sebagai bagian dari proses digitalisasi dan otomatisasi pengiriman data dari lapangan.

Proses digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan bagian dari penerapan Smart Water Operation Management (SWOM) yang akan terus dilakukan PJT II secara berkelanjutan.

To coincide with the 53rd anniversary of PJT II, on August 26, 2020, the smartphone-based SISDA application was launched. In 2020, an investment in the installation of Internet of Things (IoT) based hydrometric telemetry was made through the work of the West-East Tarum Canal Water Security System and Bekasi Flood Warning System in 14 locations as part of the digitization process and automation of data transmission from the field.

The process of digitizing, automating and using Information and Communication Technology is part of the implementation of Smart Water Operation Management (SWOM) which will continue to be carried out by PJT II on an ongoing basis.



Hal ini menjadi bukti nyata bahwa PJT II bertransformasi menjadi Badan Usaha yang siap menghadapi era disruptif Revolusi Industri 4.0 serta sejalan pula dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 dan Visium Kementerian PUPR 2030 bahwa kegiatan pengelolaan SDA didukung pilar strategis informasi, komunikasi dan teknologi.

Pengembangan TI Tahun 2021
Pada tahun 2021, Perum Jasa Tirta II telah melakukan peningkatan sistem teknologi informasi sebagai berikut :

1. Integrasi Infrastruktur Jaringan Luas (Wide Area Network) Perum Jasa Tirta II di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor- kantor Cabang (Wilayah);
2. Implementasi Perangkat Video Conference antara Kantor Pusat dengan kantor-kantor cabang (Wilayah);
3. Implementasi Aplikasi Pendukung Proses Bisnis, antara lain Sistem Informasi Manajemen Risiko, Sistem Informasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sistem Informasi Karyawan, dan Sistem Informasi Geografis Aset Perum Jasa Tirta II.

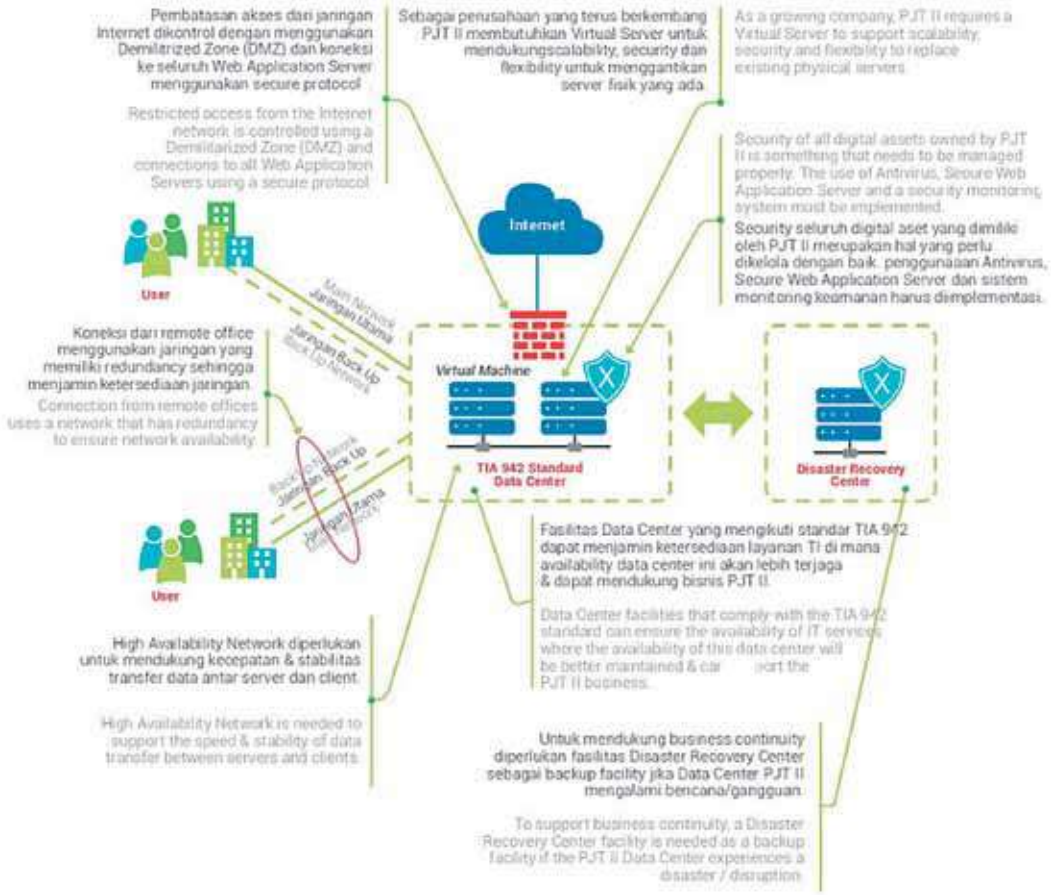
This is clear evidence that PJT II is transforming into a Business Entity that is ready to face the disruptive era of the 4.0 Industrial Revolution and is also in line with the 2020-2024 RPJMN and the Vision of the Ministry of PUPR 2030 that water resource management activities are supported by strategic pillars of information,communicationandtechnology.

ITDevelopmentin2021
In 2021, Perum Jasa Tirta II has improved the information technologysystemasfollows:

1. Integration of Wide Area Network Infrastructure of Perum Jasa TirtaIIwithintheHeadOfficeandBranchOffices(Regional);
2. Implementation of Video Conference Equipment between Headquartersandbranchoffices (Regions);
3. Implementation of Business Process Supporting Applications, including Risk Management Information System, Partnership and Community Development Program Information System, Employee Information System, and Geographic Information SystemofPerumJasaTirtaII.

Rencana Pengembangan TI Tahun 2021 Berkaca dari peta strategi TI yang telah disusun, pengembangan dan pemanfaatan TI Perusahaan di tahun mendatang diarahkan pada implementasi Sistem Terintegrasi (Enterprise Resource Planning) di lingkungan PJT II, yang meliputi Aplikasi Accounting, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management, dan aplikasi-aplikasi pendukung proses bisnis utama lainnya.

IT Development Plan for 2021 Reflecting on the IT strategy map that has been prepared, the development and utilization of the Company's IT in the coming year is directed at the implementation of the Integrated System (Enterprise Resource Planning) in the PJT II environment, which includes Accounting Application, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management , and other key business process supporting applications.



Laporan Teknologi Informasi (TI)
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan pengelolaan air, PJT II senantiasa melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem teknologi informasi pada semua aspek operasional sesuai dengan perkembangan dan standar yang berlaku. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, PJT II melakukan langkah-langkah perubahan yang strategis di bidang TI dalam rangka peningkatan pelayanan PJT II.

Information Technology (IT) Report
As a company engaged in water management, PJT II continues to improve the application of information technology systems in all operational aspects in accordance with developments and applicable standards. To anticipate the increasing need and development of information technology, PJT II undertakes strategic changes in the IT sector in order to improve PJT II services.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan peningkatan dan pembenahan infrastruktur Sistem Teknologi Informasi yang menunjang aspek operasional di lingkungan PJT II.

The steps taken include improving and revamping the Information Technology System infrastructure that supports operational aspects within the PJT II environment.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran-sasaran bisnis yang telah dicanangkan tersebut, maka PJT II menyusun strategi bisnis yang dapat dijelaskan melalui peta strategi (strategy map) berikut ini :

In order to achieve the stated business goals, PJT II has developed a business strategy that can be explained through the following strategy map :



Sumber: RJPP PJT II 2017-2021 versi Akhir Maret 2018 / Source: RJPP PJT II 2017-2021 version End of March 2018
Sumber: RJPP PJT2, Kuesioner, Analisa tim PGNCom menggunakan framework Balanced Scorecard / Source: RJPP PJT2, Questionnaire, Analysis of the PGNCom team using the Balanced Scorecard framework

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

In order to provide the best service to clients and the general public, PJT II must organize and enhance the quality of information technology-based services. This is due to the development of technology, particularly information technology, which is expanding quickly and becoming more competitive between companies. Because technology is the primary tool that enables us to deliver goods and services to customers, monitor and assess business performance, and make the best management choices for the long-term success of their enterprise. The Company works to develop sustainable innovations by taking into account business demands in policies, processes, and infrastructure in order to preserve the effectiveness, efficiency, and relevance of IT utilization. The Company is confident that, with the help of a regular review process, the availability of skilled IT human resources, and careful planning, it can take steps forward towards attaining the vision, mission, and business goals that have been established.

Pada tahun 2021, PJT II melaksanakan layanan pembuatan aplikasi pendukung proses bisnis sesuai IT Master Plan dan kebutuhan unit kerja serta memberikan layanan dukungan infrastruktur dilingkungan perusahaan.

According to the IT Master Plan and the requirements of the work units, PJT II will carry out business process support application development services in 2021 and offer infrastructure support services inside the business.

Layanan pembuatan aplikasi pendukung proses bisnis sesuai IT Master Plan dan kebutuhan Unit Kerja serta memberikan layanan dukungan infrastruktur dilingkungan perusahaan, diantaranya:

Offering infrastructure support services within the organization as well as services for creating business process support applications in accordance with the IT Master Plan and the demands of the Work Unit, including:

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur IT
2. Pemeliharaan Sistem Informasi Akuntasi
3. Pemeliharaan Data Center
4. Pemeliharaan Jaringan LAN dan WAN
5. Pemeliharaan Webmail Server PJT II

1. Performance evaluation of the IT infrastructure
2. Upkeep of Accounting Information Systems
3. Upkeep of Data Centers
4. Network maintenance for LAN and WAN
5. Upkeep of the PJT II Webmail Server





TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social And Environmental Responsibility



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Pengertian Program TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds is carried out based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. The financial reports and the implementation of the SOE TJSL Program are integrated with the periodic reports and annual reports on the performance of SOEs which are set out in separate chapters.

The definition of the CSR program is an activity that is the Company's commitment to sustainable development by providing economic, social, environmental and legal benefits and governance with more integrated, targeted, measurable and accountable principles and is part of the company's business approach.

The implementation of the SOE CSR Program can be carried out in the form of:
a. Financing and fostering micro and small businesses; and/or
b. Assistance and/or other activities.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sebelumnya bernama Program Kemitraan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II). Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Perusahaan Umum Jasa Tirta II dikelola oleh Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.

PJT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

In the context of implementing the SOE TJSL Program for financing and fostering micro and small businesses, SOEs may specifically establish a Micro and Small Business Funding Program. The Micro and Small Business Funding Program, previously known as the Partnership Program, is expected to expand employment and business opportunities for the community around the working area of the Jasa Tirta II Public Company (PJT II). The Micro and Small Business Funding Program at Jasa Tirta II Public Company is managed by the General Division and Social and Environmental Responsibility ("TJSL") which is responsible to the Director of Finance, Human Resources and Risk Management.

PJT II as a State-Owned Enterprise (BUMN) is required to provide guidance to micro and small businesses to become strong and independent.

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa kinerja positif Perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Kontribusi dalam pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci keberhasilan Perusahaan secara berkelanjutan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL) yang secara konsisten dilakukan oleh Perusahaan.

COMMITMENT TO SOCIAL RESPONSIBILITY

Perum Jasa Tirta II realizes that the Company's positive performance is not only measured by business growth and performance. Contributions to environmental preservation, community empowerment, employee welfare, and customer satisfaction are part of the positive performance and the key to the Company's sustainable success. This is the background for the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) which is consistently carried out by the Company.



Program TJSL Perusahaan dilakukan melalui berbagai inisiatifdengan mengadopsi pendekatanISO 26000 Social responsibility yang secara holistik dan komprehensif mengatur 7 (tujuh) aspek utama dalam tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut menjadi pendekatan ideal yang digunakan organisasi dan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yang berprinsip pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

The Company's CSR program is carried out through various initiatives by adopting the ISO 26000 Social responsibility approach which holistically and comprehensively regulates 7 (seven) main aspects of social responsibility. This approach is the ideal approach used by organizations and companies in carrying out social responsibility based on the principles of sustainable development goals (Sustainable Development Goals).



ISO 26000 Social Responsibility mengatur mengenai tujuh fokus tanggung jawab sosial dengan uraian sebagai berikut : / ISO 26000 Social Responsibility regulates the seven focuses of social responsibility with the following descriptions:

TANGGUNG FOKUS JAWAB PERUSAHAAN / CORPORATE RESPONSIBILITY FOCUS	URAIAN / DESCRIPTION
Tata Kelola Organisasi / Organizational Governance	Penetapan, pengambilan, dan penerapan keputusan strategis sehingga prinsip tanggung jawab sosial dapat diterapkan. / Determination, the making, and application of strategic decisions so that the principles of social responsibility can be applied.
Hak Asasi Manusia / Human Rights	Hak dasar yang dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya. / Basic rights that all people have as humans, including civil, Political, economic, social and cultural rights.
Praktik Ketenagakerjaan / Labour Practices	Kebijakan dan praktik terkait pekerjaan dan ketenagakerjaan. / Policies and practices related to job and labour.
Lingkungan / Environment	Tanggung jawab atas dampak lingkungan kepada masyarakat dari kegiatan bisnis yang dilakukan. / Responsibility on environmental impact on the community from business activities carried out.
Operasi yang Adil / Fair Operating Practices	Penerapan perilaku etis dan adil saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan. / Implementation of ethical and fair behaviour when interacting with stakeholders.
Isu Pelanggan / Consumer Issues	Pemenuhan hak-hak pelanggan terkait produk dan layanan yang diberikan, kejelasan informasi, dan perlakuan yang adil. / Fulfillment of consumer rights related to product and services given, information clariy, and fair treatment.
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat / Community Involvement and Development	Hubungan dan interaksi perusahaan dengan masyarakat di lingkungan operasinya. / Relationship and interaction of the company with community around its operational area.

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK bagi Perum Jasa Tirta II adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri agar dapat berkembang menjadi usaha menengah serta meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.

Tujuan Program TJSL adalah menciptakan keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan terdekat sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelaksanaan operasi dan pengembangan perusahaan.

DASAR KEBIJAKAN PELAKSANAAN CSR

Pelaksanaan program CSR PJT II mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun kebijakan dan program TJSL baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program TJSL. Di samping itu, Perum Jasa Tirta II telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) TJSL yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program- program TJSL agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal

OBJECTIVE

The objectives to be achieved in the implementation of the UMK Funding Program for Perum Jasa Tirta II are to grow and improve the ability of small businesses to become resilient and independent businesses so that they can develop into medium-sized businesses and increase the role of small businesses in the formation of national products, expanding employment opportunities and trying to increase exports. , increasing and equitable distribution of income as well as strengthening the structure of the national economy.

The objective of the CSR Program is to create a social balance and to build togetherness with the local community in the immediate vicinity so as to create a conducive climate for the implementation of the company's operations and development.

POLICY BASIC IMPLEMENTATION OF CSR

The implementation of the PJT II CSR program refers to the laws and regulations in Indonesia, both those that regulate in general and specifically regarding CSR, including:

- Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UU PM).
- Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT).
- Government Regulation Number 32 of 1998 concerning Small Business Guidance and Development.
- Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.
- Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor.
- Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning the Forum for the Responsibility of the Business World in the Implementation of Social Welfare.
- Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.

Referring to a number of these policies, the Company formulates CSR policies and programs both conceptually and in written implementation targets. The company already has a written policy from the company leadership regarding the CSR program. In addition, Perum Jasa Tirta II has a TJSL Standard Operating Procedure (SOP) which regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs so that they can run effectively and have an optimal impact on stakeholders. The SOP is also intended to

kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkanuntuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam pelaksanaan program TJSL.

KEGIATAN UTAMA :

1) Memberikan Pembinaan
   Pembinaan yang diberikan oleh Unit TJSL BUMN kepada para UMK Binaan adalah Bantuan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas UMK Binaan, serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan UMK.

2) Memberikan Pendanaan UMK Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jumlah pinjaman untuk setiap UMK binaan dari Program Pendanaan UMK maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan UMK binaan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

METODE PROGRAM TJSL

Kebijakan TJSL Perum Jasa Tirta II mengacu kepada konsep triple bottom line yaitu profit, people,dan planet. Dalam konsep ini, Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan (profit) semata, namun berkontribusi memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lain (people) serta turut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Guna mengimplementasikan prinsip tersebut, Perusahaan menerapkantanggung jawab sosialdimulai dari aspek yang terkecil, sebagai contoh dengan memiliki kebijakan dan menjalankan program kerja yang tidak mengeksploitasi alam.
Perusahaan merancangdan melaksanakan program TJSL secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan TJSL dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensidaerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

STRUKTUR ORGANISASI

Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata

enforce the principles of Good Corporate Governance in the implementation of the CSR program.

CSR IMPLEMENTATION PRINCIPLES

1) Providing Coaching
   The guidance provided by the SOE TJSL Unit to the fostered MSEs is assistance in education, training, marketing, promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the productivity of the fostered MSEs, as well as for studies/research related to the MSE Funding Program.

2) Providing MSE Funding Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises, the loan amount for each UMK fostered from the UMK Funding Program is a maximum of Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah), except for additional loans to finance needs. short-term in nature in order to fulfill orders from partners of UMK fostered in the maximum amount of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah).

TJSL PROGRAM METHOD

The TJSL policy of Perum Jasa Tirta II refers to the triple bottom line concept, namely profit, people, and planet. In this concept, the Company does not only aim to pursue profit (profit), but also contributes to paying attention to and being involved in fulfilling the welfare of the community, employees, and other stakeholders (people) as well as actively participating in preserving the environment (planet). In order to implement these principles, the Company implements social responsibility starting from the smallest aspects, for example by having policies and implementing work programs that do not exploit nature.
The company designs and implements the CSR program in a systematic and integrated manner. The implementation of CSR is carried out using a participatory method, namely by empowering the existing regional potential in order to increase the ability, income, and welfare of the community in a sustainable manner.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Decision of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 concerning the

Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, bahwa Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berada dua tingkat di bawah Direksi yaitu Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia danManajemen Risiko (Direktur KSMR) dan Kepala Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan. Pengelolaan Unit TJSL di bawah Divisi Umum dan TJSL Perusahaan melalui Bidang TJSLbertanggung jawab kepada Direktur KSMR. Pejabat Unit TJSL Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

Organizational Structure and Work Procedure of Jasa Tirta II Public Company, that the Social and Environmental Responsibility (TJSL) is two levels below the Board of Directors, namely the Director of Finance, Human Resources and Risk Management (Director of KSMR) and Head of General Division and Social and Environmental Responsibility. The management of the TJSL Unit under the General Division and the Company's TJSL through the TJSL Division is responsible to the Director of KSMR. The officials of the TJSL Unit of Perum Jasa Tirta II are as follows:



METODE DUE DILIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Dalam memetakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha, Perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran tingkat urgensi dampak keberlanjutan yang dihasilkan setiap aktivitas usahanya. Pelaksanaan metode due diligence dilakukan dengan melibatkan unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya guna memetakan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan yang diangkat. Hasil metode due diligence selanjutnya menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menyusun kegiatan dan program yang dikhususkan untuk membidik isu-isu keberlanjutan tersebut.

Dalam menetapkan isu-isu keberlanjutan, Perusahaan melakukan identifikasi dengan berlandaskan pada 4 (empat) langkah yang disyaratkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang material dan boundary (langkah identifikasi);
2. Membuat prioritas atas aspek-aspek pada langkah sebelumnya (langkah Prioritas);
3. Melakukan validasi atas aspek-aspek material tersebut (langkah Validasi);
4. Melakukan review atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya (langkah Review).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

1) Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang TJSL sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang TJSL mempunyai fungsi:
   a. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan nisiko, program kerja dan KPI Bidang TJSL.
   b. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan, reviu, dan melaksanakan sosialisasi aturan/ pedoman/ prosedur pengelolaan TJSL

SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COMPANY ACTIVITIES: DUE DILIGENCE METHOD

The company determines and assesses the level of urgency of the sustainability impacts produced by each of its business activities while mapping the social, economic, and environmental effects coming from business activities. Work units and other stakeholders are included in the implementation of the due diligence technique in order to map out the priority scale for the sustainability issues raised. The company will use the findings of the due diligence approach as a guide for creating activities and programs that are expressly designed to address these sustainability challenges.

The following are the four (four) steps the company uses to identify sustainability issues:

1. Identify the boundaries and material components (the identification process);
2. Give the elements from the prior step (Priority step) a higher priority;
3. Verify the tangible elements (validation stage);
4. Reviewing reports after they are published to raise the caliber of the report for the following year (Review step)

THE DUTY AND THE RESPONSIBILITY

Social and Environmental Responsibility Bidang

1) The Division of Social and Environmental Responsibility (TJSL) carries out the main tasks of preparing, directing and evaluating and reporting activities that apply in the field of CSR in accordance with the rules that apply in the Company

(2) In carrying out the tasks as referred to in paragraph (1). The TJSL field has the following functions:
   a. preparing, directing and evaluating risk management, work programs and KPIs for the TJSL Sector.
   b. prepare, direct and evaluate the preparation, review, and socialization of TJSL management rules/guidelines/ procedures

c. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi kelengkapan dokumen usulan RKAP termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Project Digest, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan penyusunan RKAP yang berlaku d. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi rencana paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan batas kewenangan Divisi Umum dan TJSL

c. prepare, direct and evaluate the completeness of the proposed RKAP document including but not limited to the Terms of Reference (KAK), Project Digest, and Budget Details (RAB) for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable RKAP preparation d. prepare, direct and evaluate the package plan for the procurement of goods/services in accordance with the limits of authority of the General Division and TJSL

e. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri HPS (Owner Estimate) dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku 1 menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi naskah Memorandum Of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi g merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kinerja TJSL

e. prepare, direct and evaluate the completeness of the procurement plan document including but not limited to the Terms of Reference (TOR), the HPS Self Estimate (Owner Estimate) and the Draft Contract for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable procurement of goods and services 1 prepare, direct and evaluate the text of the Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions of planning, managing and evaluating the performance of TJSL

h. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi laporan keuangan TJSL,

h. prepare, direct and evaluate TJSL financial statements,

i. berkoordinasi dengan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL, pemetaan dan penyusunan Program TJSL

i. coordinate with the Social and Environmental Responsibility Committee in order to formulate objectives and guidelines for the implementation of the CSR program, mapping and preparing the CSR program

j. mengendalikan bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, dan k menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

j. control the evidence of work implementation of duties and functions, and k prepare, direct and evaluate the preparation of reports in accordance with the duties and functions.

(3) Bidang TJSL terdiri dari

(3) The CSR field consists of

a. Sub Bidang TJSL Pendanaan UMK dan Bantuan,
b. Sub Bidang Administrasi dan Keuangan.

a. TJSL Sub-Sector UMK Funding and Assistance,
b. Sub Division of Administration and Finance.

SUMBER DANA

Sumber dana Program TJSL BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- Program TJSL Bantuan
  a. Program TJSL Bantuan Sumber dana Alokasi Laba BUMN Pembina. Program TJSL Bantuan Tahun 2021 tidak ada tambahan Alokasi laba BUMN Pembina.
  b. Program TJSL Bantuan Sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina. Pada Tahun 2021 Program TJSL Bantuan Sumber dana anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya adalah sebagai berikut :

SOURCE OF FUNDS

The source of funds for the SOE TJSL Program is in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 dated April 8, 2021 concerning Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises, as follows:

- CSR Program Help
  a. TJSL Program Assistance Source of funds Allocation of Profit for State Owned Enterprises Trustees. The TJSL Assistance Program in 2021 does not have an additional profit allocation for the Advisory SOEs.
  b. TJSL Program Assistance Source of budget funds which are calculated as costs from the SOE Trustees. In 2021 the TJSL Program Assistance Sources of budget funds that are calculated as costs are as follows :

URAIAN Description		RKAP 2021	REALISASI 2021 (Rp.) Realization 2021 (Rp.)	REALISASI 2020 (Rp.) Realization 2020 (Rp.)	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
					RKAP 2021	REALISASI 2020 Realization 2020
	1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
I	**TJSL BUMN Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya Dana Tersedia / TJSL BUMN Assistance and/or Other Activities Funds Available**					
1	Saldo Awal / Starting Balance	-	-	-	-	-
2	Tambahan Dana dari BUMN Pembina / Additional Funds from State Owned Enterprises	7,290,000,000	7,245,000,000	6,629,942,000	99.38	109.28
3	**Jumlah Dana Tersedia (1s.d.2) / Amount of Funds Available (1s.d.2)**	**7,290,000,000**	**7,245,000,000**	**6,629,942,000**	**99.38**	**109.28**
II	**Realisasi Pelaksanaan Program TJSL dikelompokan dalam 4 (empat) Pilar TPB sebagai: / The realization of the TJSL Program Implementation is grouped into 4 (four) TPB Pillars as:**					
4	Pilar Pembanguan Sosial / Social Development Pillars	1,520,000,000	1,394,727,000	2,738,455,000	91.76	50.93
5	Pilar Pembanguan Ekonomi / Pillars of Economic Development	1,568,000,000	1,685,000,000	894,487,000	107.46	188.38
6	Pilar Pembanguan Lingkungan / Environmental Development Pillar	4,092,000,000	3,891,000,000	2,997,000,000	95.09	129.83
7	Pilar Pembanguan Hukum dan Tata Kelola / Pillars of Legal Development and Governance	110,000,000	99,000,000	-	90.00	-
8	**Jumlah Penyaluran Dana (4sd.7) / Total Disbursement of Funds (4sd.7)**	**7,290,000,000**	**7,069,727,500**	**6,629,942,000**	**96.98**	**106.63**
9	**Setor Tunai / Cash Deposit**	-	**175,272,500**	-	-	-
	Saldo Dana (3-8-9) / Fund Balance (3-8-9)	-	-	-	-	-

Realisasi penyaluran Dana TJSL Bantuan Tahun 2021 anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dengan sumber dana dari anggaran BUMN Pembina yang dibiayakan sebesar Rp7.069.727.500,00 atau mencapai 96,98% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp7.290.000.000,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp6.629.942.000,00 mengalami kenaikan 6,63%.

Realization of the distribution of TJSL Funds for 2021 Aid budget which is calculated as a cost with the source of funds from the budget of the State-Owned Enterprise which is financed is Rp. 7,069,727,500, or reaching 96.98% of the RKA in 2021, which is Rp. 7,290,000,000.00. Realization in 2020 amounted to Rp6,629,942,000.00, an increase of 6.63%.

- Program Pendanaan UMK
  Realisasi Pengelolaan Program Pendanaan UMK yang telah dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 dibandingkan dengan RKA 2021dan Realisasi Tahun 2020 tampak sebagai berikut :

- UMK Funding Program
  The realization of the Management of the UMK Funding Program that has been carried out by Perum Jasa Tirta II in 2021 compared to the 2021 RKA and the 2020 Realization looks as follows :

Perum Jasa Tirta II telah melakukan TJSL dalam bentuk Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sejak tahun 1991 baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan Pembinaan yang bersifat hibah. Penyaluran dana Program Pendanaan UMK secara kumulatif dari tahun 1992 s.d. tahun 2020 berupa pinjaman sebesar Rp29.638.117.500,00 kepada 2640 UMK Binaan dengan dana Pembinaan kemitraan sebesar Rp2.150.267.440,00 sedangkan realisasi penyaluran pinjaman tahun 2021 sebesar Rp1.285.000.000,00 kepada 63 UMK Binaan sehingga penyaluran dana program pendanaan UMK sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp30.923.117.500,00 kepada 2703 UMK Binaan.

Since 1991, Perum Jasa Tirta II has carried out CSR through the Micro and Small Business Funding (UMK) program, providing grants as well as loans to small businesses. Distribution of UMK Funding Program funds to 2640 MSEs in the form of loans totaling Rp. 29,638,117,500.00 from 1992 to 2020, along with partnership development funds totaling Rp. 2,150,267,440.00, was realized in 2021 with Rp. 1,285,000.00 going to 63 fostered MSEs, bringing the total distribution of MSE Funding Program funds to 2703 fostered MSEs as of December 31, 2021.

Penyaluran dana Program TJSL Bantuan tahun 2021 dengan sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina. Program TJSL Bantuan secara kumulatif dari tahun 2002 s.d tahun 2020 sebesar Rp27.336.897.711,00 sedangkan penyaluran TJSL Bantuan pada tahun 2021 sebesar Rp7.069.727.500,00 sehingga penyaluran dana Program TJSL Bantuan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp34.406.625.211,00.

Distribution of funding for the TJSL Assistance Program in 2021, with budget monies from the BUMN Trustees being used as a cost source. The total amount of TJSL Assistance Program monies distributed from 2002 to 2020 is Rp. 27,336,897,711; however, Rp. 7,069,727,500 will be distributed in 2021; as a result, Rp. 34,406,625,211 will be distributed.

KETERANGAN Description	RKA 2021	REALISASI 2021 (Rp.) Realization 2021 (Rp.)	REALISASI 2020 (Rp.) Realization 2020 (Rp.)	% REALISASI TERHADAP % Realization to	
				RKA 2021	REALISASI 2020 Realization 2020
1	2	3	4	5=3:2	6=3:4
Saldo awal / Beginning balance	-	66,376,264	42,595,875	-	-
PENERIMAAN: / RECEPTION:					
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina / Allocation of Profit Shares from State-Owned Enterprises Trustees	-	-	-	-	-
Pengembalian Pinjaman UMK Binaan / Repayment of Fostered UMK Loans	1,445,368,803	1,62,578,885	1,185,510,164	80.43%	98.07%
Pendapatan Jasa Administrasi pinjaman / Loan Administration Service Income	103,431,197	79,781,859	73,639,271	77.14%	108.34%
Pendapatan Jasa Giro / Current Account Service Income	1,200,000	1,021,123	1,250,954	85.09%	81.63%
Jumlah Penerimaan / Amount of Receipt	**1,550,000,000**	**1,243,381,867**	**1,260,400,389**	**80,22%**	**98.65%**
Jumlah dana yang tersedia / Amount of available funds	**1,550,000,000**	**1,309,758,131**	**1,302,996,264**	**84.50%**	**100.52%**
PENGELUARAN: / EXPENDITURE:					
Pinjaman pada UMK Binaan / Loans for UMK Fostered	1,550,000,000	1,285,000,000	1,200,000,000	82.90%	107.08%
Dana Pembinaan Kemitraan / Partnership Development Fund	-	-	36,620,000	-	-
Jumlah Pengeluaran / Expenditure Amount	**1,550,000,000**	**1,285,000,000**	**1,236,620,000**	**82.90%**	**103.91%**
Saldo Akhir Dana / End of Fund Balance	-	**24,758,131**	**66,376,264**	**-**	**-**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi penyerapan dana Program Pendanaan UMK untuk Tahun 2021 sebesar Rp 1.243.381.867,00 atau 80,22% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp 1.550.000.000,00, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.260.400.389,00 mengalami penurunan 1,35%.
- Realisasi Penerimaan Pengembalian Pinjaman UMK Binaan Tahun 2021 sebesar Rp 1.162.578.885,00 atau 80,43% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp 1.445.368.803,00, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.185.510.164,00 mengalami penurunan 1,93%.
- Realisasi Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Tahun 2021 sebesar Rp 79.781.859,00 atau 77,14% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp 103.431.197,00, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp 73.639.271,00 mengalami kenaikan 8,34%.

From the table above, it can be explained as follows:

- When compared to the realization in 2020 of IDR 1,260,400,389.00, the absorption of UMK Funding Program funds for 2021 is IDR 1,243,381,867.00, or 80.22% of the 2021 RKA of IDR 1,550,000,000.00.
- Receipts for Repayment of Assisted UMK Loans in 2021 amounted to Rp. 1,162,578,885.00, or 80.43% of the RKA in 2021 of Rp. 1,445,368,803.00, a 1.93% decrease from Rp. 1,185,510,164.00 in 2020.
- Realization of Loan Administration Service Revenue in 2021 is Rp. 79,781,859.00, or 77.14% of RKA 2021 of Rp. 103,431,197.00, compared to Rp. 73,639,271.00 in 2020, an 8.34% increase.

- Realisasi Penerimaan Pendapatan Jasa Giro Tahun 2021 sebesar Rp 1.021.123,00 atau 85,09% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp 1.200.000,00 jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.250.954,00 mengalami penurunan 18,37%.
- Realisasi penyaluran pinjaman untuk Tahun 2021 sebesar Rp1.285.000.000,00 atau 82,90% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp1.550.000.000,00, jika dibandingkan dengan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp 1.200.000.000,00 mengalami kenaikan 7,08%.
- Dana tersedia per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.758.131,00.

Realisasi Penyaluran Program Pendanaan UMK Tahun 2021 sebesar Rp 1.285.000.000,00 sehingga Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Pendanaan UMK sebagai berikut :

- Realization of Current Account Revenue in 2021 is IDR 1,021,123.00, or 85.09% of RKA 2021 of IDR 1,200,000.00, a decrease of 18.37% from Realization in 2020 of IDR 1,250,954.00. When compared to the Realization in 2020 of Rp. 1,200,000,000.00.
- The realization of loan disbursement for 2021 is Rp. 1,285,000,000.00, or 82.90% of the RKA 2021 of Rp. 1,550,000,000.00.
- The amount of money available as of December 31, 2021 is IDR 24,758,131.00.

The realization of the distribution of the UMK Funding Program in 2021 is IDR 1,285,000,000.00 so that the Accumulated Realization of the Distribution of the UMK Funding Program is as follows:

SEKTOR USAHA UMK BINAAN Business Sector Builded	REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 Realization Until 2020		REALISASI TAHUN 2021 Realization 2020		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN III/2021 Realization Until Quarter Iii/2021	
	JUMLAH UMK BINAAN Total Umk Buildings	JUMLAH RUPIAH Total Rupiah	JUMLAH UMK BINAAN Total Umk Buildings	JUMLAH RUPIAH Total Rupiah	JUMLAH UMK BINAAN Total Umk Buildings	JUMLAH RUPIAH Total Rupiah
1	2	3	4	5	(6)=(4)+(2)	(7)=(5)+(3)
I. **Penyaluran Pinjaman / Loan Distribution**	**2,640**	**29,638,117,500**	**63**	**1,285,000,000**	**2,703**	**30,923,117,500**
Propinsi Jawa Barat / West Java Province						
Sektor Usaha Industri / Industrial Business Sector	312	2,818,000,000	4	105,000,000	316	2,923,000,000
Sektor Usaha Perdaganagan / Trading Business Sector	1,026	12,910,500,000	33	697,500,000	1.059	13,608,000,000
Sektor Usaha Pertanian / Agricultural Business Sector	267	1,591,417,500	-	-	267	1,591,417,500
Sektor Usaha Peternakan / Livestock Business Sector	79	949,500,000	-	-	79	949,500,000
Sektor Usaha Perkebunan / Plantation Business Sector	15	222,500,000	-	-	15	222,500,000
Sektor Usaha Perikanan / Fishery Business Sector	448	4,839,500,000	19	280,000,000	467	5,119,500,000
Sektor Usaha Jasa / Service Business Sector	253	3,263,700,000	7	202,500,000	260	3,466,200,000
Sektor Usaha Lainnya / Other Business Sector	239	3,035,500,000	-	-	239	3,035,500,000
Propinsi Banten / Banten Province						
Sektor Usaha Lainnya / Other Business Sector	1	7,500,000	-	-	1	7,500,000
II. **Dana Pembinaan / Coaching Fund**	**-**	**2,150,267,440**	**-**	**-**	**-**	**2,150,267,440**
JUMLAH / TOTAL	**2,640**	**2,640**	**63**	**1,285,000,000**	**2,703**	**33,073,384,940**

Jumlah UMK Binaan Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 sebagai berikut : / The number of MSEs fostered by Perum Jasa Tirta II in 2021 is as follows:

NO.	URAIAN Description	SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 Until 2020			PENYALURAN TAHUN 2021 Distribution In 2021			SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 Until 2021		
		UMK	UMK LANJUTAN Advanced UMK	JUMLAH UMK Total UMK	UMK BARU	UMK LANJUTAN Advanced UMK	JUMLAH UMK Total UMK	UMK	UMK LANJUTAN Advanced UMK	JUMLAH UMK Total UMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Koperasi / Koperasi	147	70	217	1	-	1	148	70	218
2.	Usaha Kecil / Small business	1760	663	2433	19	43	62	1,779	706	2485
	Jumlah / Total	**1907**	**733**	**2640**	**20**	**43**	**63**	**1927**	**776**	**2703**

METODA DAN LINGKUP DUE DILIGENT TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMIDAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan Perusahaan, maka PJT II telah memiliki berbagai kebijakan, mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan. Metode dan lingkup due diligent disajikan sebagai berikut :

DUE DILIGENT METHODS AND SCOPE ON SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COMPANY ACTIVITIES

In order to prevent negative impacts from the Company's decisions and activities, PJT II already has various policies, monitoring mechanisms and complaints handling mechanisms. The methods and scope of due diligence are presented as follows:



SUBJEK INTI / Core Subject	LINGKUP / Scope	KEBIJAKAN / Policy	MEKANISME PEMANTAUAN / Monitoring Mechanism	MEKANISME PENANGANGAN KELUHAN / Complaints Handling Mechanism
Hak Azasi Manusia / Human Rights	Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada seluruh Pekerja / Application of human rights principles to all workers	• Perjanjian Kerja / Employment Agreement • Bersama Code of Conduct/CoC / Together with the Code of Conduct/	Survei kepuasan karyawan / Employee Satisfaction Survey	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. / Complaints can be submitted directly through the leadership.
Operasi Yang Adil / Fair Operation	Pencegahan benturan kepentingan, implementasi Whistleblowing System dan Code of Conduct, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain. / Prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.	• Kebijakan pengendalian internal / Internal control policy • Whistleblowing System (WBS) / Whistleblowing System (WBS) • Kode Etik / Code of Conduct • Kebijakan Gratifikasi / Gratuity Policy	Assessment GCG sebagai penilaian dalam pelaksanaan operasi yang adil. / GCG assessment as an assessment in the implementation of fair operations.	Pengaduan dilaporkan kepada Tim Pengelola Laporan Pelanggaran melalui Whistle Blowing System. / Complaints are reported to the Violation Report Management Team through the Whistle Blowing System.
Lingkungan Hidup / Environment	Efisiensi di lingkungan internal Perusahaan, pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup serta penerapan keuangan berkelanjutan. / Efficiency in the Company's internal environment, environmental preservation and implementation of sustainable finance.	Kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal. / Policies related to environmental aspects, both internally and externally.	Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) / Evaluation of the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB)	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.
Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja / Occupational Health and Safety	Berbagai program ketenagakerjaan seperti kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan kebebasan berserikat dan lainnya. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan. / Various employment programs such as gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs on freedom of association and others. In addition, within the scope of occupational health and safety activities, the Company have a program to provide health facilities and provide work safety guarantees to all employees.	Peraturan Standar K3 PJT II / PJT II K3 Standard Regulations	Survei Kepuasan Karyawan / Employee Satisfaction Survey	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. / Complaints can be submitted directly through the leadership.
Tanggung Jawab Pelanggan / Customer Responsibilities	• Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan Perusahaanan. / Ease of access to information and the Company's service network. • Peningkatan kualitas layanan. / Improved service quality. • Program literasi Perusahaanan. Company literacy program.	• SK Direksi tentang Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Pelanggan Perusahaan / Decree of the Board of Directors regarding the Company's Customer Complaint Resolution Policy. • SK Direksi / Director's Decree	Survei kepuasan Pelanggan / Customer satisfaction survey	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan / Community Social Development	Kontribusi kepada masyarakat / Contribution to society	Kebijakan internal terkait pelaksanaan kegiatan CSR PJT II / Internal policies related to the implementation of PJT II CSR activities	Laporan pelaksanaan CSR / CSR implementation report	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN PJT II

Mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi, keterlibatan Pemangku Kepentingan PJT II dapat dilihat pada tabel berikut :

IMPORTANT STAKEHOLDERS THAT IMPACT OR INFLUENCE ON THE IMPACT OF PJT II COMPANY ACTIVITIES

Identify its stakeholders based on their interests and relationship with the Company. Based on the identification results, the involvement of PJT II Stakeholders can be seen in the following table:

PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholders	TOPIK UTAMA YANG DIAJUKAN Main Subjects
Topik Utama yang Diajukan / Main Topic Proposed	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Perusahaan/ informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Perusahaan. / Financial performance/non-financial performance of the Company/updated information on the Company's strategic actions and directions.
Karyawan / Employee	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Perusahaan/ informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Perusahaan. / Financial performance/non-financial performance of the Company/updated information on the Company's strategic actions and directions.
Pelanggan / Customer	Pelayanan Pelanggan/kerahasiaan data Pelanggan. / Customer service/customer data confidentiality.
Pemerintah / Government	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Compliance with applicable laws and regulations.
Masyarakat / Public	Kontribusi kepada masyarakat. / Contribution to society.

ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, PJT II melakukan Focus Group Discussion kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut :

- Ekonomi
- Kepatuhan Lingkungan
- Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
- Pendidikan dan Pelatihan
- Kepuasan Karyawan
- Kesejahteraan Masyarakat

IMPORTANT SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

In presenting the latest issues, data and information relevant to the rights of the Stakeholders, PJT II conducts Focus Group Discussions with stakeholders. The important educational, social, cultural, economic and environmental issues are as follows:

- Economy
- Environmental Compliance
- Occupational Safety, Security and Health
- Education and training
- Employee Satisfaction
- Public welfare

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WHETHER THAT IS A LIABILITY OR EXCEEDS AN OBLIGATION

Lingkup tanggung jawab sosial PJT II adalah sebagai berikut :

PJT II's scope of social responsibility is as follows:

- Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
- Hak Azasi Manusia
- Operasi Yang Adil
- Lingkungan Hidup
- Ketenagakerjaan
- Pemenuhan Kepentingan Pelanggan
- Kemasyarakatan

- Social Responsibility Governance
- Human rights
- Fair Operation
- Environment
- Employment
- Fulfillment of Customer Interests
- Society

Perusahaan telah melaksanakan berbagai program CSR, baik yang merupakan kewajiban (mandatory) maupun melebihi kewajiban (voluntary). Rincian kegiatankegiatan tersebut diungkapkan sebagai berikut :

The company has implemented various CSR programs, both mandatory and voluntary. The details of these activities are disclosed as follows:

SUBJEK INTI / Core Subject	PERATURAN TERKAIT / Related Rules
Hak Asasi Manusia / Human Rights	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan Sektor Jasa Keuangan. / Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Protection of Customers in the Financial Services Sector. • Peraturan Perusahaan Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Pelanggan. / Indonesian Company Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints.
Operasi Yang Adil / Fair Operation	Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. / Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
Lingkungan Hidup / Environment	• Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas / Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 About Changes to • Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja / Employment, Health and Safety	UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 tahun 2013 / The Manpower Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013
Pelanggan / Customers	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan Sektor Jasa Keuangan. / Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Protection of Customers in the Financial Services Sector. • PeraturanPerusahaan IndonesiaNo.7/7/PBI/2005tentangPenyelesaianPengaduan Pelanggan , dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 Tentang perlindungan Pelanggan. / Indonesian Company Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning the Resolution of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/PBI/2008 About Customer protection.
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan / Social and Community Development	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER- 02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. / Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

Sedangkan lingkup tanggung jawab sosial yang melebihi kewajiban yaitu Perusahaan turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

Meanwhile, the scope of social responsibility that exceeds obligations is that the Company supports and participates in achieving the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) through the implementation of corporate social responsibility activities and programs.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA DALAM DALAM UPAYA STEKEHOLDERS ENGAGEMENT DAN MENINGKATKAN NILAI STAKEHOLDERS

PJT II telah mengidentifikasi pemangku kepentingannya dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder. Keterlibatan Pemangku Kepentingan PJT II dapat dilihat pada tabel berikut :

STRATEGIES AND WORK PROGRAMS IN THE EFFORT OF STEKEHOLDERS ENGAGEMENT AND INCREASING STAKEHOLDERS VALUE

PJT II has identified its stakeholders in dealing with social, economic issues in an effort to engage stakeholders and increase value for stakeholders and shareholders. The involvement of PJT II Stakeholders can be seen in the following table:

PEMANGKU KEPENTINGAN / Stakeholders	METODE PELIBATAN / Engagement Methods	FREKUENSI / Frequency
Pemilik Modal / Capital owners	Rapat Umum Pemilik Modal / General Meeting of Capital Owners	Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. / Minimum 1 (one) time in 1 (one) year.
Pelanggan / Customer	Pertemuan langsung dengan Pelanggan / Face-to-face meeting with customers	Sesuai dengan kebutuhan / As needed
Karyawan / Employee	Berkumpul / Gathering	Minimal 1 (satu) tahun sekali / Minimum 1 (one) year
Mitra Kerja / Work partners	Proses Operasional / Operational Process	Sesuai dengan kebutuhan / As needed
Masyarakat / Public	Penerapan CSR / CSR Implementation	Penerapan CSR / CSR Implementation

Di samping itu, strategi dan program kerja tanggungjawab sosial untuk tiap-tiap core subject tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

In addition, strategies and work programs for social responsibility for each core subject of social responsibility are presented as follows:

- Hak Asasi Manusia Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yaitu menekankan pada pemenuhan prinsip hak asasi manusia terhadap Pekerja. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, pemenuhan hak pekerja dan program-program relevan lainnya.

- Human Rights The strategy in social responsibility related to human rights is to emphasize the fulfillment of human rights principles for workers. Work programs in social responsibility related to human rights include the fulfillment of workers' rights and other relevant programs.

- Operasi Yang Adil Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menekankan pada kegiatan operasional yang sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil antara lain, pengadaan barang dan jasa serta program-program relevan lainnya.

- Fair Operations The strategy in social responsibility related to fair operations is to emphasize operational activities that are in accordance with applicable business ethics and business ethics. Work programs in social responsibility related to fair operations, among others, procurement of goods and services as well as other relevant programs.

- Lingkungan Hidup Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup menekankan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan

- Environment The strategy in social responsibility related to the environment emphasizes the management and protection of the environment

hidup serta penghematan energi listrik dan pengurangan emisi. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup antara lain, Penghematan energi listrik dan pengurangan emisi, penghematan penggunaan air, pengelolaan limbah, dan program- program relevan lainnya.

as well as saving electrical energy and reducing emissions. Work programs in social responsibility related to the environment include saving electricity and reducing emissions, saving water use, waste management, and other relevant programs.

- Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu menekankan pada hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perusahaan dengan karyawan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain, program-program kesejahteraan pekerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta program-program relevan lainnya.

- Employment, Health, and Occupational Safety The strategy in social responsibility related to employment, health and safety at work is to emphasize healthy and conducive industrial relations between the Company and employees. Work programs in social responsibility related to employment, occupational health and safety include, among others, worker welfare programs, implementation of health checks, and other relevant programs.

- Pelanggan Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait Pelanggan yaitu menekankan pada upaya perlindungan Pelanggan serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait Pelanggan antara lain, kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perPerusahaan an, peningkatan kualitas layanan Pelanggan , program literasi perPerusahaan an serta program-program relevan lainnya.

- Customers The strategy in customer-related social responsibility is to emphasize efforts to protect customers and improve product and service quality. Work programs in customer-related social responsibility, among others, ease of access to information and the Company's service network, improvement of customer service quality, the Company's literacy program and other relevant programs.

- Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain, program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL) serta program-program relevan lainnya.

- Social and Community Development The strategy in social responsibility related to social and community development is to emphasize sustainable economic development. Work programs in social responsibility related to social and community development include the Partnership and Community Development program (TJSL) and other relevant programs.

ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PJT II memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR.

BUDGET AND COST REALIZATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY

PJT II views CSR as an investment in the long term, so that planning must be carefully considered for the smooth realization of all CSR programs and achieving their targets. An important factor in implementing CSR programs is the availability of funds or budgets allocated specifically for CSR activities.

Perum Jasa Tirta II telah melakukan TJSL dalam bentuk Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sejak tahun 1991 baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan Pembinaan yang bersifat hibah. Penyaluran dana Program Pendanaan UMK secara kumulatif dari tahun 1992 s.d. tahun 2020 berupa pinjaman sebesar Rp29.638.117.500,00 kepada 2640 UMK Binaan dengan dana Pembinaan kemitraan sebesar Rp2.150.267.440,00 sedangkan realisasi penyaluran pinjaman tahun 2021 sebesar Rp1.285.000.000,00 kepada 63 UMK Binaan sehingga penyaluran dana program pendanaan UMK sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp30.923.117.500,00 kepada 2703 UMK Binaan.

Perum Jasa Tirta II has conducted CSR in the form of Micro and Small Business Funding (UMK) since 1991, both in the form of loans and assistance in the form of grants. Cumulative distribution of UMK Funding Program funds from 1992 to d. in 2020 in the form of a loan of Rp. 29,638,117,500, 00 to 2640 MSEs with partnership development funds of Rp. 2,150,267,440.00, while the realization of loan disbursement in 2021 is Rp. 1,285,000,000. MSE funding until December 31, 2021 amounted to Rp. 30,923,117,500, 00 to 2703 MSEs fostered.

Penyaluran dana Program TJSL Bantuan tahun 2021 dengan sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina. Program TJSL Bantuan secara kumulatif dari tahun 2002 s.d tahun 2020 sebesar Rp.27.336.897.711,00 sedangkan penyaluran TJSL Bantuan pada tahun 2021 sebesar Rp7.069.727.500,00 sehingga penyaluran dana Program TJSL Bantuan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp34.406.625.211,00..

Distribution of funds for the TJSL Assistance Program in 2021 with a source of budget funds that are calculated as costs from the BUMN Trustees. The cumulative TJSL Assistance Program from 2002 to 2020 amounted to Rp.27,336,897,711.00 while the distribution of TJSL Assistance in 2021 was Rp.7,069,727,500.00 so that the distribution of TJSL Assistance Program funds up to December 31, 2021 amounted to Rp. 34,406,625. 211.00..

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related To Human Rights

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

PJT II memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. PJT II juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY IN HUMAN RIGHTS SECTOR

PJT II is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship. PJT II also provides equal rights and opportunities to work regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective workers.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

The scope of the Company's social responsibility related to Human Rights, which is related to employment includes discrimination treatment/ actions, recognition and guarantees for the Employee Union, the right to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/ miscarriage or illness due to menstruation, permission to worship as well as permission to leave the worker if there is something wrong.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING FOR HUMAN RIGHTS

Establishing a harmonious working relationship and in accordance with the provisions of the law. Creating a conducive work environment to support the smooth operation of the Company and not receiving reports related to human rights violations.

PELAKSANAAN DAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Setiap tahun, PJT II senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PJT II (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di PJT II telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

IMPLEMENTATION AND INITIATIVES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS SECTOR

Every year, PJT II always prepares activity plans as outlined in the work program contained in the PJT II Work Plan and Budget (RKAP). The work program is intended to ensure that the work process at PJT II has also taken into account the implementation of human rights, including the allocation of costs for employee activities.

Waktu Kerja

- Memperhatikan kelancaran operasional Perusahaan, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara PJT II dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu PJT II akan membayar upah kerja lembur kepada Pegawai.
- Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dan Perusahaan menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Bagi pegawai teller, customer service, dan pegawai operasional lainnya pada jama-jam istirahat tetap melayani Pelanggan , selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.

Working Time

- Taking into account the smooth operation of the Company, overtime work can be carried out with mutual agreement between PJT II and employees in order to complete work that cannot be delayed and for that PJT II will pay overtime wages to employees .
- Overtime hours are adjusted to the Company's operational needs and the Company determines overtime facilities. The amount of wages refers to the applicable laws and regulations.
- For teller employees, customer service, and other operational employees during break hours they continue to serve customers, then rest periods can be arranged in rotation with other co-workers.

- Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Izin Pernikahan

- Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada Direksi melalui unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri/ suami.
- Permohonan izin tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah atau yang bisa dipersamakan dari kantor kelurahan/ kepala desa dari instasi berwenang lainnya bagi pegawai atau calon yang memiliki status belum pernah melakukan perkawinan.

Cuti Tahunan

- Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Perusahaan selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
- Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan jabatan Pegawai yang diatur oleh Perusahaan .

- Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh Perusahaan.
- Hak cuti tahunan dilaksanakan berdasarkan permintaan pegawai dan/atau penugasan oleh Perusahaan dan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan Perusahaan
- Bagi pegawai yang mengajukan rencana cuti tahunan namun ditolak oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada kepala unit dimaksud untuk memberikan alasan penolakannya secara tertulis dan ditembuskan ke unit kerja Human Capital.

Izin Menjalankan Ibadah

PJT II senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh PJT II, termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

- Especially for female employees who are breastfeeding, have been given appropriate opportunities to do lactation and or breastfeed their children during working hours.

Marriage Permit

- For employees who are going to get married, they must apply for written permission to the Board of Directors through the work unit with provisions for male employees to be the first wife, for female employees to be the first wife by stating the identity of the prospective wife/ husband.
- The permit application must attach a Certificate of Unmarried or an equivalent from the kelurahan office/village head from other authorized agencies for employees or candidates who have never married status.

Annual Leave

- Annual leave is given to Employees who have worked in the Company for 1 (one) year continuously.
- During the period of annual leave, employees continue to receive their full salary.
- The length of annual leave is determined based on the employee's position as regulated by the Company.
- Provisions for the implementation of annual leave are regulated by the Company.
- The right to annual leave is carried out based on the request of the employee and/or assignment by the Company and adjusted to the workload/ needs of the Company.
- For employees who submit an annual leave plan but are rejected by the head of the work unit concerned, it is obligatory for the head of the unit to provide the reasons for his refusal in a formal manner. in writing and copied to the Human Capital work unit

Permission to Run Worship

PJT II always gives permission to employees to carry out worship whose implementation provisions are regulated by PJT II, including permission to carry out Hajj and Umrah.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat :

- Peristiwa khusus yaitu pernikahan pegawai, pegawai menikahkan anak, suami/istri/anak/ menantu/orang tua/ mertua/anggota dalam satu rumah meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan, khitanan anak, dan lain-lain.
- Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
- Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan.

PJT II telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK AZASI MANUSIA

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, PJT II dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan Perusahaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2021, PJT II belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

Permission to Leave Work

Every employee who is unable to attend the office for any reason must notify this matter either in writing or orally on the day concerned. In the case of verbal notification, a written notification must be prepared to his superior no later than the first opportunity to enter the office. Permission to leave work is given when:

- Special events, namely employee marriage, employee marrying off their child, husband/ wife/child/son-in-law/parent/in-law/member in one house dies, child is born, employee's wife experiences miscarriage, child circumcision, and others.
- Sickness, namely illness with a doctor's letter for a maximum of 3 (three) days, illness without a doctor's letter for 1 (one) day and illness with hospitalization.
- Important personal needs, urgent and can not be represented.

PJT II has set the conditions for the implementation of the permit to leave work.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN HUMAN RIGHTS SECTOR

By giving leave permits and guaranteeing the implementation of worship for each employee, it has an impact on increasing employee performance and sincerity in work. By applying the principles of human rights, PJT II can improve harmony in the Company's operational activities. In addition, employees will feel comfortable in the Company's environment. This has an impact on increasing employee satisfaction surveys. In 2021, PJT II has not yet received an award related to human rights.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PJT II memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. PJT II telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan pengendalian internal, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat. Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh PJT II saat ini adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti koRPBi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders. Penerapan anti koRPBi diwujudkan melalui pelaksanaan WBS, Code of Conduct dan Kebijakan Gratifikasi.

FAIR OPERATIONS COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

As a manifestation of the implementation of good corporate governance, PJT II is committed to always implementing fair operating practices. PJT II already has various policies that regulate fair operations, including internal control policies, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, and gratification policies. This policy is specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing healthy business activities. The scope of the implementation of social responsibility related to fair operating practices that are currently emphasized by PJT II are prevention of conflicts of interest, application of anti-corruption, healthy competition, and prevention of insider behavior. The implementation of anti-corruption is realized through the implementation of WBS, Code of Conduct and Gratification Policy.

RUMUSAN DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi Whistleblowing System dan Code of Conduct, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain.

FORMULATION AND SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FIELD OF OPERATING FAIR

The scope of social responsibility activities related to fair operations includes prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG ADIL

PJT II senantiasa mentargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan PJT II dan peraturan yang berlaku.

FAIR OPERATING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING

PJT II always targets in its annual planning to ensure the implementation of all fair operating practice policies. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with PJT II policies and applicable regulations.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh PJT II meliputi hal-hal berikut ini:

Pencegahan Benturan Kepentingan

PJT II melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti KoRPBi dan Gratifikasi bagi seluruh jajaran PJT II. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai- nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai conflict of interest, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Perusahaan sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Pelanggan, rekanan dan seluruh stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti koRPBi.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sanksi pelanggaran bagi yang melakukan gratifikasi adalah :

- Setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau UPG, sedara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsurunsur pasal bagi pemberi suap, yaitu: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.
- Dalam hal penerima gratifikasi tidak melaporkan barang gratifikasi yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diatur di atas, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN FAIR OPERATIONS

The implementation of social responsibility related to fair operating practices consistently carried out by PJT II includes the following:

Prevention of Conflict of Interests

PJT II through the implementation of the code of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention/ Anti-Corruption and Gratification for all ranks of PJT II. This is related to the shared commitment as stated in the Code of Ethics and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibits abuse of office and regulates employee integrity. The Company is very aware of the need to maintain good cooperative relationships with customers, partners and all stakeholders. by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions that are categorized as gratification and creating an anti-corruption culture.

Misapplication of Position and Gratification

Gratification is a broad term for the provision of money, goods, commission rebates (discounts), interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other services. Gratuities are received both domestically and internationally, and are carried out either electronically or manually. The following are the penalties for gratification violations:

- Anyone who gives gratification to the recipient of gratification, whether in the condition that the recipient of gratification reports or does not report the gratification he has received to the KPK or UPG, legally can be threatened with a criminal offense as a bribe giver, as long as the elements of the article are for the bribe giver. , namely: Article 5 paragraph (1) and Article 13 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption are fulfilled.
- In the event that the recipient of the gratuity does not report the gratuity that has been received according to the period stipulated above, the acceptance is considered a bribe until proven otherwise in court.

- Bagi insan Perusahaan yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Ketentuan sanksi atas tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG PJT II.

Implementasi Whistleblowing System

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat PJT II wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Kebijakan whistleblowing diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PJT II untuk melaporkan fraud yang terjadi. Lingkup pengaduan meliputi :

a. Perbuatan fraud.
b. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi :
   - Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/ atau dokumen.
   - Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan.
   - Menginformasikan/mengungkapkan rahasia Pelanggan dan Perusahaan.
   - Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian Perusahaan.
   - Penyelewengan uang/kas Perusahaan. Penggelapan aset dan/atau inventaris Perusahaan.
   - Pemerasan.
   - Perbuatan Asusila

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Komitmen PJT II dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada PJT II. Dengan meningkatnya kepercayaan dari stakeholder diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Sampai dengan tahun 2021,

- Company personnel who receive gratification and do not report the receipt are threatened with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

- The above sanctions provisions do not apply if the recipient of the gratuity reports the gratuity he received to the Corruption Eradication Commission (KPK) through UPG PJTII.

Whistleblowing System Implementation

All PJT II employees/officers are required to report any alleged irregularities that occur within the Company in the context of implementing healthy Company operations and good governance. The whistleblowing policy is in place to encourage and educate PJT II employees and officials about reporting fraud. The following are the types of complaints:

a. Fraud.
b. Examples of Code of Ethics violations are:
   - Misuse and falsification of data and/or documents
   - Misuse and corruption data and/ordocuments misuse of Position for Personal/Group Interests or Other Outside Interests
   - Informing/disclosing Customer and Company Secrets
   - Accept and/or disbursement of gratuities that may influence decision-making and/or result in losses to the company.

   - Misappropriation of company funds taking Company assets and/or inventory.

   - Extortion.
   - Immoral Behavior

FAIR OPERATIONS ACHIEVEMENTS AND AWARDS INITIATIVES FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

The commitment of PJT II to implementing social responsibility in the form of fair operating practices has increased stakeholders' trust in the company. It is expected that increased trust from stakeholders will improve the Company's performance. Until 2021, the Company is not subject to legal sanctions, and its performance is recognized by third parties.

Perusahaan tidak dikenakan sanksi dalam perkara hukum serta diakuinya kinerja Perusahaan oleh pihak eksternal. Sampai dengan Desember 2021, PJT II belum memiliki penghargaan terkait operasi yang adil.mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45

PJT II does not yet have a fair operations award as of December 2021.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Environmental Social Responsibility In Corporate

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, PJT II telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal.

COMMITMENT AND RESPONSIBILITY POLICY SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ENVIRONMENTAL FIELD LIVE

As one of the sustainable finance implementations, PJT II has several environmental policies, both internally and externally.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup oleh PJT II juga dapat memberikan dampak dan risiko pada lingkungan. Risiko tersebut yaitu, jika Perusahaan memberikan fasilitas kredit kepada Pelanggan menggunakan fasilitas tersebut ke dalam usaha yang dapat mencemari dan juga merusak lingkungan. Dalam hal ini, Perusahaan harus melakukan seleksi dalam memberikan kredit agar kredit yang diberikan tersebut dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena berkembangan Perusahaan tergantungpadafasilitaskreditnya.

IMPACTS AND RISKS ON THE ENVIRONMENT

The implementation of environmental social responsibility by PJT II may have environmental consequences and risks. The risk is that if the Company provides credit facilities to Customers, they will use these facilities in a way that will pollute and harm the environment. Because the Company's development is dependent on its credit facilities, the Company must make a choice in providing credit so that the credit provided can participate in environmental management.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Terjadinya efisiensi di lingkungan internal PJT II sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profit kepada Perusahaan dengan menekan biaya operasional. Sedangkan untuk kegiatan eksternal, dapat dijalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Perusahaan, sehingga citra PJT II di masyarakat dapat terjaga.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TARGET/ PLAN IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

Efficiency occurs within the PJT II internal environment in order to increase profits for the company by reducing operational costs. can be maintained in society

KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Wujud dukungan PJT II terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perusahaan baik itu operasional di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

PEDULI LINGKUNGAN INTERNAL

PJT II terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk kinerja kami pada lingkungan. Oleh sebab itu, PJT II senantiasa menerapkan peduli lingkungan di lingkungan operasional Perusahaan. Perusahaan menyadari, efisiensi energi dan air tidak hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. PJT II membuat kebijakan terkait lingkungan internal yaitu melalui program PJT II Go Green. Melalui program PJT II Go Green ini, seluruh pegawai diminta untuk peduli akan 5 (lima) hal, yakni :

- Gunakan air sehemat mungkin;
- Nyalakan listrik jika diperlukan;
- Tanam pohon sebanyak mungkin;
- Gunakan bahan yang mudah didaur ulang;
- Buang sampah pada tempatnya.

Selain hal tersebut, manajemen telah menentukan kebijakan antara lain hemat penggunaan listrik terutama di gedung kantor pusat PJT II dimana seluruh bagian gedung akan dimatikan saat jam 18.00 sore untuk penghematan. Selain itu dalam melaksanakan rapat sudah jarang digunakan kertas dalam menduplikasi bahan rapat melainkan dengan presentasi melaui TV atau Infocus, selain itu dalam penggunaan kertas juga diminimalisasi dengan penggunaan email dan kertas yang sudah terpakai untuk dimanfaatkan sisi yang masih bisa digunakan.

GREEN OFFICE GEDUNG PJT II HEMAT ENERGI

Kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dalam kegiatan operasional diwujudkan melalui penerapan prinsip Green Office. Green Office merupakan konsep kantor yangpelaksanaan kegiatannya dijalankan secara ramah lingkungan, di mana seluruh pegawai dan manajemen kantor berupaya untuk menerapkan berbagai penghematan, seperti hemat kertas, hemat penggunaan listrik, hemat konsumsi air, dan didukung oleh pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan.

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES IN CONNECTION WITH COMPANY OPERATIONS

The form of PJT II's environmental preservation support is reflected in every activity of the Company, both operational at the headquarters and business activities, including the following.

PJT II CARE FOR THE INTERNAL ENVIRONMENT.

As a result, PJT II always practices environmental stewardship in the Company's operational environment. The company recognizes that energy and water efficiency is beneficial not only for environmental sustainability, but also for cost savings in the face of an economic slowdown. PJT II implements environmental policies, specifically the PJT II Go Green program. All employees are asked to care about 5 (five) things as part of the PJT II Go Green program:

- Use water as sparingly as possible;
- Turn on power only when necessary;
- Plant as many trees as possible;
- Use easily recyclable materials;
- Put garbage in its proper place.

Aside from that, management has established policies such as saving electricity, particularly in the PJT II head office building, where all parts of the building will be turned off at 18.00 pm to save money. Furthermore, when conducting meetings, paper is rarely used in duplicating meeting materials, but with presentations via TV or Infocus, paper use is also minimized by using email and paper that has been used on the side that can still be used.

PJT II Green Office Building SAVES ENERGY

The application of Green Office principles demonstrates the Company's concern for the environment in operational activities. Green Office is an office concept in which all office employees and management strive to implement various savings, such as saving paper, saving electricity use, saving water consumption, and supported by good waste management and not polluting the environment. Building large buildings means increasing energy consumption in large quantities

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. Energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

In the midst of this global energy crisis, where energy supplies are becoming increasingly scarce and expensive. This limited energy must be distributed wisely, for example, by implementing the principle of energy-efficient buildings.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45% energi primer di Indonesia dikonsumsi oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi siginifikan. Dengan menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi, dinding gedung yang keseluruhan mengunakan kaca membuat sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien.

Energy efficient buildings use less energy while maintaining the quality of energy services. Buildings consume approximately 45% of primary energy in Indonesia, making the building sector a significant contributor to greenhouse gas (GHG) emissions. The walls of the building are entirely made of glass thanks to the use of high-efficiency electrical equipment, making the lighting system efficient, which consumes about 20% of the electricity in an office building.

Sepanjang tahun 2021 melalui penerapan konsep Green Office, Perusahaan telah melakukan penghematan penggunaan air dan listrik.

Throughout 2021, the Company has saved money on water and electricity by implementing the Green Office concept.

Sementara kegiatan konservasi air, pengelolaan sampah, dan penghijauan yang dilaksanakan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) selama tahun 2021 memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi penyaluran air bagi kebutuhan pemangku kepentingan. Secara kuantitatif, hal tersebut tercermin dari penyediaan air baku, air baku ke PLTA, air bersih, dan air irigasi tahun 2021 sebagai berikut:

Meanwhile, water conservation, waste management, and reforestation activities conducted in the watershed area (DAS) during 2021 have a positive impact on the effectiveness and efficiency of water distribution for stakeholders' needs. This is reflected quantitatively in the provision of raw water, raw water to hydropower, clean water, and irrigation water in 2021, as shown below:

Program CSV / CSV Program

Gambaran TPB Program CSV Yang Dilaksanakan Oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut : /
The description of the TPB of the CSV Program Implemented by Perum Jasa Tirta II is as follows:

NO.	PROGRAM Program	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp) 2021 Budget (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp) Realization In 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp) Realization In 2020 (Rp)	NILAI MANFAAT CSV BAGI PERUSAHAAN Value Of Csv Benefits For Companies
1.	Program Biogas di Kawasan Citarum Hulu / Biogas Program in the Upper Citarum Area	800.000.000	800.000.000	-	Mengurangi Pencemaran sungai Citarum dari kotoran sapi / Reducing Citarum River Pollution from cow dung

Gambaran TPB Program CSV Yang Dilaksanakan Oleh Perum Jasa Tirta II Tahun 2021

Latar belakang pemilihan program biogas adalah pembuangan limbah ternak dalam hal ini kotoran sapi ke Citarum dan Anak Sungai Citarum menyebabkan terjadinya pencemaran yang memerlukan penanganan dengan mengedukasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang berada di DAS Citarum Melalui Program Biogas yang mengolah limbah kotoran sapi menjadi gas sebagai energi alternative (kompor dan lampu/ penerangan) dan pupuk cair serta untuk mengatasi pencemaran air sungai Citarum dari kotoran sapi yang diperkirakan sebanyak 36 ribu sapi yang kotorannya dibuang ke sungai Citarum, nilai bantuan rencananya sebesar Rp800.000.000,00 dengan indikator keberhasilan terbangunnya 50 Digester Biogas.

Realisasi pembangunan Digester Biogas Tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00 yang berlokasi di Desa Sukamanah, kec. Pangalengan, Kab. Bandung dengan jumlah digester sebanyak 50 Digester Biogas atau mencapai 100,00% dari RKA Tahun 2021 sebanyak 50 Digester Biogas

TPB CSV Program Implemented by Perum Jasa Tirta II is described as follows:

TPB CSV Program Implemented by Perum Jasa Tirta II in 2021: Overview The background for selecting the biogas program is that the disposal of livestock waste, in this case cow dung, into the Citarum and Citarum River tributaries causes pollution that must be addressed through public education. Empowerment of communities in the Citarum watershed through the Biogas Program, which converts cow dung waste into gas for alternative energy (stoves and lamps/lighting) and liquid fertilizers, as well as to combat Citarum river water pollution caused by cow dung, which is estimated to be 36 thousand cows whose dung is dumped into the river. Citarum River, with an indicator of the success of the construction of 50 Biogas Digesters, the value of the planned assistance is Rp800,000,000.00.
The completion of a Biogas Digester with a value of Rp. 800,000,000.00 in 2021, located in Sukamanah Village, kec. Pangalengan, Kab. Bandung, with a total of 50 Biogas Digesters, or reaching 100.00% of the 2021 RKA of 50 Biogas Digesters.

Program Unggulan

Gambaran TPB Program Unggulan Yang Dilaksanakan Oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut :

Featured Shows

The following is an overview of TPB Featured Programs implemented by Perum Jasa Tirta II:

NO.	PROGRAM UNGGULAN Leading Program	TPB	RKA TAHUN 2021 (Rp) RKA 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2021 (Rp) Realization In 2021 (Rp)	REALISASI TAHUN 2020 (Rp) Realization In 2020 (Rp)
1.	Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu / Provision of Clean Water Facilities in the Upper Citarum Area	6	300.000.000	270.000.000	187.000.000
2.	Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu / Conservation and Community Empowerment in the Upper Citarum Area	15	400.000.000	353.000.000	140.000.000

Program TJSL Unggulan PJT II tahun 2021 sesuai Prioritas Program TPB sebagai berikut : / TJSL will lead TJSL Program II in 2021, based on TPB Program Priorities as follows:

Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu

Penyediaan Sarana Air Bersih masuk kedalam kategori Pilar Lingkungan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan program pemberian bantuan sarana air bersih hingga masyarakat dapat mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, dengan rencana nilai bantuan sebesar Rp300.000.000,00 yaitu tersedianya 4 sarana dan atau prasarana air baku untuk melayani kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Realisasi Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu Tahun 2021 yaitu tersedianya 9 sarana air bersih dengan nilai sebesar Rp270.000.000,00 yang berlokasi di :

- Kampung Kertamanah Desa Margamukti Kec. Pangalengan Kab. Bandung;
- Situ Sipatahunan Baleendah Bandung;
- Komplek Madani Regency, Bandung,
- Jl. Lingkar Gunung Parang Desa Pesanggrahan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.
- Desa Mekarjaya Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- RT 007 RW 005 Kelurahan Baleendah Kecamatan Belendah Kabupaten Purwakarta.
- Kampung Gentong Kelurahan Jelekong Kabupaten Bandung.
- Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
- Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan kabupaten Purwakarta.

Telah mencapai 225,00% dari RKA Tahun 2021 yaitu tersedianya 4 sarana dan atau prasarana air baku untuk melayani kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Provision of Safe Drinking Water in the Citarum Upstream Area

The provision of clean water facilities is included in TPB 6 Clean Water and Adequate Sanitation with a program of providing clean water facilities so that the community can achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all, with a planned value of assistance of Rp300,000,000.00, namely the availability of 4 raw water facilities and or infrastructure to serve community groups in need.

Realization of the Provision of Clean Water Facilities in the Upper Citarum Area in 2021, Specifically, 9 clean water facilities worth Rp270,000,000.00 are available at the following locations:

- Kampung Kertamanah, Margamukti Village, Kec. Pangalengan District, Bandung;
- Situ Sipatahun Baleendah Bandung;
- Madani Regency Complex, Bandung,
- Jl. Mount Parang Circle, Pesanggrahan Village, Tegalwaru District, Purwakarta Regency.
- Mekarjaya Village is located in the Banjaran District of the Bandung Regency.
- Baleendah Village, Belendah District, Purwakarta Regency, RT 007 RW 005. Bandung Regency,
- Gentong Village, Jelekong Village

- Lamajang Village is located in the Pangalengan District of the Bandung Regency.
- Selaawi Village is located in the Pasawahan District of the Purwakarta Regency.

Has attained 225.00% of the RKA for 2021, namely the availability of four raw water facilities and/or infrastructure to serve community groups in need.

Water Conservation and Efficiency

Efisiensi dan Konservasi Air

Perusahaan menitikberatkan pada pentingnya penerapan upaya efisiensi dan konservasi air secara efektif dan efisien gunamendukung pengelolaan SumberDaya Air yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan pada lingkup operasional perkantoran maupun penyaluran air kepada pemangku kepentingan melalui pemantauan dan pengawasan penggunaan air sesuai kebutuhan.

Dalam lingkupoperasional perkantoran, efisiensiair digencarkan melalui sosialisasi penghematan air dengan memasang petunjuk hemat air di setiap sarana penggunaan air, penggunaan kembali air limbah bersih untuk kebutuhan siram tanaman di lingkungan kantor, dan penggunaan air minum galon dibandingkan air minum kemasan sekali pakai.

Adanya pandemi Covid-19 yang tengah terjadi tidak membatasi dan menghalangi seluruh insan Jasa Tirta II untuk tetap memberikan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam melalui program konservasi di HUT PJT II ke-53 yang jatuh di tahun 2020. Dengan mengusung tagline Save Water, Save Trees, Save Life, kegiatan konservasi ini menjadi bagian penting dari corporate campaign mengenai pentingnya menjagakelestarian air melalui penanaman pohon untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan di kehidupan masa depan.

Konservasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Citarum Hulu

Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu masuk kedalam Pilar Lingkungan TPB 15 Ekosistem Daratan melalui penanaman pohon dan penebaran benih ikan serta pemberdayaan masyarakat sehingga dapat melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dengan rencana nilai bantuan sebesar Rp400.000.000,00 yaitu dengan keterlibatan 4 kelompok masyarakat dalam pelaksanaan atau realisasi bantuan.

Realisasi Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu Tahun 2021 dengan nilai Rp353.000.000,00 yaitu Keterlibatan 4 Kelompok Masyarakat dalam kegiatan Konservasi di 5 lokasi (kelompok masyarakat) dan Pemberdayaan terhadap 3 kelompok masyarakat atau mencapai 200,00% dari RKA Tahun 2021.

The Company emphasizes the importance of effective and efficient water efficiency and conservation efforts to support long-term water resource management. This effort is reflected in the scope of office operations as well as the distribution of water to stakeholders via monitoring and supervision of water use as needed.

Water efficiency is increased within the scope of office operations by socializing water savings by installing water-saving instructions at every water use facility, reusing clean wastewater for watering plants in the office environment, and using gallon drinking water instead of single-use bottled water.

The ongoing Covid-19 pandemic does not limit or prevent all Jasa Tirta II personnel from actively participating in nature preservation programs at the 53rd PJT II Anniversary in 2020. This conservation activity, with the tagline Save Water, Save Trees, Save Life, is an important part of the corporate campaign about the importance of maintaining water conservation through tree planting to support the realization of sustainability in future life. Upper Citarum

Community Conservation And Empowerment Community

Conservation and Empowerment in the Upper Citarum Area is included in the Environmental Pillar of TPB 15 Land Ecosystems through tree planting and fish seed distribution, as well as community empowerment to protect, restore, and improve sustainable use of the environment with a planned assistance value of Rp. 400,000,000.00, namely with the involvement of four community groups in the implementation or realization of assistance.

Realization of Conservation and Community Empowerment in the Upper Citarum Area in 2021 with a value of IDR 353,000,000.00, namely the participation of four community groups in conservation activities in five locations (community groups) and the empowerment of three community groups, or reaching 200.00% of the RKA in 2021.

Waste and Waste Administration

Pengelolaan Sampah Dan Limbah

Kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Perum Jasa Tirta II dalam mendukung efektivitas konservasi sumber daya air. Pengelolaan sampah dan limbah dilakukan dengan pengangkatan sampah yang mengganggu kualitas air dan berpotensi menimbulkan banjir akibat penyumbatan sampah. Selain itu pengelolaan sampah juga merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran air, yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air, dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber air. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air yang dilaksanakan oleh PJT II antara lain :

Pembuatan Project Biogas

Pembangunan Project Biogas dipilih oleh PJT II sebagai bentuk komitmen terhadap kelestarian alam dan untuk membantu masyarakat sesuai dengan semangat "Air untuk menghidupi negeri". Terbentuknya program pembangunan Project Biogas yang perencanaannya dimulai pada November 2016 adalah sebagai upaya pengendalian pencemaran air dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. PJT II membuat project di 2 lokasi yaitu di Pangalengan merepresentasikan Bandung Selatan dan di Lembang merepresentasikan Bandung Utara.

Penertiban Keramba Jaring Apung

Dasar Pelaksanaan Penertiban Keramba Jaring Apung :

- Statement Presiden Joko Widodo agar Sungai Citarum bersih dalam kurun waktu 7 tahun (Kompas 23/02/2018)
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
- Permen PUPR nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan
- Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025
- Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 660.31/ Kep.923-DKP/2019 tentang Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur yang memenuhi Daya Dukung Lingkungan.

Penerapan Culture Base Fisheries (CBF)

Culture Base Fisheries (CBF) adalah Kegiatan perikanan tangkap dimana ikan hasil tangkapan berasal dari benih ikan hasil budidaya.

Waste management in the Watershed (DAS) environment is a routine activity carried out by Perum Jasa Tirta II to support the effectiveness of water resource conservation. Waste and waste management entails removing waste that impedes water quality and has the potential to cause flooding due to garbage blockage. Furthermore, waste management is part of efforts to control water pollution, which is intended to maintain and restore the quality of incoming water and that is in water sources by preventing water pollution from entering water sources and water source infrastructure. Among the water pollution control activities carried out by PJT II are:

Developing a Biogas Project

PJT II chose the Biogas Project Development as a form of commitment to nature conservation and to help the community in keeping with the spirit of "Water to support the country." The Biogas Project Development Program, which is set to begin in November 2016, is an effort to control water pollution through community empowerment. PJT II completed projects in two locations: Pangalengan, which represents South Bandung, and Lembang, which represents North Bandung.

Floating Net Cage Control

Basic Control of Floating Net Cages:

- President Joko Widodo's Promise to Clean the Citarum River in 7 Years (Kompas 23/02/2018)
- Presidential Regulation No. 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin P
- Permen PUPR No. 27 of 2015 concerning Dams
- Governor's Regulation No. 28 of 2019 concerning the Action Plan for Pollution Control and Damage to the Citarum River Basin for 2019-2025.
- Governor of West Java Decree No. 660.31/Kep.923-DKP/2019 on the Number of Floating Net Cages (KJA) in Cirata, Saguling, and Jatiluhur Reservoirs that meet the Environmental Carrying Capacity.

Culture-Based Fisheries Implementation (CBF)

Culture Base Fisheries (CBF) is a type of capture fishery in which the caught fish is derived from cultured fish.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

PEDULI LINGKUNGAN EXTERNAL

Selain program internal, PJT II juga turut dalam beberapa program peduli lingkungan yang melibatkan pihak eksternal. Program CSR dibidang lingkungan hidup telah dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Program Kemitraan) dan Organisasi/LSM/Masyarakat (Dana Bantuan Kemasyarakatan), beberapa program yang telah dilaksanakan lebih terfokus dalam kegiatan yang segera dilaksanakan dan tidak berkelanjutan antara lain dalam peduli lingkungan seperti Pemberian Alat Pemadam Api Portable, pemberian Tong Sampah, Truk Sampah dan lainnya namun tidak ada program keberlanjutannya. Pemberian CSR tersebut lebih kepada permintaan dari Pemerintah Daerah atau Organisasi/ LSM/Masyarakat.

CARE FOR THE EXTERNAL ENVIRONMENT

In addition to internal programs, PJT II also participates in several environmental care programs that involve external parties. CSR programs in the environmental field have been implemented in collaboration with the Regional Government (Partnership Program) and Organizations/NGOs/Society (Community Assistance Funds), several programs that have been implemented are more focused on activities that are immediately implemented and are not sustainable, among others in environmental care such as the Provision of Equipment Portable Fire Extinguishers, Trash Cans, Garbage Trucks and others but there is no sustainability program. The provision of CSR is more at the request of the Regional Government or Organizations/NGOs/Communities.

- Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu / Provision of Clean Water Facilities in the Upper Citarum Area



- Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Citarum Hulu / Provision of Clean Water Facilities in the Upper Citarum Area






- Konservasi dan Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Citarum Hulu / Conservation and Community Empowerment in the Upper Citarum Area




CAPAIAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang Lingkungan Hidup telah memberikan dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di lingkungan PJT II dan juga sekitar Perusahaan .

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Sampai dengan tahun 2021 , PJT II belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

SALURAN PENGADUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Saluran pengaduan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup berada di divisi CSR, selama 2021 tidak ada pengaduan terkait hal tersebut.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

K3 (Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah sebuah konsep untuk mencapai kondisi keselamatan yang bebas dari kecelakaan dan kerusakan dimana para karyawan bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi peralatan, keselamatan, dan kondisi karyawan sebagai pekerjanya. Yang paling utama adalah bagaimana perusahaan membuat sistem dan kebijakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja biasanya adalah :

- Unsafe Action: Tindakan Membahayakan
- Unsafe Condition: Kondisi Membahayakan
  Factor X:
- Faktor diluar kemampuan manusia

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikemukakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas “Keselamatan dan kesehatan kerja”.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi berbagai program ketenagakerjaan. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

For the Improvement and Improvement of the Quality of the Environment in the PJT II Environment and around the Company

ENVIRONMENTAL SECTOR CERTIFICATION

PJT II does not yet have environmental certification until 2021.

ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY COMPLAINT CHANNEL

The social responsibility complaint channel for the environment is in the CSR division; there were no complaints in 2021. CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT, WORKPLACE HEALTH AND SAFETY COMMITMENT, AND POLICY CORPORATE

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF EMPLOYMENT, COMMITMENT TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, AND POLICY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELDS OF EMPLOYMENT, HEALTH, AND SAFETY

K3 (Employment, Health, and Safety at work) is a concept that is free of work accidents and safety conditions. It encompasses the building’s condition, the condition of the equipment, safety, and the condition of the employees as workers. The most important factor is how the company develops systems and policies to prevent workplace accidents. Workplace accidents are typically caused by:

- Dangerous Action: Unsafe Action
- Dangerous Situation: Unsafe Situation
- Factor X: Factors that are beyond the capabilities of humans.

Occupational safety and health is stated in Law No. 1 of 1970 and Law No. 13 of 2003 concerning employment that every worker has the right to obtain protection for “occupational safety and health.”

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF LABOR, OCCUPATIONAL HEALTH, AND SAFETY: SCOPE AND FORMULATION

Various employment programs are included in the scope of employment, occupational health, and safety activities. Furthermore, the Company has a program to provide health facilities and work safety guarantees to all employees as part of its occupational health and safety activities.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Semua karyawan PJT II dapat memahami prosedur dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga jika pada suatu saat nanti terjadi kondisi force majure, maka semua karyawan dapat melakukan tindakan yang benar demi keselamatan diri dan lingkungan (safety oficer). Di sinilah pentingnya keberadaan safety officer yang bertanggung jawab menakar risiko dan memberikan solusi atas permasalahan K3.

KESETARAAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tahun 2021 dilakukan penyempurnaan jalur karir berbasis manajemen talenta dengan penyempurnaan aturan dan kebijakan jalur karir pegawai atau Career Path Manajemen. Pengembangan sistem E-learning yang terus dilanjutkan dalam pengelolaan knowledge management, Pengembangan Learning Center yang menjadi wadah bagi pegawai dalam pembelajaran baik melalui e-learning maupun inhouse training dengan menyiapkan kurikulum dan silabus (pendidikan yang terprogram) serta instruktur internal yang handal di bidangnya. Database kepegawaian juga terus dilakukan penyempurnaan sistem informasi mengenai kepegawaian.

Selama tahun 2021, PJT II telah menyelenggarakan 222 pelatihan/training baik itu yang berupa inhouse dan Pelatihan Ekstern Dalam Negeri yang dikuti oleh 10.356 pegawai. PJT II memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengoptimalkan potensi diri dan keahliannya dengan mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan pelatihan. Seluruh program pelatihan dan pengembangan SDM yang diselengarakan oleh PJT II disesuaikan dengan standar kompetensi yang diinginkan, guna memenuhi kebutuhan bisnis dan suksesi SDM PJT II di masa depan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH, AND SAFETY ACTIVITIES All PJT II

Employees understand occupational safety and health management procedures and systems, so that if a force majeure condition occurs, everyone knows what to do for their own safety. as well as the environment (safety officer). This is where having a safety officer who is responsible for measuring risks and providing solutions to K3 problems comes into play.

EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS ACTIVITIES AND IMPACT

In 2021, employee rules or Career Path management policies will be improved to improve career path management.. Continuous development of an E-learning system in knowledge management management, creation of a Learning Center that serves as a forum for employees to learn both through e-learning and in-house training by developing curriculum and syllabus (programmed education), and hiring internal instructors who are knowledgeable in their fields. The personnel database is also used to improve the personnel information system.

PJT II held 222 trainings in 2021, both in-house and domestic external training, with 10,356 employees attending. Every employee at PJT II has the opportunity to maximize their potential and expertise by participating in various education, courses, and training. All PJT II HR training and development programs are tailored to the desired competency standards in order to meet the business needs and succession of employees.

Program Kesejahteraan Pegawai

PJT II senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai. Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, antara lain melalui materi maupun nonmaterial. Kesejahteraan pegawai secara material berkaitan langsung dengan prestasi pegawai, dan dapat diberikan berupa kenaikan gaji pegawai, kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, serta memberikan penghargaan pegawai.

Kesempatan Bekerja yang Adil dan Merata

PJT II menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan SDM. Rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan dan fair tanpa adanya nepotisme dari kalangan internal dan eksternal. Proses rekrutmen pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi calon pegawai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

PJT II menjamin keseteraan gender dan kesempatan kerja yang luas bagi semua pegawai tanpa memandang jenis kelamin, suku maupun agama dan kepercayaan pegawai.

Reward System

Reward System memiliki bagian yang penting dalam memotivasi produktivitas dan meningkatkan retention SDM. Untuk itu, sistem penggajian dan kesejahteraan terus di-review dengan mempertimbangkan prinsip internal equity dan external competitiveness. Unsur-unsur penggajian adalah Gaji pokok dan Tunjangan jabatan.

Selain remunerasi, sesuai dengan kemampuan Perusahaan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi pegawainya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi, diantaranya dengan memberikan fasilitas dan tunjangan sebagai berikut :

- Fasilitas Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan
- Uang Makan (uang kehadiran)
- Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar
- Bantuan Pakaian Dinas
- Uang santunan kematian
- Jasa Produksi
- THR
- Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun
- Jaminan Hari Tua (BPJS)
- Manfaat Pensiun
- Tunjangan Hari Tua
- Tunjangan Pajak

The PJT II Employee Welfare Program

Is always concerned with employee welfare and strives to meet employee needs. There are both material and non-material employee welfare improvement programs that have been implemented in 2021. Employee welfare is materially related to employee performance and can take the form of salary increases, benefit increases, bonuses, and employee awards.

Equal and Fair Employment Opportunities

In HR management, PJT II follows the non-discrimination principle. Employee recruitment is conducted in a transparent and fair manner, with no nepotism from either internal or external parties. The employee recruitment process considers prospective employees' competence in relation to the required position formation.

PJT II ensures gender equality and a diverse range of job opportunities for all employees, regardless of gender, ethnicity, religion, or employee beliefs.

System of Rewards

The Reward System is critical in motivating productivity and increasing HR retention. To that end, the payroll and welfare system is constantly reviewed while keeping internal equity and external competitiveness in mind. Salary components include base pay and job allowances.

In addition to remuneration, the Company continues to strive to improve the welfare of its employees in accordance with the Company's capabilities as a form of appreciation for performance and dedication, including by providing the following facilities and benefits:

- Health Care Facilities, both Company Guarantee and BPJS Health.
- Allowance for meals (attendance fee)
- Provision for Annual Leave and Leave of Absence
- Service Clothing Assistance for
- Compensation for Death
- Production Service
- THR
- Compensation for periods of service of 15, 25, and 30 years
- Retirement Security (BPJS)
- Pension
- Advantages of Old Age
- Allowance for Taxes

Halaman ini sengaja di kosongkan / This page has been intentionally left blank





LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL REPORT



LAI 2021

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021 and 2020

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES

Daftar Isi

Halaman/
Page

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2021 and 2020***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020 PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II AND SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We the undersigned :*

1. Nama : Imam Santoso : *Name* 1.
   Alamat Kantor : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat : *Office Address*
   Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas : Jl. Warga I No. 7 RT/RW 014/003 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta : *Domicile as stated in ID Card*
   Nomor Telepon : (0264) 201972 : *Phone Number*
   Jabatan : Direktur Utama / *President Director* : *Position*

2. Nama : Indriani Widiastuti : *Name* 2.
   Alamat Kantor : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat : *Office Address*
   Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas : Jl. Siaga I Gg. Lukis No. 36 RT/RW 004/005 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta : *Domicile as stated in ID Card*
   Nomor Telepon : (0264) 201972 : *Phone Number*
   Jabatan : Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ *Finance, Human Resources and Risk Management* : *Position*

Menyatakan bahwa: / *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan Entitas Anak (Grup). / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and Subsidiaries (Group).*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. / *The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar. / *All information contained in the consolidated financial statements of the Group are complete and correct.*
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. / *The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts and nor do they omit material information or facts.*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup. / *We are responsible for the Group's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This is our declaration, which has been made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Purwakarta, 20 Juni/ *June 20, 2022*

METERAI TEMPEL
F7A60AJX859544968

Imam Santoso
Direktur Utama/
President Director

Indriani Widiastuti
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/
Finance, Human Resources and Risk Management

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
SOHO SKYLOFT
Unit 1888-1898
Ciputra World Surabaya
Jl. Mayjen Sungkono No. 89
Surabaya - 60224

T +62 31 9953 3999, +62 31 9953 3333
F +62 31 9953 2121

www.rsm.id

Nomor/ *Number:* 00025/3.0310/AU.1/05/0500-1/1/VI/2022

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi/
The Stockholders, Boards of Supervisor and Directors

Perusahaan Umum Jasa Tirta II

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2021, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No. 543/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Head Office
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and its subsidiaries as of of December 31, 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan 34.d atas laporan keuangan, dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) PLTA Djuanda, PLTA Cirata dan PLTA Saguling antara Perusahaan dengan PT PLN (Persero), masing-masing pihak telah membuat kesepahaman bersama untuk melakukan mediasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Catatan 39.1 menjelaskan bahwa telah terbit laporan reviu dari BPKP atas permasalahan tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perusahaan Umum Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) Grup No. LR-33/D405/2/2022 tanggal 29 Maret 2022. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Emphasis of a matter

As disclosed in Note 34.d on the financial statements, in attempt to settle the matter of Water Resources Management Service Costs (BJPSDA) billing of PLTA Djuanda, PLTA Cirata and PLTA Saguling between the Company and PT PLN (Persero), each party has made mutual consentient to do mediation by Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Note 39.1 explains that review report from BPKP has been issued on the matter of Water Resources Management Service Costs (BJPSDA) billing of Perusahaan Umum Jasa Tirta II with PT PLN (Persero) Group No. LR-33/D405/2/2022 dated March 29, 2022. Our opinion is not modified in respect of this matter.

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan entitas anaknya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 6 Juni 2022 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2020 serta pengungkapan hal lain mengenai laporan keuangan tersendiri (induk saja) Perusahaan Umum Jasa Tirta II yang diterbitkan kembali.

Other matter

The consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and its subsidiaries as of and for the year then ended December 31, 2020 were audited by other independent auditor whose report dated June 6, 2022 expressed an unmodified opinion with the emphasis of matters paragraph regarding restatement of the 2020 consolidated financial statements and other matter disclosure concerning of the separate financial statement (parent only) of Perusahaan Umum Jasa Tirta II which has been reissued.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Endang Pramuwati
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya, 20 Juni 2022/ *June 20, 2022*

00025

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 Rp	2020 *) Rp	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	5	452,330,656,021	518,162,003,406	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha				*Accounts Receivable*
Pihak Berelasi	6	37,297,672,501	36,461,187,933	*Related Parties*
Pihak Ketiga	6	35,023,053,082	28,071,053,732	*Third Parties*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	7	211,007,665,707	165,646,126,324	*Accrued Revenue*
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	8	1,070,504,437	--	*Gross Amount Due from Customers*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	9	780,706,426	4,084,986,002	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	10	1,902,799,319	2,073,688,495	*Inventories*
Pembayaran di Muka	11	8,467,423,137	19,664,175,339	*Prepayments*
Jumlah Aset Lancar		**747,880,480,630**	**774,163,221,231**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non Current Assets***
Investasi pada Entitas Asosiasi	12	--	--	*Investments on Associates*
Investasi Jangka Panjang Lainnya	13	--	--	*Other Long-Term Investment*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya		67,275,000	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Aset Tetap	14	752,742,717,514	599,693,365,172	*Fixed Assets*
Aset Hak Guna	15	12,543,702,936	6,253,258,015	*Right-of-Use Assets*
Aset Pajak Tangguhan	24	74,712,242,370	57,433,124,788	*Deferred Tax Assets*
Pajak Dibayar di Muka	24	101,587,584,808	101,904,649,542	*Prepaid Taxes*
Aset Tidak Lancar Lainnya	16	220,577,800	220,577,800	*Other Non-Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**941,874,100,428**	**765,572,250,317**	***Total Non Current Asset***
JUMLAH ASET		**1,689,754,581,058**	**1,539,735,471,548**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang Usaha	17	12,296,540,629	43,121,046,858	*Accounts Payable*
Beban Akrual	18	37,638,101,878	23,401,094,351	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	24	26,306,064,447	25,987,074,732	*Taxes Payable*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	20	57,858,612,655	19,754,462,905	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang - Bagian				*Long-Term Liabilities -*
Lancar:				*Current Portion:*
Pendapatan Diterima di Muka	19	26,794,540,537	32,374,616,918	*Deferred Revenue*
Liabilitas Sewa	21	6,022,860,500	1,907,208,176	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	23	1,100,000,000	1,100,000,000	*Other Financial Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**168,016,720,646**	**147,645,503,940**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah				*Long-Term Liabilities - Less*
Dikurangi Bagian Lancar:				*Current Portion:*
Pendapatan Diterima di Muka	19	9,155,671,608	7,602,143,690	*Deferred Revenue*
Liabilitas Sewa	21	6,696,762,755	4,350,605,086	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	23	11,930,129,200	13,165,066,700	*Other Financial Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja	22	212,748,095,399	150,036,722,159	*Employee Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**240,530,658,962**	**175,154,537,635**	***Total Non-Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**408,547,379,608**	**322,800,041,575**	***TOTAL LIABILITIES***

*) Direklasifikasi (Catatan 40)

*) *As reclassified (Note 40)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 Rp	2020 *) Rp	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Pemerintah	25	164,547,635,935	164,547,635,935	*Government Capital*
Cadangan Umum		13,943,023,591	13,943,023,591	*Reserve*
Cadangan Bertujuan		1,027,001,112,300	1,027,001,112,300	*Appropriated Reserve*
Penghasilan Komprehensif Lain		(135,815,636,511)	(92,641,017,234)	*Other Comprehensive Income*
Komponen Ekuitas Lainnya		193,963,239	193,963,239	*Other Equity Component*
Saldo Laba		203,264,495,798	95,619,021,571	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan:				***Total Equity Attributable To:***
Pemilik Entitas Induk		1,273,134,594,352	1,208,663,739,402	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali	26	8,072,607,098	8,271,690,571	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Ekuitas		**1,281,207,201,450**	**1,216,935,429,973**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1,689,754,581,058**	**1,539,735,471,548**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Direklasifikasi (Catatan 40)

*) *As reclassified (Note 40)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 Rp	2020 *) Rp	
PENDAPATAN USAHA				***OPERATING REVENUES***
Pendapatan Sumber Daya Air	27	755,911,307,660	760,501,214,733	*Water Resources Revenues*
Pendapatan Non Sumber Daya Air	27	100,606,874,262	78,885,356,900	*Non Water Resources Revenue*
JUMLAH PENDAPATAN		**856,518,181,922**	**839,386,571,633**	***TOTAL REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN				***COST OF REVENUES***
Beban Sumber Daya Air	28	(487,645,867,607)	(466,856,659,574)	*Water Resources Expenses*
Beban Non Sumber Daya Air	28	(57,041,307,664)	(49,368,498,291)	*Non Water Resources Expenses*
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN		**(544,687,175,271)**	**(516,225,157,865)**	***TOTAL COST OF REVENUES***
LABA KOTOR		**311,831,006,651**	**323,161,413,768**	***GROSS PROFIT***
Beban Pemasaran	29	(4,730,927,476)	(5,370,625,562)	*Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	30	(168,651,298,989)	(167,036,305,765)	*General and Administration Expenses*
Pendapatan (Beban) Keuangan	31	11,004,850,211	24,669,924,004	*Financial Income (Expenses)*
Pendapatan (Beban) Lain-lain	32	(4,871,774,977)	(17,795,094,985)	*Other Income (Expenses)*
JUMLAH BEBAN USAHA		**(167,249,151,231)**	**(165,532,102,308)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**144,581,855,420**	**157,629,311,460**	***PROFIT BEFORE TAXES***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	24	(37,135,464,667)	(44,394,296,296)	*Income Tax Benefit (Expense)*
LABA TAHUN BERJALAN		**107,446,390,753**	**113,235,015,164**	***PROFIT FOR THE CURRENT YEAR***
Penghasilan Komprehensif Lain:				***Other Comprehensive Income:***
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				***Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss***
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	22	(55,352,075,997)	(77,989,291,011)	*Remeasurement of Defined Benefit Plans*
Pajak Penghasilan Terkait	24	12,177,456,720	15,934,206,705	*Related Income Tax*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		**(43,174,619,277)**	**(62,055,084,306)**	***Other Comprehensive Income for the Current Year***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**64,271,771,476**	**51,179,930,858**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				***Profit for the Current Year Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		107,608,172,087	114,374,590,343	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali		(161,781,334)	(1,139,575,179)	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Laba Tahun Berjalan		**107,446,390,753**	**113,235,015,164**	***Total Profit for the Current Year***
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				***Total Comprehensive Income for the Current Year Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		64,433,552,810	52,319,506,037	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali		(161,781,334)	(1,139,575,179)	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		**64,271,771,476**	**51,179,930,858**	***Total Comprehensive Income for the Current Year***

*) Direklasifikasi (Catatan 40)

*) *As reclassified (Note 40)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk/ *Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity*									
		Modal Pemerintah Republik Indonesia/ *Government Capital of Republic of Indonesia*	Cadangan Umum/ *Reserves*	Cadangan Bertujuan/ *Appropriated Reserves*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Components*	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ *Other Comprehensive Income*	*Saldo Laba/ Retained Earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah/ *Total*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo 31 Desember 2019		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**885,252,980,572**	**193,963,239**	**(30,585,932,929)**	**145,580,096,821**	**1,178,931,767,229**	**9,412,193,058**	**1,188,343,960,287**	***Balance as of December 31, 2019***
Dampak Penerapan PSAK:											*Effect on the Implementation of PSAK*
PSAK 71		--	--	--	--	--	(21,010,702,804)	(21,010,702,804)	--	(21,010,702,804)	*PSAK 71*
PSAK 72		--	--	--	--	--	19,273,353,684	19,273,353,684	--	19,273,353,684	*PSAK 72*
PSAK 73		--	--	--	--	--	(85,962,069)	(85,962,069)	(927,308)	(86,889,377)	*PSAK 73*
Saldo 1 Januari 2020		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**885,252,980,572**	**193,963,239**	**(30,585,932,929)**	**143,756,785,632**	**1,177,108,456,040**	**9,411,265,750**	**1,186,519,721,790**	***Balance as of January 1, 2020***
Peningkatan Cadangan		--	--	141,748,131,728	--	--	(141,748,131,728)	--	--	--	*Increasing of Reserve*
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	114,374,590,343	114,374,590,343	(1,139,575,179)	113,235,015,164	*Profit for Current Year*
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	22	--	--	--	--	(62,055,084,305)		(62,055,084,305)	--	(62,055,084,305)	*Loss on Remeasurement of Defined Benefits Plan*
Pembayaran Dividen		--	--	--	--	--	(20,764,222,676)	(20,764,222,676)	--	(20,764,222,676)	*Dividend Declared*
Saldo 31 Desember 2020		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**1,027,001,112,300**	**193,963,239**	**(92,641,017,234)**	**95,619,021,571**	**1,208,663,739,402**	**8,271,690,571**	**1,216,935,429,973**	***Balance as of December 31, 2020***
Saldo 31 Desember 2020											***Balance as of December 31, 2020***
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	22	--	--	--	--	(43,174,619,277)	--	(43,174,619,277)	--	(43,174,619,277)	*Loss on Remeasurement of Defined Benefits Plan*
Penyesuaian		--	--	--	--	--	37,302,140	37,302,140	(37,302,140)	--	*Adjustment*
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	107,608,172,087	107,608,172,087	(161,781,334)	107,446,390,753	*Profit for Current Year*
Saldo 31 Desember 2021		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**1,027,001,112,300**	**193,963,239**	**(135,815,636,511)**	**203,264,495,798**	**1,273,134,594,352**	**8,072,607,098**	**1,281,207,201,450**	***Balance as of December 31, 2021***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
THE CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2021 and 2020
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2021 Rp	2020 Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan dari Pelanggan		794,365,429,469	740,752,913,253	*Receipts from Customers*
Pembayaran Kas kepada:				*Cash Payments to:*
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya		(330,453,366,849)	(355,841,804,478)	*Suppliers and Other Third Parties*
Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan		(258,011,827,084)	(258,275,094,590)	*Supervisory Board, Directors and Employees*
Penghasilan Bunga		12,573,210,214	25,423,924,676	*Interest Income*
Pembayaran Pajak		(143,635,528,609)	(88,403,071,851)	*Tax Payment*
Penerimaan Restitusi Pajak		36,111,876,173	17,595,670,092	*Receipts of Tax Refunds*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**110,949,793,314**	**81,252,537,102**	***Net Cash Flows Provided by Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan Aset Tetap		(168,242,230,802)	(108,801,993,116)	*Acquisition of Fixed Assets*
Hasil Pelepasan Aset Tetap		378,398,265	--	*Gain from the disposal of Fixed Assets*
Pembayaran Uang Muka		(1,848,954,676)	(12,756,544,900)	*Advances Payment*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(169,712,787,213)**	**(121,558,538,016)**	***Net Cash Flows Used in Investment Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				***Cash Flows from Financing Activities***
Pembayaran:				*Payments of:*
Dividen		--	(20,764,222,676)	*Dividends*
Liabilitas Sewa		(5,833,415,986)	(9,954,924,816)	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya		(1,234,937,500)	(7,865,062,500)	*Other Financial Liabilities*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(7,068,353,486)**	**(38,584,209,992)**	***Net Cash Flows Used in Financing Activities***
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas		**(65,831,347,385)**	**(78,890,210,906)**	***Net Decrease in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Awal Tahun		**518,162,003,406**	**597,052,214,312**	***Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year***
Kas dan Setara Akhir Tahun		**452,330,656,021**	**518,162,003,406**	***Cash and Cash Equivalents at the End of the Year***
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:				***Cash and Cash Equivalents are as follows:***
Kas		1,629,924,833	2,237,968,485	*Cash*
Bank		40,700,731,188	35,924,034,921	*Bank*
Deposito		410,000,000,000	480,000,000,000	*Time Deposit*
Jumlah		**452,330,656,021**	**518,162,003,406**	***Total***

Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan di Catatan 37

Transaction information that does not affect cash flows is disclosed in Note 37

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

1. Umum / *1. General*

a. Pendirian dan Informasi Umum

Pembangunan Bendungan/Waduk PLTA Ir. H. Djuanda dimulai tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Dengan selesainya pembangunan tersebut maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967 Pemerintah menetapkan berdirinya Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur yang bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya. Dengan berfungsinya sebagian besar prasarana pengairan yang meliputi waduk, bendungan utama dan PLTA Ir. H. Djuanda serta jaringan irigasi, maka berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1970 Pemerintah menetapkan pendirian Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang kemudian diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 1980. PP Nomor 20 Tahun 1970 jo. PP Nomor 35 Tahun 1980 disesuaikan dan disempurnakan menjadi PP Nomor 42 Tahun 1990 yang memperluas kewenangan, tugas serta lapangan usaha Perusahaan, selanjutnya dengan diterbitkannya PP Nomor 94 Tahun 1999, Perum Otorita Jatiluhur (POJ) diubah menjadi Perum Jasa Tirta II. Selanjutnya diatur kembali dengan PP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ("Perusahaan").

a. Establishment and General Information

Construction of Hydropower Dam/Reservoir Ir. H. Djuanda began in 1957 and was completed in 1967. With the completion of the construction, then according to Government Regulation (PP) Number 8 In 1967 the Government established the Djatiluhur State Company (PN) which is in charge of Exploitation and Maintenance of Dam/Reservoir Facilities and Infrastructur of Ir. H. Djuanda hydropower plant and pioneering the development of further projects. With the functioning of most irrigation infrastructure which includes reservoirs, main dams and Ir. H. Djuanda hydropower plant and irrigation networks, then according to Government Regulation Number 20 In 1970 the Government establishes the establishment of the Jatiluhur Authority Public Corporation (called POJ) which is then amended by Government Regulation Number 35 In 1980. Government Regulation Number 20 In 1970 jo. PP No. 35 of 1980 was adjusted and refined to become Government Regulation No. 42 In 1990 which expanded the authority, duties and field of business of the Company, then with the issuance of Government Regulation No. 94 of 1999, the Jatiluhur Authority (called POJ) was changed to Perum Jasa Tirta II. Furthermore, it is regulated again with Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II ("The Company").

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG). Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha:

1) Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;

2) Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Purpose and Objective

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the national economy and development sector in general, especially in the field of Undertaking and Managing Water Resources as well as optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on Good Corporate Governance (GCG). In order to carry out the aims and objectives, the Company conducts business activities:

1) Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing out, power plants and other water needs;

2) Supply of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other than PT Perusahaan Listrik Negara in accordance with the provisions of laws and regulations;

3) Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;

4) Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan

5) Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan *resort*, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

3) Generation, distribution of hydropower, drinking water, business consulting services in the field of Water Resources technology, large equipment rental and water quality laboratory services;

4) Development of SPAM (Drinking Water Supply System); and

5) Conducting business optimization of the Company's potential resources for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, leasing and business facilities and infrastructure owned by the Company.

c. Lokasi Perusahaan dan Wilayah Kerja
Lokasi Usaha Perusahaan
Jl. Lurah Kawi No. 01, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

c. The Company Location and Work Area
Working areas of the Company
Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta, West Java.

Unit Usaha	**Lokasi/ *Location***	***Business Unit***
Unit Wilayah I	Bekasi	*Regional I Unit*
Unit Wilayah II	Karawang	*Regional II Unit*
Unit Wilayah III	Subang	*Regional III Unit*
Unit Wilayah IV	Jatiluhur	*Regional IV Unit*
Unit PLTA	Jatiluhur	*Hydropower Unit*
Unit Usaha Pariwisata dan Hotel	Jatiluhur	*Tourism and Hotel Business Unit*

d. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya, Direksi dan Karyawan
Dewan Pengawas
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-92 /MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: 392/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-79/DEWAS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Surat Keputusan Dewan Pengawas No. KEP-05/DEWAS/III/2021

d. Board of Supervisory and Its Working Units, Directors and Employees
Board of Supervisory
Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-4/MBU/01/2020 dated January 3, 2020 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK-92/MBU/03/2020 dated March 23, 2020 regarding the Appointment of Members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK-340/MBU/10/2020 dated October 21, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: 392/MBU/12/2020 dated December 15, 2020 concerning Appointment of Members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Decree of the Supervisory Board Number: KEP-79/DEWAS/X/2020 dated October 14, 2020 concerning Extension of the Term of Work Period of the Secretary of Supervisory Board of Perusahaan Umum

tanggal 30 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Dewan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

(Perum) Jasa Tirta II and Decree of the Supervisory Board No. KEP-05/DEWAS/III/2021 dated March 30, 2021 concerning Dismissal and Appointment of the Secretary of Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the membership of the Supervisory Board as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
Ketua	Kelik Wirawan Wahyu W	Kelik Wirawan Wahyu W	*Chairman*
Anggota	Nuning Sri Rejeki W	Nuning Sri Rejeki W	*Member*
Anggota	Romy Marcandi	Romy Marcandi	*Member*
Anggota	Mohamad Sofwan	Mohamad Sofwan	*Member*
Sekretaris Dewan Pengawas	Yusuf Abdullah Musthofa	Umi Gita Nugraheni	*Secretary of the Supervisory Board*

Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-222/MBU/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-196/MBU/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: SK-301/MBU/09/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-420/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Directors

Based on the Decree of the Minister of SOE Number: SK-222/MBU/08/2018 dated August 1, 2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK-196/MBU/06/2020 dated June 11, 2020 regarding Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: SK-350/MBU/10/2020 dated October 27, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Director of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: SK-301/MBU/09/2021 dated September 9, 2021 concerning Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Number: SK-420/MBU/12/2021 dated December 29, 2021 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, composition of the Board of Directors on December 31, 2021 and 2020 as follows:

	2021	2020	
Direktur Utama	Imam Santoso	Imam Santoso	*President Director*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Risiko	Indriani Widiastuti	--	*Director of Finance, Human Resources (HR) and Risk Management*
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM)	--	Haris Zulkarnain	*Director of Finance and Human Resources (HR)*
Direktur Operasi dan Pemeliharaan	Anton Mardiyono	Anton Mardiyono	*Director of Operating and Maintenance*
Direktur Pengembangan Usaha	Dikdik Permadi Yoffana	Indriani Widiastuti	*Director of Business Development*

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-80/DEWAS/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: KEP-83/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-02/DEWAS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Audit Committees

Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-80/DEWAS/X/2020 dated October 14, 2020 regarding the Extension of the Term of Work Period of the Audit Committee of the Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: KEP-83/DEWAS/XI/2020 November 5, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-02/DEWAS/I/2021 dated January 29, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Audit Committee of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the Audit Committee membership as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
Ketua	Nuning Sri Rejeki W	Nuning Sri Rejeki W	*Chairman*
Anggota	Wawan Saeful Anwar	Wawan Saeful Anwar	*Member*
Anggota	Agus Waluyo	Royza Fauzi	*Member*

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Risk Management Monitoring Committee

Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of the Chairman of the Risk Monitoring Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the membership of the Risk Management Monitoring Committee on December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021	2020	
Ketua	Romy Marcandi	Romy Marcandi	*Chairman*
Anggota	Kandianawati	Kandianawati	*Member*

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jumlah SDM Perusahan terdiri dari (tidak diaudit):

e. Human Resources (HR)

As of December 31, 2021 and 2020, the total HR Company consists of (unaudited):

	2021	2020	
Organik	1,041	1,072	*Organic*
Non Organik	5	8	*Non Organic*
Jumlah	**1,046**	**1,080**	***Total***

f. Struktur Grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, struktur Grup adalah sebagai berikut:

f. Group Structure

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group". As of December 31, 2021 and 2020 the structure of the Group is as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Lokasi/ *Location*	Kegiatan Usaha/ *Scope of Business*	Tahun Berdiri/ *Year of Establishment*	Persentase Kepemilikan dan Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Percentage of Ownership and Total Assets Before Elimination*			
				2021		2020	
				%	Rp	%	Rp
Dikonsolidasi/ *Consolidated*							
Kepemilikan Langsung/ *Direct Ownership*							
PT Jasa Tirta Luhur	Bekasi	Jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi/ *Drinking Water Supply System Service and Construction*	2018	99.00%	49,602,816,487	99.00%	48,789,273,413
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Entitas Anak/ *Indirect Ownership Through Subsidiary*							
PT Tegar Mandiri Cemerlang	Bekasi	Industri dan Pengelolaan Air/ *Industry and Water Management*	2013	51.00%	40,233,934,126	51.00%	43,112,184,051

Kepemilikan Langsung

PT Jasa Tirta Luhur (JTL)

PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 29 Agustus 2018, dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya No. AHU-0042191.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018. Akta Pendirian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 155 tanggal 11 Mei 2021 dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor tentang pengalihan saham PT Pilar Jati Persada ke PT Air Sumber Kemakmuran. Perubahan ini telah diterima pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0308897 tanggal 17 Mei 2021.

Direct Ownership

PT Jasa Tirta Luhur (JTL)

PT Jasa Tirta Luhur was established based on Deed No. 46 dated August 29, 2018, from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notary in Bogor and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights through its decree No. AHU-0042191.AH.01.01 Year 2018 dated September 5, 2018. This Deed of Establishment has been amended several times, most recently by Deed No. 155 dated May 11, 2021 from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notary in Bogor regarding the transfer of shares of PT Pilar Jati Persada to PT Air Sumber Kemakmuran. Notification of this change has been received from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-AH.01.03-0308897 dated May 17, 2021.

Kepemilikan Tidak Langsung

PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC)

PT Tegar Mandiri Cemerlang didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2013, dari Soeleman Odang, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya No. AHU-44847.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013. Akta Pendirian

Indirect Ownership

PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC)

PT Tegar Mandiri Cemerlang was established based on Deed No. 16 dated May 16, 2013, of Soeleman Odang, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights through his decree No. AHU-44847.AH .01.01. Year 2013 dated August 27, 2013. The Deed of Establishment was amended

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 6 Agustus 2020, dari Henry Susanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang tentang Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan. TMC beroperasi sejak Agustus 2018.

several times, most recently with Deed No. 08 dated August 6, 2020, of Henry Susanto, S.H., M.Kn, Notary in Karawang Regency regarding Changes in the Purposes and Objectives of the Company. TMC has been operating since August 2018.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan / *2. Significant Accounting Policies*

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup mengatur mata uang fungsional itu sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generallybased on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statement of cash flow is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group manages the functional currency itself and the elements in the financial statements of each entity are measured based on the functional currency.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan asumsi dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar dan intepretasi atas standar yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Amandemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): "Akuntansi Wa'ad";
- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2021): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PSAK 13 (Penyesuaian Tahunan 2021): "Properti Investasi";
- PSAK 48 (Penyesuaian Tahunan 2021): "Penurunan Nilai Aset";
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2021): "Pengaturan Bersama"; dan
- ISAK 16 (Penyesuaian Tahunan 2021): "Perjanjian Konsesi".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standard, amendment and improvement to standards and interpretation of standard issued which effectively applied for the year starting on or after January 1, 2021, are as follows:

- *PSAK 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business";*
- *Amandment PSAK 71, Amandment PSAK 55, Amandment PSAK 60, Amandment PSAK 62, Amandment PSAK 73 regarding Interest rate Benchmark Reform – Phase 2;*
- *PSAK 110 (Improvement 2020): "Accounting for Sukuk";*
- *PSAK 111 (Improvement 2020): "Accounting for Wa'ad";*
- *PSAK 112 (Improvement 2020): "Accounting for Endowments";*
- *PSAK 1 (Annual Improvement 2021): "Presentation of Financial Statement";*
- *PSAK 13 (Annual Improvement 2021): "Investment Properties";*
- *PSAK 48 (Annual Improvement 2021): "Impairment of Assets";*
- *PSAK 66 (Annual Improvement 2021): "Joint Arrangement"; and*
- *ISAK 16 (Annual Improvement 2021): "Service Concession Arrangements".*

The implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no significant impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Entitas anak merupakan semua entitas, dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);

d. Principles of Consolidation

Subsidiaries are all entities, over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date when that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognized in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent entity.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

If the Group losses of control, the Group will:

a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;

b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);

c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

c) Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;

d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;

e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;

f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss in profit or loss which attributable to the parent.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

e. Transactions with Related Parties
A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

i. Has control or joint control over the reporting entity;

ii. Has significant influence over the reporting entity; or

iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

iii. Both entities are joint ventures of the same third party;

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

vii. A person identified in (a).i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or

viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the State Minister for State Owned Enterprises as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpatisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

f. Investments in Associates

An associate is an entity in which the investor has significant influence. Significant influence is the power to participate in financial and operating policy decisions investee, but not control or joint control over those policies.

Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung mapun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan.

If the entity has directly or indirectly (e.g through subsidiaries), 20% or more of the voting power of the investee, it shall be deemed to have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that the entity does not have significant influence. Conversely, if an entity has, directly or indirectly (e.g through subsidiaries), less than 20% of the voting rights investee, it shall be considered not to have significant influence, unless such a significant influence can be clearly demonstrated. Substantial or majority ownership by another investor does not preclude an entity to have a significant influence.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham dibentuk apabila berdasarkan pendapat manajemen terdapat penurunan nilai secara permanen atas nilai penyertaan.

The allowance for impairment losses on investments in shares is made when in the opinion of the management, there is a permanent decline in the value of the investment.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount plus or minus to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

a. Jika *investee* menjadi entitas anak.
b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
c. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan

a. *If the investee becomes a subsidiary.*
b. *If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
c. *When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have*

dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

g. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh atau menerbitkan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan untuk memperoleh aset keuangan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

g. Financial Instruments
Initial Recognition and Measurement
The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilites, at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar, yaitu: model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Subsequent Measurement of Financial Assets
The Company financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss on the basis of both: the Company's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan

b. Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

a. The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and

b. Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

a. The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and

b. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flow that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment losses and gain or loss on foreign exchange, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as measured at FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

(i) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.

(ii) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

(iii) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitment selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

Subsequent Measurement of Financial Liabilities
The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

(i) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.

(ii) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

(iii) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

a. Jumlah penyisihan kerugian dan
b. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.

(iv) Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

a. The amount of the loss allowance
b. The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.

(iv) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(i) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch")* yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

(i) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

(ii) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

(ii) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or nvestment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities for any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and benefits of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its

seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

The Group removes a financial liability when and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Impairment of Financial Assets

Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss (stage 1) is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Nilai waktu uang; dan

ii. Time value of money; and

iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat *"investment grade"* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets of financial liabilities) and method of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the

relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasikan arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak - pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an intergral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Reclassification

The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Company reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified

aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasikan untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengakuan dapat diobservasi dan signifikan input tehadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);

(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apablia nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);

(ii) Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk bank garansi tidak diklasifikasikan sebagai dari "Kas dan Setara Kas". Kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka ini disajikan sebagai bagian dari "Aset Keuangan Lancar Lainnya" atau "Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya".

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity of 3 (three) months or less from the placement date and are not pledged as collateral and are not restricted.

Time deposits which are pledged as collateral for bank guarantees are not classified as "Cash and Cash Equivalents". These restricted cash and time deposits are presented as part of "Other Current Financial Assets" or "Other Non-Current Financial Assets".

i. Tagihan Bruto Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.

Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui

i. Gross Amount Due From Customer

Gross amount due from customer is receivable arising from construction contracts undertaken for the customers while the work undertaken is in progress.

Gross amount due from customer are stated at the difference between costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized

dan termin. Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan survei oleh pemberi kerja dan Perusahaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan pekerjaan fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

losses and progress billings. Gross amount due from customer are recognized as revenue in accordance with the percentage of completion method as stated in the work completion minutes that determined based on surveys by owner and the Company of work performed that have not been issued an invoice due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Penurunan nilai persediaan akibat nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada tahun berjalan.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position (balance sheets) date.

Decline in the value of inventories due to net realizable value is lower than the cost of acquisition is recognized as a loss in the current year.

k. Pembayaran di Muka

Pembayaran di muka terdiri atas biaya dibayar di muka dan uang muka.

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

k. Prepayments

Prepayments consist of prepaid expenses and advances.

Prepaid expenses represent expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

Advances are an amount of cash out or costs incurred by the company for an activity or something that will be accounted for within a specified and predetermined time.

l. Aset Tetap

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

l. Fixed Assets

The initial of acquisition cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended on use.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *(carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

The cost includes the cost of replacing part of the fixed asset when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. Further, when a significant inspection is performed, the cost of the inspection is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if it meets the recognition criteria. All maintenance and repair costs that do not meet the ecognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

The Group has chosen to use the cost model as the accounting policy for the measurement of its fixed assets.

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Fixed assets, except land and landrights, are stated at acqusition cost less any accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perusahaan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode Kerjasama Operasi (KSO).

The joint operation assets are the Company's land used to conduct joint operation activities. The office buildings acquired as compensation in the joint operation and the related earnings in advanced are recognized when the assets are completed and ready for its intended use. Unearned income is recognized during the period of Joint Operation (JO).

Aset dan aset KSO dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Assets and the joint operation (JO) assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumtances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognized)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or when no future economic benefit is expected from its use or disposal. Fixed asset sold or disposed of, are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset. Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds, if any, and the carrying amount of fixed

neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

assets and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Biaya kemudian setelah biaya perolehan pertama kali
Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

Costs then after the first acquisition costs

The cost of maintenance and repairs is charged as an expense when incurred. Expenditures which extend the useful life of an asset or provide further economic benefits by increasing the capacity or quality of production of the asset, are capitalized and depreciated based on the applicable depreciation rate.

Penyusutan
Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

Depreciation
Depreciation starts at commencement of assets or when the assets are ready to use, using the straight-line method based on the estimated useful lives of the economies resulting in an annual percentage of depreciation of the following cost:

Kelompok Aset Tetap	Umur/ *Useful Life (Year)* Ekonomis/ *Economic* (Tahun/*Year*)	*Group of Assets*
Bangunan	10-50	*Building*
Sarana	10-20	*Facilities*
Instalasi dan Jaringan	2-20	*Installation and Network*
Suku Cadang Penyangga	4-10	*Supporting Sparepart*
Perabotan dan Peralatan	4-5	*Furniture and Equipment*
Alat Angkut dan Alat Berat	4-5	*Vehicle and Heavy Equiqment*
Tanaman Konservasi	40	*Plant Conservation*

Aset Dalam Pelaksanaan (ADP)
Aset dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan sesuai persentase penyelesaian pekerjaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Assets Under Construction (ADP)
Assets under construction are stated at acquisition cost based on the percentage of completion and presented as a part of of fixed assets. Once it is completed and ready to use, accumulated acquisition costs are reclassified to the actual fixed assets account.

Aset Tanaman Konservasi
Merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam rangka konservasi yang jangka waktu tanamannya lebih dari 1 (satu) periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidensial.

Plant Conservation Assets
Represents plants used in the context of conservation by which the plant period is more than 1 (one) period and have very rare possibilities to be sold as agricultural products, except for residual sales that are insidential.

Tanaman konservasi terdiri dari:
- **Tanaman Konservasi – Dewasa**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian tidak memerlukan lagi biaya untuk menunjang pertumbuhan yang

Plant conservation assets consist of:
- ***Conservation Plants – Mature**, is conservation plants that technically do not require more agricultural costs to support the growth of the plants. Thus, all expenses in*

bersangkutan. Dengan demikian, segala pengeluaran yang berkenaan dengan Tanaman Konservasi – Dewasa (jika ada) diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan tanaman.

relation to Conservation Plants - Mature (if any) are classified as plant maintenance expenses.

- **Tanaman Konservasi – Dalam Pertumbuhan**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian masih memerlukan pembiayaan dalam rangka pertumbuhan biologis sampai dengan tanaman tersebut menjadi dewasa. Biaya yang timbul meliputi biaya perolehan bibit, penyemaian, penanaman, pemupukan, biaya penjagaan/pengamanan dan biaya-biaya pertumbuhan tanaman lainnya sampai dengan tanaman tersebut siap menjadi dewasa (*mature*).

- ***Conservation Plants – In Growth**, is conservation plants that are in agricultural technical still need financing to support biological growth until the plants mature. Costs incurred include costs for obtaining seedlings, seeding, planting, fertilizing, safeguarding costs, and costs for the growth of other plants until they are ready to mature.*

Aset Tidak Produktif/ Tidak Berfungsi
Merupakan aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif/ tidak berfungsi dan disajikan pada aset tidak lancar lainnya.

Non Productive/ Non Functioning Assets
Represents fixed assets that do not provide benefits in production activity or no future economic benefits are expected from the use or disposal of assets are classified as non productive/ non functioning and are presented in other non-current assets.

Aset tidak produktif/ tidak berfungsi dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Non productive/ non functioning assets will be impaired at its carrying amount at the time those assets are no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non productive assets is formed as the application of the accounting of impairment.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

The write-off and the alienation of fixed assets is in accordance with the regulation designated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and Alienation of Fixed Assets of State-Owned Enterprises.

Aset tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Dewan Pengawas dan atau Pemegang Saham.

Non productive assets are derecognized when write-off approval from the Board of Commissioners and or Shareholders has been received.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

Any gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group income or other expenses.

Reviu atas Masa Manfaat Aset dan Nilai Sisa

Review of Useful Lives of Assets and Residual Value

Perusahaan menerapkan besaran nilai residu setiap jenis aset tetapnya yaitu Rp1.000.

The Company applies the residual value of each type of fixed asset at Rp1,000.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimal setiap akhir tahun buku dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least every year end and the effect of any changes in accounting estimate for on a prospective basis.

Aset Kelola
Aset kelola adalah aset berwujud milik negara yang digunakan dalam aktivitas operasi Perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan, tetapi tidak dicatat sebagai harta Perusahaan sesuai kebijakan pemerintah. Aset kelola terdiri dari sungai, waduk, bendungan, saluran induk, tanggul, jalan inspeksi, stasiun pompa air Curug, *tower Morning Glory* dan *minihydro* PLTA.

Managed Assets
Managed assets represent stated-owned tangible assets that is used in the Company's operational activities, not intended for sale in the Company's normal activities nor recorded as the Company's assets in accordance with government policy. Managed assets consist of rivers, reservoirs, dams, primary canal, levees, inspection road, Curug pumping station, Morning Glory tower and minihydro.

m. Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas di masa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

m. Deferred Revenue
Deferred revenue are money received from other parties in relation to the services of products that will be performed by entities in the future, but the services have yet delivered to that party.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak- pihak terkait dalam kontrak
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
   - Kontrak memiliki substansi komersial
   - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan

ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat

n. Revenue and Expense Recognition
The Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

i. Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
   - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
   - *The contract has commercial substance*
   - *It is probable that the Group will receive benefits for goods or sevices which is diverted.*

ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of

variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Dengan terpenuhi lima kriteria seluruhnya tersebut di atas, Grup mengakui pendapatan sebagai berikut:

With all of five criterias above are fulfilled, the Group recognizes revenue as follows:

1. Pendapatan Listrik diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan yang menghasilkan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.

1. Electricity Revenue is recognized when the Minutes of Monthly Electricity Usage multiplied by a predetermined rate which resulted in the amount of bills to be paid by the customer.

2. Pendapatan Air diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan atau tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.

2. Water Revenue is recognized when Minutes of Monthly Usage are made multiplied by a predetermined rates or charges to be paid by the customer.

3. Pendapatan Pariwisata diakui pada saat jasa tersebut diberikan atau dimanfaatkan oleh pengunjung pariwisata, setelah dikurangi kewajiban pajak dan pelayanan.

3. Tourism Revenue is recognized when the services are provided or utilized by tourism visitors, net of tax liabilities and services.

4. Pendapatan lainnya, diakui berdasarkan:
   a) Pada saat timbulnya hak atas sewa/ diterbitkan tagihan dan sebesar kas diterima sesuai masa sewa periode akuntansi, tidak termasuk pajak.
   b) Pada saat diterbitkan tagihan sebesar yang menjadi hak periode yang bersangkutan untuk pendapatan AMDK, jasa giro dan bunga deposito.
   c) Pada saat jatuh tempo pendapatan dikaitkan dengan waktu secara periodik sebesar yang menjadi hak periode yang bersangkutan.

4. Other revenue is recognized based on:
   a) At the time when the right to lease arise/ issuance of invoice and the amount of cash received according to the lease term for the accounting period, excluding tax.
   b) At the time of issuing a bill for which the rights of the period for income bottled water, current accounts and deposit.
   c) At maturity of revenue associated with periodic time at which the rights of the period.

d) Pada saat diterima kas sebesar yang menjadi hak periode bersangkutan, tidak termasuk PPN untuk jasa keramba jaring apung.

d) *Upon receipt of the amount of cash that is rightfully concerned period, not including VAT for floating fish cages.*

Beban
Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada periode yang bersangkutan (*acrual basis*).

Expense
Expenses are recognized in accordance with the useful life of the period (accrual basis).

o. Imbalan Kerja
Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah, bonus dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

Imbalan Kerja Jangka Panjang
Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

Imbalan kerja jangka panjang meliputi:
Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 10/2020 untuk tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk tahun 2020 atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

o. Employment Benefits
Short-Term Employee Benefits
Short-term employee benefits represent employee benefits that are paid in less than one year, including salaries, wages, bonuses and social security contributions. The obligation to pay these benefits is recognized at an undiscounted amount and charged to the statement of comprehensive loss for the year and recorded as accrued expenses/accrued expenses.

Long-Term Employee Benefits
Long-term employee benefits represent employee benefits that will be paid/payable after the employee has completed his tenure. The obligation to pay these benefits is recognized at the discounted amount and matures after one accounting period and is recognized as an expense in the statement of comprehensive income and a liability.

The portion of liabilities that will mature within one accounting period will be recorded as short-term liabilities and the portion of liabilities that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

Post-employment benefits consist of:
Post-employment Benefit
Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on the Omnibus Law No. 10/2020 for the year 2021 and Labor Law No. 13/2003 or Collective Labor Agreement ("PKB"), whichever is higher.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya
Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan penghargaan masa kerja. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pascakerja manfaat pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuaria yang diakui pada laba rugi.

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits
The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

a. When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
b. When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

Other Long-Term Benefits
The Company provides other long-term employee benefits in the form of long service leave and long service award. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to that for post-employment defined benefit plans, except for actuarial gain and losses which is recognised in profit or loss.

p. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an

terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untu dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. Pengakuan awal *goodwill*; atau

a. *The initial recognition of goodwill; or*

b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

b. *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

a. The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. Entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
   i. The same taxable entity; or
   ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan

a. Has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and

b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

b. *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

q. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar Keputusan/ Rapat Pembahasan Bersama direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian laba atau dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban *(expense)* melainkan sebagai distribusi / pengurang saldo laba.

q. Use of Retained Earnings Based on Joint Discussion Meetings ("RPB")

The use of retained earnings on the basis of Decisions / Minutes of Joint Discussion Meetings ("RPB") is realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to profit or dividends, employee costs and allowance for retained earnings to general reserves. Profit sharing is not treated as expense but rather as a distribution / deduction of retained earnings.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/072015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (PKBL - BUMN), pasal 8 ayat (1), bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau

b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

As stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (called "BUMN") No. PER-03/MBU/12/2016, on the Amendment of the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015, concerning the Partnership Program and Community Development Program for State Owned Enterprises, article 8, point (1), that the Fund Partnership Program and Community Development Program sourced from:

a. Allowance partially net profit of BUMN; and/or

b. Budgets are calculated as cost in BUMN.

r. Sewa

Grup sebagai Penyewa

Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Grup mengalokasikan

r. Lease

The Group as a Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- *The initial amount of the lease liability;*
- *Lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *Initial direct cost incurred; and*
- *An estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the

imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

After the commencement date, the Group measures right-of-use assets at cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *Penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;

b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan

c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan

- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;

- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;

- Menurunkan jumlah tercatat aset hak- guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap

a. Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;

b. Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and

c. Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Short-term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right- of-use assets and lease liabilities for short- term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*

- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*

- *Determines the lease term of the modified lease;*

- *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. At the effective date of the modification, the revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate for the reminder of the lease term;*

- *Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss*

keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan

- Membuat penyesuaian terkait aset hak- guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and

- *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Grup sebagai Pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa.
2. Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

The Group as a Lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if the lease does not transfer substantially all the risks and benefits related to ownership of the asset.

The classification of leases as financing or operating leases is based on the substance of the transaction and not on the form of the contract. Examples of situations that individually or in combination under normal conditions leading to leases classified as financing are:

1. *Leases transfer ownership of assets to the lessee at the end of the lease period.*
2. *The lessee has the option to purchase assets at a price that is quite low compared to the fair value at the date the option can be exercised so that at the beginning of the lease it is certain that the option will be implemented.*
3. *The lease period is for the majority of the economic life of the asset even though the ownership rights are not transferred.*
4. *At the beginning of the lease, the present value of the minimum lease payments is substantially close to the fair value of the leased asset, and;*
5. *Leased assets are special and where only the lessee can use them without needing to be modified materially.*

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka rugi pesewa yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh penyewa.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara subtansial lebih rendah dari nilai pasar sewa.

Indicators of situations that individually or collectively can also show that leases are classified as financing are:

1. *If the lessee can cancel the lease, the lessor's loss related to the cancellation is borne by the lessee.*
2. *Gains or losses from fluctuations in the fair value of residuals are charged to the lessee (for example, in the form of a discounted rental price and which is equivalent to the majority of the proceeds of residual sales at the end of the lease), and*
3. *The lessee can continue leasing for a second period with a rental value that is substantially lower than the rental market value.*

3. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Signifikan oleh Manajemen

3. Use of Estimates and Significant Accounting Considerations by Management

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Group' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Provisi Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan nilai pertanggungan dari *letter of credit* dan bentuk lain).

a. Provision for Impairment of Financial Assets

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by geography, product type, customer type and/or rating, and coverage by letters of credit and other forms).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan infomasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, and forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Nilai tercatat piutang usaha disajikan di Catatan 6.

Carrying amount of accounts receivable is presented in Note 6.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment,

sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Nilai tercatat liabilitas sewa disajikan di Catatan 21.

the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Carrying amount of lease liabilities is presented in Note 21.

c. Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (”DJP”).

Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dalam Grup kadang-kadang dapat dikenakan pajak final dan nonfinal. Penentuan penghasilan yang dikenakan pajak final dan non final dan juga biaya pengurang pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak non final memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga

c. Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductability of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes (“DGT”).

As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax position taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax reserve in the year in which this determination is made.

The revenue of the companies within the Group is sometimes also subject to both final and non-final income tax. Determining the amount of revenue subject to final and nonfinal tax as well as expenses relating to revenue from the non-final income tax regime requires judgments and estimates.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by Management’s estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices, etc, which are subject

komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

d. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah pensiun yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pension termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

d. Post-employment Benefits Liabilities

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Group considers to use the interest rates of high quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 22.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions, as disclosed in Note 22.

e. Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Estimasi dari masa manfaat aset tetap berdasarkan penelaahan secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap mulai 3 sampai dengan 30 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan.

Nilai tercatat aset tetap disajikan di Catatan 14.

e. Determining the Depreciation Method and Estimating the Useful Life of Fixed Assets

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on a collective review of industry practice, internal technical evaluation and experience for equivalent assets. The cost of fixed assets is depreciated using the straight-line method method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets from 3 to 30 years. Changes in the level of use and technological developments can affect the economic useful lives and residual values of assets.

The estimated useful lives are reviewed at least at the end of each reporting year and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or restrictions.

Carrying amount of fixed assets is presented in Note 14.

4. Perizinan dan Aset yang Diserah Operasikan

4. Licensing and the Assets Handed-over Operations

Pemanfaatan sumber daya air (SDA) oleh pelanggan harus memiliki Surat Ijin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk menggunakan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Undang-undang R.I. No. 17 tahun 2019, tentang Sumber Daya Air, pada pasal 10 dinyatakan, bahwa: Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) bertugas, yang salah satunya sebagaimana tersebut pada huruf-f, yaitu menyelenggarakan progres perijinan penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional. Penerbitan SIPSDA tersebut kepada para pelanggan harus mendapat rekomendasi dari Perusahaan bilamana memanfaatkan aliran sungai Citarum. Dengan belum dimilikinya SIPSDA oleh pelanggan dari Perusahaan, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat ditagihkan bilamana SIPSDA tersebut telah terbit.

The use of water resources (SDA) by customers must have a Water Resources Usage Permit (SIPSDA) to use water resources in accordance with the provisions of the Indonesian Law. No. 17 of 2019, regarding Water Resources, Article 10 states, that: In regulating and managing Water Resources, the Central Government as referred to in article 9 paragraph (1) is in charge, one of which is as referred to in letter-f, namely carrying out progress licensing for the use of water resources in transnational river areas, interprovincial river areas and nationally strategic river basins. The issuance of the SIPSDA to customers must obtain a recommendation from the Company when utilizing the Citarum river flow. By not having SIPSDA by customers from the Company, it has resulted in a loss of potential revenue that could have been billed if the SIPSDA had been published.

Untuk melakukan penjualan listrik, maka Perusahaan seharusnya memiliki Surat Ijin Usaha Pengusahaan Tenaga Listrik (SIUPTL) sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2012, tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

In order to sell electricity, the Company should have an Electricity Concession Business License (SIUPTL) in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia. No. 14 of 2012, concerning the Business Activities of

pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan Penjualan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, tentunya dengan rekomendasi dari PT PLN (Persero); dan oleh karena itu salah satu sumber pendapatan perusahaan adalah jasa penjualan listrik, baik ke industri swasta dan PLN.

Electricity Supply Article 31 paragraph (3) which states that Sales as mentioned in paragraph (1) must obtain approval from the Minister, Governor or Regent / Mayor in accordance with their authority, of course with a recommendation from PT PLN (Persero) ; and therefore one of the company's revenue sources is electricity sales services, to both private industry and PLN.

Bahwa salah satu pendapatan usaha Perusahaan adalah dari penyewaan lahan dimana atas kawasan / wilayah kerja Perusahaan yang disewakan kepada pihak lain, bahwa sebagian belum memiliki legalitas kepemilikan berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Meskipun demikian, beberapa lahan telah dimiliki perusahaan dengan adanya sertifikat HGB.

Whereas one of the Company's business revenues is from land leasing where the working area / area of the Company is leased to other parties, that some of them do not have legal ownership in the form of Land Management Rights (HPL). However, some of the land has been owned by the company with the HGB certificate.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.39/KPTS/1994, tanggal 8 Pebruari 1994, tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otoritas Jatiluhur, dimana Perusahaan dalam aktivitas usahanya sebagai pengelola barang di kawasan tersebut maka ditunjuk/ ditetapkan sebagai Pengurus Barang atas penyerahan barang inventaris sesuai Daftar Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan. Dalam surat keputusan tersebut bahwa status kepemilikan barang inventaris tersebut tetap berada pada Departemen Pekerjaan UMum c.q. Ditjen Pengairan.

In accordance with the Decree of the Minister of Public Works No.39 / KPTS / 1994, dated 8 February 1994, concerning the Determination of the Amount and Types of State Property / Property Inventory that are Managed by the Public Company (Perum) of the Jatiluhur Authority, where the Company in its business activities as the goods manager in the area is then appointed / stipulated as the Goods Manager for the delivery of the inventory items in accordance with the State Property/ Property Inventory List within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation. The decree states that the ownership status of the inventory items remains with the Department of Public Works c.q. Directorate General of Irrigation.

Beberapa jenis barang yang masuk dalam Daftar Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan sebagai berikut:

Several types of goods are included in the Inventory List of Wealth / State Owned Goods within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation as follows:

- Tanah persil bangunan gedung: 104.216,865 m^2;
- Tanah persil bangunan bukan gedung: 16.342,481898 ha;
- Bangunan gedung tempat kerja:
- Bangunan gedung tempat tinggal: 39 BH.

- *Building parcel land: 104,216,865 sqm;*
- *Building parcel land not building: 16,342,481898 ha;*
- *Workplace building:*
- *Residential buildings: 39 BH.*

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut maka, Perusahaan tidak dapat mencatatkan ke dalam buku / daftar aset tetap atau aset lainnya, mengingat hanya sebagai Pengurus Barang. Dilain pihak optimalisasi pemanfaatan aset di kawasan bendungan Jatiluhur, secara fisik tidak dapat dipisahkan dengan aset-aset tersebut diatas dimana Perusahaan sebagai Pengurus Barang, sekaligus memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

With the existence of the Decree of the Minister of Public Works, the Company cannot record it in the book / list of fixed assets or other assets, considering that it is only a Goods Manager. On the other hand, optimizing the use of assets in the Jatiluhur dam area, physically it cannot be separated from the assets mentioned above, where the Company as the Goods Manager, while providing legal certainty in accordance with applicable regulations.

HPL bukan merupakan hak atas tanah, dan tidak diatur dalam UU Pokok Agraria, tetapi dalam:

- Peraturan Pemerintah R.I. No. 8 Tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara; dan
- Permen. Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; dan
- Ketentuan – Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

HPL tidak mempunyai jangka waktu kepemilikan dan diberikan hanya atas tanah negara yang dikuasai oleh PEMDA, BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk mengontrol *zoning* dan *land use*, agar sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

Diatas HPL masih dapat diletakkan Hak atas Tanah, antara lain:

- Hak Guna Bangunan (“HGB”),
- Hak Guna Usaha (“HGU”) dan
- Hak Pakai,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40, Tahun 1996 menyatakan bahwa, di atas tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah, yaitu:

- Hak Guna Bangunan (“HGB”); dan
- Hak Pakai (“HP”).

HGB atau HP yang berada di atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul (rekomendasi) dari Pemegang HPL kepada calon pemegang HGB / HP.

Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah negara yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan hak menguasai dari negara kepada pemegang haknya.

Dalam Permeneg Agraria / Kepala BPN No. 9 TH.1999, tanggal 24 Oktober 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal-67, dinyatakan bahwa:

1. Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :
   a. Instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah;

HPL is not a right to land, and is not regulated in the Basic Agrarian Law, but in:

- *Government Regulation of the Republic of Indonesia. No. 8 of 1953, concerning Control of State Lands; and*
- *Permen. Agraria / Head of BPN No. 9 of 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights; and*
- *Terms of the Further Policy.*

HPL does not have a period of ownership and is given only to state land controlled by the local government, state-owned enterprises and local-owned enterprises with the aim of controlling zoning and land use, so that it is in accordance with their spatial planning.

Above the HPL can still be placed the Right to Land, among others:

- *Building Use Rights (“HGB”)*
- *Business Use Rights (“HGU”) and*
- *Right of Use,*

Based on Government Regulation (PP) No. 40, Year 1996 states that, HPL land can be granted or charged with land rights, namely:

- *Building Use Rights (“HGB”); and*
- *Right to Use (“HP”).*

HGB or HP that is on HPL land is granted by a decision to grant rights by the Minister or an appointed official based on a recommendation (recommendation) from the HPL Holder to the prospective HGB / HP holder.

Management Rights Land, namely state land controlled with Management Rights, which is the delegation of the exercise of part of the authority over the right to control from the state to the right holders.

In Permeneg Agraria / Head of BPN No. 9 TH.1999, dated 24 October 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights, Article 67, states that:

1. *Management rights can be granted to:*
   a. *Government Agencies, including Local Governments;*

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
c. Badan Usaha Milik Daerah;
d. PT Persero;
e. Badan Otorita;
f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

2. Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolan tanah.

Dengan demikian, Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut Hak Pengelolaan Lahan atau HPL) sesuai ketentuan di atas dapat diurus oleh Perusahaan, atas kawasan Bendungan Jatiluhur dan bantaran sungai Citarum yang tentunya bertujuan menjaga konservasi alam dan lingkungannya.

Kewenangan Subyek HPL, sesuai Pasal 6, Permenag No. 9 Tahun 1999 menjelaskan HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
d. Menerima uang pemasukan/ ganti rugi dan/ atau uang wajib tahunan.

Selanjutnya, sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/1996 bahwa, negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, yang terdiri dari:

a. Hak individual yang bersifat perdata;
b. Hak Pengelolaan, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara pada instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaat atasnya;
c. Tanah wakaf yaitu hak atas tanah yang semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP atau tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk di wakafkan.

b. State Owned Enterprises (BUMN);
c. Regional owned enterprises;
d. PT Persero;
e. Authority Agency;
f. Other Government legal entities appointed by the government.

2. Legal entities as referred to in paragraph (1) can be granted Management Rights as long as they are in accordance with their main tasks and functions related to land management.

Thus, the Management Rights (hereinafter referred to as Land Management Rights or HPL) according to the above provisions can be administered by the Company, over the Jatiluhur Dam area and the banks of the Citarum river which of course aims to preserve nature and its environment.

The authority of HPL Subjects, according to Article 6, Permenag No. 9 of 1999 describes HPL as giving authority to its holders to:

a. Planning the allocation and use of the land;
b. Use the land for the purposes of carrying out his duties;
c. Hand over parts of the land to a third party with usufructuary rights for a period of 6 (six) years;
d. Receive income/ compensation and/ or mandatory annual money.

Furthermore, according to Article 4 jo. Article 16 jo. Article 53 jo. Government Regulation (PP) No. 40/1996 and Government Regulation (PP) No. 41/1996 that, the state grants various types of land rights, which consist of:

a. Individual rights that are civil in nature;
b. Management rights, namely special rights granted by the state to certain agencies to be managed and taken advantage of;
c. Waqf land is the right to land that was originally a primary right (HM, HGB, HGU, HP or girik land) and then waqfed or handed over by the owner to a religious body or other social body to be waqfed.

5. Kas dan Setara Kas / *5. Cash and Cash Equivalents*

	2021 Rp	2020 Rp
Kas/ *Cash on Hand*	1,629,924,833	2,237,968,485
Kas di Bank/ *Cash in Banks*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16,687,313,693	12,220,175,943
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,866,201,037	6,591,971,347
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,859,975,577	10,130,564,832
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ *Sub Total - Related Parties*	36,413,490,307	28,942,712,122
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2,708,196,403	3,596,972,592
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1,254,285,102	834,445,945
PT Bank Index Selindo	324,759,376	2,549,904,262
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	4,287,240,881	6,981,322,799
Jumlah Bank/ *Total of Bank*	**40,700,731,188**	**35,924,034,921**
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100,000,000,000	150,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40,000,000,000	40,000,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	140,000,000,000	140,000,000,000
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ *Sub Total - Related Parties*	280,000,000,000	330,000,000,000
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	130,000,000,000	150,000,000,000
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	130,000,000,000	150,000,000,000
Jumlah Deposito/ *Total of Time Deposits*	**410,000,000,000**	**480,000,000,000**
Jumlah/ *Total*	**452,330,656,021**	**518,162,003,406**

Seluruh kas dan setara kas pada 31 Desember 2021 dan 2020 dalam mata uang Rupiah.

All cash and cash equivalents as of December 31, 2021 and 2020 are in Rupiah.

Jangka waktu deposito adalah 1 sampai dengan 3 bulan.

Deposits represent time deposits of 1 – 3 months.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 2,85% - 3,15% dan 3,5% - 6,75%.

The annual interest rates of time deposits as of December 31, 2021 and 2020 are 2.85% - 3.15% and 3.5% - 6.75%, respectively.

6. Piutang Usaha / *6. Account Receivables*

	2021 Rp	2020 Rp
a. Berdasarkan Pelanggan/ *By Customers*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*	83,475,430,452	77,313,202,999
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable from Related Parties*	(46,177,757,951)	(40,852,015,066)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ *Sub Total - Related Parties*	37,297,672,501	36,461,187,933
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PDAM Tirta Bhagasasi	8,547,756,820	8,119,445,870
Perumda Tirtawening	8,041,429,900	8,041,429,900
PDAM Kabupaten Purwakarta	3,705,625,705	2,804,063,660
PT Mutiara Energy	1,967,824,620	1,967,824,620
PT Indograha Samudra Persada Realty	1,838,961,020	1,152,324,480
PT Tenang Jaya Sejahtera	1,798,530,875	985,810,565
PDAM Kabupaten Karawang	3,231,201,114	3,231,201,114
PT South Pacific Viscose	1,066,169,288	779,394,588
PT Archindo Development	1,018,881,000	1,018,881,000
PT DIC Graphics	871,786,915	52,041,900
PT Multi Optimal Sentosa	820,224,778	--
PT Pindodeli Pulp And Paper Mills	741,525,870	--
PDAM Kabupaten Bandung	730,782,200	63,739,900
PT Hosaindo Sejahtera Abadi	730,839,826	791,839,826
PT Tridaya Kreasi	573,278,000	573,278,000
PT Alexandra Citra Pertiwi	560,037,275	233,348,175
PDAM Kabupaten Bogor IPA Citra	557,881,300	--
PT Lippo Cikarang Tbk	553,578,940	923,848,009
PT Hebel Indonesia	536,581,873	536,581,873
PT Jababeka Infrastruktur (KIJ)	518,803,650	288,317,980
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	20,725,827,971	21,019,826,857
Sub Jumlah - Piutang Usaha Pihak Ketiga/ *Sub Total - Accounts Receivable from Third Parties*	59,137,528,940	52,583,198,317
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha - Pihak Ketiga/ *Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable from Third Parties*	(24,114,475,858)	(24,512,144,585)
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	35,023,053,082	28,071,053,732
Jumlah/ *Total*	**72,320,725,583**	**64,532,241,665**
b. Berdasarkan Umur/ *By Age*		
Belum Jatuh Tempo/ *Not Yet Due*	93,753,244,285	88,082,412,618
Jatuh Tempo/ *Past Due*		
1 - 30 hari/ *days*	2,648,527,617	3,032,745,212
31 - 60 hari/ *days*	2,106,561,556	495,944,885
61 - 90 hari/ *days*	7,374,823,936	652,254,614
Di atas 90 hari/ *More than 90 days*	36,729,801,999	37,633,043,987
Sub Jumlah/ Sub Total	142,612,959,393	129,896,401,316
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha/ *Less Allowance for Impairment*	(70,292,233,810)	(65,364,159,651)
Jumlah/ *Total*	**72,320,725,583**	**64,532,241,665**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses on accounts receivable is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	65,364,159,651	37,888,849,575	*Beginning Balance*
Penyesuaian Saldo Awal atas Dampak Penerapan Awal PSAK 71	--	13,573,871,338	*Beginning Balance Adjustment on Initial Implementation of PSAK 71*
Penambahan (Pemulihan) Tahun Berjalan	4,928,074,159	13,901,438,738	*Addition (Recovery) Current Year*
Saldo Akhir	**70,292,233,810**	**65,364,159,651**	***Ending balance***

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh piutang usaha disajikan dalam Rupiah.

As of December 31, 2021 and 2020, all of accounts receivable are denominated in Rupiah.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2021 and 2020, there are no accounts receivable as collateral.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang telah mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for expected credit loss of accounts receivable are adequate to cover loss on uncollectible receivables.

7. Pendapatan yang Masih Akan Diterima / *7. Accrued Revenues*

	2021 Rp	2020 Rp	
Sumber Daya Air			*Water Resources*
Air Baku	144,758,426,351	103,082,772,199	*Raw Water*
Listrik	55,036,967,587	39,083,281,491	*Electricity*
Air Bersih	7,618,863,285	6,319,973,896	*Clean Water*
Sub Jumlah	207,414,257,223	148,486,027,586	*Sub Total*
Non Sumber Daya Air			*Non Water Resources*
Pemanfaatan Lahan	13,406,601,278	24,089,652,991	*Land Utilization*
Pariwisata	2,861,031,754	4,222,288,401	*Tourism*
Jasa Laboratorium	1,756,920,998	1,988,735,641	*Laboratory Service*
Air Minum Dalam Kemasan	1,212,107,022	2,086,296,471	*Bottled Drinking Water*
Sub Jumlah	19,236,661,052	32,386,973,504	*Sub Total*
Cadangan Penurunan Nilai Pendapatan yang Akan Diterima	(15,643,252,568)	(15,226,874,766)	*Allowance for Impairment Losses on Accrued Revenue*
Jumlah	**211,007,665,707**	**165,646,126,324**	***Total***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses on accrued revenues is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	15,226,874,766	--	*Beginning Balance*
Penyesuaian Saldo Awal atas Dampak Penerapan Awal PSAK 71	--	13,362,927,129	*Beginning Balance Adjustment on Initial Implementation of PSAK 71*
Penambahan (Pemulihan) Tahun Berjalan	416,377,802	1,863,947,639	*Addition (Recovery) Current Year*
Saldo Akhir	**15,643,252,568**	**15,226,874,766**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai pendapatan yang masih akan diterima telah mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya pendapatan yang masih akan diterima.

Management believes that the allowance for expected credit loss of accrued revenues are adequate to cover loss on uncollectible accrued revenues.

8. Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja / *8. Gross Amount Due from Customer*

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Konstruksi	15,962,668,805	--	*Cost of Construction*
Laba yang Diakui	1,512,331,195	--	*Profit Recognized*
Pendapatan Kontraktual	17,475,000,000	--	*Contractual Revenue*
Dikurangi: Progres Ditagihkan	16,404,495,563	--	*Less: Progress Billed*
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja	**1,070,504,437**	--	***Gross Amount Due from Customers***

Tagihan bruto dari pemberi kerja merupakan pengakuan pendapatan pekerjaan konstruksi Entitas Anak dengan PT Multi Optimal Sentosa berdasarkan laporan progres fisik per 31 Desember 2021.

Gross amount due from customer represents revenue recognition of construction work between the Subsidiary with PT Multi Optimal Sentosa based on the physical progress report as of December 31, 2021.

9. Aset Keuangan Lancar Lainnya / *9. Other Current Financial Assets*

	2021 Rp	2020 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Piutang Karyawan	2,252,524,423	2,245,384,059	*Employee Receivables*
Piutang Bunga Deposito	410,604,908	2,388,317,788	*Interest Deposit Receivables*
Piutang Lainnya	12,961,154	1,196,668,214	*Other Receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Karyawan	(2,245,384,059)	(2,245,384,059)	*Allowance for Impairment Losses on Employee Receivables*
Sub Jumlah - Perusahaan	430,706,426	3,584,986,002	*Sub Total - The Company*
Entitas Anak			***The Subsidiary***
Piutang Direktur	350,000,000	500,000,000	*Director's Receivable*
Sub Jumlah - Entitas Anak	350,000,000	500,000,000	*Sub Total - The Subsidiary*
Jumlah	**780,706,426**	**4,084,986,002**	***Total***

Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya) sebagian besar merupakan piutang karyawan atas premi awal yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan dan telah dihitung penurunan nilainya (Catatan 34e).

Employee Receivables (Jiwasraya Insurance) mainly represent receivables in retirement premium which was initially paid by the Company and has been assessed the allowance for impairment losses (Note 34e).

Piutang Direktur pada 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan utang Bapak Andrijanto kepada JTL yang diberikan pada 18 Desember 2018 tanpa jaminan, tanpa bunga dan tanpa ditetapkan jangka waktu pembayaran yang pasti. Pada tanggal 28 Januari 2022, piutang tersebut telah dilunasi.

Director's Receivable as of December 31, 2021 and 2020 represents loan of Mr. Andrijanto to JTL which was given on December 18, 2018 with no collateral, bear no interest and have no definite term of repayment. On January 28, 2022 this receivable has been settled.

10. Persediaan / *10. Inventories*

	2021 Rp	2020 Rp	
Suku Cadang	747,450,000	747,450,000	*Spareparts*
Bahan Baku - Air Minum Dalam Kemasan	448,720,800	678,227,237	*Raw Materials - Bottled Water*
Bahan Kimia	268,054,651	438,190,690	*Chemicals*
Bahan Farmasi	229,758,814	198,740,268	*Pharmaceuticals*
Bahan dan Perlengkapan Lain	215,007,500	112,000,000	*Other Materials and Equipments*
Barang Jadi - Air Minum Dalam Kemasan	120,422,049	49,352,066	*Finished Goods - Bottled Water*
Bahan Makanan dan Minuman	37,348,443	29,221,219	*Food and Beverages*
Bahan Perlengkapan Perhotelan	13,800,712	8,262,050	*Hospitality Equipments*
Bahan Perlengkapan Bar dan Restoran	11,519,550	1,528,165	*Bar and Restaurant Equipments*
Sub Jumlah	**2,092,082,519**	**2,262,971,695**	***Sub Total***
Dikurangi: Cadangan Penurunan Nilai Persediaan	(189,283,200)	(189,283,200)	*Less: Allowance for Impairment Losses of Inventories*
Jumlah	**1,902,799,319**	**2,073,688,495**	***Total***

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan resiko lainnya.

Inventories are not insured against fire, burglary and other risks.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada persediaan yang dijaminkan.

As of December 31, 2021 and 2020, there are no inventories as collateral.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses on inventories is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	189,283,200	602,316,472	*Beginning Balance*
Penambahan (Pemulihan) Tahun Berjalan	--	(413,033,272)	*Addition (Recovery) Current Year*
Saldo Akhir	**189,283,200**	**189,283,200**	***Ending balance***

Manajemen berkeyanikan bahwa cadangan penurunan nilai persediaan telah mencukupi.

Management believes that the allowance for impairment losses on inventories are adequate.

11. Pembayaran di Muka / *11. Prepayments*

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Dibayar di Muka	6,593,207,547	6,827,673,984	*Prepaid Expenses*
Uang Muka	1,874,215,590	12,836,501,355	*Advances*
Jumlah	**8,467,423,137**	**19,664,175,339**	***Total***

a. Biaya Dibayar di Muka / *a. Prepaid Expenses*

	2021 Rp	2020 Rp	
Personalia	6,545,078,820	6,529,857,814	*General Affairs*
Bahan dan Perlengkapan	48,128,727	229,642,295	*Material and Supplies*
Sewa Dibayar di Muka	--	68,173,875	*Prepaid Rent*
Jumlah	**6,593,207,547**	**6,827,673,984**	***Total***

Biaya personalia merupakan biaya gaji dibayar di muka dengan rincian sebagai berikut:

General affairs expenses represent prepaid salary costs with details as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Gaji	3,068,782,779	2,967,507,400	*Salary*
Tunjangan dan Honorarium	3,450,796,041	3,307,350,414	*Allowances and Honorarium*
Lain-lain	25,500,000	255,000,000	*Others*
Jumlah	**6,545,078,820**	**6,529,857,814**	***Total***

b. Uang Muka / *b. Advances*

	2021 Rp	2020 Rp
Uang Muka Pembelian/ *Purchase Advance*		
PT Gelora Megah Sejahtera	1,181,620,000	--
Uang Muka Proyek/ *Project Advance*		
PT Prima Pesona Ardi Kreasi	494,926,506	--
PT Rasa Nungga Utama	172,408,170	--
KSO PT Putra Kencana	--	10,468,920,000
PT Anugerah Bakti Persada	--	1,447,893,260
PT Trina Cipta Karya	--	549,971,620
PT Indra Karya	--	289,760,020
Uang Muka Lainnya/ *Other Advances*	25,260,914	79,956,455
Jumlah	**1,874,215,590**	**12,836,501,355**

12. Investasi pada Entitas Asosiasi / 12. Investments in Associates

	2021 Rp	2020 Rp
Metode Ekuitas/ *Equity Method*		
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I		
Saldo Awal/ *Beginning Balance*	3,800,000,000	3,800,000,000
Penambahan Tahun Berjalan/ *Current Year Addition*	1,436,705,577	--
Saldo Akhir/ *Ending Balance*	5,236,705,577	3,800,000,000
Akumulasi Bagian Rugi Entitas Asosiasi/ *Accumulated Loss on Associates Entity*	(5,236,705,577)	(3,800,000,000)
Nilai Penyertaan - Bersih/ *Investments - Net*	--	--

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (PT BUMN HL I)

Berdasarkan surat dari PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I No. SB/A.II/3790/XI/2008 tanggal 3 November 2008, Perusahaan menginvestasikan dananya sebesar Rp1.400.000.000 atau 20% dari total modal yang disetor. Pada tahun 2011 dan 2012, Perusahaan menambah modal disetor masing-masing sebesar Rp750.000.000 dan Rp250.000.000, sehingga total modal disetor sebesar Rp2.400.000.000 yang telah diaktakan oleh Notaris Irma Rahmawati, S.H.

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (PT BUMN HL I)

Based on a letter from PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I No. SB/A.II/3790/XI/2008 dated November 3, 2008, the Company invested Rp1,400,000,000 or 20% of the total paid-in capital. In 2011 and 2012, the Company increased its paid-in capital by Rp750,000,000 and Rp250,000,000, respectively, so that the total paid-up capital amounted to Rp2,400,000,000 which was notarized by Notary Irma Rahmawati, S.H.

Berdasarkan Risalah RUPS PT BUMN Hijau Lestari I tanggal 6 Mei 2013 bahwa PT BUMN Hijau Lestari II melakukan *merger* dengan PT BUMN Hijau Lestari I, dengan Akta Penggabungan PT BUMN Hijau Lestari II ke dalam PT BUMN HL I yang dibuat oleh Notaris Rachmawati No. 16 tanggal 6 Juli 2015 yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU – 0105825.AH.01.10. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, menyatakan total modal disetor Perusahaan sebanyak 3.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp3.800.000.000 atau 20,54% dari total saham ditempatkan sebanyak 18.504 lembar saham.

Based on the Minutes of the GMS of PT BUMN Hijau Lestari I dated May 6, 2013 that PT BUMN Hijau Lestari II carried out a merger with PT BUMN Hijau Lestari I, with the Deed of Merger of PT BUMN Hijau Lestari II into PT BUMN HL I made by Notary Rachmawati No. 16 dated July 6, 2015 approved by the Ministry of Law and Human Rights Man of the Republic of Indonesia No. AHU – 0105825.AH.01.10. Year 2015 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, states that the total paid-up capital of the Company is 3,800 shares with a nominal value of Rp3,800,000,000 or 20.54% of the total issued shares were 18,504 shares.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan melakukan pencatatan kekurangan penyertaan sebesar Rp1.436.705.577 atas peningkatan modal PT BUMN HL I menjadi sebesar Rp25.500.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkulir Pemegang Saham PT BUMN HL I yang berlaku efektif serta mengikat sejak tanggal 5 Agustus 2015. Pencatatan ini dilakukan atas Laporan Hasil Reviu atas Rencana Pembubaran PT BUMN HL I tanggal 26 Oktober 2021 dan pada 31 Desember 2021, Perusahaan telah mengakui bagian kerugian atas penyertaan tersebut.

As of December 31, 2021, the Company recorded a lack of investment of Rp1,436,705,577 for the increase in the capital of PT BUMN HL I amounting to Rp25,500,000,000 based on the Circular Decision of the Shareholders of PT BUMN HL I which was effective and binding on August 5, 2015. This recording is carried out on the Review Report on the Dissolution Plan of PT BUMN HL I dated October 26, 2021, and on December 31, 2021, the Company has recognized the share of losses on the investment.

13. Investasi Jangka Panjang Lainnya / *13. Other Long-Term Investment*

	2021 Rp	2020 Rp
Metode Biaya/ *Cost Method*		
PT Air Minum Indonesia	100,000,000	100,000,000
PT Padi Energi Nusantara	2,000,000,000	2,000,000,000
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Less allowance for impairment losses*	(2,100,000,000)	(2,100,000,000)
Jumlah/*Total*	--	--

PT Air Minum Indonesia

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Air Minum Indonesia No. 04 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2449637.AH.01.01 Tahun 2015 dan surat dari PT Air Minum Indonesia No. 03/AMI/2015 tanggal 7 September 2015, Perusahaan menyetorkan modal sebesar Rp100.000.000 yang mewakili 10% kepemilikan di PT Air Minum Indonesia.

Berdasarkan surat Dirjen Cipta Karya No: PR.01-03DC/374 tanggal 04 April 2017 tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur untuk penyediaan air minum wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang yang menyatakan bahwa proyek SPAM Regional Jatiluhur I akan dilaksanakan dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) dimana Perusahaan akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan tidak akan tergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pelaksana Proyek. Untuk itu, Perusahaan agar menarik partisipasi dalam PT Air Minum Indonesia dan melepaskan kepemilikan saham pada PT Air Minum Indonesia dan menarik anggota Direksi dan Dewan Dewan Pengawas yang berasal dari Perusahaan.

PT Air Minum Indonesia

In accordance with the Deed of Establishment of a Limited Liability Company PT Air Minum Indonesia No. 04 dated 30 July 2015 made by Notary Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-2449637.AH.01.01 Year 2015 and a letter from PT Air Minum Indonesia No. 03/AMI/2015 dated September 7, 2015, the Company paid up capital of Rp100,000,000 which represents 10% ownership in PT Air Minum Indonesia.

Based on letters from the General Director of Cipta Karya No: PR.01-03-DC/374 dated April 04, 2017 regarding Follow-up to the Cooperation in the Implementation of the Development of the Jatiluhur Drinking Water Supply System (SPAM) for the supply of drinking water in Jakarta, Bekasi and Karawang areas which stated that Jatiluhur Regional SPAM project I will be implemented with scheme KPBU (Government Business Entity Cooperation) scheme in which the Company will act as the Person in Charge of the Cooperation Project (PJPK) and will not be part of the Project Implementing Business Entity consortium. For this reason, the Company must withdraw its participation in PT Air Minum Indonesia and relinquish its share ownership in PT Air Minum Indonesia and withdraw members of the Board of Directors and Board of Supervisors from the Company.

PT Padi Energi Nusantara (PEN)

Berdasarkan surat dari Kementerian BUMN No: S-899/MBU/2008 tentang persetujuan Pendirian PEN tanggal 17 November 2008 Perusahaan melakukan penyertaan sebesar Rp2.000.000.000 atau 6,9% dari total modal yang disetor pada PEN yang telah tercatat dalam akta Pendirian PEN Nomor 12 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Neny Saadah, S.H.

Berdasarkan hasil *Financial Due Diligence* dari konsultan PT Saraswati Perdana, nilai ekuitas proforma PEN per 31 Desember 2012 sebesar

PT Padi Energi Nusantara (PEN)

Based on Letter of Ministry of SOE No: S-899/MBU/2008 about the agreement of Establishment of PEN dated November 17, 2008, the Company invested Rp2,000,000,000 or 6,9% of total paid-up capital of PEN as shown in the Deed of Establishment of PEN Number 12 dated December 30, 2008 which issued by Notary Neny Saadah, S.H.

Based on Financial Due Diligence report by consultant PT Saraswati Perdana, PEN's pro forma equity value as of December 31, 2012 amounting to

Rp882.000.000 yang terbagi atas 29.000 saham atau Rp30.430 per saham. Penyertaan saham Perusahaan pada PEN adalah 2.000 saham dengan total nominal Rp2.000.000.000. Sehingga berdasarkan hasil *Financial Due Diligence* tersebut, nilai saham perusahaan menjadi sebesar Rp60.860.000.000. Karena kondisi PEN menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperkirakan nilai penyertaan saham perusahaan pada PEN per 31 Desember 2013 sebesar nihil atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000.000 (100%).

Rp882,000,000 to which divided into 29,000 shares or Rp30,430 per share. The Company's investment in PEN is 2,000 shares with a total nominal value of Rp2,000,000,000. Therefore based on the Financial Due Diligence report, the Company's nominal value is Rp60,860,000,000. Since the condition of PEN shows that there is great doubt about its ability to maintain its going concern, it is estimated that the value of the company's investment in PEN as of December 31, 2013 is amounting to nil or a decrease of Rp2,000,000,000 (100%).

14. Aset Tetap / *14. Fixed Assets*

	2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	16,635,048,380	--	5,079	--	16,635,043,301	*Land*
Sarana	20,013,287,112	1,665,081,116	--	--	21,678,368,228	*Facilities*
Bangunan	194,988,428,207	17,453,778,478	3,452,455	563,571,365	213,002,325,595	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	3,828,336,831	--	--	--	3,828,336,831	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	678,815,819,806	45,041,505,320	--	41,035,387,288	764,892,712,414	*Networks and Installation*
Alat Angkut dan Alat Berat	63,087,214,762	42,910,184,000	--	--	105,997,398,762	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	165,136,014,788	20,873,850,185	--	9,854,191,250	195,864,056,223	*Furnitures and Equipment*
Tanaman Konservasi	7,510,296,025	--	--	(7,510,296,025)	--	*Conservation Plantation*
Sub Jumlah	1,150,014,445,911	127,944,399,099	3,457,534	43,942,853,878	1,321,898,241,354	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Assets Under Construction***
Tanah	1,066,045,650	6,374,556,775	--	(490,524,320)	6,950,078,105	*Land*
Bangunan	2,360,689,320	38,716,686,679	--	(36,573,735,000)	4,503,640,999	*Buildings*
Instalasi dan Jaringan	1,069,407,350	41,418,771,415	--	(9,510,891,460)	32,977,287,305	*Networks and Installation*
Alat Angkut dan Alat Berat	--	6,018,491,570	--	--	6,018,491,570	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	3,828,286,000	957,071,500	--	(4,785,357,500)	--	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	8,324,428,320	93,485,577,939	--	(51,360,508,280)	50,449,497,979	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Sarana	11,068,509,546	925,082,857	--	--	11,993,592,403	*Facilities*
Bangunan	71,375,865,321	5,854,046,923	3,449,455	(19,335,468)	77,207,127,321	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	1,961,887,513	236,244,336	--	--	2,198,131,849	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	303,772,063,605	28,824,295,766	--	--	332,596,359,371	*Networks and Installation*
Alat Angkut dan Alat Berat	44,152,339,183	8,528,444,509	--	--	52,680,783,692	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	125,590,460,516	17,338,566,667	--	--	142,929,027,183	*Furnitures and Equipment*
Tanaman Konservasi	724,383,374	187,757,402	--	(912,140,776)	--	*Conservation Plantation*
Sub Jumlah	558,645,509,058	61,894,438,460	3,449,455	(931,476,244)	619,605,021,819	*Sub Total*
Nilai Buku	**599,693,365,173**				**752,742,717,514**	***Book Value***

	2020					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	16,635,048,380	--	--	--	16,635,048,380	*Land*
Sarana	20,013,287,112	--	--	--	20,013,287,112	*Facilities*
Bangunan	167,289,285,545	18,475,049,487	--	9,224,093,175	194,988,428,207	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	1,653,921,500	--	--	2,174,415,331	3,828,336,831	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	644,806,000,467	20,649,150,710	--	13,360,668,629	678,815,819,806	*Networks and Installation*
Alat Angkut dan Alat Berat	42,668,500,462	20,418,714,300	--	--	63,087,214,762	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	143,541,319,079	21,103,760,209	--	490,935,500	165,136,014,788	*Furnitures and Equipment*
Tanaman Konservasi	7,510,296,025	--	--	--	7,510,296,025	*Conservation Plantation*
Sub Jumlah	1,044,117,658,570	80,646,674,706	--	25,250,112,635	1,150,014,445,911	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Assets Under Construction***
Tanah	--	1,066,045,650	--	--	1,066,045,650	*Land*
Bangunan	2,360,689,320	9,224,093,175	--	(9,224,093,175)	2,360,689,320	*Buildings*
Instalasi dan Jaringan	1,660,080,400	14,944,410,910	--	(15,535,083,960)	1,069,407,350	*Networks and Installation*
Perabotan dan Peralatan	--	4,319,221,500	--	(490,935,500)	3,828,286,000	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	4,020,769,720	29,553,771,235	--	(25,250,112,635)	8,324,428,320	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Sarana	10,164,723,384	903,786,162	--	--	11,068,509,546	*Facilities*
Bangunan	64,027,218,979	7,348,646,341	--	--	71,375,865,320	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	1,653,920,500	262,739,174	--	45,227,839	1,961,887,513	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	276,641,942,309	27,175,349,135	--	(45,227,839)	303,772,063,605	*Networks and Installation*
Alat Angkut dan Alat Berat	41,991,304,246	2,161,034,936	--	--	44,152,339,182	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	112,723,894,632	12,866,565,886	--	--	125,590,460,518	*Furnitures and Equipment*
Tanaman Konservasi	536,625,973	187,757,401	--	--	724,383,374	*Conservation Plantation*
Sub Jumlah	507,739,630,023	50,905,879,035	--	--	558,645,509,059	*Sub Total*
Nilai Buku	**540,398,798,267**				**599,693,365,172**	***Book Value***

Pada tahun 2021, terdapat pelepasan aset tetap tanah dan bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp3.457.534 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.449.455. Laba atas pelepasan aset tetap sebesar Rp378.390.186.

In 2021, there was disposal of fixed assets of land and building with acquisition cost amounting to Rp3,456,534 and accumulated depreciation amounting to Rp3,449,455. Gain on disposal of fixed assets amounting to Rp378,390,186.

Pada 31 Desember 2021 dan 2020, aset tetap tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

As of December 31, 2021 and 2020, fixed assets are not insured against fire, theft and other possible risks.

Aset Dalam Penyelesaian yang telah selesai pada 31 Desember 2021 sebesar Rp51.360.508.280 direklasifikasi menjadi aset tetap dan koreksi menjadi beban masing-masing sebesar Rp48.217.767.360 dan Rp3.142.740.920. Manajemen melakukan reklasifikasi Aset Tetap antar kelompok dari kelompok Bangunan senilai Rp38.691.943.678 ke kelompok instalasi dan jaringan serta kelompok perabotan dan peralatan masing-masing sebesar Rp32.306.547.428 dan Rp6.385.396.250 atas proyek SPAM Pamanukan.

Assets Under Construction which has been completed on December 31, 2021 amounting to Rp51,360,508,280 to which were reclassified into fixed assets and corrected into expenses amounting to Rp48,217,767,360 and Rp3,142,740,920, respectively. Management reclassified Fixed Assets between groups from the Buildings group amounting to Rp38,691,943,678 to the installation and network group as well as the furniture and equipment group amounting to Rp32,306,547,428 and Rp6,385,396,250, respectively, on the SPAM Pamanukan project.

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp250.144.065.225 dan Rp238.182.826.186.

Acquisition cost of fixed assets which has been fully depreciated yet are still used for the Company's operational activities as of December 31, 2021 and 2020 is amounting to Rp250,144,065,225 and Rp238,182,826,186, respectively.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dialokasikan masing-masing pada:

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended as of December 31, 2021 and 2020, respectively, are allocated to:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Pendapatan	53,915,361,645	46,588,682,934	*Cost of Revenues*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30)	7,979,076,815	4,317,196,101	*General and Administrative Expenses (Note 30)*
Jumlah	**61,894,438,460**	**50,905,879,035**	***Total***

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Details of assets under construction as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

	2021		
	Presentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	**Biaya Perolehan/ *At cost***	**Estimasi Tahun Penyelesaian/ *Estimated Year of Completion***
Tanah/ *Land*	60% - 95%	6,950,078,105	Maret - April 2022/ *March - April 2022*
Bangunan/ *Building*	0% - 90%	4,503,640,999	Januari - November 2022/ *January - November 2022*
Instalasi dan Jaringan/ *Network and Installation*	5% - 97%	32,977,287,305	Januari - Juli 2022/ *January - July 2022*
Alat Angkut dan Alat Berat/ *Trasnportation and Heavy Equipment*	40%	6,018,491,570	Januari - Desember 2022/ *January - December 2022*

	2020		
	Presentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	**Biaya Perolehan/ *At cost***	**Estimasi Tahun Penyelesaian/ *Estimated Year of Completion***
Tanah/ *Land*	30% - 90%	1,066,045,650	Desember 2021/ *December 2021*
Bangunan/ *Building*	30%	2,360,689,320	Januari - Desember 2021/ *January - December 2021*
Instalasi dan Jaringan/ *Network and Installation*	15%	1,069,407,350	Januari - Desember 2021/ *January - December 2021*
Alat Angkut dan Alat Berat/ *Trasnportation and Heavy Equipment*	80%	3,828,286,000	Januari - Desember 2021/ *January - December 2021*

15. Aset Hak-Guna / *15. Right-of-Use Assets*

	2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Hak-Guna:						***Right-of-Use Assets:***
Bangunan	1,329,545,455	--	--	--	1,329,545,455	*Building*
Tanah	3,259,156,401	--	--	70,683,101	3,329,839,502	*Land*
Kendaraan	10,830,105,210	12,276,226,892	6,688,293,376	23,598,929	16,441,637,655	*Vehicle*
Sub Jumlah	15,418,807,066	12,276,226,892	6,688,293,376	94,282,030	21,101,022,612	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan	1,162,878,788	125,000,000	--	--	1,287,878,788	*Building*
Tanah	1,249,343,287	665,967,901	--	27,095,189	1,942,406,377	*Land*
Kendaraan	6,753,326,976	5,213,813,137	6,688,293,376	48,187,774	5,327,034,511	*Vehicle*
Sub Jumlah	9,165,549,051	6,004,781,038	6,688,293,376	75,282,963	8,557,319,676	*Sub Total*
Nilai Buku	**6,253,258,015**				**12,543,702,936**	***Book Value***

	2020					
	Penerapan PSAK 73/ *Implementation of PSAK 73*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Hak-Guna:						***Right-of-Use Assets:***
Bangunan	1,329,545,455	--	--	--	1,329,545,455	*Building*
Tanah	3,259,156,401	--	--	--	3,259,156,401	*Land*
Kendaraan	26,945,942,037	--	16,115,836,827	--	10,830,105,210	*Vehicle*
Sub Jumlah	31,534,643,893	--	16,115,836,827	--	15,418,807,066	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Bangunan	778,693,182	384,185,606	--	--	1,162,878,788	*Building*
Tanah	597,512,007	651,831,280	--	--	1,249,343,287	*Land*
Kendaraan	14,188,688,484	8,680,475,319	16,115,836,827	--	6,753,326,976	*Vehicle*
Sub Jumlah	15,564,893,673	9,716,492,205	16,115,836,827	--	9,165,549,051	*Sub Total*
Nilai Buku	**15,969,750,220**				**6,253,258,015**	***Book Value***

Beban penyusutan aset hak-guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dialokasikan masing-masing pada:

Depreciation expenses of right-of-use assets for the years ended as of December 31, 2021 and 2020, respectively, are allocated to:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pokok Pendapatan	2,910,887,990	1,036,016,886	*Cost of Revenues*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 30)	3,093,893,048	8,680,475,319	*General and Administrative Expenses (Note 30)*
Jumlah	**6,004,781,038**	**9,716,492,205**	***Total***

16. Aset Tidak Lancar Lainnya / *16. Other Non-Current Assets*

	2021 Rp	2020 Rp	
Keanggotaan Pengembangan Pariwisata	213,500,000	213,500,000	*Tourism Development Membership*
Barang Usang/ Besi Tua	6,379,400	6,379,400	*Obsolence Goods*
Aset Tidak Produktif	698,400	698,400	*Non-productive Assets*
Jumlah	**220,577,800**	**220,577,800**	***Total***

Keanggotaan Pengembangan Pariwisata
Merupakan keanggotaan pengembangan pariwisata di PT Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya *Golf and Country Club* Bogor).

Tourism Development Membership
Represents tourism membership in PT Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya Golf and Country Club Bogor).

Aset Tidak Produktif
Aset tidak produktif merupakan saldo aset tanah milik Perusahaan Ciganea yang digunakan untuk jalan Tol Cipularang. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan lahan pengganti yang terletak di kampung Bongas Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan luas 40.230 m^2 melalui pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tingkat II Purwakarta.

Non-productive Assets
Non-productive assets represent land owned by the Company in Ciganea that built for Cipularang Toll road. The Ministry of Public Works has prepared a replacement land that located in Bongas village, Sindangkasih, Purwakarta, Purwakarta District with an area of 40,230 sqm through discussion conducted by The Land Procurement of Purwakarta District Level II Committee.

Direksi telah mengirim surat ke Kementerian BUMN tanggal 28 November 2013 perihal Laporan Perkembangan Penyelesaian Permasalahan dan Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Milik Perusahaan dengan Mekanisme Tukar Menukar.

The Directors had sent a letter to Ministry of State-Owned Enterprises (SOE) in November 28, 2013 regarding Progress Report of Problem Solving and Proposal of the Company's Fixed Assets Write-offs in Exchange Scheme.

Tukar menukar tanah milik Perusahaan yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di kampung Bongas saat ini telah diselesaikan. Sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan namun untuk tanah Ciganea sampai saat ini belum dapat dikeluarkan dari daftar aset Perusahaan. Hal ini disebabkan karena harus menunggu persetujuan Kementerian untuk dilakukan penghapusan.

The swap of land owned by the Company located in Ciganea for a replacement land located in Bongas village has now been completed. So that the replacement land located in Kampung Bongas is recorded as the Company's assets, but for Ciganea land it has not been removed from the Company's asset list. This is because they have to wait for the approval of the Ministry for deletion.

Berdasarkan Surat Sekertariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PS.0402-Sj/356 tanggal 20 April 2021 mengenai penyelesaian Tukar Menukar Tanah Perum Jasa Tirta II yang Terdampak Proyek Jalan Tol Cipularang di Kp. Ciganea Desa Mekargalih Kecamatan Purwakarta, menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan pelaksanaan tukar menukar secara definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

According to the Letter of the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Public Housing No. PS.0402-Sj/356 dated April 20, 2021 regarding the completion of the Land Swap for Perum Jasa Tirta II Affected by the Cipularang Toll Road Project in Kp. Ciganea, Mekargalih Village, Purwakarta District, instructed the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing to immediately complete the definitive swap in accordance with the provisions of the legislation.

17. Utang Usaha / *17. Accounts Payable*

	2021 Rp	2020 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties*	5,555,232,233	12,895,072,685
Pihak Ketiga / *Third Parties*		
PT Duta Rama	1,887,271,379	1,708,247,513
PT Artha Trimita Selaras	1,189,675,300	--
PT Adi Sarana Armada	670,114,453	548,110,200
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	658,831,290	--
PT Binaman Utama (PPM Manajemen)	577,835,500	302,775,000
PT Prima Pesona Ardi Kreasi	--	3,182,554,100
PT Jiona Sejati	--	2,858,689,900
PT Rama Kasih Sempurna	--	2,767,943,767
PT Basuki Rahmanta Putra	--	1,696,418,900
CV Tri Putri Dewi	--	978,183,800
PT Prima Shina Cahaya	--	972,505,600
PT Seliacipta Bestari Lima	--	904,750,000
PT Altha Dyanusa Consulting	--	884,903,580
CV Orindo	--	681,775,380
PT Modern Widya Technical	--	619,490,476
PT Wahana Pengembangan Usaha	--	612,523,175
CV Aji Purwa Pratama	--	598,545,200
PT Sirara Agung Jaya	--	572,660,000
PT Ribka Putri Sejati	--	562,728,100
PT Ivibi Teruna Persada	--	538,573,200
Lainnya (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500* million)	1,757,580,474	9,234,596,282
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	6,741,308,396	30,225,974,173
Jumlah/ *Total*	**12,296,540,629**	**43,121,046,858**

Seluruh utang usaha pada 31 Desember 2021 dan 2020 dalam mata uang Rupiah.

All accounts payable as of December 31, 2021 and 2020 are in Rupiah.

18. Beban Akrual / *18. Accrued Expenses*

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Pegawai	22,505,100,786	14,476,955,733	*Employee Expenses*
Beban Non Pegawai	15,133,001,092	8,924,138,618	*Non Employee Expenses*
Jumlah	**37,638,101,878**	**23,401,094,351**	***Total***

Beban pegawai dialokasikan sebagai berikut:

Employee expenses are allocated as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Jasa Produksi	12,066,160,088	--	*Services Production Expenses*
Tantiem	7,500,000,000	10,000,000,000	*Tantiem*
Beban Pegawai Lainnya	2,938,940,698	4,476,955,733	*Other Expenses*
Jumlah	**22,505,100,786**	**14,476,955,733**	***Total***

Beban non pegawai dialokasikan sebagai berikut: *Non-employee expenses are allocated as follows:*

	2021 Rp	2020 Rp	
Operasi dan Pemeliharaan	10,701,380,056	4,321,305,181	*Operational and Maintenance*
Utilitas	1,264,221,677	1,408,581,900	*Utilities*
Konsultan	480,658,200	2,022,437,480	*Consultant*
Lainnya	2,686,741,159	1,171,814,057	*Others*
Jumlah	**15,133,001,092**	**8,924,138,618**	***Total***

19. Pendapatan Diterima di Muka / *19. Deferred Revenue*

	2021 Rp	2020 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ *By Customers*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*	8,743,532,738	8,903,855,612
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Cikarang Listrindo	5,167,445,495	6,077,117,725
PT Indo Bharat Rayon	3,416,935,052	4,397,368,877
PT Triguna Internusa	2,792,780,467	3,554,447,867
PT Logos Indonesia Prime One	1,033,727,750	1,033,727,750
PT High Speed Railway Contractor	968,916,667	804,397,150
PT Mora Telemática Indonesia	551,926,650	525,643,800
PT Daya Cipta Kemasindo	489,088,325	743,895,550
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	12,785,859,001	13,936,306,277
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	27,206,679,407	31,072,904,996
Jumlah/ *Total*	35,950,212,145	39,976,760,608
Bagian Jangka Pendek/ *Current Portion*	(26,794,540,537)	(32,374,616,918)
Bagian Jangka Panjang/ *Non-Current Portion*	**9,155,671,608**	**7,602,143,690**

20. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / *20. Other Short-Term Liabilities*

	2021 Rp	2020 Rp	
Pembelian Aset Tetap	40,431,201,336	1,398,452,825	*Acquisition of Fixed Assets*
Titipan Pemerintah Daerah Jawa Barat	9,745,653,752	10,241,148,752	*Local Government of West Java Deposits*
Asuransi	636,354,381	912,029,385	*Insurance*
Uang Jaminan	528,489,012	527,439,012	*Deposits*
Angsuran Rumah Dinas	151,146,153	529,544,418	*Official House Installments*
Jasa/ Pelayanan Pariwisata	125,068,400	37,924,356	*Tourism Services*
Lain-lain	6,240,699,621	6,107,924,157	*Others*
Jumlah	**57,858,612,655**	**19,754,462,905**	***Total***

Rincian pembelian aset tetap dari masing-masing *vendor* pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

List of acquisition of fixed assets from each vendors as of December 31, 2021 and 2020 is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp
KSO PT Putra Kencana dan PT Shiddiq Sarana Mulya	14,656,488,000	--
PT Borneo Mitra Sinergi	6,482,370,371	--
PT Gelora Megah Sejahtera	4,812,260,170	--
PT Ridha Tri Utama	4,203,714,530	--
PT Arca Energi	2,097,280,068	--
PT Pilar Jati Persada	1,013,950,080	--
Kantor PPAT Iwan Setyawan, SE., SH., M.Kn	1,100,317,625	--
PT Sava Jaya Anugerah	934,724,532	--
CV Jason Putra Abadi	798,497,854	--
Notaris dan PPAT H. Tafieldi Nevawan, SH., MH	567,364,500	--
KSO Anugerah Bangun Kencana dan Karya Konstrindo	524,011,344	--
PT. Surveyor Indonesia	405,475,967	690,954,000
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	2,834,746,295	707,498,825
Jumlah	**40,431,201,336**	**1,398,452,825**

21. Liabilitas Sewa / *21. Lease Liabilities*

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas Sewa Bruto - Pembayaran Sewa Minimum			***Gross Lease Liabilities - Minimum Lease Payments***
Tidak Lebih dari 1 Tahun	6,372,989,200	2,735,009,840	*Not Later than 1 Year*
Lebih dari 1 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	6,816,634,900	4,118,032,535	*Later than 1 Year and not Later than 5 Years*
Sub Jumlah	13,189,624,100	6,853,042,375	*Sub Total*
Dikurangi: Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(470,000,845)	(595,229,113)	*Less: Future Finance Charges on Leases*
Nilai Kini Liabilitas Sewa	**12,719,623,255**	**6,257,813,262**	***Present Value of Lease Liabilities***
Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu 1 Tahun	(6,022,860,500)	(1,907,208,176)	*Less: Current Portion Mature within 1 Year*
Bagian Jangka Panjang	**6,696,762,755**	**4,350,605,086**	***Non-Current Portion***
Liabilitas Sewa Berdasarkan Jatuh Tempo			***Lease Liabilities by Due Date***
Tidak Lebih dari 1 Tahun	6,022,860,500	1,907,208,176	*Not Later than 1 Year*
Lebih dari 1 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	6,696,762,755	4,350,605,086	*Later than 1 Year and not Later than 5 Years*
Jumlah	**12,719,623,255**	**6,257,813,262**	***Total***

	2021 Rp	2020 Rp	
Jumlah Diakui di Laba Rugi			***Amount Recognise Profit or Loss***
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna	6,004,781,038	9,716,492,206	*Depreciation of Right-of-Use Assets*
Bunga atas Liabilitas Sewa	512,599,282	469,863,485	*Interest on Lease Liabilities*
Jumlah	**6,517,380,320**	**10,186,355,691**	***Total***
Jumlah Diakui dalam Laporan Arus Kas			***Amounts Recognised in Statement of Cash Flows***
Jumlah Kas Keluar untuk Pembayaran Liabilitas Sewa	5,833,415,986	9,954,924,816	*Total Cash Outflow for Lease Payment*
Jumlah	**5,833,415,986**	**9,954,924,816**	***Total***

Merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan Aset Hak-Guna (Catatan 14).

Represents the lease liabilities in accordance to Right-of-Use Assets (Note 14).

22. Liabilitas Imbalan Kerja / *22. Employee Benefits Liabilities*

	2021 Rp	2020 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Imbalan Pascakerja	80,810,555,426	91,421,207,659	*Post-Employment Benefits*
Manfaat Pensiun	120,284,374,803	58,615,514,500	*Pension Benefits*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	11,535,772,367	--	*Other Long-Term Employee Benefits*
Sub Jumlah	212,630,702,596	150,036,722,159	*Sub Total*
Entitas Anak			***The Subsidiary***
Imbalan Pascakerja	117,392,803	--	*Post-Employment Benefits*
Sub Jumlah	117,392,803	--	*Sub Total*
Jumlah	**212,748,095,399**	**150,036,722,159**	***Total***

Berdasarkan Surat Edaran Perum Jasa Tirta II Nomor: SD-24/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menetapkan pemberian hak karyawan akibat Pemutusan Kerja mengacu pada ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-09/DIR/06/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II yang berpedoman pada Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Based on the Circular Letter of Perum Jasa Tirta II Number: SD-24/DIR/12/2021 dated December 31, 2021, the Company stipulates that the granting of employee rights due to Termination refers to the calculation provisions as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-09/ DIR/06/2020 concerning Guidelines for the Management of Human Resources in Perum Jasa Tirta II, which is guided by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Perusahaan memiliki tiga program, yaitu manfaat pensiun dari Dana Pensiun Jasa Tirta II, kewajiban diestimasi imbalan pascakerja karyawan dan liabilitas jangka panjang lainnya.

The Company has two programs, namely pension benefits from the Jasa Tirta II Pension Fund, the obligation to estimate post-employment benefits for employees and other long-term employee benefits.

Perhitungan manfaat pensiun dari Dana Pensiun dihitung oleh aktuaris independen dari Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Indra Catarya Situmeang dan Rekan dengan laporang No. 134/LA-

Calculation of pension benefits from the Pension Fund is calculated by an independent actuary from the Actuarial Consulting Office (KKA) Indra Catarya Situmeang and Partners with report No. 134/LA-

IK/KKAICS/III-2022 tanggal 25 Maret 2022 untuk tahun 2021 dan Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) PT Sigma Prima Solusindo dengan laporan No.082/SPS/R-I/II/2021 untuk tahun 2020.

IK/KKAICS/III-2022 dated March 25, 2022 for 2021 and the Actuarial Consulting Office (KKA) PT Sigma Prima Solusindo with report No.082/SPS/R-I/II/2021 for 2020.

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pascakerja lainnya kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003) dan sesuai surat edaran nomor: SED-24/DIR/12/2021 imbalan tersebut tidak didanai. Perhitungan imbalan pascakerja telah dihitung oleh aktuaris independen KKA Nurichwan berdasarkan laporan aktuaria No.368/KKA-N/R-I/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan KKA PT Sigma Prima Solusindo No. 081/SPS/RI/II/2021, tanggal 10 Februari 2021.

The Company provides long-term employee benefits and other post-employment benefits to employees in accordance with the benefits based on Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003) and according to circular letter number: SED-24/DIR/12/2021 the benefits are not funded. Calculation of post-employment benefits has been calculated by the independent actuary KKA Nurichwan based on actuarial report No. 368/KKA-N/R-I/II/2022 dated February 16, 2022 and KKA PT Sigma Prima Solusindo No. 081/SPS/RI/II/2021, dated February 10, 2021.

Asumsi dan metode yang digunakan dalam menghitung imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The assumptions and methods used in calculating employee benefits are as follows:

a. Asumsi Imbalan Pascakerja / ***a. Post-Employment Benefits Assumptions***

	2021	2020	
Tingkat Bunga Aktuaria	6.97%	6.89%	*Actuarial Interest Rate*
Tingkat Kenaikan Upah	7.00%	10.00%	*Average Salary Increase*
Tingkat Kematian/Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia th 2011 / *Indonesian Mortality Table in 2011*		*Mortality Rate*
Tingkat Kecacatan	10% dari tingkat kematian / *10% from death rate*		*Disability Rate*
Tingkat Pengunduran diri	5% pada usia sampai 39 tahun dan menurun secara linear sampai dengan usia pensiun normal/ *5% at age up to 39 years and decreases linearly until the normal retirement age*		*Resignation Rate*
Metode Penghitungan Aktuaria	*Projected Unit Credit*		*Actuary Valuation Method*

b. Asumsi Manfaat Pensiun / ***b. Pension Benefit Liability Assumption***

	2021	2020	
Tingkat Bunga Aktuaria	7.50%	6.89%	*Actuarial Interest Rate*
Tingkat Kenaikan Upah	7.00%	6.00%	*Average Salary Increase*
Tingkat Kematian/Mortalita	ANN 1949	ANN 1949 (Mod)	*Mortality Rate*
Tingkat Kecacatan	1% dari mortalita/ *1% from mortality*	5% dari mortalita/ *5% from mortality*	*Disability Rate*
Tingkat Pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun lalu menurun secara linear/ *1% at age 20 years than decreases linearly*	5% pada usia 20 tahun lalu menurun secara linear/ *5% at age 20 years than decreases linearly*	*Resignation Rate*
Metode Penghitungan Aktuaria	*Projected Unit Credit*		*Actuary valuation method*

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja di laporan posisi keuangan:

Movements of post-employment benefit liabilities in the statement of financial position:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal	91,421,207,659	71,668,261,672	*Beginning Balance*
Biaya Bunga	6,298,921,208	5,547,123,453	*Interest Cost*
Biaya Jasa Kini	4,792,377,910	5,901,171,684	*Currrent Service Cost*
Pembayaran Imbalan	(10,638,393,518)	(8,206,688,785)	*Payments of Benefits*
Sub Jumlah	91,874,113,259	74,909,868,024	*Sub Total*
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Dibebankan ke OCI	(11,063,557,833)	16,511,339,635	*Remeasurement of Defined Benefit Plan Charged to OCI*
Nilai Kini Liabilitas Akhir Tahun	**80,810,555,426**	**91,421,207,659**	***End of Year Present Value of Liabilities***

Beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif:

Post-employment benefit expense recognized in the statement of comprehensive income:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	4,792,377,910	5,901,171,684	*Currrent Service Cost*
Biaya Bunga	6,298,921,208	5,547,123,453	*Interest Cost*
Beban yang diakui	**11,091,299,118**	**11,448,295,137**	***Recognized Expenses***

Rekonsiliasi ekuitas imbalan pascakerja – OCI pada laporan posisi keuangan:

Post-employment benefit equity reconciliation – OCI on the statement of financial position:

	2021 Rp	2020 Rp	
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Tahun	(55,124,612,170)	(71,635,951,805)	*Other Comprehensive Income at Beginning of the Year*
Keuntungan Aktuaria (OCI : Keuntungan Perubahan Asumsi Aktuaria	(4,033,347,166)	(9,590,227,493)	*Gain On Actuaria (OCI): Gain on Changes in Actuaria Assumption*
Penyesuaian atas Pengalaman	(7,030,210,667)	26,101,567,128	*Adjustment in Experience*
Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Tahun	**(66,188,170,003)**	**(55,124,612,170)**	***Other Comprehensive Income - End of Year***
Pajak Penghasilan Terkait			
Saldo Awal	12,127,414,677	17,908,987,951	*Balance Beginning*
Perubahan Tarif	--	(2,149,078,554)	*Rate Changes*
Mutasi Tahun Berjalan	2,433,982,723	(3,632,494,720)	*Movement in Current Year*
Saldo Akhir	14,561,397,401	12,127,414,677	*Ending Balance*
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Akhir Tahun	**(51,626,772,602)**	**(42,997,197,493)**	***End Of Year Comprehensive Income/(Loss)***

Mutasi liabilitas manfaat pensiun di laporan posisi keuangan:

Movements of pension benefit liabilities in the statement of financial position:

	2021 Rp	2020 Rp	
Saldo Awal Tahun	58,615,514,500	1,093,873,046	*Balance Beginning of Year*
Beban Tahun Berjalan	11,259,904,682	9,079,359,769	*Current Period Expenses*
Pembayaran Iuran	(16,006,678,209)	(13,035,669,690)	*Contribution Payments*
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	66,415,633,830	61,477,951,375	*Remeasurement of Defined Benefit Plan*
Jumlah Liabilitas Bersih	**120,284,374,803**	**58,615,514,500**	***Total Net Liabilities***

Beban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif:

Movements of pension benefit liabilities in the statement of financial position:

	2021 Rp	2020 Rp	
Biaya Jasa Kini	7,221,295,733	8,056,017,249	*Current Service Cost*
Bunga atas Liabilitas	20,081,784,408	18,633,733,981	*Interest of Liabilities*
Bunga atas Aset Program	(16,043,175,459)	(17,610,391,463)	*Interest of Asset Program*
Beban yang Diakui	**11,259,904,682**	**9,079,359,767**	***Recognized Expenses***

Rekonsiliasi ekuitas manfaat pensiun – OCI pada laporan posisi keuangan:

Reconciliation of pension benefit equity – OCI on the statement of financial position:

	2021 Rp	2020 Rp	
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto-Awal	173,895,147,086	112,417,195,711	*Net Defined Benefit Liabilities (Assets) Remeasurement*
Asumsi Keuangan	37,519,379,322	23,481,788,575	*Financial Assumptions*
Penyesuaian Pengalaman Liabilitas	19,207,496,765	22,801,917,415	*Adjustments Experience of Liability*
Imbalan Hasil atas Aset Program	9,688,757,743	15,194,245,386	*Benefit Return of Plan Assets*
Penghasilan Komprehensif Lain - Saldo Akhir	**240,310,780,916**	**173,895,147,086**	***Other Comprehensive Income - End of Balance***
Pajak Penghasilan Terkait			
Saldo awal Tahun	(38,256,932,359)	(28,104,298,928)	*Balance Beginning of Year*
Perubahan Tarif	--	3,372,515,871	*Rate Changes*
Mutasi Tahun berjalan	(14,611,439,443)	(13,525,149,303)	*Movement in Current Period*
Saldo Akhir	(52,868,371,802)	(38,256,932,359)	*Ending Balance of Year*
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Akhir Tahun	**187,442,409,114**	**135,638,214,727**	***Comprehensif Income/(Loss) End Of Year***

Rekonsiliasi aset program:

Reconciliation of program assets:

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti	358,722,593,997	292,226,211,093	*Current Value of Defined Benefit Plan*
Nilai Wajar Aset Program	(238,438,219,194)	(233,610,696,593)	*Fair Value of Plan Assets*
Posisi Pendanaan	**120,284,374,803**	**58,615,514,500**	***Funding Position***

	2021 Rp	2020 Rp	
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	(233,610,696,593)	(239,652,044,026)	*Fair Value of Plan Assets Beginning Year*
Bunga atas Aset Program	(16,043,175,459)	(17,610,391,463)	*Net Defined Benefit Liabilities (Assets) Remeasurement*
Pembayaran Iuran - Pemberi Kerja	(16,006,678,209)	(13,035,669,690)	*Contributions Payments - Employer*
Pembayaran Iuran - Peserta Program	(2,988,955,601)	--	*Contributions Payments - Plan Participants*
Pembayaran Manfaat Pensiun	20,522,528,925	21,493,163,200	*Benefit Pension Payments*
Kerugian Aktuaria	9,688,757,743	15,194,245,386	*Actuarial Loss*
Nilai Wajar Aset Program - Saldo Awal Tahun (Aktual)	**(238,438,219,194)**	**(233,610,696,593)**	***FV of Plan Assets - End of Balance (Actual)***

Mutasi liabilitas imbalan jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan:

Movements of other long-term employee benefit liabilities in the statement of financial position:

	2021 Rp	2020 Rp	
Liabilitas Bersih Awal Tahun	--	--	*Net Liabilities Beginning of the Year*
Beban Tahun Berjalan	14,515,502,047	--	*Current Year Expenses*
Pembayaran Manfaat	(2,979,729,680)	--	*Interest of Liabilities*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**11,535,772,367**	**--**	***Net Liabilities - End of Year***

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long term benefit is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Kurang Dari 1 Tahun	1,847,920,667	--	*Less Than 1 Year*
1-3 Tahun	17,032,375,074	18,306,480,310	*1-3 Year*
4-5 Tahun	13,406,705,770	8,907,687,121	*4-5 Year*
6-10 Tahun	34,708,569,821	33,416,720,882	*6-10 Year*
Diatas 10 Tahun	25,350,736,461	30,790,319,346	*Over 10 Years*
Jumlah	**92,346,307,793**	**91,421,207,659**	***Total***

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

A defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salary risk, as follows:

a. Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

a. Interest Rate Risk
The present value of the defined pension obligation is calculated using discount rate determinated by reference to yields on high quality corporate bonds. Decrease interest rate would increase the liability bond program.

b. Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

b. Salary Risk
The present value of the defined benefit pension obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the program's liabilities.

Diasumsikan bahwa tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laba rugi. Satu persen perubahan diasumsikan pada tingkat diskonto dan kenaikan gaji akan memiliki dampak sebagai berikut:

An assumption has been made that discount rate and salary growth rates have a significant effect on the amounts recognized in profit or loss. One percent of change in the assumption of discount rate and salary growth will have the following impact:

Dampak atas Liabilitas Imbalan Jangka Panjang Lainnya/
Impact on Other Long-Term Employee Benefits Liabilities

	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	**Kenaikan Asumsi/ *Increase in Assumption***	**Penurunan Asumsi/ *Decrease in Assumption***	
Tingkat Diskonto	1.00%	10,900,626,520	12,252,893,694	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji di Masa Depan	1.00%	12,027,027,830	11,098,894,956	*Future Salary Growth Rate*

Dampak atas Liabilitas Imbalan Pascakerja/
Impact on Post-Employment Benefits Liabilities

	Perubahan Asumsi/ *Change in Assumption*	**Kenaikan Asumsi/ *Increase in Assumption***	**Penurunan Asumsi/ *Decrease in Assumption***	
Tingkat Diskonto	1.00%	75,175,135,983	87,176,155,779	*Discount Rate*
Tingkat Kenaikan Gaji di Masa Depan	1.00%	83,896,206,360	78,075,769,092	*Future Salary Growth Rate*

23. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / *23. Other Long-Term Liabilities*

	2021 Rp	**2020 Rp**
PT Bandung Management Economic Center	1,660,692,000	1,660,692,000
PT Dua Ribu Satu Pangripta	1,469,437,200	1,469,437,200
PT Marunda Mandiri International	9,900,000,000	11,134,937,500
Jumlah/ *Total*	13,030,129,200	14,265,066,700
Bagian Jangka Pendek/ *Current Portion*	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)
Bagian Jangka Panjang/ *Non-Current Portion*	**11,930,129,200**	**13,165,066,700**

Utang ke PT Bandung Management Economic Center dan PT Dua Ribu Satu Pangripta merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang tidak dapat diselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal.

Payables to PT Bandung Management Economic Center and PT Dua Ribu Satu Pangripta are reclassified balances of trade debt balances that cannot be settled and settled in the normal operating cycle.

Utang ke PT Marunda Mandiri Internasional merupakan *Shareholder Loan* kepada PT Tegar Mandiri Cemerlang. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 011/MMI-TMC/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan No. 001/MMI-TMC/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, PT Marunda Mandiri Internasional memberikan pinjaman dana kepada TMC masing-masing sebesar Rp8.000.000.000 dan Rp3.000.000.000, dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran penyelesaian proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Marunda kepada kontraktor dan modal kerja operasional SPAM Marunda. Utang tersebut dikenakan bunga 8,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2030. Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.900.000.000 dan Rp11.134.937.500.

Payable to PT Marunda Mandiri International represents Shareholder Loan to PT Tegar Mandiri Cemerlang. Based on the Loan Agreement No. 011/MMI-TMC/XI/2019 dated November 4, 2019 and No. 001/MMI-TMC/I/2020 dated January 17, 2020, PT Marunda Mandiri Internasional provided loan funds to TMC amounting to Rp8,000,000,000 and Rp3,000,000,000, respectively, wherein the money will be used to pay for the completion of the Marunda Drinking Water Supply System (SPAM) project to contractors and working capital for the Marunda SPAM operation. The loan bears interest at 8.5% per annum and will mature on February 16, 2030. The balance as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp9,900,000,000 and Rp11,134,937,500, respectively.

24. Perpajakan / *24. Taxes*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2021 Rp	2020 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Penghasilan			
Pasal 28a			*Income Tax Article 28a*
Tahun 2019	--	48,558,292,403	*Year 2018*
Tahun 2020	53,346,357,139	53,346,357,139	*Year 2019*
Tahun 2021	48,241,227,669	--	*Year 2020*
Jumlah	**101,587,584,808**	**101,904,649,542**	***Total***

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2019 No: 00013/406/19/051/21 tanggal 22 April 2021, Perusahaan ditetapkan lebih bayar atas Pajak Penghasilan tahun 2019 sebesar Rp37.852.036.259 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No: 00394A tanggal 18 Mei 2021 jumlah lebih bayar yang disetujui setelah dikurangi kompensasi hutang pajak sejumlah Rp1.740.160.086 melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sejumlah Rp36.111.876.173.

Based on the 2019 Income Tax Overpayment Assessment Letter No: 00013/406/19/051/21 dated 22 April 2021, the Company is determined to have overpaid the 2019 Income Tax amounting to Rp37,852,036,259 and based on the Order to Pay the Excess Tax No: 00394A dated May 18, 2021, the approved overpayment after deducting the tax payable compensation amounting to Rp1,740,160,086 through the withholding of the Order for Paying Excess Tax (SPMKP) amounting to Rp36,111,876,173.

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2021 Rp	2020 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan Wajib Pungut	3,481,380,114	3,940,496,657	*Value Added Tax - Input Withholding Tax*
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	7,147,694,084	7,643,771,572	*Value Added Tax - Output*
PPh Pasal 21	4,773,549,068	4,296,617,968	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 22	107,874,409	409,732,352	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	475,066,608	553,178,669	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 4 (2) Final	2,667,496,858	2,545,210,049	*Income Tax Article 4 (2) Final*
Pajak Penerangan Jalan	6,641,655,165	6,483,851,618	*Street Lighting Tax*
Pajak Hotel dan Restoran	142,645,925	44,370,650	*Hotel and Restaurant Tax*
Pajak Pengambilan Air Permukaan	423,036,785	150,000	*Ground Water Intake Tax*
Pajak Parkir	1,008,250	1,009,250	*Parking Tax*
Sub Jumlah	25,861,407,266	25,918,388,785	*Sub Total*
Entitas Anak			***The Subsidiary***
PPh Pasal 23	25,036,728	71,497,946	*Income Tax article 23*
PPh Pasal 4 (2)	56,721,876	(2,811,999)	*Income Tax article 4(2)*
Pajak Pertambahan Nilai	362,898,577	--	*Value Added Tax*
Sub Jumlah	444,657,181	68,685,947	*Sub Total*
Jumlah	**26,306,064,447**	**25,987,074,732**	***Total***

c. Beban (Manfaat) Pajak / *c. Tax Expenses (Benefits)*

	2021 Rp	2020 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Kini	29,790,709,300	26,740,440,980	*Current Tax*
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak	12,446,416,230	14,140,503,291	*Adjustment on Notice of Tax Assessment*
Penyesuaian Tarif Pajak Tangguhan	--	2,614,385,924	*Adjustment on Deferred Tax Tariff*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(2,777,088,112)	898,966,101	*Deferred Tax Expenses (Benefits)*
Sub Jumlah	39,460,037,418	44,394,296,296	*Sub Total*
Entitas Anak			***The Subsidiary***
Pajak Kini	--	--	*Current Tax*
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(2,324,572,751)	--	*Deferred Tax Expenses (Benefits)*
Sub Jumlah	(2,324,572,751)	--	*Sub Total*
Jumlah	**37,135,464,667**	**44,394,296,296**	***Total***

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income before tax per statements of comprehensive income and taxable income is as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan Badan	144,581,855,420	157,629,311,460	*Consolidated Loss Before Corporate Income Tax*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	(3,133,375,783)	(4,288,886,773)	*Profit (Loss) Before Income Tax of Subsidiaries*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	1,436,705,577	--	*Net Share Loss on Associates*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	149,151,936,780	161,918,198,233	*Profit (Loss) Before Tax*
Perbedaan Tetap			***Permanent Differences***
Kesejahteraan Sosial	9,429,375,977	9,940,854,683	*Social Welfare*
Beban Pajak Final Lahan	5,192,492,862	5,323,789,212	*Land Final Tax Expenses*
Jamuan	1,087,125,191	2,490,688,943	*Entertainment*
Majalah dan Surat Kabar	208,719,500	218,133,492	*Magazine and Newspaper*
Bunga Jasa Giro dan Deposito	(12,573,210,214)	(26,372,571,230)	*Current Account and Time Deposits Interest*
Pendapatan Pemanfaatan Lahan yang dikenakan Pajak Final	(60,801,750,529)	(57,278,294,013)	*Land Utilization Revenue Subjected to Final Tax*
Beban Lainnya	3,727,332,276	5,917,042,205	*Other Expenses*
Biaya Perawatan	18,147,070,098	14,127,024,122	*Medical Expenses*
Biaya Personalia	3,441,592,503	1,908,860,608	*Employee Expenses*
Beban Promosi dan Pemasaran	4,730,927,476	5,370,625,562	*Promotion and Marketing Expenses*
Biaya atas Pendapatan yang Telah Dikenakan Pajak Final	1,047,575,425	2,069,316,728	*Cost of Revenue that Subjected to Final Tax*
Jumlah	(26,362,749,435)	(36,284,529,688)	*Total*
Perbedaan Waktu			***Timing Differences***
Penyusutan Aset Tetap	(9,683,375,471)	(5,235,174,864)	*Depreciation Expenses of Fixed Assets*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	5,344,451,958	15,765,386,377	*Allowance for Impairment Losses of Account Receivable*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	--	(413,610,772)	*Allowance for Impairment Losses of Inventory*
Jasa Produksi dan Tantiem	9,566,160,088	(13,212,045,472)	*Production Services and Tantiem*
Beban Imbalan Kerja	33,886,976,167	20,527,654,904	*Employee Benefit Expenses*
Realisasi Pembayaran Imbalan Kerja	(26,645,071,727)	(21,242,358,475)	*Realization of Employee Benefit*
Sewa	153,986,764	(276,061,247)	*Lease*
Jumlah	12,623,127,779	(4,086,209,549)	*Total*
Laba Kena Pajak	**135,412,315,124**	**121,547,458,996**	***Taxable Income***
Pembulatan	**135,412,315,000**	**121,547,459,000**	***Rounded***

	2021 Rp	2020 Rp	
Rincian Beban dan Utang (Piutang) Pajak Kini adalah sebagai berikut:			*Details of Expenses and Payables (Receivables) on Current Tax are as follows:*
Beban Pajak Kini			*Current Tax Expenses*
Tarif 22%	29,790,709,300	26,740,440,980	*22% Tariff*
Pajak Dibayar di Muka			*Prepaid Tax*
PPh Pasal 22	2,324,238,780	2,711,772,151	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	568,210,561	56,735,441	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	75,139,487,628	77,318,290,527	*Income Tax Article 22*
Jumlah	78,031,936,969	80,086,798,119	*Total*
Lebih Bayar Pajak Penghasilan	**(48,241,227,669)**	**(53,346,357,139)**	***Over Payment of Income Tax***

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

The details of the deferred tax is as follows:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020 Rp	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak/ *Tax Base Correction* Rp	Dikreditkan (Dibebankan)ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Income for the Year* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ *Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year* Rp	31 Desember 2021/ *December 31, 2021* Rp	
Perusahaan						***The Company***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	18,224,012,064	--	1,175,779,430.8	--	19,399,791,495	*Allowance for Impairment Losses on Account Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	41,642,304	--	--	--	41,642,304	*Allowance for Impairment Losses on Inventory*
Jasa Produksi dan Tantiem	2,200,000,000	--	2,104,555,220.0	--	4,304,555,220	*Production Services and Tantiem*
Imbalan Kerja	6,878,561,193	--	1,593,218,976.8	--	8,471,780,170	*Employee Benefits*
Beban Penyusutan Aset Tetap	3,951,606,898	--	(2,130,342,603.6)	--	1,821,264,295	*Depreciation of Fixed Assets*
Sewa	7,784,646	--	33,877,088.0	--	41,661,734	*Lease*
	31,303,607,106	--	2,777,088,112	--	34,080,695,218	
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial dari Imbalan Kerja Manfaat Pasti	26,129,517,682	--	--	12,177,456,720	38,306,974,402	*Gains (Losses) Actuarial in Employee Benefits Defined Benefit*
Jumlah Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	**57,433,124,788**	**--**	**2,777,088,112**	**12,177,456,720**	**72,387,669,619**	***Total Deferred Tax (Liabillities) Assets***
Entitas Anak						***The Subsidiary***
PT Jasa Tirta Luhur	--	1,467,064,710	857,508,041	--	2,324,572,751	*PT Jasa Tirta Luhur*
Jumlah	**57,433,124,788**	**1,467,064,710**	**3,634,596,153**	**12,177,456,720**	**74,712,242,370**	***Total***

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019* Rp	Dampak Penerapan Awal PSAK 71 & 73/ *Impact on Initial Implementation of PSAK 71 &73* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Income for the Year* Rp	Koreksi Perubahan Tarif Tahun Lalu/ *Correction of Tariff Changes Previous Year* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ *Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year* Rp	31 Desember 2020/ *December 31, 2020* Rp	
Aset Pajak Tangguhan:							***Deferred Tax Assets:***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	10,033,558,408	5,926,095,663	3,468,385,003	(1,204,027,009)	--	18,224,012,064	*Allowance for Impairment Losses on Account Receivables*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	150,723,493	--	(90,994,370)	(18,086,819)	--	41,642,304	*Allowance for Impairment Losses on Inventory*
Jasa Produksi dan Tantiem	5,803,011,368	--	(2,906,650,004)	(696,361,364)	--	2,200,000,000	*Production Services and Tantiem*
Imbalan Kerja	7,035,795,979	--	(157,234,786)	--	--	6,878,561,193	*Employee Benefits*
Beban Penyusutan Aset Tetap	5,799,256,101	--	(1,151,738,470)	(695,910,732)	--	3,951,606,898	*Depreciation of Fixed Assets*
Sewa		68,518,120	(60,733,474)	--	--	7,784,646	*Lease*
	28,822,345,348	5,994,613,783	(898,966,101)	(2,614,385,924)	--	31,303,607,106	
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial dari Imbalan Kerja Manfaat Pasti	10,195,310,976	--	--	(1,223,437,317)	17,157,644,022	26,129,517,682	*Gains (Losses) Actuarial in Employee Benefits Defined Benefit*
Jumlah Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	**39,017,656,324**	**5,994,613,783**	**(898,966,101)**	**(3,837,823,241)**	**17,157,644,022**	**57,433,124,787**	***Total Deferred Tax (Liabilities) Assets***

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2021 **Rp**	**2020** **Rp**	
Rugi Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan Badan	144,581,855,420	157,629,311,460	*Consolidated Loss Before Corporate Income Tax*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	(3,133,375,783)	(4,288,886,773)	*Profit (Loss) Before Income Tax of Subsidiaries*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	1,436,705,577	--	*Net Share Loss on Associates*
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	149,151,936,780	161,918,198,233	*Profit (Loss) Before Tax*

	2021 Rp	2020 Rp	
Tarif Pajak yang Berlaku			*Effective Tax Rate*
22% x Rp149.151.936.780	(32,813,426,092)	--	*22% x Rp149,151,936,780*
22% x Rp161.918.198.233	--	(35,622,003,611)	*22% x Rp161,918,198,233*
Pengaruh Pajak atas Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pajak			*Tax Effect on Non Deductible Expense*
Kesejahteraan Sosial	(2,074,462,715)	(2,186,988,030)	*Social Welfare*
Beban Pajak PPN	--	--	*Value Added Tax Expenses*
Beban Pajak Final Lahan	(1,142,348,430)	(1,171,233,627)	*Land Final Tax Expenses*
Jamuan	(239,167,542)	(547,951,567)	*Entertainment*
Majalah dan Surat Kabar	(45,918,290)	(47,989,368)	*Magazines and Newspaper*
Bunga Deposito	2,766,106,247	5,801,965,671	*Deposit Interest*
Pendapatan Pemanfaatan Lahan yang Dikenakan Pajak Final	13,376,385,116	12,601,224,683	*Land Utiliation Income Subject to Final Tax*
Beban Lain-lain	(820,013,072)	(1,301,749,285)	*Other Expenses*
Biaya Perawatan	(3,992,355,422)	(3,107,945,307)	*Medical Costs*
Biaya Personalia	(757,150,351)	(419,949,334)	*General Affair Cost*
Beban Promosi dan Pemasaran	(1,040,804,045)	(1,181,537,624)	*Promotion and Marketing Expenses*
Biaya atas Pendapatan yang Pajaknya Telah Dikenakan Final	(230,466,594)	(455,249,680)	*Costs over Revenue which Tax is Subjected to Final*
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**(27,013,621,190)**	**(27,639,407,079)**	***Total Income (Exepense) Tax Benefit***
Beban Pajak Kini	29,790,709,300	26,740,440,980	*Current Tax Expenses*
Manfaat Pajak Tangguhan	(2,777,088,112)	898,966,101	*Deferred Tax Benefits*
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak	12,446,416,230	14,140,503,291	*Adjustment on Notice of Tax Assessment*
Penyesuaian Tarif Pajak Tangguhan	--	2,614,385,924	*Adjustment on Deferred Tax Tariffs*
Jumlah Beban Pajak	**39,460,037,418**	**44,394,296,296**	***Total Tax Expenses***
Entitas Anak			***The Subsidiary***
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(2,324,572,751)	--	*Deferred Tax Expenses (Benefits)*
Sub Jumlah	(2,324,572,751)	--	*Sub Total*
Jumlah	**37,135,464,667**	**44,394,296,296**	***Total***

25. Modal Pemerintah / *25. Government Capital*

	2021 Rp	2020 Rp	
Modal Dasar	46,000,000,000	46,000,000,000	*Authorized Capital*
Penambahan Modal	118,547,635,935	118,547,635,935	*Additional Paid-Up Capital*
Jumlah	**164,547,635,935**	**164,547,635,935**	***Total***

1. Penetapan Modal Perusahaan, tanggal 1 Januari 1991 berdasarkan SK Menteri Keuangan No.202/KMK.13/1992 tanggal 5 Februari 1992.	46,000,000,000	*Company's Capital dated January 1, 1991 based on Ministry of Finance Decree No. 202/KMK.13/1992 dated February 5, 1992.* 1.
2. Penambahan Modal Negara berupa Instalasi & Jaringan berdasarkan PP No.78 tahun 1998 tanggal 22 Oktober 1998.	60,287,829,310	*Additional Government Capital consisting of installation and network based on Government Regulation No.78 of 1998 dated October 22, 1998.* 2.
3. Penambahan Modal Negara Berupa lahan ex Departemen PU Divisi I PJT II berdasarkan PP No.90 tahun 2000.	18,439,506,625	*Additional State Capital consisting of ex - Department PU's land Division I PJT II based on Government Regulation No.90 of 2000.* 3.
4. Penambahan Modal Negara berupa Rehabilitasi/up-rating PLTA IR. H. Djuanda berdasarkan PP No. 4 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009	39,820,300,000	*Additional Government Capital consisting of PLTA IR. H. Djuanda rehabilitation/ up-rating based on Government Regulation No. 4 of 2009 dated January 16, 2009.* 4.
Jumlah	**164,547,635,935**	***Total***

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S463/MBU/02/2021 tanggal tanggal 30 Juni 2021, Pemegang Saham memberikan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Tahun Buku 2020 seluruhnya sebagai laba ditahan.

Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S463/MBU/02/2021 dated June 30, 2021, shareholders approve the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company for the 2020 Financial Year and stipulate the use of consolidated net profit for the 2020 Financial Year entirely as retained earnings.

Berdasarkan Surat Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2019 diatas halaman 3 Nomor 2, menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang Diatribusikan kepada Entitas Induk Perusahaan Tahun Buku 2019 sebesar Rp153.809.056.862, dengan rincian yaitu:

Based on the Annual Report Approval Letter and the Endorsement of the Company Financial Statements year 2019 above page 3 Number 2, approves the determination of the use of Consolidated Net Profits Attributable to the Company for Financial Year 2019 amounting to Rp153,809,056,862, as follows:

a. Dividen sebesar Rp20.764.222.676 atau 13,5%.
b. Cadangan sebesar Rp133.044.834.185 atau 86,5%.

a. Dividend of Rp20,764,222,676 or 13.5%.
b. Reserves amounting to Rp133,044,834,185 or 86.5%

26. Kepentingan Non Pengendali / *26. Non-Controlling Interest*

	2021 Rp	2020 Rp	
PT Tegar Mandiri Cemerlang			***PT Tegar Mandiri Cemerlang***
Nilai Tercatat - Awal	8,133,548,593	9,241,312,639	*Carrying Amount - Beginning*
Bagian Rugi Bersih	(155,245,761)	(1,107,764,046)	*Net Loss Share*
Penyesuaian	(37,678,930)	--	*Adjustments*
Sub Jumlah	7,940,623,902	8,133,548,593	*Sub Total*

	2021 Rp	2020 Rp	
PT Jasa Tirta Luhur			***PT Jasa Tirta Luhur***
Nilai Tercatat - Awal	138,141,978	170,880,415	*Carrying Amount - Beginning*
Bagian Rugi Bersih	(6,535,573)	(31,811,129)	*Net Loss Share*
Penyesuaian	376,790	(927,308)	*Adjustments*
Sub Jumlah	131,983,195	138,141,978	*Sub Total*
Jumlah	**8,072,607,097**	**8,271,690,571**	***Total***

27. Pendapatan Usaha / *27. Revenues*

	2021 Rp	2020 Rp	
Pendapatan Sumber Daya Air			*Water Resources Revenue*
Pendapatan Listrik	454,556,359,414	448,610,805,145	*Electricity Revenue*
Pendapatan Air Baku	292,436,438,725	302,948,786,678	*Raw Water Revenue*
Pendapatan Air Bersih	8,918,509,521	8,941,622,910	*Water Revenue*
Sub Jumlah	755,911,307,660	760,501,214,733	*Sub Total*
Pendapatan Non Sumber Daya Air			*Non Water Resources Revenue*
Pendapatan Pariwisata	10,654,672,239	9,102,081,748	*Tourism Revenue*
Pendapatan Pemanfaatan Lahan	60,801,750,529	57,278,294,013	*Land Utilization Revenue*
Pendapatan Laboratorium	6,984,167,000	6,057,207,000	*Laboratory Revenue*
Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan	2,927,746,577	3,685,240,039	*Bottled Drinking Water Revenue*
Pendapatan Sewa	128,811,667	87,850,000	*Rent Revenue*
Pendapatan Konstruksi	17,475,000,000	--	*Construction Revenue*
Pendapatan Usaha Lainnya	1,634,726,250	2,674,684,100	*Other Operating Revenue*
Sub Jumlah	100,606,874,262	78,885,356,900	*Sub Total*
Jumlah	**856,518,181,922**	**839,386,571,633**	***Total***

Pendapatan Listrik

Berdasarkan Addendum VI atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda No. 1/97/SPU/2004 antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) tanggal 28 November 2018, harga jual energi listrik tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp338/kWh dan Rp330/kWh.

Electricity Revenues

Based on Addendum VI of the Sale and Purchase of Electricity Power Hydroelectric Power Plant Ir. H. Djuanda No. 1/97/SPU/2004 between the Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and PT PLN (Persero) on November 28, 2018, the selling price of electrical energy in 2021 and 2020 is amounting to Rp338/kWh and Rp330/kWh, respectively.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/3/PRT/2015 tentang Tarif Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda Bagi Pelanggan Non PLN yang Berada di bawah Penguasaan Perum Jasa Tirta II tanggal 30 Januari 2015, harga jual energi listrik untuk pelanggan non PLN ditetapkan 80% dari tarif tenaga listrik yang ditetapkan pemerintah.

Based on the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. 1/3/PRT/2015 concerning the Electricity Tariff of Hydroelectric Power Plant Ir. H. Djuanda For Non PLN Customers Under the Control of Perum Jasa Tirta II dated January 30, 2015, the selling price of electricity for non PLN customers is set at 80% of the electricity tariff set by the government.

Pendapatan Air Baku

Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk penggunaan sumber daya air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah

Raw Water Revenues

The Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) tariff for the use of water resources for the Regional Drinking Water Company (PDAM) for the

Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp272,50/m^3 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 530/KPTS/M/2019 tanggal 17 Juni 2019.	*Special Capital Region of Jakarta is set for 2021 at Rp272.50/cbm in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 530 /KPTS/M/2019 dated June 17, 2019.*
Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi PDAM di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp130,81/m^3, bagi Industri di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp224,71/m^3 dan bagi Industri yang mengambil air langsung dari Waduk Jatiluhur sebesar Rp251,80/m^3 terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 765/KPTS/M/2019.	*The BJPSDA tariff for the use of water resources for PDAMs in West Java Province is Rp130.81/cbm, for Industry in West Java Province is Rp224.71/cbm and for Industries that take water directly from Jatiluhur Reservoir amounting to Rp251.80/cbm starting from August 23, 2019 in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 765/KPTS/M/2019.*
Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Ir. H. Djuanda sebesar Rp85,28/kWh, Saguling sebesar Rp14,01/kWh dan Cirata sebesar Rp45,69/kWh terhitung mulai tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 935/KPTS/M/2017.	*The BJPSDA tariff for the use of water resources for Hydroelectric Power Plants (PLTA) in Ir. H. Djuanda is Rp85.28/kWh, Saguling is Rp14.01/kWh and Cirata is Rp45.69/kWh starting on November 22, 2017 in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 935/KPTS/M/2017 .*
Pendapatan dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 26,45% dan 34,10% (Catatan 33).	*Revenue from related parties for the years ended December 31, 2021 and 2020 amounted to 26.45% and 34.10%, respectively (Note 33).*

28. Beban Pokok Pendapatan / *28. Cost of Revenues*

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Sumber Daya Air			*Water Resources Expenses*
Beban Listrik	94,475,383,716	101,633,949,799	*Electricity Expenses*
Beban Air Baku	383,370,832,278	342,976,222,292	*Raw Water Expenses*
Beban Air Bersih	9,799,651,613	22,246,487,483	*Water Expenses*
Sub Jumlah	487,645,867,607	466,856,659,574	*Sub Total*
Beban Non Sumber Daya Air			*Non Water Resources Expenses*
Beban Pariwisata	18,687,069,207	23,146,913,933	*Tourism Expenses*
Beban Pemanfaatan Lahan	8,446,770,222	12,265,688,616	*Land Utilization Expenses*
Beban Laboratorium	7,268,072,471	6,668,745,923	*Laboratory Expenses*
Beban Air Minum Dalam Kemasan	5,690,086,324	6,655,031,881	*Bottled Drinking Water Expenses*
Beban Konstruksi	15,962,668,806	--	*Construction Expenses*
Beban Usaha Lainnya	986,640,634	632,117,938	*Other Operating Expenses*
Sub Jumlah	57,041,307,664	49,368,498,291	*Sub Total*
Jumlah	**544,687,175,271**	**516,225,157,865**	***Total***

Rincian beban sumber daya air adalah sebagai berikut:

Details of water resource expenses are as follows:

	2021				
	Beban Listrik/ *Electricity Expenses*	Beban Air Baku/ *Raw Water Expenses*	Beban Air Bersih/ *Clean Water Expenses*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	25,079,029,667	87,218,748,699	2,372,930,835	114,670,709,201	*General Affair Expenses*
Beban Umum dan Operasi SDA	3,006,906,029	52,669,066,354	861,153,168	56,537,125,551	*Water Resources General and Operational Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	5,066,868,850	6,002,125,022	1,497,866,180	12,566,860,052	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	12,638,584,500	36,284,831,945	852,545,437	49,775,961,882	*Maintenance Expenses*
Beban Sistem Informasi	--	487,352,437	10,014,577	497,367,014	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	281,259,700	--	281,259,700	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	670,455,800	--	670,455,800	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	396,520,300	20,075,287,500	400,223,800	20,872,031,600	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	23,917,128,015	23,278,546,329	3,754,922,616	50,950,596,960	*Depreciation Expenses (Note 14 and 15)*
Beban *Overhead* Lainnya	24,370,346,355	156,403,158,492	49,995,000	180,823,499,847	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**94,475,383,716**	**383,370,832,278**	**9,799,651,613**	**487,645,867,607**	***Total***

	2020				
	Beban Listrik/ *Electricity Expenses*	Beban Air Baku/ *Raw Water Expenses*	Beban Air Bersih/ *Clean Water Expenses*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	21,746,460,428	76,065,310,889	3,817,817,132	101,629,588,449	*General Affair Expenses*
Beban Umum dan Operasi SDA	3,187,870,433	54,418,996,267	2,623,600,574	60,230,467,274	*Water Resources General and Operational Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	5,316,479,425	5,901,813,828	1,843,651,105	13,061,944,358	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	24,974,271,912	45,259,568,856	1,989,822,398	72,223,663,166	*Maintenance Expenses*
Beban Sistem Informasi	--	583,873,125	10,039,900	593,913,025	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	959,284,850	--	959,284,850	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	601,382,800	--	601,382,800	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	397,799,600	14,390,364,784	1,774,563,200	16,562,727,584	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	21,770,540,463	17,651,548,189	3,674,224,849	43,096,313,501	*Depreciation Expenses (Note 14 and 15)*
Beban *Overhead* Lainnya	24,240,527,538	127,144,078,704	6,512,768,325	157,897,374,567	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**101,633,949,799**	**342,976,222,292**	**22,246,487,483**	**466,856,659,574**	***Total***

Rincian beban non sumber daya air adalah sebagai berikut:

Details of non water resource expenses are as follows:

	2021						
	Beban Pariwisata/ *Tourism Expenses*	Beban Pemanfaatan Lahan/ *Land Utilization Expenses*	Beban Laboratorium/ *Laboratory Expenses*	Beban Air Minum Dalam Kemasan/ *Bottled Drinking Water Expenses*	Beban Konstruksi dan Usaha Lainnya/ *Construction and Other Operational Expenses*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	1,976,386,612	2,092,376,325	3,451,190,043	1,425,764,910	50,000,000	8,995,717,890	*General Affair Expenses*
Beban Rumah Tangga dan Operasi	5,236,827,850	882,000	759,124,985	963,166,239	577,788,100	7,537,789,174	*Office Household and Opertional Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	2,213,041,934	--	1,325,809,033	2,511,158,997	358,852,534	6,408,862,498	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	930,619,380	113,443,610	146,684,048	302,098,155	--	1,492,845,193	*Maintenance Expenses*
Beban Subkonstruksi					15,962,668,806	15,962,668,806	*Subconstruction Expenses*
Beban Sistem Informasi	157,567,369	--	15,600,000	11,622,650	--	184,790,019	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	--	70,000,000	--	--	70,000,000	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	--	154,989,975	7,486,000	--	162,475,975	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	558,617,900	--	213,998,000	--	--	772,615,900	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	4,293,127,415	--	1,113,735,887	468,789,373	--	5,875,652,675	*Depreciation Expenses (Note 14 and 15)*
Beban *Overhead* Lainnya	3,320,880,747	6,240,068,287	16,940,500	--	--	9,577,889,534	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**18,687,069,207**	**8,446,770,222**	**7,268,072,471**	**5,690,086,324**	**16,949,309,440**	**57,041,307,664**	***Total***

	2020						
	Beban Pariwisata/ *Tourism Expenses*	Beban Pemanfaatan Lahan/ *Land Utilization Expenses*	Beban Laboratorium/ *Laboratory Expenses*	Beban Air Minum Dalam Kemasan/ *Bottled Drinking Water Expenses*	Beban Usaha Lainnya/ *Other Operational Expenses*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	1,444,712,921	4,821,101,428	2,952,843,957	589,786,627	--	9,808,444,933	*General Affair Expenses*
Beban Rumah Tangga dan Operasi	6,033,587,867	1,481,248	1,040,561,599	2,244,716,747	50,000,000	9,370,347,461	*Office Household and Opertional Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	2,073,085,147	--	1,203,050,464	1,681,721,095	523,106,788	5,480,963,494	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	2,069,913,427	50,000,000	200,530,050	261,844,492	--	2,582,287,969	*Maintenance Expenses*
Beban Sistem Informasi	177,050,109	--	7,600,000	6,366,500	--	191,016,609	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	--	59,996,000	5,500,000	59,011,150	124,507,150	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	--	84,844,400	20,000,000	--	104,844,400	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	540,453,700	--	163,500,000	25,723,000	--	729,676,700	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	3,325,658,364	--	747,467,414	455,260,541	--	4,528,386,319	*Depreciation Expenses (Notes 14 and 15)*
Beban *Overhead* Lainnya	7,482,452,398	7,393,105,940	208,352,039	1,364,112,879	--	16,448,023,256	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**23,146,913,933**	**12,265,688,616**	**6,668,745,923**	**6,655,031,881**	**632,117,938**	**49,368,498,291**	***Total***

29. Beban Pemasaran / *29. Marketing Expenses*

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Promosi dan Reklame	3,201,856,043	3,679,592,600	*Marketing and Advertising Expenses*
Beban Jamuan	1,529,071,433	1,691,032,962	*Entertainment Expenses*
Jumlah	**4,730,927,476**	**5,370,625,562**	***Total***

30. Beban Umum dan Administrasi / *30. General and Administrative Expenses*

	2021 Rp	2020 Rp	
Beban Personalia	73,552,296,521	67,381,727,186	*Employees Expenses*
Beban Rumah Tangga dan Administrasi Kantor	51,229,800,834	56,339,855,423	*Office Household and Administration Expenses*
Beban Perencanaan	13,439,278,406	9,849,523,567	*Planning Expenses*
Beban Pemeliharaan	9,694,835,147	10,749,292,677	*Maintenance Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	5,421,581,563	1,936,755,798	*Monitoring, Evaluating and Empowering Society*
Beban Sistem Informasi	3,515,562,655	6,751,501,694	*Information Systems Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	724,974,000	1,029,978,000	*Conservation Implementation*
Beban Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	11,072,969,863	12,997,671,420	*Depreciation Expenses (Note 14 and 15)*
Jumlah	**168,651,298,989**	**167,036,305,765**	***Total***

31. Pendapatan (Beban) Keuangan / *31. Financial Income (Expenses)*

	2021 Rp	2020 Rp	
Pendapatan Keuangan			*Financial Income*
Pendapatan Bunga Deposito	11,784,964,178	25,025,707,018	*Time Deposits Income*
Pendapatan Jasa Giro	837,686,162	1,379,435,748	*Current Account Income*
Pendapatan Bunga Pinjaman	--	904,009,001	*Loan Interest Income*
Sub Jumlah	12,622,650,340	27,309,151,767	*Sub Total*
Beban Keuangan			*Financial Expenses*
Beban Bunga Pinjaman	1,100,000,001	2,379,845,937	*Loan Interest Expense*
Beban Bunga Sewa	512,599,280	250,738,284	*Lease Interest Expense*
Beban Bank	2,769,708	767,200	*Bank Fees*
Pajak Jasa Giro	2,431,140	7,876,342	*Current Account Service Tax*
Sub Jumlah	1,617,800,129	2,639,227,763	*Sub Total*
Jumlah	**11,004,850,211**	**24,669,924,004**	***Total***

32. Pendapatan (Beban) Lain-lain / *32. Other Income (Expense)*

	2021 Rp	2020 Rp	
Pendapatan Lain-lain			*Other Income*
Pendapatan Denda	1,318,581,743	1,670,319,633	*Penalty Income*
Laba Penjualan Aset Tetap	378,390,186	--	*Gain on Disposal of Fixed Assets*
Pendapatan Poliklinik	5,608,827	1,197,120	*Polyclinic Income*
Administrasi Kontrak Pendapatan	200,000	600,000	*Revenue Contract Administration*
Pendapatan Lain-lain	1,666,189,118	201,112,699	*Other Income*
Sub Jumlah	3,368,969,874	1,873,229,452	*Total*
Beban Lain-lain			*Other Expenses*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	5,344,451,959	15,765,386,377	*Impairment Losses on Receivables*
Bagian Rugi Perusahaan Asosiasi	1,436,705,577	--	*Loss Share in Associates*
Beban Pajak	--	3,847,454,690	*Tax Expenses*
Beban Lain	1,459,587,315	55,483,370	*Other Expenses*
Sub Jumlah	8,240,744,851	19,668,324,437	*Sub Total*
Jumlah	**(4,871,774,977)**	**(17,795,094,985)**	***Total***

33. Saldo, Sifat dan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi / *33. Balances, Nature and Transactions with Related Parties*

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pda tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi / *a. Nature of Relationship and Transactions*

Hubungan dan sifat saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Jenis Transaksi/ *Type of Transaction*
Pemerintah Republik Indonesia/ *Government of Republic of Indonesia*	Pemegang Saham/ *Shareholder*	Modal Saham/ *Capital Share*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro/ *Placement of Current Account*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro dan Deposito/ *Placement of Current Account and Deposit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro dan Deposito/ *Placement of Current Account and Deposit*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Deposito/ *Placement of Deposit*

Pihak-pihak Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi/** ***Type of Transaction***
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Kujang Tatar Persada	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Pertamina EP Region Jawa	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Pertamina EP Region Jawa Subang Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Pembangkitan Jawa-Bali	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT PP Properti Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
Balai Penelitian, Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Dahana (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*
PT Indosat Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable*, Pendapatan/ *Revenue*

Pihak-pihak Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi/** ***Type of Transaction***
PT Kimia Farma Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Kertas Padalarang (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Mitra Rajawali Banjaran	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Pabrik Gula Rajawali II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Kukuh Tangguh Sandang Mills	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Raharja Putra Perkasa	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Pilar Jati Persada	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Indra Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
Koperasi Karya Bakti Raharja	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Sucofindo Advisory Utama	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Sucofindo (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Surveyor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Hotel Indonesia Group	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Yodya Karya Persero	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Indah Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*

b. Rincian Transaksi dan Saldo
Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Nature of Relationship and Transactions
Significant transactions with related parties are as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ *Percentage to Total Assets* 2021 Rp	2020 Rp
Aset/ *Assets*				
Bank/ *Bank*				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16,687,313,693	12,220,175,943	0.99%	0.79%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,866,201,037	6,591,971,347	0.82%	0.43%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,859,975,577	10,130,564,832	0.35%	0.66%
Deposito/ *Time Deposit*				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100,000,000,000	150,000,000,000	5.92%	9.74%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40,000,000,000	40,000,000,000	2.37%	2.60%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	140,000,000,000	140,000,000,000	8.29%	9.09%
Jumlah	**316,413,490,307**	**358,942,712,122**	**18.73%**	**23.31%**
Piutang Usaha (Catatan 6)/ *Accounts Receivable (Note 6)*				
PT Sang Hyang Seri (Persero)	52,271,058,616	50,507,433,845	3.09%	3.28%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21,377,397,782	21,217,412,040	1.27%	1.38%
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	3,314,999,403	897,303	0.20%	0.00%
PT Kujang Tatar Persada	2,271,873,130	1,770,418,408	0.13%	0.11%
PT Pertamina EP Region Jawa	1,495,198,186	178,147,026	0.09%	0.01%
PT Pertamina EP Region Jawa Subang Field	1,275,994,329	32,285,144	0.08%	0.00%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	174,423,500	174,423,500	0.01%	0.01%
PT Barata Indonesia (Persero)	141,098,311	141,098,311	0.01%	0.01%
PT Waskita Beton Precast Tbk	130,592,000	103,928,000	0.01%	0.01%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	128,997,500	263,959,800	0.01%	0.02%
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	118,584,719	105,476,939	0.01%	0.01%
PT Pembangkitan Jawa-Bali	114,803,375	114,803,375	0.01%	0.01%
PT PP Properti Tbk	110,951,935	14,602,835	0.01%	0.00%
Lain-lain (di bawah Rp100 juta)/ *Others (below Rp100 million)*	549,457,666	2,688,316,473	0.03%	0.17%
Jumlah	**83,475,430,452**	**77,313,202,999**	**4.94%**	**5.02%**

	2021 Rp	2020 Rp	Persentase terhadap Jumlah Liabilitas/ *Percentage to Total Liabilities* 2021 Rp	2020 Rp
Liabilitas/ *Liabilities*				
Utang Usaha (Catatan 17)/ *Accounts Payable (Note 17)*				
PT Raharja Putra Perkasa	2,021,789,000	6,491,354,101	0.49%	2.01%
PT Pilar Jati Persada	989,370,030	1,948,301,300	0.24%	0.60%
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I	1,436,705,577	--	0.35%	0.00%
PT Indra Karya (Persero)	816,695,000	203,874,000	0.20%	0.06%
Koperasi Karya Bakti Raharja	--	1,380,075,400	0.00%	0.43%
PT Sucofindo Advisory Utama	--	942,734,100	0.00%	0.29%
PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	--	743,933,300	0.00%	0.23%
PT Sucofindo (Persero)	--	719,348,900	0.00%	0.22%
Lainnya (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	290,672,626	465,451,584	0.07%	0.14%
Jumlah	**5,555,232,233**	**12,895,072,685**	**1.36%**	**3.99%**

	2021 Rp	2020 Rp	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/ *Percentage to Total Revenue* 2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan (Catatan 27)/ *Revenue (Note 27)*				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	209,170,701,305	257,370,085,577	24.42%	30.66%
PT Sang Hyang Seri (Persero)	8,006,203,770	8,890,083,500	0.93%	1.06%
PT Indosat Tbk	5,676,466,282	5,146,361,608	0.66%	0.61%
PT Pertamina RU VI Balongan	3,100,998,000	3,197,935,210	0.36%	0.38%
Lain-lain (di bawah Rp500 juta/ *Others (below Rp500 million)*	559,768,545	6,696,989,724	0.07%	0.80%
Jumlah/ *Total*	**226,514,137,902**	**281,301,455,619**	**26.45%**	**33.51%**

c. Kompensasi Dewan Pengawas, Organ Pendukung dan Direksi

Biaya remunerasi Dewan Pengawas Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp5.544.805.206 dan Rp4.803.150.803.

Biaya remunerasi Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.985.968.319 dan Rp6.149.689.142.

c. Compensation for Board of Supervisory, Supporting Working Units and Directors

The remuneration for the Board of Supervisory for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp5,544,805,206 and Rp4,803,150,803.

The remuneration for the Board of Directors for the year ended December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp8,985,968,319 and Rp6,149,689,142.

34. Informasi Penting Lainnya / *34. Other Important Information*

Kesepakatan Penyelesaian Piutang

a. PT Sang Hyang Seri

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" No. BA-3/DIR/02/2020, tanggal 21 Februari 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Sang Hyang Seri sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.

2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp42.136.015.150.

3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur 5 (lima) kali angsuran yang di bayarkan setiap tahun, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

Settlement of Receivables Agreement

a. PT Sang Hyang Seri

As "Minutes of Settlement on Accounts Receivable Agreement" No. BA-3/DIR/02/2020, dated 21 February 2020, that the FIRST PARTY in this case the the Company and the SECOND PARTY in this case PT Sang Hyang Seri agreed to bind themselves to re-scheduling (process) The SECOND PARTY's payment of BJPSADA to the FIRST PARTY, with the following provisions:

1) The FIRST PARTY gives the SECOND PARTY the opportunity to reschedule the SECOND PARTY's debt payment obligation to the FIRST party, so that the SECOND PARTY can promptly complete its obligations.

2) The amount of SECOND-PARTY obligations based on SPU is Rp42,136,015,150.

3) Payments that have not been settled by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above shall be settled by the SECOND PARTY by means of 5 (five) installments paid annually, on the 31st (thirty-first) of December (for Hereinafter referred to as the due date) as specified in the following table:

No	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity date*	Jumlah Saldo Piutang / *Outstanding AR*	Angsuran / *Installment*	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / *Outstanding AR After Installment*
1	31 Desember 2020	42,136,015,150	1,044,876,000	41,091,139,150
2	31 Desember 2021	41,091,139,150	2,000,000,000	39,091,139,150
3	31 Desember 2022	39,091,139,150	6,000,000,000	33,091,139,150
4	31 Desember 2023	33,091,139,150	10,000,000,000	23,091,139,150
5	31 Desember 2024	23,091,139,150	23,091,139,150	--
Jumlah / *Total*			**42,136,015,150**	**136,364,556,600**

4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.

4) The FIRST PARTY shall deliver a written notice to the SECOND PARTY regarding the due date of the payment to be submitted since 3 (three) months prior to the payment due date and will be sent monthly until expiration of the due date in the year of payment.

5) Masa *rescheduling* Pinjaman berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) maka PT Sang Hyang Seri (Persero) bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perusahaan.

5) The loan rescheduling period is valid from the December 31, 2019 and ends until the December 31, 2024.

6) If the payment is not carried out by PT Sang Hyang Seri (Persero) then PT Sang Hyang Seri (Persero) is willing to be settled with a new agreement together with the Company.

Selanjutnya sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" No. BA-01/DIR/02/2021, tanggal 25 Februari 2021, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Sang Hyang Seri sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Next, As "Minutes of Settlemet on Receivable Agreement" No. BA-01/ DIR/02/2021, February 25, 2021, that the FIRST PARTY in this case the Company and the SECOND PARTY in this case PT Sang Hyang Seri agree to mutually bind themselves to reschedule the SECOND PARTY's BJPSDA payment to the FIRST PARTY, with the following conditions:

1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran utang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.

2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA tahun 2020 adalah sebesar Rp9.647.648.998.

3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang di bayarkan setiap triwulan (untuk selanjutnya disebut tanggal jatuh tempo) terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana ditentukan dalam tabel berikut:

1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY the opportunity to reschedule the debt repayment obligations of the SECOND PARTY BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.

2) The amount of the SECOND PARTY's obligations in 2020 is Rp9,647,648,998.

3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY in 6 (six) installments paid quarterly (here in after referred to as the due date) starting on June 30, 2021 as specified in the following table:

No	Tanggal Jatuh Tempo / *Maturity date*	Jumlah Saldo Piutang / *Outstanding AR*	Angsuran / *Installment*	Sisa Tagihan Setelah Cicilan / *Outstanding AR After Installment*
1	30 Juni 2021	9,647,648,998	500,000,000	9,147,648,998
2	30 September 2021	9,147,648,998	750,000,000	8,397,648,998
3	31 Desember 2021	8,397,648,998	1,000,000,000	7,397,648,998
4	31 Maret 2022	7,397,648,998	1,500,000,000	5,897,648,998
5	30 Juni 2022	5,897,648,998	2,000,000,000	3,897,648,998
6	30 September 2022	3,897,648,998	3,897,648,998	--
Jumlah / *Total*			**9,647,648,998**	**34,738,244,990**

4) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA perihal tanggal jatuh tempo pembayaran yang akan disampaikan sejak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan akan dikirimkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo pada tahun pembayaran tersebut.

4) The FIRST PARTY will deliver a written notification to the SECOND PARTY regarding the due date of payment which will be submitted from 3 (three) months before the due date of payment and will be sent every month until the expiration date of the payment due date.

5) Masa *rescheduling* Piutang berlaku terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2022.

5) The period of rescheduling of Accounts Receivable starts from Februari 25, 2021 and ends until September 30, 2022.

6) Apabila pembayaran tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri maka PT Sang Hyang Seri bersedia untuk diselesaikan dengan kesepakatan baru secara bersama dengan Perusahaan.

6) If the payment is not made by PT Sang Hyang Seri, PT Sang Hyang Seri agreed to settle it with a new agreement together with the Company.

b. PDAM Kabupaten Karawang

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" No. BA-09/DIR/12/2020, tanggal 07 Desember 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Summarecon Agung Tbk sepakat saling mengikat diri untuk mengadakan penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan-ketentuan antara lain:

b. PDAM Kabupaten Karawang

As with the "Minutes of Accounts Receivable Settlement Agreement" No. BA-09/DIR/12/2020, dated December 7, 2020, that the FIRST PARTY in this case the Company and the SECOND PARTY in this case PT Summarecon Agung Tbk agreed to mutually commit itself to rescheduling the SECOND PARTY's BJPSDA payments to the FIRST PARTY, with the following provisions:

1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA dapat segera menyelesaikan kewajibannya.

1) The FIRST PARTY hereby provides the SECOND PARTY an opportunity to reschedule the SECOND PARTY's BJPSDA to the FIRST PARTY, so that the SECOND PARTY can immediately settle its obligations.

2) Besarnya kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPU adalah sebesar Rp3.344.540.589.

2) The amount of the SECOND PARTY's liabilities based on SPU is Rp3,344,540,589.

3) Pembayaran yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 di atas wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan cara :

3) Payment that has not been completed by the SECOND PARTY as referred to in number 2 above must be completed by the SECOND PARTY by:

a. Tagihan sebesar Rp210.132.479 adalah tagihan pemakaian air dan lahan di wilayah 1 dan 2 akan dibarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

a. Bill of Rp210,132,479 is a bill for water and land use in regions 1 and 2 that will be paid no later than December 31, 2020.

b. Tagihan sebesar Rp2.832.591.297 adalah tagihan pemakaian air dan lahan diwilayah 1, 2 dan 3 terhadap tagihan ini pihak kedua menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. The bill of Rp2,832,591,297 is a bill for water and land use in regions 1, 2 and 3 against this bill the second party is awaiting a court ruling with permanent legal force.

c. Tagihan sebesar Rp293.132.592 adalah tagihan pemakaian air dan lahan di wilayah 1, 2 dan 3 tahun 2004 sampai dengan 2014 dan tagihan denda sebesar Rp8.684.230.

4) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disetorkan melalui Rekening BRI Cabang Purwakarta

5) Masa rescheduling Piutang berlaku terhitung sejak tanggal 07 Desember 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

6) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaikan pada Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta.

c. PDAM Bhagasasi Bekasi

Sebagaimana "Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang" No. 01/GM1.DOP/01/2020, tanggal 14 Januari 2020, bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan, dan PIHAK KEDUA dalam hal ini PDAM Bhagasasi Bekasi bersama-sama telah melakukan pembahasan atas piutang pemakaian air berdasarkan Surat No. SD1489/GM1.DOP/KU/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 Perihal : Konfirmasi Pembayaran Air Baku sebesar Rp11.400.049.180 atas dasar kepentingan bersama yang dilandasi azas musyawarah untuk mufakat dengan hasil sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil pembahasan pembayaran untuk pemakaian tagihan *(rescheduling)* PDAM Bekasi untuk pemakaian air periode Desember 2018 s.d November 2019 dengan total tagihan sebesar Rp11.400.049.180 akan dibayarkan pada tanggal 25 sampai dengan 30 di setiap bulannya dengan cicilan ± 38 bulan minimal pembayaran Rp300.000.000 sesuai dengan rencana pembayaran yang disepakati. Pembayaran dilakukan mulai bulan Januari 2020.

2) PDAM Bekasi sepakat untuk pemakaian air bulan berjalan akan dibayarkan setiap tanggal 15 di bulan berikutnya yang akan dimulai untuk tagihan pemakaian Desember 2019.

c. Bill of Rp293,132,592 is a bill for water and land use in regions 1, 2 and 3 from 2004 to 2014 and a bill for a fine of Rp8,684,230.

4) Payment as referred to in number 3 is deposited through the BRI Purwakarta Branch Account

5) Accounts receivable rescheduling period starts from December 7, 2020 and ends until December 31, 2021.

6) If the dispute cannot be resolved by deliberation, the PARTIES agree to hand over the settlement to the Purwakarta District Court Office.

c. PDAM Bhagasasi Bekasi

As with the "Accounts Receivable Settlement Agreement Minutes" No. 01/GM1.DOP/01/2020, dated January 14, 2020, that the FIRST PARTY in this case the Company and the SECOND PARTY in this case PDAM Bhagasasi Bekasi have jointly conducted discussion of water usage receivables based on Letter No. SD-1489/GM1.DOP/KU/12/2019 dated December 17, 2019 regarding Subject: Confirmation of Raw Water Payment of Rp11,400,049,180 on the basis of mutual interest based on the principle of deliberation to reach a consensus with the following results:

1) Based on the results of the discussion of payments for the use of PDAM Bekasi bills for water use for the period December 2018 to November 2019 with a total bill of Rp11,400,049,180 will be paid on the date 25 to 30 in each month with ± 38 months of installments with a minimum payment of Rp300,000,000 in accordance with the agreed payment plan. Payments are made starting in January 2020.

2) PDAM Bekasi agreed that the current month's water usage will be paid every 15th of the following month which will start for the December 2019 usage bill.

3) Berdasarkan pasal 5 ayat (5) point (a & b) setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sebagaimana pada pasar 5 ayat 6 adapun perhitungan terhadap tagihan sebesar Rp11.400.049.180 adalah sebesar Rp504.545.235 akan dibayarkan pada 25 sampai dengan 30 disetiap bulannya.

3) Based on article 5 paragraph (5) point (a & b), any late payment will be subject to a fine, as in the market 5 paragraph 6, the calculation of the bill is Rp11,400,049,180 is Rp504,545,235 to be paid on 25 to 30 each month.

d. Pendapatan BJPSDA

Penerapan BJPSDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

a. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan;

b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

c. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1981, tentang Iuran Pembayaran Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;

Sebagaimana representasi Direksi Perusahaan, sesuai surat dari Direktur Keuangan dan SDM No. SD-72/DIR/KU/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang menyatakan adanya beberapa hal penting yang kemudian menjadi pertimbangan untuk tidak mengakui pendapatan BJPSDA dalam tahun 2021 dan 2020, antara lain:

1) Sesuai laporan Tim BJPSDA No. ND-01/Tim BJPSDA/03/2020, tanggal 4 Maret 2020 dan No. ND-02/Tim BJPSDA/03/2020, tanggal 17 Maret 2020, PT IP dan PT PJB menyatakan bahwa, “pembayaran BJPSDA prospektif ke depan mulai tahun 2020” sesuai dengan Risalah Rapat Tim BJPSDA dengan PT PLN, PT IP dan PT PJB di Kantor Pusat PT PLN (Persero) Jakarta tanggal 3 Maret 2020 dan Risalah Rapat dengan PT PJB di Kantor Pusat PT PJB Surabaya tanggal 13 Maret 2020. Hal tersebut tidak sesuai dengan temuan dan rekomendasi BPK R.I. yang menjadi dasar penagihan BJPSDA oleh Perusahaan kepada PT PLN (Persero), PT IP dan PT PJB.

2) PT PLN (Persero) belum melaksanakan kewajiban pembayaran BJPSDA yang telah disepakati dalam Rapat antara PT PLN dengan Perusahaan pada Senin, 9 Desember 2019, di Ruang Rapat Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan agenda: Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air

d. Revenue of BJPSDA

The application of BJPSDA is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, consist of:

a. Law Number 11 of 1974, concerning Irrigation;

b. Law Number 17 Year 2019 concerning Water Resources;

c. Government Regulation number 6 of 1981, concerning Exploitation and Maintenance of Irrigation Infrastructure Payment Contribution;

As the representation of the Directors of the Company, according to a letter from the Director of Finance and HR No. SD-72 /DIR/KU/03/2020, dated March 18, 2020, which stated that there were some important things which later became a consideration for not recognizing BJPSDA revenue in the year 2021 and 2020, including:

1) According to the BJPSDA Team report No. ND-01/Tim BJPSDA/03/2020, March 4 2020 and No. ND-02/Tim BJPSDA/03/2020, March 17 2020, PT IP and PT PJB stated that, "prospective BJPSDA payment going forward from 2020" in accordance with the Minutes of the BJPSDA Team Meeting with PT PLN, PT IP and PT PJB at PT PLN (Persero) Jakarta Headquarters on March 3, 2020 and Minutes of Meeting with PT PJB at PT PJB Surabaya Head Office dated March 13, 2020. This is not in accordance with the findings and recommendations of BPK R.I. which is the basis for BJPSDA billing by the Company to PT PLN (Persero), PT IP and PT PJB.

2) PT PLN (Persero) has not carried out the BJPSDA payment obligations agreed at the Meeting between PT PLN and the Company on Monday, December 9, 2019, in the Meeting Room of the President Director of PT PLN (Persero) with the agenda: Discussion on Settling Payment of Management Services Costs Water

(BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) kepada Perusahaan. Di dalam Risalah Rapat pada angka 2 huruf d dinyatakan bahwa, “PT PLN akan Menyelesaikan Pembayaran BJPSDA periode 14 Februari 2013 s.d. 22 November 2017 sepanjang terdapat Perjanjian antara PT PLN dengan Perusahaan”.

Resources (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to the Company. In the Minutes of the Meeting in item 2 letter d states that, "PT PLN will complete the payment of BJPSDA for the period of February 14, 2013 to 22 November 2017 as long as there is an Agreement between PT PLN and the Company".

3) PT PLN (Persero) belum melaksanakan kesepakatan sebagaimana Berita Acara Rapat antara Perusahaan dengan PT PLN, PT IP, PT PJB, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Tim JPN DATUN di Kementerian BUMN tanggal 30 Desember 2019 dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, dan PT PJB kepada Perusahaan. Di dalam Berita Acara Rapat pada angka 1 dan 2 dinyatakan bahwa, “PT PLN, PT IP dan PT PJB sepakat bahwa BJPSDA tetap menjadi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan dan sepakat akan membuat perjanjian sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mulai tahun 2013”.

3) PT PLN (Persero) has not yet implemented an agreement as Minutes of Meeting between the Company and PT PLN, PT IP, PT PJB, the Ministry of SOEs, the Ministry of PUPR, and the JPN DATUN Team at the Ministry of BUMN on 30 December 2019 with the Payment Settlement Discussion Agenda BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, and PT PJB to the Company. In the Minutes of the Meeting in numbers 1 and 2 stated that, "PT PLN, PT IP and PT PJB agreed that BJPSDA remains a payment obligation to the Company and agreed to make an agreement according to the rates set by the Government and starting in 2013".

Sampai surat ini dibuat PT IP dan PT PJB belum melaksanakan temuan dan rekomendasi BPK RI serta beberapa kesepakatan:

Until this letter was made, PT IP and PT PJB had not carried out BPK R.I.'s findings and recommendations as well as several agreements:

1) Risalah Rapat antara PT PLN dengan Perusahaan pada Senin, 9 Desember 2019, di Ruang Rapat Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan agenda : Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) kepada Perusahaan. Di dalam Risalah Rapat pada angka 2 huruf e dinyatakan bahwa, “PT IP dan PT PJB telah mendapatkan manfaat dari sumber daya air, maka PT IP dan PT PJB dapat membayar BJPSDA”.

1) Minutes of Meeting between PT PLN and the Company on Monday, December 9, 2019, in the Meeting Room of the President Director of PT PLN (Persero) with the agenda: Discussion on Payment of Water Resources Management Services (BJPSDA), PT PLN (Persero), PT Indonesia Power (PT IP) and PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) to the Company. In the Minutes of Meeting in item 2 letter e states that, "PT IP and PT PJB have benefited from water resources, then PT IP and PT PJB can pay BJPSDA".

2) Berita Acara Rapat antara Perusahaan dan PT PLN, PT IP, PT PJB, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Tim JPN DATUN di Kementerian BUMN tanggal 30 Desember 2019 dengan Agenda Pembahasan Penyelesaian Pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero), PT IP, dan PT PJB kepada Perusahaan, menyatakan bahwa “PT PLN, PT IP dan PT PJB sepakat

2) Minutes of the Meeting between the Company and PT PLN, PT IP, PT PJB, the Ministry of SOEs, the Ministry of PUPR, and the JPN DATUN Team at the Ministry of SOEs on December 30, 2019 with the Agenda for Discussion on Settlement of BJPSDA Payment of PT PLN (Persero), PT IP , and PT PJB to the Company, stated that "PT PLN, PT IP

bahwa BJPSDA tetap menjadi kewajiban pembayaran kepada Perusahaan sesuai dengan Berita Acara Rapat pada angka 1 dan sepakat akan membuat perjanjian sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mulai tahun 2013.

and PT PJB agreed that BJPSDA remains a payment obligation to the Company in accordance with the Minutes of Meeting in number 1 and agreed to make an agreement according to the tariff set by the Government and start 2013.

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan diatas, masing-masing pihak telah membuat Kesepahaman Bersama Para Pihak untuk Melakukan Mediasi oleh BPKP Tentang Penyelesaian Tagihan Biava Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Djuanda, PLTA Cirata, dan PLTA Saguling antara Perusahaan dengan PT PLN (Persero) No. Pihak Pertama: MoU-1/DIR/01/2021 dan No. Pihak Kedua: 0003-1.MoU/HKM.05.01/801080000/2021 tanggal 25 Januari 2021.

In order to resolve the above problems, each party has made a Mutual Understanding of the Parties to Conduct Mediation held by BPKP regarding the Settlement of Bills for Water Resources Management Services for PLTA Djuanda, PLTA Cirata, and PLTA Saguling between the Company and PT PLN (Persero) No. First Party: MoU-1/DIR/01/2021 and No. Second Party: 0003-1.MoU/HKM.05.01/801080000/2021 dated January 25, 2021.

Laporan Reviu atas Permasalahan Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perusahaan kepada PT PLN (Persero) Group dari Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah terbit 29 Maret 2022 (Catatan 39).

Review Report on the Problem of Billing for Water Resources Management Services (BJPSDA) of the Company to PT PLN (Persero) Group from the Financial and Development Supervision (BPKP) published March 29, 2022 (Note 39).

e. Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya)

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan kerja sama dengan Asuransi Jiwasraya untuk program *Past Service* Liabilities bagi Karyawan Perusahaan. Program ini merupakan pembayaran Premi Awal Asuransi Jiwasraya atas Pegawai Perusahaan yang diakui sebagai beban pada tahun 2009.

e. Employee Receivables (Jiwasraya Insurance)

In 2009, the Company held cooperation with Jiwasraya Insurance for Past Service Liabilities program for employees of the Company. The program was an initial premium payment of Jiwasraya Insurance of employees that recognized as expenses in 2009.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan teknis dengan kementerian BUMN tentang Laporan Audit Independen Perusahaan tahun 2009 tanggal 21 Mei 2010, "Bahwa beban pegawai untuk asuransi jiwasraya tidak boleh menjadi beban Perusahaan melainkan beban masing-masing karyawan, sehingga perlu diadakan koreksi dan penyesuaian atas kelebihan beban tersebut." Direksi Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 1/606/KPT.S/2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang pengalihan beban *Past Service* Liabilities Asuransi Jiwasraya dari Perusahaan kepada Pegawai yang menjadi peserta Asuransi Jiwasraya.

Based on technical discussion meeting result with Ministry of State Owned Enterprises about Independent Audit Report of the Company in 2009 dated May, 21 2010, that "personnel expenses for Jiwasraya Insurance should not be Company's expenses, but the expenses of each employee, so there should be a correction and adjustment of excess from those expenses." Board of Directors of the Company issued the Directors Decree No. 1/606/KPT.S/2009 dated December, 31 2009, about the transfer of Past Service Liabilities expenses of Jiwasraya Insurance from Company to employees who participated in Jiwasraya Insurance.

Melalui surat Direksi Perusahaan No. 1/149/2010 tanggal 25 Mei 2010, tentang hasil pembahasan teknis dengan kementerian BUMN atas Laporan Keuangan tahun buku 2009, agar dilakukan penyesuaian atas

By Letter of Directors of the Company No. 1/149/2010 dated May, 25 2010 about technical discussion result with Ministry of State Owned Enterprises of Financial Statements for the year 2009 that held adjustment for Financial

Laporan Keuangan *Unaudited* tahun buku 2009 yang berakibat penurunan beban pegawai sebesar Rp4.608.301.256 yang berasal dari penurunan beban Asuransi Jiwasraya Rp11.644.694.314 dan kenaikan beban insentif sebesar Rp7.036.393.058 sehingga diperoleh kenaikan Laba bersih sebesar Rp3.317.976.976 dan penurunan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.317.976.976.

Statements (Unaudit) of 2009 which affected the decreasing of employees expenses as amount Rp4,608,310,256 from decrease of Jiwasraya Insurance for Rp11,644,694,314 and increase of incentives expenses for Rp7,036,393,058 so obtained the increasing of net income for Rp3,317,976,976 and decreasing of Short-term Liabilities for Rp3,317,976,976.

Pada awal tahun 2010 berdasarkan koreksi tersebut, maka timbul piutang karyawan (Asuransi Jiwasraya) sebesar Rp6.333.195.276. Selama tahun 2010 terjadi pembayaran atas piutang pegawai tersebut, sehingga saldo piutang karyawan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp5.551.297.894, yang terdiri dari piutang pegawai yang masih aktif sebesar Rp3.307.010.964, dan piutang pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia sebesar Rp2.244.286.930.

At beginning of 2010, based on correction then procured employees receivables (Jiwasraya Insurance) for Rp6,333,195,276. During 2010 occured payments of those receivables, so the employees receivables of Jiwasraya Insurance for Rp5,551,297,894 which consists of active employees receivable for Rp3,307,010,964 and pension and passed away employees receivables for Rp2,244,286,930.

Berdasarkan hal di atas, manajemen berkeyakinan bahwa piutang karyawan yang telah pensiun dan meninggal dunia tidak dapat ditagih, maka Direksi Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 1/569/SKPT.S/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Cadangan Piutang Pegawai Perusahaan, yang isinya menetapkan cadangan piutang pegawai Perusahaan sebesar Rp2.244.286.930 menjadi beban perusahaan.

Based on above, management believes that pension and passed away employees receivables can not be collected, so Directors of the Company issued the Letter of Decree of Directors No. 1/569/SKPT.S/2010 dated December, 30 2010 about the allowance for doubtful account of the personnel receivabale of the Company, whose contents about the allowance of personnel receivables of the Company for Rp2,244,286,930 became the Company's expenses.

35. Perkara-Perkara Litigasi / *35. Litigation Cases*

a. Gugatan Perdata No. 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr
Obyek sengketa Adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Blok Rawa Belut Kampung Tangsi Patikoro RT 003 RW 06 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi Seluas ± 77.500 m^2.

a. Civil Lawsuit No. 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located on Rawa Belut Block Tangsi Patikoro Village RT 003 RW 06 Sukadanau Village West Cikarang District, Bekasi ± 77,500 sqm wide.

Berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi No: 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr. Jo No: 201/Pdt/2020/PT.Bdg Jo No: 13/Akta.Kasasi/2020 tanggal 14 Agustus 2020, Perusahaan sebagai Pemohon Kasasi II semula Terbanding II/ Tergugat II.

Based on the notice of cassation statement No: 51/Pdt.G/2019/PN.Ckr. Jo No: 201/Pdt/2020/PT.Bdg Jo No: 13/Akta.Kasasi/2020 dated August, 14 2020, the Company as Cassation petitioner II was a defendant II.

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021 masih menunggu keputusan dari Makamah Agung.

As of the reporting date December, 31 2021, still awaits for a decision from Supreme Court.

b. Gugatan Perdata No. 103/Pdt.G/2019/PN.Ckr
Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat Seluas 9.885 m^2.

Perusahaan dinyatakan kalah dalam pokok perkara pada tanggal 7 Juli 2020 dalam putusannya No: 252/PDT/2020/PT BDG dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, No. 103/Pdt.G/ 2019/PN Ckr, tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.

Perusahaan sudah mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi tgl 28 September 2020 dan sampai dengan tanggal pelaporan, masih menunggu Putusan dari Mahkamah Agung.

b. Civil Lawsuit No. 103/Pdt.G.2019/PN.Ckr
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located on Cibuntu Village, Cibitung District, Bekasi Regency, West Java Province 9,855 sqm wide.

The company was declared defeated in the main case on July 7, 2020 in its decision No: 252/PDT/2020/PT BDG with the following order:

- *Received an appeal from the original appellant for Defendant I.*
- *Confirmed the Decision of the Cikarang District Court, No. 103/Pdt.G/2019/PN Ckr, dated January 16, 2020, for which the appeal was requested.*
- *Fined the prior Appellant of the Defendant, to pay court fees at both levels of court, which in the appeal level is set at Rp150,000.*

The Company has filed an appeal process to the Supreme Court in accordance with the Minutes of Notification and Submission of The Memory of The Cassation dated September 28, 2020 and till reporting date is waiting a Verdict from the Supreme Court.

c. Gugatan Perdata No. 248/Pdt.G/2019/PN.Bks.
Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Seluas 500 m^2.

Berdasarkan Putusan Kasasi No: 1473K/Pdt/2021 tanggal 16 Juni 2021, Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Perusahaan, Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp500.000.

c. Civil Lawsuit No. 248/Pdt.G/2019/PN. Bks
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which Located on Sepanjangjaya Village, Rawalumbu District, Bekasi 500 sqm wide.

Based on Cassation decision No. 1473K/Pdt/2021 dated June 16, 2021, rejected the appeal by petitioner the Company, fined the petitioner to pay the court fees at the cassation level for Rp500,000.

d. Gugatan Perdata No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
Obyek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Seluas 418 m^2.

Perusahaan mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Banding No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

d. Civil Lawsuit No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
The object of dispute about other party claimed and controlled land owned by the Company which located on Margajaya Village, South Bekasi District, Bekasi 418 sqm wide.

The Company filed an appeal application at the Bekasi District Court Clerk's Office on January 7 2021 as evidenced by the statement of appeal No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Kasasi No. 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 522/Pdt/2021/PT.Bdg Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks, Perusahaan sebagai Pemohon Kasasi telah menyerahkan Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

Based on Cassation Memory Receipt No. 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 522/Pdt/2021/PT.Bdg Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks, the Company as a cassation petitioner has submitted a memorandum of cassation to Bekasi District Court Clerk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, memori kasasi yang diajukan oleh Perusahaan masih dalam proses Pemeriksaaan di Mahkamah Agung.

As of the date of reporting, the memory of the appeal filed by the Company is still in the process in Supreme Court Hearing.

36. Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan dan Instrumen Keuangan

36. Business And Financial Risk Management And Financial Instruments

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

a. Objectives and Financial Risk Management Policy

Objectives and policies of the Company's financial risk management to ensure that adequate financial resources available for operations and business development, and to manage foreign currency risk, interest rate, credit and liquidity risk. The Company operates with the guidelines set by Directors.

Risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrument keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh factor eksternal perusahaan.

The risk of loss related to potential deviations result from transactions and financial instruments (interest rates, exchange rates, commodity and equity) as well as of financial management (liquidity, accounting, credit and loans and equities, debt and taxes) are caused by internal factors and by external factors.

Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

The Company business includes risk-taking activities with specific target with professional management. The main function of corporate risk management is to identify all key risks, quantify these risks and manage risk positions.

Tujuan Perusahaan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan.

The Company's goal is to manage the financial risks to achieve an appropriate balance between risk and return and minimize the potential effects of the deteriorating financial performance.

"Pengelolaan Risiko Usaha". khususnya dalam rangka untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi Perusahaan telah melaksanakan

"Business Risk Management". especially in order to effectively manage financial risks, Directors of the Company has implemented

beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan, antara lain:

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Perusahaan dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Dewan Pengawas.

several strategies for managing financial risk, which is in line with corporate objectives, among others:

- *Minimize the interest rate, currency and market risks for all types of transactions.*
- *The Company may invest in shares or similar instruments only in the event of excess liquidity is temporary, and the transaction must be approved by the Board of Commissioners.*

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Perusahaan menghadapi resiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

In running the operating, investing, and financing, the Company faced financial risks, namely credit risk, liquidity risk and market risk and define the risks as follows:

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Perusahaan.

Credit Risk
Credit risk is the risk of financial losses incurred if the customer fails to meet the contractual obligations to the Company.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

31 Desember 2021	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	Lebih dari 3 Bulan/ *More than 3 Month*	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2021*
Aset Keuangan				***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	452,330,656,021	--	452,330,656,021	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	105,883,157,394	36,729,801,999	142,612,959,393	*Accounts Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3,026,090,485	--	3,026,090,485	*Other Current Financial Assets*
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	1,070,504,437	--	1,070,504,437	*Gross Amount Due from Customers*
Pendapatan yang masih Akan Diterima	226,650,918,275	--	226,650,918,275	*Accrued Revenue*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	--	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Jumlah	**789,028,601,612**	**36,729,801,999**	**825,758,403,611**	***Total***

31 Desember 2020	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	Lebih dari 3 Bulan/ *More than 3 Month*	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2020*
Aset Keuangan				***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	518,162,003,406	--	518,162,003,406	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	92,263,357,329	37,633,043,987	129,896,401,316	*Accounts Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	6,330,370,061	--	6,330,370,061	*Other Current Financial Assets*
Pendapatan yang masih Akan Diterima	180,873,001,090	--	180,873,001,090	*Accrued Revenue*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	--	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Jumlah	**797,696,006,886**	**37,633,043,987**	**835,329,050,873**	***Total***

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Pada saat ini Perusahaan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, Perusahaan berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang.

Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Company could not meet obligations as they fall due.

At this time the Company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short-term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Details of the maturities of financial liabilities held as follows:

31 Desember 2021	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	3 Bulan sampai 1 Tahun/ *3 Month up to 1 Year*	Lebih dari 1 Tahun/ *More than 1 Year*	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2021*
Utang Usaha	12,296,540,629	--	--	12,296,540,629	*Accounts Payable*
Liabilitas Sewa	1,734,681,135	4,288,179,365	6,696,762,755	12,719,623,255	*Lease Liabilities*
Beban Akrual	37,638,101,878	--	--	37,638,101,878	*Accrued Expenses*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	57,858,612,655	--	--	57,858,612,655	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	1,100,000,000	--	11,930,129,200	13,030,129,200	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**110,627,936,297**	**4,288,179,365**	**18,626,891,955**	**133,543,007,617**	***Total***

31 Desember 2020	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	3 Bulan sampai 1 Tahun/ *3 Month up to 1 Year*	Lebih dari 1 Tahun/ *More than 1 Year*	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2020*
Utang Usaha	43,121,046,858	--	--	43,121,046,858	*Accounts Payable*
Liabilitas Sewa	552,118,208	1,355,089,968	4,350,605,086	6,257,813,262	*Lease Liabilities*
Beban Akrual	23,401,094,351	--	--	23,401,094,351	*Accrued Expenses*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	19,754,462,905	--	--	19,754,462,905	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	1,100,000,000	--	13,165,066,700	14,265,066,700	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**87,928,722,322**	**1,355,089,968**	**17,515,671,786**	**106,799,484,076**	***Total***

Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah resiko dimana arus kas masa depan dari satu instrument keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that the cash flow of future cash flows of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates.

The Company has short-term loans and long-term floating rate. The Company will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the company will negotiate interest rates with lenders.

Pada saat ini, Perusahaan tidak mempersiapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat suku bunga untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan risiko arus kas yang terkait dengan kewajiban tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 20201 dan 2020.

At this time, the Company did not prepare a specific policy or regulation to manage interest rate risk to reduce the risks associated with the fair value of cash flow risk associated with floating rate liabilities. There is no interest rate hedging activities on December 31, 2021 and 2020.

Tidak ada risiko signifikan atas pengelolaan risiko usaha, kecuali upaya Perusahaan untuk membantu pelanggan dalam mendapatkan SIPSDA nya.

There is no significant risk for business risk management, except for the efforts of the Company to assist customers in obtaining SIPSDA.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Grup adalah:

On the statement of financial position, the Group's profile, as follows:

	2021 Rp	2020 Rp	
Aset Keuangan	825,758,403,611	835,329,050,873	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(133,543,007,617)	(106,799,484,076)	*Financial Liabilities*
Total Aset - bersih	**692,215,395,993**	**728,529,566,797**	***Total Asset - net***

Tabel berikut menganalisis rincian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

The following table analyzes the financial assets and liabilities by type of interest:

	2021 Rp	2020 Rp	
Tidak Dikenakan Bunga			***Interest Free***
Aset Keuangan	375,057,672,422	319,405,015,952	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(131,808,326,482)	(106,247,365,868)	*Financial Liabilities*
Sub Jumlah	**243,249,345,940**	**213,157,650,084**	***Sub Total***
Tingkat bunga tetap			***Fixed rate***
Aset Keuangan	410,000,000,000	480,000,000,000	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(1,734,681,135)	(552,118,208)	*Financial Liabilities*
Sub Jumlah	**408,265,318,865**	**479,447,881,792**	***Sub Total***
Tingkat bunga mengambang			***Variable rate***
Aset Keuangan	40,700,731,188	35,924,034,921	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	--	--	*Financial Liabilities*
Sub Jumlah	**40,700,731,188**	**35,924,034,921**	***Sub Total***
Total Aset - bersih	**692,215,395,993**	**728,529,566,797**	***Total Assets - net***

Kenaikan suku bunga 2% akan meningkatkan ekuitas dan laba untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp814.014.624 dan Rp718.480.698. Penurunan 2% suku bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have increased equity and profit for the years ended December 31, 2021 and 2020 by Rp814,014,624 and Rp718,480,698, respectively. Decreasing 2% in interest rates for the periods ended December 31, 2021 and 2020 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrument keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diakrual secara andal.

Nilai wajar mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tahun - tahun 31 Desember 2021 dan 2020:

b. Fair Value of Financial Instruments

Financial instruments are presented in the statement of financial position are stated at fair value or at amortized cost. Moreover, financial instruments are stated at carrying amounts either because the amount is less than fair value or because of their fair value can not be reliably accrued.

The fair value is close to or equal to its carrying value, due to the impact of the discount is not significant or will be due in the short term.

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the year ended December 31, 2021 and 2020:

	2021		2020		
	Nilai tercatat/ *Carrying Value* Rp	Nilai wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying Value* Rp	Nilai wajar/ *Fair Value* Rp	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	452,330,656,021	452,330,656,021	518,162,003,406	518,162,003,406	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	72,320,725,583	72,320,725,583	64,532,241,665	64,532,241,665	*Accounts Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	780,706,426	780,706,426	4,084,986,002	4,084,986,002	*Other Current Financial Assets*
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	1,070,504,437	1,070,504,437	--	--	*Gross Amount Due from Customers*
Pendapatan yang masih Akan Diterima	211,007,665,707	211,007,665,707	165,646,126,324	165,646,126,324	*Accrued Revenue*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	67,275,000	67,275,000	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Jumlah	**737,577,533,173**	**737,577,533,173**	**752,492,632,397**	**752,492,632,397**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liability***
Utang Usaha	12,296,540,629	12,296,540,629	43,121,046,858	43,121,046,858	*Accounts Payable*
Liabilitas Sewa	12,719,623,255	12,719,623,255	6,257,813,262	6,257,813,262	*Lease Liabilities*
Beban Akrual	37,638,101,878	37,638,101,878	23,401,094,351	23,401,094,351	*Accrued Expenses*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	57,858,612,655	57,858,612,655	19,754,462,905	19,754,462,905	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	13,030,129,200	13,030,129,200	14,265,066,700	14,265,066,700	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**133,543,007,617**	**133,543,007,617**	**106,799,484,076**	**106,799,484,076**	***Total***

Tidak ada risiko likuiditas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

There is no significant liquidity risk as of December 31, 2021 and 2020.

37. Aktivitas Non-Kas / *37. Non-Cash Activities*

Berikut adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, sehingga tidak disajikan dalam laporan arus kas konsolidasian:

Below are the investing and financing activities that do not require the use of cash and cash equivalents, so it is not presented in the consolidated statement of cash flows:

	2021 Rp	2020 Rp	
			Acquisistion of
Perolehan Aset Tetap melalui:			*Fixed Assets through:*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	40,431,201,336	1,398,452,825	*Other Short-Term Liabilities*
Realisasi dari Uang Muka	12,756,544,900	--	*Realization from Advances*
Jumlah	**53,187,746,236**	**1,398,452,825**	***Total***

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2021 and 2020, as follows:

31 Desember 2021/ *December 31, 2021*

	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Arus Kas/ *Cash Flows*	Non Kas/ *Non Cash*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Liabilitas Sewa	6,257,813,282	(5,833,415,986)	12,295,225,959	12,719,623,255	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	14,265,066,700	(1,234,937,500)	--	13,030,129,200	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**20,522,879,982**	**(7,068,353,486)**	**12,295,225,959**	**25,749,752,455**	***Total***

31 Desember 2020/ *December 31, 2020*

	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Dampak Penerapan Awal PSAK 73/ *Impact on Initial Implementation of PSAK 73*	Arus Kas/ *Cash Flows*	Non Kas/ *Non Cash*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Liabilitas Sewa	--	16,212,738,078	(9,954,924,816)	--	6,257,813,282	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	22,130,129,200	--	(7,865,062,500)	--	14,265,066,700	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**22,130,129,200**	**16,212,738,078**	**(17,819,987,316)**	**--**	**20,522,879,982**	***Total***

38. Aset Kontijensi / *38. Contigency Asset*

Terdapat pengguna Sumber Daya Air (intake pelanggan) belum memiliki SIPSDA (Non SIPSDA) dan pemakaian airnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemakaian Air tahun 2020 sebanyak 60 intake yang menjadi potensi pendapatan yang belum dapat ditagihkan sebesa Rp11.728.713.038 dan tahun 2021 sebanyak 92 intake yang menjadi potensi pendapatan yang belum dapat ditagihkan sebesar Rp15.321.001.989.

There are Water Resources users (customer intakes) who do not have SIPSDA (Non SIPSDA) and the use of water has been stated in the 2020 Water Usage Minutes as many as 60 intakes which are potential income that cannot be billed as much as Rp11,728,713,038 and in 2021 as many as 92 intakes which became the potential unbilled income of Rp15,321,001,989.

Potensi pendapatan BJPSDA yang belum ditagihkan tersebut diatas, dicatat secara *extracountable* dan pendapatan dibukukan pada saat diterbitkan/ diperolehnya SIPSDA oleh Pengguna SDA tersebut.

The potential revenue of BJPSDA that has not been billed above is recorded on an extracountable basis and the income is recorded at the time the SIPSDA is issued/acquired by the SDA User.

39. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *39. Event After Reporting Period*

Perusahaan

1. Laporan Reviu atas Permasalahan Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perusahaan kepada PT PLN (Persero) Grup dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

   Telah terbit Laporan Reviu atas Permasalahan Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perum Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) Grup No. LR-33/D405/2/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan pokok-pokok hasil reviu sebagai berikut:

   Reviu atas Dasar Pengenaan BJPSDA
   Berdasarkan hasil reviu atas dasar pengenaan diketahui bahwa:

   a. Perusahaan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air serta memungut, menerima, dan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang antara lain wilayah sungai Citarum sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

   b. Baik periode berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya dan periode berlakunya kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, PT PLN (Persero) Group sebagai pengguna sumber daya air wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan) terhadap penggunaan sumber daya air pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dikelola oleh Perusahaan.

   c. Besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air dihitung berdasarkan tarif sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 56/KPTS/M/2013 untuk periode periode 14 Februari 2013 sampai dengan 21 November 2017 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 935/KPTS/M/2017 untuk periode 22 November 2017 s.d. 31 Desember 2019.

The Company

1. *Review Report on the Problem of Billing for Water Resources Management Services (BJPSDA) of the Company to PT PLN (Persero) Group from Financial and Development Supervision (BPKP)*

   A Review Report has been published on the Problem of Billing for Water Resources Management Services (BJPSDA) of Perum Jasa Tirta II to PT PLN (Persero) Group No. LR-33/D405/2/2022 dated March 29, 2022, with the main points of the results of the review as follows:

   Review on the Imposition of BJPSDA
   Based on the results of the review on the basis of imposition, it is known that:

   a. The Company has the duty and authority to carry out water resource management and to collect, receive, and use Water Resources Management Service Fees (BJPSDA), which include the Citarum river area in accordance with Government Regulation No. 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

   b. Both the period of the enactment of Law No. 7 of 2004 and its implementing regulations and the period of re-enactment of Law No. 11 of 1974 and its implementing regulations, PT PLN (Persero) Group as a user of water resources is required to pay a water resource management service fee (exploitation fee).

   c. The amount of the water resources management service fee is calculated based on the tariff in accordance with the Decree of the Minister of Public Works No. 56/KPTS/M/2013 for the period of February 14, 2013 until. 21 November 2017 and Decree of the Minister of Public Works No. 935/KPTS/M/2017 for the period of 22 November 2017 to d. December 31, 2019

d. Operasi dan pemeliharaan bendungan berserta waduknya untuk bendungan dan waduk Saguling dan Cirata yang dibangun oleh PT PLN (Persero) Group merupakan tanggung jawab PT PLN (Persero) Group.

d. *The operation and maintenance of dams and their reservoirs for the Saguling and Cirata dams and reservoirs built by PT PLN (Persero) Group is the responsibility of PT PLN (Persero) Group.*

Reviu atas Tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)

Sesuai Surat Direktur Utama Perusahaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor SD-8/DIR/UL/01/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Perihal Permintaan Pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) PT PLN (Persero) Group, besarnya kewajiban pembayaran BJPSDA PT PLN (Persero) Group untuk penggunaan sumber daya air sejak 14 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.100.685.210.314,90. Terhadap tagihan BJPSDA di atas, PT PLN (Persero) Group telah melakukan pembayaran tagihan BJPSDA untuk PLTA Ir. H. Djuanda periode Juli 2019 s.d. Desember 2019 sebesar Rp19.217.584.608,00 pada tanggal 8 April 2021 sehingga saldo tagihan menjadi sebesar Rp1.081.467.625.706,90. Berdasarkan data operasional realisasi produksi listrik periode 14 Februari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk PLTA Saguling dan PLTA Cirata yang disampaikan oleh PT PLN (Persero) Group dan data penjualan listrik Perusahaan dari PLTA Ir. H. Djuanda kepada PT PLN (Persero) Group periode 14 Februari 2013 sampai dengan 21 November 2017 serta memperhitungkan pelunasan, tagihan BJPSDA adalah sebesar Rp1.047.616.792.595,52.

Review of Bill of Water Resources Management Services (BJPSDA)

According to the Letter of the President Director of the Company to the President Director of PT PLN (Persero) Number SD-8/DIR/UL/01/2020 dated January 14, 2020 Regarding Requests for Payment of Water Resources Management Services Fees (BJPSDA) of PT PLN (Persero) Group, the amount PT PLN (Persero) Group's BJPSDA payment obligation for the use of water resources since February 14, 2013 untill. December 31, 2019 amounted to Rp1,100,685,210,314.90. Regarding the BJPSDA bill above, PT PLN (Persero) Group has paid the BJPSDA bill for PLTA Ir. H. Djuanda period July 2019 s.d. December 2019 amounted to Rp19,217,584,608.00 on April 8, 2021 so that the balance of the bill was Rp1,081,467,625,706.90. Based on the operational data of the realization of electricity production for the period of February 14, 2013 untill. December 31, 2019 for PLTA Saguling and PLTA Cirata submitted by PT PLN (Persero) Group and the Company electricity sales data from PLTA Ir. H. Djuanda to PT PLN (Persero) Group for the period February 14, 2013 to November 21, 2017 and taking into account the settlement, the bill for BJPSDA amounted to Rp1,047,616,792,595.52.

Reviu atas Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum

Berdasarkan hasil reviu terhadap kebutuhan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Citarum dijumpai bahwa:

a. Perusahaan belum melakukan penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) wilayah sungai Citarum secara berkala.

b. Penyusunan Rencana Kerja Operasi dan Pemeliharaan (RKOP) Perusahaan hanya mendasarkan pada kegiatan operasional dan pemeliharaan yang mampu dibiayai dengan BJPSDA yang mungkin tertagih.

c. Masih terdapat kekurangan pembiayaan operasi dan pembiayaan tahunan sebesar Rp301.330.814.607 antara penerimaan BJPSDA dengan Angka Kebutuhan Nyata

Review of Water Resources Management Needs in Citarum River Basin

Based on the results of a review of the management needs of water resources in the Citarum river area, it was found that:

a. The Company has not carried out the preparation of the Real Operation and Maintenance Needs Figure (AKNOP) for the Citarum river area on a regular basis.

b. The preparation of the Operation and Maintenance Work Plan (RKOP) of the Company is only based on operational and maintenance activities that can be financed with BJPSDA which may be collected.

c. There is still a shortage of operational financing and annual financing of Rp301,330,814,607 between BJPSDA receipts and the Company's Real Operation

Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Perusahaan. Kekurangan tersebut menyebabkan Perusahaan belum dapat melakukan tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Citarum sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Perusahaan.

and Maintenance Needs Figures (AKNOP). This deficiency causes the Company to not be able to carry out the task of managing water resources in the Citarum river area in accordance with the Real Operation and Maintenance Needs Figure (AKNOP) of the Company.

Hal Lainnya Perlu Diperhatikan

a. Realisasi komponen BJPSDA untuk Penjualan listrik PLTA Ir. H. Djuanda ke pelanggan Non PLN dan Pemakaian Sendiri belum diadministrasikan secara baik.

b. Pengajuan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk PLTA Saguling belum mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR.

Other Matters for Attention

a. Realization of BJPSDA components for Hydroelectric Power Sales Ir. H. Djuanda to non-PLN customers and their own use has not been properly administered.

b. The application for a Water Resources Concession Permit (SIPSDA) for the Saguling PLTA has not yet received approval from the Ministry of PUPR.

Saran

Dalam rangka penyelesaian permasalahan tagihan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perusahaan kepada PT PLN (Persero) Grup, BPKP menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

a. PT PLN (Persero) Grup dan Perusahaan membuat kesepakatan baru untuk menyelesaikan tagihan BJPSDA tersebut dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan pelaksanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Perusahaan wilayah sungai Citarum.

b. Perusahaan agar menyusun dan melaksanakan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) wilayah sungai Citarum serta melaporkan rencana dan realisasi penerimaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) serta penggunaannya untuk operasi dan pemeliharaan wilayah sungai Citarum secara berkala kepada Kementerian PUPR.

c. Perusahaan agar melakukan pemisahan pencatatan BJPSDA dari pendapatan listrik untuk penjualan kepada Non PLN maupun pemakaian sendiri energi listrik dari PLTA Ir. H. Djuanda.

d. PT PLN (Persero) meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat pengurusan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk PLTA Saguling.

Suggestions

In order to resolve the problem of the bill for the Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) of the Company to PT PLN (Persero) Group, BPKP conveys several suggestions as follows:

a. PT PLN (Persero) Group and the Company made a new agreement to settle the BJPSDA bill by considering the suitability of the implementation of the the Company Real Operation and Maintenance Needs Figure (AKNOP) for the Citarum river area.

b. The Company to compile and implement the Real Operation and Maintenance Requirement Figure (AKNOP) for the Citarum river area and report the plan and realization of the receipt of the Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) and its use for the operation and maintenance of the Citarum river area on a regular basis to the Ministry of PUPR.

c. The Company to separate the recording of BJPSDA from electricity revenue for sales to Non-PLN and own use of electrical energy from PLTA Ir. H. Djuanda.

d. PT PLN (Persero) is increasing coordination with the Ministry of Public Works and Public Housing to speed up the processing of a Water Resources Concession Permit (SIPSDA) for the Saguling hydropower plant.

2. Pada tanggal 22 April 2022 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (Lebih)/ Kurang Bayar yang terdiri dari:

2. On April 22, 2022, the Company received a Decree of Over /(Underpayment) Tax (SKPLB/SKPKB) with consist of:

No	Tahun Pajak/ *Tax Period*	No SKPKB/SKPLB/STP	Tanggal Penertbitan/ *Date of Issued*	Jenis Pajak/ *Type Of Tax*	Jumlah Kurang (Lebih) Bayar/ *Amount Under (Over) Payment*	Sanksi Administrasi/ *Administrative Sanction*	Jumlah/ *Total*
1	Tahun 2020/ *Year 2020*	SKPLB No: 00010/406/20/051/22	Friday, April 22, 2022	Pajak Penghasilan Badan/ *Corporate Income Tax*	(50,124,718,610)	-	(50,124,718,610)
2	December 2020/ *December 2020*	SKPKB No: 00085/207/20/051/22	Friday, April 22, 2022	PPN/ *VAT*	869,924,986	251,930,276	1,121,855,262
3	Desember 2020/ *December 2020*	SKPKB No: 00036/287/20/051/22	Friday, April 22, 2022	PPN atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/ *VAT*	322,875,529	93,504,753	416,380,282
4	Desember 2020/ *December 2020*	STP No: 00038/187/20/051/22	Friday, April 22, 2022	PPN atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/ *VAT*	-	8,817,880	8,817,880
5	Desember 2020/ *December 2020*	STP No: 00074/107/20/051/22	Friday, April 22, 2022	PPN/ *VAT*	-	83,927,802	83,927,802
6	Desember 2020/ *December 2020*	SKPKB No: 00002/202/20/051/22	Friday, April 22, 2022	Pajak Penghasilan Pasal 22/ Income Tax Article 22	141,764,430	41,054,979	182,819,409
7	Desember 2020/ *December 2020*	SKPKB No: 00019/203/20/051/22	Friday, April 22, 2022	Pajak Penghasilan Pasal 23/ Income Tax Article 23	8,241,367	2,386,700	10,628,067
Jumlah/ *Total*					**(48,781,912,298)**	**481,622,390**	**(48,300,289,908)**

40. Reklasifikasi Akun / *40. Reclassification of Account*

Bebarapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berikut adalah rincian akun-akun sebelum dan sesudah reklasifikasi:

Several accounts in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 have been reclassified to conform to the presentation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, here are the details accounts before and after reclassification:

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	*Reklasifikasi/ Reclassification*	*Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification*	
	Rp	Rp	Rp	
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang Usaha	230,178,367,989	(165,646,126,324)	64,532,241,665	*Accounts Receivable*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	--	165,646,126,324	165,646,126,324	*Accrued Revenue*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2,901,278,942	1,183,707,060	4,084,986,002	*Other Current Financial Assets*
Pembayaran di Muka	20,915,157,399	(1,250,982,060)	19,664,175,339	*Prepayments*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	--	67,275,000	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Pajak Dibayar di Muka	--	101,904,649,542	101,904,649,542	*Prepaid Taxes*
Aset Tidak Lancar Lainnya	102,125,227,342	(101,904,649,542)	220,577,800	*Other Non-Current Assets*
JUMLAH ASET	**1,539,735,471,548**	--	**1,539,735,471,548**	***TOTAL ASSETS***

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	*Reklasifikasi/ Reclassification*	*Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification*	
	Rp	Rp	Rp	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang Usaha	46,541,937,163	(3,420,890,305)	43,121,046,858	*Accounts Payable*
Beban Akrual	21,378,656,871	2,022,437,480	23,401,094,351	
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	58,332,770,688	(38,578,307,783)	19,754,462,905	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Lancar:				*Deferred Revenue*
Pendapatan Diterima di Muka	--	32,374,616,918	32,374,616,918	
Liabilitas Keuangan Lainnya	--	1,100,000,000	1,100,000,000	*Other Financial Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Lancar:				
Pendapatan Diterima di Muka	--	7,602,143,690	7,602,143,690	
Liabilitas Keuangan Lainnya	14,265,066,700	(1,100,000,000)	13,165,066,700	*Other Financial Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**322,800,041,575**	**--**	**322,800,041,575**	***TOTAL LIABILITIES***
LABA (RUGI)				***PROFIT (LOSS)***
Beban Pokok Pendapatan	(518,622,959,397)	2,397,801,532	(516,225,157,865)	*Cost of Revenue*
Beban Umum dan Administrasi	(164,637,004,231)	(2,399,301,534)	(167,036,305,765)	*General and Administrative Expenses*
Pendapatan (Beban) Keuangan	--	24,669,924,004	24,669,924,004	*Financial Income (Expenses)*
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(7,267,174,269)	(10,527,920,711)	(17,795,094,985)	*Other Income (Expenses)*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**143,488,808,173**	**14,140,503,291**	**157,629,311,460**	***PROFIT BEFOR TAXES***
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(30,253,793,005)	(14,140,503,291)	(44,394,296,296)	*Income Tax Benefit (Expense)*
LABA TAHUN BERJALAN	**11,323,515,164**	**--**	**113,235,015,164**	***PROFIT FOR THE CURRENT YEAR***

41. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

41. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective

Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Financial Accounting Standard Board–Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI) has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2021.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 yaitu:

Amendments to the standard that are effective for periods beginning on or after April 1, 2021 are:

- Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021.

- *PSAK 73: Leases regarding Covid-19-related Rent Concessions Beyond 30 June 2021.*

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows :

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;

- *Amendment PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;*

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: “Kontrak Asuransi”;
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- *Amendment PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *Amendment PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendment PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendment PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;*
- *Amendment PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates; and*
- *Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74:” Insurance Contract”;*
- *Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Implementation of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information.*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

42. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

42. Responsibility and Authorization for Issuance of the Consolidated Financial Statements

Manajemen Perusahaan, sesuai dengan ketentuan hukum dan batasan kewenangannya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 20 Juni 2022.

The Management of the Company, to the extent fullest limited by laws and its authority is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on June 20, 2022.


Annual Report Award

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2015+)

Kriteria Annual Report Award 2015+)

Penilaian ARA 2015 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

A. Penilaian Kuantitatif (100%) terdiri dari 8 klasifikasi, yaitu:

1. Umum: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 2%;
2. Ikhtisar Data Keuangan Penting: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 5%;
3. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 3%;
4. Profil Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 8%;
5. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan: Bobot keseluruhan untu k klasifikasi ini sebesar 22%;
6. Good Corporate Governance: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 35%;
7. Informasi Keuangan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 20%; dan
8. Lain-lain: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar +/- 5%

a. Praktik good corporate governance (+5%) yang melebihi kriteria, seperti:
   1) Terdapat surat pernyataan tanggung jawab manajemen atas Laporan Keuangan bagi Perusahaan non Tbk; dan
   2) Menyampaikan Laporan Keberlanjutan/CSR yang disusun berdasarkan standar yang berlaku secara internasional (GRI Sustainability Reporting Guidelines).

b. Praktik bad corporate governance (-5%) yang tidak diatur dalam kriteria, seperti:
   1) Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan;
   2) Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
   3) Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
   4) Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan pera turan yang berlaku dan SAK.

B. Wawancara (Penentuan Pemenang)

+) Kriteria penilaian dimaksud berlaku bagi semua peserta, kecuali peserta Dana Pensiun

Rate of ARA in 2015 is divided into two stages:

A. Quantitative Assessment (100%) consists of eight classifications, namely:

1. General: Overall weight for this classification is by 2%;
2. Financial Highlights: Overall weight for this classification is by 5%;
3. Report of the Board of Commissioners and Board of Directors: Overall weight for this classification is by 3%;
4. Company Profile: The weight of the overall classification is by 8%;
5. The Management Analysis and Discussion on the Company's Performance: Overall weight for this classification is by 22%;
6. Good Corporate Governance: The Weight of the overall classification is by 35%;
7. Financial Information: Overall weight for this classification is by 20%; and
8. Others: Overall weight for this classification is about +/- 5%

a. The practice of good corporate governance (+ 5%) which exceeds the criteria, such as:
   1) There is a statement of management's responsibility for the Non Tbk Company's Financial Statements ; and
   2) Delivering Sustainability Report/CSR which is based on internationally accepted standards (GRI Sustainability Reporting Guidelines).

b. Bad corporate governance practices (-5%) are not governed by the criteria, such as:
   1) There is a report as company that pollutes the environment;
   2 Important case being faced by the company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners in office, which was not disclosed in the Annual Report;
   3 Non-compliance in the fulfillment of tax obligations; and
   4) Incompatibility presentation of the annual report and financial statements with the applicable regulations and IFRSs.

B. Interview (Determination of Winners)

+) The evaluation criteria is applicable to all participants, except the participant of the Pension Fund

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2020+)

Criteria Annual Report Award 2020+)

NO.	KRITERIA / Criteria
I	UMUM / General
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris / Annual report is presented in good and appropriate Bahasa Indonesia and also in English
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca Annual report is printed in good quality by using font type and size that are easy to read
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Annual report mentions corporate identities clearly
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Annual report is displayed in company's website
II	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING / Financial Highlights
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. / Information of company's business result in comparison form for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the company run the business activities for less than 3 (three) years.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: The name of the company and the year of the annual report are displayed in: 1. Sampul muka / The cover; 2. Samping / Side cover; 3. Sampul belakang; dan / Back cover; and 4. Setiap halaman / Each page. Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. The annual report includes the most recent and less than 4 years.	
Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total. Information includes among others: 1. Sales / revenues; 2. Gain (loss): a. Attributable to owners of the parent; and b. Attributable to non-controlling interests; 3. Total profit (loss) and other comprehensive income: a. Attributable to owners of the parent; and b. Attributable to non-controlling interests; and 4. Earnings (loss) per share. Note: If the company does not have a subsidiary, the company presents net income (loss) and earnings (loss) and other comprehensive income in total.	

NO.	KRITERIA / Criteria
II	**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING / Financial Highlights**
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information of company's financial position in comparison form for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the company run the business activities for less than 3 (three) years.
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in comparison form for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the company run the business activities for less than 3 (three) years.
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik* *Information of stock price in tables and charts.**
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir* Information on bonds, securities or convertible bonds that are still circulating in the last 2 (two) fiscal year. *

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. Information includes among others: 1. The amount of investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. The amount of equity.	
Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. Information includes five (5) financial ratios that are common and relevant to industrial companies.	
1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. 1. The information in table form which contains: a. The number of shares outstanding; b. The market capitalization; c. The stock price high, low and closing; and d. The trading volume. 2. The information in graphic form containing at least the closing prices and trading volumes. for each quarter in 2 (two) last fiscal year.	
Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk. Information includes: 1. Number of bonds / securities / convertible bonds outstanding; 2. The interest rate / yield; 3. The maturity date; and 4. Rating obligations/bonds	

NO.	KRITERIA / Criteria
III	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI / Report of Board of Commissioners and Directors
1.	Laporan Dewan Komisaris Report of Board of Commissioners
2.	Laporan Direksi Report of Board of Directors
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains of the following: 1. Assessment of the performance of the Board of Directors on the company's management and the assessment base; 2. The overview of the company's business prospects prepared by the Board of Directors and the basic considerations; 3. The assessment of the performance of the committees under the Board of Commissioners; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the change.	
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains of the following: 1. Analysis of the performance of the company, which includes, among others, strategic policy, a comparison between the results achieved with targeted, and the constraints faced by the company; 2. Analysis of business prospects; 3. Application of corporate governance; and 4. Assessment of the performance of the committees under the Board of Directors (if any); and 5. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reasons for the change.	
Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	

NO.	KRITERIA / Criteria
III	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI / Laporan Dewan Komisaris dan Direksi
IV	PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan Company's name and address
2.	Riwayat singkat perusahaan Company's history
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signature of Commissioners and Directors
4.	Struktur Organisasi Organizational structure

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Contains of the following: 1. Signature poured on a separate sheet; 2. A declaration that the Board of Commissioners and Directors are fully responsible for the accuracy of the content of the annual report; 3. Signed the Board of Commissioners and Director by mention name and title; and 4. A written explanation in a separate letter from the concerned parties in the event of a member of the Board of Commissioners or Board of Directors who did not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from the other members in the absence of appropriate written explanation from the concerned parties.	
Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website. Information includes among others: the name and address, zip code, Phone number, Fax number, email, and website.	
Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Include: date / year of establishment, the name, and the name change company (if any). Note: if the company never did change the name, please be disclosed.	
Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. The description of, among others: 1. The business activities of the company according to the last budget; 2. The business activities which are carried out; and 3. Products and / or services which are produced.	
Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi. In chart form, including the name and position at least one structure level below the directors.	

NO.	KRITERIA / Criteria
IV	PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Company's Culture
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and history of Board of Commissioners
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and history of Directors

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. includes: 1. The company's vision; 2. The company's mission; 3. Remarks that the vision and the mission has been approved by the Board of Directors / Board of Commissioners; and 4. Statement on corporate culture of the company.	
Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan. Information includes among others: 1. Name; 2. Position (including positions in companies or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Field Studies and the Institute of Education); 6. Work Experience (Position, Agencies and Served Period); and 7. History of the appointment as a member of the Board of Commissioners of the Company.	
Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.	

NO.	KRITERIA / Criteria
IV	PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) Number of employees (comparative 2 years) and description of the competence development (e.g: education aspects and employee training)
9.	Komposisi Pemegang saham Composition of shareholders

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Information includes among others: 1. Name; 2. Position (including positions in companies or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Field Studies and the Institute of Education); 6. Work Experience (Position, Agencies and Served Period); and 7. History of the appointment as member of the Board of Directors of the Company.	
Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. Information includes among others: 1. The number of employees for each level of the organization; 2. The number of employees for each level of education; 3. The number of employees based on employment status; 4. A description of the data and employee competence development has been done to reflect the equality of opportunity for each level of the organization; and 5. The cost of development of employee competencies that have been issued.	
Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. Include: 1. Details of names of shareholders that includes 20 largest shareholders and the percentage of ownership; 2. Details of shareholders and percentage of ownership include: a. The names of shareholders who own 5% or more shares; b. Name of Commissioners and Directors who hold shares; and c. Shareholder groups of society with a stake of each of less than 5%.	

NO.	KRITERIA / Criteria
IV	**PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile**
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi List of Subsidiaries and/or associate
11.	Struktur grup perusahaan Company's group structure
12.	Kronologis pencatatan efek lainnya* Chronological of other stock registration*
13.	Kronologis pencatatan efek lainnya* Chronological of other stock registration*

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). Information includes among others: 1. Name of the subsidiaries and / or associates; 2. Percentage of share ownership; 3. Description of the business areas the subsidiaries and / or associated company; and 4. Description of subsidiaries operating status and / or an associate (already operating or not operating).	
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV). The structure of company's group in the form of a chart that describes the subsidiaries, entity of associates, joint ventures, and special purpose vehicle (SPV).	
Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Include: 1. Chronology of stock listing; 2. Type of corporate actions which led to changes in the number of shares; 3. Change in number of shares from the start of recording until the end of the fiscal year; and 4. Name of the exchanges on which the company's shares are listed.	
Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek. Include: 1. Chronology of recording other effects; 2. Type of corporate actions that cause changes in the number of other effects; 3. Change in number of other effects of early registration until the end of the fiscal year; 4. Name of the exchanges on which other securities are listed; and 5. Ranked effect.	

NO.	KRITERIA / Criteria
IV	**PROFIL PERUSAHAAN / Company Profile**
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal* Name and address of institution and/or profession of supporting capital market*
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Awards received in the last fiscal year and / or valid certification in the last fiscal year both national and international.
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any).
17.	Informasi pada Website Perusahaan. Information on company's website.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. Information includes among others: 1. Name and address of BAE / parties who administer the company's shares; 2. The name and address of the Public Accounting Firm; and 3. The name and address of company securities rating.	
Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). Information includes among others: 1. Name of the award and / or certificates; 2. In the acquisition; 3. The Agency appreciator and / or certificates; and 4. The validity period (for certification).	
Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan. Contains information such as: 1. Name and address of the subsidiary; and 2. The name and address of the branch office / representative. Note: if the company does not have subsidiaries / branches / representatives, please be disclosed.	
Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains of the following: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance per business segment, among others: a. Production; b. Increase / decrease in production capacity; c. Sales / revenues; and d. Profitability.	

NO.	KRITERIA / Criteria
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / Management analysis and
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha Operational review per business segments
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Description on company's financial performance
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the ability to pay debts and company's receivable collectability, by presenting the relevant ratio calculation in accordance with the type of industry the company.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
discussion on company's performance	
Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains of the following: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance per business segment, among others: a. Production; b. Increase / decrease in production capacity; c. Sales / revenues; and d. Profitability.	
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas. Analysis of financial performance that includes a comparison between the financial performance for the year to a year earlier and the cause of the increase / decrease (in the form of narrative and tables), among others: 1. Current assets, Fixed assets and total assets; 2. The short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales / revenues, expenses and income (loss), other comprehensive income and total net income (loss) and other comprehensive income; and 5. Cash flow.	
Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation of: 1. Ability to pay the debt, both short- and long-term; and 2. Level of collectability.	

NO.	KRITERIA / Criteria
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / Management analysis and
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy). Discussion on capital structure and management policies on capital structure policy.
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir. Discussion on material bond to capital goods investment in last fiscal year.
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital goods investment which have been realized on last fiscal year.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
discussion on company's performance	
Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut. Explanation of: 1. Details of capital structure consisting of interest-based debt and equity; and 2. Management policy on capital structure (capital structure policies) and the basis for selecting the policy.	
Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Explanation of: 1. The purpose of such commitments; 2. Sources of funds to meet these bonds; 3. Currency denominated; and 4. The steps the company plans to protect the risk of foreign currency related. Note: if the company does not have ties related to capital investments in the last fiscal year, please be disclosed.	
Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Explanation of: 1. Type of capital investments; 2. The investment objective of capital goods; and 3. The value of capital investments incurred in the last fiscal year. Note: if there is no realization of capital investments, please be disclosed.	

NO.	KRITERIA / Criteria
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / Management analysis and
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku denganhasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparison between the target at the beginning of the fiscal year by achieved result (realized), and the target or projected to be achieved for the next year on revenues, profits, and others that are considered important for the company.
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Information and material facts which occurred after auditor's report date.
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan Description on company's business prospect
10.	Uraian tentang aspek pemasaran Description on marketing aspect
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of the dividend policy and the amount of cash dividends per share and total dividend per year declared or paid during the two (2) years of the last fiscal book.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
discussion on company's performance	
Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Information includes among others: 1. Comparison between the targets at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realized); and 2. Target or projected to be achieved within 1 (one) year ahead.	
Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Description of important events after the date of the auditor's report, including its impact on the performance and business risk in the future. Note: if there is no important events after the date of the auditor's report, please be disclosed.	
Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The description of the company's prospects associated with the industry and the general economy quantitative supporting data from the data source to be trusted.	
Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description of the marketing of the product and/or service companies, such as marketing strategy and market share.	
Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Contains of the following: 1. The dividend distribution policy; 2. Total dividend; 3. The amount of the cash dividend per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of the announcement and payment of cash dividends for each year. Note: if there is no dividend distribution, please be disclosed.	

NO.	KRITERIA / Criteria
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / Management analysis and
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). Stock ownership program by employee and/or management which implemented by company (ESOP/MSOP).
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)* Actual use of fund from public offering (in which the company is obliged to submit reports on realization of the use of funds)*
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi* Information on material transaction which consists of conflict of interest and/or transaction with affiliations*

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
discussion on company's performance	
Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Loading description of: 1. The number of shares of ESOP / MSOP and its realization; 2. Duration; 3. Terms of the employees and / or management of the beneficiaries; and 4. The exercise price. Note: if it does not have such programs, please be disclosed.	
Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Contains of the following: 1. Total achieved fund; 2. Plan for the use of funds; 3. Details of the use of funds; 4. The balance of the funds; and 5. Date of approval of GMS / RUPO on changes in the use of funds (if any).	
Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Loading description of: 1. Name of the parties to a transaction and the nature of the affiliation; 2. Description of the fairness of the transaction; 3. Reasons for the transaction; 4. Actual transactions during the period of the last fiscal year; 5. The company's policy review on the mechanisms associated with the transaction; and 6. Compliance regulations and related provisions. Note: if it does not have the intended transaction, please be disclosed.	

NO.	KRITERIA / Criteria
V	ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN / Management analysis and
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Description on change of laws which significantly affected to company
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Description on change of accounting policies which have been implemented by company in last fiscal year
17.	Informasi kelangsungan usaha Information on business continuance

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
discussion on company's performance	
Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan. The description includes among others: changes in legislation and their impact on the company. Note: if there is no change in the legislation that significantly, please be disclosed.	
Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan. The description includes among others: changes in accounting policies, reasons and impact on the financial statements. Note: if there are no changes in accounting policies, please be disclosed.	
Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku. Disclosure of information about: 1. Things are potentially significant effect on the company's sustainability in the last fiscal year; 2. Assessment of management on matters in figure 1; and 3. The assumptions used by management in making the assessment. Note: if there are things that are potentially significant effect on the sustainability of the company in the last fiscal year, the underlying assumptions need to be disclosed in order the management believes that there are things that are potentially significant effect on the company's sustainability in the fiscal year.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
1.	Uraian Dewan Komisaris Description on Board of Commissioners
2.	Informasi mengenai Komisaris Independen Information on Independent Commissioners
3.	Uraian Direksi Description on Directors
4.	Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi Assessment on Board of Commissioners and Directors

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). The description includes among others: 1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners; 2. The training program in order to increase the competence of the Board of Commissioners or orientation program for new Commissioners; and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and work rules BOC).	
Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Contains of the following: 1. Criteria for determining the Independent Commissioner; and 2. Statement of Independence each Independent Commissioner.	
Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). The description includes among others: 1. The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors; 2. The training program in order to improve the competence of the Board of Directors or orientation program for new Directors; and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and work rules the Board of Directors).	
Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan assessment. Include: 1. The procedures of assessment of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors; 2. Criteria used in the implementation of the assessment of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors; and 3. The Parties who undertake assessment.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Description on remuneration policies to Board of Commissioners and Directors
6.	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. The frequency and level of attendance of board meetings, the Board of Directors meetings and joint meetings with the Board of Commissioners Board of Directors.
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major shareholders and controllers, either directly or indirectly, to the individual owner.
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliation between the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Main Shareholders and / or controllers.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. Contains of the following: 1. Disclosure of the remuneration of the Board of Commissioners determination procedures; 2. Disclosure of the remuneration of Directors determination procedures; 3. The remuneration structure that indicates the type and number of short-term benefits, post-employment, and / or other long-term for each member of the Board of Commissioners; 4. The remuneration structure that indicates the type and number of short-term benefits, post-employment, and / or other long-term for each member of the Board of Directors; and 5. Disclosure indicators for the remuneration of Directors.	
Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. Contains of the following: 1. Date of the Meeting; 2. Participants Meeting; and 3. Agenda. for each meeting of the Board of Commissioners, Directors, and joint meetings.	
Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. In a schematic or diagram, except for State-Owned Enterprises which entirely owned by the government.	
Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
9.	Komite Audit Audit Committee
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi. Committee/Nomination Function and/or Remuneration.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Include: 1. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with members of the Board of Directors; 2. Affiliate Relations between members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; 3. The relationship between the members of the Board of Directors affiliated with Major Shareholder and / or control; 4. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliation with members of other Commissioners; and 5. The relationship between the members of the Board of Commissioners affiliated with Major Shareholder and / or controllers. Note: if it is not affiliated in question, please be disclosed.	
Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Include: 1. Name and title of member of the audit committee; 2. The educational qualifications and work experience of the audit committee members; 3. The independence of audit committee members; 4. Description of the tasks and responsibilities; 5. Brief report of the activities of the audit committee; and 6. Frequency of meetings and attendance levels of the audit committee.	
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. Include: 1. Name, position and brief resume of committee members / functions nomination and / or remuneration; 2. Independence committees / functions nomination and / or remuneration; 3. Description of the tasks and responsibilities; 4. Description of the committee's activities / functions of the nomination and / or remuneration; 5. Frequency of meetings and attendance committees / functions nomination and / or remuneration; 6. Statement of the guidelines committee / functions nomination and / or remuneration; and 7. Policies regarding the succession of Directors.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Other committees under Board of Commissioners who owned by the company.
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of task and function of corporate's secretary.
13.	Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya. Information on last year Annual General Meeting of Shareholders (RUPS).
14.	Uraian mengenai unit audit internal. Description on internal audit unit.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Include: 1. Name, position and brief resume of the other committee members; 2. The independence of the other committees; 3. Description of the tasks and responsibilities; 4. Description of the activities of other committees; and 5. Frequency of meetings and attendance of other committees.	
Mencakup antara lain: 1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan. Include: 1. Name, domicile, and a brief history of the post of secretary of the company; 2. Description of the company secretarial duties; and 3. The training program in order to develop the competence of the company secretary.	
Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan. In the form of tables include, among others: 1. Decision of RUPS on previous year; 2. Realization of the RUPS a year earlier in the fiscal year; and 3. Reason for the RUPS decision has yet to be realized.	
Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal. Include: 1. Name of the head of internal audit unit; 2. Number of employees (internal auditor) the internal audit unit; 3. Certification as the internal audit profession; 4. The position of the internal audit unit within the corporate structure; 5. Brief report of the implementation of the internal audit unit; and 6. The lifting / dismiss the head of internal audit unit.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
15.	Akuntan Publik. Public accountant.
16.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description on company risk management.
17.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Description on internal control system.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. Information includes among others: 1. Name and year public accountants who audit the annual financial statements for the last 5 years; 2. The name and years of public accounting firm that audited the annual financial statements for the last 5 years; 3. The amount of fee for each type of service provided by a public accountant in the last fiscal year; and 4. Other services provided accounting services other than audit annual financial statements in the last fiscal year. Note: if there is no other service in question, please be disclosed.	
Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Include: 1. A description of the risk management system applied by the company; 2. A description of the evaluation conducted on the effectiveness of the risk management system; 3. A description of the risks facing the company; and 4. Efforts to manage these risks.	
Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. Include: 1. A brief description of the internal control system, among others, include both financial and operational control; 2. Explanation of the suitability of the internal control system with internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and 3. A description of the evaluation conducted on the effectiveness of internal control systems.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup. Description on corporate social responsibility related to the environment.
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Description on corporate social responsibility related to the employment, health and work safety.
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Description on corporate social responsibility related to social and society development.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Contains of the following: 1. The policies set management; 2. Activities undertaken; and related environmental programs related to the operations of the company, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, sewage treatment systems companies, consideration of environmental aspects in the provision of credit to customers, and others. 3. Certification in the field of environmental owned.	
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. Terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, Contains of the following: 1. The policies set management; and 2. Activities undertaken. Related employment practices, health and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety at work, employee turnover tingkat kecelakaan kerja, dan lain-	
Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain. Contains of the following: 1. The policies set management; 2. Activities undertaken; and 3. Costs incurred. Related to social and community development, such as the use of local labor, community empowerment companies, repair facilities and social infrastructure, the form of donations, and others.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
22.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Important case faced by the company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the annual reporting period.
23.	Akses informasi dan data perusahaan. Access to company 's information and data.
24.	Bahasan mengenai kode etik. Discussion on ethic codes.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan. Include: 1. Principal lawsuit / accusation; 2. Status of the settlement / accusation; 3. Effect on the condition of the company; and 4. An administrative sanction imposed on the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities (capital markets, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that is not subject to administrative sanctions). Note: in the absence of litigation, please be disclosed.	
Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. A description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), the mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, and so on.	
Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Includes a description, among others: 1. Fill in the code of conduct; 2. Disclosure that the code of conduct applies to all levels of the organization; 3. The dissemination of codes of conduct; 4. What kind of sanctions for any violations of the code of ethics; and 5. The number of code violations and penalties given in the last fiscal year. Note: if there is no violation of the code of conduct in the last fiscal year, please be disclosed.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VI	TATA KELOLA PERUSAHAAN / Good Corporate Governance
25.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system. Disclosure on whistleblowing system.
26.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Policies on various compositions of Board of Commissioners and Directors.
VII	**INFORMASI KEUANGAN** / ***Financial Information***
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan* Statement of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners on Responsibility for Financial Statements*
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Opinion of independent auditor on financial report.
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Description of independent auditor in opinion.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan Contains a description of the mechanisms of the whistleblowing system, among others: 1. Submission of reports of violations; 2. Protection of whistleblowers; 3. Handling of complaints; 4. Parties which manages the complaint; and 5. The number of complaints received and processed in the last fiscal year as well as follow-ups. Note: if there are no complaints received in the last fiscal year, please be disclosed	
Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of Company policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. Note: if there is no such policy should be disclosed with reasons and considerations.	
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with the related regulations concerning the Responsibility for Financial Statements.	
Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. Description contains about: 1. Name and signature; 2. Date of Audit Report; and 3. KAP license number and license number of Certified Public Accountants.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VII	INFORMASI KEUANGAN / Financial Information
4.	Laporan keuangan yang lengkap. Completed financial report.
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison on profitability.
6.	Laporan Arus Kas. Cash flow report.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Contains a complete elements of financial statements: 1. The statement of financial position; 2. The statements of income and other comprehensive income; 3. Statement of changes in equity; 4. Statement of cash flows; 5. Notes to the financial statements; 6. Comparative information concerning the previous period; and 7. The statement of financial position at the beginning of the previous period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).	
Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of performance / profit (loss) for the year with the previous year.	
Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Meet the following requirements: 1. Grouping into three categories of activity: operating, investing and financing activities; 2. The use of the direct method (direct method) to report cash flows from operating activities; 3. The separation between the presentation of cash receipts and disbursements for a year or run on operating, investing and financing activities; and 4. Disclosure of Non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VII	INFORMASI KEUANGAN / Financial Information
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Summary of accountant policies.
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Pengungkapan transaksi pihak berelasi
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure related to tax.

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Includes at least: 1. Statement of compliance with IFRSs; 2. Basis of measurement and preparation of financial statements; 3. The income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial Instruments.	
Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas. Things are disclosed, among others: 1. Name of related parties, and the nature and relationships with related parties; 2. The transaction value and the percentage of total income and expense; and 3. The balance amount and the percentage of the total assets or liabilities.	
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Things that should be disclosed: 1. Reconciliation fiscal and current income tax expense calculation; 2. Explanation of the relationship between expense (income) and income tax accounting; 3. A statement that the taxable income (CGC) as basis for reconciliation results charging Annual Income Tax Agency; 4. Details of the assets and the deferred tax liabilities recognized in the statement of financial position for all periods presented, and the amount of expense (income) Deferred tax recognized in the income statement if the number is not visible from the amount of deferred tax assets or liabilities are recognized in the statement of position finance; and 5. Disclosure or no tax disputes.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VII	INFORMASI KEUANGAN / Financial Information
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure related to fixed assets.
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi* Disclosure related to operations segment*

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasidan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Things that should be disclosed: 1. The used depreciation method; 2. A description of the accounting policies selected between the revaluation model and the cost model; 3. The used method and significant assumptions in estimating the fair value of fixed assets (to the revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (to the cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period showing: addition, subtraction and reclassification.	
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Things that should be disclosed: 1. General information covering factors used to identify reportable segment; 2. The information about income, assets and liabilities reportable segment; 3. Reconciliation of total segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other segments of the material elements of the corresponding number in the entity; and 4. Disclosures on the entity level, which includes information about products and / or services, geographical areas and major customers.	

NO.	KRITERIA / Criteria
VII	INFORMASI KEUANGAN / Financial Information
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. PDisclosure related to financial instrument.
13.	Penerbitan laporan keuangan. Financial report publicity.

* Kriteria khusus untuk Perusahaan Listed
* Specific criteria for listed company

PENJELASAN / Description	PENILAIAN / Valuation
Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Things that should be disclosed: 1. Details of financial instruments held by its classification; 2. The fair value and their hierarchy for each class of financial instruments; 3. The risk management policy; 4. Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and 5. Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively.	
Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Things are disclosed, among others: 1. The date the financial statements were authorized for issue; and 2. The party responsible for authorizing the financial statements.	

KANTOR PUSAT
Jl. Lurah Kawi No. 1, Kec. Jatiluhur, Jatiluhur,
Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,
Jawa Barat 41152

(0264) 201 972
(0264) 201 971

KANTOR PERWAKILAN JAKARTA
Jl. H. Agus Salim No. 69
Jakarta Pusat
Telp : (021) 3193 1606

www.jasatirta2.co.id